SALINAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan dan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034, perlu dilakukan revisi;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026-2046;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Pemerintah kabupaten/kota adalah Bupati/Wali Kota yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
8. Wilayah adalah Ruang di Daerah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang Laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
15. Laut adalah Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
16. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
18. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
19. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
20. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
23. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.

25. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
29. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antar kota antar provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan/ atau angkutan perdesaan serta dapat dipadukan dengan simpul moda lain
30. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
31. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
32. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
33. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
34. Jaringan Jalur Kereta Api Antar kota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
35. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kabupaten.
36. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
37. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
38. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

39. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul untuk menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
40. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
41. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
42. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
43. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
44. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri selanjutnya disingkat dengan TUKS adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
45. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
46. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
47. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
48. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

49. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap yang memanfaatkan sumber energi bahan bakar batu bara.
50. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar cair yang menghasilkan tenaga berupa gas hasil pembakaran udara terkompresi yang digunakan untuk mengubah energi gerak luncur piston menjadi energi putar pada poros engkol yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan poros yang tersambung dengan poros generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
51. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan energi panas bumi.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/ terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
53. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang selanjutnya disingkat PLTSa adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga.
54. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber penghasil listrik, dengan alat utama untuk menangkap, mengubah dan menghasilkan listrik adalah fotovoltaik yang disebut secara umum modul surya.
55. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disingkat PLTBm adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan biomassa berupa serabut, cangkang, ampas, daun tebu kering dan/atau biomassa lainnya.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi angin (bayu) menjadi listrik.
57. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG atau Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas yang selanjutnya disingkat PLTDG adalah suatu kegiatan yang memproduksi tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar gas atau bahan bakar cair baik menggunakan penyalaan pengapian dengan menggunakan busi, maupun dengan sistem kompresi udara dan bahan bakar tanpa menggunakan busi yang menghasilkan tenaga berupa gas hasil pembakaran udara terkompresi yang digunakan untuk mengubah energi gerak luncur piston menjadi energi putar pada poros engkol yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan poros yang tersambung dengan poros generator sehingga membangkitkan tenaga listrik.
58. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Laut yang selanjutnya disebut PLT Energi Laut adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan arus laut, gelombang laut, pasang surut laut atau perbedaan suhu lapisan laut.

59. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
60. Saluran Udara Tegangan Menengah selanjutnya disingkat dengan SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
61. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
62. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
63. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disebut STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
64. Jaringan Bergerak adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
65. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
66. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
67. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
68. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
69. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
70. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
71. Sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
72. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
73. *Gas Insulated Switchgear* selanjutnya disingkat dengan GIS adalah sebuah sistem penghubung dan pemutus jaringan listrik yang dikemas dalam sebuah tabung non ferro dan menggunakan bahan *gas sulphurhexaflouride* sebagai media isolasinya.

74. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
75. Jaringan Distribusi Utama yang selanjutnya disingkat JDU adalah rangkaian pipa distribusi yang membentuk zona distribusi dalam suatu wilayah pelayanan SPAM.
76. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk di konsumsi.
77. *Intake* adalah suatu konstruksi yang berguna untuk mengambil air dari sumber air di permukaan tanah seperti reservoir, sungai, danau, atau kanal.
78. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala provinsi.
79. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut KPPP adalah suatu Ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
80. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
81. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
82. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
83. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
84. Zona Tunda adalah ketentuan tambahan pada peta rencana Pola Ruang berupa delineasi areal pada Kawasan tertentu yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan menjadi Kawasan peruntukan lainnya.
85. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

86. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
87. Kawasan Perkotaan Bitung, Minahasa, Manado disebut juga Wilayah Metropolitan Manado yang selanjutnya disebut Bimindo adalah satu kesatuan Kawasan Perkotaan yang terdiri atas Kota Manado dan Kota Bitung sebagai Kawasan Perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Airmadidi, Kawasan Perkotaan Likupang, Kawasan Perkotaan Tatelu, Kawasan Perkotaan Munte, di Kabupaten Minahasa Utara, Kawasan Perkotaan Tomohon di Kota Tomohon, Kawasan Perkotaan Tondano, dan Kawasan Perkotaan Tateli Tiga di Kabupaten Minahasa sebagai Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan metropolitan.
88. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW.
89. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjang dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
90. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
91. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
92. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
93. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
94. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

95. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
96. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
97. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
98. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
99. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
100. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
101. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
102. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
103. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
104. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
105. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. wilayah perencanaan;
b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah;
c. rencana Struktur Ruang Wilayah;
d. rencana Pola Ruang Wilayah;
e. kawasan strategis;
f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
g. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah;
h. pengawasan Penataan Ruang;
i. peran Masyarakat dan kelembagaan;
j. ketentuan lain-lain;
k. ketentuan pidana;
l. ketentuan peralihan; dan
m. ketentuan penutup.

BAB II
WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

(1) Wilayah RTRW meliputi seluruh wilayah Daerah dengan cakupan termasuk Wilayah udara dan Wilayah dalam bumi, mempunyai luas sebesar kurang lebih 6.496.548 (enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh delapan) hektare meliputi:
   a. Wilayah darat termasuk pulau kecil seluas kurang lebih 1.449.517 (satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas) hektare; dan
   b. Wilayah laut seluas kurang lebih 5.047.031 (lima juta empat puluh tujuh ribu tiga puluh satu) hektare.

(2) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota meliputi:
   a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
   b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
   c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
   d. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
   e. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
   f. Kabupaten Kepulauan Talaud;
   g. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
   h. Kabupaten Minahasa;
   i. Kabupaten Minahasa Selatan;
   j. Kabupaten Minahasa Tenggara;
   k. Kabupaten Minahasa Utara;
   l. Kota Bitung;
   m. Kota Kotamobagu;
   n. Kota Manado; dan
   o. Kota Tomohon.

(3) Pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 382 (tiga ratus delapan puluh dua) pulau meliputi:
   a. Daerah terdiri dari 1 (satu) pulau;
   b. Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari 6 (enam) pulau;
   c. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 5 (lima) pulau;
   d. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdiri dari 11 (sebelas) pulau;
   e. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 12 (dua belas) pulau;
   f. Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari 144 (seratus empat puluh empat) pulau;
   g. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari 55 (lima puluh lima) pulau;
   h. Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari 19 (sembilan belas) pulau;
   i. Kabupaten Minahasa terdiri dari 2 (dua) pulau;
   j. Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 4 (empat) pulau;
   k. Kabupaten Minahasa Tenggara terdiri dari 25 (dua puluh lima) pulau;
   l. Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) pulau;

m. Kota Bitung terdiri dari 36 (tiga puluh enam) pulau; dan
n. Kota Manado terdiri dari 3 (tiga) pulau.

(4) Batas-batas Wilayah Daerah meliputi:
a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, Negara Filipina dan Samudera Pasifik;
b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Teluk Tomini; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, Laut Sulawesi dan Teluk Tomini.

(5) Peta Wilayah Daerah, peta pulau-pulau dan nama-nama pulau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Terwujudnya Daerah sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia Timur dan Pasifik yang berpusat pada penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas yang bertumpu pada sektor pariwisata, kelautan, perikanan, dan pertanian secara terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:
a. pengembangan kemudahan aksesibilitas dan layanan transportasi di seluruh Wilayah (diutamakan pada Wilayah kepulauan);
b. peningkatan layanan infrastruktur wilayah secara terpadu dan berdaya guna;
c. perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung;
d. pengembangan dan pengelolaanpariwisata di seluruh Wilayah yang berbasis kesejahteraan Masyarakat;
e. pengembangan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan terpadu;
f. pengembangan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di Wilayah dan meningkatkan perekonomian Masyarakat;
g. pembangunan dan pengembangan Kawasan Budi Daya lainnya yang ramah lingkungan, berdaya guna dan berhasil guna;
h. pemantapan, pengelolaan, dan pengembangan Kawasan perbatasan negara dan KSP; dan

i. penguatan dan pengembangan kelembagaan di bidang Penataan Ruang.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

(1) Strategi pada kebijakan pengembangan kemudahan aksesibilitas dan layanan transportasi di seluruh Wilayah (diutamakan pada Wilayah kepulauan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi:
   a. membuka aksesibilitas pada daerah terisolir dengan layanan transportasi Masyarakat penumpang dan barang secara berkesinambungan;
   b. mengembangkan sistem alih moda transportasi yang memberikan kenyamanan dan kemudahan pada Masyarakat;
   c. menciptakan alternatif dan pilihan layanan transportasi yang layak dan terjangkau;
   d. membuka hubungan transportasi seluas-luasnya dengan Wilayah negara lainnya terutama yang terkait dengan aktivitas pariwisata dan perekonomian;
   e. memaksimalkan fungsi jalan tol sebagai jalur logistik;
   f. mendukung program prioritas dan integrasi pembangunan super hub sulawesi utara koridor manado-bitung-likupang;
   g. mengembangkan fungsi pelabuhan dan bandar udara sebagai lokasi transit dari dan menuju luar negeri;
   h. mendukung kerja sama *Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area*; dan
   i. menyediakan fasilitas bongkar muat barang untuk kepentingan logistik.

(2) Strategi pada kebijakan peningkatan layanan infrastruktur wilayah secara terpadu dan berdaya guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi:
   a. mengembangkan sistem keterpaduan terhadap layanan infrastruktur antar Wilayah Kabupaten dan Kota yang menjangkau seluruh Wilayah;
   b. memanfaatkan dan memaksimalkan setiap potensi nilai ekonomi yang ada dalam pengelolaan infrastruktur wilayah;
   c. meningkatkan daya saing dalam pengelolaan infrastruktur dengan memberikan kesempatan keterlibatan pihak lainnya;
   d. mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
   e. mengelola sumber daya air yang diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan ketersediaan air tanah, serta mewujudkan pengelolaan daerah aliran sungai dalam prinsip *one river, one plan, one management*.

(3) Strategi pada kebijakan perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

a. melakukan rekonstruksi tapal batas pada seluruh Kawasan Lindung yang ada di Wilayah provinsi, untuk memperkuat eksistensi Kawasan Lindung dan menghindarkan ancaman serta gangguan pada Kawasan Lindung;
b. melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi pada Kawasan Lindung yang ada di Wilayah daratan dan perairan;
c. melakukan kajian secara menyeluruh potensi-potensi yang berada di dalam Kawasan Lindung, serta melakukan pemanfaatan dan pengelolaan yang berwawasan konservasi;
d. memantapkan Kawasan RTH eksisting dan memenuhi ketersediaan RTH publik di seluruh Kawasan Perkotaan yang terdata dan terpetakan dengan baik;
e. memberikan perlindungan terhadap Kawasan hutan lindung untuk mencegah terjadinya deforestasi, erosi, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah yang menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan;
f. memberikan perlindungan terhadap Kawasan sempadan pantai, sungai, danau/waduk, dan mata air agar terlindungi dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsinya;
g. memberikan perlindungan terhadap Kawasan suaka alam dan suaka marga satwa untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya;
h. memberikan perlindungan terhadap sebaran *mangrove* sebagai pembentuk ekosistem *mangrove* dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung kawasan budi daya di belakangnya;
i. memberikan perlindungan terhadap Kawasan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran;
j. memberikan perlindungan terhadap Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa situs dan peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional;
k. melakukan upaya pemenuhan indeks ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon di Provinsi Sulawesi Utara;
l. mengelola Cagar Biosfer Bunaken Tangkoko Minahasa untuk mendukung dan menyelaraskan konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, serta penelitian dan pendidikan;

m. mendukung Kawasan segitiga terumbu karang dunia atau *Coral Triangle Initiative* melalui *Management of Seascape, Fisheries Management, Marine Protected Area, Climate Change* dan *Threatened Species*; dan
n. melakukan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 93,5% (sembilan puluh tiga koma lima persen) pada tahun 2045.

(4) Strategi pada kebijakan pengembangan pariwisata di seluruh Wilayah yang berbasis kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d meliputi:
a. pemantapan, penerapan dan pelaksanaan rencana induk kepariwisataan dalam membangun dan mengembangkan melalui empat pilar pembangunan kepariwisataan yang bertaraf internasional;
b. mengembangkan setiap peruntukan Ruang menjadi aset potensial dalam pengembangan pariwisata daerah;
c. mengutamakan pengembangan pariwisata yang berbasis ekowisata;
d. memberikan dukungan kepada industri pariwisata khususnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
e. mengembangkan destinasi pariwisata nasional Manado-Likupang;
f. meningkatkan sumber daya manusia di bidang pariwisata dengan membangun dan mengembangkan pendidikan kepariwisataan; dan
g. menciptakan dan mengembangkan regulasi yang mampu memberikan jaminan perlindungan bagi pelaku wisata.

(5) Strategi pada kebijakan pengembangan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e meliputi:
a. mendorong implementasi RTR Laut yang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun Wilayah agar Pemanfaatan Ruang laut yang bersinergis, serasi, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi modern;
b. mengelola sumber daya alam terbarukan di Wilayah perairan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab;
c. mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Wilayah perairan dengan penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara efektif dan konsisten di segala bidang;
d. meningkatkan perdagangan lintas batas negara yang dihubungkan melalui Laut dengan dukungan kemudahan transportasi;
e. mendorong implementasi pengelolaan wilayah perairan Laut sampai dengan 2 (dua) mil Laut diutamakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan/atau infrastruktur publik; dan

f. mengembangkan dan memantapkan pusat pertumbuhan dan pusat industri kelautan dan perikanan.

(6) Strategi pada kebijakan pengembangan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan di wilayah provinsi dan meningkatkan perekonomian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f meliputi:
a. memantapkan dan mengembangkan pengelolaan Kawasan pertanian yang mengacu pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan petani;
b. mengembangkan Kawasan pembibitan untuk menciptakan bibit unggul komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi sesuai dengan potensi dan daya dukung lahan pertanian yang ada;
c. mengembangkan pertanian yang berbasis teknologi melalui *system of rice intensification* dan komunitas; dan
d. membangun dan mengembangkan infrastruktur penunjang di bidang pertanian untuk memaksimalkan rantai pasok.

(7) Strategi pada kebijakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Budi daya lainnya yang ramah lingkungan, berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g meliputi:
a. melakukan kajian secara menyeluruh potensi-potensi Kawasan rawan bencana yang ada di seluruh Wilayah, serta menyusun dan menetapkan peta rawan bencana dan rencana penanggulangan bencana provinsi dan Kabupaten/Kota;
b. mengembangkan perumahan dan Kawasan permukiman berdasarkan arahan yang tertuang dalam rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman provinsi dan Kabupaten/Kota;
c. mengembangkan Kawasan peruntukan industri berdasarkan rencana pengembangan industri provinsi dan Kabupaten/Kota;
d. membangun dan mengembangkan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara merata di seluruh Wilayah provinsi yang terjangkau dan bisa diakses secara mudah oleh Masyarakat;
e. mengembangkan sistem pusat permukiman sebagai pusat pertumbuhan melalui transformasi ekonomi;
f. memaksimalkan fungsi kawasan perkotaan metropolitan dan kawasan perkotaan sedang;
g. mengembangkan kawasan perdesaan prioritas;
h. merestorasi kawasan pasca kegiatan pertambangan; dan
i. memaksimalkan potensi sumber daya daerah untuk dikelola meningkatkan pendapatan asli daerah.

(8) Strategi pada kebijakan pemantapan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan perbatasan negara dan KSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h meliputi:
a. menetapkan dan menegaskan batas di Laut, serta mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya nasional, sumber daya manusia, penegakan hukum dan kedaulatan di Laut dengan melibatkan pemerintah daerah

tanpa memicu konflik antar negara;

b. meningkatkan sarana dan prasarana dasar, serta ketersediaan logistik operasional untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di pulau-pulau perbatasan negara;
c. memantapkan pengelolaan dan pertahanan berbasis maritim di kawasan perbatasan negara secara terpadu dan terintegrasi dengan seluruh sektor terkait;
d. mengembangkan sistem pusat permukiman perbatasan negara sebagai pusat pertahanan dan keamanan negara;
e. mengembangkan fungsi pos lintas batas negara secara terpadu untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar;
f. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung perdagangan antar negara pada kawasan perbatasan negara untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan daya saing ekonomi antar wilayah;
g. menetapkan KSP berdasarkan potensi untuk dikembangkan sesuai dengan kemampuan Kawasan serta mendukung KSN;
h. mengembangkan KSP yang mampu meningkatkan dan menaikkan kesejahteraan masyarakat setempat; dan
i. mengembangkan KSP menjadi bagian penting dalam promosi pariwisata daerah.

(9) Strategi pada kebijakan penguatan dan pengembangan kelembagaan di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf i meliputi:
a. memantapkan dan meningkatkan fungsi FPR dalam penyelenggaraan Penataan Ruang;
b. memperkuat instansi teknis bidang Penataan Ruang setingkat eselon II;
c. menjalin kemitraan dengan lembaga lain/pihak swasta dalam mengembangkan Pengawasan Penataan Ruang; dan
d. memperkuat sistem dan sumber daya manusia dalam proses perizinan bidang Penataan Ruang.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas:
a. sistem pusat permukiman;
b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

(1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
a. PKN;
b. PKW;
c. PKSN; dan
d. PKL.

(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kawasan Perkotaan Manado-Bitung yang terdiri atas:
a. seluruh Wilayah Kota Manado; dan
b. seluruh Wilayah Kota Bitung.

(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. PKW Tomohon di Kota Tomohon;
b. PKW Tondano di Kabupaten Minahasa; dan
c. PKW Kotamobagu di Kota Kotamobagu.

(4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. PKSN Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud; dan
b. PKSN Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

(5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. PKL Kawasan Perkotaan Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud;
b. PKL Kawasan Perkotaan Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. PKL Kawasan Perkotaan Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud;
d. PKL Kawasan Perkotaan Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
e. PKL Kawasan Perkotaan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
f. PKL Kawasan Perkotaan Ulu di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
g. PKL Kawasan Perkotaan Buhias Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
h. PKL Kawasan Perkotaan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
i. PKL Kawasan Perkotaan Dumoga Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow;
j. PKL Kawasan Perkotaan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
k. PKL Kawasan Perkotaan Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
l. PKL Kawasan Perkotaan Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
m. PKL Kawasan Perkotaan Modayag di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
n. PKL Kawasan Perkotaan Kaidipang di Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara;
o. PKL Kawasan Perkotaan Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
p. PKL Kawasan Perkotaan Tateli Tiga di Kabupaten Minahasa;
q. PKL Kawasan Perkotaan Langowan di Kabupaten Minahasa;
r. PKL Kawasan Perkotaan Atep Oki di Kabupaten Minahasa;
s. PKL Kawasan Perkotaan TUANGTIBA di Kabupaten Minahasa Selatan;
t. PKL Kawasan Perkotaan Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
u. PKL Kawasan Perkotaan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara;
v. PKL Kawasan Perkotaan Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara; dan
w. PKL Kawasan Perkotaan Likupang di Kabupaten Minahasa Utara.

(6) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan kereta api;
c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
d. sistem jaringan transportasi laut; dan
e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
a. jalan umum;
b. jalan tol;
c. terminal penumpang;

d. terminal barang;
e. jembatan timbang; dan
f. jembatan.

Pasal 11

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
   a. jalan arteri;
   b. jalan kolektor; dan
   c. jalan lokal.
(2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3) Penambahan ruang milik jalan pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar minimal, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 12

Jalan arteri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer, meliputi:
a. Kauditan - Bts. Kota Bitung melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
b. Jln. Sompotan (Bitung) melintas di Kota Bitung;
c. Jln. Moh Hatta (Bitung) melintas di Kota Bitung;
d. Jln. Yos Sudarso (Bitung) melintas di Kota Bitung;
e. Jln. W. Maramis (Bitung)melintas di Kota Bitung;
f. Jln. Wolter Monginsidi (Bitung) melintas di Kota Bitung;
g. Airmadidi - Kauditan (By Pass) melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
h. Bts. Kota Manado - Airmadidi melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
i. Kairagi - Bts. Kota Manado melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
j. Jln. Yos Sudarso (Manado) melintas di Kota Manado;
k. Jln. R. Martadinata (Manado) melintas di Kota Manado;
l. Jln. Jenderal Sudirman (Manado) melintas di Kota Manado;
m. Kairagi - Mapanget melintas di Kota Manado;
n. Bts. Kota Manado - Tomohon melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
o. Jln. Suprapto (Lembong) (Manado) melintas di Kota Manado;
p. Jln. Samratulangi (Manado) melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Manado;
q. Tomohon - Kawangkoan melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
r. Kawangkoan - Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
s. Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan - Tumpaan melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
t. Tumpaan - Worotican melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
u. Worotican - Poigar melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;

v. Poigar - Kaiya melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;
w. Kaiya - Maelang melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
x. Maelang - Bts. Kab. Bolmong/Bolmut melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
y. Bts. Kab. Bolmong/Bolmut - Biontong melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
z. Biontong - Atinggola (Bts. Prov. Gorontalo) melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
aa. Akses Terminal Boroko (Kab. Bolaang Mongondow Utara) melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
bb. Airmadidi - Bts. Kota Tondano melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;
cc. Jln. W. Maramis (Tondano) melintas di Kabupaten Minahasa;
dd. Jln. Imam Bonjol (Tondano) melintas di Kabupaten Minahasa;
ee. Lingkar Kota Manado (MORR I) melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
ff. Lingkar Kota Manado (MORR II) melintas di Kota Manado;
gg. Simpang SBY - Akses Tol Airmadidi melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
hh. Akses Tol Airmadidi - Simpang Tondano melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
ii. Lingkar Kota Manado (MORR III) melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Manado;
jj. Lingkar Kota Manado (MORR IV) melintas di Kota Manado;
kk. Amurang Bypass (Kapitu-Tumpaan)melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
ll. Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Manado (Jalan Lembong - Pierre Tandean) melintas di Kota Manado;
mm. Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Labuhan Uki melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
nn. Jalan Lingkar Tomohon melintas di Kota Manado.

Pasal 13

Jalan kolektor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi:
a. Bts. Kota Manado - Tumpaan melintas di Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado;
b. Jln. Monginsidi (Manado) melintas di Kota Manado;
c. Jln. Bethesda (Manado) melintas di Kota Manado;
d. Zero Point - Jln. Pierre Tendean (Manado) melintas di Kota Manado;
e. Jln. Pierre Tendean (Boulevard) (Manado) melintas di KotaManado;
f. Likupang - Girian (Bitung) melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
g. Wori - Likupang melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
h. Bts. Kota Manado - Wori melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
i. Jln. Hasanudin (Manado) melintas di Kota Manado;
j. Jln. KS. Tubun (Manado) melintas di Kota Manado;
k. Jln. Panjaitan (Manado) melintas di Kota Manado;

l. Jln. Pogidon (Manado) melintas di Kota Manado;
m. Girian - Kema (Makalisung) melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
n. Kema - Rumbia melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;
o. Rumbia - Buyat melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
p. Buyat - Molobog melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
q. Molobog - Onggunoi melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
r. Onggunoi - Pinolosian melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
s. Pinolosian - Molibagu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
t. Molibagu - Momalia melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
u. Momalia - Taludaa (Bts. Prov. Gorontalo) melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
v. Bts. Kota Tondano - Tomohon melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
w. Jln. Samratulangi (Tondano) melintas di Kabupaten Minahasa;
x. Jln. Bulovard (Tondano) melintas di Kabupaten Minahasa;
y. Worotican - Poopo melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
z. Poopo - Sinisir melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan;
aa. Sinisir - Bts. Kota Kotamobagu/Boltim melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
bb. Bts. Kota Kotamobagu/Boltim - Sp. Empat Siliwangi melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu;
cc. Jln. Gatot Subroto (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
dd. Jln. Adampe Dolot (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
ee. Jln. A. Yani (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
ff. Jln. Sutoyo (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
gg. Jln. Yusuf Hasiru (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
hh. Jln. Siliwangi (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
ii. Bts. Kota Kotamobagu - Doloduo melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu;
jj. Jln. Kotamobagu - Doloduo (Kotamobagu) melintas di Kota Kotamobagu;
kk. Doloduo - Molibagu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
ll. Bts. Kota Tahuna - Enemawira melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
mm. Jln. Jend. Sudirman (Tahuna) melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
nn. Akhir Jln. Jend. Sudirman - Bts. Kota Tahuna melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

oo. Bts. Kota Tahuna - RSU Tahuna melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
pp. Naha - Enemawira melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
qq. Bts. Kota Tahuna (Tahuna) - Naha melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
rr. Jln. Kara Manusa (Tahuna) melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
ss. Jln. Apeng Cendera (Tahuna) melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
tt. Bts. Kota Tahuna - Tamako melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
uu. Jln. Marakambo (Tahuna) melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
vv. Jln. Tidore (Tahuna) melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
ww. Enemawira - Manalu - Tamako melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
xx. Beo - Melonguane melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
yy. Beo - Esang melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
zz. Esang - Rainis melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
aaa. Melonguane - Rainis melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
bbb. Beo - Rainis melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
ccc. Kaiya - Kotamobagu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu;
ddd. Matali - Torosik melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kota Kotamobagu;
eee. Langowan - Ratahan - Belang melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
fff. Tondano - Wasian - Kakas - Langowan - Kawangkoan melintas di Kabupaten Minahasa;
ggg. Jln. Lingkar Miangas melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
hhh. Jln. Lingkar Kakorotan melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
iii. Jalan Akses Likupang melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
jjj. Molobog - Onggunoi (Alih Trase) melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
kkk. Likupang - Girian (Bitung) Alih Trase melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
lll. Jalan Boulevard II (Manado) melintas di Kota Manado;
mmm. Akses Terminal Tipe A Liwas melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado ;
nnn. Jalan Akses Terminal Tangkoko melintas di Kota Bitung;
ooo. Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Tahuna melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
ppp. Jalan Trans PPKT Pulau Siau melintas di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
qqq. Jalan Trans PPKT Pulau Marore melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

rrr. Kauditan - Kema melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
sss. Ulu - Ondong - Talawid – Bandara melintas di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
ttt. Ratahan - Amurang melintas di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
uuu. Modayag - Molobog melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
vvv. Makalisung - Kombi - Toliang Oki melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;
www. Manado - Tongkaina - Wori melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
xxx. Tondano - Remboken - Kakas melintas di Kabupaten Minahasa;
yyy. Tondano - Kembes - Manado melintas di Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan Kota Tomohon;
zzz. Sonder - Tincep - Maruasey melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Selatan;
aaaa. Tomohon - Tanawangko melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
bbbb. Tanawangko - Kumu - Popontolen melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
cccc. Pinogaluman - Dumoga melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
dddd. Wasian - Simbel - Wailang melintas di Kabupaten Minahasa;
eeee. Mapanget - Molas (Manado) melintas di Kota Manado;
ffff. Tatelu - Klabat - Danowudu melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
gggg. Pontak - Kalait - Lobu melintas di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Tenggara ;
hhhh. Pontodon - Insil - Palelon melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
iiii. Akses Kek Bitung melintas di Kota Bitung;
jjjj. Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
kkkk. Togid - Kokapoy - Kakenturan melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan;
llll. Ponompiaan - Serasi - Totabuan melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
mmmm. Inomunga - Komus - Tuntung melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
nnnn. Laine - Ngalipaeng - Pintareng melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
oooo. Pintareng - Manalu melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
pppp. Lenganeng - Raku - Naha melintas di di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
qqqq. Langowan - Atep - Temboan melintas di Kabupaten Minahasa;
rrrr. Remboken - Kawangkoan melintas di Kabupaten Minahasa;
ssss. Lirung - Kalongan - Balang melintas di di Kabupaten Kepulauan Talaud;

tttt. Lirung - Balang melintas di di Kabupaten Kepulauan Talaud;
uuuu. Lirung - Bitunuris melintas di di Kabupaten Kepulauan Talaud;
vvvv. Tarohan - Pulutan melintas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
wwww. Jln. Samratulangi (Manado) melintas di Kota Manado;
xxxx. Jln. Ahmad Yani (Manado) melintas di Kota Manado;
yyyy. Warembungan - Simpang Tiga Desa Sea (Tugu) melintas di Kabupaten Minahasa;
zzzz. Dimembe - Paniki melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
aaaaa. Matungkas - Paniki melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
bbbbb. Kalasey - Sea melintas di Kabupaten Minahasa;
ccccc. Jln. Lingkar Tomohon - Rurukan - Sasaran melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
ddddd. Simpang Tiga Tataaran - Unima - Tondano melintas di Kabupaten Minahasa;
eeeee. Kasuang - Patar Tataaran - Remboken melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
fffff. Liwutung - Tababo melintas di Kabupaten Minahasa Tenggara;
ggggg. Imandi - Tambun - Uluan melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
hhhhh. Tolondadu - Salongo melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
iiiii. Ring Road II - Paniki melintas di Kota Manado;
jjjjj. Kolongan - Kuwil - Sawangan melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;
kkkkk. Paniki - Soekarno melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
lllll. Akses Pariwisata Pantai Paal - Kinunang melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
mmmmm. Batas Kota Manado - Mapanget melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
nnnnn. Bandara - Likupang (Alternatif) melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
ooooo. Jalan Akses TPA Regional melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
ppppp. Leleko - Kasuratan - Leilem melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
qqqqq. Sukur - Zero Point Minut melintas di Kabupaten Utara;
rrrrr. Zero Point Minut - Tatelu melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
sssss. Wasian - Likupang melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
ttttt. Kawangkoan - Ir. Soekarno melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
uuuuu. Ir. Soekarno - Matungkas melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
vvvvv. Papakelan - Tanggari - Tonsealama melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;
wwwww. Ir. Soekarno melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
xxxxx. Kuwil - Malendeng melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;

yyyyy. Atep - Wongkai - Pangu melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
zzzzz. Singsingon - Mobuya - Wulurmahatus melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;
aaaaaa. Paniki Atas - Mapanget melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
bbbbbb. Tateli - Agotey - Kakaskasen melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
cccccc. Pineleng - Kali - Kakaskasen melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
dddddd. Kaleosan - Rumengkor melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;
eeeeee. Toluaya - Popodu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
ffffff. Lobong - Passi - Bilalang - Biga dan melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu; dan
gggggg. Sangkub Timur - Sidodadi - Sukamakmur - Sangkub melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pasal 14

Jalan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer meliputi:

a. Dalam Kawasan Pananaru melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
b. Dalam Kota Likupang 12 melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
c. Dalam Kota Likupang 13 melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
d. Dalam Kota Melonguane melintas di Kepulauan Talaud;
e. Dalam Kota Salibabu melintas di Kepulauan Talaud;
f. Dalam Kota Ulu melintas di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
g. jalan akses pangkalan pendaratan ikan Tondano melintas di Kabupaten Minahasa;
h. jalan akses pelabuan perikanan ikan Sauk melintas di Bolaang Mongondow;
i. jalan akses pelabuhan Likupang melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
j. jalan akses pelabuhan Munte/Likupang Barat melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
k. jalan akses pelabuhan perikanan ikan Atep Oki melintas di Kabupaten Minahasa;
l. jalan akses pelabuhan perikanan ikan Dagho melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
m. jalan akses terminal "Tumatenden" Airmadidi melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
n. Jalan dalam IKK Tabukan Utara melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
o. Jalan Dalam Kota Langowan Timur melintas di Kabupaten Minahasa;
p. Jalan Dalam Kota Langowan Utara melintas di Kabupaten Minahasa;

q. Jalan Dalam Kota Tondano Barat melintas di Kabupaten Minahasa;
r. Jalan Desa Jiko Port melintas di Bolaang Mongondow Timur;
s. Jalan Masuk Bandara Naha melintas di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
t. Jl. Pande Bulan melintas di Kota Kotamobagu;
u. Jl. Pasar beriman I melintas di Kota Tomohon;
v. Jl. Puskesmas-Pasar Beriman melintas di Kota Tomohon;
w. Jln. Rajawali melintas di Kota Manado;
x. Jln. Terminal Paal Dua melintas di Kota Manado;
y. Jln. Tolour melintas di Kota Manado;
z. Jln. Tonsawang melintas di Kota Manado;
aa. Kema-Batu Nona melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
bb. Komus I-Tanjung Sidupa I melintas di Bolaang Mongondow Utara;
cc. Komus I-Tanjung Sidupa II melintas di Bolaang Mongondow Utara;
dd. Munte-Bulutui melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
ee. Ruas Jalan Dudepo Barat I melintas di Bolaang Mongondow Selatan; dan
ff. Ulu-Ondong (LU) melintas di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 15

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
a. Amurang-Kaiya melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;
b. Kairagi-Mapanget melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
c. Kaiya-Atingola melintas di Bolaang Mongondow dan di Bolaang Mongondow Utara;
d. Manado – Tomohon melintas di Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan Kota Tomohon;
e. Tomohon – Amurang melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon; dan
f. Manado – Bitung melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.

Pasal 16

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari:
   a. terminal penumpang tipe A; dan
   b. terminal penumpang tipe B.
(2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. terminal Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow;
   b. terminal Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
   c. terminal Liwas di Kota Manado;
   d. terminal Malalayang di Kota Manado; dan
   e. terminal Tangkoko di Kota Bitung.
(3) Terminal Penumpang tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. terminal “Beriman” Tomohon di Kota Tomohon;

b. terminal “Bonawang” di Kota Kotamobagu;
c. terminal “Linekepan” Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;
d. terminal “Maesaan” Langowan di Kabupaten Minahasa;
e. terminal “Tumatenden” Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara;
f. terminal Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
g. terminal Karombasan di Kota Manado;
h. terminal Kawangkoan di Kabupaten Minahasa;
i. terminal Paal Dua di Kota Manado; dan
j. terminal Tondano di Kabupaten Minahasa.

(4) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 17

(1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d yaitu terminal barang Liwas di Kota Manado.
(2) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan status terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 18

(1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
a. jembatan timbang Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondow;
b. jembatan timbang Pineleng di Kabupaten Minahasa; dan
c. jembatan timbang Wangurer-Bitung di Kota Bitung.

(2) Penambahan, peningkatan, dan penetapan status jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 19

(1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Penambahan, peningkatan, dan penetapan status jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 20

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api; dan
b. stasiun kereta api.

(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. lintas Manado-Bitung melintas di Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Manado; dan
b. lintas Malalayang – Wenang - Paal Dua - Mapanget melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado.

(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
a. stasiun Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara;
b. stasiun Barang Liwas di Kota Manado;
c. stasiun Bitung Kota di Kota Bitung;
d. stasiun Girian di Kabupaten Minahasa Utara;
e. stasiun Manado di Kota Manado;
f. stasiun Pelabuhan Bitung di Kota Bitung;
g. stasiun Bandara di Kota Manado;
h. stasiun GPI di Kota Manado;
i. stasiun Kalasey di Kabupaten Minahasa;
j. stasiun Malalayang di Kota Manado;
k. stasiun Mantos di Kota Manado;
l. stasiun Mega Mas di Kota Manado;
m. stasiun Paal Dua di Kota Manado;
n. stasiun Ranomuut di Kota Manado;
o. stasiun RSUP Prof. Kandouw di Kota Manado;
p. stasiun Tikala Ares di Kota Manado;
q. stasiun Transmart di Kota Manado; dan
r. stasiun Zero Point di Kota Manado.

(4) Penambahan dan pengembangan status sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 21

(1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. lintas penyeberangan antarprovinsi;
b. lintas penyeberangan antarkabupaten/Kota dalam provinsi;
c. pelabuhan sungai dan danau; dan
d. pelabuhan penyeberangan.

(2) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Amurang-Samarinda melintas di wilayah laut;
b. Amurang-Toli-toli-Tarakan melintas di wilayah laut;
c. Bitung-Gorua (Tobelo, Maluku Utara) melintas di wilayah laut;
d. Bitung-Luwuk (Sulawesi Tengah) melintas di wilayah laut;
e. Bitung-Molibagu/Torosik-Gorontalo melintas di wilayah laut;
f. Bitung-Pagimana (Sulteng) melintas di wilayah laut;

g. Bitung-Sanana (Maluku Utara) melintas di wilayah laut; dan
h. Bitung-Ternate (Maluku Utara) melintas di wilayah laut.

(3) Lintas penyeberangan antarkabupaten/Kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Amurang-Biaro melintas di wilayah laut;
b. Amurang-Melonguane melintas di wilayah laut;
c. Amurang-Pananaru melintas di wilayah laut;
d. Biaro-Minanga melintas di wilayah laut;
e. Bitung-Biaro melintas di wilayah laut;
f. Bitung-Melonguane melintas di wilayah laut;
g. Bitung-Minanga melintas di wilayah laut;
h. Bitung-Pananaru melintas di wilayah laut;
i. Bitung-Pulau Lembeh melintas di wilayah laut;
j. Bitung-Siau melintas di wilayah laut;
k. Bitung-Tagulandang melintas di wilayah laut;
l. Buhias-Sawang melintas di wilayah laut;
m. Kawaluso-Marore melintas di wilayah laut;
n. Likupang-Biaro melintas di wilayah laut;
o. Likupang-Melonguane melintas di wilayah laut;
p. Likupang-Tahuna melintas di wilayah laut;
q. Makalehi-Sawang melintas di wilayah laut;
r. Marampit-Miangas melintas di wilayah laut;
s. Melonguane-Marampit melintas di wilayah laut;
t. Melonguane-Musi melintas di wilayah laut;
u. Minanga-Buhias melintas di wilayah laut;
v. Minanga-Makalehi melintas di wilayah laut;
w. Munte-Manado-Pulau Gangga-Pulau Mantehage (Minahasa Utara)-Bitung melintas di wilayah laut;
x. Musi-Mangaran melintas di wilayah laut;
y. Pananaru-Kawaluso melintas di wilayah laut;
z. Pananaru-Melonguane melintas di wilayah laut; dan
aa. Sawang-Pananaru melintas di wilayah laut.

(4) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. dermaga Danau Linouw di Kota Tomohon; dan
b. dermaga Danau Tondano di Kabupaten Minahasa.

(5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan Bitung di Kota Bitung;
b. pelabuhan penyeberangan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
c. pelabuhan penyeberangan Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
d. pelabuhan penyeberangan Pananaru di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
e. pelabuhan penyeberangan Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
f. pelabuhan penyeberangan Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
g. pelabuhan penyeberangan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud;
h. pelabuhan penyeberangan Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;

i. pelabuhan penyeberangan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
j. pelabuhan penyeberangan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
k. pelabuhan penyeberangan Lembeh di Kota Bitung;
l. pelabuhan penyeberangan Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
m. pelabuhan penyeberangan Musi di Kabupaten Kepulauan Talaud;
n. pelabuhan penyeberangan Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud;
o. pelabuhan penyeberangan Bunaken di Kota Manado;
p. pelabuhan penyeberangan Siladen di Kota Manado;
q. pelabuhan penyeberangan Manado Tua di Kota Manado;
r. pelabuhan penyeberangan Mangarang di Kabupaten Kepulauan Talaud;
s. pelabuhan penyeberangan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
t. pelabuhan penyeberangan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
u. pelabuhan penyeberangan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud;
v. pelabuhan penyeberangan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud;
w. pelabuhan penyeberangan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
x. pelabuhan penyeberangan Buhias di Kabupaten Minahasa Utara;
y. pelabuhan penyeberangan Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
z. pelabuhan penyeberangan Talise di Kabupaten Minahasa Utara; dan
aa. pelabuhan penyeberangan Manado (Megamas) di Kota Manado.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 22

Sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. pelabuhan Laut; dan
b. alur-pelayaran di Laut.

Pasal 23

(1) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
    a. pelabuhan utama;
    b. pelabuhan pengumpul;
    c. pelabuhan pengumpan;
    d. terminal khusus; dan
    e. pelabuhan perikanan.

(2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pelabuhan Bitung di Kota Bitung, yang berfungsi sebagai *International Hub Port.*

(3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pelabuhan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
b. pelabuhan Labuhan Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow;
c. pelabuhan Manado di Kota Manado;
d. pelabuhan Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
e. pelabuhan Petta di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
f. pelabuhan Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pelabuhan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara;
b. pelabuhan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
c. pelabuhan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud;
d. pelabuhan Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
e. pelabuhan Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;
f. pelabuhan Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud;
g. pelabuhan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
h. pelabuhan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud;
i. pelabuhan Munte/Likupang Barat di Kabupaten Minahasa Utara;
j. pelabuhan Pehe di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
k. pelabuhan Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
l. pelabuhan Tg. Sidupa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
m. pelabuhan Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
n. pelabuhan Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
o. pelabuhan Babelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
p. pelabuhan Bangka di Kabupaten Minahasa Utara;
q. pelabuhan Bentung di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
r. pelabuhan Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud;
s. pelabuhan Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
t. pelabuhan Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
u. pelabuhan Buhias di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
v. pelabuhan Bukide di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
w. pelabuhan Bunaken di Kota Manado;
x. pelabuhan Damao di Kabupaten Kepulauan Talaud;
y. pelabuhan Dapalan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
z. pelabuhan Essang di Kabupaten Kepulauan Talaud;
aa. pelabuhan Gangga di kabupaten Minahasa Utara;
bb. pelabuhan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud;
cc. pelabuhan Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondow;
dd. pelabuhan Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

ee. pelabuhan Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
ff. pelabuhan Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
gg. pelabuhan Kora-kora di Kabupaten Minahasa;
hh. pelabuhan Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
ii. pelabuhan Lipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
jj. pelabuhan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
kk. pelabuhan Mangarang di Kabupaten Kepulauan Talaud;
ll. pelabuhan Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud;
mm. pelabuhan Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
nn. pelabuhan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
oo. pelabuhan Montehage di Kabupaten Minahasa Utara;
pp. pelabuhan Nain di Kabupaten Minahasa Utara;
qq. pelabuhan Ngalipaeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
rr. pelabuhan P. Beng Darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
ss. pelabuhan P. Mahangetang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
tt. pelabuhan P. Manado Tua di Kota Manado;
uu. pelabuhan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
vv. pelabuhan Pananaru di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
ww. pelabuhan Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
xx. pelabuhan Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud;
yy. pelabuhan Ratatotok di Kabupaten Minahasa Tenggara;
zz. pelabuhan Salangka di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
aaa. pelabuhan Sawang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
bbb. pelabuhan Siladen di Kota Manado;
ccc. pelabuhan Talise di Kabupaten Minahasa Utara;
ddd. pelabuhan Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
eee. pelabuhan Tanawangko di Kabupaten Minahasa;
fff. pelabuhan Tumbak di Kabupaten Minahasa Tenggara;
ggg. pelabuhan Tumumpa di Kota Manado;
hhh. pelabuhan Tutuyan-Jikoblanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
iii. pelabuhan Wori di Kabupaten Minahasa Utara.

(5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. pelabuhan perikanan samudera;
b. pelabuhan perikanan pantai; dan
c. pangkalan pendaratan ikan.

(7) Pelabuhan perikanan samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
a. pelabuhan perikanan samudera Bitung di Kota Bitung; dan
b. pelabuhan perikanan samudera Likupang di Kabupaten Minahasa Utara.

(8) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu pelabuhan perikanan pantai Tumumpa di Kota Manado.

(9) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
   a. pangkalan pendaratan ikan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
   b. pangkalan pendaratan ikan Atep Oki di Kabupaten Minahasa;
   c. pangkalan pendaratan ikan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara;
   d. pangkalan pendaratan ikan Dagho di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
   e. pangkalan pendaratan ikan Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
   f. pangkalan pendaratan ikan Jiko di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
   g. pangkalan pendaratan ikan Kema di Kabupaten Minahasa Utara;
   h. pangkalan pendaratan ikan Salibabu di Kabupaten Kepulauan Talaud;
   i. pangkalan pendaratan ikan Sauk di Kabupaten Bolaang Mongondow;
   j. pangkalan pendaratan ikan Tanawangko di Kabupaten Minahasa;
   k. pangkalan pendaratan ikan Tondano di Kabupaten Minahasa;
   l. pangkalan pendaratan ikan Tanjung Sidupa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
   m. pangkalan pendaratan ikan Ulu di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

(10) Penambahan dan penetapan pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 24

(1) Alur-pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
   a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
   b. alur-pelayaran masuk Pelabuhan.

(2) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu alur pelayaran Nasional melintas di wilayah laut.

(3) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. alur-pelayaran masuk pelabuhan Bitung melintas di wilayah laut;
   b. alur-pelayaran masuk pelabuhan Manado dan Pulau Bunaken melintas di wilayah laut;
   c. alur-pelayaran masuk pelabuhan Labuan Uki melintas di wilayah laut; dan
   d. alur-pelayaran masuk pelabuhan Tahuna melintas di wilayah laut.

(4) Penambahan dan penetapan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 25

(1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas:
   a. bandar udara pengumpul; dan
   b. bandar udara pengumpan.
(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. bandar udara Sam Ratulangi di Kota Manado; dan
   b. bandar udara Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud.
(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. bandar udara Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow;
   b. bandar udara Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
   c. bandar udara Naha di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
   d. bandar udara Sitaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
(4) Penambahan dan penetapan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 26

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi:
   a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan minyak dan gas bumi.
(2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
   a. depot bahan bakar minyak Paceda di Kota Bitung;

b. depot *liquefied petroleum gas* Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
c. DPPU Sam Ratulangi di Kota Manado;
d. *fuel terminal* Bitung di Kota Bitung; dan
e. *fuel terminal* Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan.

Pasal 28

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. PLT Energi Laut Bitung di Wilayah laut.
b. PLTA Bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara;
c. PLTA Minut 1 di Kabupaten Minahasa Utara;
d. PLTA Minut 2 di Kabupaten Minahasa Utara;
e. PLTA Minut 3 di Kabupaten Minahasa Utara;
f. PLTA Pindol di Kabupaten Bolaang Mongondow;
g. PLTA Sawangan 1 di Kabupaten Minahasa Utara;
h. PLTA Sawangan 2 di Kabupaten Minahasa Utara;
i. PLTA Tanggari 1 di Kabupaten Minahasa Utara;
j. PLTA Tanggari 2 di Kabupaten Minahasa Utara;
k. PLTA Tonsealama di Kabupaten Minahasa;
l. PLTB Bitung di Kota Bitung;
m. PLTB Kepulauan Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud;
n. PLTB Malamenggu di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
o. PLTB Wawo di Kota Tomohon;
p. PLTBm Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow;
q. PLTD Bangka di Kabupaten Minahasa Utara;
r. PLTD Bengketang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
s. PLTD Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
t. PLTD Bitung di Kota Bitung;
u. PLTD Bukide di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
v. PLTD Dapalan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
w. PLTD Essang di Kabupaten Kepulauan Talaud;
x. PLTD Gangga di Kabupaten Minahasa Utara;
y. PLTD Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud;
z. PLTD Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
aa. PLTD Karakelang/Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud;
bb. PLTD Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud;
cc. PLTD Kotamobagu di Kota Kotamobagu;
dd. PLTD Lesabe di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
ee. PLTD Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud;

ff. PLTD Lopana di Kabupaten Minahasa Selatan;
gg. PLTD Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
hh. PLTD Mangaran di Kabupaten Kepulauan Talaud;
ii. PLTD Mantehage di Kabupaten Minahasa Utara;
jj. PLTD Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud;
kk. PLTD Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
ll. PLTD Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud;
mm. PLTD Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
nn. PLTD Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
oo. PLTD Nain di Kabupaten Minahasa Utara;
pp. PLTD Nanedakele di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
qq. PLTD Ondong di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
rr. PLTD Papusungan di Kota Bitung;
ss. PLTD Pokol di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
tt. PLTD Pulau Bunaken di Kota Manado;
uu. PLTD Pulau Manado Tua di Kota Manado;
vv. PLTD Pulau Siladen di Kota Manado;
ww. PLTD Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
xx. PLTD Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
yy. PLTD Talise di Kabupaten Minahasa Utara;
zz. PLTD Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
aaa. PLTD Tarun di Kabupaten Kepulauan Talaud;
bbb. PLTMG Minahasa di Kabupaten Minahasa Utara;
ccc. PLTMG MVPP Amurang di Wilayah laut;
ddd. PLTMG Tahuna 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
eee. PLTMG Tahuna 3 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
fff. PLTMG Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
ggg. PLTP Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara;
hhh. PLTP Bitung di Kota Bitung;
iii. PLTP Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
jjj. PLTP Kaleosan Kalawat di Kabupaten Minahasa Utara;
kkk. PLTP Kotamobagu di Kabupaten Bolaang Mongondow;
lll. PLTP Lahendong 7 di Kabupaten Minahasa;
mmm. PLTP Lahendong 8 di Kabupaten Minahasa;
nnn. PLTP Lahendong I dan II di Kota Tomohon;
ooo. PLTP Lahendong III dan IV di Kota Tomohon;
ppp. PLTP Lahendong V di Kabupaten Minahasa;
qqq. PLTP Lahendong VI di Kabupaten Minahasa;
rrr. PLTP Tanggari di Kabupaten Minahasa Utara;
sss. PLTP Tomohon di Kota Tomohon;
ttt. PLTP Wineru di Kabupaten Minahasa Utara;
uuu. PLTS Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud;
vvv. PLTS Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
www. PLTS Bitung di Kota Bitung;
xxx. PLTS Buhias di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
yyy. PLTS Bunaken di Kota Manado;
zzz. PLTS Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud;

aaaa. PLTS Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
bbbb. PLTS Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;
cccc. PLTS Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud;
dddd. PLTS Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
eeee. PLTS Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud;
ffff. PLTS Marore I di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
gggg. PLTS Marore II di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
hhhh. PLTS Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
iiii. PLTS Nanusa di Kabupaten Kepulauan Talaud;
jjjj. PLTS Nusa Tabukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
kkkk. PLTS Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
llll. PLTS Pulau Manado Tua di Kota Manado;
mmmm. PLTS Pulau Siladen di Kota Manado;
nnnn. PLTS Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
oooo. PLTS Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
pppp. PLTS Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
qqqq. PLTS Tapile di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
rrrr. PLTS Terapung Danau Bunong di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
ssss. PLTS Terapung Danau Linow di Kota Tomohon;
tttt. PLTS Terapung Danau Luah Bulilin di Kabupaten Minahasa Tenggara;
uuuu. PLTS Terapung Danau Pononotokan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
vvvv. PLTS Terapung Danau Tabang Tabakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
wwww. PLTS Terapung Danau Tondano di Kabupaten Minahasa;
xxxx. PLTS Terapung Mooat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
yyyy. PLTS Tomohon Timur di Kota Tomohon;
zzzz. PLTSa Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara;
aaaaa. PLTU Amurang I di Kabupaten Minahasa Selatan;
bbbbb. PLTU Amurang II di Kabupaten Minahasa Selatan;
ccccc. PLTU Sulut 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
ddddd. PLTU Sulut 3 di Kabupaten Minahasa Utara; dan
eeeee. PLTU Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud.

(3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
b. gardu listrik.

(4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. SUTT Belang - Tutuyan melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
b. SUTT GI Ranomuut – GI Teling melintas di Kota Manado;

c. SUTT Teling - Paniki melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
d. SUTT Isimu - Boroko melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
e. SUTT Kawangkoan - Lopana melintas di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
f. SUTT Kawangkoan - PLTP Lahendong V dan VI melintas di Kabupaten Minahasa;
g. SUTT Kema (PLTU Sulut 3) – Belang melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
h. SUTT Likupang - Bitung melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
i. SUTT Likupang - Pandu melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
j. SUTT Likupang - Paniki melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
k. SUTT Lolak - Boroko melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
l. SUTT Lopana - GIS Teling melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado;
m. SUTT Lopana - Otam melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan;
n. SUTT Molibagu – Botupingge melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
o. SUTT Otam - Lolak melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
p. SUTT Otam - Molibagu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kota Kotamobagu;
q. SUTT Otam - Tutuyan melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu;
r. SUTT PLTA Sawangan - Sawangan melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
s. SUTT PLTA Tanggari 1 - Sawangan melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
t. SUTT PLTA Tanggari 2 - Sawangan melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
u. SUTT PLTA TNSLM-TNSLM melintas di Kabupaten Minahasa;
v. SUTT PLTMG Minahasa - Likupang melintas di Kabupaten Minahasa Utara;
w. SUTT PLTP Lahendong - Kawangkoan melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
x. SUTT PLTP Lahendong - Tomohon melintas di Kota Tomohon;
y. SUTT PLTU Amurang - Lopana melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
z. SUTT PLTU Sulut 3 - Tanjung Merah melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
aa. SUTT PLTU Sulut I - Incomer Double Phi (Lolak - Boroko) melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

bb. SUTT Sawangan - Bitung melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
cc. SUTT Sawangan - Ranomut melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado;
dd. SUTT Tanjung Merah - Bitung melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
ee. SUTT Tanjung Merah - Paniki melintas di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;
ff. SUTT Tomohon-Tasik Ria melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
gg. SUTT Tomohon - Teling melintas di Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan Kota Tomohon;
hh. SUTT Tonsealama - Sawangan di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara;
ii. SUTT Tonsealama - Tomohon melintas di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon;
jj. SUTT Tutuyan - Molibagu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
kk. saluran kabel tegangan tinggi Mapanget - Sario melintas di Kota Manado; dan
ll. saluran kabel tegangan tinggi Sario - Teling melintas di Kota Manado.

(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. GI Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
b. GI Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara;
c. GI Bintauna (*Town Feeder*) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
d. GI Bitung di Kota Bitung;
e. GI Buroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
f. GI Kawangkoan I di Kabupaten Minahasa;
g. GI Kawangkoan II di Kabupaten Minahasa;
h. GI Kawangkoang - PLTP Lahendong (1,2) 2 di Kabupaten Minahasa;
i. GI Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;
j. GI Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
k. GI Lopana di Kabupaten Minahasa Selatan;
l. GI Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
m. GI Otam di Kabupaten Bolaang Mongondow;
n. GI Pandu di Kabupaten Minahasa Utara;
o. GI Paniki di Kabupaten Minahasa Utara;
p. GI PLTU Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
q. GI Ranomut di Kota Manado;
r. GI Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara;
s. GI Tanjung Merah di Kota Bitung;
t. GI Tasik Ria di Kabupaten Minahasa;
u. GI Teling di Kota Manado;
v. GI Tomohon di Kota Tomohon;
w. GI Tonsealama di Kabupaten Minahasa;
x. GI Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
y. GIS Sario di Kota Manado;
z. GIS Sinsingon di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
aa. GIS Teling di Kota Manado.

(6) Rencana pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 29

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
a. jaringan tetap;
b. infrastruktur jaringan tetap; dan
c. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. *backbone* melintas di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
b. alur kabel bawah laut Luwuk-Tutuyan;
c. alur kabel bawah laut Manado (*Landing Station*) - Ondong Siau;
d. alur kabel bawah laut Ondong Siau-Tahuna;
e. alur kabel bawah laut Kauditan-Davao;
f. alur kabel bawah laut Kauditan-Sofifi;
g. alur kabel bawah laut Melonguane-Morotai;
h. alur kabel bawah laut Tahuna-Melonguane;
i. alur kabel bawah laut Kauditan-Ondong Siau;
j. alur kabel bawah laut WP-Makassar-Manado *(Landing Station)*; dan
k. sistem komunikasi kabel laut (SKKL)-Bifrost.

(3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. sentral telepon otomat Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara;
b. sentral telepon otomat Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
c. sentral telepon otomat Bahu di Kota Manado;
d. sentral telepon otomat Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud;
e. sentral telepon otomat Bitung di Kota Bitung;
f. sentral telepon otomat Kauditan di Kabupaten Minahasa Utara;
g. sentral telepon otomat Kotamobagu di Kota Kotamobagu;
h. sentral telepon otomat Langowan di Kabupaten Minahasa;
i. sentral telepon otomat Manado di Kota Manado;
j. sentral telepon otomat Paniki di Kota Manado;
k. sentral telepon otomat Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
l. sentral telepon otomat Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
m. sentral telepon otomat Tomohon di Kota Tomohon;

n. sentral telepon otomat Tondano di Kabupaten Minahasa;
o. sentral telepon otomat Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
p. sentral telepon otomat Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
q. *landing station* Manado di Kabupaten Minahasa;
r. BMH Manado di Kabupaten Minahasa;
s. *beach manhole* dan *terminal station* Kauditan di Kabupaten Minahasa Utara;
t. *beach manhole* dan *terminal station* Manado di Kota Manado;
u. *beach manhole* dan *terminal station* Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud;
v. *beach manhole* dan *terminal station* Ondong di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
w. *beach manhole* dan *terminal station* Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
x. *beach manhole* dan *terminal station* Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
y. *beach manhole* dan *terminal station* Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
z. *Swift Broadband* Dendengan di Kota Manado.

(4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. satelit multi fungsi di Kabupaten Minahasa Utara;
b. stasiun bumi Bakamla Bitung di Kota Bitung;
c. stasiun bumi Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
d. stasiun bumi Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

(5) Penambahan dan pengembangan status sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 30

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e adalah prasarana sumber daya air meliputi:
a. sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. jaringan irigasi Dataran Kotamobagu melintas di Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu;
b. jaringan irigasi Kosinggolan melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
c. jaringan irigasi Toraut melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
d. jaringan irigasi Sangkub melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
e. jaringan irigasi Premium Lolak melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
f. jaringan irigasi Ayong Bolangat Maelang melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
g. jaringan irigasi Buko Tuntung melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
h. jaringan irigasi Buyat melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
i. jaringan irigasi Lahendong melintas di Kabupaten Minahasa Tenggara;
j. jaringan irigasi Lolak, Pinogaluman, Monanow melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
k. jaringan irigasi Moayat-Pawak melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu;
l. jaringan irigasi Noongan melintas di Kabupaten Minahasa;
m. jaringan irigasi Pusian Molong melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
n. jaringan irigasi Ranombolay melintas di Kabupaten Minahasa Tenggara;
o. jaringan irigasi Ranoyapo melintas di Kabupaten Minahasa Selatan;
p. jaringan irigasi Talawaan Meras melintas di Kabupaten Minahasa Utara; dan
q. jaringan irigasi Tombolikat Sita melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. jaringan pengendalian banjir; dan
b. bangunan pengendalian banjir.

(4) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, meliputi:
a. tanggul Danau Tondano di Kabupaten Minahasa;
b. tanggul Sungai Bailang di Kota Manado;
c. tanggul Sungai Malalayang di Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan Kota Tomohon;
d. tanggul Sungai Sario di Kabupaten Minahasa dan Kota Manado;
e. tanggul Sungai Tikala di Kabupaten Minahasa dan Kota Manado; dan
f. tanggul Sungai Tondano di Kota Manado.

(5) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, meliputi:
a. bendungan Kali di Kabupaten Minahasa;

b. bendungan Kuwil Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara;
c. bendungan Sawangan di Kabupaten Minahasa;
d. embung Bailang di Kota Manado;
e. embung Tote di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
f. kolam retensi Karombasan di Kota Manado;
g. kolam retensi/embung buatan Tikala di Kota Manado;
h. kolam retensi/embung buatan Tingkulu di Kota Manado;
i. pengendali banjir S. Maasing di Kota Manado;
j. pengendali banjir S. Mahawu di Kota Manado;
k. pengaman pantai Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
l. pengaman pantai Bakida di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
m. pengaman pantai Batuderang Metegehi di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
n. pengaman pantai Bebalang Sapaeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
o. pengaman pantai Bentenan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
p. pengaman pantai Bukit Tinggi di Kabupaten Minahasa;
q. pengaman pantai Buko 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
r. pengaman pantai Buko 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
s. pengaman pantai Buku di Kabupaten Minahasa Tenggara;
t. pengaman pantai Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
u. pengaman pantai Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondow;
v. pengaman pantai Kalasuge di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
w. pengaman pantai Kamenti di Kabupaten Minahasa;
x. pengaman pantai Lion di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
y. pengaman pantai Lungkap di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
z. pengaman pantai Luwoo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
aa. pengaman pantai Mamalia di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
bb. pengaman pantai Marore 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
cc. pengaman pantai Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
dd. pengaman pantai Miangas 1 di Kabupaten Kepulauan Talaud;

ee. pengaman pantai Miangas 2 di Kabupaten Kepulauan Talaud;
ff. pengaman pantai Milangodaa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
gg. pengaman pantai Minanga di Kabupaten Minahasa Tenggara;
hh. pengaman pantai Mokupa di Kabupaten Minahasa;
ii. pengaman pantai Molompar di Kabupaten Minahasa Tenggara;
jj. pengaman pantai Pinolosian di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
kk. pengaman pantai Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow;
ll. pengaman pantai Poopo di Kabupaten Minahasa;
mm. pengaman pantai Pulau Gangga di Kabupaten Minahasa Utara;
nn. pengaman pantai Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
oo. pengaman pantai Pulau Kebaruan di Kabupaten Kepulauan Talaud;
pp. pengaman pantai Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
qq. pengaman pantai Pulau Pehe Ondong di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
rr. pengaman pantai Rap-rap dan Arakan di Kota Manado;
ss. pengaman pantai Rumbia di Kabupaten Minahasa;
tt. pengaman pantai Saputa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
uu. pengaman pantai Sinombayuga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
vv. pengaman pantai Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
ww. pengaman pantai Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
xx. pengaman pantai Wori di Kabupaten Minahasa Utara.

(6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi;
a. bendung Ayong di Kabupaten Bolaang Mongondow;
b. bendung Bolangat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
c. bendung Domara di Kabupaten Bolaang Mongondow;
d. bendung Dondomon di Kabupaten Bolaang Mongondow;
e. bendung Dulangon di Kabupaten Bolaang Mongondow;
f. bendung Konarom di Kabupaten Bolaang Mongondow;
g. bendung Kosinggolan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
h. bendung Liang di Kabupaten Bolaang Mongondow;
i. bendung Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
j. bendung Lolak Atas di Kabupaten Bolaang Mongondow;
k. bendung Maelang di Kabupaten Bolaang Mongondow;
l. bendung Mananow di Kabupaten Bolaang Mongondow;

m. bendung Mobilai di Kabupaten Bolaang Mongondow;
n. bendung Molong 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
o. bendung Molong 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
p. bendung Poyangat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
q. bendung Pusian Kanan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
r. bendung Pusian Kiri di Kabupaten Bolaang Mongondow;
s. bendung Sidomulyo di Kabupaten Bolaang Mongondow;
t. bendung Sukamaju di Kabupaten Bolaang Mongondow;
u. bendung suplesi Ibolian di Kabupaten Bolaang Mongondow;
v. bendung suplesi Ikuna di Kabupaten Bolaang Mongondow;
w. bendung suplesi Mekarsari di Kabupaten Bolaang Mongondow;
x. bendung suplesi Mekarsari 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow;
y. bendung Suplesi Pusian di Kabupaten Bolaang Mongondow;
z. bendung Tapadaka di Kabupaten Bolaang Mongondow;
aa. bendung Tirtonadi di Kabupaten Bolaang Mongondow;
bb. bendung Tonop di Kabupaten Bolaang Mongondow;
cc. bendung Toraut di Kabupaten Bolaang Mongondow;
dd. bendung Toruakat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
ee. bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
ff. bendung Kaliputi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
gg. bendung Lombiawan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
hh. bendung Sita di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
ii. bendung Suplesi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
jj. bendung suplesi Yuyak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
kk. bendung Tombolikat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
ll. bendung Toyot di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
mm. bendung Wuwuk 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
nn. bendung Buko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
oo. bendung Sangkub di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
pp. bendung Tuntung di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
qq. bendung Bonodon di Kota Kotamobagu;
rr. bendung Bonodon II di Kota Kotamobagu;
ss. bendung Kope di Kota Kotamobagu;
tt. bendung Kope II di Kota Kotamobagu;
uu. bendung Koppe I di Kota Kotamobagu;
vv. bendung Moayat di Kota Kotamobagu;
ww. bendung Tangaton di Kota Kotamobagu;
xx. bendung Wuwuk 2 di Kota Kotamobagu;
yy. bendung Yantaton 1 di Kota Kotamobagu;
zz. bendung Yantaton 2 di Kota Kotamobagu;

aaa. bendung Yantaton 3 di Kota Kotamobagu;
bbb. bendung Botu di Kabupaten Minahasa;
ccc. bendung Impit di Kabupaten Minahasa;
ddd. bendung Kaliambong di Kabupaten Minahasa;
eee. bendung Kinalawiran di Kabupaten Minahasa;
fff. bendung Malemboh di Kabupaten Minahasa;
ggg. bendung Miwimbongen I di Kabupaten Minahasa;
hhh. bendung Miwimbongen II di Kabupaten Minahasa;
iii. bendung Noongan di Kabupaten Minahasa;
jjj. bendung Palembu di Kabupaten Minahasa;
kkk. bendung Panasen Hilir di Kabupaten Minahasa;
lll. bendung Ranoweleng di Kabupaten Minahasa;
mmm. bendung Sarewo di Kabupaten Minahasa;
nnn. bendung Sina I di Kabupaten Minahasa;
ooo. bendung Sina II di Kabupaten Minahasa;
ppp. bendung Timbukar di Kabupaten Minahasa;
qqq. bendung Touliang di Kabupaten Minahasa;
rrr. bendung Watuporong di Kabupaten Minahasa;
sss. bendung Wawowanga di Kabupaten Minahasa;
ttt. bendung Moyondok Atas di Kabupaten Minahasa Selatan;
uuu. bendung Moyondok Bawah di Kabupaten Minahasa Selatan;
vvv. bendung Moyondok II di Kabupaten Minahasa Selatan;
www. bendung Moyondok III di Kabupaten Minahasa Selatan;
xxx. bendung Moyondok IV di Kabupaten Minahasa Selatan;
yyy. bendung Moyondok V di Kabupaten Minahasa Selatan;
zzz. bendung Pinontalan I di Kabupaten Minahasa Selatan;
aaaa. bendung Pinontalan II di Kabupaten Minahasa Selatan;
bbbb. bendung Pinontalan III di Kabupaten Minahasa Selatan;
cccc. bendung Pinontalan IV di Kabupaten Minahasa Selatan;
dddd. bendung Polimaan di Kabupaten Minahasa Selatan;
eeee. bendung Polimaan II di Kabupaten Minahasa Selatan;
ffff. bendung Ponombiaan di Kabupaten Minahasa Selatan;
gggg. bendung Ranoyapo I di Kabupaten Minahasa Selatan;
hhhh. bendung Ranoyapo II di Kabupaten Minahasa Selatan;
iiii. bendung Ranoyapo III di Kabupaten Minahasa Selatan;
jjjj. bendung Ranoyapo IV di Kabupaten Minahasa Selatan;
kkkk. bendung Abuang I di Kabupaten Minahasa Tenggara;
llll. bendung Abuang II di Kabupaten Minahasa Tenggara;
mmmm. bendung Abuang III di Kabupaten Minahasa Tenggara;
nnnn. bendung Abuang IV di Kabupaten Minahasa Tenggara;
oooo. bendung Abuang V di Kabupaten Minahasa Tenggara;
pppp. bendung Abuang VI di Kabupaten Minahasa Tenggara;
qqqq. bendung Buyat di Kabupaten Minahasa Tenggara;
rrrr. bendung Kawiwi di Kabupaten Minahasa Tenggara;
ssss. bendung Kawiwi I di Kabupaten Minahasa Tenggara;
tttt. bendung Kawiwi II di Kabupaten Minahasa Tenggara;
uuuu. bendung Kawiwi III di Kabupaten Minahasa Tenggara;
vvvv. bendung Kokor I di Kabupaten Minahasa Tenggara;
wwww. bendung Kokor II di Kabupaten Minahasa Tenggara;

xxxx. bendung Kokor III di Kabupaten Minahasa Tenggara;
yyyy. bendung Kokor IV di Kabupaten Minahasa Tenggara;
zzzz. bendung Kokor V di Kabupaten Minahasa Tenggara;
aaaaa. bendung Kokor VI di Kabupaten Minahasa Tenggara;
bbbbb. bendung Lahendong I di Kabupaten Minahasa Tenggara;
ccccc. bendung Lahendong II di Kabupaten Minahasa Tenggara;
ddddd. bendung Lahendong III di Kabupaten Minahasa Tenggara;
eeeee. bendung Lahendong IV di Kabupaten Minahasa Tenggara;
fffff. bendung Lahendong V di Kabupaten Minahasa Tenggara;
ggggg. bendung Lahendong VI di Kabupaten Minahasa Tenggara;
hhhhh. bendung Lumbuhan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
iiiii. bendung Mbuhuk di Kabupaten Minahasa Tenggara;
jjjjj. bendung Mbuhuk I di Kabupaten Minahasa Tenggara;
kkkkk. bendung Noan I di Kabupaten Minahasa Tenggara;
lllll. bendung Noan II di Kabupaten Minahasa Tenggara;
mmmmm. bendung Noan III di Kabupaten Minahasa Tenggara;
nnnnn. bendung Palaus di Kabupaten Minahasa Tenggara;
ooooo. bendung Palaus II di Kabupaten Minahasa Tenggara;
ppppp. bendung Palaus III di Kabupaten Minahasa Tenggara;
qqqqq. bendung Pimamangkulan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
rrrrr. bendung Ranombolay di Kabupaten Minahasa Tenggara;
sssss. bendung Ranombolay Atas di Kabupaten Minahasa Tenggara;
ttttt. bendung Tatayan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
uuuuu. bendung Mapapera di Kabupaten Minahasa Utara;
vvvvv. bendung Meras di Kabupaten Minahasa Utara;
wwwww. bendung Talawaan 1 di Kabupaten Minahasa Utara;
xxxxx. bendung Talawaan 2 di Kabupaten Minahasa Utara;
yyyyy. bendung Talawaan Atas 2 di Kabupaten Minahasa Utara;
zzzzz. bendung Talawaan Atas I di Kabupaten Minahasa Utara;
aaaaaa. bendung Talawaan Atas I.B di Kabupaten Minahasa Utara;
bbbbbb. bendung Talawaan Atas III di Kabupaten Minahasa Utara;
cccccc. bendung Talawaan Atas IV di Kabupaten Minahasa Utara;

dddddd. bendung Talawaan Atas V di Kabupaten Minahasa Utara;
eeeeee. bendung Talawaan Atas VI di Kabupaten Minahasa Utara; dan
ffffff. embung Kaput di Kabupaten Minahasa Utara.

(7) Penambahan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 31

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
a. jaringan SPAM;
b. infrastruktur SPAM;
c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
d. sistem jaringan persampahan.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Jaringan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. jaringan SPAM regional Bimatara melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Manado;
b. jaringan SPAM regional Boltagu melintas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu; dan
c. jaringan SPAM regional Mitramon melintas di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon.

Pasal 33

Infrastruktur SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. infrastruktur SPAM regional Bimatara di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Manado;

b. infrastruktur SPAM regional Boltagu di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu; dan
c. infrastruktur SPAM regional Mitramon di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Tomohon.

Pasal 34

(1) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c terdapat di Kabupaten Minahasa Utara.
(2) Penambahan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, yaitu TPA sampah regional di perbatasan Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara.
(2) Penambahan dan pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri dari:
    a. Kawasan Lindung; dan
    b. Kawasan Budi Daya.
(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya seluas kurang lebih 5.416.577 (lima juta empat ratus enam belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) hektare;
    b. terdapat kawasan perairan di sekitar PPKT merupakan KSNT seluas kurang lebih 1.079.971 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) hektare; dan
    c. Rencana Pola Ruang pada kawasan perairan di sekitar PPKT merupakan KSNT sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Pada Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain kawasan hutan yang tidak memenuhi tingkat ketelitian pemetaan RTR Wilayah Provinsi ditetapkan dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

(4) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 37

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi:
a. badan air;
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan konservasi;
e. kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
f. kawasan ekosistem *mangrove*.

Pasal 38

(1) Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a seluas kurang lebih 9.222 (sembilan ribu dua ratus dua puluh dua) hektare tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
(2) Badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pengaturan dan penyesuaian badan air Danau Tondano dalam bentuk zona tunda yakni usulan penyesuaian Badan Air/Kawasan Perlindungan Setempat seluas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektare, terdapat di Kabupaten Minahasa.

Pasal 39

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 158.021 (seratus lima puluh delapan ribu dua puluh satu) hektare tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 40

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c yaitu seluas kurang lebih 4.443 (empat ribu empat ratus empat puluh tiga) hektare yang tersebar di:
    a. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
    b. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
    c. Kabupaten Minahasa;
    d. Kabupaten Minahasa Utara;
    e. Kota Manado; dan
    f. Kota Tomohon.

(2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pengaturan dan penyesuaian badan air Danau Tondano dalam bentuk zona tunda yakni usulan penyesuaian kawasan perlindungan setempat/badan air seluas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektare, terdapat di Kabupaten Minahasa.

Pasal 41

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d yaitu seluas kurang lebih 459.815 (empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas) hektare, meliputi:

a. Cagar Alam Duasudara di Kota Bitung;
b. Cagar Alam Gunung Ambang di Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu;
c. Cagar Alam Gunung Lokon di Kota Tomohon;
d. Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di Wilayah laut;
e. Suaka Margasatwa Karakelang di Kabupaten Kepulauan Talaud;
f. Suaka Margasatwa Gunung Manembo Nembo di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan;
g. Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara;
h. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
i. Taman Nasional Bunaken di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Wilayah laut;
j. Taman Wisata Alam Batu Angus di Kota Bitung;
k. Taman Wisata Alam Batu Putih di Kota Bitung; dan
l. Taman Wisata Alam Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan.

Pasal 42

Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e seluas kurang lebih 109.745 (seratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima) hektare, meliputi:

a. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara di Wilayah laut;
b. Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro di Wilayah laut;
c. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow di Wilayah laut;
d. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Wilayah laut;
e. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Wilayah laut;
f. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Wilayah laut;

g. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Talaud di Wilayah laut;
h. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa di Wilayah laut;
i. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Selatan di Wilayah laut;
j. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Tenggara di Wilayah laut;
k. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Utara di Wilayah laut;
l. Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kota Manado di Wilayah laut; dan
m. Taman Wisata Perairan Bitung di Wilayah laut.

Pasal 43

Kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, seluas kurang lebih 3.214 (tiga ribu dua ratus empat belas) hektare, tersebar di:
a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
d. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
e. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
f. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
g. Kabupaten Kepulauan Talaud;
h. Kabupaten Minahasa;
i. Kabupaten Minahasa Selatan;
j. Kabupaten Minahasa Tenggara;
k. Kabupaten Minahasa Utara;
l. Kota Bitung; dan
m. Kota Manado.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 44

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan perkebunan rakyat;
c. kawasan pertanian;
d. kawasan perikanan;
e. kawasan pertambangan dan energi;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan pariwisata;
h. kawasan permukiman;
i. kawasan transportasi; dan
j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 45

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, seluas kurang lebih 290.688 (dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektare tersebar di:
   a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
   b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
   c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
   d. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
   e. Kabupaten Kepulauan Talaud;
   f. Kabupaten Minahasa;
   g. Kabupaten Minahasa Selatan;
   h. Kabupaten Minahasa Tenggara;
   i. Kabupaten Minahasa Utara;
   j. Kota Bitung;
   k. Kota Kotamobagu; dan
   l. Kota Tomohon.

(2) Pada sebagian kawasan hutan produksi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan sebagai hutan produksi, namun terdapat usulan pelepasan Kawasan hutan sebagai badan air yang selanjutnya digambarkan sebagai zona tunda kawasan hutan produksi/ badan air seluas kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua) hektare, terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 46

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektare, berada di Kabupaten Minahasa.

Pasal 47

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, seluas kurang lebih 614.352 (enam ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh dua) hektare, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 48

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, seluas kurang lebih 3.595.715 (tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas) hektare, tersebar di:

a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
d. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
e. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
f. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
g. Kabupaten Kepulauan Talaud;
h. Kabupaten Minahasa;
i. Kabupaten Minahasa Selatan;
j. Kabupaten Minahasa Tenggara;
k. Kabupaten Minahasa Utara;

l. Kota Bitung;
m. Kota Manado; dan
n. Wilayah laut.

Pasal 49

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, seluas kurang lebih 1.432 (seribu empat ratus tiga puluh dua) hektare hektare, tersebar di:
a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
b. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
c. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
d. Kabupaten Kepulauan Talaud;
e. Kabupaten Minahasa;
f. Kabupaten Minahasa Selatan;
g. Kabupaten Minahasa Utara;
h. Kota Tomohon; dan
i. Wilayah laut.

Pasal 50

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, seluas kurang lebih 6.424 (enam ribu empat ratus dua puluh empat) hektare, tersebar di:
a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
c. Kabupaten Kepulauan Talaud;
d. Kabupaten Minahasa;
e. Kabupaten Minahasa Selatan;
f. Kabupaten Minahasa Utara;
g. Kota Bitung;
h. Kota Manado;
i. Kota Tomohon; dan
j. Wilayah laut.

Pasal 51

(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g, seluas kurang lebih 56.010 (lima puluh enam ribu sepuluh) hektare yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan wilayah laut.
(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. destinasi pariwisata nasional;
    b. destinasi pariwisata prioritas;
    c. kawasan ekonomi khusus pariwisata;
    d. kawasan pengembangan pariwisata nasional;
    e. kawasan strategis pariwisata nasional;
    f. *key tourism area*;
    g. DPP;
    h. KPPP; dan
    i. KSPP.
(3) Destinasi pariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang.
(4) Kawasan ekonomi khusus pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu KEK Likupang.

(5) Kawasan pengembangan pariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
a. kawasan pengembangan pariwisata nasional Bunaken dan sekitarnya;
b. kawasan pengembangan pariwisata nasional Bitung-Lembeh dan sekitarnya;
c. kawasan pengembangan pariwisata nasional Tomohon-Tondano dan sekitarnya;
d. kawasan pengembangan pariwisata nasional Bogani Nani Wartabone dan sekitarnya;
e. kawasan pengembangan pariwisata nasional Manado Kota dan sekitarnya;
f. kawasan pengembangan pariwisata nasional Likupang dan sekitarnya; dan
g. kawasan pengembangan pariwisata nasional Sangihe-Talaud dan sekitarnya.

(6) Kawasan strategis pariwisata nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
a. kawasan strategis pariwisata nasional Bunaken dan sekitarnya;
b. kawasan strategis pariwisata nasional Bitung-Lembeh dan sekitarnya; dan
c. kawasan strategis pariwisata nasional Tomohon-Tondano dan sekitarnya.

(7) *Key tourism area* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
a. *key tourism area* Manado Bunaken di Kota Manado;
b. *key tourism area* Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;
c. *key tourism area* Bitung Lembeh Di Kota Bitung;
d. *key tourism area* Tomohon di Kota Tomohon;
e. *key tourism area* Tondano di Kabupaten Minahasa;
f. *key tourism area* Minahasa Pantai di Kabupaten Minahasa; dan
g. *key tourism area* Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara.

(8) DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
a. DPP Bukit Kasih di Kabupaten Minahasa;
b. DPP Sumaru Endo di Kabupaten Minahasa;
c. DPP Paleloan di Kabupaten Minahasa;
d. DPP Tasik Oki di Kabupaten Minahasa Utara; dan
e. DPP Pangalisang di Kota Manado.

(9) KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
a. KPPP Gunung Mahawu di Kota Tomohon;
b. KPPP Wisata Air Terjun Tekaan Telu di Kota Tomohon;
c. KPPP Permandian Air Panas Tumatangtang di Kota Tomohon;
d. KPPP Kawasan Wisata Woloan di Kota Tomohon;
e. KPPP Kawasan Wisata Bukit Wawo di Kota Tomohon;
f. KPPP Kawasan Hutan Mangrove Meras di Kota Manado;
g. KPPP Kawasan Hutan Mangrove Tongkaina di Kota Manado;
h. KPPP Pantai Malalayang di Kota Manado;
i. KPPP Teluk Manado di Kota Manado;

j. KPPP Kawasan Wisata Lembeh Utara di Kota Bitung;
k. KPPP Kawasan Wisata Ranowulu di Kota Bitung;
l. KPPP Kawasan Wisata Kuliner Girian di Kota Bitung;
m. KPPP Kawasan Wisata Aertembaga di Kota Bitung;
n. KPPP Kawasan Bukit Kasih di Kabupaten Minahasa;
o. KPPP Kawasan Benteng Moraya di Kabupaten Minahasa;
p. KPPP Kawasan Sumaru Endo di Kabupaten Minahasa;
q. KPPP Kawasan Pantai Barat Minahasa (Pantai Mangatasik, Pinasungkulan, Kumu, Telling, Poopoh, Ranowangko, Borgo, Mokupa, Tateli, Kalasey) di Kabupaten Minahasa;
r. KPPP Kawasan Watu Pinawetengan di Kabupaten Minahasa;
s. KPPP Kawasan Makam Sam Ratulangi di Kabupaten Minahasa;
t. KPPP Kawasan Kampung Jawa Tondano dan Makam Kyai Modjo di Kabupaten Minahasa;
u. KPPP Kawasan Makam Imam Bonjol di Kabupaten Minahasa;
v. KPPP Air Terjun Nomorampa di Kabupaten Minahasa;
w. KPPP Pantai Moinit di Kabupaten Minahasa Selatan;
x. KPPP Kawasan Penyangga Taman Laut Bunaken (Wisata Bahari Tatapaan Popareng) di Kabupaten Minahasa Selatan;
y. KPPP Pantai Molinow di Kabupaten Minahasa Selatan;
z. KPPP Gunung Payung Poopo di Kabupaten Minahasa Selatan;
aa. KPPP Bukit Duluong di Kabupaten Minahasa Selatan;
bb. KPPP Pantai Perjuangan Desa Matani di Kabupaten Minahasa Selatan;
cc. KPPP Wisata Mangrove Sondaken di Kabupaten Minahasa Selatan;
dd. KPPP Kawasan Kolongan-Kuwil dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
ee. KPPP Kawasan Kauditan-Lembean dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
ff. KPPP Kawasan Wori-Tiwoho dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
gg. KPPP Kawasan Kema dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
hh. KPPP Pantai Bentenan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
ii. KPPP Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
jj. KPPP Danau Bulilin di Kabupaten Minahasa Tenggara;
kk. KPPP Desa Adat Musi di Kabupaten Kepulauan Talaud;
ll. KPPP Pulau Intata – Kakorotan – Nanusa di Kabupaten Kepulauan Talaud;
mm. KPPP Gugusan Pulau Mahoro di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
nn. KPPP Pulau Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
oo. KPPP Kawasan Wisata Penangkaran Burung Maleo Desa Tambun di Kabupaten Bolaang Mongondow;

pp. KPPP Agrowisata (Kebun Hortikultura) di Kabupaten Bolaang Mongondow;
qq. KPPP Air Terjun Muntoi di Kabupaten Bolaang Mongondow;
rr. KPPP Goa Kristal Inuai di Kabupaten Bolaang Mongondow;
ss. KPPP Air Terjun Mominit di Kabupaten Bolaang Mongondow;
tt. KPPP Air Panas Mugoyunggung di Kabupaten Bolaang Mongondow;
uu. KPPP Hutan Kota Bonawang di Kota Kotamobagu;
vv. KPPP Air Terjun Boliagonan di Kota Kotamobagu;
ww. KPPP Pantai Bunga Indah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
xx. KPPP Kompleks Keraton Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
yy. KPPP Pantai Modisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
zz. KPPP Wisata Mangrove Panango di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
aaa. KPPP Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
bbb. KPPP Pulau Bombuyanoy/P.Nenas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
ccc. KPPP Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
ddd. KPPP Pantai Kasaraeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

(10) KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
a. KSPP Ekowisata Danau Linouw di Kota Tomohon;
b. KSPP Kawasan Ekowisata Gunung Lokon di Kota Tomohon;
c. KSPP Kawasan Ekowisata Rurukan di Kota Tomohon;
d. KSPP Kawasan Pulau Bunaken dan sekitarnya di Kota Manado;
e. KSPP Pulau Manado Tua di Kota Manado;
f. KSPP Pulau Siladen di Kota Manado;
g. KSPP Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang di Kota Manado;
h. KSPP Kawasan Kampung Arab di Kota Manado;
i. KSPP Kawasan Kampung Cina di Kota Manado;
j. KSPP Kawasan Kota Tua di Kota Manado;
k. KSPP Kawasan Wisata Lembeh Selatan di Kota Bitung;
l. KSPP Kawasan Wisata Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tangkoko (Cagar Alam Duasudara, Taman Wisata Alam Batuputih dan Taman Wisata Alam Batu Angus) di Kota Bitung;
m. KSPP Kawasan Wisata Kuliner Maesa di Kota Bitung;
n. KSPP Kawasan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa;
o. KSPP Kawasan Agrowisata Lengkoan-Wawona di Kabupaten Minahasa;
p. KSPP Kawasan Agrowisata Tombariri di Kabupaten Minahasa;

q. KSPP Kawasan Pantai Timur Minahasa (Pantai Rumbia, Temboan, Bukit Tinggi, Mahembang, Tumpaan, Parentek, Korakora, Kamenti, Kawis, Touloun, Tulap, Ranowangko, Sawangan, Kolongan, Makalisung) di Kabupaten Minahasa;
r. KSPP Kawasan Ekowisata Kebun Raya Minahasa Makawembeng di Kabupaten Minahasa;
s. KSPP Kawasan Lapangan Sam Ratulangi Tondano di Kabupaten Minahasa;
t. KSPP Kawasan Bukit Sasayaban di Kabupaten Minahasa Selatan;
u. KSPP Kawasan Pantai Alar di Kabupaten Minahasa Selatan;
v. KSPP Kawasan Air Terjun Kulung-kulung dan Tunan Wiau Lapi di Kabupaten Minahasa Selatan;
w. KSPP Kawasan GABATA (Gangga, Bangka dan Talise) dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
x. KSPP Kawasan Nain-Mantehage dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
y. KSPP Kawasan Airmadidi-Sawangan dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
z. KSPP Kawasan Pulisan-Marinsow dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara;
aa. KSPP Kebun Raya Megawati di Kabupaten Minahasa Tenggara;
bb. KSPP Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud;
cc. KSPP Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
dd. KSPP Pulau Tiga di Kabupaten Bolaang Mongondow;
ee. KSPP Wisata Gunung Kramat Bumbungon Kec. Dumoga di Kabupaten Bolaang Mongondow;
ff. KSPP Air Terjun Molipungan di Kota Kotamobagu;
gg. KSPP Pantai Batu Pinagut – Pulau Bongkil di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
hh. KSPP Makam Raja Hasan Van Gobel di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
ii. KSPP Danau Mooat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
jj. KSPP Pantai Jiko dsk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
kk. KSPP Pantai Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
ll. KSPP Kawasan Mangrove di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
mm. KSPP Pantai Pananualeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 52

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h, seluas kurang lebih 91.319 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus sembilan belas) hektare yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan wilayah laut.

Pasal 53

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i, seluas kurang lebih 15.489 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan) hektare tersebar di:

a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
b. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
c. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
d. Kabupaten Kepulauan Sangihe;
e. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
f. Kabupaten Kepulauan Talaud;
g. Kabupaten Minahasa;
h. Kabupaten Minahasa Selatan;
i. Kabupaten Minahasa Tenggara;
j. Kabupaten Minahasa Utara;
k. Kota Bitung;
l. Kota Manado; dan
m. wilayah laut.

Pasal 54

(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf j seluas kurang lebih 661 (enam ratus enam puluh satu) hektare, tersebar di:
    a. Kabupaten Bolaang Mongondow;
    b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
    c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
    d. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
    e. Kabupaten Kepulauan Talaud;
    f. Kabupaten Minahasa;
    g. Kabupaten Minahasa Utara;
    h. Kota Bitung;
    i. Kota Manado;
    j. Kota Tomohon; dan
    k. wilayah laut.
(2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa aset serta rencana pertahanan dan keamanan lainnya yang telah ditetapkan menurut rencana Wilayah pertahanan dan RTRW Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS

Pasal 55

Kawasan strategis yang ada di Wilayah Provinsi meliputi:

a. KSN;
b. KSNT; dan
c. KSP.

Pasal 56

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:

a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan Manado-Bitung;

b. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan perkotaan Bitung-Minahasa-Manado;
c. KSN dari sudut kepentingan lingkungan hidup berupa kawasan konservasi dan wisata daerah aliran Sungai Tondano; dan
d. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara berupa Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Bitung dan Kota Manado.

Pasal 57

(1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:
   a. KSNT yang terkait dengan Situs Warisan Dunia berupa Situs Warisan Dunia Alami;
   b. KSNT yang terkait dengan Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Daerah Cadangan Karbon Biru; dan
   c. KSNT yang terkait dengan Pengendalian Lingkungan Hidup berupa Kawasan yang Signifikan secara Ekologis dan Biologis.
(2) KSNT berupa Situs Warisan Dunia Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berlokasi di Laut Sulawesi berupa pulau-pulau kecil terluar sebagai kawasan yang diperuntukkan bagi batas wilayah negara terluar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang terdapat di:
   a. Pulau Batubawaikang;
   b. Pulau Bongkil;
   c. Pulau Intata;
   d. Pulau Kabaruan;
   e. Pulau Kakorotan;
   f. Pulau Kawaluso;
   g. Pulau Kawio;
   h. Pulau Makalehi;
   i. Pulau Mantehage;
   j. Pulau Marampit;
   k. Pulau Marore; dan
   l. Pulau Miangas.
(3) KSNT berupa Daerah Cadangan Karbon Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Ratatotok di Kabupaten Minahasa Tenggara;
   b. Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
   c. Pulau Lembeh di Kota Bitung; dan
   d. Kema di Kabupaten Minahasa Utara.
(4) KSNT berupa Kawasan yang Signifikan secara Ekologis dan Biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Ekoregion Laut Sulu-Sulawesi.

(5) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:
a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
b. KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

(2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

(1) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:
a. KSP kawasan koridor pesisir pantai utara di Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
b. KSP kawasan koridor pesisir pantai selatan di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
c. KSP KEK Bitung dan sekitarnya di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara; dan
d. KSP KEK Likupang dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara.

(2) KSP Kawasan koridor pesisir pantai utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memperkuat peran sebagai jalur utama penggerak pertumbuhan wilayah dan menjaga konsistensi perkembangan ekonomi antarpusat kegiatan.

(3) Arahan pengembangan KSP kawasan koridor pesisir pantai utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pengembangan simpul perekonomian yang sesuai dengan sektor unggulan di bidang pariwisata, kelautan dan perikanan, perkebunan, peternakan, industri serta perdagangan dan jasa; dan
b. pengembangan transportasi multi moda secara terintegrasi.

(4) KSP Kawasan koridor pesisir pantai selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan pesisir selatan dalam mendorong aktivitas ekonomi wilayah.

(5) Arahan pengembangan KSP kawasan koridor pesisir pantai selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. pengembangan dan pengelolaan sektor unggulan di bidang kelautan dan perikanan, serta pariwisata berbasis pengembangan ekonomi lokal;

b. pengembangan kawasan transmigrasi untuk mendukung sektor unggulan di bidang kelautan dan perikanan, serta pariwisata; dan
c. pemenuhan prasarana dan sarana dasar, serta pengembangan transportasi multi moda secara terintegrasi.

(6) KSP KEK Bitung dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mendukung kelangsungan pengembangan kawasan sebagai simpul kegiatan industri dan logistik dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

(7) Arahan pengembangan KSP KEK Bitung dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
b. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah dalam mendukung pelayanan kegiatan di KEK dan kawasan sekitarnya;
c. pengembangan kawasan sekitar KEK berbasis ekonomi lokal yang sinergis dengan pengembangan KEK secara komplementer dan suplementer;
d. pengendalian dan revitalisasi Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
e. pengendalian dan pelestarian kawasan lindung berbasis daya dukung lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

(8) KSP KEK Likupang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk mengembangkan kawasan yang memiliki daya saing strategis melalui penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan pendukungnya secara berkelanjutan

(9) Arahan pengembangan KSP KEK Likupang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berdaya saing didukung oleh sektor pariwisata, perikanan dan pertanian yang berkelanjutan;
b. pengembangan kawasan pariwisata berkelanjutan bertaraf internasional; dan
c. pengembangan transportasi multi moda secara terintegrasi.

Pasal 60

(1) KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:
a. KSP kawasan waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara;
b. KSP kawasan benteng Amurang yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan;
c. KSP kawasan pecinaan yang berada di Kota Manado;
d. KSP kawasan Kampung Arab yang berada di Kota Manado;
e. KSP kawasan Kampung Jawa Tondano yang berada di Kabupaten Minahasa;
f. KSP kompleks keraton Boroko yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

g. KSP kompleks istana Manganitu yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
h. KSP kawasan lodji Tondano yang berada di Kabupaten Minahasa.

(2) KSP kawasan waruga Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjaga kelestarian situs budaya waruga Sawangan.

(3) Arahan pengembangan KSP kawasan waruga Sawangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi; dan
c. penataan kawasan dengan tematik kebudayaan etnis Minahasa.

(4) KSP kawasan benteng Amurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga kelestarian bentuk arkeologis dan mendorong penjenamaan tempat sebagai kota benteng pada kawasan situs budaya benteng Amurang dan sekitarnya.

(5) Arahan pengembangan KSP kawasan benteng Amurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi; dan
c. penataan kawasan dengan tematik kota benteng.

(6) KSP kawasan pecinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjaga identitas kawasan dan keberagaman budaya, serta meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pecinaan sebagai ruang interaksi sosial dan ekonomi masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai lokal.

(7) Arahan pengembangan KSP kawasan pecinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi;
c. penataan kawasan dengan tematik kebudayaan etnis Tionghoa; dan
d. peningkatan aksesibilitas transportasi yang aman dan nyaman.

(8) KSP kawasan Kampung Arab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjaga identitas kawasan dan keberagaman budaya, serta meningkatkan kualitas lingkungan kawasan Kampung Arab sebagai ruang interaksi sosial dan ekonomi masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai lokal.

(9) Arahan pengembangan KSP kawasan Kampung Arab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi;
c. penataan kawasan dengan tematik kebudayaan etnis Arab;

d. peningkatan aksesibilitas transportasi yang aman dan nyaman; dan
e. pengembangan pusat pengembangan Islam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

(10) KSP kawasan Kampung Jawa Tondano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjaga identitas kawasan dan keberagaman budaya, serta meningkatkan kualitas lingkungan kawasan Kampung Jawa Tondano sebagai ruang interaksi sosial dan ekonomi masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai lokal.

(11) Arahan pengembangan KSP kawasan Kampung Jawa Tondano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi;
c. penataan kawasan dengan tematik kebudayaan perpaduan etnis Jawa dan Minahasa; dan
d. pengembangan pusat pengembangan Islam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

(12) KSP kawasan kompleks keraton Boroko dimaksud pada ayat (1) huruf f bertujuan untuk menjaga identitas kawasan dan menguatkan fungsi kawasan sebagai pusat warisan budaya kerajaan yang mendukung aktivitas masyarakat sesuai karakter sejarah lokal.

(13) Arahan pengembangan KSP kompleks keraton Boroko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi; dan
c. penataan kawasan dengan tematik kebudayaan etnis Kaidipang Bolangitang.

(14) KSP kawasan kompleks istana Manganitu dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjaga identitas kawasan dan menguatkan fungsi kawasan sebagai pusat warisan budaya kerajaan yang mendukung aktivitas masyarakat sesuai karakter sejarah lokal.

(15) Arahan pengembangan KSP kompleks istana Manganitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
a. perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
b. pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi; dan
c. penataan kawasan dengan tematik kebudayaan etnis Sangihe.

(16) KSP kawasan lodji Tondano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjaga kelestarian situs sejarah lodji Tondano,

(17) Arahan pengembangan KSP kawasan lodji Tondano sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
a. Perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah;
b. Pemanfaatan bangunan bersejarah untuk kegiatan pariwisata dan ekonomi;
c. Penataan Kawasan dengan tematik kebudayaan etnis Minahasa; dan

d. Pengembangan prasarana dan sarana museum budaya Minahasa.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi:
a. ketentuan KKPR;
b. indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun; dan
c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Paragraf 1

Pasal 62

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan non berusaha.
(2) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. KKPR Darat; dan
b. KKPRL.
(3) Ketentuan pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
KKPR Darat

Pasal 63

(1) Pelaksanaan KKPR darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. konfirmasi KKPR;
b. persetujuan KKPR; atau
c. rekomendasi KKPR;
(3) Penerbitan KKPR Darat menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
(4) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendelegasikan kewenangan penerbitan KKPR Darat kepada Gubernur untuk:
a. persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha;
b. konfirmasi KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

c. persetujuan KKPR untuk kegiatan nonberusaha.

(5) Pendelegasian kewenangan penerbitan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berada di lintas Wilayah administrasi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi diberikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Pendelegasian kewenangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang:
a. merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
b. bersifat strategis nasional;
c. perizinan berusahanya merupakan kewenangan kementerian/lembaga; dan/atau
d. lokasi bersifat lintas provinsi.

(7) Pendelegasian kewenangan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mengurangi kewenangan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(8) Penerbitan persetujuan KKPR di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi) wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal:
a. belum tersedia RDTR;
b. telah tersedia RDTR namun belum terintegrasi dengan Sistem OSS;
c. RTR belum memuat pengaturan zonasi terkait pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km^2 (seratus kilometer persegi); atau
d. tidak termasuk dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
KKPRL

Pasal 64

(1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
b. persetujuan atau konfirmasi untuk kegiatan non berusaha.

(2) Pelaksanaan KKPRL diberikan berdasarkan permohonan.

(3) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang laut di Wilayah laut secara menetap di sebagian Ruang laut wajib memiliki KKPRL.

(4) KKPRL mempertimbangkan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan/zona/sub zona yang tercantum matriks peraturan KKPRL yang meliputi:
a. aktivitas yang dibolehkan;
b. aktivitas yang tidak dibolehkan; dan

c. aktivitas yang dibolehkan setelah memperoleh izin.

(5) Penerbitan KKPRL menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan.

(6) Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Matriks peraturan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Peta peraturan KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Jangka Menengah 5 (lima) Tahun

Pasal 65

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
c. perwujudan KSP.

(2) Indikasi program perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. perwujudan sistem pusat pemukiman;
b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
c. perwujudan sistem jaringan energi;
d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

(3) Indikasi program perwujudan rencana sistem pusat pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan PKN meliputi program:
1. pemantapan fungsi PKN melalui program Pemanfaatan Ruang;
2. pengembangan kawasan perkotaan PKN;
3. peningkatan infrastruktur kawasan perkotaan;
4. peningkatan fungsi pelayanan regional, nasional, dan internasional; dan
5. sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang;
b. perwujudan PKW meliputi program:
1. penetapan fungsi PKW;
2. pemantapan fungsi PKW;
3. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perkotaan;
4. pengembangan sentra produksi;
5. fasilkitasi penyusunan dan penetapan RDTR;
6. peningkatan infrastruktur PKW;
7. pengembangan fungsi pertumbuhan ekonomi; dan

8. sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang;

c. perwujudan PKSN meliputi program:
1. pemantapan fungsi PKSN melalui program pemanfaatan ruang;
2. pengembangan kawasan PKSN;
3. peningkatan infrastruktur kawasan PKSN;
4. peningkatan fungsi pelayanan regional, nasional, dan internasional; dan
5. sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan

d. perwujudan PKL meliputi program:
1. pemantapan fungsi PKL;
2. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perkotaan;
3. pengembangan kawasan perkotaan;
4. mendorong pengembangan sentra produksi komoditas unggulan;
5. fasilitasi penyusunan dan penetapan RDTR;
6. peningkatan infrastruktur PKL; dan
7. sinkronisasi pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(4) Indikasi program perwujudan rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. sistem jaringan jalan terdiri atas:
1. perwujudan jalan umum terdiri atas:
a) perwujudan Jalan Arteri Primer meliputi program:
1) pembangunan jalan nasional;
2) pelebaran jalan nasional menuju standar;
3) pemeliharaan berkala jalan nasional;
4) pengawasan penyelenggaraan jalan;
5) penurunan status separuh ruas jalan Jalan Arteri Primer menjadi jalan kabupaten/kota; dan
6) konstruksi jalan arteri primer sebagai landasan darurat pesawat tempur dalam situasi konflik/perang;
b) perwujudan Jalan Kolektor Primer meliputi program:
1) pembangunan jalan nasional;
2) pelebaran jalan menuju standar;
3) pembangunan jalan provinsi; dan
4) pelebaran jalan provinsi menuju standar;
c) perwujudan Lokal Kolektor Primer meliputi program:
1) pembangunan Jalan Lokal Primer; dan
2) peningkatan status jalan menjadi kolektor primer;
2. perwujudan Jalan Tol meliputi program:
a) pembangunan Jalan Tol;
b) pemeliharaan berkala Jalan Tol; dan
c) konstruksi Jalan Tol sebagai landasan darurat pesawat tempur dalam situasi konflik/perang;
3. perwujudan terminal penumpang terdiri atas:
a) perwujudan Terminal Penumpang Tipe A meliputi program:

1) pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
2) rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Tipe A (fasilitas utama dan penunjang);

b) perwujudan Terminal Penumpang Tipe B meliputi program:
1) pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
2) rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B (fasilitas utama dan penunjang);

4. perwujudan Terminal Barang yaitu pembangunan terminal barang yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
5. perwujudan Jembatan Timbang yaitu pemeliharaan rutin jembatan timbang; dan
6. perwujudan Jembatan meliputi program:
a) pembangunan Jembatan; dan
b) pemeliharaan rutin Jembatan;

b. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi program:
1. perwujudan jaringan jalur kereta api yaitu perumusan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kewenangan provinsi; dan
2. perwujudan stasiun kereta api yaitu perumusan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;

c. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan meliputi program:
1. perwujudan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi yaitu penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antarprovinsi;
2. perwujudan lintas penyeberangan antarkabupaten/ kota dalam provinsi meliputi program:
a) penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
b) pengendalian dan pengawasan jaringan trayek sungai, danau dan penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan antarkabupaten/ kota dalam provinsi;
3. Perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau meliputi program:
a) pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
b) pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
4. perwujudan Pelabuhan Penyeberangan meliputi program:

a) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional; dan
b) pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan Pelabuhan Penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

d. perwujudan sistem jaringan transportasi laut terdiri atas:
1. perwujudan pelabuhan laut meliputi program:
a) perwujudan Pelabuhan Utama yaitu pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Utama;
b) perwujudan Pelabuhan Pengumpul yaitu pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpul;
c) perwujudan Pelabuhan Pengumpan meliputi program:
1) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan; dan
2) pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan Pelabuhan Pengumpan;
d) perwujudan Terminal Khusus meliputi program:
1) pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus; dan
2) pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan Terminal Khusus; dan
e) perwujudan Pelabuhan Perikanan meliputi program:
1) perwujudan Pelabuhan Perikanan samudera yaitu penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
2) perwujudan Pelabuhan Perikanan Pantai yaitu penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
3) perwujudan Pangkalan Pendaratan Ikan berupa penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan, penyediaan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan dan pembangunan *cold storage*; dan
2. perwujudan alur pelayaran di Laut terdiri atas:
a) perwujudan alur-pelayaran umum dan perlintasan meliputi program:
1) penetapan alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
2) pengawasan dan pemeliharaan alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
b) perwujudan alur-pelayaran masuk pelabuhan meliputi program:
1) penetapan alur pelayaran masuk pelabuhan; dan
2) pengawasan dan pemeliharaan alur pelayaran masuk pelabuhan; dan

e. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus terdiri atas:
1. perwujudan Bandar Udara Pengumpul meliputi program:
a) pengembangan sarana dan prasarana; dan
b) pembangunan bandar udara pengumpul;
2. perwujudan Bandar Udara Pengumpan yaitu pengembangan sarana dan prasarana; dan

3. perwujudan bandar udara khusus yaitu pengembangan sarana dan prasarana.

(5) Indikasi program perwujudan rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi program:
   1. perwujudan infrastruktur minyak dan gas bumi yaitu pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   2. perwujudan jaringan minyak dan gas bumi yaitu pengembangan sarana dan prasarana jaringan minyak dan gas bumi; dan
b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri atas:
   1. perwujudan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi program:
      a) pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik;
      b) pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik; dan
      c) penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan; dan
   2. perwujudan jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas:
      a) perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi program:
         1) pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik;
         2) pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik;
         3) pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
         4) pengembangan sarana dan prasarana jaringan distribusi tenaga listrik; dan
      b) perwujudan gardu listrik meliputi program:
         1) pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik; dan
         2) pengembangan sarana penyediaan tenaga listrik.

(6) Indikasi program perwujudan rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. perwujudan Jaringan Tetap meliputi program:
   1. pembangunan Jaringan Tetap; dan
   2. pemeliharaan sarana dan prasarana Jaringan Tetap;
b. perwujudan infrastruktur Jaringan Tetap meliputi program:
   1. pembangunan infrastruktur Jaringan Tetap; dan
   2. pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur Jaringan Tetap; dan
c. perwujudan Jaringan Bergerak yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana.

(7) Indikasi program perwujudan rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
a. perwujudan sistem Jaringan Irigasi yaitu rehabilitasi jaringan irigasi permukaan;
b. perwujudan sistem pengendalian banjir terdiri atas:

1. perwujudan Jaringan Pengendalian Banjir meliputi program:
   a) pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir;
   b) rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir; dan
   c) pengembangan tanggul pantai dan pengaman pantai: dan
2. perwujudan Bangunan Pengendalian Banjir meliputi program:
   a) pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir; dan
   b) rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir; dan

c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air meliputi program:
   1. pembangunan embung dan penampung air lainnya; dan
   2. rehabilitasi embung dan penampung air lainnya.

(8) Indikasi program perwujudan rencana sistem jaringan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
   a. perwujudan jaringan SPAM yaitu pembangunan SPAM lintas kabupaten/kota;
   b. perwujudan sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun meliputi program:
      1. pembangunan tempat Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun; dan
      2. pengembangan sarana dan prasarana tempat Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun; dan
   c. perwujudan Sistem Jaringan Persampahan meliputi program:
      1. pembangunan tempat pemrosesan akhir; dan
      2. pengembangan sarana dan prasarana tempat pemrosesan akhir.

(9) Indikasi program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
   b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

(10) Indikasi program perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
   a. perwujudan badan air meliputi program:
      1. operasi dan pemeliharaan situ;
      2. operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya;
      3. operasi dan pemeliharaan danau;
      4. operasi dan pemeliharaan sungai;
      5. rehabilitasi vegetasi riparian;
      6. pengendalian pencemaran;
      7. pemindahan aliran sungai;
      8. pelaksanaan kegiatan penyelidikan kawasan lindung geologi di badan air;
      9. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk di badan air;

10. pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst di badan air;
11. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di badan air;
12. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa liar di badan air;
13. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di badan air; dan
14. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di badan air;

b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi program:
   1. pembangunan pagar keliling pembatas kawasan hutan;
   2. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   3. pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   5. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   6. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   7. perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan; dan
   8. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c. perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi program:
   1. penetapan, penataan, dan pemeliharaan di kawasan sempadan pantai;
   2. penetapan, penataan, dan pemeliharaan di kawasan sempadan sungai dan danau;
   3. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan perlindungan setempat;
   4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan perlindungan setempat;
   5. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan perlindungan setempat; dan
   6. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan perlindungan setempat;

d. perwujudan kawasan konservasi meliputi program:
   1. pembangunan pengamanan kawasan konservasi;
   2. pembangunan pagar keliling pembatas untuk pengelolaan daerah penyangga di kawasan konservasi;
   3. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan konservasi;
   4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan konservasi;
   5. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa di kawasan konservasi;
   6. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan konservasi; dan
   7. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan konservasi;

e. perwujudan kawasan pencadangan konservasi di laut meliputi program:
   1. penetapan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil, mencakup pengajuan usulan inisiatif, identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan;
   2. penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil;
   3. pengembangan, pengelolaan dan penataan pesisir, zonasi kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil dan kawasan wisata lainnya;
   4. penataan batas kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil
   5. penyusunan arahan teknis pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil;
   6. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan pulau-pulau kecil;
   7. rehabilitasi ekosistem laut pada kawasan pencadangan konservasi laut;
   8. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa yang dilindungi di kawasan pencadangan konservasi laut;
   9. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan pencadangan konservasi laut;
   10. peningkatan fungsi, pelestearian, perlindungan kawasan pencadangan konservasi laut;
   11. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan pencadangan konservasi laut; dan
   12. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan pencadangan konservasi laut; dan

f. perwujudan kawasan ekosistem mangrove meliputi program:
   1. pelaksanaan perlindungan kawasan ekosistem mangrove;

2. koordinasi dan sinkronisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil, sempadan pantai, wilayah perbatasan dan pulau terpencil;
3. pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst di kawasan ekosistem mangrove;
4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan ekosistem mangrove;
5. koordinasi dan sosialisasi kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan ekosistem mangrove; dan
6. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan ekosistem mangrove.

(11) indikasi program perwujudan kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:

a. perwujudan kawasan hutan produksi meliputi program:
   1. pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
   2. penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi;
   3. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan hutan produksi;
   4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan hutan produksi;
   5. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa liar di kawasan hutan produksi;
   6. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan hutan produksi; dan
   7. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan hutan produksi.
b. perwujudan kawasan perkebunan rakyat meliputi program:
   1. pengembangan prasarana pertanian;
   2. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
   3. program penelitian dan pengembangan daerah; dan
   4. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan perkebunan rakyat;
c. perwujudan kawasan pertanian meliputi program:
   1. pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
   2. peningkatan agro-produksi, agro-industri, dan agro-marketing;
   3. pengawasan mutu dan peredaran benih hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan;
   4. peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi;
   5. penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya di kawasan pertanian;

6. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan pertanian;
7. pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst di kawasan pertanian;
8. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan pertanian;
9. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa di kawasan pertanian;
10. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan pertanian;
11. pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
12. koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah di kawasan pertanian; dan
13. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan pertanian;

d. perwujudan kawasan perikanan meliputi program:
1. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan;
2. koordinasi dan sinkronisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil, sempadan, wilayah perbatasan dan pulau terpencil;
3. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa di kawasan perikanan;
4. pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di kawasan perikanan;
5. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan perikanan;
6. koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah di kawasan perikanan; dan
7. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan hutan produksi;

e. perwujudan kawasan pertambangan dan energi meliputi program:
1. pemberian izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan;
2. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha jasa pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
3. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan pertambangan dan energi;

4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan pertambangan dan energi;
5. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan pertambangan dan energi;
6. pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya; dan
7. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan pertambangan dan energi;

f. perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi program:
1. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
2. penataan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya di kawasan peruntukan industri;
3. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan peruntukan industri;
4. pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst di kawasan peruntukan industri;
5. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan peruntukan industri; dan
6. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan peruntukan industri;

g. perwujudan kawasan pariwisata meliputi program:
1. pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana dalam daya tarik wisata provinsi;
2. pengembangan kawasan pariwisata;
3. penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
4. koordinasi dan sinkronisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah pesisir, laut dan pulau kecil, sempadan, wilayah perbatasan dan pulau terpencil;
5. pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
6. penatausahaan izin usaha jasa pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
7. pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
8. penetapan rencana induk dan daerah lingkungan kerja /daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
9. penyediaan sarana dan prasarana transportasi; dan
10. kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di kawasan pariwisata;

h. perwujudan kawasan permukiman meliputi program:
1. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman untuk menunjang fungsi permukiman;
2. pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;

3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota;
4. pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi;
5. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
6. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
7. penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran;
8. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan permukiman;
9. pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst di kawasan permukiman;
10. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan permukiman;
11. penetapan koridor hidupan kawasan migrasi satwa di kawasan permukiman;
12. pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja /daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di kawasan permukiman;
13. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap kawasan perlindungan ekosistem laut di kawasan permukiman;
14. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan permukiman;
15. program pengelolaan pendidikan;
16. program upaya pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; dan
17. optimalisasi pembangunan desa dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;

i. perwujudan kawasan transportasi meliputi program:
   1. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk menunjang fungsi permukiman;
   2. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
   3. penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
   4. peningkatan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
   5. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di kawasan transportasi;
   6. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan transportasi;
   7. pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan di kawasan transportasi; dan
   8. pembangunan lapangan terbang; dan

j. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi program:
   1. pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan;

2. pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan;
3. penetapan, penataan, dan pemeliharaan kawasan sempadan di pertahanan dan keamanan;
4. pengendalian dan pemanfaatan kawasan pertambangan di kawasan pertahanan dan keamanan;
5. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan pertahanan dan keamanan; dan
6. koordinasi dan sosialisasi kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara di kawasan pertahanan dan keamanan.

(12) Indikasi program perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. perwujudan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri yaitu penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah dan lintas daerah Kabupaten/Kota; dan
b. perwujudan KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya yaitu penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah dan lintas daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 66

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi:
a. program utama;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

(2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisikan usulan program pengembangan Wilayah Provinsi untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan KSP.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:
a. APBN;
b. APBD Provinsi;
c. APBD Kabupaten/Kota; dan/atau
d. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan/atau masyarakat.

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu:
   a. tahap kesatu, yaitu tahun 2026-2029;
   b. tahap kedua, yaitu tahun 2030-2034;
   c. tahap ketiga, yaitu tahun 2035-2039;
   d. tahap keempat, yaitu tahun 2040-2044; dan
   e. tahap kelima, yaitu tahun 2045-2046.

Pasal 67

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan SPPR

Pasal 68

(1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
(3) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
   a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
   b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
(4) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Umum

Pasal 69

(1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
   a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
   b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
   c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
(2) Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. Indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
c. penilaian perwujudan RTR;
d. arahan insentif dan disinsentif;
e. arahan sanksi; dan
f. penyelesaian sengketa penataan ruang.

(3) Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesatu
Indikasi Arahan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

(1) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi.

(2) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan yang mencakup Ruang darat, laut, udara, dan Ruang dalam bumi;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap Kawasan antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau, arahan bagi koefisien dasar bangunan, arahan bagi koefisien lantai bangunan, dan arahan bagi garis sempadan bangunan;
c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
d. arahan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Wilayah dalam mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

(3) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang;
b. indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang; dan
c. ketentuan khusus.

Paragraf 2
Indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang

Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a berupa:
a. indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman;
b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi;
c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi;
d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi;
e. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air; dan
f. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 72

(1) Indikasi arahan zonasi pada sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:
   a. indikasi arahan zonasi untuk PKN;
   b. indikasi arahan zonasi untuk PKW;
   c. indikasi arahan zonasi untuk PKSN; dan
   d. indikasi arahan zonasi untuk PKL.
(2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
   a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan fungsinya sebagai PKN;
   b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi;
   c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi;
   d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan skala nasional atau provinsi; dan
   e. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal.
(3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
   a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan fungsinya sebagai PKN;
   b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
   c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
   d. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;

e. kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan di wilayah perbatasan negara berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan fungsinya sebagai PKSN;
b. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara berbatasan;
c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya termasuk wilayah perbatasan negara; dan
d. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya termasuk wilayah perbatasan negara.

(5) Indikasi arahan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala Kabupaten/Kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan fungsinya sebagai PKL;
b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
d. kawasan perkotaan yang berada di pesisir berfungsi atau berpotensi mendukung ekonomi kelautan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan
e. penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 73`

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b terdiri atas:
a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan;
b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
d. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut; dan
e. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 74

(1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:

a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
b. indikasi arahan zonasi untuk jalan tol;
c. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang;
d. indikasi arahan zonasi untuk terminal barang;
e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang; dan
f. indikasi arahan zonasi untuk jembatan.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup;
2. pemenuhan kelengkapan jalan harus memenuhi ketentuan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan dan bangunan penghubung jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. jalan yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. jalan yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. penyediaan jalur hijau dilaksanakan sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang - undangan;
5. pembangunan halte, papan reklame dan jembatan penyeberangan orang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. alih fungsi lahan dengan fungsi budi daya di sepanjang jalan umum;
7. pada saat kondisi darurat perang jalan dapat digunakan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
8. pemindahan trase jalan akibat kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran jalur pejalan kaki atau trotoar, jalur hijau jalan, dan jaringan utilitas lainnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan;
2. kendaraan angkutan barang berupa truk lebih dari 3 (tiga) gandar melalui jalan umum apabila pada kawasan tersebut telah tersedia jalan tol; dan
3. kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan tol memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup;
   2. pemenuhan kelengkapan jalan tol harus memenuhi ketentuan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian jalan tol dan bangunan penghubung jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   4. pemagaran sesuai dengan ruang milik jalan dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan;
   5. bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan; dan
   6. jumlah lajur untuk jalur utama paling sedikit 2 (dua) lajur per arah menggunakan pemisah tengah atau median;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. jalan tol yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. jalan tol yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pada saat kondisi darurat perang jalan tol dapat digunakan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
   4. ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan;
   5. pengendalian akses jalan masuk dan jalan keluar jalan tol dibatasi secara efisien;
   6. penyediaan fasilitas komunikasi, sarana dan prasarana deteksi pengamanan dan keselamatan, akses yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya;

7. penyediaan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol antar kota dan perkotaan;
8. lebar bahu jalan sebelah luar dapat dipergunakan sebagai jalur lalu lintas sementara dalam keadaan darurat;
9. kendaraan angkutan barang meliputi truk lebih dari 3 (tiga) gandar wajib menggunakan jalan tol;
10. pelaksanaan kegiatan perbaikan jalan tol dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan
11. perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran jalur hijau jalan dan jaringan utilitas lainnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
   2. pembuatan jalan masuk atau keluar, serta simpang susun jalan tol, kecuali dengan izin Pemerintah; dan
   3. kegiatan yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan tol.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan dan pengembangan fasilitas utama dan penunjang terminal sesuai dengan standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek mitigasi bencana;
   2. Pemanfaatan Ruang di dalam dan di sekitar terminal penumpang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan terminal;
   3. penyediaan jaringan jalan yang keluar masuk terminal penumpang sesuai dengan kapasitas;
   4. penyediaan pelayanan angkutan umum yang memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal; dan
   5. lokasi terminal penumpang diarahkan berada pada pusat dan/atau kegiatan bangkitan perjalanan angkutan orang serta perpindahan moda transportasi;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan terminal penumpang berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
   2. terminal penumpang yang berlokasi di kawasan rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi terminal penumpang dan keselamatan transportasi terminal.

(5) Indikasi arahan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan memperhatikan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pendataan kinerja terminal barang, pemungutan jasa layanan terminal barang, pemberian informasi kegiatan terminal barang, pengaturan pergerakan kendaraan di area lingkungan kerja terminal barang dan pengaturan lalu lintas di area pengawasan terminal barang; dan
2. pembangunan dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal barang;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang yang mendukung kegiatan terminal barang berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
2. terminal barang yang berlokasi di kawasan rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi terminal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan memperhatikan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penimbangan kendaraan bermotor;
2. pengawasan muatan angkutan barang dan pencatatan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor; dan
3. pembangunan dan pengembangan fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa jembatan timbang yang berlokasi di kawasan rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi jembatan timbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan memperhatikan:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jembatan memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
2. pendirian fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada jembatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. jembatan yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. jembatan yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pada saat kondisi darurat perang jembatan dapat digunakan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
4. pemindahan jembatan akibat kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan jembatan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jembatan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jembatan.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan kereta api memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup;
2. pendirian fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada sistem jaringan kereta api dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. penetapan ruang manfaat, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. kegiatan pengoperasian kereta api dalam ruang manfaat jalur kereta api;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. sistem jaringan kereta api yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sistem jaringan kereta api yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan kepelabuhanan;
   2. penetapan lintas penyeberangan;
   3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
   4. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan yang dapat membahayakan operasi dan keselamatan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d terdiri atas:

a. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut; dan
b. indikasi arahan zonasi untuk alur-pelayaran di laut.

Pasal 78

(1) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a disusun dengan memperhatikan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan kepelabuhanan dan pendaratan ikan;
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan laut memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
3. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada pelabuhan laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pelabuhan laut yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelabuhan laut yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan yang dapat membahayakan operasi dan keselamatan kegiatan pelabuhan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Indikasi arahan zonasi untuk alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
2. kegiatan penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi/pelayaran;
3. kegiatan penetapan rute pelayaran; dan
4. kegiatan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan penelitian dan pendidikan, perikanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pemasangan pipa/kabel bawah Laut sepanjang tidak menghalangi dan mengganggu kapal yang sedang berlayar di dalam koridor alur;
3. kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota Laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. kegiatan penangkaran dan pelestarian satwa;
5. kegiatan pengambilan kuota karang hias;
6. kegiatan pengambilan benda muatan dan kerangka kapal tenggelam; dan
7. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sepanjang alur pelayaran setelah mendapatkan izin

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat membahayakan operasi dan keselamatan pada alur-pelayaran di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan kebandarudaraan dengan memperhatikan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda;
   2. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
   3. kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan karantina;
   4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bandar udara umum dan bandar udara khusus memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
   5. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada bandar udara umum dan bandar udara khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. bandar udara umum dan bandar udara khusus yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. bandar udara umum dan bandar udara khusus yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   3. Pemanfaatan Ruang yang mendukung kegiatan bandar udara umum dan bandar udara khusus berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat membahayakan operasi dan keselamatan bandar udara umum dan bandar udara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan penyimpanan dan pendistribusian minyak dan gas;
   2. kegiatan pembangkitan, pengkonversian dan pendistribusian tenaga listrik;
   3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan energi memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan

4. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. sistem jaringan energi yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. sistem jaringan energi yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan di sekitar sistem jaringan energi selain infrastruktur minyak dan gas bumi serta infrastruktur ketenagalistrikan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. pemanfaatan ruang disekitar sistem jaringan energi memperhitungkan jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat membahayakan aspek keamanan dan keselamatan sistem jaringan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan jaringan tetap, infrastruktur jaringan tetap dan infrastruktur jaringan tetap;
   2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan telekomunikasi memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup;
   3. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada sistem jaringan telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. kegiatan pemasangan dan pemeliharaan kabel bawah laut;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. sistem jaringan telekomunikasi yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. sistem jaringan telekomunikasi yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
   4. kegiatan yang tidak mengganggu atau merusak fungsi sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat membahayakan aspek keamanan

dan keselamatan sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air bersih, sistem pengendalian banjir dan bangunan sumber daya air;
   2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan sumber daya air memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
   3. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada sistem jaringan sumber daya air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. sistem jaringan sumber daya air yang berlokasi di daerah rawan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. sistem jaringan sumber daya air yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pemanfaatan ruang pada garis sempadan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. pemanfaatan jaringan irigasi yang berada dalam kawasan non pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

(1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f terdiri dari:
   a. indikasi arahan zonasi untuk SPAM;
   b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
   c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.
(2) Indikasi arahan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan jaringan SPAM dan infrastruktur SPAM;
      2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SPAM memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan

3. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada SPAM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. SPAM yang berlokasi di daerah rawan bencana dan daerah resapan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. SPAM yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pemanfaatan ruang di sekitar SPAM memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
   2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
   3. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berlokasi di daerah rawan bencana dan daerah resapan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengelolaan limbah beracun memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
   4. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan sistem jaringan persampahan;
   2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan persampahan memperhatikan kaidah dan fungsi lingkungan hidup; dan
   3. pendirian fasilitas utama, fasilitas penunjang dan utilitas lainnya pada sistem jaringan persampahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. sistem jaringan persampahan yang berlokasi di daerah rawan bencana dan daerah resapan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. sistem jaringan persampahan yang berlokasi di kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan persampahan memperhatikan sub zona penyangga dan sub zona Budi Daya terbatas yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. kegiatan pendidikan dan penelitian.

Paragraf 3
Indikasi arahan zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 84

(1) Indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b terdiri atas:
   a. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
   b. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
(2) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. indikasi arahan zonasi untuk badan air;
   b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
   c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
   d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi;
   e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
   f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem *mangrove*.
(3) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
   b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat;
   c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian;
   d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan;

e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi;
f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata;
h. indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman;
i. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi; dan
j. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) huruf a disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pengerukan untuk normalisasi badan air;
   2. peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi sungai, danau, embung, waduk dan rawa;
   3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan; dan
   4. kegiatan pengamanan badan air dan penjagaan kualitas air;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pengembangan struktur alami dan buatan;
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pembangunan bangunan penunjang kegiatan di badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. kegiatan pendidikan dan penelitian;
   5. kegiatan perikanan, pariwisata, pertahanan dan keamanan;
   6. kegiatan olahraga air;
   7. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   8. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan sumber daya air, dan utilitas lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   9. pembuangan sisa hasil pengolahan limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   10. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
   11. pembangunan dan pengembangan SPAM;
   12. pemindahan alur sungai akibat kegiatan pertambangan dan bencana dilengkapi dengan dokumen kajian lingkungan hidup dan rekomendasi teknis dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   13. kegiatan pemanfaatan lain di badan air tanpa mengubah fungsi ekologis kawasan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang merusak kelestarian kawasan badan air; dan
   2. kegiatan yang merusak kualitas air;
d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. badan air yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batubara dan kawasan migrasi satwa diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan hutan lindung;
   2. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;
   3. kegiatan pemulihan lingkungan dan penyerapan atau penyimpanan karbon; dan
   4. kegiatan penataan batas kawasan hutan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. usaha pemanfaatan kawasan;
   2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
   3. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
   4. kegiatan pendidikan dan penelitian;
   5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   6. kegiatan pariwisata;
   7. kegiatan pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   8. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   9. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
   10. Pemanfaatan Ruang untuk penggunaan kawasan hutan lindung di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
   11. pada saat kondisi darurat perang, kawasan hutan lindung digunakan sebagai daerah pertempuran;
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung, kerusakan bentang alam dan kegiatan yang menimbulkan resiko dampak lingkungan;
d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara dan kawasan migrasi satwa diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. perlindungan badan tanggul; dan
   2. Pemanfaatan Ruang untuk RTH;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pendidikan dan penelitian, kegiatan perikanan, kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan olahraga, kegiatan evakuasi bencana, kegiatan energi, kegiatan pertahanan dan keamanan dan kegiatan budaya dan keagamaan;
   2. bangunan eksisting dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi kawasan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pembangunan prasarana sumber daya air, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan sistem jaringan telekomunikasi;
   4. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
   5. pembangunan SPAM dan sistem pengelolaan air limbah;
   6. prasarana kegiatan perikanan, pariwisata, kebudayaan dan religi;
   7. kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dengan memperhatikan fungsi resapan air tetap terjaga dengan prinsip *zero delta Q policy* dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   8. kegiatan pemanfaatan lain di kawasan perlindungan setempat tanpa mengubah fungsi ekologis kawasan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. dalam hal di kawasan perlindungan setempat yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan perlindungan badan tanggul tidak diperbolehkan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul pada sistem pengendalian banjir;
   2. kegiatan lain yang tidak selaras, mengganggu dan mengubah fungsi kawasan perlindungan setempat;

3. membuang limbah tanpa pengolahan dan menggembala ternak di sempadan danau; dan
4. kegiatan permukiman, pertanian dan perikanan di Pulau Ruang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. kawasan perlindungan setempat yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, dan kawasan pertambangan mineral dan batu bara diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, taman pulau kecil, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, perlindungan terhadap satwa, ekosistem pesisir dan laut, kegiatan mitigasi bencana, migrasi satwa, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dan pemanfaatan sumber plasma nutfah;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
   2. kegiatan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; dan
   4. pada saat kondisi darurat perang, kawasan konservasi digunakan sebagai daerah pertempuran;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan konservasi yaitu mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan konservasi, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. kawasan konservasi yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertambangan mineral dan batu bara, kawasan migrasi satwa dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 89

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf e disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan dan perlindungan situs budaya/adat tradisional;
   2. pelayaran rakyat dan nelayan kecil, pada zona pemanfaatan terbatas dan zona lain di kawasan konservasi laut; dan
   3. pelayaran kapal penumpang regular domestik kecil pada zona pemanfaatan terbatas di kawasan konservasi laut;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan, wisata alam bentang laut, wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, wisata budaya, penangkapan ikan, kegiatan energi pembudidayaan ikan, fasilitas umum;
   2. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar; penelitian; pendidikan; penangkapan ikan; penangkapan ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi; pembudidayaan ikan; pembudidayaan ikan oleh pembudidaya ikan kecil; kegiatan pariwisata alam perairan; penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan; pendirian dan/atau penempatan bangunan laut; penempatan instalasi di laut; pemanfaatan air laut selain energi; pembuatan foto, film, dan video komersial; *landing, take off, dan taxiing seaplane* pada zona pemanfaatan terbatas di kawasan konservasi laut;
   4. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah; dan
   5. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang bukan pada zona inti;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi Kawasan dan perubahan fungsi Kawasan;
   2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
   3. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
   4. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;
   5. kegiatan mengambil/menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
   6. kegiatan pembuangan sampah dan limbah; dan

7. kegiatan yang dapat mengganggu ekosistem pada zona inti dan zona lain sesuai peruntukan kawasan di kawasan konservasi laut;

d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. kawasan pencadangan konservasi di laut yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan mineral dan batu bara, kawasan migrasi satwa, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 90

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf f disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perlindungan, pemulihan dan peningkatan ekosistem *mangrove* dan preservasi sumber daya alam;
   2. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tetap menjaga keanekaragaman hayati dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi;
   3. kegiatan jasa lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca serta mitigasi terhadap bencana; dan
   4. kegiatan pengamanan abrasi pantai;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan perikanan tangkap skala tradisional dengan tetap menjaga keanekaragaman hayati dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi;
   2. kegiatan pariwisata dengan tetap menjaga keanekaragaman hayati dan tidak mengakibatkan kerusakan ekologi;
   3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   4. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
   6. pembangunan tambat perahu nelayan tradisional; dan
   7. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi ekosistem *mangrove* sebagai pelindung pantai dan perkembangan biota laut;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan kayu *mangrove* yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan yang dapat merusak dan mencemari ekosistem *mangrove*, vegetasi pantai dan/atau tempat perkembangan biota laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. kawasan ekosistem mangrove yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara dan kawasan migrasi satwa diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan fungsi utamanya;
    2. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan pengawasan hutan dan rehabilitasi kawasan hutan; dan
    3. kegiatan jasa lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon untuk mengurangi efek gas rumah kaca serta mitigasi terhadap bencana;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang untuk penggunaan kawasan hutan produksi di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, sosial dan ekonomi serta dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
    2. kegiatan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, sosial dan ekonomi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
    5. kegiatan pendidikan dan penelitian serta pertahanan dan keamanan; dan
    6. pada saat kondisi darurat perang, kawasan hutan produksi digunakan sebagai daerah pertempuran;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. melakukan kegiatan pembersihan lahan dengan metode pembakaran lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Kawasan hutan produksi yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara dan kawasan migrasi satwa diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf b disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perkebunan;
   2. kegiatan pertanian;
   3. kegiatan pendidikan dan penelitian;
   4. kegiatan hortikultura; dan
   5. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan berfungsi lindung, pariwisata, industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dikecualikan, kegiatan pertambangan dan energi serta pertahanan dan keamanan;
   2. kegiatan agrobisnis dan agroindustri sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
   3. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
   4. pada saat kondisi kontijensi/darurat perang diperbolehkan kawasan pertanian digunakan sebagai daerah logistik pertahanan; dan
   5. kegiatan hilirisasi hasil pertanian;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengubah bentang alam yang merusak kesuburan tanah;
d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. kawasan perkebunan rakyat yang masuk dalam kawasan rawan bencana dan kawasan resapan air diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 93

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf c disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan ruang terbuka hijau;
   2. kegiatan intensifikasi pertanian dan cetak sawah; dan
   3. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan berfungsi lindung, penelitian, pendidikan, perikanan, pariwisata, permukiman, industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dikecualikan, transportasi, kegiatan pertambangan dan energi serta pertahanan dan keamanan;
   2. kegiatan agrobisnis dan agroindustri sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
   3. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
   4. pada saat kondisi kontijensi/darurat perang diperbolehkan kawasan pertanian digunakan sebagai daerah logistik pertahanan;
   5. pembatasan alih fungsi lahan sawah beririgasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   6. kegiatan hilirisasi hasil pertanian;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian irigasi teknis;
d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. kawasan pertanian yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara dan kawasan migrasi satwa diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 94

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf d disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap; dan
   2. pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan perikanan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan penelitian, pendidikan, pertanian, pariwisata, permukiman, industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dikecualikan, transportasi, kegiatan pertambangan dan energi serta pertahanan dan keamanan;
   2. kegiatan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
   3. kegiatan bioteknologi dan biofarmakologi;
   4. kegiatan pemanfaatan air laut selain energi;
   5. kegiatan hilirisasi hasil perikanan;

6. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah; dan
7. kegiatan reklamasi pada kode zona PP-2, PP-8, PP-18 dan PT-16 sebagaimana tercantum dalam matriks peraturan KKPRL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan yang mengakibatkan terganggunya alur pelayaran, alur migrasi biota dan infrastruktur dalam laut lainnya;
   3. kegiatan yang mengganggu akses keluar masuk nelayan tradisional; dan
   4. kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. kawasan perikanan yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara, kawasan migrasi satwa, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 95

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf e disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan, pembangkitan tenaga listrik, dan sarana pendukungnya; dan
   2. kegiatan perlindungan objek vital nasional;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang kawasan pertambangan dan energi mempertimbangkan kawasan rawan dan risiko bencana serta aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
   2. sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan ruang evakuasi serta mitigasi bencana;
   3. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
   4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
   5. kegiatan hilirisasi hasil pertambangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga

listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. kawasan pertambangan dan energi yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan pertambangan mineral dan batu bara diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 96

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf f disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan industri beserta kegiatan lainnya yang mendukung kawasan industri;
   2. kegiatan pergudangan, logistik barang dan pendistribusian barang; dan
   3. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, kelautan dan perikanan, pertahanan dan keamanan, kegiatan pertambangan dan energi, serta transportasi;
   3. Pemanfaatan Ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
   4. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
   5. pembuangan air sisa hasil pengolahan limbah cair;
   6. Pengolahan limbah non B3 di kawasan industri yang berada di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. kawasan peruntukan industri dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan;
   8. kegiatan hilirisasi hasil pertanian, perikanan dan pertambangan; dan
   9. kegiatan reklamasi pada kode zona ID-4, ID-5, ID-6, ID-21, ID-22 dan ID-23 sebagaimana tercantum dalam matriks peraturan KKPRL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa pembuangan limbah sisa hasil kegiatan industri secara langsung di wilayah laut;

d. kegiatan industri skala besar dan menengah diwajibkan berlokasi di kawasan peruntukan industri;

e. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. kawasan peruntukan industri yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 97

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf g disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pariwisata beserta kegiatan lainnya yang mendukung kawasan pariwisata;
   2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan daya tarik wisata;
   3. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
   4. kegiatan perlindungan terhadap cagar budaya;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan yang berfungsi lindung, pertanian, kelautan dan perikanan, permukiman, industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dikecualikan, transportasi, kegiatan energi, panas bumi serta pertahanan dan keamanan;
   2. pengembangan RTH; dan
   3. kegiatan reklamasi pada kode zona W-43, W-85, W-86, W-87, W-88, W-89, W-90, W-91, W-92, W-237, W-238, W-239 dan W-240 sebagaimana tercantum dalam matriks peraturan KKPRL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan vandalisme yang merusak potensi dan lokasi wisata;
d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. kawasan pariwisata yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara, kawasan migrasi satwa, daerah kepentingan lingkungan pelabuhan dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 98

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf h disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, perumahan, perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial, ruang terbuka non hijau, RTH, jalur dan tempat evakuasi bencana dan infrastruktur perkotaan; dan

2. pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana penunjang permukiman sesuai dengan standar pelayanan minimum;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa, industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dikecualikan, transportasi, kegiatan pertambangan dan energi, badan jalan, cagar budaya dan pertahanan dan keamanan;
   2. pembatasan permukiman eksisting yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
   3. pemindahan permukiman akibat kegiatan pertambangan mineral dan batu bara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. pemindahan permukiman akibat kegiatan pengembangan bandar udara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
   6. gedung bertingkat yang memiliki ruang bawah tanah dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan;
   7. pembatasan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara pada kawasan perkotaan;
   8. kegiatan hilirisasi hasil pertanian dan perikanan; dan
   9. kegiatan reklamasi pada kode zona DG-4, DG-10, DG-11, DG-12, DG-13, DG-14, DG-15, DG-16, DG-17, DG-18 dan DG-22 sebagaimana tercantum dalam matriks peraturan KKPRL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban kegiatan permukiman;

d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Kawasan permukiman yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara, kawasan migrasi satwa, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan kawasan perlindungan ekosistem laut diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 99

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf i ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan transportasi beserta kegiatan lainnya yang mendukung kawasan transportasi; dan

2. kegiatan pergudangan, logistik barang dan pendistribusian barang;
3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan transportasi;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perdagangan dan jasa, pertanian, kelautan dan perikanan, permukiman, industri sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang dikecualikan, pertahanan dan keamanan, badan jalan, perkantoran, kegiatan pertambangan dan energi, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
2. kegiatan logistik barang;
3. kegiatan pendidikan dan penelitian;
4. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah; dan
5. kegiatan reklamasi pada kode zona PL-11, PL-28, PL-29, PL-30, PL-31, PL-32, PL-33, PL-97 dan PL-98 sebagaimana tercantum dalam matriks peraturan KKPRL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu akses masuk dan keluar kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Kawasan transportasi yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan karst, kawasan pertambangan mineral dan batu bara, kawasan migrasi satwa dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan diatur pada ketentuan khusus.

Pasal 100

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf j disusun dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan;
3. pembangunan pangkalan utama tentara nasional Indonesia matra darat, laut dan udara dilengkapi dengan fasilitas jalan dan jembatan dengan kekuatan 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) ton, jaringan distribusi tenaga listrik, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, dan landasan helikopter; dan
4. kegiatan pelayanan umum di rumah sakit militer;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
3. kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti; dan
5. Pemanfaatan Ruang kegiatan pertahanan dan keamanan dapat menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan prasarana jaringan pipa minyak dan gas, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan jaringan kabel bawah tanah; dan
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di zona inti dan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang membahayakan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. penyediaan sistem jaringan sarana dan prasarana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan; dan

e. kawasan pertahanan dan keamanan yang masuk dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan dan kawasan pertambangan mineral dan batu bara diatur pada ketentuan khusus.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus

Pasal 101

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
c. kawasan rawan bencana;
d. kawasan cagar budaya;
e. kawasan resapan air;
f. kawasan sempadan;
g. kawasan pertahanan dan keamanan;
h. kawasan karst;
i. kawasan pertambangan mineral dan batu bara;
j. kawasan migrasi satwa;
k. kawasan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan; dan
l. kawasan perlindungan ekosistem laut.

Pasal 102

(1) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a terdiri atas:
   a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
   b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
   c. kawasan di bawah permukaan transisi;
   d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
   e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
   f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

(2) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi kebandarudaraan.

(3) Kegiatan pematangan lahan untuk pengembangan bandar udara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(4) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan wilayah laut.

(5) Peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

(1) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b seluas kurang lebih 60.117 (enam puluh ribu seratus tujuh belas) hektare meliputi:
   a. Kabupaten Bolaang Mongondow seluas 25.073 (dua puluh lima ribu tujuh puluh tiga) hektare;
   b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan seluas 1.503 (seribu lima ratus tiga) hektare;
   c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur seluas 3.723 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh tiga) hektare;
   d. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seluas 8.527 (delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh) hektare;
   e. Kabupaten Kepulauan Sangihe seluas 138 (seratus tiga puluh delapan) hektare;
   f. Kabupaten Kepulauan Talaud seluas 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) hektare;
   g. Kabupaten Minahasa seluas 5.223 (lima ribu dua ratus dua puluh tiga) hektare;
   h. Kabupaten Minahasa Selatan seluas 5.071 (lima ribu tujuh puluh satu) hektare;

i. Kabupaten Minahasa Tenggara seluas 2.806 (dua ribu delapan ratus enam) hektare;
j. Kabupaten Minahasa Utara seluas 4.578 (empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektare;
k. Kota Kotamobagu seluas 1.529 (seribu lima ratus dua puluh sembilan) hektare; dan
l. Kota Tomohon seluas 823 (delapan ratus dua puluh tiga) hektare.

(2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
b. lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
c. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam rangka Proyek Strategis Nasional, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau terjadi bencana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
d. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yang meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan/atau pembangkit dan jaringan listrik;
e. selain kepentingan umum, alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;
f. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan difungsikan untuk komoditas yang menghasilkan pangan pokok;
g. penetapan suatu kejadian sebagai bencana dilakukan oleh badan yang berwenang dalam urusan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah diterbitkan hak guna bangunan dan hak guna usaha sebelum penetapan peraturan daerah ini dilakukan dengan memperhatikan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. dalam hal alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. ganti rugi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
l. pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam RTR dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peta ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, terdiri atas:
a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi;
d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi tingkat rendah dan sedang;
e. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
f. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
g. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
h. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi;
i. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang;
j. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
k. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
a. batas dataran banjir;
b. diarahkan kegiatan revitalisasi fungsi resapan tanah;
c. Pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum;

d. pengendalian pembangunan di kawasan rawan banjir di sekitar daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai;
e. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan;
f. pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana evakuasi;
g. diarahkan pembangunan jaringan dan bangunan pengendali banjir;
h. karakteristik dan jenis Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana banjir ditetapkan dengan mempertimbangkan kajian teknis; dan
i. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
a. diarahkan kegiatan revitalisasi fungsi resapan tanah;
b. Pemanfaatan Ruang di daerah dataran banjir untuk ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum;
c. pengendalian pembangunan di kawasan rawan banjir bandang di sekitar daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai;
d. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu peringatan;
e. pembangunan sistem dan jalur evakuasi yang dilengkapi sarana dan prasarana evakuasi;
f. diarahkan pembangunan jaringan dan bangunan pengendali banjir;
g. karakteristik dan jenis Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana banjir ditetapkan dengan mempertimbangkan kajian teknis; dan
h. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan cuaca ekstrem tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
a. diarahkan pengembangan teknik konstruksi bangunan untuk fasilitas umum maupun permukiman yang berada di area rawan cuaca ekstrem;
b. diarahkan penyediaan sistem peringatan dini bahaya cuaca ekstrem;
c. diarahkan penyediaan infrastruktur pengendalian daya rusak air; dan
d. diarahkan rehabilitasi fungsi-fungsi hutan dan ruang terbuka hijau.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan gelombang ekstrem dan abrasi tingkat rendah dan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
a. pengendalian pembangunan di kawasan rawan gelombang ekstrem;
b. diarahkan pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;

c. diarahkan pengembangan ekosistem *mangrove* dan terumbu karang sebagai pelindung alami;
d. pelarangan kegiatan penambangan pasir; dan
e. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu bahaya, serta jalur evakuasi.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tsunami wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi bencana tsunami;
b. perlindungan pada vegetasi pantai, ekosistem *mangrove*, dan fungsi sempadan pantai;
c. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis bencana sesuai dengan kajian teknis;
d. penyediaan infrastruktur proteksi bencana sesuai dengan ketentuan teknis;
e. penetapan dan penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, bangunan perlindungan terhadap tsunami, dan tempat evakuasi sementara baik vertikal dan horizontal sesuai dengan ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami; dan
f. pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana.

(7) Ketentuan khusus Kawasan rawan longsor tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan longsor wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi dan sosialisasi;
b. pengendalian pembangunan pada kawasan rawan longsor dengan memperhatikan kaidah teknis;
c. pengembangan terasering atau sengkedan di lereng yang curam dan tidak memotong tebing menjadi tegak;
d. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan longsor diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
e. Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis bencana sesuai dengan kajian teknis;
f. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
g. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan bencana longsor diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan; dan
h. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana.

(8) Ketentuan khusus kawasan rawan gempa tingkat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana gempa wajib melakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi dan sosialisasi;
b. penempatan fasilitas umum vital pada kawasan dengan bahaya gempa bumi rendah;
c. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa diarahkan melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa;
d. pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi bencana; dan
e. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.

(9) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk dilakukan pemetaan dan analisis ancaman, kajian risiko bencana, rencana kontijensi, sosialisasi dan simulasi letusan gunung api;
b. penetapan zona bahaya dan zona aman untuk pembangunan;
c. pengendalian Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana letusan gunung api dengan memperhatikan kaidah teknis;
d. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi diarahkan relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan;
e. Pemanfaatan Ruang diarahkan sebagai kegiatan berfungsi lindung;
f. Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
g. penentuan lokasi ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
h. pembangunan fasilitas pengendali limpasan material gunung api;
i. penempatan fasilitas umum vital tidak berada pada kawasan dengan bahaya letusan gunung api tingkat tinggi;
j. penetapan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara sesuai dengan ketentuan mitigasi bencana; dan
k. Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan karakteristik dan jenis bencana sesuai dengan kajian teknis.

(10) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan memperhatikan:
a. Pemanfaatan Ruang diarahkan dengan intensitas bangunan rendah;
b. Pemanfaatan Ruang diarahkan sebagai kegiatan berfungsi lindung atau budi daya non terbangun;
c. bangunan diarahkan Rekayasa teknik bangunan tahan likuefaksi membuat fondasi hingga ke lapisan batuan keras; dan

d. diarahkan penyediaan prasarana pemantauan muka air tanah.

(11) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan dengan memperhatikan:
a. diarahkan penyediaan menara pantau api, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
b. diarahkan penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
c. pelarangan kegiatan membakar hutan, membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

(12) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan memperhatikan:
a. diarahkan kegiatan revitalisasi fungsi resapan tanah;
b. penyediaan infrastruktur yang mendukung tersedianya cadangan air, seperti biopori, embung, sumur dalam, dan fasilitas tampungan air lainnya;
c. peningkatan area ruang terbuka hijau untuk menambah resapan air; dan
d. pengendalian pembangunan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(13) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:
a. Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon dan Kota Kotamobagu;
b. Kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi tersebar di seluruh Kabupaten/Kota;
c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi tersebar di seluruh Kabupaten/Kota;
d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gelombang ekstrem dan abrasi tingkat rendah dan sedang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado dan Kota Bitung;
e. Kawasan rawan tsunami tingkat tinggi tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa,

Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado dan Kota Bitung;

f. Kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;
g. Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota;
h. Kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Tomohon;
i. Kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Manado;
j. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota; dan
k. Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.

(14) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

(1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf d meliputi:
a. Bangunan Gereja Tua Sion Tomohon di Kota Tomohon;
b. Benteng Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
c. Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM) Sentrum Manado di Kota Manado;
d. Istana Manganitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
e. Keraton Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
f. Kompleks Waruga Airmadidi Bawah di Kabupaten Minahasa Utara;
g. Kompleks Waruga Kaima di Kabupaten Minahasa Utara;
h. Kompleks Waruga Maumbi di Kabupaten Minahasa Utara;
i. Kompleks Waruga Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara;

j. Lokasi Gereja Tua Sion Tomohon di Kota Tomohon;
k. Makam Kanjeng Ratu Sekar Kedaton (Permaisuri Hamengku Buwono V) di Kota Manado;
l. Makam Kyai Modjo di Kabupaten Minahasa;
m. Makam Pahlawan Maria J.C. Walanda Maramis di Kabupaten Minahasa Utara;
n. Makam Tuanku Imam Bonjol di Kabupaten Minahasa;
o. Monumen Dotu Lolong Lasut di Kota Manado; dan
p. Waruga Mahakeret Barat di Kota Manado.

(2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
a. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;
b. kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif, serta menetapkan batas-batas keluasannya;
c. ketentuan kegiatan mengubah, memindahkan, alih fungsi dan penguasaan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya; dan
f. ketentuan pelarangan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya.

(3) Peta ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

(1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf e tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon ditetapkan dengan memperhatikan:
a. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
b. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan, waduk, kolam retensi, polder dan/atau sejenisnya pada lahan terbangun;

c. menjaga fungsi hidrogeologi kawasan resapan air, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. ketentuan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf f meliputi:
a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai;
b. ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
c. ketentuan khusus sempadan pipa/kabel; dan
d. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai.

(2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
a. hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
1. bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
2. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai; dan
3. bangunan ketenagalistrikan;
b. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
c. pemanfaatan sempadan sungai danau dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan; dan
d. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi: bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. sempadan danau hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dan bangunan tertentu seperti penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olah raga dan/atau aktivitas budaya dan keagamaan, bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi dan bangunan ketenagalistrikan;
   b. pada sempadan danau dilarang untuk mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau; dan
   c. pemanfaatan sempadan danau dilakukan berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air serta dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sekitar danau yang bersangkutan.

(4) Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. penempatan, pemendaman, dan penandaan;
   b. pemendaman kabel bawah laut pada alur pelayaran mengikuti peraturan perundangan yang berlaku;
   c. kegiatan pemasangan kabel bawal laut dengan jarak 50 m (lima puluh meter);
   d. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi-Pelayaran;
   e. memperhatikan ruang bebas dalam pembangunan jembatan;
   f. memperhatikan koridor pemasangan kabel laut dan pipa bawah laut;
   g. pemutusan/kerusakan oleh pemilik kabel/pipa bawah laut terhadap kabel/pipa bawah laut lainnya;
   h. pemutusan/kerusakan pada kabel/pipa laut lain; harus menanggung biaya perbaikannya; dan
   i. ganti rugi untuk mencegah kerusakan pada kabel atau pipa bawah laut.

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
   b. peningkatan fungsi ekologis sempadan pantai;
   c. pengendalian kualitas perairan dan konservasi lingkungan pesisir;
   d. pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi;

e. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan gelombang pasang; dan
f. Pembangunan dan pengembangan kawasan terbangun memperhatikan/mempertahankan fungsi sempadan pantai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di:
a. ketentuan khusus sempadan sungai tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon;
b. ketentuan khusus sempadan situ, danau, embung, dan waduk tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado dan Kota Tomohon;
c. ketentuan khusus sempadan pipa/kabel berada di wilayah laut; dan
d. ketentuan khusus sempadan pantai tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Manado.

(7) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

(1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf g tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan,

Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado, Kota Tomohon dan wilayah laut, ditetapkan dengan memperhatikan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
   2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan;
   3. pembangunan pangkalan utama tentara nasional Indonesia matra darat, laut dan udara dilengkapi dengan fasilitas jalan dan jembatan dengan kekuatan 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) ton, jaringan distribusi tenaga listrik, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, dan landasan helikopter; dan
   4. kegiatan pelayanan umum di rumah sakit militer;

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   2. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
   3. kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. alih fungsi wilayah pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan dan menyediakan wilayah pengganti; dan
   5. Pemanfaatan Ruang kegiatan pertahanan dan keamanan dapat menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. pengembangan prasarana jaringan pipa minyak dan gas, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan jaringan kabel bawah tanah; dan
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di zona inti dan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang membahayakan kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Kawasan pertahanan dan keamanan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

(3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan yang telah ditetapkan sebagai objek vital nasional mengikuti ketentuan peraturan perundangan.

(4) Peta ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

(1) Ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf h tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kota Kotamobagu ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. klasifikasi Kawasan karst terdiri dari Kawasan karst kelas I dan Kawasan karst kelas II;
   b. pemanfaatan kawasan karst kelas I dapat dilakukan setelah penyelidikan dan verifikasi dari instansi yang membidangi sektor geologi untuk memastikan keberadaan eksokarst dan endokarst yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai kawasan bentang alam karst yang akan dilindungi;
   c. pemanfaatan kawasan karst kelas II dapat dilakukan setelah verifikasi dari instansi yang membidangi sektor geologi untuk memastikan keberadaan eksokarst dan endokarst yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai kawasan bentang alam karst yang akan dilindungi; dan
   d. ketentuan pada kawasan karst kelas I dan kelas II dapat dilakukan kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan lain setelah verifikasi dari instansi yang membidangi sektor geologi untuk memastikan tidak ada keberadaan eksokarst dan endokarst dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peta ketentuan khusus kawasan karst sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 110

(1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf i tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon dan wilayah laut, ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. wilayah izin usaha pertambangan, wilayah pencadangan negara dan wilayah pertambangan rakyat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan batuan;
c. kegiatan pertambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat risiko, bahaya dan kerentanan tinggi perlu mempertimbangkan mitigasi bencana dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. kegiatan pertambangan di kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan pertambangan di kawasan resapan air dan kawasan sempadan dengan menjaga fungsi hidrogeologi kawasan resapan air dengan penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*);
f. ketentuan kegiatan pertambangan dengan memanfaatkan kawasan karst kelas I dan II dapat dilakukan setelah dilakukan verifikasi dari instansi yang membidangi sektor geologi untuk memastikan bukan merupakan keberadaan eksokarst dan endokarst yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai kawasan bentang alam karst yang akan dilindungi;
g. ketentuan kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil, kawasan hutan, wilayah laut dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. ketentuan pembatasan lokasi pertambangan pada kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. ketentuan kegiatan penambangan pada kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
j. ketentuan pembatasan lokasi pertambangan yang berada pada kawasan perdesaan harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air;
k. ketentuan kegiatan pertambangan di kawasan permukiman eksisting wajib melakukan pemindahan permukiman di lokasi yang baru;
l. ketentuan kegiatan hilirisasi hasil pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. ketentuan pembuangan limbah tambang harus diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan limbah yang aman untuk lingkungan;
n. ketentuan pasca kegiatan tambang diarahkan menjadi Kawasan Budi Daya lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. ketentuan kegiatan reklamasi dan pasca tambang mengacu pada dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
p. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal.

(2) Peta ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

(1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf j meliputi:
a. migrasi biota penyu laut berupa alur migrasi biota penyu perairan di wilayah laut;
b. migrasi biota cetacea berupa alur migrasi biota cetacea perairan di wilayah laut;
c. migrasi biota burung maleo senkawor kawasan ekosistem esensial koridor hidup liar Tanjung Binerean di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
d. Koridor Ekologis Muara Pusian di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
e. Koridor Ekologis Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow.

(2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan untuk Kawasan migrasi satwa yaitu:
a. penelitian dan pendidikan;
b. lalu lintas kapal yang tidak mengganggu migrasi biota laut;
c. wisata bahari;
d. kegiatan lainnya yang selaras dengan kepentingan perlindungan alur migrasi satwa dan yang tidak mengganggu keberadaan alur migrasi satwa;
e. perlindungan dan pengamanan area bertelur burung Maleo serta pengelolaannya; dan
f. kegiatan pemulihan ekosistem kawasan migrasi satwa.

(3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang di kawasan migrasi satwa yang tidak diperbolehkan yaitu:
a. kegiatan perikanan budi daya;
b. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah penyu dan mamalia laut yaitu rawai dan jaring insang;
c. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, bius dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
e. penangkapan burung maleo dan telur burung maleo; dan
f. penangkapan satwa lainnya yang dilindungi.

(4) Peta ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

(1) Ketentuan khusus kawasan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf k berada di wilayah laut, ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. pengendalian pemanfaatan untuk penelitian dan sarana prasarana penunjang kegiatan pelabuhan;
   b. ketentuan pemanfaatan dengan syarat yaitu kegiatan reklamasi yang dapat menunjang kegiatan pelabuhan;
   c. ketentuan pelarangan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
   d. ketentuan pelarangan untuk kegiatan pelabuhan yang tidak sesuai dengan kapasitas pelabuhan.

(2) Peta ketentuan khusus kawasan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

(1) Ketentuan khusus kawasan perlindungan ekosistem laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf l berada di wilayah laut, ditetapkan dengan memperhatikan:
   a. kegiatan yang mendukung pelestarian ekosistem pesisir dan tidak boleh merusak ekosistem pesisir;
   b. kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. kegiatan pelayaran tanpa merusak ekosistem pesisir;
   d. kegiatan penangkapan ikan tidak diperbolehkan, baik menggunakan pukat dan/atau pukat jangkar; dan
   e. kegiatan wisata tidak diperbolehkan.

(2) Peta ketentuan khusus kawasan perlindungan ekosistem laut sebagai mana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 114

(1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada ruang darat dan ruang laut untuk memastikan:
   a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
   b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

(2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
   a. selama pembangunan; dan
   b. pasca pembangunan.
(3) Penilaian pada periode selama Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR dan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
(4) Penilaian pada periode pasca Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
(5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 115

(1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penilaian rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
(2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan:
   a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang
(3) Penilaian perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
   a. kesesuaian program;
   b. kesesuaian lokasi; dan
   c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
(5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, Pembangunan berdasarkan perizinan berusaha dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

(6) Hasil penilaian tingkat perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terdiri dari:
   a. muatan rencana Struktur Ruang dan/ atau Pola Ruang terwujud;
   b. muatan rencana Struktur Ruang dan/ atau Pola Ruang belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang dan/atau Pola Ruang.

(7) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(8) Penilaian Perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.

(9) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Penilaian pelaksanaan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 116

(1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d diselenggarakan untuk:
   a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW;
   b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW; dan
   c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR Wilayah.

(2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.

(3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
   a. menindaklanjuti hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagai dasar pengendalian implikasi kewilayahan pada Kawasan yang perlu dikendalikan atau didorong perkembangannya;
   b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;

c. menindaklanjuti hasil kesepakatan sengketa penataan ruang; dan/atau
d. mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal dan insentif non fiskal.

(5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. subsidi;
c. imbalan;
d. sewa ruang;
e. urun saham;
f. fasilitasi persetujuan KKPR;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. penghargaan; dan/atau
i. publikasi atau promosi.

(7) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(8) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada Zona Kendali.

(9) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. disinsentif fiskal; dan/atau
b. disinsentif non fiskal.

(10) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
c. pemberian status tertentu.

(12) Pemberian disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi kearifan lokal, jenis Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan

sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

(14) Pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 117

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e berupa sanksi administratif.

(2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang melalui pemeriksaan perubahan fungsi ruang dan/atau tidak melalui pemeriksaan perubahan fungsi ruang.

(3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada:
   a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW;
   b. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
   c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
   d. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
   e. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
   f. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, Rencana Zonasi Antar Wilayah, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan/atau
   g. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

(4) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap setiap Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang melalui pemeriksaan perubahan fungsi ruang dan/atau tidak melalui pemeriksaan perubahan fungsi ruang.

(5) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui audit Tata Ruang.

(6) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

(7) Audit tata ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(8) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

a. kewenangan pemberi sanksi;
b. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
c. dasar pengenaan sanksi administratif;
d. jenis, kriteria, dan klasifikasi pengenaan sanksi administratif;
e. tahapan pengenaan sanksi administratif;
f. tata cara pengenaan sanksi administratif;
g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengenaan sanksi administratif;
h. upaya administratif terhadap pengenaan sanksi administratif; dan
i. basis data pengenaan sanksi administratif.

(9) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

Pasal 118

(1) Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf f terjadi akibat:
a. perubahan kebijakan; dan/atau
b. pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang

(2) Sengketa Penataan Ruang yang terjadi akibat perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diakibatkan oleh:
a. perubahan RTRW;
b. perubahan kebijakan sektoral; dan/atau
c. perubahan kebijakan pembangunan.

(3) Sengketa Penataan Ruang yang terjadi akibat pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diakibatkan oleh dampak kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diatur dalam RTRW.

(4) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 119

(1) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi:
a. pengaturan Penataan Ruang, pembinaan Penataan Ruang, dan pelaksanaan Penataan Ruang;
b. fungsi dan manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang;

c. pemenuhan standar pelayanan bidang Penataan Ruang; dan
d. pemenuhan standar teknis kawasan.

(2) Pengawasan Penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. tata cara pengawasan penataan ruang;
b. inspektur; dan
c. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.

(3) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 120

Dalam proses Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:
a. mengetahui RTRW;
b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat yang berwenang;
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW menimbulkan kerugian; dan
g. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

(1) Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:
a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTRW;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 122

(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan, antara lain melalui partisipasi dalam:
   a. penyusunan RTRW;
   b. Pemanfaatan Ruang; dan
   c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam Penataan Ruang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan secara langsung dan/atau tertulis
(2) Dalam hal Masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 124

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk FPR.
(2) FPR di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
(3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja FPR diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 125

(1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
(2) Peninjauan Kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun kelima sejak RTRW diundangkan.
(3) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Ketentuan dan tata cara Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

(1) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam zona tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) tetap berlaku sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
(2) Tata cara perubahan fungsi Kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan diintegrasikan dalam revisi RTR.
(3) Ruang laut yang berada diantara garis pantai dan garis pantai rencana pada RTRW Daerah harus mendapatkan KKPRL dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebelum diatur pemanfaatannya pada RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 127

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, terpadu, dan mudah diakses oleh Masyarakat.
(2) Ketentuan mengenai pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 128

Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 129

Setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dan/ atau kematian orang diancam

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Penataan Ruang.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang/KKPR ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
    2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1); dan
b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 1),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 15 Juli 2026

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

TAHLIS GALLANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA : (3-90/2026)

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730422 199303 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2026-2046

I. UMUM:

Ruang wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut di samping berfungsi sebagai sumber daya juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Mengingat potensi dan keterbatasan ruang maka Pemanfaatan Ruang perlu dilaksanakan secara bijaksana, baik untuk kegiatan-kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan-kegiatan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas-asas Pemanfaatan Ruang antara lain asas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian ruang sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan dan daya dukungnya bagi kegiatan-kegiatan manusia. Agar Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis provinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu merumuskan penetapan, pokok-pokok kebijakan, dan strategi pengembangan dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah provinsi, dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, Pemanfaatan Ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan provinsi harus meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Provinsi dan dijabarkan menjadi Strategi Pengembangan Struktur dan Pola Ruang Nasional yang merupakan dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi-nya.

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya

dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. RTRW Provinsi memadukan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRW Provinsi ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Struktur ruang wilayah mencakup sistem pusat perkotaan provinsi, sistem jaringan transportasi provinsi, sistem jaringan energi provinsi, sistem jaringan telekomunikasi provinsi, dan sistem jaringan sumber daya air provinsi. Pola ruang wilayah provinsi mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis provinsi.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW Provinsi ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis provinsi; arahan Pemanfaatan Ruang yang merumuskan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri atas arahan zonasi kawasan, insentif dan disinsentif, perijinan serta arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis provinsi berkaitan erat dengan RTRW Provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan perangkat operasionalnya. Oleh karena itu penetapan peraturan daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

huruf a

luas wilayah darat sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau yaitu seluas 14.488,429

(empat belas ribu empat ratus delapan puluh delapan koma empat dua sembilan) Km^2, tidak termasuk Danau Mooat.

huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.
Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
Yang dimaksud dengan "produktif" adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.
Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang di wilayah provinsi" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam Pemanfaatan Ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang Wilayah" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Kriteria pelabuhan perikanan samudera:

a. Kriteria teknis terdiri dari:
   1. mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan Laut Lepas;
   2. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh Kapal Perikanan yang berukuran paling kecil 60 (enam puluh) *gross tonnage*;
   3. memiliki dan/ atau memanfaatkan dermaga paling pendek 3O0 (tiga ratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 3 (tiga) meter;
   4. mampu menampung Kapal Perikanan paling sedikit 10O (seratus) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 6.000 (enam ribu) *gross tonnage*; dan
   5. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 2O (dua Puluh) hektare.

b. Kriteria operasional terdiri dari:
   1. ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
   2. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 (lima puluh) ton per hari; dan
   3. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Ayat (8)

Kriteria pelabuhan perikanan pantai:

a. Kriteria teknis terdiri dari:
   1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
   2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
   3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
   4. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan
   5. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.

b. Kriteria operasional terdiri dari:
   1. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari;
   2. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Ayat (9)

Kriteria pangkalan pendaratan ikan:

a. Kriteria teknis terdiri dari:

1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
4. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
5. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.

b. Kriteria operasional terdiri dari:
1. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari;
2. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.

Ayat (10)
Cukup Jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
huruf a. Bandar Udara Sam Ratulangi juga difungsikan untuk pelayanan pesawat udara khusus kargo.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 32
huruf a.
Jaringan SPAM regional Bimatara terdiri atas:

1. JDU bendungan-rumah katup;
2. JDU rumah katup-rumah pompa;
3. JDU SPAM Bimatara; dan
4. pipa transmisi rumah pompa-IPA Suwaan.

huruf b.

Jaringan SPAM regional Boltagu terdiri atas:

1. JDU intake Danau Tondok-IPA Boltim;
2. JDU intake SPL Lantat-offtake Passi;
3. JDU IPA Boltim-offtake Modayag;
4. JDU offtake Kotamobagu-Simpang Mesjid Raya;
5. JDU offtake Modayag-offtake Kotamobagu;
6. JDU Simpang Masuk Kota-offtake Bolaang;
7. JDU Simpang Masuk Kota-offtake Lolayan;
8. JDU Simpang Mesjid Raya-offtake Passi; dan
9. JDU Simpang Mesjid Raya-Simpang Masuk Kota.

huruf c

Jaringan SPAM regional Boltagu terdiri atas:

1. JDU intake Tondano-IPA Peleloan;
2. JDU IPA Peleloan-offtake Kaima;
3. JDU IPA Peleloan-offtake Kota Tondano;
4. JDU offake Kota Tondano-offtake Kota Tomohon;
5. JDU offtake Kaima-offtake Kakas; dan
6. JDU offtake Kakas-offtake Mitra.

Pasal 33

huruf a.

Infrastruktur SPAM regional Bimatara terdiri atas:

1. bak pelepas tekanan Kauditan di Kabupaten Minahasa Utara;
2. bak pelepas tekanan Watudambo di Kota Bitung;
3. *inline* booster Airmadidi 2 di Kabupaten Minahasa Utara;
4. *inline booster* Suwaan di Kabupaten Minahasa Utara;
5. *intake* Kuwil di Kabupaten Minahasa Utara;
6. IPA Suwaan di Kabupaten Minahasa Utara;
7. *offtake* Airmadidi 1 dan pompa booster di Kabupaten Minahasa Utara;
8. *offtake* Airmadidi 2 di Kabupaten Minahasa Utara;
9. *offtake* Kauditan dan reservoar transfer di Kabupaten Minahasa Utara;
10. *offtake* KEK Bitung di Kota Bitung;
11. *offtake* Mapanget di Kota Manado;
12. *offtake* Paal Dua di Kabupaten Minahasa;
13. *offtake* Sagerat di Kota Bitung;
14. *offtake* Tendeki di Kota Bitung;
15. reservoar IPA Suwaan di Kabupaten Minahasa Utara;
16. reservoar Manado dan offtake Watutumou III di Kabupaten Minahasa Utara;
17. rumah katup di Kabupaten Minahasa Utara; dan
18. rumah pompa di Kabupaten Minahasa Utara.

huruf b.

Infrastruktur SPAM regional Boltagu terdiri atas:

1. intake SPL Lantat di Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. IPA Boltim di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. offtake Bolaang di Kota Kotamobagu;
4. offtake Kotamobagu di Kota Kotamobagu;
5. offtake Lolayan di Kota Kotamobagu;

6. offtake Modayag di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
7. offtake Passi di Kota Kotamobagu.

Huruf c

Infrastruktur SPAM regional Boltagu terdiri atas:

1. booster pump 1 di Kabupaten Minahasa;
2. booster pump 2 di Kabupaten Minahasa;
3. booster pump 3 di Kabupaten Minahasa;
4. booster pump 4 di Kabupaten Minahasa;
5. booster pump Paleloan di Kabupaten Minahasa;
6. intake Tondano di Kabupaten Minahasa;
7. IPA Paleloan/Gunung Tokapokol di Kabupaten Minahasa;
8. offtake Kaima di Kabupaten Minahasa;
9. offtake Kakas di Kabupaten Minahasa;
10. offtake Kota Tomohon di Kota Tomohon;
11. offtake Kota Tondano di Kabupaten Minahasa; dan
12. offtake Mitra di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)" adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sistem jaringan persampahan" adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan air yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat BA adalah air terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat PTB adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah bencana banjir, erosi, longsor, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat PS dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat. Dalam kawasan perlindungan setempat, RTRW perlu mengatur arahan batas sempadan sebagai dasar bagi penetapan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan kawasan konservasi yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat KS adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Karakteristik, keaslian, atau keunikan ekosistem (hutan hujan tropis yang meliputi pegunungan, dataran rendah, rawa gambut, pantai);
b. Habitat penting atau ruang hidup bagi satu atau beberapa spesies (flora dan fauna) khusus: endemik (hanya terdapat di suatu tempat di seluruh muka bumi), langka, atau terancam punah (seperti harimau, orang utan, badak, gajah, beberapa jenis burung seperti Cendrawasih, Kakaktua, Julang Papua serta beberapa jenis tumbuhan seperti Gaharu, dan beberapa jenis anggrek). Jenis-jenis ini biasanya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
c. Tempat yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah alami;
d. Bentang alam (lanskap) atau ciri geofisik yang bernilai estetik atau ilmiah;
e. Fungsi perlindungan hidro-orologi: batu/tanah, air, dan iklim global; dan
f. Pengusahaan wisata alam yang alami (danau, pantai, keberadaan satwa liar yang menarik).

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar alam” adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Perlindungan

terhadap kawasan cagar alam dilakukan untuk melindungi kekhasan biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Kriteria kawasan cagar alam, meliputi:

a. kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta mempunyai kekhasan jenis tumbuhan, satwa atau ekosistemnya; dan
b. kondisi alam, baik biota maupun fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia.

Yang dimaksud dengan "kawasan suaka margasatwa" adalah kawasan suaka alam yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, dan/atau merupakan tempat dan kehidupan jenis satwa migran tertentu. Perlindungan terhadap kawasan suaka margasatwa dilakukan untuk melindungi keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa. Kriteria kawasan suaka margasatwa meliputi:

a. kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
b. memiliki keanekaragaman dan/atau keunikan satwa; dan
c. mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "taman nasional" adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk melindungi keaslian ekosistem dan dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi, dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran. Kriteria taman nasional, meliputi:

a. kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk relatif luas, tumbuhan dan/atau satwanya memiliki sifat spesifik dan endemik serta berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
b. dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari atas zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Yang dimaksud dengan "taman hutan raya" adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi. Perlindungan terhadap taman hutan raya dilakukan untuk melindungi koleksi tumbuhan yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Kriteria taman hutan raya, meliputi:

a. kawasan yang ditunjuk mempunyai luas tertentu, yang dapat merupakan kawasan hutan dan/atau kawasan bukan hutan; dan
b. memiliki bentang alam dan akses yang baik untuk kepentingan pariwisata

Yang dimaksud dengan "taman wisata alam" adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi. Kriteria taman wisata alam, meliputi:

a. kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan; dan
b. memenuhi kebutuhan rekreasi dan/atau olahraga serta mudah dijangkau.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan kawasan pencadangan konservasi di laut yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat KPL adalah Kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan kawasan ekosistem *mangrove* yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat EM adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan *mangrove*/bakau dilakukan untuk melestarikan hutan sebagai pembentuk ekosistem *mangrove*/bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut di samping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budi daya di belakangnya.

Yang dimaksud dengan "hutan *mangrove*" adalah hutan yang ditunjuk dan/atau terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh iklim.

Kriteria kawasan *mangrove* adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kawasan hutan produksi yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat KHP adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan kawasan perkebunan rakyat yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat KR adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar;

Pasal 47

Yang dimaksud dengan kawasan pertanian yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat P adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan kawasan perikanan yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat IK adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan dan energi yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat TE adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan industri yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan pariwisata yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat W adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan kawasan permukiman yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat PM adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan kawasan transportasi yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat TR adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan Laut.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan pertahanan dan keamanan yang pada peta rencana Pola Ruang disingkat HK adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.
Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
penjenamaan adalah proses penciptaan nama dan citra unik untuk suatu produk di benak konsumen, khususnya melalui iklan.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.
Ayat (9)
Cukup Jelas.
Ayat (10)
Cukup Jelas.
Ayat (11)
Cukup Jelas.
Ayat (12)
Cukup Jelas.
Ayat (13)
Cukup Jelas.
Ayat (14)
Cukup Jelas.
Ayat (15)
Cukup Jelas.
Ayat (16)
Cukup Jelas.
Ayat (17)
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.
Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Matriks Peraturan KKPRL berisi pengaturan terkait Zona, Kode Zona, Lokasi, Luas, Koordinat, Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Khusus.
Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
huruf b. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.

Pasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)" adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 103
Ayat (1)
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 104
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.
Ayat (9)
Cukup Jelas.
Ayat (10)
Cukup Jelas.
Ayat (11)
Cukup Jelas.
Ayat (12)
Cukup Jelas.
Ayat (13)
Cukup Jelas.
Ayat (14)
Cukup Jelas.

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 106
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 107
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 108
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan karst" adalah kawasan batu gamping atau daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah yang pada umunya dicirikan dengan adanya depresi tertutup (*closed depression*), drainase permukaan dan gua.

Karst kelas I hanya merupakan sebaran batu gamping sebagai pembentuk karst yang diambil dari peta geologi regional, belum ada penyelidikan tentang keberadaan eksokarst dan endokarst.

Karst kelas II pada sebaran batu gamping tersebut telah dilakukan penyelidikan tentang keberadaan eksokarst dan endokarst yang menjadi kriteria untuk penetapan kawasan bentang alam karst, namun belum diverifikasi oleh instansi yang membidangi Geologi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kawasan migrasi satwa" adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan. Kawasan migrasi satwa termasuk alur migrasi biota laut;.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)" adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Yang dimaksud dengan "Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)" adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran..

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 113
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut", dapat berupa EBSA/Kawasan yang Signifikan secara Ekologi dan Biologi, PSSA/Area Sensitif dan Daerah Larangan Penangkapan Ikan. EBSA (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas)/Kawasan yang Signifikan Secara Ekologi dan Biologi, merupakan kawasan tertentu di laut yang memiliki fungsi penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi laut. Sedangkan PSSA (Particularly Sensitive Sea Areas)/Area Sensitif merupakan kawasan tertentu di laut yang memerlukan perlindungan khusus dikarenakan memiliki fungsi penting secara ekologi, sosio ekonomi maupun ilmu pengetahuan, yang sensitif terhadap kegiatan maritim internasional..
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 115
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jelas.
Ayat (9)
Cukup Jelas.
Ayat (10)
Cukup Jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya Pemanfaatan Ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas.

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 119
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 120
Cukup Jelas.

Pasal 121
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 122
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 123
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 124
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 125
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Garis Pantai Rencana" yang digambarkan pada RTRW Daerah adalah garis pantai berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 124 Tahun 2025 tentang Penetapan Data Geospasial Dasar dan Peta Rupabumi Indonesia Tahun 2025 dengan mempertimbangkan:

1. Rencana reklamasi yang tercantum dalam Matriks Peraturan KKPRL sesuai Lampiran XIV dan Peta Peraturan KKPRL sesuai Lampiran XV.
2. Rencana Pola Ruang sesuai Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kota Manado Tahun 2023-2042.
3. Rencana Pola Ruang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024-2043.
4. Rencana Pola Ruang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2025 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Tahun 2026-2046.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas.

Pasal 131

Cukup Jelas.

Pasal 132

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA WILAYAH DAERAH, PETA PULAU-PULAU DAN NAMA-NAMA PULAU

A. Peta Wilayah Daerah

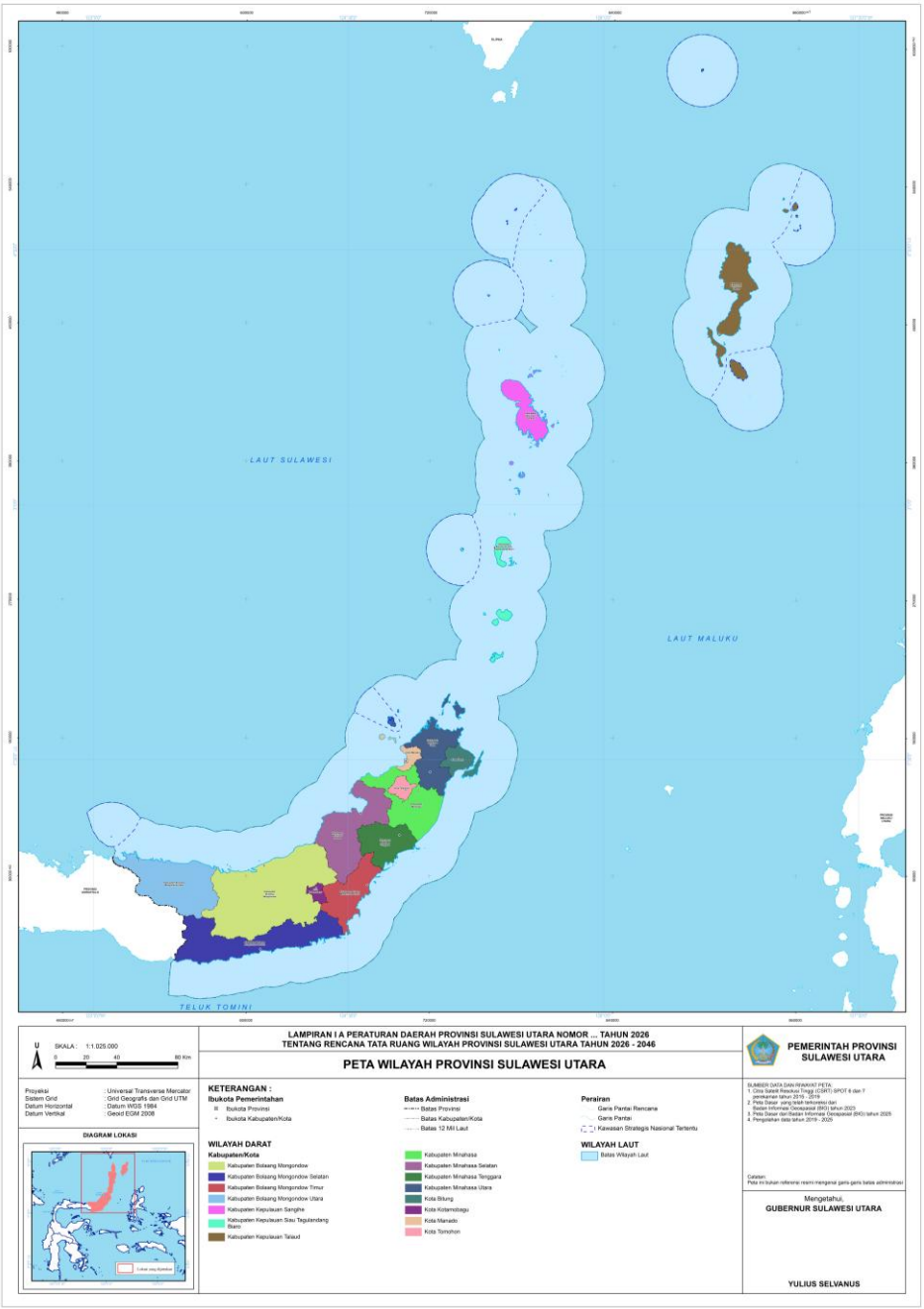

B. Peta Pulau-Pulau

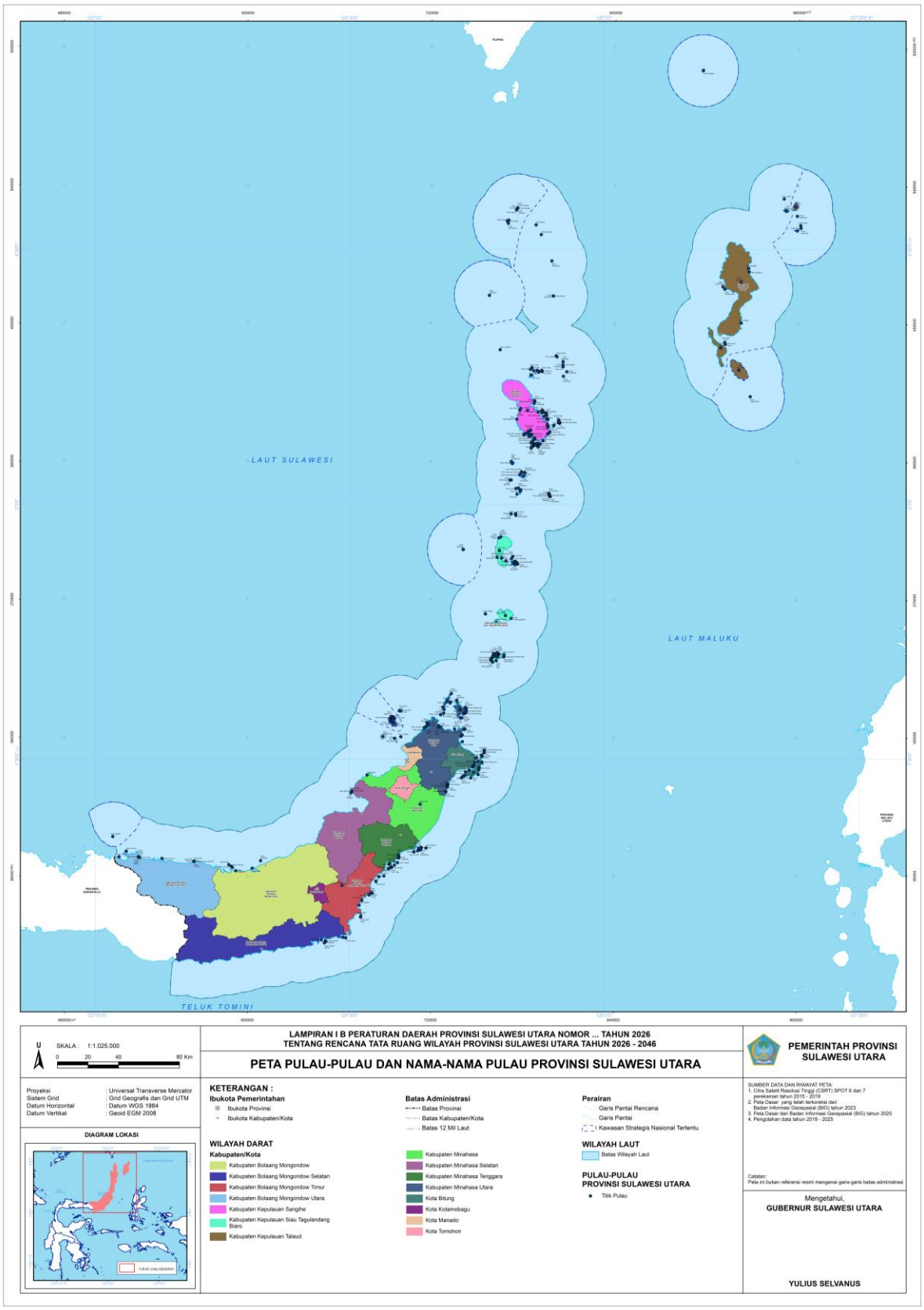

C. Nama-nama Pulau

No	Nama Pulau	Koordinat	
a.	**Daerah**		
1	Pulau Libuton	00°50'34.01" U	123°49'47.55" T
b	**Kabupaten Bolaang Mongondow**		
1	Pulau Gogabola	00°50'34.01" U	123°49'47.55" T
2	Pulau Molosing	00°54'06.61" U	123°58'34.33" T
3	Pulau Paniki	00°52'41.99" U	123°47'20.00" T
4	Pulau Tengah	00°52'09.99" U	123°48'13.00" T
5	Pulau Tikus	00°51'26.25" U	123°55'36.48" T
6	Pulau Tudunya	00°51'43.99" U	123°48'38.99" T
c.	**Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan**		
1	Pulau Babi	00°27'02.99" U	124°27'42.00" T
2	Pulau Bango	00°25'47.15" U	124°21'28.58" T
3	Pulau Kelapa	00°26'08.00" U	124°20'03.00" T
4	Pulau Pondan Mointok	00°25'04.79" U	124°21'06.36" T
5	Pulau Pondan Moloben	00°25'32.32" U	124°21'42.19" T
d.	**Kabupaten Bolaang Mongondow Timur**		
1	Pulau Ibantong	00°42'41.59" U	124°37'59.99" T
2	Pulau Kumeke	00°48'28.00" U	124°40'25.00" T
3	Pulau Laga Besar	00°34'22.94" U	124°33'58.37" T
4	Pulau Laga Kecil	00°34'10.64" U	124°33'55.56" T
5	Pulau Nenas	00°46'45.99" U	124°39'20.99" T
6	Pulau Ponogaguan	00°42'36.46" U	124°37'27.90" T
7	Pulau Racun	00°48'44.00" U	124°42'08.62" T
8	Pulau Tanjung Merah	00°41'59.41" U	124°36'55.25" T
9	Pulau Lampu	00°26'51.00" U	124°28'41.00" T
10	Pulau Ariang	00°40'05.44" U	124°34'22.44" T
11	Pulau Ilobang	00°38'21.93" U	124°33'23.51" T
e.	**Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**		
1	Pulau Anuling	00°57'30.15" U	123°11'06.40" T

No	Nama Pulau	Koordinat	
2	Pulau Bongkil	01°02'39.00" U	123°06'20.00" T
3	Pulau Damar	00°55'23.99" U	123°15'38.99" T
4	Pulau Keramat	00°55'29.50" U	123°08'33.16" T
5	Pulau Lolato Dokalo	00°55'22.60" U	123°15'26.16" T
6	Pulau Lolato Yisiko	00°55'28.81" U	123°15'22.95" T
7	Pulau Nipa	00°53'59.65" U	123°35'00.89" T
8	Pulau Nipa Mointo'O	00°53'54.36" U	123°35'08.78" T
9	Pulau Nunuka	00°54'54.41" U	123°23'44.20" T
10	Pulau Posiposi	00°53'51.76" U	123°34'56.88" T
11	Pulau Posiposi Mointo'O	00°53'52.60" U	123°35'05.94" T
12	Pulau Tikus	00°55'18.00" U	123°15'51.00" T
f.	**Kabupaten Kepulauan Sangihe**		
1	Pulau Balontohe	03°46'54.39" U	125°46'48.68" T
2	Pulau Tanggirang	03°32'40.35" U	125°36'40.86" T
3	Pulau Batubahoa	03°24'36.89" U	125°33'36.20" T
4	Pulau Batubawaikang	04°44'45.58" U	125°29'23.72" T
5	Pulau Batudolohe	03°25'15.63" U	125°33'02.29" T
6	Pulau Batuhiang	03°20'57.10" U	125°35'42.98" T
7	Pulau Mendaku	03°21'40.34" U	125°34'42.48" T
8	Pulau Batukalai	03°21'51.77" U	125°34'10.88" T
9	Pulau Batukemba	03°03'37.92" U	125°40'38.63" T
10	Pulau Batukolokolo	03°03'52.64" U	125°40'26.05" T
11	Pulau Batuliang Disi	03°21'03.66" U	125°35'59.50" T
12	Pulau Batuluha	03°03'34.05" U	125°40'34.94" T
13	Pulau Sela	02°56'26.68" U	125°28'43.50" T
14	Pulau Batumananinta	03°24'35.67" U	125°33'33.55" T
15	Pulau Batunderang	03°21'23.75" U	125°36'47.07" T
16	Pulau Batunolo	03°19'55.51" U	125°34'13.88" T
17	Pulau Batupaliaheng	03°03'49.52" U	125°40'25.85" T
18	Pulau Batupehe	03°20'35.62" U	125°34'48.00" T

No	Nama Pulau	Koordinat	
19	Pulau Batupuikang	03°36'32.86" U	125°35'30.24" T
20	Pulau Batupuntieng	03°03'08.70" U	125°40'34.11" T
21	Pulau Batusalambeang	03°10'32.14" U	125°30'09.18" T
22	Pulau Batusalana	03°22'34.42" U	125°34'50.27" T
23	Pulau Batusaiki	03°32'24.97" U	125°37'59.67" T
24	Pulau Batusenggelohe	03°30'07.55" U	125°29'08.46" T
25	Pulau Batutadinting	03°23'22.31" U	125°35'22.08" T
26	Pulau Batutebe	03°08'38.17" U	125°26'44.80" T
27	Pulau Tentumbango Malaude	03°21'23.63" U	125°37'23.02" T
28	Pulau Tapurung Kadio	03°11'31.75" U	125°30'47.74" T
29	Pulau Batuwingkung	03°31'56.04" U	125°39'30.30" T
30	Pulau Tolengbara	03°27'32.44" U	125°40'07.88" T
31	Pulau Batuwuhe	03°21'05.87" U	125°36'09.41" T
32	Pulau Batuwola	03°20'59.03" U	125°36'08.22" T
33	Pulau Bebalang	03°20'23.16" U	125°34'24.86" T
34	Pulau Beeng Darat	03°27'54.85" U	125°42'12.97" T
35	Pulau Beeng Laut	03°28'50.82" U	125°43'54.21" T
36	Pulau Binteluhang	03°21'17.30" U	125°35'33.98" T
37	Pulau Batumalokong	02°56'39.81" U	125°27'05.13" T
38	Pulau Buang	03°52'31.95" U	125°43'04.77" T
39	Pulau Bukide	03°47'22.89" U	125°36'20.62" T
40	Pulau Bukidebatu	03°46'48.88" U	125°36'57.28" T
41	Pulau Bukidelapango	03°23'26.79" U	125°35'18.93" T
42	Pulau Dokole	04°40'29.38" U	125°26'20.46" T
43	Pulau Dakupang	03°21'58.14" U	125°34'21.59" T
44	Pulau Dane	03°25'38.57" U	125°40'49.69" T
45	Pulau Dokole	04°13'41.34" U	125°42'00.55" T
46	Pulau Dulunge	04°44'42.52" U	125°29'26.89" T
47	Pulau Dumarehe	04°13'39.62" U	125°42'06.73" T
48	Pulau Ehise	04°38'49.20" U	125°35'59.35" T

No	Nama Pulau	Koordinat	
49	Pulau Bunakeng	03°20'57.54" U	125°35'35.67" T
50	Pulau Enggahai Besar	03°32'18.70" U	125°39'26.66" T
51	Pulau Enggahai Kecil	03°32'22.54" U	125°39'23.02" T
52	Pulau Tumbaloke	03°33'21.52" U	125°30'12.31" T
53	Pulau Hiung	03°47'25.09" U	125°37'59.06" T
54	Pulau Hompetang	03°47'03.18" U	125°38'05.87" T
55	Pulau Inise	03°48'39.99" U	125°45'29.22" T
56	Pulau Kahakitang	03°10'05.77" U	125°31'22.82" T
57	Pulau Kalama	03°14'35.56" U	125°27'34.15" T
58	Pulau Kalea	03°21'30.39" U	125°36'09.83" T
59	Pulau Kamaio	03°32'44.75" U	125°36'42.14" T
60	Pulau Kawaluso	04°13'55.80" U	125°19'28.99" T
61	Pulau Kawio	04°40'11.82" U	125°25'47.60" T
62	Pulau Kemboleng	04°39'22.79" U	125°26'09.43" T
63	Pulau Laotongang	03°02'48.57" U	125°40'56.26" T
64	Pulau Laweang	04°44'46.91" U	125°29'28.98" T
65	Pulau Lenggis	03°22'31.50" U	125°38'24.94" T
66	Pulau Liang	03°48'23.96" U	125°34'29.72" T
67	Pulau Lipaeng	03°54'42.61" U	125°23'16.27" T
68	Pulau Lungguhe	04°44'47.16" U	125°29'31.73" T
69	Pulau Mahangsumangi	03°24'41.92" U	125°34'22.64" T
70	Pulau Mahangsumangi Kadodo	03°24'41.99" U	125°34'28.03" T
71	Pulau Mahengetang	03°08'38.47" U	125°27'09.73" T
72	Pulau Mahumu	03°24'11.97" U	125°34'02.38" T
73	Pulau Mahumu Kadodo	03°24'09.68" U	125°33'20.05" T
74	Pulau Mekoahe	03°48'41.17" U	125°45'26.52" T
75	Pulau Meliha	03°49'23.37" U	125°45'27.71" T
76	Pulau Marore	04°44'08.56" U	125°29'04.58" T
77	Pulau Maseleng	03°45'18.30" U	125°45'38.15" T
78	Pulau Masetang	03°50'29.28" U	125°45'28.55" T

No	Nama Pulau	Koordinat	
79	Pulau Matutuang	04°26'05.12" U	125°41'31.40" T
80	Pulau Mamanu	04°35'22.86" U	125°37'47.28" T
81	Pulau Tentumbango Marulung	03°21'26.31" U	125°37'15.57" T
82	Pulau Mendempuge	03°21'01.77" U	125°35'50.38" T
83	Pulau Nenung	03°03'06.07" U	125°40'41.90" T
84	Pulau Nitu	03°03'41.47" U	125°29'13.01" T
85	Pulau Nusa	03°45'43.47" U	125°34'13.75" T
86	Pulau Para	03°04'38.04" U	125°30'21.77" T
87	Pulau Pemamengketang	03°36'41.04" U	125°35'21.48" T
88	Pulau Poa	03°47'45.93" U	125°33'57.01" T
89	Pulau Punge Dua	03°29'04.52" U	125°43'56.92" T
90	Pulau Punge Empat	03°28'56.58" U	125°44'18.85" T
91	Pulau Punge Enam	03°28'43.81" U	125°44'17.91" T
92	Pulau Punge Lima	03°28'49.01" U	125°44'17.03" T
93	Pulau Punge Satu	03°29'44.22" U	125°43'54.54" T
94	Pulau Punge Tiga	03°29'01.09" U	125°44'10.93" T
95	Pulau Sakede	04°44'43.55" U	125°29'29.38" T
96	Pulau Salahunge	03°35'44.19" U	125°35'18.21" T
97	Pulau Salahune	03°47'11.99" U	125°36'33.90" T
98	Pulau Saleha	03°52'11.01" U	125°43'21.71" T
99	Pulau Salengkere	03°05'47.11" U	125°29'39.26" T
100	Pulau Sambo	03°25'52.20" U	125°33'16.30" T
101	Pulau Sanggaluhang	02°56'47.00" U	125°28'43.50" T
102	Pulau Sangihe	03°33'17.11" U	125°32'56.02" T
103	Pulau Siha	03°05'38.98" U	125°28'49.26" T
104	Batu Punting	03°27'21.91" U	125°40'12.96" T
105	Pulau Tahami	03°47'19.74" U	125°35'05.02" T
106	Pulau Tapurung Talorane	03°11'26.71" U	125°30'48.89" T
107	Pulau Tarete	03°47'23.87" U	125°38'00.41" T
108	Pulau Tehang	03°32'44.75" U	125°38'25.62" T

No	Nama Pulau	Koordinat	
109	Pulau Toademanandu	03°24'39.38" U	125°31'38.55" T
110	Pulau Tonggeng Lahiaka	03°20'19.34" U	125°36'40.57" T
111	Pulau Balontohe Besar	03° 31'33.49" U	125° 39'37.53" T
112	Pulau Batu Sanggelohe	03° 15'14.10" U	125° 27'11.08" T
113	Pulau Batu Buge	03° 03'05.53" U	125° 40'44.39" T
114	Pulau Batu Bunakeng	03° 03'08.51" U	125° 40'41.62" T
115	Pulau Batu Hengise	03° 30'17.61" U	125° 39'54.90" T
116	Pulau Batu Isi	03° 29'48.66" U	125° 43'55.05" T
117	Pulau Batu Liang	03° 03'20.47" U	125° 40'31.33" T
118	Pulau Batu Luha	03° 03'40.61" U	125° 40'33.60" T
119	Pulau Batu Lungguhe	03° 03'20.13" U	125° 40'29.73" T
120	Pulau Batu Paliaheng	03° 03'06.90" U	125° 40'41.40" T
121	Pulau Bowongdeke	02° 56'08.65" U	125° 28'47.58" T
122	Pulau Liang Napoto	03° 03'26.94" U	125° 40'32.02" T
123	Pulau Lingkoko	03° 28'08.48" U	125° 39'55.36" T
124	Pulau Punge Bondole	03° 29'35.40" U	125° 43'53.11" T
125	Pulau Punge Taloara	03° 29'51.00" U	125° 43'54.99" T
126	Tahanusa Kanarung Labo	03° 11'17.22" U	125° 31'55.89" T
127	Pulau Saligo	03° 30'15.72" U	125° 39'47.66" T
128	Tahanusa Kanarung Kadio	03° 11'15.49" U	125° 31'54.86" T
129	Pulau Tapurung Labo	03° 11'23.53" U	125° 30'48.62" T
130	Pulau Toaladu	03° 28'18.21" U	125° 39'56.83" T
131	Batu Lingkusang	03°31'08.73" U	125°38'40.56" T
132	Batu Miolo	03°24'59.34" U	125°40'11.96" T
133	Batu Nolo	03°23'14.10" U	125°35'27.38" T
134	Batu Siwuhang	03°32'51.35" U	125°37'54.73" T
135	Pulau Balontohe Kadodo	03°31'41.46" U	125°39'36.00" T
136	Pulau Batu Sanggelohe	03°25'00.65" U	125°32'16.25" T
137	Pulau Bukide	03°33'50.94" U	125°30'28.29" T
138	Pulau Dagho Kadodo	03°26'16.62" U	125°34'00.52" T

No	Nama Pulau	Koordinat	
139	Pulau Kasampungang	03°29'12.77" U	125°43'53.23" T
140	Pulau Pahato	03°05'12.61" U	125°30'34.56" T
141	Pulau Sawe	03°33'15.20" U	125°38'07.11" T
142	Pulau Tahanusa	03°27'13.10" U	125°40'05.76" T
143	Tahanusa Mikawulaeng	03°30'05.82" U	125°40'08.45" T
144	Tahanusa Sasiritang	03°24'52.28" U	125°39'59.76" T
g.	**Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro**		
1	Pulau Apeng Binuni	02°06'01.66" U	125°20'34.32" T
2	Pulau Apeng Dalai	02°07'22.20" U	125°22'21.48" T
3	Pulau Bahoa Kodio Darua	02°06'12.32" U	125°24'31.50" T
4	Pulau Bahoa Kodio Simbau	02°06'11.98" U	125°24'34.04" T
5	Pulau Bahoa Kodio Tatelu	02°06'12.10" U	125°24'30.08" T
6	Pulau Batu Pulo	02°04'48.51" U	125°21'52.57" T
7	Pulau Batubalawo	02°40'04.21" U	125°25'18.07" T
8	Pulau Batubalontohe	02°41'36.51" U	125°27'41.23" T
9	Pulau Batuguhita	02°38'46.85" U	125°28'36.18" T
10	Pulau Batukasaho	02°41'19.93" U	125°22'09.47" T
11	Pulau Batumapaha	02°39'31.47" U	125°29'04.10" T
12	Pulau Batumeo	02°06'13.14" U	125°24'32.04" T
13	Pulau Batunepo	02°39'19.48" U	125°28'28.21" T
14	Pulau Batupaliaheng	02°39'38.61" U	125°28'37.05" T
15	Pulau Batupuki Sawenahe	02°48'33.82" U	125°23'30.59" T
16	Pulau Batupuki Timuhe	02°48'10.31" U	125°22'49.62" T
17	Pulau Batusalana	02°07'09.07" U	125°22'45.74" T
18	Pulau Batusenggelohe	02°39'46.95" U	125°28'32.78" T
19	Pulau Batusinggelohi	02°04'23.29" U	125°20'30.71" T
20	Pulau Batusohong	02°39'48.45" U	125°28'31.68" T
21	Pulau Batutonggeng Kanuku	02°41'05.73" U	125°23'47.12" T
22	Pulau Batutulang	02°38'55.32" U	125°29'25.43" T
23	Pulau Batuwola	02°04'18.55" U	125°20'33.76" T

No	Nama Pulau	Koordinat	
24	Pulau Biaro	02°06'13.97" U	125°22'24.37" T
25	Pulau Gunatin	02°40'56.80" U	125°27'19.61" T
26	Pulau Kalioho	02°06'50.29" U	125°24'38.14" T
27	Pulau Kapuliha	02°39'56.76" U	125°28'28.37" T
28	Pulau Lamontang	02°04'59.65" U	125°20'05.52" T
29	Pulau Laweang	02°38'43.91" U	125°28'33.10" T
30	Pulau Mahoro	02°39'09.89" U	125°29'06.74" T
31	Pulau Makalehi	02°44'07.66" U	125°10'10.92" T
32	Pulau Manumpitaeng	02°39'38.71" U	125°28'26.74" T
33	Pulau Nusa Darua Mundung Sawunahi	02° 06'16.53" U	125° 21'41.13" T
34	Pulau Nusa Darua Mundung Timuhi	02° 06'18.36" U	125° 21'41.58" T
35	Pulau Nusadarua	02°04'51.58" U	125°21'50.15" T
36	Pulau Nusadarua Mundung Sawunahi	02°04'48.81" U	125°21'52.36" T
37	Pulau Nusadarua Mundung Timuhi	02°04'48.34" U	125°21'52.94" T
38	Pulau Nusadarua Raki	02°07'19.98" U	125°22'30.06" T
39	Pulau Nusadarua Wahe	02°07'21.48" U	125°22'28.51" T
40	Pulau Pahepa	02°39'22.62" U	125°27'43.43" T
41	Pulau Pasige	02°21'21.01" U	125°18'01.05" T
42	Pulau Ruang	02°18'27.03" U	125°21'57.26" T
43	Pulau Salangka	02°07'34.41" U	125°22'06.80" T
44	Pulau Seha Kodio	02°07'16.07" U	125°20'55.96" T
45	Pulau Seha Kolabo	02°06'55.78" U	125°21'00.78" T
46	Pulau Siau	02°43'47.09" U	125°22'58.37" T
47	Pulau Singkaha	02°05'55.01" U	125°20'25.75" T
48	Pulau Tagulandang	02°20'44.94" U	125°25'08.21" T
49	Pulau Tahanusang Kambing	02°07'27.59" U	125°22'00.40" T
50	Pulau Tandukuhang	02°05'17.55" U	125°19'56.27" T
51	Pulau Tonggengnapoto	02°19'44.44" U	125°27'09.42" T
52	Pulau Tumbonang Kodio	02°06'12.15" U	125°20'32.88" T

No	Nama Pulau	Koordinat	
53	Pulau Tumbonang Kolabo	02°06'10.45" U	125°20'41.50" T
54	Pulau Tumbonang Sawenahe	02° 06'20.93" U	125° 20'37.12" T
55	Pulau Tumbonang Timuhe	02° 06'19.07" U	125° 20'37.58" T
h.	**Kabupaten Kepulauan Talaud**		
1	Pulau Garat	04°47'56.24" U	127°03'39.15" T
2	Pulau Intata	04°38'31.64" U	127°09'30.17" T
3	Pulau Kabaruan	03°47'29.19" U	126°47'36.08" T
4	Pulau Kakorotan	04°37'36.26" U	127°09'35.12" T
5	Pulau Karakelang	04°18'25.17" U	126°48'24.45" T
6	Pulau Karatung	04°43'46.07" U	127°04'22.66" T
7	Pulau Mallo	04°36'39.90" U	127°08'15.03" T
8	Pulau Mangupun	04°41'49.40" U	127°08'17.00" T
9	Pulau Marampit	04°45'11.11" U	127°07'43.38" T
10	Pulau Miangas	05°33'20.83" U	126°35'06.82" T
11	Pulau Napombarru	03°38'04.26" U	126°51'38.43" T
12	Pulau Nusamararum	04°16'59.70" U	126°41'59.32" T
13	Pulau Nusamawawo	04°16'05.17" U	126°42'39.01" T
14	Pulau Salibabu	03°55'22.33" U	126°41'12.98" T
15	Pulau Sara Besar	03°56'36.26" U	126°42'50.78" T
16	Pulau Sara Kecil	03°57'15.74" U	126°42'38.86" T
17	Batu Lumatto	04°04'06.96" U	126°48'26.33" T
18	Batu Sanggelo	04°23'24.85" U	126°51'05.76" T
19	Batu Sanggisu	04°22'10.58" U	126°51'16.92" T
i.	**Kabupaten Minahasa**		
1	Pulau Kayu	01°24'24.10" U	124°36'13.46" T
2	Pulau Likri	01°14'04.99" U	124°54'58.93" T
j.	**Kabupaten Minahasa Selatan**		
1	Pulau Benteng	01°18'47.00" U	124°30'46.00" T
2	Pulau Burung	01°18'32.15" U	124°30'43.31" T
3	Pulau Cepatu	01°18'51.66" U	124°30'45.28" T

No	Nama Pulau	Koordinat	
4	Pulau Tatapaan	01°18'01.00" U	124°30'27.00" T
k.	**Kabupaten Minahasa Tenggara**		
1	Pulau Babi	00°52'54.00" U	124°43'53.00" T
2	Pulau Babi Kecil	00°52'58.34" U	124°44'16.95" T
3	Pulau Balingbaling	00°57'36.00" U	124°54'06.99" T
4	Pulau Bangkoang	00°57'57.02" U	124°55'03.94" T
5	Pulau Belakang Kuda	00°58'42.56" U	124°55'10.81" T
6	Pulau Bentenan	00°58'25.00" U	124°54'25.99" T
7	Pulau Bohoi Besar	00°55'22.00" U	124°47'26.03" T
8	Pulau Bohoi Kecil	00°55'41.00" U	124°47'22.99" T
9	Pulau Dakokayu	00°51'47.48" U	124°44'50.56" T
10	Pulau Gomala	00°51'34.99" U	124°44'17.00" T
11	Pulau Guntur	00°56'11.48" U	124°47'17.96" T
12	Pulau Hogow	00°52'32.99" U	124°45'51.00" T
13	Pulau Kukusan	00°58'46.31" U	124°55'13.72" T
14	Pulau Pakolor	00°58'36.00" U	124°57'02.00" T
15	Pulau Punten	00°57'11.99" U	124°52'46.99" T
16	Pulau Putih	00°58'42.56" U	124°55'23.26" T
17	Pulau Putus	00°58'34.60" U	124°55'09.06" T
18	Pulau Putus Dua	00°51'46.54" U	124°44'35.03" T
19	Pulau Putus Satu	00°51'46.02" U	124°44'33.11" T
20	Pulau Putus Tiga	00°51'49.42" U	124°44'40.21" T
21	Pulau Sangkeles	00°55'03.25" U	124°47'21.35" T
22	Pulau Santigi	00°51'40.00" U	124°44'26.00" T
23	Pulau Strat Kecil	00°51'18.00" U	124°43'45.99" T
24	Pulau Tulang	00°53'24.02" U	124°46'55.51" T
25	Pulau Sangkeles Kecil	00°55'19.43" U	124°47'15.36" T
l.	**Kabupaten Minahasa Utara**		
1	Pulau Arengkambing	01°46'07.32" U	125°10'33.36" T
2	Pulau Bangka	01°47'34.68" U	125°09'01.51" T

No	Nama Pulau	Koordinat	
3	Pulau Batubesar	01°48'17.59" U	125°03'01.47" T
4	Pulau Batugosok	01°48'14.92" U	125°10'50.17" T
5	Pulau Batugurinda	01°48'01.02" U	125°11'19.15" T
6	Pulau Batugurita	01°53'09.16" U	125°05'58.80" T
7	Pulau Batukamanga	01°47'59.44" U	125°11'17.55" T
8	Pulau Batukapal	01°50'49.11" U	125°07'55.93" T
9	Pulau Batukuhia	01°44'36.41" U	125°09'39.39" T
10	Pulau Batulogas	01°20'37.00" U	125°04'41.00" T
11	Pulau Batumeja	01°20'44.44" U	125°04'38.51" T
12	Pulau Batunihaweng	01°47'16.04" U	125°11'13.72" T
13	Pulau Batunona	01°21'17.29" U	125°04'48.13" T
14	Pulau Batupandita	01°40'38.85" U	125°10'46.54" T
15	Pulau Batutatelu Tiga	01°45'58.02" U	125°10'20.44" T
16	Pulau Batutuang	01°40'38.41" U	125°07'08.59" T
17	Pulau Besi	01°45'04.50" U	124°44'56.91" T
18	Pulau Bongko	01°21'05.15" U	125°04'40.64" T
19	Pulau Bulu	01°44'29.75" U	124°45'53.02" T
20	Pulau Burung	01°21'14.07" U	125°04'47.47" T
21	Pulau Burung 8	01°42'29.11" U	124°57'34.39" T
22	Pulau Gangga	01°46'12.77" U	125°03'18.32" T
23	Pulau Kelapa Dua	01°41'50.39" U	125°01'28.98" T
24	Pulau Kelapa Satu	01°21'20.81" U	125°04'47.13" T
25	Pulau Kinabuhutan	01°50'10.40" U	125°05'46.91" T
26	Pulau Kinawuudan	01°18'40.00" U	125°04'00.00" T
27	Pulau Kineongan	01°20'20.81" U	125°04'34.08" T
28	Pulau Kolongan	01°19'56.92" U	125°04'27.19" T
29	Pulau Komang	01°38'09.24" U	125°09'27.40" T
30	Pulau Komang	01°49'49.96" U	125°05'32.56" T
31	Pulau Lidah	01°43'20.29" U	124°44'50.73" T
32	Pulau Lihaga	01°45'44.40" U	125°02'11.00" T

No	Nama Pulau	Koordinat	
33	Pulau Mandar Iii	01°42'48.04" U	124°57'25.91" T
34	Pulau Mantehage	01°42'51.51" U	124°45'32.44" T
35	Pulau Nain Besar	01°47'07.13" U	124°47'34.69" T
36	Pulau Nain Kecil	01°47'02.96" U	124°48'14.98" T
37	Pulau Napomano	01°41'15.18" U	125°02'16.54" T
38	Pulau Pananangalan	01°44'48.46" U	124°45'31.93" T
39	Pulau Paniki	01°44'25.98" U	124°44'28.54" T
40	Pulau Paniki	01°44'52.56" U	124°44'52.66" T
41	Pulau Rompong	01°41'12.27" U	124°56'30.49" T
42	Pulau Sahaung	01°44'36.50" U	125°09'25.74" T
43	Pulau Sambayang Napo	01°42'15.54" U	124°57'57.17" T
44	Pulau Sangkelohe	01°44'35.68" U	125°09'44.66" T
45	Pulau Sermela	01°18'30.16" U	125°04'04.95" T
46	Pulau Singkaha	01°40'28.64" U	125°10'34.01" T
47	Pulau Sunggile Darua	01°46'00.13" U	125°10'18.32" T
48	Pulau Sunggile Simbau	01°46'03.04" U	125°10'20.85" T
49	Pulau Sunggile Tatellu	01°45'59.92" U	125°10'18.92" T
50	Pulau Talise	01°50'36.83" U	125°04'30.61" T
51	Pulau Tapahing Napo	01°41'35.25" U	124°57'08.06" T
52	Pulau Tengkorak	01°45'02.22" U	124°44'43.72" T
53	Pulau Tindila	01°47'34.01" U	125°03'27.34" T
54	Pulau Tolabe Besar	01°41'16.25" U	125°01'20.07" T
55	Pulau Tonggenglahang Kadio	01°46'28.82" U	125°11'10.46" T
56	Pulau Tonggenglahang Labo	01°46'32.44" U	125°11'09.65" T
57	Pulau Ular Besar	01°44'00.16" U	124°44'09.19" T
58	Pulau Burung	01°38'32.61" U	125°09'51.48" T
59	Pulau Mandar	01°42'55.15" U	124°57'20.36" T
m.	**Kota Bitung**		
1	Pulau Abadi	01°26'00.32" U	125°12'19.78" T
2	Pulau Batu Sempung	01°24'14.70" U	125°10'36.73" T

No	Nama Pulau	Koordinat	
3	Pulau Batu Timbul	01°32'26.30" U	125°17'36.83" T
4	Pulau Batukapal Besar	01°32'38.60" U	125°17'40.07" T
5	Pulau Batukapal Kecil	01°33'09.35" U	125°17'39.41" T
6	Pulau Burung	01°32'20.52" U	125°17'35.96" T
7	Pulau Burung	01°29'17.27" U	125°15'22.71" T
8	Pulau Dua	01°23'22.99" U	125°12'54.00" T
9	Pulau Konde	01°23'59.40" U	125°10'07.84" T
10	Pulau Lembeh	01°25'19.09" U	125°13'52.69" T
11	Pulau Mandolang	01°24'31.47" U	125°15'26.18" T
12	Pulau Napokering	01°23'26.06" U	125°09'34.48" T
13	Pulau Oda	01°32'34.53" U	125°17'38.18" T
14	Pulau Punteng	01°36'10.62" U	125°09'51.75" T
15	Pulau Putus	01°31'22.53" U	125°16'36.47" T
16	Pulau Putus Kecil	01°31'23.57" U	125°16'40.02" T
17	Pulau Sarena Besar	01°27'36.00" U	125°13'57.00" T
18	Pulau Sarena Besar Utara	01°27'45.45" U	125°13'57.07" T
19	Pulau Sarena Kecil	01°27'21.12" U	125°13'27.17" T
20	Pulau Sarena Kecil Selatan	01°27'16.79" U	125°13'26.24" T
21	Pulau Sarena Kecil Timur	01°27'21.36" U	125°13'36.66" T
22	Pulau Sarena Kecil Utara	01°27'23.77" U	125°13'32.24" T
23	Pulau Susulina	01°31'00.89" U	125°16'57.29" T
24	Batu Menipi	01°26'52.49" U	125°15'46.80" T
25	Batu Tengah	01°30'22.23" U	125°14'46.68" T
26	Batu Timbul	01°25'28.55" U	125°10'59.71" T
27	Pulau Burung	01°26'56.96" U	125°15'52.56" T
28	Pulau Dua	01°28'50.99" U	125°14'19.32" T
29	Pulau Mangrove	01°30'27.76" U	125°14'50.28" T
30	Pulau Pakelu Asu	01°28'50.40" U	125°16'50.52" T
31	Pulau Sarena Kecil Selatan	01°27'36.64" U	125°13'51.24" T
32	Pulau Sarena Kecil Utara	01°27'39.44" U	125°14'05.28" T

No	Nama Pulau	Koordinat	
33	Pulau Tanjungkeker	01°26'17.58" U	125°15'42.04" T
34	Pulau Tanjungtebal Besar	01°26'30.93" U	125°15'46.80" T
35	Pulau Tanjungtebal Kecil	01°26'31.39" U	125°15'45.36" T
36	Pulau Tarsius	01°30'32.05" U	125°14'54.24" T
n.	**Kota Manado**		
1	Pulau Bunaken	01°37'22.75" U	124°45'54.87" T
2	Pulau Manado Tua	01°37'59.56" U	124°41'49.46" T
3	Pulau Siladen	01°37'51.55" U	124°48'09.31" T

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

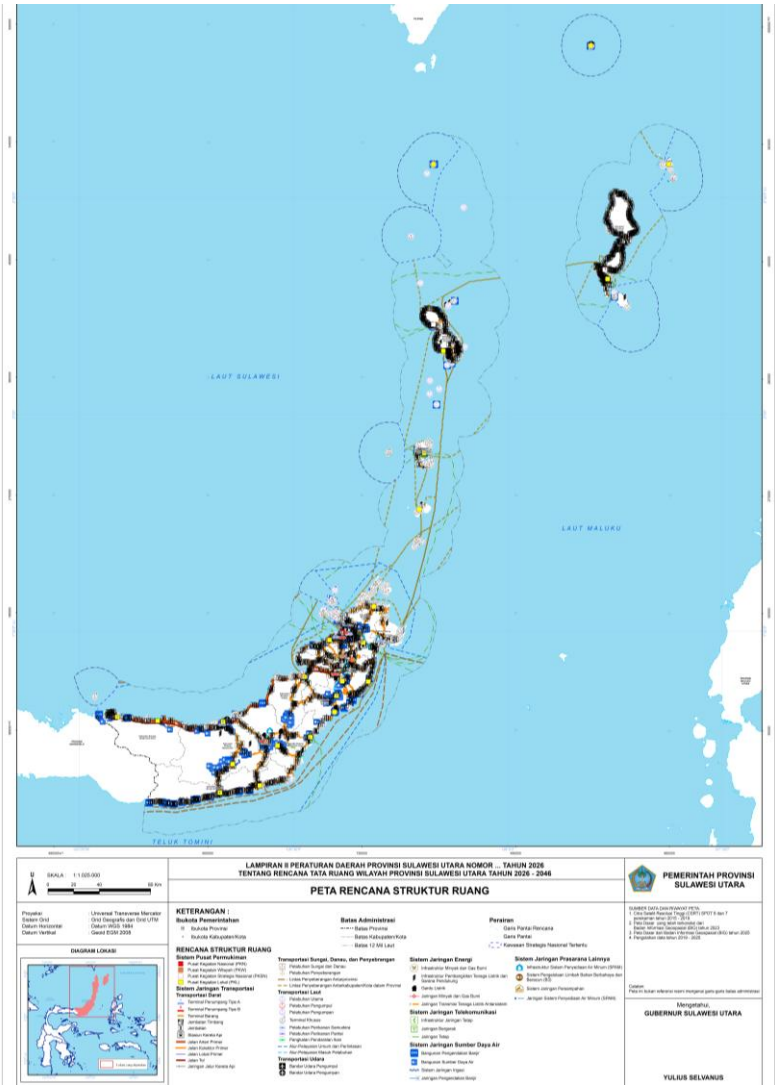

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

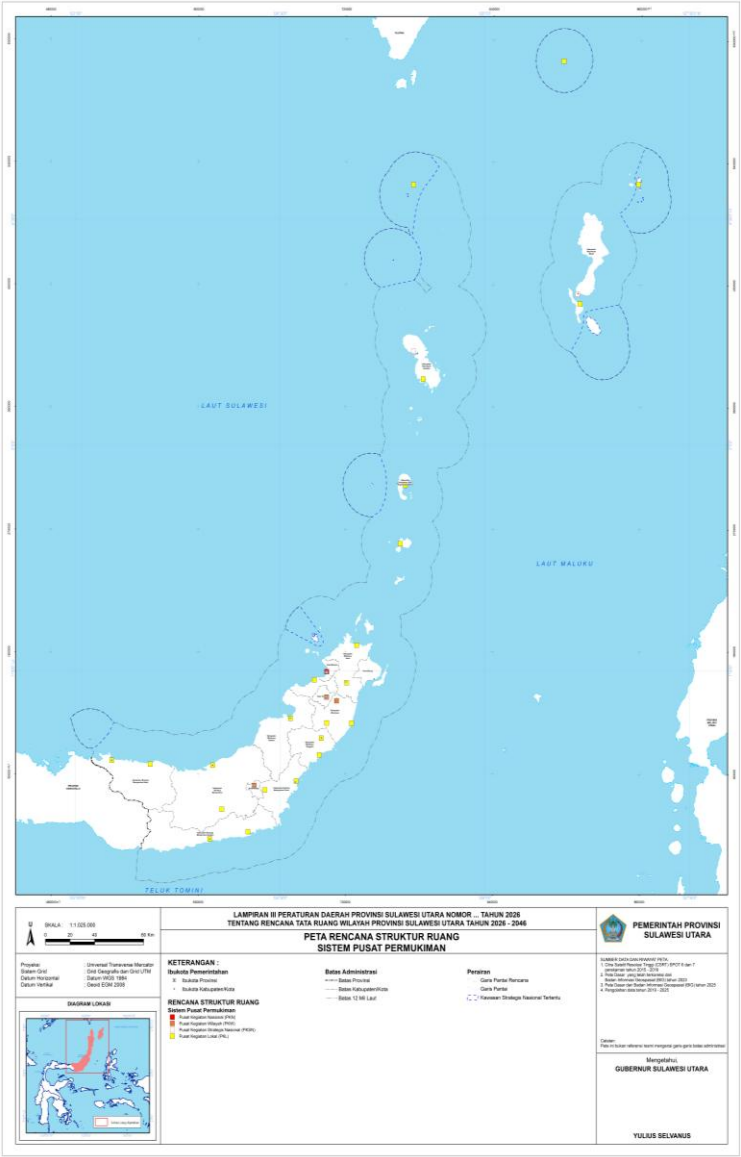

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

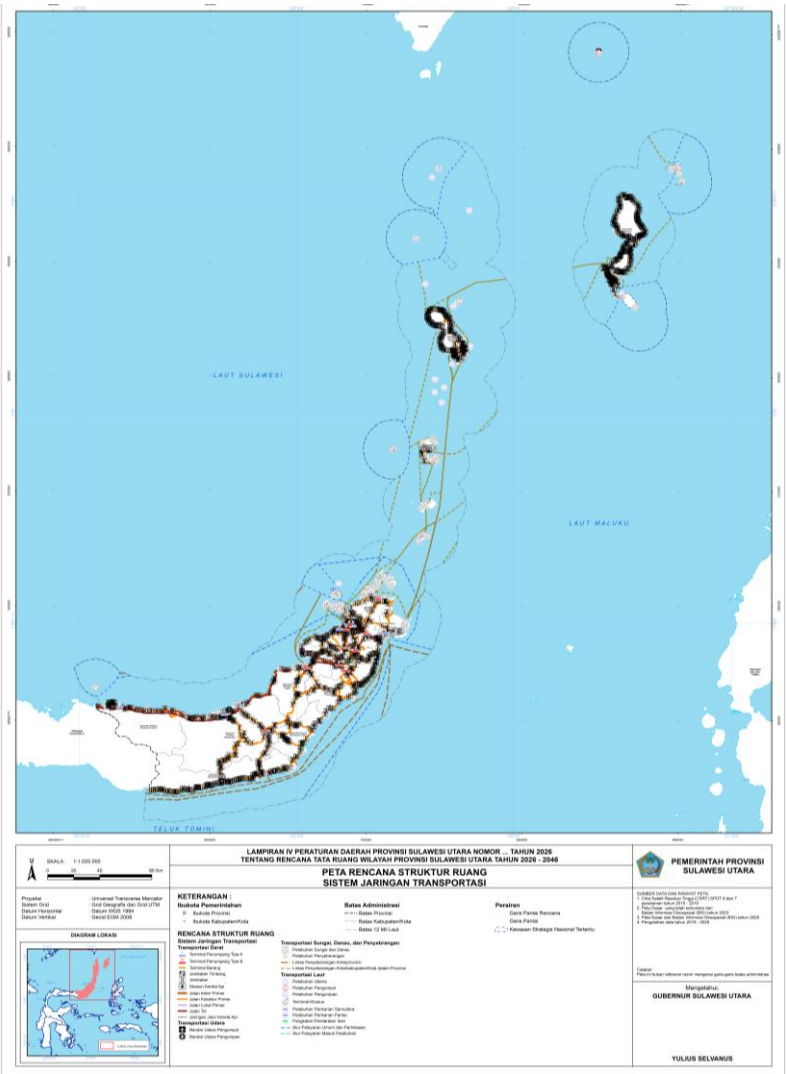

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

JEMBATAN

No.	Nama Jembatan	Lokasi
1	jembatan Montayangan XII	Kabupaten Bolaang Mongondow
2	jembatan Montayangan I	Kabupaten Bolaang Mongondow
3	jembatan Uuan	Kabupaten Bolaang Mongondow
4	jembatan Ikwan II	Kabupaten Bolaang Mongondow
5	jembatan Uuan 3	Kabupaten Bolaang Mongondow
6	jembatan Tongsile II	Kabupaten Bolaang Mongondow
7	jembatan Ikwan I	Kabupaten Bolaang Mongondow
8	jembatan Tongile	Kabupaten Bolaang Mongondow
9	jembatan Kuait	Kabupaten Bolaang Mongondow
10	jembatan Uuan 2	Kabupaten Bolaang Mongondow
11	jembatan Uuan 1	Kabupaten Bolaang Mongondow
12	jembatan Kasio	Kabupaten Bolaang Mongondow
13	jembatan Werdi Agung 3	Kabupaten Bolaang Mongondow
14	jembatan Werdi Agung 2	Kabupaten Bolaang Mongondow
15	jembatan Ibolian	Kabupaten Bolaang Mongondow
16	jembatan Werdi Agung 1	Kabupaten Bolaang Mongondow
17	jembatan Pinaingan	Kabupaten Bolaang Mongondow
18	jembatan Mogoyunggun	Kabupaten Bolaang Mongondow
19	jembatan Imandi 2	Kabupaten Bolaang Mongondow
20	jembatan Osiosing I	Kabupaten Bolaang Mongondow
21	jembatan Osiosing	Kabupaten Bolaang Mongondow
22	jembatan Imandi 1	Kabupaten Bolaang Mongondow
23	jembatan Mosingongoi	Kabupaten Bolaang Mongondow
24	jembatan Dumoga	Kabupaten Bolaang Mongondow
25	jembatan Boyaya	Kabupaten Bolaang Mongondow
26	jembatan Siniung I	Kabupaten Bolaang Mongondow
27	jembatan Sikala 1	Kabupaten Bolaang Mongondow
28	jembatan Yoyapan	Kabupaten Bolaang Mongondow
29	jembatan Siniung 1	Kabupaten Bolaang Mongondow
30	jembatan Pusian	Kabupaten Bolaang Mongondow
31	jembatan Molong	Kabupaten Bolaang Mongondow
32	jembatan Ponompiaan	Kabupaten Bolaang Mongondow
33	jembatan Ponompiaan I	Kabupaten Bolaang Mongondow
34	jembatan Mopait	Kabupaten Bolaang Mongondow
35	jembatan Ikarat	Kabupaten Bolaang Mongondow
36	jembatan Ikarat I	Kabupaten Bolaang Mongondow
37	jembatan Siniung 2	Kabupaten Bolaang Mongondow
38	jembatan Serasi	Kabupaten Bolaang Mongondow
39	jembatan Ampera	Kabupaten Bolaang Mongondow
40	jembatan Wotu	Kabupaten Bolaang Mongondow
41	jembatan Lobong	Kabupaten Bolaang Mongondow
42	jembatan Totabuan I	Kabupaten Bolaang Mongondow
43	jembatan Muntoi	Kabupaten Bolaang Mongondow
44	jembatan Muntoi I	Kabupaten Bolaang Mongondow
45	jembatan Pangian	Kabupaten Bolaang Mongondow

No.	Nama Jembatan	Lokasi
46	jembatan Poopo	Kabupaten Bolaang Mongondow
47	jembatan Inuai	Kabupaten Bolaang Mongondow
48	jembatan Insil	Kabupaten Bolaang Mongondow
49	jembatan Totabuan	Kabupaten Bolaang Mongondow
50	jembatan Komangan	Kabupaten Bolaang Mongondow
51	jembatan Mawu	Kabupaten Bolaang Mongondow
52	jembatan Ilotoka I	Kabupaten Bolaang Mongondow
53	jembatan Ilotoka	Kabupaten Bolaang Mongondow
54	jembatan Moyut	Kabupaten Bolaang Mongondow
55	jembatan Bolangat I	Kabupaten Bolaang Mongondow
56	jembatan Bolangat II	Kabupaten Bolaang Mongondow
57	jembatan Pindolili II	Kabupaten Bolaang Mongondow
58	jembatan Pindolili I	Kabupaten Bolaang Mongondow
59	jembatan Domisil Kecil	Kabupaten Bolaang Mongondow
60	jembatan Pindolili	Kabupaten Bolaang Mongondow
61	jembatan Pinogaluman 1	Kabupaten Bolaang Mongondow
62	jembatan Domisil II A	Kabupaten Bolaang Mongondow
63	jembatan Domisil II B	Kabupaten Bolaang Mongondow
64	jembatan Domisil I	Kabupaten Bolaang Mongondow
65	jembatan Sapanae	Kabupaten Bolaang Mongondow
66	jembatan Maelang	Kabupaten Bolaang Mongondow
67	jembatan Batu Merah II	Kabupaten Bolaang Mongondow
68	jembatan Pangi Kecil	Kabupaten Bolaang Mongondow
69	jembatan Pinogaluman - Dumoga	Kabupaten Bolaang Mongondow
70	jembatan Batu Merah I	Kabupaten Bolaang Mongondow
71	jembatan Pinogaluman - Doloduo I	Kabupaten Bolaang Mongondow
72	jembatan Kokole	Kabupaten Bolaang Mongondow
73	jembatan Baturapa	Kabupaten Bolaang Mongondow
74	jembatan Ayong	Kabupaten Bolaang Mongondow
75	jembatan Sauk	Kabupaten Bolaang Mongondow
76	jembatan Baya Buta	Kabupaten Bolaang Mongondow
77	jembatan Pasir Putih	Kabupaten Bolaang Mongondow
78	jembatan Pusingkia	Kabupaten Bolaang Mongondow
79	jembatan Babo	Kabupaten Bolaang Mongondow
80	jembatan Air Jatuh	Kabupaten Bolaang Mongondow
81	jembatan Pangi	Kabupaten Bolaang Mongondow
82	jembatan Sikala I	Kabupaten Bolaang Mongondow
83	jembatan Tobang	Kabupaten Bolaang Mongondow
84	jembatan Pinogaluman 2	Kabupaten Bolaang Mongondow
85	jembatan Sikala 2	Kabupaten Bolaang Mongondow
86	jembatan Labuan Uki	Kabupaten Bolaang Mongondow
87	jembatan Gora	Kabupaten Bolaang Mongondow
88	jembatan Mayambak	Kabupaten Bolaang Mongondow
89	jembatan Dulangon	Kabupaten Bolaang Mongondow
90	jembatan Lobong 1	Kabupaten Bolaang Mongondow
91	jembatan Wotu I	Kabupaten Bolaang Mongondow
92	jembatan Ampera I	Kabupaten Bolaang Mongondow
93	jembatan Sapa IBU	Kabupaten Bolaang Mongondow
94	jembatan Mongkoinit	Kabupaten Bolaang Mongondow
95	jembatan Tuyat	Kabupaten Bolaang Mongondow
96	jembatan Air Diam	Kabupaten Bolaang Mongondow
97	jembatan Maindang	Kabupaten Bolaang Mongondow
98	jembatan Lolak A	Kabupaten Bolaang Mongondow
99	jembatan Lolak B	Kabupaten Bolaang Mongondow

No.	Nama Jembatan	Lokasi
100	jembatan Inoba 1	Kabupaten Bolaang Mongondow
101	jembatan Lalow	Kabupaten Bolaang Mongondow
102	jembatan Lolak I	Kabupaten Bolaang Mongondow
103	jembatan Kaiya	Kabupaten Bolaang Mongondow
104	jembatan Tadoy	Kabupaten Bolaang Mongondow
105	jembatan Lolan	Kabupaten Bolaang Mongondow
106	jembatan Nonapan II	Kabupaten Bolaang Mongondow
107	jembatan Nonapan I	Kabupaten Bolaang Mongondow
108	jembatan Lubuk	Kabupaten Bolaang Mongondow
109	jembatan Poigar	Kabupaten Bolaang Mongondow
110	jembatan Pangia	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
111	jembatan Sinombayuga I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
112	jembatan Inosota	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
113	jembatan Sinombayuga III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
114	jembatan Sinombayuga II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
115	jembatan Luwoo I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
116	jembatan Luwoo II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
117	jembatan Pilolahunga	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
118	jembatan Luwoo III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
119	jembatan Motolahu	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
120	jembatan Lion	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
121	jembatan Pakuku II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
122	jembatan Botuliodu	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
123	jembatan Tolutu	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
124	jembatan Seibua III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
125	jembatan Seibua II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
126	jembatan Seibua I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
127	jembatan Manggadaa	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
128	jembatan Pangia I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
129	jembatan Tolutu III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
130	jembatan Mamalia IV	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
131	jembatan Pakuku I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
132	jembatan Hutonga I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
133	jembatan Tolutu II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
134	jembatan Nunuka	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
135	jembatan Mamalia III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
136	jembatan Mamalia I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
137	jembatan Mamalia II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
138	jembatan Mayambanga II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
139	jembatan Mayambanga I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
140	jembatan Milangodaa	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
141	jembatan Soputa II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
142	jembatan Molalahu	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
143	jembatan Soputa I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
144	jembatan Bakida	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
145	jembatan Duminanga	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
146	jembatan Sinandaka	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
147	jembatan Sinandaka II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
148	jembatan Molalahu II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
149	jembatan Sinandaka I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
150	jembatan Bineha V	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
151	jembatan Bineha IV	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
152	jembatan Tangaga II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
153	jembatan Tangaga III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No.	Nama Jembatan	Lokasi
154	jembatan Dudepo II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
155	jembatan Tangaga I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
156	jembatan Bineha III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
157	jembatan Dudepo I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
158	jembatan Bineha I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
159	jembatan Bineha II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
160	jembatan Bilantungan II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
161	jembatan Salongo III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
162	jembatan Kompe I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
163	jembatan Kompe II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
164	jembatan Salongo Timur	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
165	jembatan Tabilaa V	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
166	jembatan Popodu	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
167	jembatan Tabilaa IV	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
168	jembatan Tolondadu 2	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
169	jembatan Tolondadu 1	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
170	jembatan Salongo I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
171	jembatan Salongo II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
172	jembatan Tabilaa III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
173	jembatan Tolundadu I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
174	jembatan Batu Hamba III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
175	jembatan Toluaya II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
176	jembatan Toluaya I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
177	jembatan Air Panas	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
178	jembatan Inawan III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
179	jembatan Tolundadu	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
180	jembatan Inawan I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
181	jembatan Linawan III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
182	jembatan Linawan I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
183	jembatan Nunuk II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
184	jembatan Kombot II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
185	jembatan Molibagu	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
186	jembatan Nunuk I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
187	jembatan Nunuk	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
188	jembatan S.Lungkap	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
189	jembatan Tolontoyon II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
190	jembatan Kombot	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
191	jembatan Tolontoyon III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
192	jembatan Pinolosian	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
193	jembatan Kombot I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
194	jembatan Lungkap III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
195	jembatan Tolontoyon I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
196	jembatan Lungkap II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
197	jembatan Lungkap I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
198	jembatan Montayangan XI	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
199	jembatan Montayangan X	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
200	jembatan Tapa Binuni	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
201	jembatan Balangaso	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
202	jembatan Totoka II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
203	jembatan Mataindo	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
204	jembatan Boyongkasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
205	jembatan Totoka I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
206	jembatan Ilangsot III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
207	jembatan Torosik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

No.	Nama Jembatan	Lokasi
208	jembatan Torosik I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
209	jembatan Ilangsot II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
210	jembatan Mataindo I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
211	jembatan Gentung	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
212	jembatan Ilangsot I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
213	jembatan Tapa Mosolag	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
214	jembatan S.Tobayangan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
215	jembatan Kuala Asam	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
216	jembatan Adou	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
217	jembatan Adou I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
218	jembatan Tobayagan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
219	jembatan Binolang	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
220	jembatan Matandoi VI	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
221	jembatan Matandoi IV	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
222	jembatan Matandoi V	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
223	jembatan Londuk	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
224	jembatan Matandoi III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
225	jembatan Matandoi I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
226	jembatan Dumagin I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
227	jembatan Matandoi II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
228	jembatan Dumagin II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
229	jembatan Bunong II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
230	jembatan Modisi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
231	jembatan Onggunoi I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
232	jembatan Bunong I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
233	jembatan Polipik I	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
234	jembatan Polipik	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
235	jembatan Posilangon IV	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
236	jembatan Onggunoi II	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
237	jembatan Musolang	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
238	jembatan Tongsile V	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
239	jembatan Tongsile IV	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
240	jembatan Tonsile III	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
241	jembatan Posilangon	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
242	jembatan Matabulu III	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
243	jembatan Pakoba I	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
244	jembatan Deaga	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
245	jembatan Matabulu I	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
246	jembatan Matabulu II	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
247	jembatan Nuangan III	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
248	jembatan Nuangan II	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
249	jembatan Nuangan I	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
250	jembatan Molobog IV	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
251	jembatan Molobog III	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
252	jembatan Molobog I	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
253	jembatan Molobog II	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
254	jembatan Lanut I	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
255	jembatan Lanut	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
256	jembatan Badaro IV	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
257	jembatan Badaro III	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
258	jembatan Badaro II	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
259	jembatan Badaro I	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
260	jembatan Tobongon V	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
261	jembatan Tobongon III	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No.	Nama Jembatan	Lokasi
262	jembatan Tobongon IV	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
263	jembatan Motongkat I	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
264	jembatan Tobongon II	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
265	jembatan Tobongon I	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
266	jembatan Kali Putih II	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
267	jembatan Kali Putih I	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
268	jembatan Kali Putih	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
269	jembatan Inatonn	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
270	jembatan Togit I	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
271	jembatan Togit	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
272	jembatan Togid	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
273	jembatan Tutuyan	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
274	jembatan Tombolikat	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
275	jembatan Kakenturan Barat	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
276	jembatan Kokapoy I	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
277	jembatan Kokapoy II	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
278	jembatan Kokapoy IV	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
279	jembatan Kokapoy III	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
280	jembatan Kokapoy	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
281	jembatan Dongo	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
282	jembatan Kayumayondi	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
283	jembatan Kotabunan II	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
284	jembatan Kotabunan I	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
285	jembatan Bulawan	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
286	jembatan Sang	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
287	jembatan Kuhanga	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
288	jembatan Pono-Pono	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
289	jembatan Binjeita	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
290	jembatan Bohabak	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
291	jembatan Kuhanga I	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
292	jembatan Sangkup Kecil	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
293	jembatan Motumping	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
294	jembatan Biontong	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
295	jembatan Binuanga	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
296	jembatan Saleo	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
297	jembatan Nunuka	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
298	jembatan Jambu Sarang	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
299	jembatan Sunuo	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
300	jembatan Sangkup	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
301	jembatan Komus 1	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
302	jembatan Wakat III	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
303	jembatan Wakat IV	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
304	jembatan Tote II	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
305	jembatan Tote III	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
306	jembatan Keakar	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
307	jembatan Wuwuo	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
308	jembatan Komus II 1	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
309	jembatan Tuntung	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
310	jembatan Inomunga	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
311	jembatan Dengi	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
312	jembatan Komus IV	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
313	jembatan Komus III	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
314	jembatan Inomunga I	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
315	jembatan Komus II 2	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Nama Jembatan	Lokasi
316	jembatan Komus I	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
317	jembatan Komus	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
318	jembatan Inomunga Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
319	jembatan Solo II	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
320	jembatan Solo III	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
321	jembatan Solo V	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
322	jembatan Solo	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
323	jembatan Solo I	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
324	jembatan Solo IV	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
325	jembatan Inomunga Utara II	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
326	jembatan Inomunga Utara I	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
327	jembatan Inomunga Utara III	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
328	jembatan Sowaeng I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
329	jembatan Sowaeng II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
330	jembatan Ngalipaeng I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
331	jembatan Ngalipaeng II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
332	jembatan Lehimi Tariang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
333	jembatan Kitareng	Kabupaten Kepulauan Sangihe
334	jembatan Hadakele	Kabupaten Kepulauan Sangihe
335	jembatan Matenggahe II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
336	jembatan Matenggahe I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
337	jembatan Bawuniang IV	Kabupaten Kepulauan Sangihe
338	jembatan Bawuniang III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
339	jembatan Bawuniang II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
340	jembatan Katawakeng VII	Kabupaten Kepulauan Sangihe
341	jembatan Katawakeng VI	Kabupaten Kepulauan Sangihe
342	jembatan Katawakeng V	Kabupaten Kepulauan Sangihe
343	jembatan Katawakeng IV	Kabupaten Kepulauan Sangihe
344	jembatan Katawakeng III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
345	jembatan Katawakeng I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
346	jembatan Katawakeng II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
347	jembatan Mawira II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
348	jembatan Lapepahe II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
349	jembatan Lapepahe I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
350	jembatan Mawira III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
351	jembatan Sampakang II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
352	jembatan Tawara Laine	Kabupaten Kepulauan Sangihe
353	jembatan Tempohe II Laine	Kabupaten Kepulauan Sangihe
354	jembatan Sampakang III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
355	jembatan Tempohe I Laine	Kabupaten Kepulauan Sangihe
356	jembatan Laine II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
357	jembatan Sampakang IV	Kabupaten Kepulauan Sangihe
358	jembatan Laine I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
359	jembatan Sampakang V	Kabupaten Kepulauan Sangihe
360	jembatan Bitung II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
361	jembatan Karalung II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
362	jembatan Karalung III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
363	jembatan Lehase	Kabupaten Kepulauan Sangihe
364	jembatan Pananaru II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
365	jembatan Kaluwatu II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
366	jembatan Tatilane II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
367	jembatan Kaluwatu III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
368	jembatan Dagho	Kabupaten Kepulauan Sangihe
369	jembatan Kalinda I	Kabupaten Kepulauan Sangihe

No.	Nama Jembatan	Lokasi
370	jembatan Bitung I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
371	jembatan Kaluwatu I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
372	jembatan Pindang Apeng	Kabupaten Kepulauan Sangihe
373	jembatan Saweba	Kabupaten Kepulauan Sangihe
374	jembatan Mala IV 1	Kabupaten Kepulauan Sangihe
375	jembatan Mala III 1	Kabupaten Kepulauan Sangihe
376	jembatan Karalung I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
377	jembatan Tatilade	Kabupaten Kepulauan Sangihe
378	jembatan Mala V 1	Kabupaten Kepulauan Sangihe
379	jembatan Pintareng 1	Kabupaten Kepulauan Sangihe
380	jembatan Mala II 1	Kabupaten Kepulauan Sangihe
381	jembatan Menggawa	Kabupaten Kepulauan Sangihe
382	jembatan Dolokaweng	Kabupaten Kepulauan Sangihe
383	jembatan Mala I 1	Kabupaten Kepulauan Sangihe
384	jembatan Pintareng 2	Kabupaten Kepulauan Sangihe
385	jembatan Aha Patung III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
386	jembatan Laine 1	Kabupaten Kepulauan Sangihe
387	jembatan Tambung I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
388	jembatan Tambung II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
389	jembatan Aha Patung II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
390	jembatan Baluntas	Kabupaten Kepulauan Sangihe
391	jembatan Bawatas Manimbu	Kabupaten Kepulauan Sangihe
392	jembatan Baluntas Marani	Kabupaten Kepulauan Sangihe
393	jembatan Tamakok.Cina	Kabupaten Kepulauan Sangihe
394	jembatan Tambung III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
395	jembatan Balao	Kabupaten Kepulauan Sangihe
396	jembatan Naga Satu I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
397	jembatan Aha Patung I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
398	jembatan Tenda	Kabupaten Kepulauan Sangihe
399	jembatan Naga Dua III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
400	jembatan Naga Dua II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
401	jembatan Naga Dua I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
402	jembatan Salarung I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
403	jembatan Barangkalang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
404	jembatan Salarung II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
405	jembatan Bulade II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
406	jembatan Malamenggu I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
407	jembatan Binebas I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
408	jembatan Lesang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
409	jembatan Binebas II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
410	jembatan Malamenggu II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
411	jembatan Binebas III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
412	jembatan Binebas IV	Kabupaten Kepulauan Sangihe
413	jembatan Belengan I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
414	jembatan Pokole	Kabupaten Kepulauan Sangihe
415	jembatan Lebo	Kabupaten Kepulauan Sangihe
416	jembatan Tiwelo I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
417	jembatan Tiwelo	Kabupaten Kepulauan Sangihe
418	jembatan Banala	Kabupaten Kepulauan Sangihe
419	jembatan Manalu	Kabupaten Kepulauan Sangihe
420	jembatan Sesiung	Kabupaten Kepulauan Sangihe
421	jembatan Bentung	Kabupaten Kepulauan Sangihe
422	jembatan Liwase	Kabupaten Kepulauan Sangihe
423	jembatan Kauhis IV	Kabupaten Kepulauan Sangihe

No.	Nama Jembatan	Lokasi
424	jembatan Kauhis III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
425	jembatan Kauhis II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
426	jembatan Kauhis I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
427	jembatan Simueng	Kabupaten Kepulauan Sangihe
428	jembatan Bahoi	Kabupaten Kepulauan Sangihe
429	jembatan Karelung	Kabupaten Kepulauan Sangihe
430	jembatan Enggohang III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
431	jembatan Enggohang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
432	jembatan Kulur I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
433	jembatan Tanamahamu	Kabupaten Kepulauan Sangihe
434	jembatan Kulur II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
435	jembatan Mala 1	Kabupaten Kepulauan Sangihe
436	jembatan Henda	Kabupaten Kepulauan Sangihe
437	jembatan Mengkong	Kabupaten Kepulauan Sangihe
438	jembatan Kuma	Kabupaten Kepulauan Sangihe
439	jembatan Miulu I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
440	jembatan Miulu II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
441	jembatan Miulu III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
442	jembatan Damalihade	Kabupaten Kepulauan Sangihe
443	jembatan Mahempasaeng I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
444	jembatan Mahempasaeng II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
445	jembatan Talengan	Kabupaten Kepulauan Sangihe
446	jembatan Tapuang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
447	jembatan Lengko	Kabupaten Kepulauan Sangihe
448	jembatan Mandaling	Kabupaten Kepulauan Sangihe
449	jembatan Tidore	Kabupaten Kepulauan Sangihe
450	jembatan Biru Base	Kabupaten Kepulauan Sangihe
451	jembatan Makawang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
452	jembatan Akembuala	Kabupaten Kepulauan Sangihe
453	jembatan Malebur I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
454	jembatan Lahar Malebur	Kabupaten Kepulauan Sangihe
455	jembatan Mala 2	Kabupaten Kepulauan Sangihe
456	jembatan Angges	Kabupaten Kepulauan Sangihe
457	jembatan Lahar Angges	Kabupaten Kepulauan Sangihe
458	jembatan Mahena	Kabupaten Kepulauan Sangihe
459	jembatan Lengkuase	Kabupaten Kepulauan Sangihe
460	jembatan Mitung I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
461	jembatan Mitung	Kabupaten Kepulauan Sangihe
462	jembatan Daripa	Kabupaten Kepulauan Sangihe
463	jembatan Sensong	Kabupaten Kepulauan Sangihe
464	jembatan Buwong	Kabupaten Kepulauan Sangihe
465	jembatan Malebur II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
466	jembatan Malebur	Kabupaten Kepulauan Sangihe
467	jembatan Sensong 1	Kabupaten Kepulauan Sangihe
468	jembatan Akembawi III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
469	jembatan Akembawi I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
470	jembatan Akembawi II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
471	jembatan S.Biawang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
472	jembatan Malebur III	Kabupaten Kepulauan Sangihe
473	jembatan Metik	Kabupaten Kepulauan Sangihe
474	jembatan S. Tonggeng	Kabupaten Kepulauan Sangihe
475	jembatan Mentaki	Kabupaten Kepulauan Sangihe
476	jembatan Mitung II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
477	jembatan Masalihe	Kabupaten Kepulauan Sangihe

No.	Nama Jembatan	Lokasi
478	jembatan Ruha	Kabupaten Kepulauan Sangihe
479	jembatan Kakewang II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
480	jembatan Maseko II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
481	jembatan Kakewang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
482	jembatan Raku	Kabupaten Kepulauan Sangihe
483	jembatan Moronge	Kabupaten Kepulauan Sangihe
484	jembatan Huang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
485	jembatan Maselihe I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
486	jembatan Naha	Kabupaten Kepulauan Sangihe
487	jembatan Kembung	Kabupaten Kepulauan Sangihe
488	jembatan Laine 2	Kabupaten Kepulauan Sangihe
489	jembatan Sahabe Kembung I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
490	jembatan Balo Tilade	Kabupaten Kepulauan Sangihe
491	jembatan Biwai I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
492	jembatan Pondole	Kabupaten Kepulauan Sangihe
493	jembatan Hego	Kabupaten Kepulauan Sangihe
494	jembatan Naha 2	Kabupaten Kepulauan Sangihe
495	jembatan Kendahe	Kabupaten Kepulauan Sangihe
496	jembatan Pempanikiang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
497	jembatan Lahar Naha	Kabupaten Kepulauan Sangihe
498	jembatan Bunga I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
499	jembatan Kalasuge (S) Kalakube	Kabupaten Kepulauan Sangihe
500	jembatan Lahar Mala	Kabupaten Kepulauan Sangihe
501	jembatan Mala I 2	Kabupaten Kepulauan Sangihe
502	jembatan Mala II 2	Kabupaten Kepulauan Sangihe
503	jembatan Tariang Pasebang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
504	jembatan Talawid	Kabupaten Kepulauan Sangihe
505	jembatan Mala VI	Kabupaten Kepulauan Sangihe
506	jembatan Bunane	Kabupaten Kepulauan Sangihe
507	jembatan Matane	Kabupaten Kepulauan Sangihe
508	jembatan Mala III 2	Kabupaten Kepulauan Sangihe
509	jembatan Mala III.1	Kabupaten Kepulauan Sangihe
510	jembatan Mala IV 2	Kabupaten Kepulauan Sangihe
511	jembatan Mala V 2	Kabupaten Kepulauan Sangihe
512	jembatan Salumerendung	Kabupaten Kepulauan Sangihe
513	jembatan Salupongo	Kabupaten Kepulauan Sangihe
514	jembatan Tawiro	Kabupaten Kepulauan Sangihe
515	jembatan Bahu II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
516	jembatan Bahu I	Kabupaten Kepulauan Sangihe
517	jembatan Lahar Kalasuge	Kabupaten Kepulauan Sangihe
518	jembatan Kalasuge II	Kabupaten Kepulauan Sangihe
519	jembatan Biwai	Kabupaten Kepulauan Sangihe
520	jembatan Batumuhamu	Kabupaten Kepulauan Sangihe
521	jembatan Pampalaraeng	Kabupaten Kepulauan Sangihe
522	jembatan Talawid II	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
523	jembatan Talawid I	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
524	jembatan Ondong V	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
525	jembatan Ondong IV	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
526	jembatan Ondong III	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
527	jembatan Ulu V	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

No.	Nama Jembatan	Lokasi
528	jembatan Ulu IV	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
529	jembatan Ulu III	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
530	jembatan Ondong II	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
531	jembatan Ulu II	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
532	jembatan Ulu I	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
533	jembatan Paniki Ondong	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
534	jembatan Bebali	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
535	jembatan Batu Awang	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
536	jembatan Ulu VII	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
537	jembatan Panding	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
538	jembatan S. Bitunuris	Kabupaten Kepulauan Talaud
539	jembatan S. Pelong 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
540	jembatan S. Pelong 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
541	jembatan Buluda	Kabupaten Kepulauan Talaud
542	jembatan S. Morsel	Kabupaten Kepulauan Talaud
543	jembatan S. Lentean	Kabupaten Kepulauan Talaud
544	jembatan S. Nonem	Kabupaten Kepulauan Talaud
545	jembatan S. Sarabengko	Kabupaten Kepulauan Talaud
546	jembatan S. Balang 3	Kabupaten Kepulauan Talaud
547	jembatan S. Balang 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
548	jembatan S. Dingkaren II	Kabupaten Kepulauan Talaud
549	jembatan S. Dingkaren I	Kabupaten Kepulauan Talaud
550	jembatan S. Lingkaren	Kabupaten Kepulauan Talaud
551	jembatan S. Balang 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
552	jembatan S. Lirung 3	Kabupaten Kepulauan Talaud
553	jembatan S. Balang	Kabupaten Kepulauan Talaud
554	jembatan S. Tibo 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
555	jembatan S. Tibo 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
556	jembatan S. Lirung 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
557	jembatan S. Andeta	Kabupaten Kepulauan Talaud
558	jembatan S. Binanga	Kabupaten Kepulauan Talaud
559	jembatan Lirung 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
560	jembatan S. Bunne	Kabupaten Kepulauan Talaud
561	jembatan S. Linturan	Kabupaten Kepulauan Talaud
562	jembatan S. Lu'a	Kabupaten Kepulauan Talaud
563	jembatan Lirung	Kabupaten Kepulauan Talaud
564	jembatan S. Wallat	Kabupaten Kepulauan Talaud
565	jembatan S. Maruut	Kabupaten Kepulauan Talaud
566	jembatan S. Bukit 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
567	jembatan S. Bukit 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
568	jembatan S. Lendo	Kabupaten Kepulauan Talaud
569	jembatan S. Alo	Kabupaten Kepulauan Talaud
570	jembatan S. Babarru	Kabupaten Kepulauan Talaud
571	jembatan S. Musi	Kabupaten Kepulauan Talaud
572	jembatan S. Lalenes	Kabupaten Kepulauan Talaud
573	jembatan S. Papatu'u	Kabupaten Kepulauan Talaud
574	jembatan S. Ailuan	Kabupaten Kepulauan Talaud

No.	Nama Jembatan	Lokasi
575	jembatan S. Maman'nu	Kabupaten Kepulauan Talaud
576	jembatan S. Balak Tua	Kabupaten Kepulauan Talaud
577	jembatan S. Alarum	Kabupaten Kepulauan Talaud
578	jembatan S. Salosoga	Kabupaten Kepulauan Talaud
579	jembatan S. Rarang	Kabupaten Kepulauan Talaud
580	jembatan S. Rarang 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
581	jembatan S. Basian 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
582	jembatan S. Basian 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
583	jembatan S. Sisip	Kabupaten Kepulauan Talaud
584	jembatan Awawana	Kabupaten Kepulauan Talaud
585	jembatan Moasi	Kabupaten Kepulauan Talaud
586	jembatan Arangio	Kabupaten Kepulauan Talaud
587	jembatan Bulo 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
588	jembatan S. Mangamboreng 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
589	jembatan S. Mangamboreng 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
590	jembatan Amituan	Kabupaten Kepulauan Talaud
591	jembatan Guil	Kabupaten Kepulauan Talaud
592	jembatan S. Rawuala Kecil	Kabupaten Kepulauan Talaud
593	jembatan Bune Kiama	Kabupaten Kepulauan Talaud
594	jembatan Matanug	Kabupaten Kepulauan Talaud
595	jembatan S.Angingaran	Kabupaten Kepulauan Talaud
596	jembatan Waratung	Kabupaten Kepulauan Talaud
597	jembatan S. Rawuala Besar	Kabupaten Kepulauan Talaud
598	jembatan S. Sapangan	Kabupaten Kepulauan Talaud
599	jembatan Alelo	Kabupaten Kepulauan Talaud
600	jembatan Barowo	Kabupaten Kepulauan Talaud
601	jembatan Potot	Kabupaten Kepulauan Talaud
602	jembatan Mala	Kabupaten Kepulauan Talaud
603	jembatan S. Baturawan	Kabupaten Kepulauan Talaud
604	jembatan S. Tairo	Kabupaten Kepulauan Talaud
605	jembatan S.Manaha	Kabupaten Kepulauan Talaud
606	jembatan S. Mangole	Kabupaten Kepulauan Talaud
607	jembatan Tule I	Kabupaten Kepulauan Talaud
608	jembatan S. Olla	Kabupaten Kepulauan Talaud
609	jembatan S. Kalongan	Kabupaten Kepulauan Talaud
610	jembatan S. Alude	Kabupaten Kepulauan Talaud
611	jembatan Tule	Kabupaten Kepulauan Talaud
612	jembatan Arangaca II	Kabupaten Kepulauan Talaud
613	jembatan Arangaca I	Kabupaten Kepulauan Talaud
614	jembatan S. Sampirian	Kabupaten Kepulauan Talaud
615	jembatan S. Maniwuan	Kabupaten Kepulauan Talaud
616	jembatan S. Urapu Besar	Kabupaten Kepulauan Talaud
617	jembatan S. Urapu Kecil	Kabupaten Kepulauan Talaud
618	jembatan S. Awawa	Kabupaten Kepulauan Talaud
619	jembatan Toto	Kabupaten Kepulauan Talaud
620	jembatan S. Maranggi	Kabupaten Kepulauan Talaud
621	jembatan S. Hu'o	Kabupaten Kepulauan Talaud
622	jembatan Binangaraal	Kabupaten Kepulauan Talaud
623	jembatan Bowombaru	Kabupaten Kepulauan Talaud
624	jembatan Sawang	Kabupaten Kepulauan Talaud
625	jembatan Lingkawada	Kabupaten Kepulauan Talaud
626	jembatan Anggun	Kabupaten Kepulauan Talaud
627	jembatan Pompini	Kabupaten Kepulauan Talaud
628	jembatan Lawano	Kabupaten Kepulauan Talaud

No.	Nama Jembatan	Lokasi
629	jembatan Tarun	Kabupaten Kepulauan Talaud
630	jembatan Aurucca	Kabupaten Kepulauan Talaud
631	jembatan Noharan	Kabupaten Kepulauan Talaud
632	jembatan Nunu	Kabupaten Kepulauan Talaud
633	jembatan Pampalu II	Kabupaten Kepulauan Talaud
634	jembatan Tampanio	Kabupaten Kepulauan Talaud
635	jembatan Pampalu	Kabupaten Kepulauan Talaud
636	jembatan Pampalu I	Kabupaten Kepulauan Talaud
637	jembatan Ruso	Kabupaten Kepulauan Talaud
638	jembatan Bawirung 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
639	jembatan Saripaputan	Kabupaten Kepulauan Talaud
640	jembatan Teduhrahman	Kabupaten Kepulauan Talaud
641	jembatan Bonggo	Kabupaten Kepulauan Talaud
642	jembatan Pucean I	Kabupaten Kepulauan Talaud
643	jembatan Ben Besar	Kabupaten Kepulauan Talaud
644	jembatan Pucean	Kabupaten Kepulauan Talaud
645	jembatan Niampak	Kabupaten Kepulauan Talaud
646	jembatan Potot II	Kabupaten Kepulauan Talaud
647	jembatan Languwan	Kabupaten Kepulauan Talaud
648	jembatan Sarongsongan	Kabupaten Kepulauan Talaud
649	jembatan Ben Kecil	Kabupaten Kepulauan Talaud
650	jembatan Kepala Ular	Kabupaten Kepulauan Talaud
651	jembatan Padisan	Kabupaten Kepulauan Talaud
652	jembatan Totombatu	Kabupaten Kepulauan Talaud
653	jembatan Bawirung 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
654	jembatan Maransin	Kabupaten Kepulauan Talaud
655	jembatan Melam	Kabupaten Kepulauan Talaud
656	jembatan Wiso	Kabupaten Kepulauan Talaud
657	jembatan Tarohan I	Kabupaten Kepulauan Talaud
658	jembatan S. Sala'bau	Kabupaten Kepulauan Talaud
659	jembatan S. Latimbang	Kabupaten Kepulauan Talaud
660	jembatan Assu I	Kabupaten Kepulauan Talaud
661	jembatan Assu II	Kabupaten Kepulauan Talaud
662	jembatan S. Sansumapi	Kabupaten Kepulauan Talaud
663	jembatan S. Pulutan	Kabupaten Kepulauan Talaud
664	jembatan Tarohan II	Kabupaten Kepulauan Talaud
665	jembatan S. Balente	Kabupaten Kepulauan Talaud
666	jembatan Taluara 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
667	jembatan Tambinanga	Kabupaten Kepulauan Talaud
668	jembatan Muiang	Kabupaten Kepulauan Talaud
669	jembatan Ralihala	Kabupaten Kepulauan Talaud
670	jembatan Irum	Kabupaten Kepulauan Talaud
671	jembatan Sawuran	Kabupaten Kepulauan Talaud
672	jembatan Tadareno	Kabupaten Kepulauan Talaud
673	jembatan Ambuna	Kabupaten Kepulauan Talaud
674	jembatan Bune 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
675	jembatan Maurawada	Kabupaten Kepulauan Talaud
676	jembatan Matahit	Kabupaten Kepulauan Talaud
677	jembatan Lesa	Kabupaten Kepulauan Talaud
678	jembatan Pampang	Kabupaten Kepulauan Talaud
679	jembatan Alumu	Kabupaten Kepulauan Talaud
680	jembatan Buala	Kabupaten Kepulauan Talaud
681	jembatan Sarion	Kabupaten Kepulauan Talaud
682	jembatan Malabut	Kabupaten Kepulauan Talaud

No.	Nama Jembatan	Lokasi
683	jembatan Maasin	Kabupaten Kepulauan Talaud
684	jembatan Pade	Kabupaten Kepulauan Talaud
685	jembatan Darangirang	Kabupaten Kepulauan Talaud
686	jembatan Lalare	Kabupaten Kepulauan Talaud
687	jembatan Tambioe II	Kabupaten Kepulauan Talaud
688	jembatan Tambioe I	Kabupaten Kepulauan Talaud
689	jembatan Mallat	Kabupaten Kepulauan Talaud
690	jembatan Malat II	Kabupaten Kepulauan Talaud
691	jembatan Malat I	Kabupaten Kepulauan Talaud
692	jembatan Bulo 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
693	jembatan Manuala	Kabupaten Kepulauan Talaud
694	jembatan Saring Kolongan	Kabupaten Kepulauan Talaud
695	jembatan Limu I	Kabupaten Kepulauan Talaud
696	jembatan Taluara 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
697	jembatan Limu	Kabupaten Kepulauan Talaud
698	jembatan Roat	Kabupaten Kepulauan Talaud
699	jembatan Nungin	Kabupaten Kepulauan Talaud
700	jembatan Goat I	Kabupaten Kepulauan Talaud
701	jembatan Goat	Kabupaten Kepulauan Talaud
702	jembatan Sawanguati I	Kabupaten Kepulauan Talaud
703	jembatan Maratap	Kabupaten Kepulauan Talaud
704	jembatan Maro	Kabupaten Kepulauan Talaud
705	jembatan Punna	Kabupaten Kepulauan Talaud
706	jembatan Panding	Kabupaten Kepulauan Talaud
707	jembatan Bantane II	Kabupaten Kepulauan Talaud
708	jembatan Bawaasam	Kabupaten Kepulauan Talaud
709	jembatan Lua	Kabupaten Kepulauan Talaud
710	jembatan Bantane I	Kabupaten Kepulauan Talaud
711	jembatan Mitun	Kabupaten Kepulauan Talaud
712	jembatan Bantane	Kabupaten Kepulauan Talaud
713	jembatan Maranti Tabang	Kabupaten Kepulauan Talaud
714	jembatan Malarum Tabang 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
715	jembatan Sawanguati II	Kabupaten Kepulauan Talaud
716	jembatan Malarum Tabang 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
717	jembatan Makatara	Kabupaten Kepulauan Talaud
718	jembatan Bawunian I	Kabupaten Kepulauan Talaud
719	jembatan Inawang I	Kabupaten Kepulauan Talaud
720	jembatan Andaarantabang	Kabupaten Kepulauan Talaud
721	jembatan Inawang II	Kabupaten Kepulauan Talaud
722	jembatan Sanguala 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
723	jembatan Lobo	Kabupaten Kepulauan Talaud
724	jembatan Laramisan II	Kabupaten Kepulauan Talaud
725	jembatan Winaleran	Kabupaten Kepulauan Talaud
726	jembatan Laramisan I	Kabupaten Kepulauan Talaud
727	jembatan Birang	Kabupaten Kepulauan Talaud
728	jembatan Lahario	Kabupaten Kepulauan Talaud
729	jembatan Sanguala 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
730	jembatan Lahae	Kabupaten Kepulauan Talaud
731	jembatan Toabatu IV	Kabupaten Kepulauan Talaud
732	jembatan Toabatu III	Kabupaten Kepulauan Talaud
733	jembatan Toabatu II	Kabupaten Kepulauan Talaud
734	jembatan Toabatu	Kabupaten Kepulauan Talaud
735	jembatan Arombar	Kabupaten Kepulauan Talaud
736	jembatan Wida	Kabupaten Kepulauan Talaud

No.	Nama Jembatan	Lokasi
737	jembatan S.Binalang III	Kabupaten Kepulauan Talaud
738	jembatan S.Binalang II	Kabupaten Kepulauan Talaud
739	jembatan Awit I	Kabupaten Kepulauan Talaud
740	jembatan Musian	Kabupaten Kepulauan Talaud
741	jembatan Awit II	Kabupaten Kepulauan Talaud
742	jembatan S.Binalang I	Kabupaten Kepulauan Talaud
743	jembatan S.Andaaran	Kabupaten Kepulauan Talaud
744	jembatan Daduri	Kabupaten Kepulauan Talaud
745	jembatan Bune III	Kabupaten Kepulauan Talaud
746	jembatan Tiling II	Kabupaten Kepulauan Talaud
747	jembatan Bune II	Kabupaten Kepulauan Talaud
748	jembatan Bune I	Kabupaten Kepulauan Talaud
749	jembatan Sambuara I	Kabupaten Kepulauan Talaud
750	jembatan Lilae	Kabupaten Kepulauan Talaud
751	jembatan Watuwerung I	Kabupaten Kepulauan Talaud
752	jembatan Watuwerung	Kabupaten Kepulauan Talaud
753	jembatan Sambuara	Kabupaten Kepulauan Talaud
754	jembatan Saroco	Kabupaten Kepulauan Talaud
755	jembatan Riung II	Kabupaten Kepulauan Talaud
756	jembatan Riung I	Kabupaten Kepulauan Talaud
757	jembatan Riung	Kabupaten Kepulauan Talaud
758	jembatan Dapihe I	Kabupaten Kepulauan Talaud
759	jembatan Dapihe	Kabupaten Kepulauan Talaud
760	jembatan Boro II	Kabupaten Kepulauan Talaud
761	jembatan Saliru	Kabupaten Kepulauan Talaud
762	jembatan Ensem	Kabupaten Kepulauan Talaud
763	jembatan Bune 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
764	jembatan Batu Balango I	Kabupaten Kepulauan Talaud
765	jembatan Dapalan VI	Kabupaten Kepulauan Talaud
766	jembatan Batu Balango	Kabupaten Kepulauan Talaud
767	jembatan Dapalan V	Kabupaten Kepulauan Talaud
768	jembatan Dapalan IV	Kabupaten Kepulauan Talaud
769	jembatan Dapalan III	Kabupaten Kepulauan Talaud
770	jembatan Dapalan II	Kabupaten Kepulauan Talaud
771	jembatan Dapalan I	Kabupaten Kepulauan Talaud
772	jembatan Ammat I	Kabupaten Kepulauan Talaud
773	jembatan Ambia	Kabupaten Kepulauan Talaud
774	jembatan Ammat	Kabupaten Kepulauan Talaud
775	jembatan Ganalo II	Kabupaten Kepulauan Talaud
776	jembatan Ganalo I	Kabupaten Kepulauan Talaud
777	jembatan Kuma	Kabupaten Kepulauan Talaud
778	jembatan Pook	Kabupaten Kepulauan Talaud
779	jembatan Maririk	Kabupaten Kepulauan Talaud
780	jembatan Maririkkecili	Kabupaten Kepulauan Talaud
781	jembatan S.Ritawu	Kabupaten Kepulauan Talaud
782	jembatan Bulo 3	Kabupaten Kepulauan Talaud
783	jembatan Puro	Kabupaten Kepulauan Talaud
784	jembatan S.Apan I	Kabupaten Kepulauan Talaud
785	jembatan S.Apan	Kabupaten Kepulauan Talaud
786	jembatan Esang I	Kabupaten Kepulauan Talaud
787	jembatan Banada	Kabupaten Kepulauan Talaud
788	jembatan Lalue	Kabupaten Kepulauan Talaud
789	jembatan Malat	Kabupaten Kepulauan Talaud
790	jembatan Rawa	Kabupaten Kepulauan Talaud

No.	Nama Jembatan	Lokasi
791	jembatan S.Tarun	Kabupaten Kepulauan Talaud
792	jembatan Kandualang	Kabupaten Kepulauan Talaud
793	jembatan S.Arangka	Kabupaten Kepulauan Talaud
794	jembatan Mamahan I	Kabupaten Kepulauan Talaud
795	jembatan Nanoan II	Kabupaten Kepulauan Talaud
796	jembatan S.Gemeh II	Kabupaten Kepulauan Talaud
797	jembatan Gemeh	Kabupaten Kepulauan Talaud
798	jembatan Tawuna	Kabupaten Kepulauan Talaud
799	jembatan S.Winanga	Kabupaten Kepulauan Talaud
800	jembatan Andaaran I	Kabupaten Kepulauan Talaud
801	jembatan S.Saliru	Kabupaten Kepulauan Talaud
802	jembatan Lale	Kabupaten Kepulauan Talaud
803	jembatan Langimaramu	Kabupaten Kepulauan Talaud
804	jembatan S.Poobambung	Kabupaten Kepulauan Talaud
805	jembatan Baramban	Kabupaten Kepulauan Talaud
806	jembatan Darapalan	Kabupaten Kepulauan Talaud
807	jembatan Andaaran II	Kabupaten Kepulauan Talaud
808	jembatan Saruuesa	Kabupaten Kepulauan Talaud
809	jembatan Barusuda 1	Kabupaten Kepulauan Talaud
810	jembatan Raman	Kabupaten Kepulauan Talaud
811	jembatan Taraca	Kabupaten Kepulauan Talaud
812	jembatan Saan	Kabupaten Kepulauan Talaud
813	jembatan Barusuda 2	Kabupaten Kepulauan Talaud
814	jembatan S.Taraca	Kabupaten Kepulauan Talaud
815	jembatan Nohaan	Kabupaten Kepulauan Talaud
816	jembatan Tumino	Kabupaten Kepulauan Talaud
817	jembatan Arane	Kabupaten Kepulauan Talaud
818	jembatan Rumbia	Kabupaten Minahasa
819	jembatan Kalelak	Kabupaten Minahasa
820	jembatan Ranowangko	Kabupaten Minahasa
821	jembatan Palamba	Kabupaten Minahasa
822	jembatan Walensori	Kabupaten Minahasa
823	jembatan Ranowangko III	Kabupaten Minahasa
824	jembatan Bukit Tinggi II	Kabupaten Minahasa
825	jembatan Sindoran	Kabupaten Minahasa
826	jembatan Temboan	Kabupaten Minahasa
827	jembatan Bukit Tinggi	Kabupaten Minahasa
828	jembatan Kakak	Kabupaten Minahasa
829	jembatan Bukit Tinggi I	Kabupaten Minahasa
830	jembatan Mahembang	Kabupaten Minahasa
831	jembatan Wiau	Kabupaten Minahasa
832	jembatan Pangisan	Kabupaten Minahasa
833	jembatan Kayuwatu Oki	Kabupaten Minahasa
834	jembatan Kaliakel	Kabupaten Minahasa
835	jembatan Tumpaan	Kabupaten Minahasa
836	jembatan Rarumis	Kabupaten Minahasa
837	jembatan Kayuwatu Wangko	Kabupaten Minahasa
838	jembatan Parentek	Kabupaten Minahasa
839	jembatan Pakeretan	Kabupaten Minahasa
840	jembatan Kora-Kora	Kabupaten Minahasa
841	jembatan Atep Wangko	Kabupaten Minahasa
842	jembatan Tete Rangka	Kabupaten Minahasa
843	jembatan Kamenti I	Kabupaten Minahasa
844	jembatan Atep Oki	Kabupaten Minahasa

No.	Nama Jembatan	Lokasi
845	jembatan Air Panas	Kabupaten Minahasa
846	jembatan Kamenti	Kabupaten Minahasa
847	jembatan Kakas	Kabupaten Minahasa
848	jembatan Kawies	Kabupaten Minahasa
849	jembatan Kayu Uwi	Kabupaten Minahasa
850	jembatan Kayu Uwi I	Kabupaten Minahasa
851	jembatan Toloun	Kabupaten Minahasa
852	jembatan Kayu Uwi II	Kabupaten Minahasa
853	jembatan Maasem	Kabupaten Minahasa
854	jembatan Telap	Kabupaten Minahasa
855	jembatan Kayu Uwi Sawah	Kabupaten Minahasa
856	jembatan Rapa	Kabupaten Minahasa
857	jembatan Ranowangko	Kabupaten Minahasa
858	jembatan Sawangan I	Kabupaten Minahasa
859	jembatan Air Sonder	Kabupaten Minahasa
860	jembatan Sawangan	Kabupaten Minahasa
861	jembatan Rerer	Kabupaten Minahasa
862	jembatan Paimpang	Kabupaten Minahasa
863	jembatan Coklat	Kabupaten Minahasa
864	jembatan Kombi	Kabupaten Minahasa
865	jembatan Tangisan	Kabupaten Minahasa
866	jembatan Monte	Kabupaten Minahasa
867	jembatan Ranomerut	Kabupaten Minahasa
868	jembatan Raringis	Kabupaten Minahasa
869	jembatan Maweris	Kabupaten Minahasa
870	jembatan Bulo II	Kabupaten Minahasa
871	jembatan Matehem	Kabupaten Minahasa
872	jembatan Leilem	Kabupaten Minahasa
873	jembatan Bulo	Kabupaten Minahasa
874	jembatan Air Merah	Kabupaten Minahasa
875	jembatan Kombi 1	Kabupaten Minahasa
876	jembatan Bulo I	Kabupaten Minahasa
877	jembatan Tataaran	Kabupaten Minahasa
878	jembatan Kiniar II	Kabupaten Minahasa
879	jembatan Kiniar I	Kabupaten Minahasa
880	jembatan Roong	Kabupaten Minahasa
881	jembatan Lapangan	Kabupaten Minahasa
882	jembatan Wengkol	Kabupaten Minahasa
883	jembatan Luan	Kabupaten Minahasa
884	jembatan Pineles	Kabupaten Minahasa
885	jembatan Marawas	Kabupaten Minahasa
886	jembatan Kawidei	Kabupaten Minahasa
887	jembatan Senduk	Kabupaten Minahasa
888	jembatan Manggatasik	Kabupaten Minahasa
889	jembatan Ranowangko	Kabupaten Minahasa
890	jembatan Agogong	Kabupaten Minahasa
891	jembatan Paniki	Kabupaten Minahasa
892	jembatan Tambala	Kabupaten Minahasa
893	jembatan Wunong	Kabupaten Minahasa
894	jembatan Tasik Ria	Kabupaten Minahasa
895	jembatan Mokupa II	Kabupaten Minahasa
896	jembatan Mokupa I	Kabupaten Minahasa
897	jembatan Sawah I Rempang	Kabupaten Minahasa
898	jembatan Imam Bonjol	Kabupaten Minahasa

No.	Nama Jembatan	Lokasi
899	jembatan Bulo II	Kabupaten Minahasa
900	jembatan Bulo I	Kabupaten Minahasa
901	jembatan Tateli	Kabupaten Minahasa
902	jembatan Tateli I	Kabupaten Minahasa
903	jembatan Kalasey II	Kabupaten Minahasa
904	jembatan Kalasey I	Kabupaten Minahasa
905	jembatan Kalasey	Kabupaten Minahasa
906	jembatan Pulau Likri	Kabupaten Minahasa
907	jembatan Wiau 1	Kabupaten Minahasa
908	jembatan Palamba 1	Kabupaten Minahasa
909	jembatan Bukit Tinggi 2	Kabupaten Minahasa
910	jembatan Wolaang	Kabupaten Minahasa
911	jembatan Winebetan	Kabupaten Minahasa
912	jembatan Tonelet	Kabupaten Minahasa
913	jembatan Wasian 2	Kabupaten Minahasa
914	jembatan Wasian 1	Kabupaten Minahasa
915	jembatan Wasian	Kabupaten Minahasa
916	jembatan Puser	Kabupaten Minahasa
917	jembatan Nimesel	Kabupaten Minahasa
918	jembatan Kawangkoan 2	Kabupaten Minahasa
919	jembatan Kawangkoan 1	Kabupaten Minahasa
920	jembatan Kinali 1	Kabupaten Minahasa
921	jembatan Kinali	Kabupaten Minahasa
922	jembatan Remboken 2	Kabupaten Minahasa
923	jembatan Remboken 1	Kabupaten Minahasa
924	jembatan Remboken	Kabupaten Minahasa
925	jembatan Kombi 1	Kabupaten Minahasa
926	jembatan Tandengan	Kabupaten Minahasa
927	jembatan Lololo	Kabupaten Minahasa
928	jembatan Kolongan 3	Kabupaten Minahasa
929	jembatan Saugian	Kabupaten Minahasa
930	jembatan Kombi 2	Kabupaten Minahasa
931	jembatan Winuner	Kabupaten Minahasa
932	jembatan Kolongan 2	Kabupaten Minahasa
933	jembatan Leleko 1	Kabupaten Minahasa
934	jembatan Kolongan	Kabupaten Minahasa
935	jembatan Leleko	Kabupaten Minahasa
936	jembatan Salosot	Kabupaten Minahasa
937	jembatan Toliang Oki	Kabupaten Minahasa
938	jembatan Toliang Oki 1	Kabupaten Minahasa
939	jembatan Rerer 3	Kabupaten Minahasa
940	jembatan Kounaru	Kabupaten Minahasa
941	jembatan Rerer 2	Kabupaten Minahasa
942	jembatan Sonder	Kabupaten Minahasa
943	jembatan Kawilei	Kabupaten Minahasa
944	jembatan Tonsaru	Kabupaten Minahasa
945	jembatan Sonder I	Kabupaten Minahasa
946	jembatan Urongo	Kabupaten Minahasa
947	jembatan Rerer 1	Kabupaten Minahasa
948	jembatan Tougela	Kabupaten Minahasa
949	jembatan Surat	Kabupaten Minahasa
950	jembatan Kalawiran	Kabupaten Minahasa
951	jembatan Toubeke	Kabupaten Minahasa
952	jembatan Timbulanu	Kabupaten Minahasa

No.	Nama Jembatan	Lokasi
953	jembatan Ulele	Kabupaten Minahasa
954	jembatan Tataaran 1	Kabupaten Minahasa
955	jembatan Timbukar I	Kabupaten Minahasa
956	jembatan Salu Koya	Kabupaten Minahasa
957	jembatan Timbuhan I	Kabupaten Minahasa
958	jembatan Wewelen	Kabupaten Minahasa
959	jembatan Kembuan	Kabupaten Minahasa
960	jembatan Ranotongkor II	Kabupaten Minahasa
961	jembatan Ranotongkor I	Kabupaten Minahasa
962	jembatan Lolah	Kabupaten Minahasa
963	jembatan Pinasungkulan	Kabupaten Minahasa
964	jembatan Sungai K'ala	Kabupaten Minahasa
965	jembatan Sarang	Kabupaten Minahasa
966	jembatan Rumengkor	Kabupaten Minahasa
967	jembatan Kumu	Kabupaten Minahasa
968	jembatan Tanawangko	Kabupaten Minahasa
969	jembatan Manggatasik 1	Kabupaten Minahasa
970	jembatan Manggatasik 2	Kabupaten Minahasa
971	jembatan Rona 1	Kabupaten Minahasa
972	jembatan Poopoh 1	Kabupaten Minahasa
973	jembatan Rona 2	Kabupaten Minahasa
974	jembatan Kembes	Kabupaten Minahasa
975	jembatan Poopoh	Kabupaten Minahasa
976	jembatan Pindeng	Kabupaten Minahasa
977	jembatan Kamangta	Kabupaten Minahasa
978	jembatan Kalasey 1	Kabupaten Minahasa
979	jembatan Kamangta 1	Kabupaten Minahasa
980	jembatan Sawangan I 2	Kabupaten Minahasa
981	jembatan Sawangan 2	Kabupaten Minahasa
982	jembatan Sawangan II	Kabupaten Minahasa
983	jembatan Awelas	Kabupaten Minahasa
984	jembatan Lotta	Kabupaten Minahasa
985	jembatan Totabuan	Kabupaten Minahasa Selatan
986	jembatan Kakenturan Induk	Kabupaten Minahasa Selatan
987	jembatan Modoinding	Kabupaten Minahasa Selatan
988	jembatan Palelon	Kabupaten Minahasa Selatan
989	jembatan 14 Pebruari	Kabupaten Minahasa Selatan
990	jembatan Tompaso Baru	Kabupaten Minahasa Selatan
991	jembatan Moyondok	Kabupaten Minahasa Selatan
992	jembatan Wakan II	Kabupaten Minahasa Selatan
993	jembatan Pangian	Kabupaten Minahasa Selatan
994	jembatan Mopolo 1	Kabupaten Minahasa Selatan
995	jembatan Pontak	Kabupaten Minahasa Selatan
996	jembatan Mopolo	Kabupaten Minahasa Selatan
997	jembatan Pontak 1	Kabupaten Minahasa Selatan
998	jembatan Tumicakal	Kabupaten Minahasa Selatan
999	jembatan Kalait	Kabupaten Minahasa Selatan
1000	jembatan Motoling	Kabupaten Minahasa Selatan
1001	jembatan Makakilu	Kabupaten Minahasa Selatan
1002	jembatan Tewalen	Kabupaten Minahasa Selatan
1003	jembatan Pingsaan	Kabupaten Minahasa Selatan
1004	jembatan Mopilu	Kabupaten Minahasa Selatan
1005	jembatan Lesung	Kabupaten Minahasa Selatan
1006	jembatan Tinua	Kabupaten Minahasa Selatan

No.	Nama Jembatan	Lokasi
1007	jembatan Ongkaw	Kabupaten Minahasa Selatan
1008	jembatan Wakan I	Kabupaten Minahasa Selatan
1009	jembatan Boyong Pante IV	Kabupaten Minahasa Selatan
1010	jembatan Sui	Kabupaten Minahasa Selatan
1011	jembatan Ranoketang	Kabupaten Minahasa Selatan
1012	jembatan Buyungon 1	Kabupaten Minahasa Selatan
1013	jembatan Buyungon 2	Kabupaten Minahasa Selatan
1014	jembatan Rumoong Bawah	Kabupaten Minahasa Selatan
1015	jembatan Kilo	Kabupaten Minahasa Selatan
1016	jembatan Sapa	Kabupaten Minahasa Selatan
1017	jembatan Sidate	Kabupaten Minahasa Selatan
1018	jembatan Molinow	Kabupaten Minahasa Selatan
1019	jembatan Mayaan	Kabupaten Minahasa Selatan
1020	jembatan Ranoyapo	Kabupaten Minahasa Selatan
1021	jembatan Liwason	Kabupaten Minahasa Selatan
1022	jembatan Ranowangko	Kabupaten Minahasa Selatan
1023	jembatan Worotican	Kabupaten Minahasa Selatan
1024	jembatan Worotican 1	Kabupaten Minahasa Selatan
1025	jembatan Ranomea A	Kabupaten Minahasa Selatan
1026	jembatan Ranomea B	Kabupaten Minahasa Selatan
1027	jembatan Pondang Kecil	Kabupaten Minahasa Selatan
1028	jembatan Pentu.A	Kabupaten Minahasa Selatan
1029	jembatan Pentu.B	Kabupaten Minahasa Selatan
1030	jembatan Sendoan	Kabupaten Minahasa Selatan
1031	jembatan Sendoan B	Kabupaten Minahasa Selatan
1032	jembatan Tuunan	Kabupaten Minahasa Selatan
1033	jembatan Ritey	Kabupaten Minahasa Selatan
1034	jembatan Ritey B	Kabupaten Minahasa Selatan
1035	jembatan Roroman	Kabupaten Minahasa Selatan
1036	jembatan Sosongian	Kabupaten Minahasa Selatan
1037	jembatan Ranotuana 1	Kabupaten Minahasa Selatan
1038	jembatan Walaimbang	Kabupaten Minahasa Selatan
1039	jembatan Ranotuana 2	Kabupaten Minahasa Selatan
1040	jembatan Pinamorongan I	Kabupaten Minahasa Selatan
1041	jembatan Matani	Kabupaten Minahasa Selatan
1042	jembatan Popontolen 1	Kabupaten Minahasa Selatan
1043	jembatan Popontolen 2	Kabupaten Minahasa Selatan
1044	jembatan Lelema II	Kabupaten Minahasa Selatan
1045	jembatan Bajo 1	Kabupaten Minahasa Selatan
1046	jembatan Lelema I	Kabupaten Minahasa Selatan
1047	jembatan Ranosulu	Kabupaten Minahasa Selatan
1048	jembatan Popareng	Kabupaten Minahasa Selatan
1049	jembatan Durian	Kabupaten Minahasa Selatan
1050	jembatan Marenge	Kabupaten Minahasa Selatan
1051	jembatan Wowontulap 4	Kabupaten Minahasa Selatan
1052	jembatan Katagasan	Kabupaten Minahasa Selatan
1053	jembatan Paslaten	Kabupaten Minahasa Selatan
1054	jembatan Paslaten II	Kabupaten Minahasa Selatan
1055	jembatan Maruasey 3	Kabupaten Minahasa Selatan
1056	jembatan Maruasey 1	Kabupaten Minahasa Selatan
1057	jembatan Paslaten I	Kabupaten Minahasa Selatan
1058	jembatan Maruasey 2	Kabupaten Minahasa Selatan
1059	jembatan Maruasey 4	Kabupaten Minahasa Selatan
1060	jembatan Wowontulap 3	Kabupaten Minahasa Selatan

No.	Nama Jembatan	Lokasi
1061	jembatan Suparaka 2	Kabupaten Minahasa Selatan
1062	jembatan Wowontulap 2	Kabupaten Minahasa Selatan
1063	jembatan Timbuhan II	Kabupaten Minahasa Selatan
1064	jembatan Suparaka 1	Kabupaten Minahasa Selatan
1065	jembatan Tangkunei I	Kabupaten Minahasa Selatan
1066	jembatan Tangkunei	Kabupaten Minahasa Selatan
1067	jembatan Wowontulap 1	Kabupaten Minahasa Selatan
1068	jembatan Pungkol	Kabupaten Minahasa Selatan
1069	jembatan Sondaken 1	Kabupaten Minahasa Selatan
1070	jembatan Rap Rap	Kabupaten Minahasa Selatan
1071	jembatan Buyat	Kabupaten Minahasa Tenggara
1072	jembatan Ratatotok	Kabupaten Minahasa Tenggara
1073	jembatan Bubungan	Kabupaten Minahasa Tenggara
1074	jembatan Air Jatuh	Kabupaten Minahasa Tenggara
1075	jembatan Mayang	Kabupaten Minahasa Tenggara
1076	jembatan Belang	Kabupaten Minahasa Tenggara
1077	jembatan Waweseni	Kabupaten Minahasa Tenggara
1078	jembatan Tababo	Kabupaten Minahasa Tenggara
1079	jembatan Palaus IV	Kabupaten Minahasa Tenggara
1080	jembatan Minanga	Kabupaten Minahasa Tenggara
1081	jembatan Tatengesan II	Kabupaten Minahasa Tenggara
1082	jembatan Mongawo	Kabupaten Minahasa Tenggara
1083	jembatan Bentenan	Kabupaten Minahasa Tenggara
1084	jembatan Liwutung	Kabupaten Minahasa Tenggara
1085	jembatan Pancuran	Kabupaten Minahasa Tenggara
1086	jembatan Rumbia II	Kabupaten Minahasa Tenggara
1087	jembatan Rasi 3	Kabupaten Minahasa Tenggara
1088	jembatan Rasi 2	Kabupaten Minahasa Tenggara
1089	jembatan Lowatag	Kabupaten Minahasa Tenggara
1090	jembatan Molompar	Kabupaten Minahasa Tenggara
1091	jembatan Box Culvert Ranoako	Kabupaten Minahasa Tenggara
1092	jembatan Molompar 1	Kabupaten Minahasa Tenggara
1093	jembatan Rasi	Kabupaten Minahasa Tenggara
1094	jembatan Kuyanga	Kabupaten Minahasa Tenggara
1095	jembatan Kuyanga 1	Kabupaten Minahasa Tenggara
1096	jembatan Sue	Kabupaten Minahasa Tenggara
1097	jembatan Rasi 1	Kabupaten Minahasa Tenggara
1098	jembatan Tosuraya 2	Kabupaten Minahasa Tenggara
1099	jembatan Touluaan	Kabupaten Minahasa Tenggara
1100	jembatan Tosuraya	Kabupaten Minahasa Tenggara
1101	jembatan Desa Lobu	Kabupaten Minahasa Tenggara
1102	jembatan S.Palaaus	Kabupaten Minahasa Tenggara
1103	jembatan Air Buang	Kabupaten Minahasa Tenggara
1104	jembatan Kelewaha	Kabupaten Minahasa Tenggara
1105	jembatan Makalisung 4	Kabupaten Minahasa Utara
1106	jembatan Makalisung 3	Kabupaten Minahasa Utara
1107	jembatan Makalisung 2	Kabupaten Minahasa Utara
1108	jembatan Makalisung 1	Kabupaten Minahasa Utara
1109	jembatan Waleo	Kabupaten Minahasa Utara
1110	jembatan Lilang	Kabupaten Minahasa Utara
1111	jembatan Sawang RUT	Kabupaten Minahasa Utara
1112	jembatan Pakowa	Kabupaten Minahasa Utara
1113	jembatan Ranowangko Oki II	Kabupaten Minahasa Utara
1114	jembatan Kelong	Kabupaten Minahasa Utara

No.	Nama Jembatan	Lokasi
1115	jembatan Ranowangko Oki I	Kabupaten Minahasa Utara
1116	jembatan Karimenga	Kabupaten Minahasa Utara
1117	jembatan Tontalete	Kabupaten Minahasa Utara
1118	jembatan Seduan	Kabupaten Minahasa Utara
1119	jembatan Kauditan I 1	Kabupaten Minahasa Utara
1120	jembatan Kauditan 1	Kabupaten Minahasa Utara
1121	jembatan Pahalaten	Kabupaten Minahasa Utara
1122	jembatan Kauditan 2	Kabupaten Minahasa Utara
1123	jembatan Kauditan I 2	Kabupaten Minahasa Utara
1124	jembatan Kauditan 3	Kabupaten Minahasa Utara
1125	jembatan Dinambunan	Kabupaten Minahasa Utara
1126	jembatan Airmadidi	Kabupaten Minahasa Utara
1127	jembatan Kuwil 1	Kabupaten Minahasa Utara
1128	jembatan Kuwil	Kabupaten Minahasa Utara
1129	jembatan Padumpung	Kabupaten Minahasa Utara
1130	jembatan Temberan	Kabupaten Minahasa Utara
1131	jembatan Padumpung 1	Kabupaten Minahasa Utara
1132	jembatan Watudaney	Kabupaten Minahasa Utara
1133	jembatan Sukur	Kabupaten Minahasa Utara
1134	jembatan Kolongan	Kabupaten Minahasa Utara
1135	jembatan Kawangkoan I	Kabupaten Minahasa Utara
1136	jembatan Kawangkoan II	Kabupaten Minahasa Utara
1137	jembatan Matungkas	Kabupaten Minahasa Utara
1138	jembatan Maumbi	Kabupaten Minahasa Utara
1139	jembatan Kawangkoan III	Kabupaten Minahasa Utara
1140	jembatan Flyover 2 Interchange Manado By Pass	Kabupaten Minahasa Utara
1141	jembatan Tiran	Kabupaten Minahasa Utara
1142	jembatan Matikut 2	Kabupaten Minahasa Utara
1143	jembatan Matungkas I	Kabupaten Minahasa Utara
1144	jembatan Matungkas II	Kabupaten Minahasa Utara
1145	jembatan Matikut	Kabupaten Minahasa Utara
1146	jembatan Dimembe	Kabupaten Minahasa Utara
1147	jembatan Pinilih	Kabupaten Minahasa Utara
1148	jembatan Warukapas	Kabupaten Minahasa Utara
1149	jembatan Mapanget	Kabupaten Minahasa Utara
1150	jembatan Teterusan	Kabupaten Minahasa Utara
1151	jembatan Tatelu	Kabupaten Minahasa Utara
1152	jembatan Pinenek	Kabupaten Minahasa Utara
1153	jembatan Lumpias	Kabupaten Minahasa Utara
1154	jembatan Tiwoho	Kabupaten Minahasa Utara
1155	jembatan Wangurer	Kabupaten Minahasa Utara
1156	jembatan Kaweruan	Kabupaten Minahasa Utara
1157	jembatan Minaesa	Kabupaten Minahasa Utara
1158	jembatan Paslaten	Kabupaten Minahasa Utara
1159	jembatan Bulo	Kabupaten Minahasa Utara
1160	jembatan Marinsow	Kabupaten Minahasa Utara
1161	jembatan Miaya	Kabupaten Minahasa Utara
1162	jembatan Maen I	Kabupaten Minahasa Utara
1163	jembatan Maen A	Kabupaten Minahasa Utara
1164	jembatan Maen B	Kabupaten Minahasa Utara
1165	jembatan Wineru	Kabupaten Minahasa Utara
1166	jembatan Kijang	Kabupaten Minahasa Utara
1167	jembatan Pangisan	Kabupaten Minahasa Utara

No.	Nama Jembatan	Lokasi
1168	jembatan Palaes	Kabupaten Minahasa Utara
1169	jembatan Sarawet II	Kabupaten Minahasa Utara
1170	jembatan Likupang	Kabupaten Minahasa Utara
1171	jembatan Serei	Kabupaten Minahasa Utara
1172	jembatan Tiwoho Madidir	Kabupaten Minahasa Utara
1173	jembatan Sarawet I	Kabupaten Minahasa Utara
1174	jembatan Sonsilo I	Kabupaten Minahasa Utara
1175	jembatan Sagerat	Kota Bitung
1176	jembatan Girian	Kota Bitung
1177	jembatan Tewaan 2	Kota Bitung
1178	jembatan Tewaan 1	Kota Bitung
1179	jembatan Klabat	Kota Bitung
1180	jembatan Pinasungkulan	Kota Bitung
1181	jembatan Moayat	Kota Kotamobagu
1182	jembatan S.Gilainan	Kota Kotamobagu
1183	jembatan Monogit	Kota Kotamobagu
1184	jembatan Kope	Kota Kotamobagu
1185	jembatan Pombudayan II (S.Yantaton)	Kota Kotamobagu
1186	jembatan Matali	Kota Kotamobagu
1187	jembatan Mongkonai I	Kota Kotamobagu
1188	jembatan Sinindian	Kota Kotamobagu
1189	jembatan Ampera	Kota Kotamobagu
1190	jembatan Inoba	Kota Kotamobagu
1191	jembatan Kotobongon I 1	Kota Kotamobagu
1192	jembatan Kotabangon	Kota Kotamobagu
1193	jembatan Kotobongon I 2	Kota Kotamobagu
1194	jembatan UP Winangun, Manado - Tomohon RR	Kota Manado
1195	jembatan Malalayang II	Kota Manado
1196	jembatan Malalayang I	Kota Manado
1197	jembatan Malalayang	Kota Manado
1198	jembatan Kolongan	Kota Manado
1199	jembatan Sam Ratulangi	Kota Manado
1200	jembatan Malendeng	Kota Manado
1201	jembatan Paal IV	Kota Manado
1202	jembatan Sario II	Kota Manado
1203	jembatan Wanea	Kota Manado
1204	jembatan Sario	Kota Manado
1205	jembatan Boulevard	Kota Manado
1206	jembatan Miangas Tikala	Kota Manado
1207	jembatan Paal 2.1	Kota Manado
1208	jembatan Paal 2.2	Kota Manado
1209	jembatan Tirang	Kota Manado
1210	jembatan Kairagi I	Kota Manado
1211	jembatan Megawaty	Kota Manado
1212	jembatan Kairagi.A	Kota Manado
1213	jembatan Kairagi.B	Kota Manado
1214	jembatan Soekarno (Manado)	Kota Manado
1215	jembatan Paniki	Kota Manado
1216	jembatan Kilu	Kota Manado
1217	jembatan Sumompo	Kota Manado
1218	jembatan Bengkol	Kota Manado
1219	jembatan Buha	Kota Manado
1220	jembatan Kilu I	Kota Manado

No.	Nama Jembatan	Lokasi
1221	jembatan Bailang	Kota Manado
1222	jembatan Bailang I	Kota Manado
1223	jembatan Mapanget	Kota Manado
1224	jembatan Pandu 1	Kota Manado
1225	jembatan Paniki Bawah	Kota Manado
1226	jembatan Tongkaina	Kota Manado
1227	jembatan Meras	Kota Manado
1228	jembatan Pandu 2	Kota Manado
1229	jembatan Kima Atas	Kota Manado
1230	jembatan Sumompo I	Kota Manado
1231	jembatan Talawaan Bajo	Kota Manado
1232	jembatan Sarongsong	Kota Tomohon
1233	jembatan Tara tara	Kota Tomohon
1234	jembatan Pamuraan	Kota Tomohon
1235	jembatan Kolongan	Kota Tomohon
1236	jembatan Tara tara II	Kota Tomohon
1237	jembatan Tara tara III	Kota Tomohon
1238	jembatan Kamasi	Kota Tomohon
1239	jembatan Maanar	Kota Tomohon
1240	jembatan Kamasi I	Kota Tomohon
1241	jembatan Sineleyan	Kota Tomohon
1242	jembatan Wiau	Kota Tomohon
1243	jembatan Makalisung	Kota Tomohon
1244	jembatan Mahawu	Kota Tomohon
1245	jembatan Lembuyan	Kota Tomohon
1246	jembatan Rurukan	Kota Tomohon
1247	jembatan Rurukan 1	Kota Tomohon
1248	jembatan Suluan	Kota Tomohon
1249	jembatan Ranosaut	Kota Tomohon
1250	jembatan Ranopaso	Kota Tomohon
1251	jembatan Mahenderkinilow	Kota Tomohon
1252	jembatan Tambulinas	Kota Tomohon
1253	jembatan Sapa Tinoor	Kota Tomohon
1254	jembatan Bitung - Lembeh	Wilayah Laut

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

TERMINAL KHUSUS

No	Nama Terminal Khusus	Lokasi
1	pelabuhan rakyat Desa Inobonto	Kabupaten Bolaang Mongondow
2	pelabuhan rakyat Desa Pangi Timur	Kabupaten Bolaang Mongondow
3	tambatan nelayan Desa Ayong	Kabupaten Bolaang Mongondow
4	terminal khusus industri Desa Labuan Uki	Kabupaten Bolaang Mongondow
5	terminal khusus industri Desa Solog	Kabupaten Bolaang Mongondow
6	terminal khusus penunjang industri Desa Labuan Uki	Kabupaten Bolaang Mongondow
7	pelabuhan pariwisata Desa Nunuka Raya	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
8	pelabuhan pariwisata Desa Perjuangan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
9	pelabuhan rakyat Desa Iligon	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
10	terminal khusus pertambangan Desa Matandoi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
11	terminal khusus Pos TNI AL Tabilaa	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
12	terminal khusus industri Desa Buyat Selatan	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
13	terminal khusus pertambangan Desa Paret Timur	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
14	terminal khusus pertambangan Nuangan	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
15	dermaga pariwisata Pulau Bongkil	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
16	terminal khusus PLTU Desa Binjeita II	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
17	pelabuhan rakyat boulevard Kelurahan Sawangbendar	Kabupaten Kepulauan Sangihe
18	pelabuhan rakyat boulevard tanah abang Kelurahan Sawangbendar	Kabupaten Kepulauan Sangihe
19	pelabuhan rakyat Desa Batunderang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
20	pelabuhan rakyat Desa Bengketang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
21	pelabuhan rakyat Desa Bukide Timur	Kabupaten Kepulauan Sangihe
22	pelabuhan rakyat Desa Bulo	Kabupaten Kepulauan Sangihe
23	pelabuhan rakyat Desa Mawira	Kabupaten Kepulauan Sangihe
24	pelabuhan rakyat Desa Sampakang	Kabupaten Kepulauan Sangihe
25	pelabuhan rakyat Desa Talengen	Kabupaten Kepulauan Sangihe

No	Nama Terminal Khusus	Lokasi
26	terminal khusus dermaga Bakamla Sensong	Kabupaten Kepulauan Sangihe
27	terminal khusus niaga minyak bumi dan gas bumi Tahuna Timur	Kabupaten Kepulauan Sangihe
28	terminal khusus stasiun PSDKP Sawang Bendar	Kabupaten Kepulauan Sangihe
29	terminal khusus TNI AL Tahuna	Kabupaten Kepulauan Sangihe
30	terminal khusus TNI AL Lapango	Kabupaten Kepulauan Sangihe
31	dermaga pariwisata Desa Balirangeng	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
32	dermaga pariwisata Desa Barangka Pehe	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
33	dermaga pariwisata Desa Makalehi	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
34	dermaga pariwisata Kelurahan Balehumara	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
35	dermaga pariwisata Kelurahan Tarorane	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
36	dermaga pariwisata Pantai Bira Desa Lamanggo Biaro	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
37	pelabuhan rakyat Desa Buang	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
38	pelabuhan rakyat Desa Karungo	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
39	pelabuhan rakyat Desa Matole	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
40	pelabuhan rakyat Desa Pahepa	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
41	pelabuhan rakyat Desa Pehe	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
42	pelabuhan rakyat Desa Pumpente	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
43	pelabuhan rakyat Desa Tapile	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
44	terminal khusus dermaga evakuasi bencana Desa Apelawo	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
45	terminal khusus dermaga evakuasi bencana Desa Bukide	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
46	terminal khusus dermaga evakuasi bencana Desa Deahe	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
47	terminal khusus dermaga evakuasi bencana Desa Hiung	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
48	terminal khusus dermaga evakuasi bencana Desa Lia	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
49	terminal khusus dermaga evakuasi bencana Desa Nameng	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
50	pelabuhan pariwisata Desa Lirung Satu	Kabupaten Kepulauan Talaud
51	pelabuhan pariwisata Desa Salibabu	Kabupaten Kepulauan Talaud
52	pelabuhan pariwisata Desa Sara Besar	Kabupaten Kepulauan Talaud

No	Nama Terminal Khusus	Lokasi
53	pelabuhan pariwisata Nusa Dolom	Kabupaten Kepulauan Talaud
54	pelabuhan pariwisata Nusa Tofor	Kabupaten Kepulauan Talaud
55	pelabuhan pariwisata Pulau Intata	Kabupaten Kepulauan Talaud
56	pelabuhan rakyat Desa Alo	Kabupaten Kepulauan Talaud
57	pelabuhan rakyat Desa Damau	Kabupaten Kepulauan Talaud
58	pelabuhan rakyat Desa Karatung	Kabupaten Kepulauan Talaud
59	pelabuhan rakyat Desa Kiama	Kabupaten Kepulauan Talaud
60	pelabuhan rakyat Desa Lirung Matane	Kabupaten Kepulauan Talaud
61	pelabuhan rakyat Desa Mala Timur	Kabupaten Kepulauan Talaud
62	pelabuhan rakyat Desa Mangaran	Kabupaten Kepulauan Talaud
63	pelabuhan rakyat Desa Tarohan	Kabupaten Kepulauan Talaud
64	pelabuhan rakyat Desa Taturan	Kabupaten Kepulauan Talaud
65	pelabuhan rakyat Kakorotan	Kabupaten Kepulauan Talaud
66	pelabuhan rakyat Lalue	Kabupaten Kepulauan Talaud
67	pelabuhan rakyat Laluhe	Kabupaten Kepulauan Talaud
68	pelabuhan rakyat Mala	Kabupaten Kepulauan Talaud
69	pelabuhan rakyat Pulau Mangupun Kelurahan Marampit	Kabupaten Kepulauan Talaud
70	terminal khusus PLTU Talaud Desa Tarun Selatan	Kabupaten Kepulauan Talaud
71	dermaga nelayan Desa Parentek	Kabupaten Minahasa
72	dermaga nelayan Desa Tateli Tiga	Kabupaten Minahasa
73	dermaga nelayan Desa Tumpaan	Kabupaten Minahasa
74	dermaga nelayan Kamenti Desa Kapataran Satu	Kabupaten Minahasa
75	dermaga nelayan Pasolo Desa Bukit Tinggi	Kabupaten Minahasa
76	dermaga nelayan Touloun Desa Lalumpe	Kabupaten Minahasa
77	pelabuhan pariwisata 1 Desa Mokupa	Kabupaten Minahasa
78	pelabuhan pariwisata 1 Desa Poopoh	Kabupaten Minahasa
79	pelabuhan pariwisata 1 Desa Tambala	Kabupaten Minahasa
80	pelabuhan pariwisata 1 Kalasey Satu	Kabupaten Minahasa
81	pelabuhan pariwisata 2 Desa Mokupa	Kabupaten Minahasa
82	pelabuhan pariwisata 2 Desa Poopoh	Kabupaten Minahasa
83	pelabuhan pariwisata 2 Kalasey Satu	Kabupaten Minahasa
84	pelabuhan pariwisata 3 Desa Kalasey Satu	Kabupaten Minahasa
85	pelabuhan pariwisata 3 Desa Poopoh	Kabupaten Minahasa
86	terminal khusus industri Desa Koha	Kabupaten Minahasa
87	terminal khusus pariwisata 2 Desa Tambala	Kabupaten Minahasa
88	terminal khusus pariwisata Desa Koha	Kabupaten Minahasa
89	terminal khusus pariwisata Desa Tateli Dua	Kabupaten Minahasa

No	Nama Terminal Khusus	Lokasi
90	terminal khusus pertambangan Desa Koha	Kabupaten Minahasa
91	terminal khusus TNI AD Yonif Raider 712/WT Kompi Senapan C Desa Tateli Satu	Kabupaten Minahasa
92	pelabuhan pariwisata Desa Wawontulap	Kabupaten Minahasa Selatan
93	pelabuhan rakyat Desa Bajo	Kabupaten Minahasa Selatan
94	pelabuhan rakyat Desa Sondaken	Kabupaten Minahasa Selatan
95	terminal khusus industri minyak kasar (minyak ikan) dari nabati	Kabupaten Minahasa Selatan
96	terminal khusus penyediaan tenaga listrik	Kabupaten Minahasa Selatan
97	terminal khusus penyimpanan bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas	Kabupaten Minahasa Selatan
98	terminal khusus Politeknik Desa Tawaang Timur	Kabupaten Minahasa Selatan
99	tambatan perahu nelayan Desa Tumbak	Kabupaten Minahasa Tenggara
100	terminal khusus pertambangan Desa Ratatotok Utara	Kabupaten Minahasa Tenggara
101	dermaga Desa Ehe	Kabupaten Minahasa Utara
102	dermaga pariwisata Desa Paputungan	Kabupaten Minahasa Utara
103	dermaga pariwisata Desa Wineru	Kabupaten Minahasa Utara
104	dermaga rakyat Kelurahan Talise	Kabupaten Minahasa Utara
105	pelabuhan Kinabuhutan	Kabupaten Minahasa Utara
106	pelabuhan pariwisata 1 Desa Gangga I	Kabupaten Minahasa Utara
107	pelabuhan pariwisata 1 Desa Kima Bajo	Kabupaten Minahasa Utara
108	pelabuhan pariwisata 2 Desa Gangga I	Kabupaten Minahasa Utara
109	pelabuhan pariwisata 2 Desa Kima Bajo	Kabupaten Minahasa Utara
110	pelabuhan pariwisata 2 Desa Paputungan	Kabupaten Minahasa Utara
111	pelabuhan pariwisata 2 Desa Tarabitan	Kabupaten Minahasa Utara
112	pelabuhan pariwisata Desa Bahoi	Kabupaten Minahasa Utara
113	pelabuhan pariwisata Desa Ehe	Kabupaten Minahasa Utara
114	pelabuhan pariwisata Desa Gangga I	Kabupaten Minahasa Utara
115	pelabuhan pariwisata Desa Libas	Kabupaten Minahasa Utara
116	pelabuhan pariwisata Desa Lihunu	Kabupaten Minahasa Utara
117	pelabuhan pariwisata Desa Maen	Kabupaten Minahasa Utara
118	pelabuhan pariwisata Desa Serei	Kabupaten Minahasa Utara
119	pelabuhan pariwisata Desa Tarabitan	Kabupaten Minahasa Utara
120	pelabuhan pariwisata Desa Wori	Kabupaten Minahasa Utara
121	pelabuhan rakyat Desa Bango	Kabupaten Minahasa Utara
122	pelabuhan rakyat Desa Buhias	Kabupaten Minahasa Utara

No	Nama Terminal Khusus	Lokasi
123	pelabuhan rakyat Desa Bulutui 1	Kabupaten Minahasa Utara
124	pelabuhan rakyat Desa Bulutui 2	Kabupaten Minahasa Utara
125	pelabuhan rakyat Desa Gangga I	Kabupaten Minahasa Utara
126	pelabuhan rakyat Desa Gangga II	Kabupaten Minahasa Utara
127	pelabuhan rakyat Desa Jayakarsa	Kabupaten Minahasa Utara
128	pelabuhan rakyat Desa Kinabuhutan	Kabupaten Minahasa Utara
129	pelabuhan rakyat Desa Kulu	Kabupaten Minahasa Utara
130	pelabuhan rakyat Desa Mantehage III Tinongko	Kabupaten Minahasa Utara
131	pelabuhan rakyat Desa Tambun	Kabupaten Minahasa Utara
132	pelabuhan rakyat Desa Tiwoho	Kabupaten Minahasa Utara
133	pelabuhan rakyat Likupang	Kabupaten Minahasa Utara
134	terminal khusus Bakamla Zona Maritim Tengah Likupang	Kabupaten Minahasa Utara
135	terminal khusus dermaga pertambangan Desa Lilang	Kabupaten Minahasa Utara
136	terminal khusus industri 1 Desa Wineru	Kabupaten Minahasa Utara
137	terminal khusus industri 2 Desa Wineru	Kabupaten Minahasa Utara
138	terminal khusus industri Desa Talise	Kabupaten Minahasa Utara
139	terminal khusus Lab Basah Desa Kampung Ambong	Kabupaten Minahasa Utara
140	terminal khusus pertambangan Desa Rinondoran	Kabupaten Minahasa Utara
141	terminal khusus PLTU Desa Kema I	Kabupaten Minahasa Utara
142	dermaga pariwisata 1 Kelurahan Makawidey	Kota Bitung
143	dermaga pariwisata 2 Kelurahan Makawidey	Kota Bitung
144	dermaga pariwisata Kelurahan Manembo-Nembo	Kota Bitung
145	dermaga pariwisata Pintu Kota Kecil Kelurahan Batu Kota	Kota Bitung
146	dermaga tugu wisata Trikora Kelurahan Batulubang	Kota Bitung
147	pelabuhan pariwisata 1 Kelurahan Kasawari Aertembaga	Kota Bitung
148	pelabuhan pariwisata 1 Kelurahan Makawidey	Kota Bitung
149	pelabuhan pariwisata 1 Kelurahan Tandurusa	Kota Bitung
150	pelabuhan pariwisata 2 Kelurahan Kasawari Aertembaga	Kota Bitung
151	pelabuhan pariwisata 2 Kelurahan Makawidey	Kota Bitung
152	pelabuhan pariwisata 2 Kelurahan Tandurusa	Kota Bitung

No	Nama Terminal Khusus	Lokasi
153	pelabuhan pariwisata Kelurahan Pintu Kota	Kota Bitung
154	pelabuhan rakyat Kelurahan Pateten Dua	Kota Bitung
155	terminal khusus Bakamla Bitung	Kota Bitung
156	terminal Khusus industri Kelurahan Paudean	Kota Bitung
157	terminal khusus industri pengolahan ikan Kelurahan Manembo-nembo	Kota Bitung
158	terminal khusus pariwisata Kelurahan Batukota	Kota Bitung
159	terminal khusus perikanan Kelurahan Aertembaga Satu	Kota Bitung
160	terminal khusus PSDKP Kelurahan Aertembaga Dua	Kota Bitung
161	terminal khusus wisata kebun binatang Tandurusa	Kota Bitung
162	TUKS BBM 1 Kelurahan Kadoodan	Kota Bitung
163	TUKS BBM 2 Kelurahan Kadoodan	Kota Bitung
164	TUKS dermaga pariwisata Tandurusa	Kota Bitung
165	TUKS Dermaga Pol Air Polda Sulut Kelurahan Tandurusa	Kota Bitung
166	TUKS Distrik Navigasi Kelurahan Tandurusa	Kota Bitung
167	TUKS industri 1 Kelurahan Aertembaga Dua	Kota Bitung
168	TUKS industri 1 Kelurahan Aertembaga Satu	Kota Bitung
169	TUKS industri 1 Kelurahan Kadoodan	Kota Bitung
170	TUKS industri 1 Kelurahan Madidir Unet	Kota Bitung
171	TUKS industri 1 Kelurahan Madidir Ure	Kota Bitung
172	TUKS industri 1 Kelurahan Madidir Weru	Kota Bitung
173	TUKS industri 1 Kelurahan Paceda	Kota Bitung
174	TUKS industri 1 Kelurahan Pateten Dua	Kota Bitung
175	TUKS industri 1 Kelurahan Winenet Dua	Kota Bitung
176	TUKS industri 2 Kelurahan Aertembaga Dua	Kota Bitung
177	TUKS industri 2 Kelurahan Aertembaga Satu	Kota Bitung
178	TUKS industri 2 Kelurahan Madidir Unet	Kota Bitung
179	TUKS industri 2 Kelurahan Madidir Ure	Kota Bitung
180	TUKS industri 2 Kelurahan Madidir Weru	Kota Bitung

No	Nama Terminal Khusus	Lokasi
181	TUKS industri 2 Kelurahan Paceda	Kota Bitung
182	TUKS industri 2 Kelurahan Pateten Dua	Kota Bitung
183	TUKS industri 2 Kelurahan Winenet Dua	Kota Bitung
184	TUKS industri 3 Kelurahan Aertembaga Dua	Kota Bitung
185	TUKS industri 3 Kelurahan Aertembaga Satu	Kota Bitung
186	TUKS industri 3 Kelurahan Paceda	Kota Bitung
187	TUKS industri 4 Kelurahan Aertembaga Dua	Kota Bitung
188	TUKS industri 4 Kelurahan Aertembaga Satu	Kota Bitung
189	TUKS industri 4 Kelurahan Paceda	Kota Bitung
190	TUKS industri 5 Kelurahan Aertembaga Dua	Kota Bitung
191	TUKS industri 5 Kelurahan Paceda	Kota Bitung
192	TUKS industri 6 Kelurahan Aertembaga Dua	Kota Bitung
193	TUKS industri Kelurahan Bitung Timur	Kota Bitung
194	TUKS industri Kelurahan Girian Bawah	Kota Bitung
195	TUKS industri Kelurahan Kelapa Dua	Kota Bitung
196	TUKS industri Kelurahan Manembo-nembo	Kota Bitung
197	TUKS industri Kelurahan Pateten Satu	Kota Bitung
198	TUKS industri Kelurahan Tanjung Merah	Kota Bitung
199	TUKS industri Kelurahan Wangurer Timur	Kota Bitung
200	TUKS niaga minyak bumi dan gas bumi 1 Kelurahan Bitung Barat Satu	Kota Bitung
201	TUKS niaga minyak bumi dan gas bumi 2 Kelurahan Bitung Barat Satu	Kota Bitung
202	TUKS niaga minyak bumi dan gas bumi Kelurahan Bitung Tengah	Kota Bitung
203	TUKS pariwisata Kelurahan Mawali	Kota Bitung
204	TUKS penyalur bahan bakar Kelurahan Wangurer Barat	Kota Bitung
205	TUKS Politeknik Kelurahan Aertembaga Dua	Kota Bitung
206	TUKS TNI AL Bitung	Kota Bitung
207	TUKS TNI AL Kelurahan Aertembaga Dua	Kota Bitung
208	pelabuhan pariwisata 1 Kelurahan Bunaken	Kota Manado
209	pelabuhan pariwisata 1 Kelurahan Molas	Kota Manado

No	Nama Terminal Khusus	Lokasi
210	pelabuhan pariwisata 2 Kelurahan Bunaken	Kota Manado
211	pelabuhan pariwisata 2 Kelurahan Malalayang Dua	Kota Manado
212	pelabuhan pariwisata 2 Kelurahan Molas	Kota Manado
213	pelabuhan pariwisata Kelurahan Alung Banua	Kota Manado
214	pelabuhan pariwisata Kelurahan Calaca	Kota Manado
215	pelabuhan pariwisata Kelurahan Tongkaina	Kota Manado
216	pelabuhan pariwisata Kelurahan Wenang Selatan	Kota Manado
217	pelabuhan pariwisata Kelurahan Wenang Utara	Kota Manado
218	pelabuhan rakyat Kelurahan Alung Banua	Kota Manado
219	pelabuhan rakyat Kelurahan Manado Tua Dua	Kota Manado
220	pelabuhan rakyat Kelurahan Tongkaina	Kota Manado
221	pelabuhan rakyat Papindang Kelurahan Manado Tua Satu	Kota Manado

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI

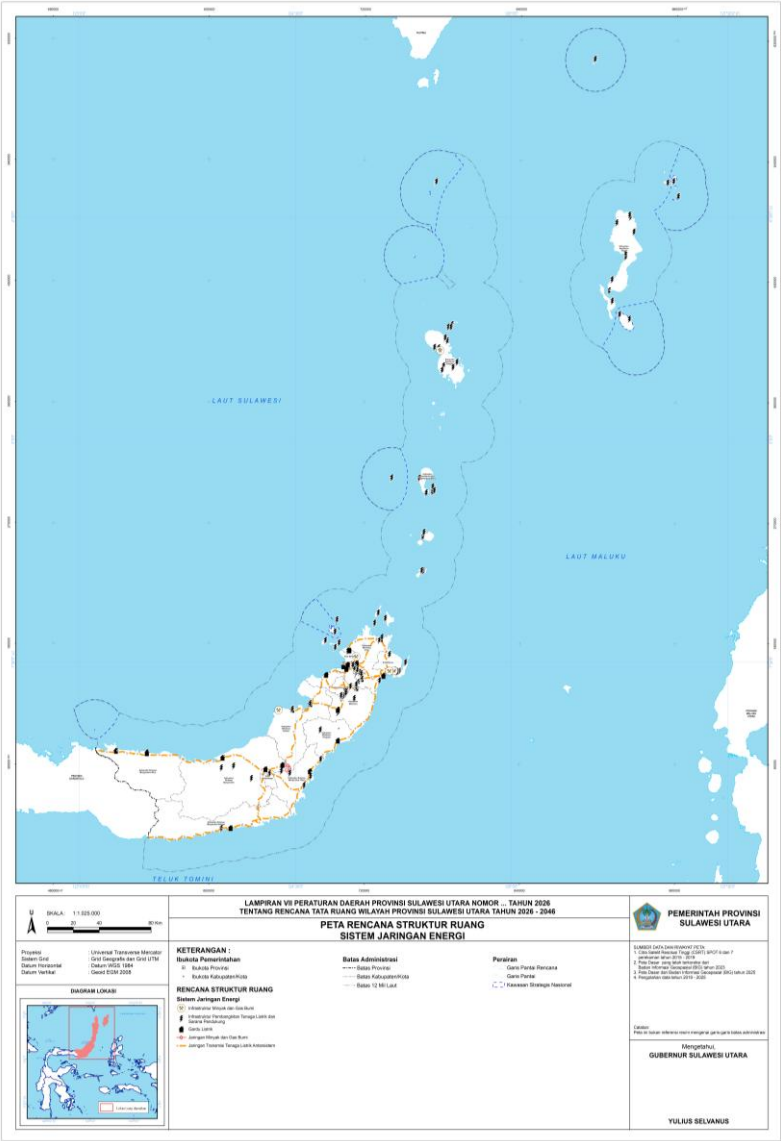

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

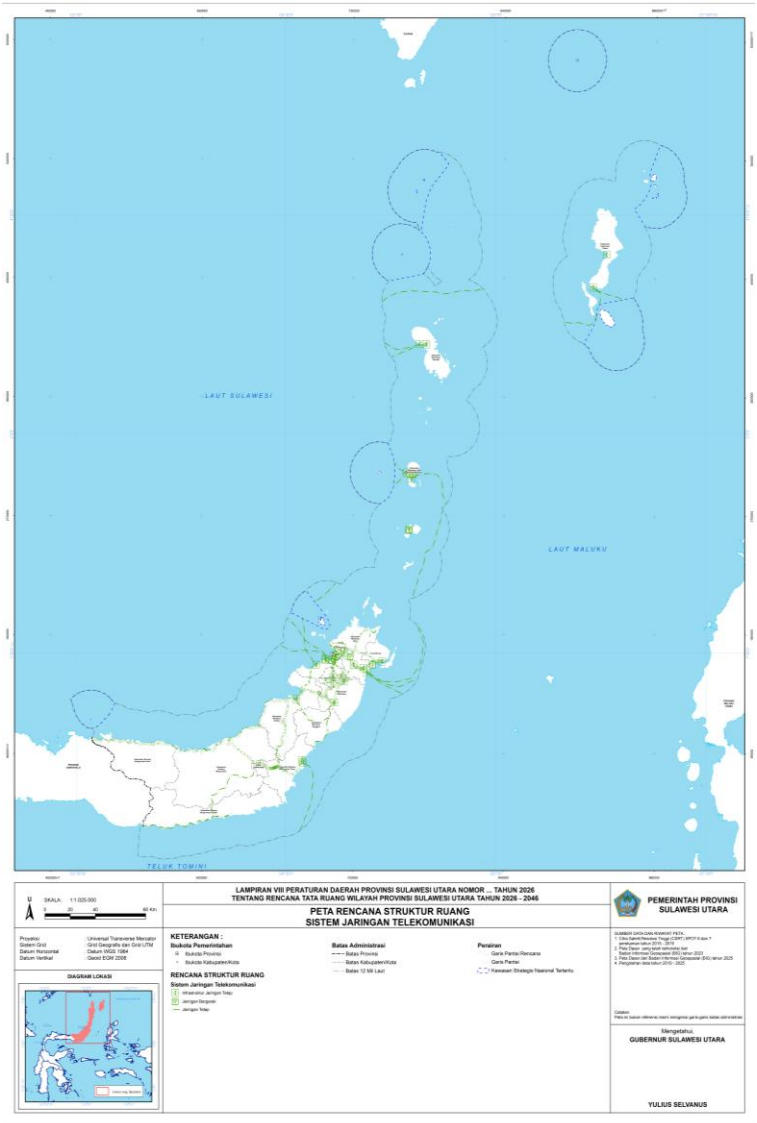

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

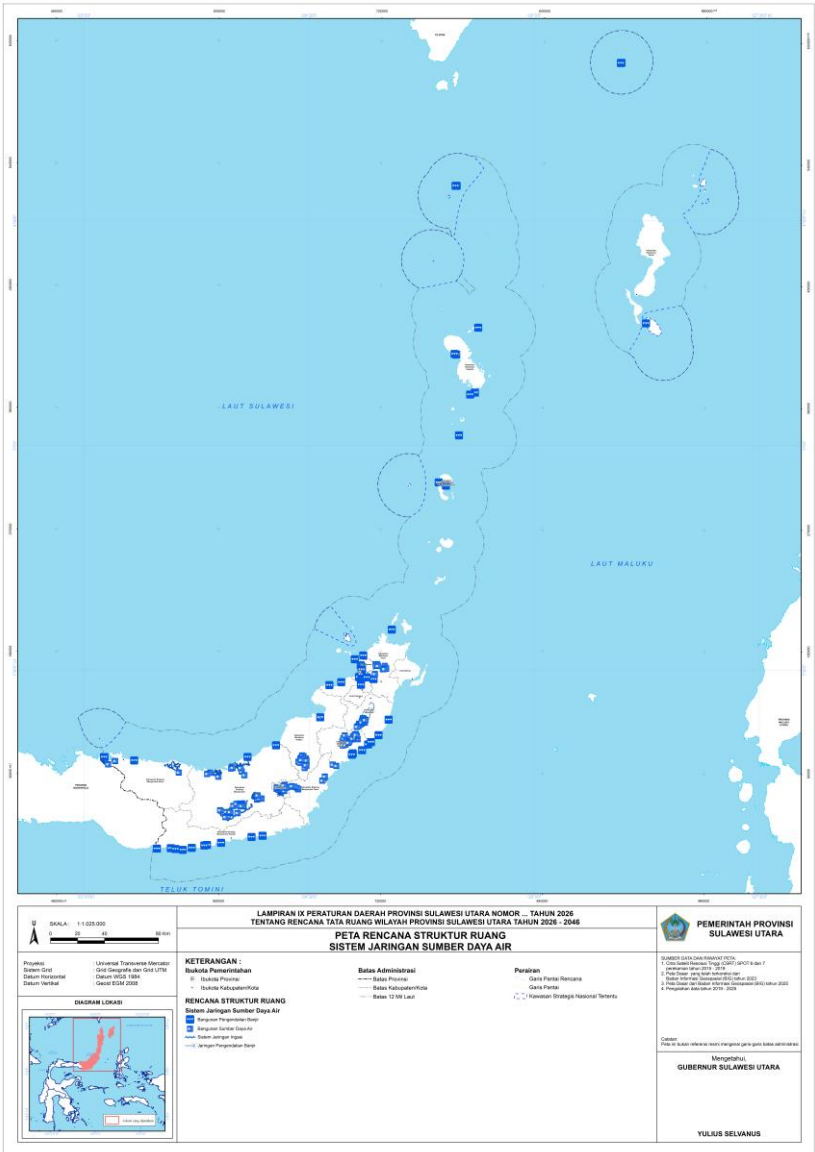

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

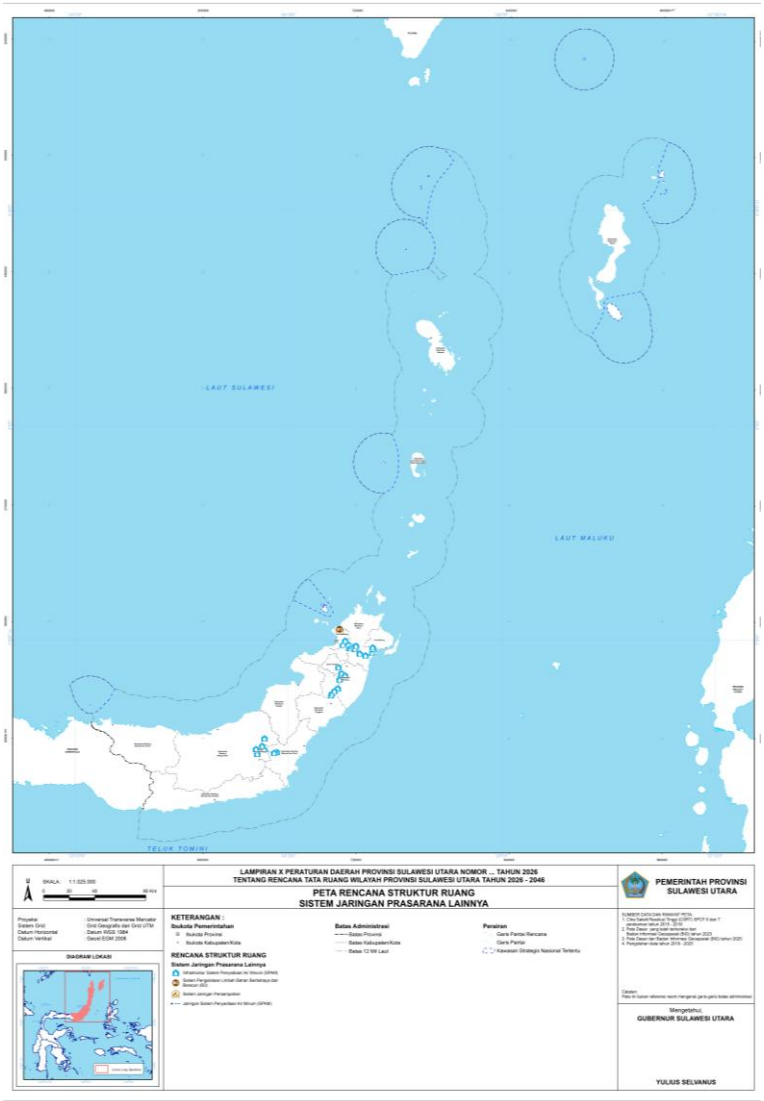

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA RENCANA POLA RUANG WILAYAH

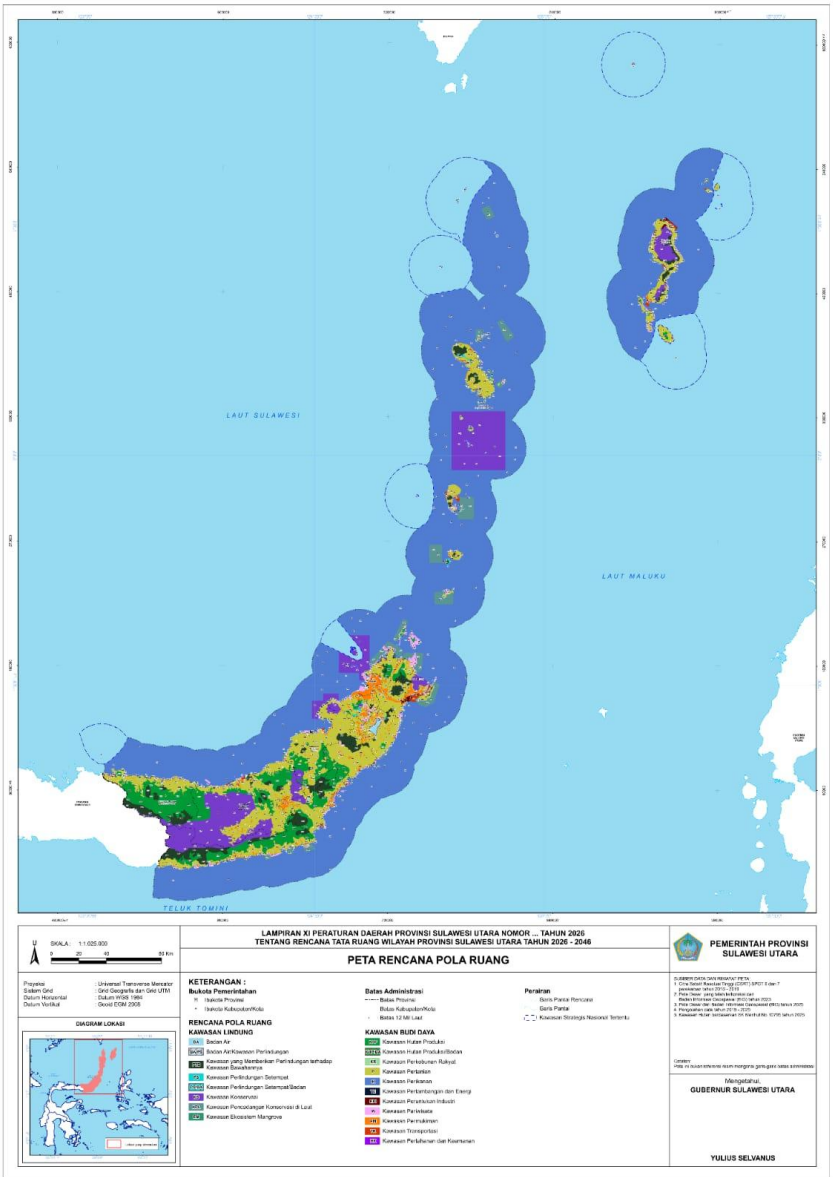

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

ASET SERTA RENCANA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

A. TNI Angkatan Darat
1. Makodam XIII/Mdk Kota Manado
2. Makodim 1302/Min Kabupaten Minahasa
3. Makodim 1303/BM Kota Kotamobagu
4. Kodim 1309/Manado Unit Inteldim Kota Manado
5. Kodim 1309/Mdo Kota Manado
6. Makodim 1310/BitungKota Bitung
7. Denpom XIII/1/C Tikala Kota Manado
8. Sub Den Pom Rem 131/Stg Kota Manado
9. Makodim Kota Bitung,
10. Kodim 1312/Tld Kabupaten Kepulauan Talaud
11. Korem 131/Stg, Tim Intelrem Kota Manado
12. Denhubrem 131/Stg. Kota Manado
13. Tim Intelrem Kota Manado
14. Ajenrem 131 Kota Manado
15. Ajenrem 131/Stg Kota Manado
16. Denzibang 1/XIII, Kota Manado
17. Denkesyah Rem 131/Stg Kota Manado
18. Rindam XIII/Mdk
    a. Mako Rindam Kota Tomohon
    b. Dodikjur Rindam XIII/Mdk Kota Tomohon,
    c. Dodiklatpur Rindam XIII/Mdk Kab. Minahasa
    d. Secaba Rindam XIII/Mdk Kab. Minahasa Selatan
    e. Secata Rindam XIII/Mdk Kota Bitung
19. Hubdam XIII/Mdk Kota Manado
20. Mazidam XIII/Mdk Kota Manado
21. Mapaldam XIII/Mdk Kota Manado
22. Bengrah XIII/Manado Kota Manado
23. POMAL LANTAMALVIII Kota Manado
24. Pomdam XIII/Mdk, Mazidam XIII/Mdk, Hubdam XIII/Mdk, Mapaldam XIII/Mdk, Maajendam XIII/Mdk, Mabekangdam XII/Mdk, Babinminvitcadda XII/Mdk, Makumdam XIII/Mdk, Makesdam XIIII/Mdk, Rumkit Tk III, Makudam XIII/Mdk,

Matopdam XIII/Mdk, Jasdam XIII/Mdk, Bintaldam XIII/Mdk, Pendam XIII/Mdk, Infolahtadam XIII/Mdk, Denmadam XII/Mdk, Setumdam XIII/Mdk, Sansidam XIII/Mdk, Puskodalopsdam XIII/Mdk

25. Yonif R 712/WT.
    a. Mayon dan Kima Ds. Loreng Kel. Bailang Kota Manado
    b. Kipan A Ds. Tateli Kabupaten Minahasa
    c. Kipan B Ds. Sukur Kabupaten Minut
    d. Kipan C Ds. Tateli Kabupaten Minahasa
    e. Kiban Ds. Paniki Kabupaten Manado
26. Kodam XIII/Mdk Kota Manado
27. Denpal Rem 131/Stg Kota Manado
28. Ajendam XIII/Manado Kota Manado
29. Gudmurah Dam Xlll Kota Tomohon
30. Yon Armed 19 105/Tarik, Kabupaten Bolaang Mongondow
31. Yonarmed/19/105/MM/Tarik/Bogani Kabupaten Bolaang Mongondow
32. Eks Kodam XIII/Merdeka Kota Manado
33. Rencana Guest House Kota Manado
34. Denbekang XIII-44-01.B Kota Manado
35. Asrama Pa SM IV Kota Manado
36. Rumah Dinas Kajen Rem 131/Santiago Kota Manado
37. Wisma Merdeka I diKota Manado
38. Rumah Dinas Danrem 131/Santiago Kota Manado
39. Asrama Kombos Kota Manado
40. Eks Cadnas Kabupaten Minahasa
41. Eks Satlak Pom VII/1 Kota Manado
42. Koramil Wenang Kota Manado
43. Makodim 1301/Sangihe Kab. Kepulauan Sangihe
44. Rumah Dinas Kasdim 1301/Satal Kabupaten Kepulauan Sangihe
45. Rumah Dinas Dandim 1301/Satal Kabupaten Kepulauan Sangihe
46. Rumah Dinas Pa tipe H-70 Kabupaten Kepulauan Sangihe
47. Rumah Dinas Kodim Kabupaten Kepulauan Sangihe
48. Kesdim Kelurahan Bungalawan Kabupaten Kepulauan Sangihe
49. Rumah Dinas Kodim tipe K-38 Kabupaten Kepulauan Sangihe
50. Koramil 1301-01/Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
51. Rumah Dinas Babinsa 1301-01 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
52. Rumah Dinas Babinsa 1301-01 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
53. Eks. Koramil 1301-02 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

54. Koramil 1301-02/Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
55. Rumah Dinas Babinsa 1301-02 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
56. Pos Babinsa Lamanggo Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
57. Koramil 1301-03/Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe
58. Rumah Dinas Koramil 1301-03 Kabupaten Kepulauan Sangihe
59. Koramil 1301-04/Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe
60. Koramil 1301-05/Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe
61. Koramil 1301-06 Kabupaten Kepulauan Sangihe
62. Koramil 1301-07 Kabupaten Kepulauan Sangihe
63. Koramil 1301-08 Kabupaten Kepulauan Sangihe
64. Koramil 1301-09 Kabupaten Kepulauan Sangihe
65. Koramil Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe
66. Rumah Dinas Babinsa 1301-07 Kabupaten Kepulauan Sangihe
67. Rumah Dinas Koramil 1301-09 Kabupaten Kepulauan Sangihe
68. Kantor Koramil Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe
69. Koramil 1301-10 Kabupaten Kepulauan Sangihe
70. Polkes 13.09.01/Satal Kabupaten Kepulauan Sangihe
71. Subdenpom XIII/1-1/C Kabupaten Kepulauan Sangihe
72. Subdenpom XIII/1-2 Kota Bitung
73. Subdenpom XIII/1-2/C Kota Bitung
74. Rumah Dinas Babinsa 1301-06 Kabupaten Kepulauan Sangihe
75. Rumah Dinas Babinsa 1301-08 Kabupaten Kepulauan Sangihe
76. Rumah Dinas Babinsa 1301-09 Kabupaten Kepulauan Sangihe
77. Rumah Dinas Babinsa 1301-01 Kabupaten Kepulauan Sangihe
78. Rumah Dinas Babinsa 1301-02 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
79. Rumah Dinas Babinsa 1301-05 Beha Kabupaten Kepulauan Sangihe
80. Kantor BCA/Lintas Batas Kabupaten Kepulauan Talaud
81. Kantor BCA/Lintas Batas Kabupaten Kepulauan Sangihe
82. Kantor Koramil Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud
83. Kantor Koramil Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe
84. Barak Siaga TNI Kabupaten Kepulauan Talaud
85. Pos Koramil 1301-07 Kabupaten Kepulauan Sangihe
86. Pos Koramil 1301-07 Kabupaten Kepulauan Sangihe
87. Kantor Koramil Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud
88. Kantor Kodim Talaud Kabupaten Kepulauan Talaud
89. Rumah Dinas Dandim dan Kasdim Talaud Kabupaten Kepulauan Talaud
90. Rd. Babinsa 1301-02/Siau Timur

91. Pos Perbatasan Koramil 1301-05/Tahuna
92. Pos Perbatasan Koramil 1301-05/Tahuna
93. Tanah Kosong 1301-06/Kendahe
94. Rumdis Babinsa Kodim 1301
95. Pos jaga Perbatsab Desa Lipang
96. Pos jaga Perbatsan Desa Matutuang
97. Rumdis Koramil Siau Tagulandang Biaro
98. Pospamtas Marore
99. Rumdis Koramil Marore
100. Kesdim 1302 Kabupaten Minahasa
101. Rumah Dinas Dandim 1302 Kabupaten Minahasa
102. Koramil 1302-01/Tondano Kabupaten Minahasa
103. Rumah Dinas Babinsa 1302-01 Kabupaten Minahasa
104. Koramil 1302-02/Eris Kabupaten Minahasa
105. Eks. Koramil 1302-02 Kabupaten Minahasa
106. Koramil 1302-03/Kakas Kabupaten Minahasa
107. Rumah Dinas Koramil 1302-03 Kabupaten Minahasa
108. Koramil 1302-04/Remboken Kabupaten Minahasa
109. Rumah Dinas Koramil 1302-04 Kabupaten Minahasa
110. Koramil 1302-05/Kombi Kabupaten Minahasa
111. Rumah Dinas Koramil 1302-05 Kabupaten Minahasa
112. Koramil 1302-06/Tomohon Kota Tomohon
113. Koramil 1302-07/Tombariri Minahasa
114. Rumah Dinas Koramil 1302-08 Kabupaten Minahasa
115. Rumah Dinas Babinsa 1302-08 Kabupaten Minahasa Selatan
116. Rumah Dinas Koramil 1302-09 Kabupaten Minahasa
117. Koramil 1302-08/Kawangkoan Kabupaten Minahasa
118. Koramil 1302-09/Langowan Kabupaten Minahasa
119. Koramil 1302-10/Sonder Kabupaten Minahasa
120. Koramil 1302-11/Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara
121. Rumah Dinas Koramil 1302-11 Kabupaten Minahasa Tenggara
122. Koramil 1302-12/Belang Kabupaten Minahasa Tenggara
123. Rumah Dinas Koramil 1302-12 Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara
124. Koramil 1302-13/Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara
125. Koramil 1302-14/Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
126. Koramil 1302-15/Tenga Kabupaten Minahasa Selatan
127. Koramil 1302-16/Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan
128. Koramil 1302-17/Motoling Kabupaten Minahasa Selatan
129. Koramil 1302-18/Tompaso Kabupaten Minahasa Selatan
130. Rumah Dinas Koramil 1302-18 Baru Kabupaten Minahasa Selatan
131. Koramil 1302-19/Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan
132. Rumah Dinas Koramil 1302-19 Kabupaten Minahasa Selatan

133. Rumah Dinas Babinsa 1302-19 Kabupaten Minahasa Selatan
134. Rumah Dinas Babinsa 1302-09 Kabupaten Minahasa
135. Rumah Dinas Babinsa 1302-12 Kabupaten Minahasa Tenggara
136. Rumah Dinas Babinsa 1302-13 Kabupaten Minahasa Tenggara
137. Rumdis Kodim 1302/Minahasa
138. Tanah lapangan 1302-03/Kakas
139. Rumdis Babinsa 1302-08/Kawangkoan
140. Rumdis Koramil 1302-09/Langowan
141. Gudang Latpur Rindam XIII/Mdk
142. Eks. Koramil 1302-14
143. Eks Kipan C Yonif 712/WT (Secaba Amurang)
144. Lapangan Tembak Amurang barat
145. Puslatpur Noongan
146. Tanah Kosong kec Wongkai
147. Tanah Kosong Kec Kakas
148. Tanah Kosong Kodim 1302/Minahasa Kec Toluaan
149. Tanah Kosong Kodim 1302/Minahasa kec Desa Pondang
150. Menara Pos Jaga Kodim 1302/Mhs Kec Posumaen
151. Rumah Dinas Dandim Kota Kotamobagu
152. Rumah Dinas Pa Kota Kotamobagu
153. Kesdim Kota Kotamobagu
154. Koramil 1303-01/Kotamobagu Kota Kotamobagu
155. Rumah Dinas Babinsa 1303-01 Besar Kota Kotamobagu
156. Rumah Dinas Babinsa 1303-01 Kota Kotamobagu
157. Rumah Dinas Kodim Kota Kotamobagu
158. Rumah Dinas Pa Kodim Kota Kotamobagu
159. Koramil 1303-02/Passi Kota Kotamobagu
160. Polisi Militer Kota Kotamobagu
161. Koramil 1303-03/Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
162. Rumah Dinas Babinsa 1303-03 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
163. Koramil 1303-04/Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow
164. Eks. Koramil 1303-04 Kabupaten Bolaang Mongondow
165. Koramil 1303-05/Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
166. Eks. Koramil 1303-05 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
167. Koramil 1303-06/ Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
168. Pos Koramil Dumagin Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
169. Eks. Koramil 1303-06/Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
170. Koramil 1303-07/Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow
171. Rumah Dinas Babinsa 1303-07 Kabupaten Bolaang Mongondow

172. Rumah Dinas Babinsa 1303-07 Kabupaten Bolaang Mongondow
173. Koramil 1303-08/Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
174. Koramil Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
175. Eks. Koramil 1303-08 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
176. Koramil 1303-09/Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow
177. Eks. Koramil 1303-09 bonto Kabupaten Bolaang Mongondow
178. Rumah Dinas Babinsa 1303-09 Kabupaten Bolaang Mongondow
179. Koramil 1303-10/Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow
180. Eks. Koramil 1303-10 Kabupaten Bolaang Mongondow
181. Koramil 1303-11/Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow
182. Eks. Koramil 1303-11 Kabupaten Bolaang Mongondow
183. Koramil 1303-12/Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow
184. Eks. Koramil 1303-12 Kabupaten Bolaang Mongondow
185. Koramil 1303-13/Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
186. Koramil 1303-14/Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
187. Rumah Dinas Koramil 1303-14 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
188. Eks. Koramil 1303-14 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
189. Koramil 1303-15/Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
190. Densubpom Kotamobagu Kota Kotamobagu
191. Kantor Densub POM Kotamobagu Kota Kotamobagu
192. Rumah Dinas Babinsa 1303-02 Kabupaten Bolaang Mongondow
193. Rumah Dinas Babinsa 1303-05 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
194. Rumah Dinas Babinsa 1303-10 Kabupaten Bolaang Mongondow
195. Rumah Dinas Babinsa 1303-03 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
196. Kodim 1303/BM Kota Kotamobagu
197. Rumkitban 13.08.02 Kotamobagu
198. Rumdis Kesdim 1303/Bolmong
199. Rumdis Babinsa 1303-10/Poigar
200. Rumdis Koramil 1303-02/Passi
201. Tanah dan Bangunan Pos Koramil Pinolosian timur
202. Tanah Kosong desa Pilolahunga
203. Tanah dan Bangunan Kantor 3 Pilar
204. Persiapan Kantor Kodim 1303 Bolmong Selatan
205. Persiapan Kantor Korem Bolmong
206. Pos Babinsa Koramil Bolmut
207. Pos Jaga Babinsa Buko selatan
208. Pos Jaga Babinsa Bohabak I
209. Pos Jaga Babinsa Tanoyan Selatan

210. Persiapan kantor Kodim Boltim
211. Koramil 1309-01 Kota Manado
212. Mes Babinsa 1309-01 Kota Manado
213. Rumah Dinas Perwira Kota Manado
214. Rumah Dinas Koramil 1309-01 Kota Manado
215. Koramil 1309-02 Kota Manado
216. Rumah Dinas Babinsa 1309-02 Kota Manado
217. Mes Babinsa 1309-01 Kota Manado
218. Koramil 1309-03 Kota Manado
219. Rumah Dinas Babinsa 1309-02 Kota Manado
220. Koramil Tuminting Kota Manado
221. Koramil 1309-04 Kabupaten Minahasa
222. Rumah Dinas Babinsa 1309-04 Kabupaten Minahasa
223. Rumah Dinas Babinsa 1309-04 Kabupaten Minahasa
224. Koramil 1309-05 Kabupaten Minahasa Utara
225. Den Pomdam XIII/Mdk Kota Manado
226. Tk Persit
227. Eks Kudam XIII/Mdk
228. Asrama Denpal
229. Lapbak. Kipan D Yonif Raider 712/WT
230. Rumdis Babinsa 1309-05/Wori desa Talawaan atas
231. Rumdis Babinsa 1309-05/Wori desa Mantahage Tinongko
232. Rumdis Koramil Batu Kota
233. Rumah Dinas Babinsa 1309-10 Atas Kabupaten Minahasa Utara
234. Rumah Dinas Babinsa 1309-10 Tinongko Kabupaten Minahasa Utara
235. Rumah Dinas Babinsa 1310-09 Kabupaten Minahasa Utara
236. Koramil 1310-08 Kelurahan Saroinsong Kabupaten Minahasa Utara
237. Koramil 1310-03/Likupang Kabupaten Minahasa Utara
238. Koramil 1310-04/Dimembe Kabupaten Minahasa Utara
239. Koramil 1310-05/Kauditan Kabupaten Minahasa Utara
240. Koramil 1310-06/Airmadi Kabupaten Minahasa Utara
241. Kompi Kavaleri 10/Manguni Setia Cakti
242. Komando Distrik Militer 1310, Likupang
243. Rumah Dinas Koramil 1310-06 Kabupaten Minahasa Utara
244. Koramil 1310-01 Kota Bitung
245. Mes Babinsa 1310-01 Kota Bitung
246. Koramil 1310-02/Lembeh Kota Bitung
247. Rumah Dinas Koramil 1310-03 Bitung Selatan Kota Bitung
248. Rumah Dinas Babinsa 1310-02 Bitung Selatan Kota Bitung
249. Rumah Dinas Babinsa 1310-03 Kabupaten Minahasa Utara
250. Rumah Dinas Babinsa 1310-06 Kabupaten Minahasa Utara
251. Asrama Kodim 1310/Bitung Kota Bitung

252. Asrama Kodim 1310/Bitung Bitung
253. Rumdis Babinsa 1310-06/Airmadidi
254. Lapangan tembak Kec Aermadidi
255. Kantor Sub Denpom XIII-21
256. Tanah Kosong 1310-03/Likupang Desa Serey
257. Lapangan Tembak Secata Rindam Desa Girian Indah
258. Kompi C Yonzipur 19/Ykn Ds. Sukur Kabupaten Minut
259. Makoramil 1312-01/Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud
260. Rumah Dinas Danramil 1312-01 Kabupaten Kepulauan Talaud
261. Makoramil 1312-02/Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud
262. Rumah Dinas Danramil 1312-02/Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud
263. Rumah Dinas Babinsa Kabupaten Kepulauan Talaud
264. Makoramil 1312-03/Beo Kabupaten Kepulauan Talaud
265. Rumah Dinas Danramil Kabupaten Kepulauan Talaud
266. Makoramil 1312-04/Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud
267. Rumah Dinas Danramil Kabupaten Kepulauan Talaud
268. Makoramil 1312-05/Essang Kabupaten Kepulauan Talaud
269. Makoramil 1312-06/Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud
270. Rumah Dinas Danramil Kabupaten Kepulauan Talaud
271. Rumah Dinas Babinsa Timur Kabupaten Kepulauan Talaud
272. Makoramil 1312-07/Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud
273. Pos Angkatan Darat Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud
274. Rumah Dinas Babinsa Kabupaten Kepulauan Talaud
275. Makoramil 1312-08/Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud
276. Rumah Dinas Danramil Kabupaten Kepulauan Talaud
277. Rumah Dinas Babinsa Kabupaten Kepulauan Talaud
278. Rumdis Koramil 1312-02/Lirung
279. Rumdis Babinsa 1312-03/Beo
280. Rumdis Babinsa 1312-04/Rainis
281. Rumdis Babinsa 1312-05/Esang
282. Rumdis Babinsa 1312-07/Miangas
283. Rumdis Babinsa 1312-03/Beo
284. Rumdis Babinsa 1312-05/Esang
285. Rumdis Babinsa 1312-06/Nanusa
286. Posad TNI AD Miangas
287. Ktr BCA/Lintas Batas Miangas
288. Barak Siaga TNI Marampit
289. Rumdis Kodim 1312/Talaud
290. Rumdis Jabatan/Mess Kodim Talaud
291. Tanah Kosong (Persiapan Koramil 1312-01) Kec. Damau
292. Tanah Kosong (Persiapan Koramil 1312-01) Kec. Damau
293. Tanah Kosong (Koramil 1312-04) Kec. Tampaanama

294. Rumdis PA Kodim 1312/Talaud
295. Rumdis Koramil Karatung
296. Rumdis kodim Talaud
297. Pos Pamtas Kodim Talaud
298. Denhubrem 131 Jln 14 Februari Kota Manado
299. Mabekangdam Utara Kota Manado
300. Babinminvitcaddan Utara Kota Manado
301. Makumdam XIII/Mdk Utara Kota Manado
302. Makesdam XIII/Mdk Utara Kota Manado
303. Rumkit Tk III Teling Atas Kota Manado
304. Makudam XIII/Mdk Utara Kota Manado
305. Matopdam XIII/Mdk Utara Kota Manado
306. Jasdam XIII/Mdk Utara Kota Manado
307. Bintaldam XII/Mdk Utara Kota Manado
308. Pendam XIII/Mdk Utara Kota Manado
309. Infolahtadam XIII/Mdk Utara Kota Manado
310. Asrama Ton Intel (Eks Wisma Lililotor) Kota Manado
311. Eks Rd SD Persit IV Kota Manado
312. Asgab SM V Kota Manado
313. Eks Paldam Beringin Kota Manado
314. Will Box Selatan Kota Manado
315. Eks Asrama Perawat Utara Kota Manado
316. Eks Pulahta Rem 131/Santiago Utara Kota Manado
317. Asgab SM XII Kota Manado
318. Asgab SM XIII Kota Manado
319. Eks Kodam XIII/Merdeka Kota Manado
320. Asgab SM IX Kota Manado
321. Asgab SM XV Kota Manado
322. Kantor Puskopad B Kota Manado
323. Rencana Guest House Kota Manado
324. Asrama Pa SM IV Kota Manado
325. Asgab SM III Kota Manado
326. Rumah Dinas Kajen Rem 131/Santiago Kota Manado
327. Wisma Merdeka I Kota Manado
328. Rumah Dinas Perwira Kota Manado
329. Wisma Merdeka II Kota Manado
330. Asgab SM VIII/APT Kota Manado
331. Eks Hubyah Kota Manado
332. RD Danrem 131/Santiago Kota Manado
333. Mes Cakalele Kota Manado
334. Wisma A. Yani I Kota Manado
335. Asrama Ton Intel Kota Manado
336. Kantor Ajen Rem 131/Santiago Kota Manado

337. Eks Satlak Pom VII/1 Kota Manado
338. Persit Kartika Chandra Kirana Korem 131
339. Eks. Kipan C. Yonif 712/WT Kabupaten Minahasa Selatan
340. Kipan C. Yonif 712/WT Kabupaten Minahasa Selatan
341. Mayonif 712/WT dan Rumah Sakit Kota Manado
342. Yonif 712/WT Kota Manado
343. Kipan D. Yonif 712/WT Kota Manado
344. Kipan C Yonif 713/ST Kota Kotamobagu
345. Yonzipur 19/YKN Desa Maumbi Kabupaten Minahasa Utara
346. Sumber Air Denzipur-4/YKN Desa Suwaan Kabupaten Minahasa Utara
347. Asrama Denzipur-4/YKN Kelurahan Pakowa Kota Manado
348. Kikav Serbu Dam VII/Wrb Desa Wori Kabupaten Minahasa Utara
349. Puslatpur Noongan Desa Noongan Kabupaten Minahasa
350. Secata "B" Eks. Gudang Amunisi Rindam XIII/Merdeka Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung
351. Gudang Peralatan Tempur Desa Noongan Kabupaten Minahasa
352. Secata "B" Eks Gudang Munisi Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung
353. Mako Kakaskaseen Kota Tomohon
354. Koramil-06/Tomohon Walian Kota Tomohon
355. Koramil 01/STB Kelurahan Bitung Karangria Kota Manado
356. Koramil 02/WTPM Kelurahan Calaca Kota Manado
357. Koramil 03/WSM Kelurahan Karombasan Utara Kota Manado
358. Koramil Wanea Kota Manado
359. Koramil 04/PTM Desa Pineleng Kabupaten Minahasa
360. Koramil 05/WORI Desa Wori Kabupaten Minahasa Utara
361. Latihan Tembak Kikav 10/Msc Desa Wori Kabupaten Minahasa Utara
362. Latbakjatratpur Kikav 10/Msc Desa Tiwohi Kabupaten Minahasa Utara
363. Noongan Kompleks Kabupaten Minahasa
364. Denkesyah 13.12.01 Manado
365. Daerah Latihan Kodam XIII/Merdeka Wilayah Korem 131/Santiago Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
366. Rumkitban 13.08.02 Kotamobagu Kota Kotamobagu
367. Lapangan tembak Kodim 1301/Sgh Kabupaten Kepulauan Sangihe
368. Lapangan Tembak Kodim 1302/Min Kabupaten Minahasa
369. Lapangan Tembak Kodim 1303/BM Kabupaten Bolaang Mongondow
370. Lapangan Tembak Yonzipur 19/Ykn Kabupaten Minahasa Utara
371. Rencana Koramil Damau Kabupaten Kepulauan Talaud

372. Rencana Rencana Koramil Marore Kabupaten Kepulauan Talaud
373. Rencana Koramil Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud
374. Rencana Koramil Kolongan Kabupaten Kepulauan Talaud
375. Rencana Koramil Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud
376. Rencana Koramil Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud
377. Rencana Koramil Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud
378. Rencana Koramil Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud
379. Rencana Koramil Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud
380. Rencana Koramil Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud
381. Rencana Koramil Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud
382. Rencana Yonif TP Kabupaten Kepulauan Talaud
383. Rencana Kodim Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
384. Rencana Koramil Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
385. Rencana Koramil Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
386. Rencana Koramil Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
387. Rencana Koramil Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
388. Rencana Koramil Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
389. Rencana Koramil Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
390. Rencana Koramil Biaro Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
391. Rencana Yonif TP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
392. Rencana Koramil Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe
393. Rencana Koramil Nusa Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe
394. Rencana Koramil Nusa Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe
395. Rencana Koramil Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe
396. Rencana Koramil Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe
397. Rencana Koramil Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe
398. Rencana Yonif TP Kabupaten Kepulauan Sangihe
399. Rencana Koramil Aertembaga Kota Bitung
400. Rencana Koramil Girian Kota Bitung
401. Rencana Koramil Lembeh Utara Kota Bitung
402. Rencana Koramil Madidir Kota Bitung
403. Rencana Koramil Matuari Kota Bitung
404. Rencana Koramil Ranowulu Kota Bitung
405. Rencana Yonif TP Kota Bitung

406. Rencana Kodim Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Utara
407. Rencana Koramil Kalawat Kabupaten Minahasa Utara
408. Rencana Koramil Kema Kabupaten Minahasa Utara
409. Rencana Koramil Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara
410. Rencana Koramil Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara
411. Rencana Koramil Talawaan Kabupaten Minahasa Utara
412. Rencana Bgrigif TP Kabupaten Minahasa Utara
413. Rencana Yonif TP Kabupaten Minahasa Utara
414. Rencana Yon Kav Kabupaten Minahasa Utara
415. Rencana Yon Arhanud Kabupaten Minahasa Utara
416. Rencana Koramil Bunaken Kota Manado
417. Rencana Koramil Bunaken Kepulauan Kota Manado
418. Rencana Koramil Malalayang Kota Manado
419. Rencana Koramil Mapanget Kota Manado
420. Rencana Koramil Paal Dua Kota Manado
421. Rencana Koramil Sario Kota Manado
422. Rencana Koramil Singkil Kota Manado
423. Rencana Koramil Tikala Kota Manado
424. Rencana Yonif TP Kota Manado
425. Rencana Kodim Tomohon Kota Tomohon
426. Rencana Koramil Tomohon Barat Kota Tomohon
427. Rencana Koramil Tomohon Timur Kota Tomohon
428. Rencana Koramil Tomohon Utara Kota Tomohon
429. Rencana Yonif TP Kota Tomohon
430. Rencana Koramil Tondano Selatan Kabupaten Minahasa
431. Rencana Koramil Tondano Utara Kabupaten Minahasa
432. Rencana Koramil Tondano Timur Kabupaten Minahasa
433. Rencana Koramil Lembean Timur Kabupaten Minahasa
434. Rencana Koramil Kakas Barat Kabupaten Minahasa
435. Rencana Koramil Tombariri Timur Kabupaten Minahasa
436. Rencana Koramil Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa
437. Rencana Koramil Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa
438. Rencana Koramil Tompaso Kabupaten Minahasa
439. Rencana Koramil Tompaso Barat Kabupaten Minahasa
440. Rencana Koramil Langowan Barat Kabupaten Minahasa
441. Rencana Koramil Langowan Selatan Kabupaten Minahasa
442. Rencana Koramil Langowan Timur Kabupaten Minahasa
443. Rencana Yonif TP Kabupaten Minahasa
444. Rencana Kodim Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Tenggara
445. Rencana Koramil Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara
446. Rencana Koramil Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara
447. Rencana Koramil Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara
448. Rencana Koramil Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara

449. Rencana Koramil Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara
450. Rencana Koramil Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara
451. Rencana Koramil Utara Kabupaten Minahasa Tenggara
452. Rencana Koramil Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara
453. Rencana Brigif TP Kabupaten Minahasa Tenggara
454. Rencana Yonif TP Kabupaten Minahasa Tenggara
455. Rencana Kodim Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Selatan
456. Rencana Koramil Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan
457. Rencana Koramil Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan
458. Rencana Koramil Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan
459. Rencana Koramil Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan
460. Rencana Koramil Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan
461. Rencana Koramil Motilong Timur Kabupaten Minahasa Selatan
462. Rencana Koramil Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan
463. Rencana Koramil Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan
464. Rencana Koramil Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan
465. Rencana Koramil Tareran Kabupaten Minahasa Selatan
466. Rencana Koramil Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan
467. Rencana Yonif TP Kabupaten Minahasa Selatan
468. Rencana Koramil Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu
469. Rencana Koramil Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
470. Rencana Yonif TP Kota Kotamobagu
471. Rencana Korem Kabupaten Bolaang Mongondow
472. Rencana Kodim Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow
473. Rencana Koramil Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow
474. Rencana Koramil Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow
475. Rencana Koramil Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
476. Rencana Koramil Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow
477. Rencana Koramil Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow
478. Rencana Koramil Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow
479. Rencana Koramil Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow
480. Rencana Brigif TP Kabupaten Bolaang Mongondow
481. Rencana Yonif TP Kabupaten Bolaang Mongondow
482. Rencana Kodim Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
483. Rencana Koramil Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
484. Rencana Koramil Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
485. Rencana Koramil Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
486. Rencana Yonif TP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

487. Rencana Kodim Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
488. Rencana Koramil Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
489. Rencana Koramil Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
490. Rencana Koramil Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
491. Rencana Koramil Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
492. Rencana Koramil Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
493. Rencana Yonif TP Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
494. Rencana Kodim Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
495. Rencana Koramil Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
496. Rencana Koramil Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
497. Rencana Koramil Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
498. Rencana Yonif TP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

B. TNI Angkatan Laut

1. Mako Lantamal VIII Manado Kota Manado
2. Satrol Lantamal VIII,Kota Bitung.
3. Lapangan Tembak Pistol, Mako Lantamal VIII
4. Lantamal Babinpotmar
5. Mako Lanal Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe
6. Mako Lanal Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud
7. Rumjab Danlantamal VII, Mess Pati, Mess Pamen, Mess Kowal ,Kota Manado
8. Gedung eks Mako Daeral VI , Kota Manado
9. Mess Pamen Kota Manado
10. Mess transit Pamen Kota Manado
11. Mess Ba/Ta Yon-marhanlan Kota Bitung
12. Bekangdam XIII/Merdeka
13. Mess Marore/Kawaluso TNI AL
14. Rumdis TNI AL Kota Bitung
15. Mako Lanudal Manado Kabupaten Minahasa Utara
16. Monumen Ar, TK Hang Tuah Komplek Tugu Aru, Kota Bitung
17. Fasharkan Bitung, Satkamla Bitung, Disyahal Lant.VIII, Dermaga TNI AL Kota Bitung
18. Fasharkan Bitung Kota Bitung
19. Fasharkan Bitung Kota Bitung
20. Pemukiman Transmigrasi, Posal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
21. Rumdis TNI AL Kota Manado

22. Rencana Posmat TNI AL Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
23. Rencana Posmat TNI AL Kabupaten Minahasa Utara
24. Kantor Lanal, Rumdis TNI AL Kabupaten Kepulauan Sangihe
25. kantor Lanal Kabupaten Kepulauan Sangihe
26. Rumjab Danlanal Kabupaten Kepulauan Sangihe
27. Rumdis TNI AL, Mess Ba/Ta
28. Balai pengobatan, Mess Perwira, Mesjid Kabupaten Kepulauan Sangihe
29. Rumdis TNI AL Kabupaten Kepulauan Sangihe
30. Rumdis TNI AL Kabupaten Kepulauan Sangihe
31. Wisma TNI AL Kabupaten Kepulauan Sangihe
32. Mess Satrad CSS Kabupaten Kepulauan Sangihe
33. Rumdis TNI AL Kabupaten Kepulauan Sangihe
34. Mess Posal Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe
35. Helipad Kabupaten Kepulauan Sangihe
36. Posal Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe
37. Posal Siau Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
38. Posal Tagulandang
39. Posal Arakan (Satrad IMSS) Kabupaten Minahasa Selatan
40. Posal Atep Oki (Satrad IMSS) Kabupaten Minahasa
41. Posal Bungalawang Desa Bungalawang Kabupaten Kepulauan Sangihe
42. Rencana Posal Kabupaten Kepulauan Talaud
43. Rencana Posal Kabupaten Kepulauan Talaud
44. Kantor Posal Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud
45. Posal Jiko Belanga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
46. Posal Tumumpa Kelutahan Tumumpa Kota Manado
47. Posal Manado Kota Manado
48. Posal Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
49. Rencana Pengembangan Posal Likupang Kabupaten Minahasa Utara
50. Rencana Pengembangan Posal Tinakareng Kabupaten Kepulauan Sangihe
51. Rencana Pengembangan Posal Makalehi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
52. Rencana Pengembangan Posal Biaro Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
53. Rencana Pengembangan Posal Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud
54. Rencana Pengembangan Posal Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud
55. Rencana Pengembangan Satuan Radar Desa Marampit Kabupaten Kepulauan Talaud

56. Rencana Pengembangan Posal Desa Marampit Kabupaten Kepulauan Talaud
57. Rencana Pengembangan Posal Jiko Salibabu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
58. Rencana Pengembangan Posal Labuan Salibabu Kabupaten Bolaang Mongondow
59. Mess Kabupaten Kepulauan Talaud
60. Kantor Lanal Kabupaten Kepulauan Talaud
61. Rumdis TNI AL Kabupaten Kepulauan Talaud
62. Rumjab Danlanal , Kabupaten Kepulauan Talaud
63. Mess Posal Pos jaga Kabupaten Kepulauan Talaud
64. Helipad Kabupaten Kepulauan Talaud
65. Pemancar (Rascar) Kabupaten Minahasa
66. Satrad CSS Kabupaten Kepulauan Sangihe
67. Menara air Kabupaten Kepulauan Sangihe
68. Menara air Kabupaten Kepulauan Talaud
69. Daerah Latihan Bersama dengan Filipina Perairan Laut Sulawesi
70. Lapangan Tembak Pistol Mako Yonmarhanlan VIII
71. Yonmarhanlan VIII, Rumkital, Rumdis TNI AL Kota Bitung
72. Rumdis TNI AL Jl. Yos Sudarso Kota Bitung
73. Guskamla Armada 2 Kota Bitung
74. Rencana Tempat Latihan TNI AL Kota Bitung
75. Rencana Tempat Latihan TNI AL Kec. Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud
76. Daerah Pembuangan Amunisi Perairan Pulau Manado Tua
77. Daerah Pembuangan Amunisi Perairan Pulau Lembeh
78. Daerah Pembuangan Amunisi Perairan Tahuna
79. Daerah Latihan Militer Perbukitan Kairagi Kota Manado
80. Daerah Latihan Militer Kesatriaan Satkamla Kota Bitung
81. Daerah Latihan Militer Naimundung Kota Bitung
82. Jalan Tembus Manado Kabupaten Minahasa Utara
83. Komplek Perumahan Siau Lanudal Kota Manado
84. Gudang Senjata Kairagi Kota Manado
85. Gudang Senjata Marinir Kota Bitung
86. Gudang Amunisi Kairagi Weru Kota Manado
87. Gudang Amunisi Marinir Kota Bitung
88. Rencana Pengembangan Dermaga TNI AL Dagho Kabupaten Kepulauan Sangihe
89. Rencana Pembangunan Satuan Pendidikan TNI AL Likupang Kabupaten Minahasa Utara
90. Tambahan Rencana Pembangunan Pangkalan TNI AL Kec. Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow
91. Pos TNI AL Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

92. Pos Angkatan Laut Panango
93. Kantor Badan Keamanan Laut RI Zona Maritim tengah Kota Manado
94. Stasiun Penamntauan Kemanan dan Keselamatan Laut Kema Minahasa Utara
95. Pangkalan Keamanan Serei Minahasa Utara
96. Rumjab Danlanal Jl. Tahete Kabupaten Kepulauan. Sangihe
97. Kantor Posal Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud

C. TNI Angkatan Udara

1. Lanud Sam Ratulangi Lapangan Kota Manado
2. Kipan B Yonko 466 Pasopati
3. Rumdis Danlanud Kota Manado
4. Mess Pringgondani II (Tikala Baru) Kota Manado
5. Komplek Albatros Kota Manado
6. Rumdis Mess Pringgondani, Mess Crew Bethesda Kota Manado
7. Rumdis Pama Kota Manado
8. Komplek Falcon Kota Manado
9. Gudang GPL Kota Manado
10. Rumah Sakit TNI AU Lanud Sam Ratulangi Kota Manado
11. Mess TNI AURI Kota Manado
12. POM TNI AU Kota Manado
13. Komplek Sarbe, Mess Wara Kota Manado
14. Komplek Sarbe 2 Kota Manado
15. Komplek Sarbe 3 Kota Manado
16. TI, Komplek Pinabetengan Kota Manado
17. Base Ops Kota Manado
18. Senkom, Gudang Pasint Kota Manado
19. Lapangan Tenis Kota Manado
20. Mess Rajawali dan Maleo, Lapangan Bola Kota Manado
21. Komplek Mustang Kota Manado
22. Pos Paskhas Kalawiran Kabupaten Minahasa
23. Persawahan Desa Karondoran Kabupaten Minahasa
24. Persawahan Desa Kalawiran Kabupaten Minahasa
25. Eks Lapter Kalawiran Kabupaten Minahasa
26. Water Base Tasuka Kabupaten Minahasa
27. Daerah Latihan Penerbangan sementara dasar NOTAM Wilayah Udara RI
28. Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya
29. Daerah disposal amunisin dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya

30. Objek vital nasional dan instansi strategis, Stasiun Pengamat Dirgantara
31. ADIZ Indonesia Wilayah Udara RI
32. Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Kawio
33. Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Marore
34. Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Batubawaikang
35. Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Miangas
36. Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Marampit
37. Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Intata
38. Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Kakarutan
39. Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Kabaruan
40. Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Bangkit
41. Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Manterawu
42. Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Makalehi
43. Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Kawalusu
44. Kawasan Udara Terlarang (WIR) WAR 19 Area One 30NM sampai 100 NM berpusat ”MKS”VOR/DME, dengan radial 340o sampai 020o
45. Kawasan Udara Terlarang (WIR) WAR 19 Alpa Two 30NM sampai 100 NM berpusat ”MKS”VOR/DME, dengan radial 025o sampai 060o
46. Kawasan Udara Terlarang (WIR) WAR 19 Alpa Three 30NM sampai 100 NM berpusat ”MKS”VOR/DME, dengan radial 160o sampai 220o
47. Fasilitas Penerbangan FIR Ujung Pandang Wilayah udara NKRI (timur)
48. Fasilitas Penerbangan Bandara Sam Ratulangi Kota Manado
49. Fasilitas Penerbangan Bandara Naha Kabupaten Kepulauan Sangihe
50. Fasilitas Penerbangan Bandara Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud
51. Fasilitas Penerbangan Bandara Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud
52. Fasilitas Penerbangan Mokoagow Airstrip Kabupaten Bolaang Mongondow
53. Pos TNI AU Naha Kabupaten Kepulauan Sangihe
54. Tasuka water base Kabupaten Minahasa
55. Posau Naha Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe
56. Daerah Latihan Kalawiran Kabupaten Minahasa
57. Rencana Pembangunan Pos TNI AU Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
58. Rencana Pembangunan Pos TNI AU Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow

59. Rencana Pembangunan Pos TNI AU Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud
60. Rencana Pembangunan Pos TNI AU Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud
61. Rencana Pembangunan Pos TNI AU Pulau Lembeh Kota Bitung
62. Rencana Pengembangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Desa Mapanget Kabupaten Minahasa Utara

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

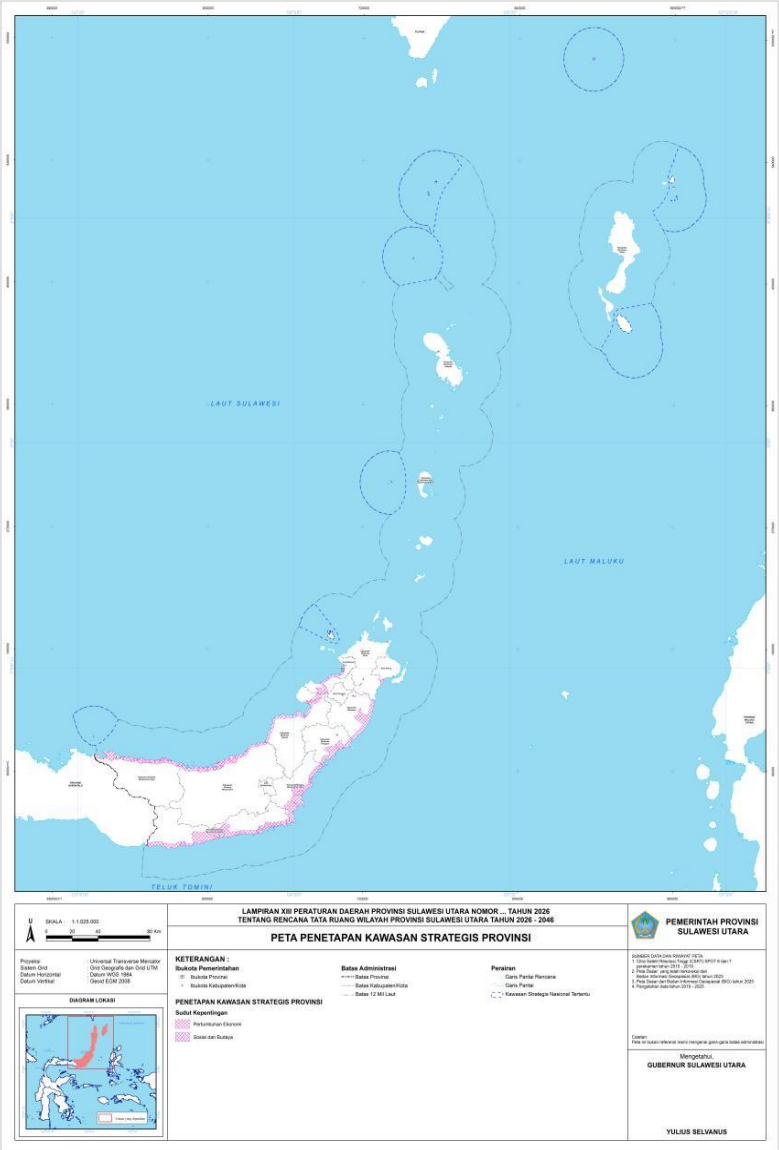

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

MATRIKS PERATURAN KKPRL

1. Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi yang diintegrasikan kedalam RTRWP berdasarkan arahan KKPR Laut RZWP3K, berupa Kawasan Konservasi Lainnya dan Taman, yang diuraikan pada tabel berikut ini:

a. Kawasan Konservasi Lainnya

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-1		Manado	Taman Nasional Laut Bunaken	0.001	124° 45' 15.968" E	1° 37' 12.856" N		- Kegiatan Pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada Zona Inti; - Kegiatan Pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada Zona Inti; - Kegiatan Pelayaran Kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada Zona Inti; - Kegiatan Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT pada Zona Inti; - Kegiatan Pendidikan pada Zona Inti; - Kegiatan Penangkapan Ikan pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan; - Kegiatan Penangkapan Ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan;	- Kegiatan Pelayaran Kapal penumpang reguler domestik di luar Zona Inti; - Kegiatan Pendidikan di luar Zona Inti; - Kegiatan Penelitian; - Kegiatan Penangkapan Ikan pada Zona Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan Penangkapan Ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi pada Zona Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan Pembudidayaan ikan pada Zona Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan Pembudidayaan ikan oleh pembudi daya ikan	Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa berupa Alur Migrasi Biota Laut pada kode zona: • KKL-1 • KKL-2 • KKL-3 • KKL-4 • KKL-5 • KKL-6 • KKL-7
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-2		Minahasa Utara	Taman Nasional Laut Bunaken	1,349.27	124° 46' 7.590" E	1° 48' 31.932" N				
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-3		Manado	Taman Nasional Laut Bunaken	0.001	124° 45' 18.043" E	1° 37' 13.475" N				
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-4		Manado	Taman Nasional Laut Bunaken	2,941.82	124° 44' 55.922" E	1° 39' 11.453" N				
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-5		Manado	Taman Nasional Laut Bunaken	0.001	124° 45' 17.849" E	1° 37' 13.414" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-6		Minahasa Utara	Taman Nasional Laut Bunaken	757.76	124° 43' 55.192" E	1° 40' 35.774" N		- Kegiatan Pembudidayaan ikan pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan; - Kegiatan Pembudidayaan ikan oleh pembudi daya ikan kecil pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan; - Kegiatan Kegiatan pariwisata alam peraian pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan; - Kegiatan Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan; - Kegiatan Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut pada Zona Inti; - Kegiatan Penempatan instalasi di laut pada Zona Inti; - Kegiatan Pemanfaatan air laut selain energi pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan; - Kegiatan Pembuatan foto, film, dan video komersial pada Zona Inti; dan - Kegiatan Landing, take off, dan taxiing seaplane pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan;	kecil pada Zona Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan pariwisata alam peraian pada Zona Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan pada Zona Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut pada Zona Inti; - Kegiatan Penempatan instalasi di laut pada Zona Inti; - Kegiatan Pemanfaatan air laut selain energi pada Zona Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan Pembuatan foto, film, dan video komersial pada Zona Inti; - Landing, take off, dan taxiing seaplane pada Zona Pemanfaatan Terbatas; Kegiatan Minyak dan Gas Bumi; - Kegiatan Telekomunikasi; - Kegiatan Penyediaan Energi; dan - Kegiatan Penyediaan Air Bersih.	
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-7		Minahasa Utara	Taman Nasional Laut Bunaken	0.05	124° 45' 27.864" E	1° 49' 28.496" N				
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-8		Manado	Taman Nasional Laut Bunaken	15,994.95	124° 44' 3.527" E	1° 37' 11.618" N				
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-9		Minahasa Utara	Taman Nasional Laut Bunaken	178.10	124° 41' 28.963" E	1° 42' 3.740" N				
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-10		Minahasa Utara	Taman Nasional Laut Bunaken	16,768.58	124° 49' 26.573" E	1° 43' 42.731" N				
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-11		Minahasa Selatan	Taman Nasional Laut Bunaken	295.24	124° 32' 46.359" E	1° 23' 29.989" N				
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-12		Minahasa Utara	Taman Nasional Laut Bunaken	30.02	124° 43' 57.180" E	1° 49' 21.002" N				
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-13		Minahasa	Taman Nasional Laut Bunaken	7,174.25	124° 35' 44.400" E	1° 25' 54.097" N				
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-14		Manado	Taman Nasional Laut Bunaken	15.47	124° 39' 30.494" E	1° 41' 36.102" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-15		Minahasa Selatan	Taman Nasional Laut Bunaken	7,147.99	124° 30' 30.770" E	1° 20' 43.784" N				
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-16		Minahasa	Taman Nasional Laut Bunaken	0.02	124° 33' 54.869" E	1° 22' 43.754" N				
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-17		Minahasa Utara	Taman Nasional Laut Bunaken	0.06	124° 47' 36.387" E	1° 49' 27.893" N				
Kawasan Konservasi Lainnya	KKL-18		Minahasa Utara	Taman Nasional Laut Bunaken	0.01	124° 43' 55.903" E	1° 49' 28.927" N				

b. Taman

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Taman	T-1		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	8.01	125° 30' 50.983" E	3° 8' 24.461" N	Kegiatan yang diperbolehkan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Kegiatan yang tidak diperbolehkan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Kegiatan yang diperbolehkan setelah mendapat izin sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa berupa Alur Migrasi Biota Laut pada kode zona: • T-1 • T-16 Ketentuan Khusus Kawasan
Taman	T-2		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	0.25	125° 26' 47.237" E	3° 8' 50.507" N				
Taman	T-3		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	176.56	125° 28' 1.051" E	3° 15' 41.159" N				
Taman	T-4		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	1,145.69	125° 32' 12.504" E	3° 9' 33.621" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Taman	T-5		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	29.61	125° 28' 52.670" E	3° 3' 48.646" N				Perlindungan Ekosistem Laut berupa Daerah Larangan Penangkapan Ikan pada kode zona: • T-1 • T-10 • T-11 • T-12 • T-13 • T-14 • T-15 • T-2 • T-3 • T-4 • T-5 • T-6 • T-7 • T-8 • T-9
Taman	T-6		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	32.05	125° 29' 43.582" E	3° 5' 9.457" N				
Taman	T-7		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	916.94	125° 31' 15.521" E	3° 3' 41.410" N				
Taman	T-8		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	57.03	125° 28' 49.559" E	3° 5' 21.878" N				
Taman	T-9		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	33.20	125° 29' 55.200" E	3° 4' 33.420" N				
Taman	T-10		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	82.17	125° 30' 22.322" E	3° 10' 27.455" N				
Taman	T-11		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	38.30	125° 27' 16.130" E	3° 8' 9.135" N				
Taman	T-12		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	40.18	125° 29' 26.879" E	3° 5' 34.068" N				
Taman	T-13		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	29.42	125° 29' 31.718" E	3° 3' 26.522" N				
Taman	T-14		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	243.57	125° 27' 14.244" E	3° 15' 41.355" N				
Taman	T-15		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	465.21	125° 31' 17.707" E	3° 5' 12.809" N				
Taman	T-16		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	17,595.34	125° 34' 22.114" E	3° 2' 31.430" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Taman	T-17		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	27,445.82	125° 28' 5.006" E	3° 4' 25.335" N				
Taman	T-18		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	31,974.61	125° 33' 2.074" E	2° 56' 52.322" N				
Taman	T-19		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	76,864.50	125° 36' 22.277" E	3° 11' 8.526" N				
Taman	T-20		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	3.22	125° 30' 21.201" E	3° 10' 34.085" N				
Taman	T-21		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	61.89	125° 32' 6.120" E	3° 11' 5.641" N				
Taman	T-22		Kepulauan Sangihe	Taman Pulau Kecil Tatoareng	6,785.71	125° 42' 52.966" E	2° 59' 16.903" N				

2. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut yang diintegrasikan kedalam RTRWP berdasarkan arahan KKPR Laut RZWP3K, berupa Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi, yang diuraikan pada tabel berikut ini:

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-1		Minahasa Utara		0.20	125° 1' 20.957" E	1° 42' 42.302" N		- Kegiatan Pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada Zona Inti; - Kegiatan Pelayaran kapal penumpang reguler domestik pada Zona Inti; - Kegiatan Pelayaran Kapal penumpang wisata/kapal pesiar pada Zona Inti; - Kegiatan Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT pada Zona Inti; - Kegiatan Pendidikan pada Zona Inti; - Kegiatan Penangkapan Ikan pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan;	- Kegiatan Pelayaran Kapal penumpang reguler domestik di luar Zona Inti; - Kegiatan Pendidikan di luar Zona Inti; - Kegiatan Penelitian; - Kegiatan Penangkapan Ikan pada Zona Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan Penangkapan Ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi pada Zona Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan Pembudidayaan ikan pada Zona Pemanfaatan Terbatas;	Ketentuan Khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada kode zona: • PKK-1 • PKK-2 • PKK-3 • PKK-4 • PKK-5 Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada kode zona: • PKK-1 • PKK-10 • PKK-11 • PKK-12 • PKK-13 • PKK-14 • PKK-15 • PKK-16 • PKK-17 • PKK-18 • PKK-19 • PKK-20 • PKK-21 • PKK-22
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-2		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		297.82	125° 27' 31.556" E	2° 43' 17.724" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-3		Bitung		414.57	125° 10' 5.491" E	1° 24' 11.672" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-4		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		29.24	125° 26' 59.193" E	2° 43' 32.094" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-5		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		268.88	125° 27' 35.592" E	2° 42' 51.099" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-6		Minahasa Utara		70.52	125° 3' 52.049" E	1° 51' 25.527" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-7		Minahasa Utara		58.82	125° 2' 52.616" E	1° 48' 58.011" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-8		Minahasa Utara		11.88	125° 4' 24.184" E	1° 51' 55.760" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-9		Minahasa Utara		8.20	125° 1' 25.763" E	1° 43' 20.021" N		- Kegiatan Penangkapan Ikan oleh nelayan yang bermukim di sekitar kawasan konservasi pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan; - Kegiatan Pembudidayaan ikan pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan; - Kegiatan Pembudidayaan ikan oleh pembudi daya ikan kecil pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan; - Kegiatan Kegiatan pariwisata alam peraian pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan; - Kegiatan Penyediaan	- Kegiatan Pembudidayaan ikan oleh pembudi daya ikan kecil pada Zona Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan pariwisata alam peraian pada Zona Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan Penyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan pada Zona Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut pada Zona Inti; - Kegiatan Penempatan instalasi di laut pada Zona Inti; - Kegiatan Pemanfaatan air laut selain energi pada Zona	• PKK-6 • PKK-7 • PKK-8 • PKK-9 Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa berupa Alur Migrasi Biota Laut pada kode zona: • PKK-13 • PKK-34 • PKK-35 • PKK-36 • PKK-37 • PKK-38 • PKK-39 • PKK-40 • PKK-41 • PKK-42 • PKK-43 • PKK-44 • PKK-45 Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan berupa Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut pada kode zona: • PKK-2 • PKK-46 • PKK-47
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-10		Minahasa Utara		3.73	125° 9' 10.063" E	1° 44' 52.114" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-11		Minahasa Utara		61.20	125° 1' 19.922" E	1° 44' 10.166" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-12		Minahasa Utara		40.61	125° 1' 46.747" E	1° 42' 13.673" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-13		Minahasa Utara		0.15	125° 11' 1.384" E	1° 46' 28.025" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-14		Minahasa Utara		3,072.32	125° 2' 37.916" E	1° 50' 3.576" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-15		Minahasa Utara		4,228.29	125° 2' 25.820" E	1° 43' 46.992" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-16		Minahasa Utara		1,037.70	125° 10' 28.102" E	1° 41' 30.753" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-17		Minahasa Utara		2,920.63	125° 6' 40.820" E	1° 41' 37.715" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-18		Minahasa Utara		36.53	125° 2' 57.802" E	1° 46' 29.377" N		infrastruktur Pariwisata Alam Perairan pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan; - Kegiatan Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut pada Zona Inti; - Kegiatan Penempatan instalasi di laut pada Zona Inti; - Kegiatan Pemanfaatan air laut selain energi pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai Peruntukkan Kawasan; - Kegiatan Pembuatan foto, film, dan video komersial pada Zona Inti; dan - Kegiatan Landing, take off, dan taxiing seaplane pada Zona Inti dan Zona Lain sesuai	Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan Pembuatan foto, film, dan video komersial pada Zona Inti; - Landing, take off, dan taxiing seaplane pada Zona Pemanfaatan Terbatas; - Kegiatan Minyak dan Gas Bumi; - Kegiatan Telekomunikasi; - Kegiatan Penyediaan Energi; dan - Kegiatan Penyediaan Air Bersih.	Ketentuan Khusus Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut berupa Daerah Larangan Penangkapan Ikan pada kode zona: • PKK-10 • PKK-11 • PKK-12 • PKK-23 • PKK-24 • PKK-25 • PKK-26 • PKK-27 • PKK-28 • PKK-29 • PKK-30 • PKK-31 • PKK-32 • PKK-33 • PKK-6 • PKK-7 • PKK-8 • PKK-9
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-19		Minahasa Utara		14.49	125° 10' 55.874" E	1° 46' 18.419" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-20		Minahasa Utara		182.88	125° 9' 27.691" E	1° 44' 21.827" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-21		Minahasa Utara		27.22	125° 2' 43.402" E	1° 45' 49.049" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-22		Bolaang Mongondow Timur		122.74	124° 39' 41.026" E	0° 46' 25.866" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-23		Minahasa Utara		17.34	124° 58' 38.381" E	1° 44' 37.299" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-24		Minahasa Utara		2.27	124° 55' 29.649" E	1° 39' 46.648" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-25		Minahasa Utara		1.45	124° 54' 56.404" E	1° 39' 51.378" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-26		Minahasa Utara		217.77	124° 56' 36.161" E	1° 42' 4.215" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-27		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		56.76	125° 22' 6.632" E	2° 5' 17.183" N		Peruntukkan Kawasan;		
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-28		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		186.91	125° 20' 8.409" E	2° 5' 49.403" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-29		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		602.27	125° 18' 59.755" E	2° 21' 21.354" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-30		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		34.46	125° 28' 32.050" E	2° 38' 39.021" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-31		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		26.54	125° 20' 33.106" E	2° 4' 15.493" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-32		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		19.93	125° 26' 58.600" E	2° 40' 4.730" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-33		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		6.26	125° 27' 49.122" E	2° 40' 51.241" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-34		Minahasa		208.32	125° 4' 8.740" E	1° 16' 3.652" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-35		Minahasa		77.25	125° 3' 41.944" E	1° 14' 10.383" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-36		Minahasa		222.23	125° 2' 57.851" E	1° 11' 32.601" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-37		Minahasa		129.50	125° 3' 24.253" E	1° 13' 5.723" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-38		Minahasa Utara		240.24	125° 5' 3.770" E	1° 20' 1.716" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-39		Minahasa Utara		13.24	125° 4' 27.084" E	1° 16' 30.397" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-40		Minahasa Utara		147.01	125° 11' 24.751" E	1° 46' 38.524" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-41		Bitung		748.16	125° 10' 47.746" E	1° 35' 37.127" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-42		Kepulauan Sangihe		910.81	125° 34' 27.608" E	3° 48' 57.940" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-43		Kepulauan Sangihe		120.20	125° 38' 5.711" E	3° 47' 15.595" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-44		Kepulauan Talaud		60.58	127° 2' 56.365" E	4° 48' 23.764" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-45		Minahasa Tenggara		180.62	124° 54' 57.338" E	0° 58' 27.086" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-46		Manado		0.50	124° 47' 5.757" E	1° 27' 46.591" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-47		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		297.50	125° 30' 17.507" E	2° 43' 29.352" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-48		Minahasa		46.12	125° 2' 3.707" E	1° 9' 33.443" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-49		Minahasa		7.60	125° 4' 5.241" E	1° 16' 42.699" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-50		Minahasa		88.56	125° 3' 59.393" E	1° 15' 20.629" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-51		Minahasa		1,740.80	124° 57' 44.235" E	1° 3' 0.753" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-52		Minahasa Utara		79.78	125° 4' 20.807" E	1° 16' 50.097" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-53		Minahasa Utara		13.07	125° 5' 17.178" E	1° 20' 30.467" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-54		Manado		0.50	124° 47' 32.391" E	1° 27' 41.077" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-55		Bitung		52.78	125° 10' 46.499" E	1° 25' 13.305" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-56		Bitung		9,192.03	125° 15' 19.923" E	1° 25' 16.012" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-57		Minahasa Utara		4,752.91	124° 54' 36.170" E	1° 41' 15.829" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-58		Bitung		1,176.53	125° 10' 46.199" E	1° 36' 47.312" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-59		Minahasa Utara		1,496.09	124° 58' 37.916" E	1° 45' 50.947" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-60		Minahasa Utara		23.52	125° 11' 11.517" E	1° 46' 13.294" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-61		Minahasa Utara		3,433.48	125° 11' 8.560" E	1° 39' 33.284" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-62		Minahasa Utara		872.58	125° 4' 23.211" E	1° 53' 35.375" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-63		Bolaang Mongondow		56.25	124° 17' 20.374" E	1° 1' 0.452" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-64		Bolaang Mongondow		29.87	124° 5' 26.968" E	0° 55' 30.792" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-65		Bolaang Mongondow Selatan		1,512.80	124° 11' 37.617" E	0° 22' 35.109" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-66		Bolaang Mongondow Selatan		1,951.98	124° 20' 21.902" E	0° 24' 57.040" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-67		Bolaang Mongondow Selatan		1,763.26	124° 27' 18.108" E	0° 25' 45.881" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-68		Bolaang Mongondow Timur		77.91	124° 33' 56.090" E	0° 34' 13.694" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-69		Bolaang Mongondow Timur		48.99	124° 31' 3.699" E	0° 33' 33.500" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-70		Bolaang Mongondow Timur		33.76	124° 39' 39.305" E	0° 46' 2.183" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-71		Bolaang Mongondow Timur		924.75	124° 29' 5.888" E	0° 26' 30.047" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-72		Bolaang Mongondow Timur		63.13	124° 37' 57.541" E	0° 42' 45.426" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-73		Kepulauan Sangihe		16.79	125° 35' 23.665" E	3° 49' 27.738" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-74		Kepulauan Sangihe		2,079.30	125° 43' 15.970" E	3° 28' 18.036" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-75		Kepulauan Sangihe		3,220.87	125° 34' 49.561" E	3° 46' 47.330" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-76		Kepulauan Sangihe		174.88	125° 34' 23.922" E	3° 21' 44.637" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-77		Kepulauan Sangihe		631.32	125° 38' 49.695" E	3° 32' 32.303" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-78		Kepulauan Sangihe		5,726.97	125° 38' 1.042" E	4° 35' 10.201" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-79		Kepulauan Sangihe		9,064.21	125° 44' 46.398" E	3° 48' 53.317" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-80		Kepulauan Sangihe		228.19	125° 34' 27.280" E	3° 20' 24.571" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-81		Kepulauan Talaud		775.65	127° 3' 44.140" E	4° 47' 52.277" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-82		Kepulauan Talaud		64.46	126° 42' 36.851" E	3° 57' 16.145" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-83		Kepulauan Talaud		91.13	126° 42' 49.270" E	3° 56' 36.860" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-84		Minahasa Selatan		864.04	124° 17' 54.162" E	1° 2' 25.917" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-85		Minahasa Selatan		207.05	124° 20' 38.443" E	1° 8' 41.224" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-86		Minahasa Tenggara		110.06	124° 54' 33.011" E	0° 58' 53.579" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-87		Minahasa Tenggara		90.43	124° 54' 0.777" E	0° 58' 13.074" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-88		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		15,856.20	125° 29' 31.699" E	2° 38' 54.206" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-89		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		11,447.64	125° 17' 17.401" E	2° 21' 26.908" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-90		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		10,800.54	125° 20' 27.791" E	2° 3' 52.340" N				
Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi	PKK-91		Minahasa Utara		1,278.20	125° 5' 21.313" E	1° 54' 49.101" N				

3. Kawasan Perikanan

Kawasan Perikanan yang diintegrasikan kedalam RTRWP berdasarkan arahan KKPR Laut RZWP3K, berupa Zona Perikanan Tangkap, Zona Perikanan Budidaya dan sebagian Zona Pelabuhan Perikanan, yang diuraikan pada tabel berikut ini:

a. Zona Perikanan Tangkap

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-1		Minahasa Utara		1.59	125° 1' 18.608" E	1° 42' 38.831" N	- Pelepasan jangkar; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin	- Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan	- Kegiatan pembuangan amunisi di kode zona PT-1 s/d PT-2, PT-17 s/d PT-23, PT-25 s/d PT-32 - Latihan militer seperti kegiatan latihan pendaratan di kode zona PT-24 - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri;	Ketentuan Khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada kode zona: • PT-1 • PT-10 • PT-11 • PT-12 • PT-13 • PT-14 • PT-15 • PT-16 • PT-2 • PT-3
Zona Perikanan Tangkap	PT-2		Minahasa Utara		4.70	125° 1' 9.431" E	1° 42' 24.637" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-3		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		26.23	125° 28' 1.144" E	2° 43' 40.086" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-4		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		151.03	125° 21' 3.198" E	2° 44' 23.540" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-5		Kepulauan Siau		262.00	125° 24' 53.012" E	2° 42' 15.360" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
			Tagulandang Biaro					pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal;	penimbunan limbah non B3; - Pengambilan terumbu karang;	- Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/ delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Terminal Khusus - Taxi laut - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Instalasi/Penggelaran Kabel Bawah Laut untuk kepentingan telekomunikasi dan kepentingan lainnya; - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas;	• PT-4 • PT-5 • PT-6 • PT-7 • PT-8 • PT-9 Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada kode zona: • PT-1 • PT-17 • PT-18 • PT-19 • PT-2 • PT-20 • PT-21 • PT-22 • PT-23 • PT-24 • PT-25 • PT-26 • PT-27 • PT-28 • PT-29 • PT-30 • PT-31 • PT-32 Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa berupa Alur Migrasi Biota Laut
Zona Perikanan Tangkap	PT-6		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		2.38	125° 26' 41.368" E	2° 43' 19.798" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-7		Bitung		648.60	125° 15' 59.109" E	1° 31' 6.470" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-8		Bitung		0.00	125° 10' 1.275" E	1° 23' 19.675" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-9		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		212.78	125° 21' 4.079" E	2° 43' 39.832" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-10		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		151.31	125° 20' 47.330" E	2° 6' 48.257" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-11		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		326.73	125° 24' 39.787" E	2° 42' 57.112" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-12		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		32.57	125° 26' 36.644" E	2° 40' 39.828" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-13		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		203.15	125° 25' 18.982" E	2° 41' 51.440" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-14		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		816.36	125° 21' 37.380" E	2° 46' 26.302" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-15		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		738.47	125° 26' 59.564" E	2° 44' 14.446" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-16		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		2.20	125° 21' 36.677" E	2° 44' 58.093" N	- Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh,		- Pembangunan anjungan/ platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas; - Mooring; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi Mineral Logam; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam; - Pembangunan PLTU/ PLTGU; - Kegiatan Industri Galangan Kapal	pada kode zona: • PT-33 • PT-34 • PT-35 • PT-36 • PT-37 • PT-38 • PT-39 • PT-40 • PT-41 • PT-42 • PT-43 • PT-44 • PT-45 • PT-46 • PT-47 • PT-48 • PT-49 • PT-50 • PT-51 • PT-52 • PT-53 • PT-54 • PT-55 • PT-56 • PT-57 • PT-58 • PT-59 • PT-60 • PT-61 • PT-62 • PT-63 Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan berupa Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut
Zona Perikanan Tangkap	PT-17		Manado		3.22	124° 34' 57.278" E	1° 39' 57.233" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-18		Minahasa Utara		21,139.13	125° 5' 31.648" E	1° 47' 25.555" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-19		Minahasa Utara		32.21	125° 1' 23.587" E	1° 43' 9.631" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-20		Minahasa Utara		21.74	125° 1' 18.527" E	1° 42' 24.343" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-21		Minahasa		112.99	124° 34' 28.588" E	1° 35' 8.432" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-22		Minahasa Utara		0.04	125° 1' 19.742" E	1° 42' 44.155" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-23		Minahasa Utara		8.94	125° 1' 3.480" E	1° 42' 26.294" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-24		Bolaang Mongondow Timur		728.24	124° 39' 25.740" E	0° 47' 6.811" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-25		Kepulauan Talaud		19.41	127° 6' 29.682" E	4° 43' 25.383" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-26		Kepulauan Sangihe		3,126.47	125° 17' 57.953" E	3° 22' 2.241" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-27		Kepulauan Talaud		389.44	126° 39' 48.494" E	4° 1' 8.328" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-28		Bolaang Mongondow Utara		2,013.03	123° 11' 15.232" E	0° 58' 44.889" N	togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang -layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Bongkar muat ikan; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal;		dengan sistem Graving Dock Kapal; - Kegiatan pembuatan alat - alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat - alat maritim lainnya; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut;	pada kode zona: • PT-17 • PT-3 • PT-33 • PT-4 • PT-5 • PT-6 • PT-64 • PT-65 • PT-66 • PT-67 • PT-68 • PT-69 • PT-70 • PT-71 • PT-72 • PT-73 • PT-74 • PT-75 • PT-76 • PT-77 • PT-78 • PT-79 • PT-80 • PT-81 • PT-82 • PT-83
Zona Perikanan Tangkap	PT-29		Bitung		152.80	125° 23' 19.852" E	1° 15' 41.984" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-30		Manado		3,370.49	124° 33' 14.237" E	1° 38' 45.184" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-31		Minahasa Utara		1,069.83	125° 9' 12.623" E	1° 52' 21.700" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-32		Minahasa		5,057.92	124° 31' 57.778" E	1° 36' 42.968" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-33		Bitung		258.70	125° 27' 35.042" E	1° 25' 57.696" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-34		Minahasa Utara		3,266.97	125° 15' 15.118" E	1° 44' 28.856" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-35		Minahasa Tenggara		802.48	124° 57' 22.975" E	0° 58' 23.336" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-36		Minahasa Utara		0.58	125° 4' 51.474" E	1° 20' 44.531" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-37		Minahasa		4,037.88	125° 5' 12.075" E	1° 13' 4.839" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-38		Minahasa		4,248.75	125° 4' 0.641" E	0° 59' 52.777" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-39		Minahasa		200.90	125° 4' 50.730" E	1° 15' 40.782" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-40		Minahasa Utara		6,547.64	125° 8' 22.103" E	1° 15' 26.162" N	- Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal / kapal nelayan; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke		- Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; – Usaha vila (cottage) di atas laut; – Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital	
Zona Perikanan Tangkap	PT-41		Bitung		8,622.92	125° 19' 32.753" E	1° 35' 57.949" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-42		Kepulauan Talaud		8,467.37	127° 4' 11.989" E	4° 49' 14.022" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-43		Kepulauan Sangihe		3,230.53	125° 19' 20.080" E	2° 58' 21.279" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-44		Minahasa Selatan		1,423.36	124° 14' 16.753" E	1° 18' 20.600" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-45		Minahasa Tenggara		407.44	124° 55' 44.033" E	0° 58' 13.356" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-46		Minahasa Utara		483.33	125° 13' 58.532" E	1° 11' 48.351" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-47		Kepulauan Sangihe		8,040.17	125° 22' 25.213" E	3° 50' 1.771" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-48		Bitung		1,518.17	125° 26' 17.656" E	1° 27' 59.779" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-49		Bitung		199.26	125° 14' 39.827" E	1° 11' 50.821" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-50		Bitung		261.56	125° 28' 2.448" E	1° 25' 26.912" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-51		Kepulauan Sangihe		109.81	125° 35' 55.239" E	3° 48' 51.931" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-52		Kepulauan Sangihe		8,983.21	125° 19' 28.332" E	3° 8' 40.130" N	pelabuhan perikanan; - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating)		dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Penetapan tambat labuh; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pembangunan TPI; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ;	
Zona Perikanan Tangkap	PT-53		Bolaang Mongondow Selatan		5,867.89	123° 34' 48.787" E	0° 13' 29.888" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-54		Minahasa Utara		5,009.29	124° 47' 57.421" E	1° 54' 19.716" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-55		Kepulauan Sangihe		21,337.69	125° 35' 43.967" E	4° 13' 9.793" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-56		Kepulauan Sangihe		3,042.78	125° 48' 50.992" E	3° 3' 7.479" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-57		Bolaang Mongondow Utara		4,600.37	123° 21' 18.165" E	1° 6' 6.659" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-58		Kepulauan Sangihe		7,608.37	125° 46' 58.869" E	3° 41' 52.441" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-59		Kepulauan Talaud		318.59	127° 9' 54.513" E	4° 58' 11.913" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-60		Minahasa		1,054.36	125° 10' 41.031" E	1° 2' 17.984" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-61		Bolaang Mongondow		2,770.70	124° 6' 25.577" E	1° 7' 7.302" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-62		Kepulauan Sangihe		7,563.85	125° 38' 31.885" E	4° 40' 59.067" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-63		Kepulauan Sangihe		1,148.40	125° 45' 38.764" E	2° 53' 21.757" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-64		Minahasa		8.05	124° 46' 48.962" E	1° 27' 56.963" N			- Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air);	
Zona Perikanan Tangkap	PT-65		Minahasa		2,632.38	124° 35' 45.917" E	1° 31' 9.906" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-66		Minahasa Utara		2,169.54	125° 7' 35.872" E	1° 20' 5.954" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-67		Manado		3,266.26	124° 43' 34.561" E	1° 31' 33.332" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-68		Bitung		3,723.73	125° 13' 26.671" E	1° 17' 52.898" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-69		Kepulauan Sangihe		8,376.24	125° 32' 28.964" E	3° 58' 7.348" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-70		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		3,354.01	125° 35' 42.978" E	2° 38' 54.450" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-71		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		1,098.65	125° 18' 23.926" E	2° 46' 16.346" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-72		Minahasa		364.00	124° 28' 7.123" E	1° 32' 54.433" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-73		Bolaang Mongondow Selatan		172.31	124° 36' 12.258" E	0° 17' 41.780" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-74		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		7,248.97	125° 30' 48.005" E	2° 10' 44.487" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-75		Bitung		2,886.72	125° 28' 1.692" E	1° 34' 15.572" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-76		Kepulauan Talaud		7,431.24	126° 42' 37.141" E	3° 51' 51.027" N			- Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal -kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik	
Zona Perikanan Tangkap	PT-77		Kepulauan Sangihe		5,265.89	125° 20' 2.045" E	3° 34' 56.669" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-78		Manado		2,117.09	124° 34' 30.970" E	1° 40' 19.225" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-79		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		55.17	125° 24' 10.235" E	2° 41' 44.237" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-80		Bolaang Mongondow Timur		5,442.28	124° 40' 2.839" E	0° 32' 1.045" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-81		Bitung		1,188.50	125° 17' 14.363" E	1° 14' 33.390" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-82		Bitung		2,054.87	125° 21' 21.356" E	1° 17' 37.763" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-83		Bitung		2,124.83	125° 23' 48.616" E	1° 21' 6.068" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-84		Bitung		15.76	125° 15' 34.919" E	1° 29' 44.470" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-85		Manado		594.62	124° 45' 2.712" E	1° 29' 35.826" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-86		Bitung		1.23	125° 13' 17.875" E	1° 27' 33.862" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-87		Minahasa		11,089.48	124° 35' 17.918" E	1° 32' 54.815" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-88		Minahasa		267.85	125° 4' 1.381" E	1° 12' 29.730" N			Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pembangunan PLTU/ PLTGU; - Pemasangan fasilitas mesin kalor - Kegiatan pendaratan pesawat di atas air (sea plane); - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat - alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin - mesin utama/pembantu; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut;	
Zona Perikanan Tangkap	PT-89		Minahasa Selatan		7,568.66	124° 28' 15.884" E	1° 27' 6.818" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-90		Bitung		1,499.81	125° 15' 34.161" E	1° 17' 38.434" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-91		Minahasa		7,840.13	125° 3' 33.679" E	0° 57' 32.979" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-92		Bitung		51,254.21	125° 17' 49.099" E	1° 26' 59.118" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-93		Minahasa Utara		15,546.40	125° 15' 39.520" E	1° 47' 17.283" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-94		Manado		2,615.24	124° 40' 31.938" E	1° 33' 1.795" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-95		Minahasa Tenggara		5,479.88	124° 59' 43.381" E	0° 55' 18.957" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-96		Bitung		1,738.78	125° 12' 50.211" E	1° 15' 21.061" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-97		Bitung		655.14	125° 12' 40.052" E	1° 17' 14.712" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-98		Manado		43.09	124° 46' 32.272" E	1° 29' 16.325" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-99		Minahasa Utara		1,228.71	125° 6' 57.919" E	1° 21' 55.132" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-100		Minahasa		317.54	125° 4' 34.347" E	1° 15' 3.981" N			- Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Kegiatan scraping kapal mati; - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Rehabilitasi Pantai; - Reklamasi pada kode zona PT-16 - Kegiatan Minyak dan Gas Bumi; - Kegiatan Telekomunikasi; - Kegiatan Penyediaan Energi; dan - Kegiatan Penyediaan Air Bersih.	
Zona Perikanan Tangkap	PT-101		Bitung		8,157.92	125° 16' 41.411" E	1° 38' 32.636" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-102		Minahasa		43,384.85	125° 4' 46.494" E	1° 5' 24.497" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-103		Minahasa Utara		5.82	125° 5' 50.520" E	1° 15' 6.621" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-104		Minahasa Tenggara		454.11	124° 56' 12.733" E	0° 59' 25.572" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-105		Bitung		74.21	125° 14' 46.101" E	1° 29' 53.405" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-106		Minahasa Utara		96.43	125° 6' 12.115" E	1° 53' 4.198" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-107		Bitung		4,490.74	125° 22' 32.571" E	1° 36' 52.991" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-108		Minahasa Utara		4,797.81	125° 9' 34.681" E	1° 16' 50.861" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-109		Minahasa		26,687.02	124° 36' 54.182" E	1° 28' 22.625" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-110		Minahasa Utara		9,269.40	125° 13' 59.342" E	1° 42' 16.987" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-111		Minahasa		4.27	125° 3' 18.374" E	1° 13' 40.305" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-112		Minahasa Utara		4,428.36	125° 10' 54.339" E	1° 11' 35.977" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-113		Minahasa Utara		2,377.05	125° 5' 38.849" E	1° 17' 32.878" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-114		Minahasa Utara		35,184.10	124° 55' 40.797" E	1° 49' 28.210" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-115		Manado		10,565.32	124° 44' 43.172" E	1° 33' 12.601" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-116		Kepulauan Sangihe		31,038.63	125° 31' 14.248" E	2° 53' 44.181" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-117		Kepulauan Sangihe		282.78	125° 14' 2.218" E	4° 2' 15.837" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-118		Kepulauan Sangihe		6,128.75	125° 16' 19.150" E	3° 34' 10.557" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-119		Kepulauan Sangihe		35,148.58	125° 39' 29.530" E	4° 46' 32.799" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-120		Kepulauan Sangihe		14,628.82	125° 21' 10.419" E	3° 3' 7.230" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-121		Kepulauan Sangihe		2,509.35	125° 20' 38.412" E	4° 3' 44.026" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-122		Minahasa Selatan		107,719.70	124° 20' 20.021" E	1° 15' 55.702" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-123		Kepulauan Sangihe		0.24	125° 26' 58.033" E	3° 37' 4.922" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-124		Kepulauan Sangihe		177,249.10	125° 41' 9.258" E	3° 51' 15.846" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-125		Kepulauan Sangihe		21,013.44	125° 48' 27.734" E	2° 58' 29.607" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-126		Kepulauan Sangihe		107.12	125° 37' 27.889" E	3° 46' 39.405" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-127		Kepulauan Sangihe		344,918.83	125° 34' 16.342" E	3° 30' 9.133" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-128		Kepulauan Sangihe		171,591.21	125° 38' 51.933" E	4° 26' 35.740" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-129		Kepulauan Sangihe		155,098.34	125° 40' 58.461" E	4° 8' 28.097" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-130		Kepulauan Sangihe		20,622.50	125° 17' 38.807" E	3° 8' 47.279" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-131		Bolaang Mongondow Selatan		9.87	124° 36' 37.980" E	0° 17' 46.279" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-132		Minahasa Tenggara		72,244.46	124° 53' 31.536" E	0° 50' 28.091" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-133		Manado		13,681.93	124° 35' 54.033" E	1° 42' 11.350" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-134		Manado		4,447.21	124° 31' 26.325" E	1° 41' 27.779" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-135		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		72,737.76	125° 29' 32.096" E	2° 47' 1.320" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-136		Minahasa		1,052.81	124° 27' 11.671" E	1° 32' 3.789" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-137		Bitung		5,654.57	125° 23' 18.040" E	1° 19' 48.122" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-138		Bolaang Mongondow		133,790.47	123° 58' 5.413" E	0° 59' 43.795" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-139		Bolaang Mongondow Utara		128,022.90	123° 28' 9.608" E	0° 59' 46.658" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-140		Minahasa Utara		21,280.56	124° 44' 34.417" E	1° 55' 53.435" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-141		Kepulauan Talaud		21,456.03	126° 35' 46.822" E	3° 42' 11.092" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-142		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		65,793.77	125° 33' 13.256" E	2° 8' 18.259" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-143		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		314,888.54	125° 21' 23.327" E	2° 20' 47.902" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-144		Minahasa		3,866.58	124° 29' 47.342" E	1° 35' 42.427" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-145		Bolaang Mongondow Selatan		271,262.40	124° 0' 10.996" E	0° 15' 26.138" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-146		Minahasa Utara		100,973.60	125° 6' 47.228" E	1° 56' 6.837" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-147		Bitung		20,981.88	125° 25' 12.150" E	1° 36' 49.513" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-148		Minahasa Tenggara		693.63	124° 54' 48.601" E	0° 59' 40.864" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-149		Bolaang Mongondow Utara		4,789.06	123° 19' 0.075" E	1° 7' 36.132" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-150		Minahasa		152.29	124° 35' 20.514" E	1° 35' 44.777" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-151		Kepulauan Talaud		565,649.24	126° 46' 23.571" E	4° 20' 27.739" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-152		Minahasa Utara		12.27	125° 13' 38.168" E	1° 12' 53.302" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-153		Manado		1,698.85	124° 35' 51.913" E	1° 37' 5.317" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-154		Bitung		7,594.67	125° 20' 52.992" E	1° 16' 0.768" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-155		Minahasa		11,109.76	125° 6' 50.820" E	0° 55' 51.325" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-156		Bitung		6,859.17	125° 24' 19.001" E	1° 23' 29.551" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-157		Minahasa Utara		1,877.55	125° 13' 28.115" E	1° 9' 35.354" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-158		Bolaang Mongondow Timur		53,837.09	124° 43' 49.748" E	0° 37' 13.710" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-159		Bolaang Mongondow Selatan		60.39	124° 28' 15.907" E	0° 27' 44.697" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Tangkap	PT-160		Bitung		4,513.25	125° 16' 2.226" E	1° 13' 19.613" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-161		Bolaang Mongondow		302.90	123° 56' 53.611" E	0° 50' 34.417" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-162		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		55.79	125° 21' 36.557" E	2° 6' 32.829" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-163		Kepulauan Talaud		7,500.40	126° 48' 7.530" E	3° 55' 20.955" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-164		Bitung		3,229.35	125° 28' 46.693" E	1° 32' 59.232" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-165		Kepulauan Talaud		17,243.02	127° 5' 57.017" E	4° 49' 22.544" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-166		Minahasa		2,708.90	125° 12' 5.777" E	1° 5' 30.740" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-167		Kepulauan Talaud		49.53	126° 43' 22.373" E	3° 50' 0.340" N				
Zona Perikanan Tangkap	PT-168		Bolaang Mongondow Timur		58,916.82	124° 36' 0.755" E	0° 30' 44.746" N				

b. Zona Perikanan Budidaya

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Budidaya	PB-1		Minahasa Utara		9.39	125° 1' 14.154" E	1° 42' 39.787" N	- Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal / kapal nelayan; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung);	- Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; ; - Usaha bongkar muat barang: pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Kegiatan pendaratan	- Kegiatan pembuangan amunisi di kode zona PB-1, PB-5 s/d PB-11 - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Terminal Khusus - Taxi laut - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi; - Instalasi/Penggelaran KabelBawah Laut untuk kepentingan telekomunikasi dan kepentingan lainnya; - Pengoperasian Pelabuhan	Ketentuan Khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada kode zona: • PB-1 • PB-2 • PB-3 • PB-4 Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada kode zona: • PB-1 • PB-10 • PB-11 • PB-5 • PB-6 • PB-7 • PB-8 • PB-9 Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa berupa Alur Migrasi Biota Laut pada kode zona: • PB-12
Zona Perikanan Budidaya	PB-2		Bitung		34.77	125° 16' 35.927" E	1° 31' 8.790" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-3		Bitung		23.06	125° 16' 2.046" E	1° 30' 17.717" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-4		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		10.28	125° 24' 18.320" E	2° 43' 14.862" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-5		Minahasa Utara		1,099.60	125° 4' 38.981" E	1° 48' 51.727" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-6		Minahasa Utara		42.27	125° 1' 12.557" E	1° 42' 50.838" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-7		Minahasa Utara		163.33	125° 5' 31.413" E	1° 51' 34.548" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-8		Minahasa Utara		45.63	125° 3' 42.251" E	1° 50' 39.449" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-9		Minahasa Utara		29.22	125° 6' 29.608" E	1° 39' 58.859" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-10		Minahasa Utara		17.03	125° 0' 33.505" E	1° 44' 29.541" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-11		Minahasa Utara		0.03	125° 1' 14.870" E	1° 42' 29.974" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-12		Kepulauan Sangihe		0.88	125° 38' 12.178" E	3° 46' 24.895" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Budidaya	PB-13		Kepulauan Talaud		98.02	126° 41' 56.595" E	4° 0' 0.287" N	- Pelepasan jangkar; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;	pesawat di atas air (sea plane); - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat - alat terapung saja;	Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pembangunan Fasilitas Terapung	Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan berupa Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut pada kode zona: • PB-13
Zona Perikanan Budidaya	PB-14		Bitung		14.31	125° 15' 32.058" E	1° 29' 31.965" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-15		Bitung		0.32	125° 11' 56.972" E	1° 25' 56.772" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-16		Minahasa Utara		27.26	124° 57' 3.454" E	1° 41' 5.246" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-17		Minahasa Utara		21.34	124° 55' 23.463" E	1° 40' 4.036" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-18		Bitung		0.23	125° 11' 44.864" E	1° 25' 54.955" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-19		Bitung		22.92	125° 14' 38.754" E	1° 30' 13.636" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-20		Minahasa		19.75	124° 59' 53.211" E	1° 6' 16.825" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-21		Minahasa Utara		801.48	124° 51' 55.119" E	1° 37' 46.974" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-22		Bitung		0.19	125° 14' 3.570" E	1° 27' 57.928" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-23		Bitung		2.31	125° 14' 21.514" E	1° 26' 56.772" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-24		Bitung		2.24	125° 13' 20.882" E	1° 27' 34.986" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Budidaya	PB-25		Minahasa		6.51	124° 44' 26.142" E	1° 26' 15.225" N	- Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi	- Kegiatan pembuatan mesin - mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat - alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat - alat maritim lainnya; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;	(Floating Facility) Migas: - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Mooring; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi Mineral Logam; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam; - Pembangunan TPI; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;	
Zona Perikanan Budidaya	PB-26		Kepulauan Talaud		111.96	126° 51' 6.795" E	4° 23' 3.973" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-27		Kepulauan Talaud		159.36	126° 37' 50.604" E	4° 2' 2.190" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-28		Minahasa Selatan		876.49	124° 24' 26.572" E	1° 11' 38.935" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-29		Kepulauan Sangihe		121.99	125° 36' 46.376" E	3° 22' 6.631" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-30		Kepulauan Talaud		39.52	126° 40' 40.783" E	3° 57' 12.153" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-31		Kepulauan Talaud		141.59	126° 51' 17.206" E	4° 24' 31.102" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-32		Bolaang Mongondow Utara		446.57	123° 10' 42.869" E	0° 55' 5.309" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-33		Bolaang Mongondow Utara		110.00	123° 21' 22.357" E	0° 54' 39.685" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-34		Bolaang Mongondow Selatan		119.78	123° 55' 53.569" E	0° 21' 13.903" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-35		Kepulauan Sangihe		7.67	125° 34' 18.189" E	3° 23' 48.869" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-36		Kepulauan Sangihe		55.82	125° 32' 48.187" E	3° 40' 37.831" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Budidaya	PB-37		Bolaang Mongondow Selatan		24.50	124° 16' 56.217" E	0° 24' 48.037" N			- Pembangunan dermaga perikanan - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal;	
Zona Perikanan Budidaya	PB-38		Kepulauan Talaud		28.53	126° 42' 50.546" E	4° 27' 9.200" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-39		Kepulauan Talaud		9.95	126° 50' 20.615" E	4° 11' 33.014" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-40		Kepulauan Sangihe		65.13	125° 33' 35.543" E	3° 39' 44.650" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-41		Kepulauan Talaud		127.16	126° 43' 3.056" E	3° 59' 55.477" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-42		Minahasa Selatan		2,121.83	124° 18' 44.558" E	1° 5' 47.084" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-43		Kepulauan Sangihe		52.69	125° 34' 20.828" E	3° 38' 44.296" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-44		Kepulauan Sangihe		85.40	125° 29' 44.787" E	3° 32' 48.914" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-45		Bolaang Mongondow Timur		164.13	124° 29' 23.965" E	0° 28' 43.170" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-46		Kepulauan Talaud		235.94	126° 46' 21.346" E	4° 0' 15.101" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-47		Bolaang Mongondow Utara		269.16	123° 23' 25.408" E	0° 54' 28.252" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-48		Kepulauan Talaud		29.81	126° 53' 36.561" E	4° 15' 32.007" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Budidaya	PB-49		Kepulauan Sangihe		1,256.44	125° 36' 45.726" E	3° 45' 25.309" N			- Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau	
Zona Perikanan Budidaya	PB-50		Minahasa Tenggara		88.00	124° 48' 22.694" E	0° 57' 1.653" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-51		Kepulauan Sangihe		31.32	125° 38' 3.342" E	3° 32' 35.919" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-52		Bolaang Mongondow		237.70	123° 45' 18.648" E	0° 50' 21.531" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-53		Bolaang Mongondow Utara		169.79	123° 19' 57.750" E	0° 54' 45.213" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-54		Kepulauan Talaud		180.12	126° 43' 16.386" E	4° 29' 41.517" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-55		Bolaang Mongondow Timur		255.08	124° 36' 15.045" E	0° 41' 51.866" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-56		Kepulauan Sangihe		6.50	125° 41' 25.872" E	4° 26' 17.471" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-57		Bolaang Mongondow		32.78	123° 56' 28.603" E	0° 51' 54.195" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-58		Minahasa Tenggara		1,499.36	124° 44' 11.588" E	0° 52' 42.531" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-59		Kepulauan Talaud		85.23	126° 42' 38.602" E	3° 55' 53.526" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-60		Bolaang Mongondow Selatan		157.88	124° 18' 18.748" E	0° 25' 20.394" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Budidaya	PB-61		Kepulauan Sangihe		1,494.95	125° 30' 53.833" E	3° 25' 6.095" N			ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; – Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Kegiatan pengujian kapal	
Zona Perikanan Budidaya	PB-62		Bolaang Mongondow		196.41	123° 47' 49.992" E	0° 50' 31.924" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-63		Kepulauan Talaud		93.73	126° 41' 22.782" E	3° 59' 33.225" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-64		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		41.45	125° 23' 16.835" E	2° 23' 0.174" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-65		Bolaang Mongondow Timur		789.40	124° 41' 34.073" E	0° 46' 23.725" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-66		Bolaang Mongondow Timur		59.88	124° 30' 2.262" E	0° 32' 59.596" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-67		Bolaang Mongondow Timur		1,002.37	124° 32' 41.981" E	0° 31' 23.472" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-68		Bolaang Mongondow Selatan		10.77	124° 10' 48.763" E	0° 23' 35.667" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-69		Kepulauan Sangihe		232.12	125° 39' 10.014" E	3° 23' 23.540" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-70		Bolaang Mongondow Utara		24.80	123° 15' 33.197" E	0° 55' 53.453" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-71		Kepulauan Talaud		620.25	126° 42' 10.678" E	4° 18' 19.692" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-72		Kepulauan Sangihe		499.46	125° 38' 43.184" E	3° 30' 35.107" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Budidaya	PB-73		Kepulauan Sangihe		107.70	125° 26' 2.141" E	3° 44' 10.291" N			perikanan/perahu ikan bermotor ; - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha vila (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penelitian kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Bongkar muat ikan;	
Zona Perikanan Budidaya	PB-74		Bolaang Mongondow Timur		2,842.18	124° 37' 29.065" E	0° 39' 14.092" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-75		Bolaang Mongondow Timur		231.58	124° 31' 49.067" E	0° 34' 10.462" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-76		Minahasa Tenggara		7.08	124° 45' 42.999" E	0° 53' 16.550" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-77		Kepulauan Talaud		139.65	126° 52' 9.616" E	4° 26' 1.137" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-78		Kepulauan Sangihe		487.20	125° 34' 38.949" E	3° 35' 20.955" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-79		Kepulauan Sangihe		437.05	125° 40' 20.012" E	3° 27' 50.314" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-80		Minahasa Tenggara		10.04	124° 42' 22.861" E	0° 50' 42.533" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-81		Bolaang Mongondow Selatan		239.13	124° 22' 7.736" E	0° 26' 19.615" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-82		Kepulauan Sangihe		11.46	125° 35' 14.024" E	3° 36' 56.742" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-83		Bolaang Mongondow Timur		12.34	124° 41' 21.247" E	0° 49' 58.948" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-84		Minahasa Selatan		819.58	124° 30' 17.415" E	1° 12' 10.503" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perikanan Budidaya	PB-85		Kepulauan Sangihe		489.35	125° 36' 39.298" E	3° 32' 47.120" N			- Penelitian dan pengembangan perikanan; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Pengintroduksian organisme hasil	
Zona Perikanan Budidaya	PB-86		Minahasa Selatan		625.16	124° 21' 7.684" E	1° 10' 4.608" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-87		Kepulauan Talaud		295.61	126° 41' 37.354" E	4° 23' 25.682" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-88		Kepulauan Talaud		68.06	126° 52' 25.609" E	4° 13' 33.808" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-89		Minahasa Selatan		3,814.06	124° 34' 43.280" E	1° 14' 21.636" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-90		Minahasa Tenggara		103.40	124° 53' 39.563" E	0° 58' 46.606" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-91		Kepulauan Talaud		31.43	126° 51' 40.966" E	4° 14' 48.908" N				
Zona Perikanan Budidaya	PB-92		Minahasa Tenggara		213.93	124° 46' 51.744" E	0° 55' 7.926" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/ Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										rekayasa genetika ke lingkungan; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Industri; - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Kegiatan scraping kapal mati; - Rehabilitasi Pantai; - Pembangunan saluran intake/outake air laut - Kegiatan Minyak dan Gas Bumi; - Kegiatan Telekomunikasi; - Kegiatan Penyediaan Energi; dan - Kegiatan Penyediaan Air Bersih.	

c. Zona Pelabuhan Perikanan

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-1		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		7.20	125° 24' 35.014" E	2° 43' 44.429" N	- Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Bongkar muat ikan; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Pembangunan TPI; - Pembangunan stasiun pengisian	- Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang);	- Kegiatan pembuangan amunisi di kode zona PP-2 - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Terminal Khusus - Instalasi/Penggelasan Kabel Bawah Laut untuk kepentingan telekomunikasi dan kepentingan lainnya; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Wisata alam bentang laut;	Ketentuan Khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada kode zona: • PP-1 Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada kode zona: • PP-2
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-2		Minahasa Utara		168.69	125° 3' 54.742" E	1° 40' 48.815" N				
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-4		Manado		17.72	124° 50' 27.316" E	1° 31' 20.813" N				
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-5		Minahasa Utara		7.50	125° 4' 36.132" E	1° 21' 33.017" N				
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-6		Minahasa		237.84	125° 1' 58.850" E	1° 8' 47.722" N				
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-10		Bolaang Mongondow Timur		366.87	124° 33' 24.137" E	0° 37' 43.468" N				
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-12		Bolaang Mongondow Utara		11.22	123° 11' 1.436" E	0° 55' 46.178" N				
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-13		Kepulauan Talaud		12.83	126° 41' 26.655" E	3° 51' 44.122" N				
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-15		Bolaang Mongondow		2.89	123° 56' 42.637" E	0° 50' 21.348" N				
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-16		Kepulauan Sangihe		17.12	125° 33' 49.223" E	3° 26' 10.431" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-17		Bolaang Mongondow Selatan		19.09	123° 54' 55.949" E	0° 20' 58.126" N	bahan bakar nelayan; - Penelitian kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pelepasan jangkar; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan;	- Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal / kapal nelayan; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan	- Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha vila (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: - Mooring;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
								- Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Penempatan kapal mati; - Uji coba kapal; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau	Pengumpan Regional dan Lokal; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pembuatan mesin - mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat - alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat - alat maritim lainnya; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya);	- Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi Mineral Logam; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
								pemeliharaan kapal/alat - alat terapung saja	- Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;	- Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal - Pengambilan foto/video bawah laut - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan,	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal -kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang -layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										- Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Kegiatan pendaratan pesawat di atas air (sea plane); - Kegiatan scraping kapal mati; - Rehabilitasi Pantai; - Reklamasi pada kode zona PP-2, PP-8 dan PP-18 Kegiatan Minyak dan Gas Bumi; - Kegiatan Telekomunikasi; - Kegiatan Penyediaan Energi; dan - Kegiatan Penyediaan Air Bersih.	

4. Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan Pertambangan dan Energi yang diintegrasikan kedalam RTRWP berdasarkan arahan KKPR Laut RZWP3K, berupa Zona Pengelolaan Energi, yang diuraikan pada tabel berikut ini:

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pengelolaan Energi	EN-1		Minahasa Utara		8.75	125° 5' 8.028" E	1° 22' 10.330" N	- Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;	- Pengambilan foto/video bawah laut; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; – Bongkar muat ikan; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong;	- Kegiatan pembuangan amunisi di kode zona EN-7 - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Terminal Khusus - Instalasi/Penggelaran Kabel Bawah Laut untuk kepentingan telekomunikasi dan kepentingan lainnya; - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: - Mooring; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Eksplorasi Migas;	Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada kode zona: • EN-7 Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan berupa Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut pada kode zona: • EN-1
Zona Pengelolaan Energi	EN-2		Minahasa Utara		17.46	125° 5' 17.060" E	1° 22' 17.168" N				
Zona Pengelolaan Energi	EN-3		Bolaang Mongondow Utara		25.53	123° 28' 15.490" E	0° 53' 41.631" N				
Zona Pengelolaan Energi	EN-4		Minahasa Selatan		332.61	124° 28' 39.376" E	1° 11' 41.965" N				
Zona Pengelolaan Energi	EN-5		Minahasa Selatan		185.56	124° 22' 42.827" E	1° 10' 57.687" N				
Zona Pengelolaan Energi	EN-6		Kepulauan Talaud		19.76	126° 41' 43.799" E	4° 4' 45.877" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pengelolaan Energi	EN-7		Minahasa Utara		10.00	125° 6' 13.514" E	1° 40' 4.644" N	- Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Penarikan (Towing); - Penelitian kegiatan konservasi; - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Pengapungan (refloating)	- Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; − Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing	- Eksplorasi Mineral Logam; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Pelepasan jangkar; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup;	- Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); − Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Pengerukan perairan laut dengan capital	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									- Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal / kapal nelayan; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan TPI; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping	dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Kegiatan scraping kapal mati; - Rehabilitasi Pantai; - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan Industri Galangan Kapal	- Usaha vila (cottage) di atas laut; Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Kegiatan pendaratan pesawat di atas air (sea plane); - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 - Kegiatan Minyak dan Gas Bumi; - Kegiatan Telekomunikasi; - Kegiatan Penyediaan Energi; dan - Kegiatan Penyediaan Air Bersih.	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin - mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat - alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat - alat maritim lainnya; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Latihan militer; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang;		

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									- Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing.		

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri yang diintegrasikan kedalam RTRWP berdasarkan arahan KKPR Laut RZWP3K, berupa Zona Industri, yang diuraikan pada tabel berikut ini:

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Industri	ID-1		Bitung		11.93	125° 7' 22.246" E	1° 24' 57.457" N	- Pelepasan jangkar; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Bongkar muat ikan; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor;	- Pengambilan foto/video bawah laut; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong;	- Instalasi/Penggelaran Kabel Bawah Laut untuk kepentingan telekomunikasi dan kepentingan lainnya; - Terminal Khusus - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO);	Ketentuan Khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada kode zona: • ID-1 • ID-2 • ID-3 • ID-4 • ID-5 • ID-6 Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan
Zona Industri	ID-2		Bitung		207.93	125° 7' 45.098" E	1° 24' 56.793" N				
Zona Industri	ID-3		Bitung		0.14	125° 7' 35.995" E	1° 25' 39.619" N				
Zona Industri	ID-4		Bitung		8.90	125° 7' 37.488" E	1° 25' 32.020" N				
Zona Industri	ID-5		Bitung		72.88	125° 7' 26.979" E	1° 24' 50.458" N				
Zona Industri	ID-6		Bitung		8.37	125° 7' 43.759" E	1° 25' 38.156" N				
Zona Industri	ID-7		Kepulauan Sangihe		11.08	125° 27' 22.832" E	3° 36' 54.766" N				
Zona Industri	ID-8		Kepulauan Sangihe		0.99	125° 26' 54.037" E	3° 37' 0.594" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Industri	ID-9		Bitung		3.24	125° 12' 35.454" E	1° 27' 1.307" N	- Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri :	- Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk	- Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: - Mooring; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi Mineral Logam; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ;	berupa Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut pada kode zona: • ID-7 • ID-8
Zona Industri	ID-10		Bitung		9.64	125° 13' 7.005" E	1° 27' 30.547" N				
Zona Industri	ID-11		Bitung		104.46	125° 7' 2.429" E	1° 23' 47.907" N				
Zona Industri	ID-12		Bitung		19.07	125° 12' 11.038" E	1° 26' 0.430" N				
Zona Industri	ID-13		Bitung		0.00	125° 12' 41.813" E	1° 27' 12.100" N				
Zona Industri	ID-14		Minahasa Utara		18.24	125° 6' 23.115" E	1° 23' 28.079" N				
Zona Industri	ID-15		Bitung		91.19	125° 13' 28.803" E	1° 26' 24.428" N				
Zona Industri	ID-16		Bitung		130.76	125° 9' 9.989" E	1° 26' 6.758" N				
Zona Industri	ID-17		Bitung		34.34	125° 11' 30.332" E	1° 25' 50.008" N				
Zona Industri	ID-18		Manado		21.49	124° 50' 22.300" E	1° 31' 34.482" N				
Zona Industri	ID-19		Minahasa Utara		38.85	125° 5' 50.786" E	1° 22' 46.669" N				
Zona Industri	ID-20		Bitung		7.53	125° 12' 50.922" E	1° 27' 23.397" N				
Zona Industri	ID-21		Bitung		0.00	125° 7' 34.888" E	1° 25' 39.282" N				
Zona Industri	ID-22		Bitung		6.46	125° 9' 43.352" E	1° 26' 19.836" N				
Zona Industri	ID-23		Bitung		87.61	125° 8' 27.460" E	1° 26' 1.962" N				
Zona Industri	ID-24		Bolaang Mongondow		4.39	123° 56' 24.082" E	0° 50' 13.018" N				
Zona Industri	ID-25		Kepulauan Talaud		1,040.03	126° 48' 33.551" E	4° 31' 50.898" N				
Zona Industri	ID-26		Bolaang Mongondow		38.54	124° 2' 30.964" E	0° 54' 23.487" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Industri	ID-27		Kepulauan Sangihe		4.69	125° 27' 38.326" E	3° 36' 48.763" N	kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat - alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin - mesin	kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal / kapal nelayan; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Konstruksi Pertambangan Garam - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing	- Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Kegiatan pendaratan pesawat di atas air (sea plane); - Latihan militer; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net,	
Zona Industri	ID-28		Bolaang Mongondow Selatan		160.48	123° 36' 21.890" E	0° 18' 15.023" N				
Zona Industri	ID-29		Kepulauan Sangihe		12.10	125° 26' 48.435" E	3° 37' 6.115" N				
Zona Industri	ID-30		Bolaang Mongondow		1.06	123° 56' 7.627" E	0° 50' 11.788" N				
Zona Industri	ID-31		Kepulauan Talaud		72.95	126° 41' 27.523" E	3° 51' 41.451" N				
Zona Industri	ID-32		Kepulauan Talaud		29.41	126° 50' 51.202" E	4° 11' 50.287" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
								utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat - alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat - alat maritim lainnya; - Penarikan (Towing); - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembuangan air sisa hasil		bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
								pengolahan industri perikanan; - Pembangunan TPI; - Penempatan kapal mati; - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Pengapungan (refloating); - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ;		- Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha villa (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Pembangunan dermaga perikanan; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Operasi Kapal Angkutan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal -kapal yang masih mengapung tetapi	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										sedang mendapat malapetaka; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Kegiatan scraping kapal mati; - Pembangunan saluran intake/outake air laut - Rehabilitasi Pantai; - Reklamasi pada kode zona ID-4 s/d ID-6, ID-21 s/d ID-23 - Kegiatan Minyak dan Gas Bumi; - Kegiatan Telekomunikasi; - Kegiatan Penyediaan Energi; dan - Kegiatan Penyediaan Air Bersih.	

6. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata yang diintegrasikan kedalam RTRWP berdasarkan arahan KKPR Laut RZWP3K, berupa Zona Pariwisata, yang diuraikan pada tabel berikut ini:

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-1		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		3.65	125° 24' 1.637" E	2° 42' 4.206" N	- Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penanaman tanaman bakau dan nipah;	- Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Pembangunan TPI; - Uji coba kapal; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan;	- Kegiatan pembuangan amunisi di kode zona W-9 s/d W-27 - Latihan militer seperti kegiatan daerah latihan pendaratan di kode zona W-28 s/d W-30 - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Terminal Khusus - Taxi laut - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan;	Ketentuan Khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada kode zona: • W-1 • W-2 • W-3 • W-4 • W-5 • W-6 • W-7 • W-8 Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada kode zona: • W-10 • W-11 • W-12 • W-13 • W-14 • W-15 • W-16 • W-17 • W-18 • W-19 • W-20 • W-21
Zona Pariwisata	W-2		Bitung		1.23	125° 3' 31.493" E	1° 46' 8.824" N				
Zona Pariwisata	W-3		Bitung		8.82	124° 17' 20.141" E	0° 25' 30.258" N				
Zona Pariwisata	W-4		Bitung		11.49	123° 49' 18.938" E	0° 19' 29.950" N				
Zona Pariwisata	W-5		Bitung		4.39	124° 46' 56.119" E	0° 53' 24.937" N				
Zona Pariwisata	W-6		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		10.16	124° 18' 58.331" E	0° 24' 29.725" N				
Zona Pariwisata	W-7		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		5.56	126° 52' 58.043" E	4° 19' 18.082" N				
Zona Pariwisata	W-8		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		67.56	124° 38' 52.266" E	0° 47' 55.555" N				
Zona Pariwisata	W-9		Minahasa Utara		0.78	123° 48' 1.199" E	0° 52' 15.282" N				
Zona Pariwisata	W-10		Minahasa Utara		3.42	124° 30' 25.638" E	0° 28' 40.984" N				
Zona Pariwisata	W-11		Minahasa Utara		62.52	123° 37' 8.929" E	0° 17' 41.504" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-12		Minahasa Utara		160.54	125° 41' 40.531" E	4° 26' 5.573" N	- Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang - layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil; - Kegiatan pekerjaan	- Usaha bongkar muat barang: pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal;	- Instalasi/Penggelaran KabelBawah Laut untuk kepentingan telekomunikasi dan kepentingan lainnya; - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; - Pembangunan anjungan/platform migas; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: - Mooring; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi Mineral Logam;	• W-22 • W-23 • W-24 • W-25 • W-26 • W-27 • W-28 • W-29 • W-30 • W-9 Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa berupa Alur Migrasi Biota Laut pada kode zona: • W-31 • W-32 • W-33 • W-34 • W-35 • W-36 • W-37 • W-38 • W-39 Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan berupa Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut pada kode zona: • W-1
Zona Pariwisata	W-13		Minahasa Utara		319.09	125° 6' 48.805" E	1° 48' 24.930" N				
Zona Pariwisata	W-14		Minahasa Utara		43.64	123° 28' 59.208" E	0° 18' 43.004" N				
Zona Pariwisata	W-15		Minahasa Utara		68.17	124° 32' 34.997" E	1° 16' 30.521" N				
Zona Pariwisata	W-16		Minahasa Utara		274.64	126° 37' 14.905" E	3° 58' 57.846" N				
Zona Pariwisata	W-17		Minahasa Utara		318.31	124° 54' 7.746" E	0° 57' 37.958" N				
Zona Pariwisata	W-18		Minahasa Utara		66.97	125° 43' 56.972" E	3° 28' 42.436" N				
Zona Pariwisata	W-19		Minahasa Utara		28.93	125° 35' 19.887" E	3° 37' 0.305" N				
Zona Pariwisata	W-20		Minahasa Utara		339.65	124° 2' 30.299" E	0° 22' 25.938" N				
Zona Pariwisata	W-21		Minahasa Utara		63.24	125° 35' 29.245" E	3° 35' 51.750" N				
Zona Pariwisata	W-22		Minahasa Utara		98.83	125° 34' 50.077" E	3° 34' 54.603" N				
Zona Pariwisata	W-23		Minahasa Utara		127.84	123° 38' 6.354" E	0° 53' 29.294" N				
Zona Pariwisata	W-24		Minahasa Utara		300.41	125° 0' 29.036" E	1° 44' 31.970" N				
Zona Pariwisata	W-25		Minahasa Utara		780.35	126° 51' 12.269" E	4° 23' 45.492" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-26		Bolaang Mongondow Utara		5.65	125° 24' 30.050" E	2° 6' 5.067" N	penyelaman (diving works); - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi	- Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat - alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin - mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat - alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat - alat maritim lainnya; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing	- Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan alat	• W-40 • W-41 • W-42 • W-43 • W-44 • W-45
Zona Pariwisata	W-27		Bolaang Mongondow Utara		21.54	124° 17' 40.790" E	1° 0' 38.338" N				
Zona Pariwisata	W-28		Bolaang Mongondow Timur		158.17	125° 22' 28.931" E	2° 39' 42.346" N				
Zona Pariwisata	W-29		Bolaang Mongondow Timur		39.30	123° 33' 37.461" E	0° 53' 30.885" N				
Zona Pariwisata	W-30		Bolaang Mongondow Timur		74.23	125° 27' 16.408" E	2° 20' 3.312" N				
Zona Pariwisata	W-31		Minahasa Utara		12.54	125° 37' 15.423" E	3° 21' 25.688" N				
Zona Pariwisata	W-32		Minahasa		116.78	123° 45' 41.620" E	0° 50' 58.402" N				
Zona Pariwisata	W-33		Minahasa Utara		123.24	125° 5' 54.576" E	1° 53' 30.937" N				
Zona Pariwisata	W-34		Minahasa		107.62	126° 52' 15.016" E	4° 13' 52.042" N				
Zona Pariwisata	W-35		Minahasa		128.57	125° 7' 56.932" E	1° 45' 54.607" N				
Zona Pariwisata	W-36		Bitung		117.77	124° 18' 8.395" E	1° 1' 24.425" N				
Zona Pariwisata	W-37		Minahasa		92.80	123° 9' 16.262" E	0° 54' 34.165" N				
Zona Pariwisata	W-38		Kepulauan Sangihe		20.16	124° 47' 23.297" E	0° 55' 1.287" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-39		Kepulauan Sangihe		29.95	124° 10' 7.970" E	0° 57' 27.155" N			yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pelepasan jangkar; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha villa (cottage) di atas laut; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik	
Zona Pariwisata	W-40		Minahasa Utara		18.82	123° 43' 20.683" E	0° 18' 37.677" N				
Zona Pariwisata	W-41		Minahasa		4.97	123° 30' 57.928" E	0° 18' 46.835" N				
Zona Pariwisata	W-42		Manado		78.28	124° 42' 40.553" E	0° 52' 3.844" N				
Zona Pariwisata	W-43		Minahasa		8.45	126° 41' 58.484" E	4° 16' 59.256" N				
Zona Pariwisata	W-44		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		44.91	125° 23' 34.516" E	2° 41' 15.871" N				
Zona Pariwisata	W-45		Bolaang Mongondow Timur		80.82	124° 46' 12.860" E	0° 53' 58.448" N				
Zona Pariwisata	W-46		Minahasa Utara		17.57	125° 2' 12.946" E	1° 45' 46.596" N				
Zona Pariwisata	W-47		Minahasa		0.99	125° 36' 35.567" E	3° 32' 44.991" N				
Zona Pariwisata	W-48		Minahasa Utara		1,721.91	126° 41' 30.025" E	3° 52' 6.405" N				
Zona Pariwisata	W-49		Bitung		21.80	126° 48' 38.263" E	4° 9' 40.972" N				
Zona Pariwisata	W-50		Bitung		136.56	124° 10' 24.185" E	0° 23' 30.363" N				
Zona Pariwisata	W-51		Bitung		80.25	123° 15' 25.474" E	0° 56' 33.256" N				
Zona Pariwisata	W-52		Minahasa		27.35	124° 36' 6.653" E	1° 15' 29.689" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-53		Bitung		3.68	124° 42' 54.348" E	0° 50' 43.036" N			pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Penetapan tambat labuh; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal -kapal yang masih mengapung tetapi	
Zona Pariwisata	W-54		Bitung		20.25	124° 27' 3.841" E	1° 11' 46.837" N				
Zona Pariwisata	W-55		Bitung		97.38	123° 17' 39.275" E	0° 54' 50.023" N				
Zona Pariwisata	W-56		Minahasa Utara		96.41	125° 23' 54.120" E	2° 38' 3.271" N				
Zona Pariwisata	W-57		Bitung		7.98	125° 3' 32.472" E	1° 47' 19.098" N				
Zona Pariwisata	W-58		Minahasa		20.40	126° 47' 57.255" E	4° 1' 40.401" N				
Zona Pariwisata	W-59		Minahasa Tenggara		1.46	124° 52' 45.882" E	0° 57' 7.613" N				
Zona Pariwisata	W-60		Minahasa		58.13	123° 35' 11.142" E	0° 18' 20.657" N				
Zona Pariwisata	W-61		Minahasa		51.54	123° 25' 45.076" E	0° 54' 10.100" N				
Zona Pariwisata	W-62		Manado		6.63	125° 36' 27.482" E	3° 47' 11.599" N				
Zona Pariwisata	W-63		Minahasa		9.49	124° 42' 32.403" E	0° 51' 2.887" N				
Zona Pariwisata	W-64		Minahasa		97.09	123° 14' 24.299" E	0° 56' 49.845" N				
Zona Pariwisata	W-65		Minahasa		9.32	125° 29' 25.725" E	3° 28' 25.501" N				
Zona Pariwisata	W-66		Minahasa		90.78	126° 41' 2.177" E	4° 21' 24.976" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-67		Bitung		310.37	125° 34' 51.853" E	3° 45' 54.898" N			sedang mendapat malapetaka; - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); ; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL); - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Kegiatan pendaratan pesawat di atas air (sea plane); - Penetapan rute pelayaran internasional - Latihan militer;	
Zona Pariwisata	W-68		Minahasa Utara		10.47	125° 5' 38.505" E	1° 50' 22.224" N				
Zona Pariwisata	W-69		Minahasa Utara		31.93	124° 15' 15.912" E	1° 0' 9.627" N				
Zona Pariwisata	W-70		Minahasa Utara		93.44	125° 33' 11.657" E	3° 40' 16.633" N				
Zona Pariwisata	W-71		Minahasa		69.21	124° 18' 41.040" E	1° 2' 55.342" N				
Zona Pariwisata	W-72		Manado		1,386.90	123° 11' 19.891" E	0° 57' 8.278" N				
Zona Pariwisata	W-73		Minahasa Utara		417.13	123° 58' 33.028" E	0° 54' 6.231" N				
Zona Pariwisata	W-74		Minahasa		889.04	125° 33' 17.553" E	3° 44' 59.465" N				
Zona Pariwisata	W-75		Bitung		190.50	125° 22' 15.124" E	2° 40' 57.976" N				
Zona Pariwisata	W-76		Bitung		0.99	124° 3' 27.616" E	0° 22' 4.351" N				
Zona Pariwisata	W-77		Bitung		29.38	125° 33' 53.192" E	3° 46' 8.610" N				
Zona Pariwisata	W-78		Minahasa		0.17	123° 54' 34.657" E	0° 50' 44.612" N				
Zona Pariwisata	W-79		Bitung		108.63	125° 7' 48.497" E	1° 50' 4.117" N				
Zona Pariwisata	W-80		Minahasa		186.45	124° 37' 41.825" E	0° 45' 57.531" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-81		Minahasa		154.50	126° 52' 16.610" E	4° 12' 53.075" N			- Alur pelayaran patroli militer - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Pengoperasian kapal selam untuk kegiatan wisata - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus (selain untuk kegiatan wisata); - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung);	
Zona Pariwisata	W-82		Minahasa Utara		498.78	123° 44' 11.661" E	0° 51' 39.809" N				
Zona Pariwisata	W-83		Minahasa Utara		337.88	126° 41' 10.520" E	3° 49' 54.139" N				
Zona Pariwisata	W-84		Minahasa		12.60	125° 22' 53.398" E	2° 19' 5.845" N				
Zona Pariwisata	W-85		Minahasa		1.86	125° 28' 53.887" E	3° 36' 19.165" N				
Zona Pariwisata	W-86		Minahasa		4.91	123° 46' 40.098" E	0° 50' 19.117" N				
Zona Pariwisata	W-87		Minahasa		3.96	123° 30' 43.417" E	0° 53' 20.257" N				
Zona Pariwisata	W-88		Minahasa		3.36	123° 49' 1.211" E	0° 50' 49.812" N				
Zona Pariwisata	W-89		Minahasa		4.81	123° 57' 44.885" E	0° 21' 27.395" N				
Zona Pariwisata	W-90		Minahasa Utara		6.91	125° 1' 38.023" E	1° 43' 46.451" N				
Zona Pariwisata	W-91		Minahasa Utara		2.42	126° 52' 42.763" E	4° 15' 16.261" N				
Zona Pariwisata	W-92		Minahasa		0.66	126° 43' 0.698" E	3° 53' 48.580" N				
Zona Pariwisata	W-93		Minahasa Tenggara		271.12	125° 25' 33.656" E	3° 38' 0.177" N				
Zona Pariwisata	W-94		Kepulauan Talaud		391.38	123° 52' 6.818" E	0° 50' 28.308" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-95		Kepulauan Sangihe		17.22	123° 8' 6.020" E	0° 55' 28.535" N			- Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Industri - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Kegiatan scraping kapal mati; - Rehabilitasi Pantai; - Reklamasi pada kode zona W-43, W-85 s/d W-92, W-237 s/d W-240 - Kegiatan Minyak dan Gas Bumi; - Kegiatan Telekomunikasi; - Kegiatan Penyediaan Energi; dan - Kegiatan Penyediaan Air Bersih.	
Zona Pariwisata	W-96		Bolaang Mongondow Selatan		256.95	123° 52' 5.002" E	0° 19' 50.855" N				
Zona Pariwisata	W-97		Kepulauan Sangihe		11.27	126° 48' 22.106" E	4° 6' 40.990" N				
Zona Pariwisata	W-98		Kepulauan Sangihe		3.07	124° 14' 19.571" E	0° 23' 31.045" N				
Zona Pariwisata	W-99		Bolaang Mongondow		317.58	125° 29' 37.867" E	3° 35' 59.218" N				
Zona Pariwisata	W-100		Bolaang Mongondow Selatan		23.50	125° 37' 3.924" E	3° 47' 36.093" N				
Zona Pariwisata	W-101		Bolaang Mongondow Selatan		695.02	125° 3' 2.389" E	1° 45' 34.132" N				
Zona Pariwisata	W-102		Minahasa Tenggara		8.91	125° 27' 47.399" E	3° 36' 47.721" N				
Zona Pariwisata	W-103		Bolaang Mongondow Selatan		71.87	124° 34' 41.014" E	0° 40' 18.853" N				
Zona Pariwisata	W-104		Kepulauan Talaud		706.73	123° 55' 15.619" E	0° 20' 49.905" N				
Zona Pariwisata	W-105		Bolaang Mongondow Timur		27.13	126° 47' 19.970" E	4° 13' 5.015" N				
Zona Pariwisata	W-106		Bolaang Mongondow		533.63	123° 10' 5.960" E	0° 56' 49.658" N				
Zona Pariwisata	W-107		Bolaang Mongondow Timur		235.22	124° 54' 33.269" E	1° 1' 5.134" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-108		Bolaang Mongondow Selatan		15.22	125° 22' 16.359" E	2° 21' 55.257" N				
Zona Pariwisata	W-109		Kepulauan Sangihe		48.62	123° 32' 23.060" E	0° 19' 15.144" N				
Zona Pariwisata	W-110		Bolaang Mongondow Selatan		123.72	124° 26' 49.451" E	0° 26' 48.116" N				
Zona Pariwisata	W-111		Minahasa Selatan		18.29	123° 10' 24.141" E	0° 57' 9.618" N				
Zona Pariwisata	W-112		Kepulauan Talaud		88.24	125° 17' 12.532" E	1° 32' 44.819" N				
Zona Pariwisata	W-113		Minahasa Tenggara		47.94	125° 9' 31.141" E	1° 45' 28.408" N				
Zona Pariwisata	W-114		Kepulauan Sangihe		420.72	125° 34' 29.939" E	3° 48' 17.158" N				
Zona Pariwisata	W-115		Kepulauan Sangihe		160.74	125° 25' 43.456" E	2° 22' 57.810" N				
Zona Pariwisata	W-116		Bolaang Mongondow Selatan		20.89	125° 22' 10.380" E	2° 7' 38.438" N				
Zona Pariwisata	W-117		Kepulauan Sangihe		76.95	123° 9' 53.773" E	0° 54' 11.429" N				
Zona Pariwisata	W-118		Kepulauan Sangihe		4.16	124° 33' 52.329" E	1° 16' 25.257" N				
Zona Pariwisata	W-119		Bolaang Mongondow Utara		335.56	126° 39' 58.765" E	4° 2' 25.920" N				
Zona Pariwisata	W-120		Kepulauan Talaud		28.34	125° 27' 52.386" E	3° 36' 42.632" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-121		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		8.95	124° 42' 10.140" E	0° 48' 41.696" N				
Zona Pariwisata	W-122		Bolaang Mongondow		25.88	125° 35' 43.692" E	3° 46' 17.045" N				
Zona Pariwisata	W-123		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		48.63	125° 40' 14.267" E	3° 29' 25.973" N				
Zona Pariwisata	W-124		Bolaang Mongondow Utara		86.00	125° 2' 51.722" E	1° 48' 23.421" N				
Zona Pariwisata	W-125		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		141.90	126° 36' 31.901" E	4° 2' 40.715" N				
Zona Pariwisata	W-126		Kepulauan Sangihe		10.15	124° 31' 27.644" E	1° 12' 31.064" N				
Zona Pariwisata	W-127		Bolaang Mongondow		64.09	125° 21' 27.944" E	2° 7' 39.956" N				
Zona Pariwisata	W-128		Minahasa Utara		1.26	125° 23' 54.322" E	2° 42' 3.200" N				
Zona Pariwisata	W-129		Kepulauan Talaud		11.63	123° 55' 36.945" E	0° 51' 27.063" N				
Zona Pariwisata	W-130		Minahasa Selatan		164.66	125° 29' 3.286" E	3° 35' 23.453" N				
Zona Pariwisata	W-131		Bolaang Mongondow Utara		17.33	126° 42' 24.583" E	4° 18' 42.100" N				
Zona Pariwisata	W-132		Minahasa Tenggara		1.15	124° 41' 46.304" E	0° 50' 14.546" N				
Zona Pariwisata	W-133		Bolaang Mongondow		230.29	126° 39' 8.945" E	3° 58' 58.797" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-134		Bolaang Mongondow Selatan		460.23	124° 29' 38.458" E	0° 32' 41.962" N				
Zona Pariwisata	W-135		Bolaang Mongondow Selatan		26.75	125° 4' 50.524" E	1° 52' 26.002" N				
Zona Pariwisata	W-136		Minahasa Tenggara		16.89	124° 40' 44.401" E	0° 48' 25.123" N				
Zona Pariwisata	W-137		Kepulauan Talaud		36.72	125° 26' 16.468" E	2° 22' 33.376" N				
Zona Pariwisata	W-138		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		6.01	125° 31' 51.766" E	3° 24' 47.190" N				
Zona Pariwisata	W-139		Minahasa Tenggara		69.54	125° 25' 1.119" E	2° 39' 47.359" N				
Zona Pariwisata	W-140		Kepulauan Sangihe		4.20	126° 42' 36.728" E	4° 16' 6.061" N				
Zona Pariwisata	W-141		Kepulauan Talaud		63.77	123° 47' 31.121" E	0° 18' 58.379" N				
Zona Pariwisata	W-142		Kepulauan Talaud		199.88	124° 53' 51.023" E	0° 59' 50.564" N				
Zona Pariwisata	W-143		Bolaang Mongondow Selatan		43.36	125° 34' 34.537" E	3° 24' 29.066" N				
Zona Pariwisata	W-144		Bolaang Mongondow Utara		75.56	123° 21' 15.242" E	0° 54' 40.062" N				
Zona Pariwisata	W-145		Minahasa Selatan		13.91	124° 33' 50.559" E	0° 35' 24.207" N				
Zona Pariwisata	W-146		Minahasa Tenggara		28.50	125° 3' 8.891" E	1° 49' 51.572" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-147		Minahasa Selatan		760.12	124° 37' 22.344" E	0° 42' 18.876" N				
Zona Pariwisata	W-148		Bolaang Mongondow Utara		123.59	125° 29' 23.069" E	3° 28' 35.941" N				
Zona Pariwisata	W-149		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		133.41	124° 21' 53.752" E	0° 25' 22.017" N				
Zona Pariwisata	W-150		Kepulauan Talaud		127.00	126° 40' 15.906" E	4° 0' 4.289" N				
Zona Pariwisata	W-151		Minahasa Tenggara		47.56	125° 23' 31.320" E	3° 54' 42.821" N				
Zona Pariwisata	W-152		Bolaang Mongondow Selatan		349.16	124° 37' 46.036" E	0° 43' 50.641" N				
Zona Pariwisata	W-153		Bolaang Mongondow Utara		262.24	124° 44' 31.539" E	0° 51' 41.908" N				
Zona Pariwisata	W-154		Kepulauan Sangihe		28.10	125° 27' 48.337" E	3° 36' 46.124" N				
Zona Pariwisata	W-155		Minahasa Tenggara		9.68	125° 27' 53.737" E	3° 36' 46.436" N				
Zona Pariwisata	W-156		Bolaang Mongondow Utara		33.13	125° 28' 40.318" E	3° 36' 24.245" N				
Zona Pariwisata	W-157		Kepulauan Sangihe		0.73	125° 9' 39.960" E	1° 48' 52.198" N				
Zona Pariwisata	W-158		Kepulauan Talaud		122.48	124° 45' 28.742" E	1° 27' 22.206" N				
Zona Pariwisata	W-159		Kepulauan Sangihe		24.47	125° 8' 24.762" E	1° 41' 8.796" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-160		Bolaang Mongondow		102.48	123° 11' 7.031" E	0° 57' 30.183" N				
Zona Pariwisata	W-161		Kepulauan Sangihe		10.28	123° 10' 59.575" E	0° 57' 13.766" N				
Zona Pariwisata	W-162		Minahasa Selatan		149.09	124° 39' 13.394" E	0° 46' 49.847" N				
Zona Pariwisata	W-163		Bolaang Mongondow Utara		2.90	124° 38' 5.475" E	0° 46' 47.594" N				
Zona Pariwisata	W-164		Bolaang Mongondow		32.64	125° 14' 56.545" E	1° 30' 31.682" N				
Zona Pariwisata	W-165		Kepulauan Sangihe		50.11	124° 38' 44.674" E	0° 47' 39.782" N				
Zona Pariwisata	W-166		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		8.18	125° 11' 12.373" E	1° 47' 21.700" N				
Zona Pariwisata	W-167		Bolaang Mongondow Selatan		304.23	125° 3' 42.372" E	1° 16' 8.355" N				
Zona Pariwisata	W-168		Kepulauan Sangihe		30.60	125° 4' 35.881" E	1° 20' 17.040" N				
Zona Pariwisata	W-169		Bolaang Mongondow		134.21	125° 3' 13.616" E	1° 14' 15.200" N				
Zona Pariwisata	W-170		Bolaang Mongondow Timur		142.27	125° 2' 23.127" E	1° 11' 29.734" N				
Zona Pariwisata	W-171		Kepulauan Talaud		104.63	125° 9' 36.957" E	1° 34' 51.882" N				
Zona Pariwisata	W-172		Bolaang Mongondow		43.46	125° 2' 55.076" E	1° 13' 8.540" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-173		Kepulauan Talaud		875.40	125° 37' 53.316" E	3° 47' 26.006" N				
Zona Pariwisata	W-174		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		48.48	125° 34' 31.203" E	3° 48' 31.777" N				
Zona Pariwisata	W-175		Kepulauan Sangihe		26.58	125° 15' 46.664" E	1° 30' 0.840" N				
Zona Pariwisata	W-176		Bolaang Mongondow		22.64	125° 4' 52.492" E	1° 22' 4.684" N				
Zona Pariwisata	W-177		Bolaang Mongondow Utara		115.05	124° 46' 56.772" E	1° 27' 48.376" N				
Zona Pariwisata	W-178		Bolaang Mongondow		154.86	124° 47' 18.936" E	1° 27' 59.870" N				
Zona Pariwisata	W-179		Bolaang Mongondow Selatan		306.93	124° 46' 55.716" E	1° 27' 46.299" N				
Zona Pariwisata	W-180		Kepulauan Talaud		143.77	125° 23' 51.811" E	2° 41' 44.700" N				
Zona Pariwisata	W-181		Kepulauan Talaud		231.91	124° 37' 34.744" E	0° 45' 0.234" N				
Zona Pariwisata	W-182		Kepulauan Sangihe		109.20	124° 55' 40.371" E	1° 39' 47.894" N				
Zona Pariwisata	W-183		Bolaang Mongondow		110.15	124° 41' 1.839" E	1° 24' 9.826" N				
Zona Pariwisata	W-184		Bolaang Mongondow Utara		159.87	124° 57' 30.194" E	1° 43' 13.719" N				
Zona Pariwisata	W-185		Bolaang Mongondow Selatan		160.72	125° 12' 41.262" E	1° 26' 9.654" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-186		Kepulauan Talaud		319.68	125° 16' 37.021" E	1° 31' 25.456" N				
Zona Pariwisata	W-187		Bolaang Mongondow Selatan		1,089.71	125° 14' 16.428" E	1° 29' 1.479" N				
Zona Pariwisata	W-188		Kepulauan Sangihe		7.75	125° 10' 31.648" E	1° 33' 52.517" N				
Zona Pariwisata	W-189		Kepulauan Sangihe		37.15	125° 3' 51.471" E	1° 16' 50.117" N				
Zona Pariwisata	W-190		Kepulauan Sangihe		0.000001	125° 12' 45.756" E	1° 27' 13.653" N				
Zona Pariwisata	W-191		Bolaang Mongondow Timur		615.46	125° 14' 47.179" E	1° 30' 24.211" N				
Zona Pariwisata	W-192		Bolaang Mongondow Selatan		21.24	125° 14' 39.963" E	1° 31' 2.150" N				
Zona Pariwisata	W-193		Kepulauan Talaud		52.59	125° 5' 26.420" E	1° 53' 11.400" N				
Zona Pariwisata	W-194		Bolaang Mongondow Utara		6.01	125° 11' 3.605" E	1° 25' 41.426" N				
Zona Pariwisata	W-195		Minahasa		0.11	124° 43' 36.477" E	1° 25' 45.757" N				
Zona Pariwisata	W-196		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		68.07	124° 54' 39.395" E	1° 0' 57.437" N				
Zona Pariwisata	W-197		Bolaang Mongondow Selatan		4.59	125° 26' 37.681" E	2° 44' 56.230" N				
Zona Pariwisata	W-198		Bolaang Mongondow Selatan		393.68	125° 2' 38.670" E	1° 12' 18.129" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-199		Bolaang Mongondow Utara		29.05	124° 46' 15.055" E	1° 27' 39.093" N				
Zona Pariwisata	W-200		Kepulauan Sangihe		35.57	124° 50' 8.828" E	1° 31' 46.593" N				
Zona Pariwisata	W-201		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		35.10	124° 44' 17.145" E	1° 26' 9.865" N				
Zona Pariwisata	W-202		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		3.59	124° 39' 22.842" E	1° 23' 53.806" N				
Zona Pariwisata	W-203		Bolaang Mongondow Utara		7.90	124° 41' 5.872" E	1° 24' 23.242" N				
Zona Pariwisata	W-204		Minahasa Selatan		20.20	125° 3' 30.046" E	1° 15' 14.007" N				
Zona Pariwisata	W-205		Kepulauan Talaud		26.72	125° 14' 37.512" E	1° 27' 51.648" N				
Zona Pariwisata	W-206		Kepulauan Sangihe		6.97	125° 6' 10.182" E	1° 23' 20.233" N				
Zona Pariwisata	W-207		Bolaang Mongondow Timur		34.39	125° 11' 13.516" E	1° 47' 48.046" N				
Zona Pariwisata	W-208		Kepulauan Sangihe		52.44	125° 22' 9.939" E	2° 46' 12.424" N				
Zona Pariwisata	W-209		Kepulauan Sangihe		60.72	125° 4' 38.532" E	1° 21' 6.419" N				
Zona Pariwisata	W-210		Kepulauan Talaud		23.21	124° 44' 47.379" E	1° 26' 55.084" N				
Zona Pariwisata	W-211		Minahasa Selatan		182.51	124° 48' 36.551" E	1° 28' 36.823" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-212		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		24.96	124° 53' 37.824" E	1° 38' 27.918" N				
Zona Pariwisata	W-213		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		0.10	124° 57' 33.090" E	1° 3' 50.919" N				
Zona Pariwisata	W-214		Bolaang Mongondow		7.14	125° 17' 29.471" E	1° 32' 30.638" N				
Zona Pariwisata	W-215		Kepulauan Sangihe		1.73	125° 11' 50.885" E	1° 25' 57.386" N				
Zona Pariwisata	W-216		Kepulauan Talaud		24.41	125° 13' 38.658" E	1° 27' 25.429" N				
Zona Pariwisata	W-217		Bolaang Mongondow Timur		58.74	124° 46' 37.225" E	1° 27' 36.326" N				
Zona Pariwisata	W-218		Kepulauan Talaud		352.53	125° 9' 20.644" E	1° 35' 47.445" N				
Zona Pariwisata	W-219		Bolaang Mongondow Timur		11.61	125° 24' 7.585" E	2° 42' 36.403" N				
Zona Pariwisata	W-220		Bolaang Mongondow Timur		246.93	125° 1' 58.732" E	1° 10' 3.338" N				
Zona Pariwisata	W-221		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		7.95	124° 42' 19.321" E	1° 25' 6.655" N				
Zona Pariwisata	W-222		Kepulauan Sangihe		1.18	125° 9' 21.607" E	1° 37' 54.601" N				
Zona Pariwisata	W-223		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		195.61	125° 4' 6.904" E	1° 18' 9.904" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-224		Kepulauan Talaud		28.91	125° 3' 2.871" E	1° 13' 42.306" N				
Zona Pariwisata	W-225		Bolaang Mongondow Selatan		14.23	124° 46' 50.913" E	1° 27' 38.415" N				
Zona Pariwisata	W-226		Minahasa Tenggara		404.13	124° 46' 43.646" E	1° 27' 38.338" N				
Zona Pariwisata	W-227		Kepulauan Sangihe		206.69	124° 46' 24.584" E	1° 27' 40.847" N				
Zona Pariwisata	W-228		Bolaang Mongondow Utara		99.73	124° 46' 37.103" E	1° 27' 40.160" N				
Zona Pariwisata	W-229		Bolaang Mongondow Timur		309.47	124° 46' 5.023" E	1° 27' 34.759" N				
Zona Pariwisata	W-230		Bolaang Mongondow Timur		114.07	125° 9' 52.133" E	1° 39' 55.007" N				
Zona Pariwisata	W-231		Kepulauan Sangihe		1.12	124° 58' 0.313" E	1° 43' 58.247" N				
Zona Pariwisata	W-232		Bolaang Mongondow Selatan		19.67	124° 58' 30.829" E	1° 43' 37.224" N				
Zona Pariwisata	W-233		Kepulauan Talaud		24.81	124° 39' 8.317" E	1° 23' 52.335" N				
Zona Pariwisata	W-234		Kepulauan Sangihe		19.52	124° 50' 36.966" E	0° 57' 46.215" N				
Zona Pariwisata	W-235		Bolaang Mongondow Timur		239.36	126° 42' 30.800" E	4° 26' 4.764" N				
Zona Pariwisata	W-236		Minahasa Tenggara		95.80	125° 36' 53.346" E	3° 46' 50.495" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pariwisata	W-237		Kepulauan Sangihe		2.22	124° 19' 57.213" E	0° 26' 14.371" N				
Zona Pariwisata	W-238		Kepulauan Sangihe		1.06	125° 33' 58.161" E	3° 35' 19.736" N				
Zona Pariwisata	W-239		Kepulauan Sangihe		1.05	125° 30' 2.089" E	3° 26' 47.075" N				
Zona Pariwisata	W-240		Minahasa		1.60	124° 0' 35.625" E	0° 53' 31.975" N				

7. Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman yang diintegrasikan kedalam RTRWP berdasarkan arahan KKPR Laut RZWP3K, berupa Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa dan Zona Fasilitas Umum, yang diuraikan pada tabel berikut ini:

a. Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-1		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		28.45	125° 21' 30.219" E	2° 44' 13.034" N	- Usaha terkait perdangangan dan jasa - infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa	- Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Pembangunan terminal peti kemas;	- Kegiatan pembuangan amunisi di kode zona DG-5 - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Terminal Khusus - Taxi laut	Ketentuan Khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada kode zona: • DG-1 • DG-2 • DG-3
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-2		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		20.92	125° 21' 30.232" E	2° 43' 34.383" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-3		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		2.54	125° 21' 27.456" E	2° 44' 32.864" N	- Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Usaha dermaga wisata	- Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; ; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pengapungan (refloating); - Bongkar muat ikan; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non	- Instalasi/Penggelaran Kabel Bawah Laut untuk kepentingan telekomunikasi dan kepentingan lainnya; - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: - Mooring; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi Mineral Logam; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam	• DG-4 Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada kode zona: • DG-5 Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan berupa Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut pada kode zona: • DG-1
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-4		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		6.08	125° 24' 45.570" E	2° 43' 53.004" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-5		Minahasa Utara		0.26	125° 0' 44.113" E	1° 41' 39.420" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-6		Manado		13.56	124° 47' 50.457" E	1° 27' 39.798" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-7		Minahasa		10.82	124° 41' 28.694" E	1° 24' 32.842" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-8		Manado		30.67	124° 49' 23.233" E	1° 28' 4.345" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-9		Manado		1.62	124° 48' 26.338" E	1° 27' 40.241" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-10		Manado		5.14	124° 48' 12.899" E	1° 27' 39.122" N		ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pembangunan TPI; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan;	- Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3;	
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-11		Manado		2.20	124° 48' 3.082" E	1° 27' 39.183" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-12		Manado		11.82	124° 48' 30.359" E	1° 27' 36.796" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-13		Manado		16.99	124° 48' 57.468" E	1° 27' 35.770" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-14		Manado		1.87	124° 49' 35.698" E	1° 27' 49.667" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-15		Manado		0.99	124° 49' 45.510" E	1° 28' 5.439" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-16		Manado		0.40	124° 49' 58.700" E	1° 28' 29.236" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-17		Manado		86.41	124° 50' 30.445" E	1° 30' 39.029" N		- Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; - Uji coba kapal; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; – Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin - mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya - Penangkapan ikan menggunakan alat	- Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Latihan militer; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring	
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-18		Manado		14.14	124° 50' 1.855" E	1° 29' 18.723" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-19		Bolaang Mongondow Selatan		182.64	124° 0' 2.475" E	0° 22' 20.459" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-20		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		15.96	125° 21' 32.444" E	2° 43' 1.798" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-21		Bolaang Mongondow Selatan		313.57	124° 8' 14.652" E	0° 23' 24.016" N				
Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa	DG-22		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		10.79	125° 22' 36.656" E	2° 20' 42.872" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan;	insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Usaha villa (cottage) di atas laut; - Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pemasangan rumpon perairan dalam; – Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Penarikan (Towing); - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional - Pelepasan jangkar; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal / kapal nelayan; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										- Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha wisata berenang;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										- Jasa Wisata Tirta (bahari); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Kegiatan pendaratan pesawat di atas air (sea plane); - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Pembangunan pembangkitan,	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Kegiatan scraping kapal mati; - Rehabilitasi Pantai; - Reklamasi pada kode zona DG-4, DG-10 s/d DG-18, DG-22 - Kegiatan Minyak dan Gas Bumi; - Kegiatan Telekomunikasi; - Kegiatan Penyediaan Energi; dan - Kegiatan Penyediaan Air Bersih.	

b. Zona Fasilitas Umum

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Fasilitas Umum	FU-1		Minahasa Utara		24.88	125° 4' 27.003" E	1° 40' 40.696" N	- Pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP);	- Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal / kapal nelayan; - Pembangunan terminal peti kemas;	- Kegiatan pembuangan amunisi di kode zona FU-1 - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Terminal Khusus - Pembangunan dan pengoperasian Jetty;	Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada kode zona: • FU-1 Ketentuan
Zona	FU-2		Minahasa Selatan		2.44	124° 34' 27.437" E	1° 11' 14.392" N				
Zona Fasilitas Umum	FU-3		Minahasa Selatan		258.44	124° 35' 38.334" E	1° 12' 58.837" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
								- Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi dalam rangka kepentingan umum ; - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati;	- Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pemasangan rumpon perairan; - Pemasangan rumpon perairan dangkal;	- Instalasi/Penggelaran KabelBawah Laut untuk kepentingan telekomunikasi dan kepentingan lainnya; - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha villa (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata;	Khusus Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut berupa Area Sensitif (PSSA) pada kode zona: • FU-2

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
								- Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pelepasan jangkar; - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal	- Bongkar muat ikan; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap;	- Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: - Mooring; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi Mineral Logam; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									- Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan	- Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan ; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya);	- Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); - Pengambilan foto/video bawah laut; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									- Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; – Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesinmesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus	- Pembangunan PLTU/PLTGU; - Pembangunan TPI; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Kegiatan pendaratan pesawat di atas air (sea plane); - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan	- Kegiatan scraping kapal mati; - Rehabilitasi PantaiKegiatan Minyak dan Gas Bumi; - Kegiatan Telekomunikasi; - Kegiatan Penyediaan Energi; dan - Kegiatan Penyediaan Air Bersih.	

8. Kawasan Transportasi

Kawasan Transportasi yang diintegrasikan kedalam RTRWP berdasarkan arahan KKPR Laut RZWP3K, berupa Zona Pelabuhan Laut dan sebagian Zona Pelabuhan Perikanan, yang diuraikan pada tabel berikut ini:

a. Zona Pelabuhan Laut

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pelabuhan Laut	PL-1		Minahasa Utara		1.28	125° 1' 5.612" E	1° 42' 17.764" N	- Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ;	- Pengambilan foto/video bawah laut; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut;	- Kegiatan pembuangan amunisi di kode zona PL-1, PL-12 s/d PL-14 - Latihan militer seperti kegiatan daerah latihan pendaratan di kode zona PL-15 - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Alur pelayaran patroli militer; - Instalasi/Penggelaran Kabel Bawah Laut untuk kepentingan telekomunikasi dan kepentingan lainnya; - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi);	Ketentuan Khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada kode zona: • PL-1 • PL-10 • PL-11 • PL-2 • PL-3 • PL-4 • PL-5 • PL-6 • PL-7 • PL-8 • PL-9 Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada kode zona: • PL-1 • PL-12 • PL-13 • PL-14 • PL-15 Ketentuan
Zona Pelabuhan Laut	PL-2		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		241.98	125° 26' 5.977" E	2° 42' 52.426" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-3		Bitung		1,163.36	125° 8' 51.385" E	1° 24' 32.535" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-4		Bitung		0.22	125° 15' 35.606" E	1° 29' 58.884" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-5		Manado		40.84	124° 49' 58.682" E	1° 29' 52.150" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-6		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		158.50	125° 26' 16.288" E	2° 42' 24.164" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-7		Bolaang Mongondow		167.65	123° 55' 39.668" E	0° 50' 51.348" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-8		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		199.82	125° 21' 27.936" E	2° 45' 28.185" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-9		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		550.70	125° 25' 38.386" E	2° 43' 34.627" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pelabuhan Laut	PL-10		Minahasa Selatan		594.00	124° 33' 29.122" E	1° 12' 18.504" N	- Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Penarikan (Towing); - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pelepasan jangkar;	- Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut,	- Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha villa (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); Industri - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: - Mooring; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi Mineral Logam; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam,	Khusus Kawasan Sempadan berupa Sempadan Pipa/Kabel Bawah Laut pada kode zona: • PL-16 • PL-2
Zona Pelabuhan Laut	PL-11		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		0.42	125° 21' 36.024" E	2° 45' 2.657" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-12		Minahasa Utara		10.86	125° 9' 4.844" E	1° 49' 17.880" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-13		Minahasa Utara		107.49	125° 0' 59.942" E	1° 41' 48.931" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-14		Minahasa Utara		205.35	125° 6' 56.684" E	1° 47' 38.010" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-15		Bolaang Mongondow Timur		25.28	124° 38' 17.045" E	0° 47' 6.844" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-16		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		5.67	125° 23' 46.976" E	2° 41' 26.329" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-17		Minahasa		7.95	124° 43' 55.513" E	1° 26' 3.450" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-18		Minahasa Utara		20.23	124° 51' 52.560" E	1° 36' 4.431" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-19		Minahasa Utara		9.79	125° 4' 5.884" E	1° 19' 39.901" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-20		Minahasa Utara		11.23	125° 4' 4.099" E	1° 19' 24.238" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pelabuhan Laut	PL-21		Manado		250.81	124° 49' 59.589" E	1° 30' 7.566" N	- Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal / kapal nelayan; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja;	jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;	batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu ; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Uji coba kapal; - Taxi laut	
Zona Pelabuhan Laut	PL-22		Bitung		1,891.32	125° 12' 8.029" E	1° 26' 56.340" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-23		Minahasa		7.85	124° 43' 17.888" E	1° 25' 35.328" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-24		Minahasa Utara		2.38	125° 4' 18.790" E	1° 19' 43.293" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-25		Bitung		3.73	125° 12' 41.925" E	1° 27' 7.134" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-26		Minahasa		4.39	124° 40' 58.247" E	1° 24' 4.575" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-27		Bitung		188.45	125° 8' 17.009" E	1° 23' 40.097" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-28		Minahasa		11.26	124° 43' 21.551" E	1° 25' 31.616" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-29		Minahasa		5.99	124° 44' 6.491" E	1° 26' 5.459" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-30		Minahasa		5.80	124° 43' 48.154" E	1° 25' 57.590" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-31		Minahasa Utara		9.89	125° 4' 4.404" E	1° 19' 33.108" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pelabuhan Laut	PL-32		Minahasa Utara		6.86	125° 4' 13.049" E	1° 19' 41.865" N	- Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Pengapungan (refloating);	- Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan;	- Kegiatan pendaratan pesawat di atas air (sea plane); - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan pembuatan mesin - mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat- alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;	
Zona Pelabuhan Laut	PL-33		Minahasa		2.22	124° 40' 56.991" E	1° 23' 59.759" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-34		Bolaang Mongondow Timur		61.43	124° 39' 35.416" E	0° 48' 26.683" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-35		Bolaang Mongondow Selatan		0.12	124° 20' 59.081" E	0° 26' 51.173" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-36		Kepulauan Talaud		4.37	126° 42' 31.350" E	4° 0' 13.427" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-37		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		87.07	125° 20' 30.056" E	2° 18' 13.503" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-38		Kepulauan Talaud		167.08	127° 5' 40.547" E	4° 43' 28.536" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-39		Kepulauan Talaud		121.20	126° 47' 7.557" E	4° 31' 49.647" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-40		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		12.08	125° 21' 53.407" E	2° 7' 39.398" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-41		Kepulauan Sangihe		90.44	125° 37' 39.199" E	3° 31' 12.906" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-42		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		144.51	125° 23' 49.899" E	2° 40' 54.620" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pelabuhan Laut	PL-43		Kepulauan Talaud		159.62	126° 51' 57.406" E	4° 14' 21.609" N		- Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;	- Kegiatan pembuatan alat- alat maritim lainnya - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda; - Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU;	
Zona Pelabuhan Laut	PL-44		Kepulauan Talaud		409.05	126° 46' 54.026" E	4° 14' 8.657" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-45		Bolaang Mongondow Timur		23.36	124° 41' 30.806" E	0° 50' 0.556" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-46		Kepulauan Talaud		1,291.20	126° 50' 17.014" E	4° 30' 13.421" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-47		Bolaang Mongondow		74.47	124° 5' 1.299" E	0° 55' 37.057" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-48		Bolaang Mongondow Timur		41.88	124° 29' 1.070" E	0° 28' 36.761" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-49		Kepulauan Sangihe		4.24	125° 23' 13.315" E	3° 54' 58.883" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-50		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		40.31	125° 23' 38.618" E	2° 19' 32.055" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-51		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		36.71	125° 22' 43.975" E	2° 20' 22.646" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-52		Kepulauan Sangihe		8.46	125° 41' 23.768" E	4° 25' 51.862" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-53		Kepulauan Talaud		305.69	126° 43' 33.093" E	4° 27' 50.299" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pelabuhan Laut	PL-54		Kepulauan Sangihe		29.62	125° 33' 49.405" E	3° 39' 2.476" N			- Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Kegiatan scraping kapal mati; - Rehabilitasi Pantai; - Reklamasi pada kode zona PL-11, PL-28 s/d PL-33, PL-97, PL-98 - Kegiatan Minyak dan Gas Bumi; - Kegiatan Telekomunikasi; - Kegiatan Penyediaan Energi; dan - Kegiatan Penyediaan Air Bersih.	
Zona Pelabuhan Laut	PL-55		Minahasa Tenggara		96.92	124° 47' 37.124" E	0° 56' 37.998" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-56		Bolaang Mongondow Selatan		251.20	123° 44' 17.243" E	0° 18' 43.649" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-57		Kepulauan Sangihe		48.16	125° 37' 14.822" E	3° 23' 1.483" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-58		Bolaang Mongondow		11.96	123° 44' 51.698" E	0° 50' 29.587" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-59		Bolaang Mongondow Utara		418.91	123° 10' 43.347" E	0° 54' 45.849" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-60		Bolaang Mongondow Selatan		117.04	124° 16' 41.997" E	0° 25' 22.000" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-61		Bolaang Mongondow		153.73	123° 56' 3.736" E	0° 51' 1.753" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-62		Kepulauan Talaud		2.17	126° 41' 12.320" E	3° 52' 15.929" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-63		Bolaang Mongondow		57.42	123° 56' 59.147" E	0° 51' 58.979" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-64		Kepulauan Sangihe		65.67	125° 29' 51.003" E	3° 27' 16.508" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pelabuhan Laut	PL-65		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		27.64	125° 21' 18.482" E	2° 6' 45.147" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-66		Kepulauan Sangihe		157.94	125° 29' 46.622" E	3° 36' 17.824" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-67		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		73.25	125° 26' 55.307" E	2° 40' 31.448" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-68		Kepulauan Talaud		1.90	126° 44' 18.286" E	3° 59' 35.863" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-69		Bolaang Mongondow Selatan		28.26	123° 54' 14.359" E	0° 20' 54.217" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-70		Bolaang Mongondow Selatan		85.14	124° 21' 16.962" E	0° 26' 41.266" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-71		Minahasa Tenggara		12.35	124° 43' 5.809" E	0° 53' 41.636" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-72		Bolaang Mongondow		65.52	124° 6' 52.322" E	0° 55' 25.425" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-73		Kepulauan Talaud		600.65	126° 40' 23.376" E	3° 59' 13.513" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-74		Bolaang Mongondow Selatan		228.19	124° 27' 25.189" E	0° 27' 36.523" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-75		Kepulauan Sangihe		73.84	125° 33' 13.089" E	3° 25' 55.372" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pelabuhan Laut	PL-76		Kepulauan Sangihe		18.19	125° 37' 18.994" E	3° 46' 56.787" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-77		Minahasa Selatan		153.89	124° 29' 17.356" E	1° 11' 38.872" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-78		Kepulauan Talaud		316.64	126° 41' 33.459" E	3° 56' 48.710" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-79		Kepulauan Sangihe		27.89	125° 33' 57.918" E	3° 37' 44.982" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-80		Kepulauan Talaud		4.06	126° 44' 54.505" E	4° 8' 32.877" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-81		Bolaang Mongondow		2.18	124° 6' 0.700" E	0° 55' 11.095" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-82		Kepulauan Talaud		49.08	126° 51' 36.556" E	4° 25' 5.979" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-83		Kepulauan Talaud		156.63	127° 3' 14.047" E	4° 44' 23.476" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-84		Bolaang Mongondow Timur		494.11	124° 32' 41.616" E	0° 34' 48.317" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-85		Kepulauan Sangihe		6.21	125° 34' 25.557" E	3° 20' 32.001" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-86		Bolaang Mongondow		4.81	123° 53' 11.103" E	0° 50' 30.395" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pelabuhan Laut	PL-87		Minahasa Tenggara		396.24	124° 43' 3.579" E	0° 51' 32.339" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-88		Minahasa Tenggara		92.63	124° 53' 27.508" E	0° 58' 17.498" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-89		Kepulauan Sangihe		7.29	125° 28' 27.482" E	3° 36' 26.585" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-90		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		31.58	125° 26' 17.719" E	2° 42' 4.918" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-91		Bolaang Mongondow Selatan		40.47	124° 2' 37.383" E	0° 22' 17.051" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-92		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		73.66	125° 24' 55.558" E	2° 22' 21.022" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-93		Kepulauan Sangihe		11.54	125° 23' 4.276" E	3° 54' 28.450" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-94		Bolaang Mongondow Utara		32.18	123° 15' 39.086" E	0° 55' 4.735" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-95		Kepulauan Sangihe		35.64	125° 34' 57.852" E	3° 44' 59.691" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-96		Kepulauan Sangihe		256.80	125° 35' 2.457" E	3° 23' 24.121" N				
Zona Pelabuhan Laut	PL-97		Kepulauan Sangihe		0.91	125° 28' 28.866" E	3° 36' 29.984" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pelabuhan Laut	PL-98		Kepulauan Sangihe		1.71	125° 29' 19.068" E	3° 36' 26.650" N				

b. Zona Pelabuhan Perikanan

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-3		Minahasa		0.23	124° 40' 52.235" E	1° 23' 57.817" N	- Penggunaan galah untuk mendorong perahu; - Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Bongkar muat ikan; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor;	- Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan jaring insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut,	- Kegiatan pembuangan amunisi di kode zona PP-2 - Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Terminal Khusus - Instalasi/Penggelasan Kabel Bawah Laut untuk kepentingan telekomunikasi dan kepentingan lainnya; - Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar	Ketentuan Khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada kode zona: • PP-1 Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada kode zona: • PP-2
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-7		Bitung		121.65	125° 12' 50.107" E	1° 27' 0.828" N				
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-8		Minahasa		1.40	124° 40' 53.937" E	1° 23' 56.421" N				
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-9		Minahasa Tenggara		108.05	124° 47' 33.297" E	0° 56' 11.361" N				
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-11		Minahasa Selatan		51.75	124° 33' 5.203" E	1° 12' 23.098" N				
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-14		Kepulauan Sangihe		16.13	125° 28' 9.761" E	3° 36' 34.955" N				
Zona Pelabuhan Perikanan	PP-18		Kepulauan Sangihe		2.27	125° 28' 11.544" E	3° 36' 38.199" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
								- Penelitian dan pengembangan perikanan; - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Pembangunan TPI; - Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; - Penelitian kegiatan konservasi; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove;	jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik;	kab/kota dalam Provinsi ; - Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam, antar provinsi dan pelabuhan internasional ; - Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan; - Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut ; - Penetapan rute pelayaran internasional; - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
								- Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pelepasan jangkar; - Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Penempatan kapal mati; - Uji coba kapal;	- Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3; - Kegiatan pembuatan mesin - mesin utama/pembantu; - Kegiatan pembuatan alat - alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; - Kegiatan pembuatan alat - alat maritim lainnya; - Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri	- Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha vila (cottage) di atas laut; - Usaha wisata berenang; - Jasa Wisata Tirta (bahari); - Pemasangan / Penggelaran Pipa Migas; - Pembangunan anjungan/platform migas ; - Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO); - Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading); - Pembangunan Fasilitas	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
								- Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri; - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air); - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat - alat terapung saja	Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing;	Terapung (Floating Facility) Migas: - Mooring; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Migas ; - Eksplorasi Migas; - Eksplorasi Mineral Logam; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal - Pengambilan foto/video bawah laut - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										memotong material karang dan/atau batu ; - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi ; - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP); - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing; - Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										- Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; - Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal - kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang -layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										- Pemasangan fasilitas turbin generator energi ; - Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) ; - Pemasangan fasilitas mesin kalor ; - Eksplorasi energi OTEC; - Pembangunan PLTU/PLTGU; - Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works); - Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional ; - Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi ; - Kegiatan pendaratan pesawat di atas air (sea plane); - Kegiatan scraping kapal mati;	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
										- Rehabilitasi Pantai; - Reklamasi pada kode zona PP-2, PP-8 dan PP-18 - Kegiatan Minyak dan Gas Bumi; - Kegiatan Telekomunikasi; - Kegiatan Penyediaan Energi; dan - Kegiatan Penyediaan Air Bersih.	

9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang diintegrasikan kedalam RTRWP berdasarkan arahan KKPR Laut RZWP3K, berupa Zona Pertahanan dan Keamanan, yang diuraikan pada tabel berikut ini:

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
Zona Pertahanan dan Keamanan	HK-1		Minahasa		8.62	124° 45' 35.833" E	1° 27' 26.967" N	- Latihan Militer - Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) untuk kepentingan militer - Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat- alat terapung saja untuk kepentingan militer - Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi militer untuk kepentingan militer - Kegiatan pembuatan mesinmesin utama/pembantu untuk kepentingan militer - Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal untuk kepentingan militer	- Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan kapal / kapal nelayan; - Pembangunan terminal peti kemas; - Pembangunan terminal curah kering; - Pembangunan terminal curah CAIR; - Pembangunan terminal Roro; - Usaha bongkar muat barang: pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan; - Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri;	- Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) - Terminal Khusus - Penanaman tanaman bakau dan nipah; - Budidaya mangrove; - Perlindungan keanekaragaman hayati; - Penyelamatan dan perlindungan lingkungan; - Pelepasan jangkar; - Penetapan tambat labuh; - Penetapan tempat alih muat antar kapal; - Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal; - Pembangunan Tempat perbaikan kapal; - Penempatan kapal mati; - Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air);	Tidak terdapat ketentuan khusus
Zona Pertahanan dan Keamanan	HK-2		Bitung		2.51	125° 12' 55.161" E	1° 27' 32.971" N				
Zona Pertahanan dan Keamanan	HK-3		Kepulauan Sangihe		39.20	125° 33' 54.697" E	3° 25' 54.626" N				

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
								- Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya untuk kepentingan militer - Kegiatan pembuangan amunisi	- Pengambilan foto/video bawah laut; - Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing; - Usaha villa (cottage) di atas laut; - Jasa Wisata Tirta (bahari) - Wisata alam bentang laut; - Wisata alam bawah laut; - Wisata sejarah; - Wisata budaya; - Wisata olahraga air; - Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi); - Usaha jasa perjalanan wisata; - Usaha wisata berenang; - Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi; - Pemasangan rumpon perairan dalam; - Pemasangan rumpon perairan dangkal; - Bongkar muat ikan;	- Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka; - Penarikan (Towing); - Pengapungan (refloating); - Penelitian kegiatan konservasi; - Pendidikan kegiatan konservasi; - Penelitian dan pengembangan perikanan; - Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing; - Pembangunan breakwater (pemecah gelombang); - Pembangunan turap (revetment), pembangunan groin; - Uji coba kapal; - Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional ; - Kegiatan pendaratan pesawat di atas air (sea plane); - Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									- Penangkapan ikan menggunakan jaring lingkar : pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukat cincin teri dengan satu kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, jaring lingkar tanpa kerut; - Penangkapan ikan menggunakan jaring tarik : jaring tarik pantai, payang, jaring tarik berkantong ; - Penangkapan ikan menggunakan jaring hela : jaring hela udang berkantong, jaring hela ikan berkantong; - Penangkapan ikan menggunakan penggaruk : penggaruk berkapal, penggaruk tanpa kapal; - Penangkapan ikan menggunakan jaring angkat : anco, bagan berperahu atau bagan apung, bouke ami, bagan tancap; - Penangkapan ikan menggunakan jaring	keadaan force majeure oleh kapal asing; - Pemasangan fasilitas turbin - Pembangunan dan pengoperasian Jetty; - Kegiatan scraping kapal mati; - Rehabilitasi Pantai - Kegiatan Minyak dan Gas Bumi; - Kegiatan Telekomunikasi; - Kegiatan Penyediaan Energi; dan - Kegiatan Penyediaan Air Bersih.	

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									insang : jaring insang tetap, jaring insang hanyut, jaring insang lingkar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis, jaring insang kombinasi; - Penangkapan ikan menggunakan perangkap : set net, bubu, bubu bersayap, pukat labuh, togo, ambai, jermal, pengerih, sero; - Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor ; - Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang); - Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri; - Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung); - Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi;		

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									- Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup; - Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik; - Pemasangan Keramba Jaring Apung; - Pembangunan TPI; - Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan ; - Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan ; - Pembangunan dermaga perikanan; - Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant; - Konstruksi Pertambangan Garam; - Industri penggaraman; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3;		

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									- Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut; - Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan; - Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya); - Pengambilan terumbu karang; - Usaha dermaga wisata; - Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi; - Usaha angkutan laut wisata dalam negeri; - Usaha angkutan laut internasional wisata; - Survei dan/atau penelitian ilmiah; - Pengerukan perairan dengan capital dredging ; - Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material		

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									karang dan/atau batu ; - Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing; - Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3; - Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal; - Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan; – Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; - Penangkapan ikan menggunakan alat yang dijatuhkan atau ditebarkan : jala jatuh berkapal, jala tebar; - Penangkapan ikan menggunakan pancing : pancing ulur, pancing ulur tuna, pancing berjoran, pancing cumi, pancing cumi mekanis, pancing layang-layang, huhate, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, tonda;		

Zona	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			Ketentuan Khusus
		Perairan	Kab/Kota	Nama Obyek/Toponimi		Long (X)	Lat (Y)	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan setelah mendapat izin	
									- Penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan lainnya : tombak, ladung, panah, pukat dorong, seser, pocongan; - Mooring; - Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam; - Eksplorasi Mineral Logam; - Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif; - Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam		

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

Peta Peraturan KKPRL

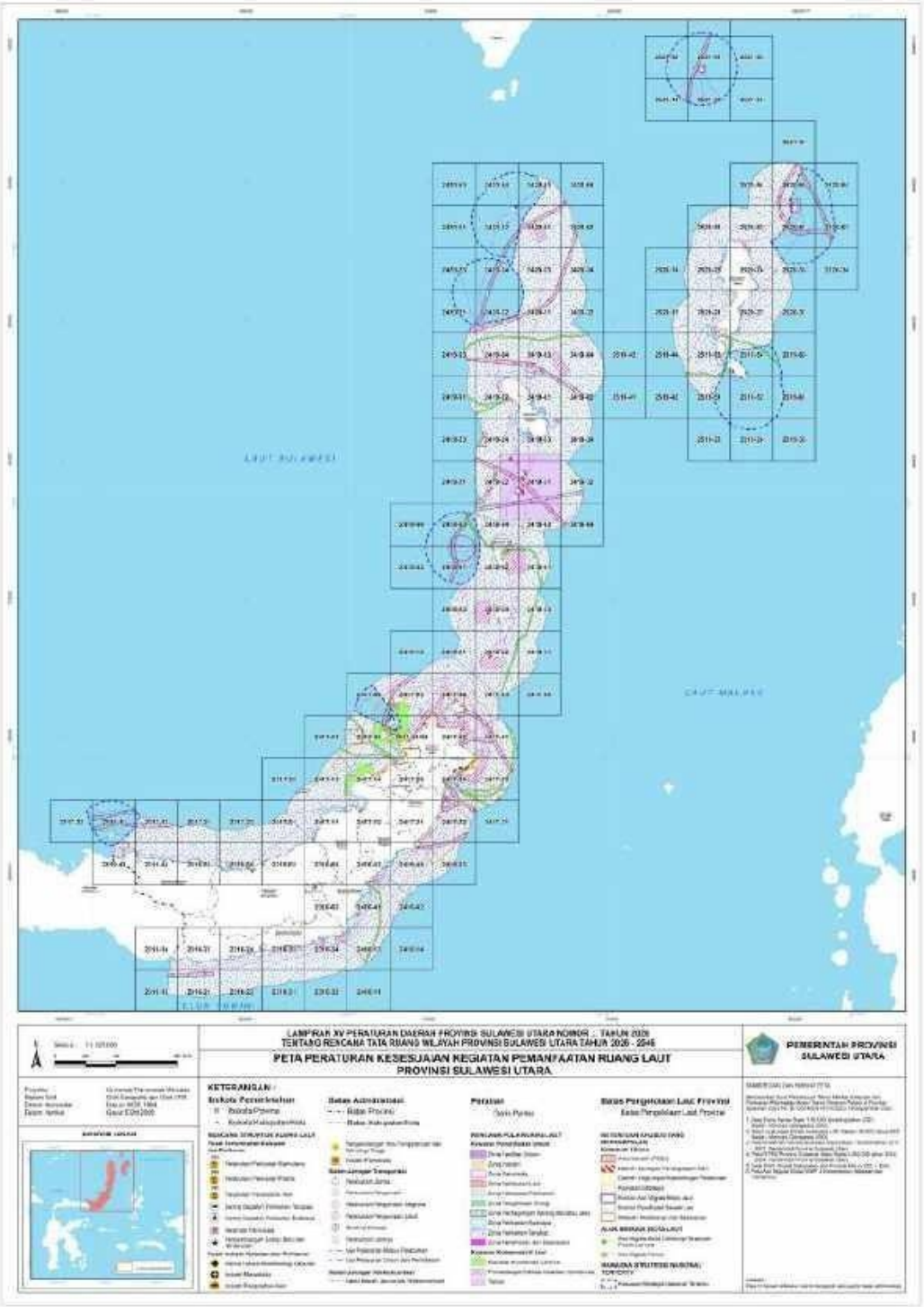

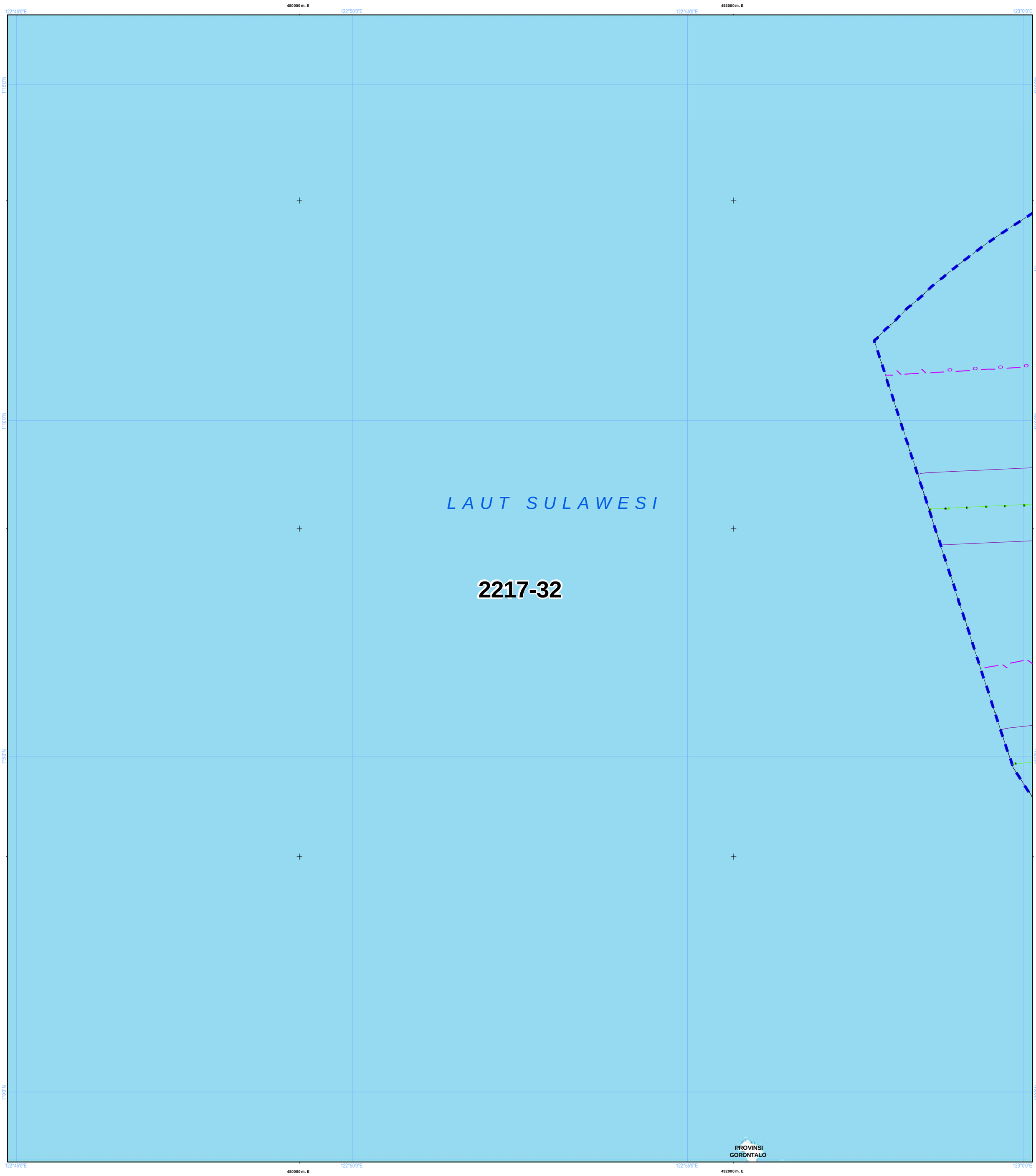

NLP : 2217-32

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

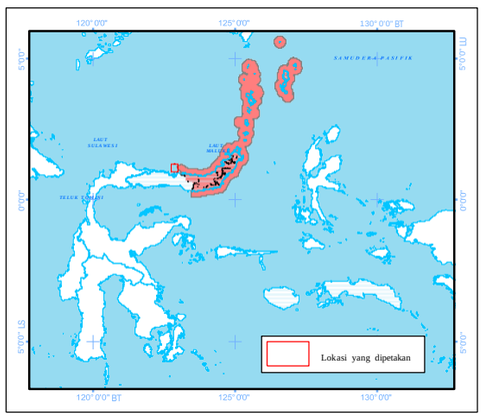

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

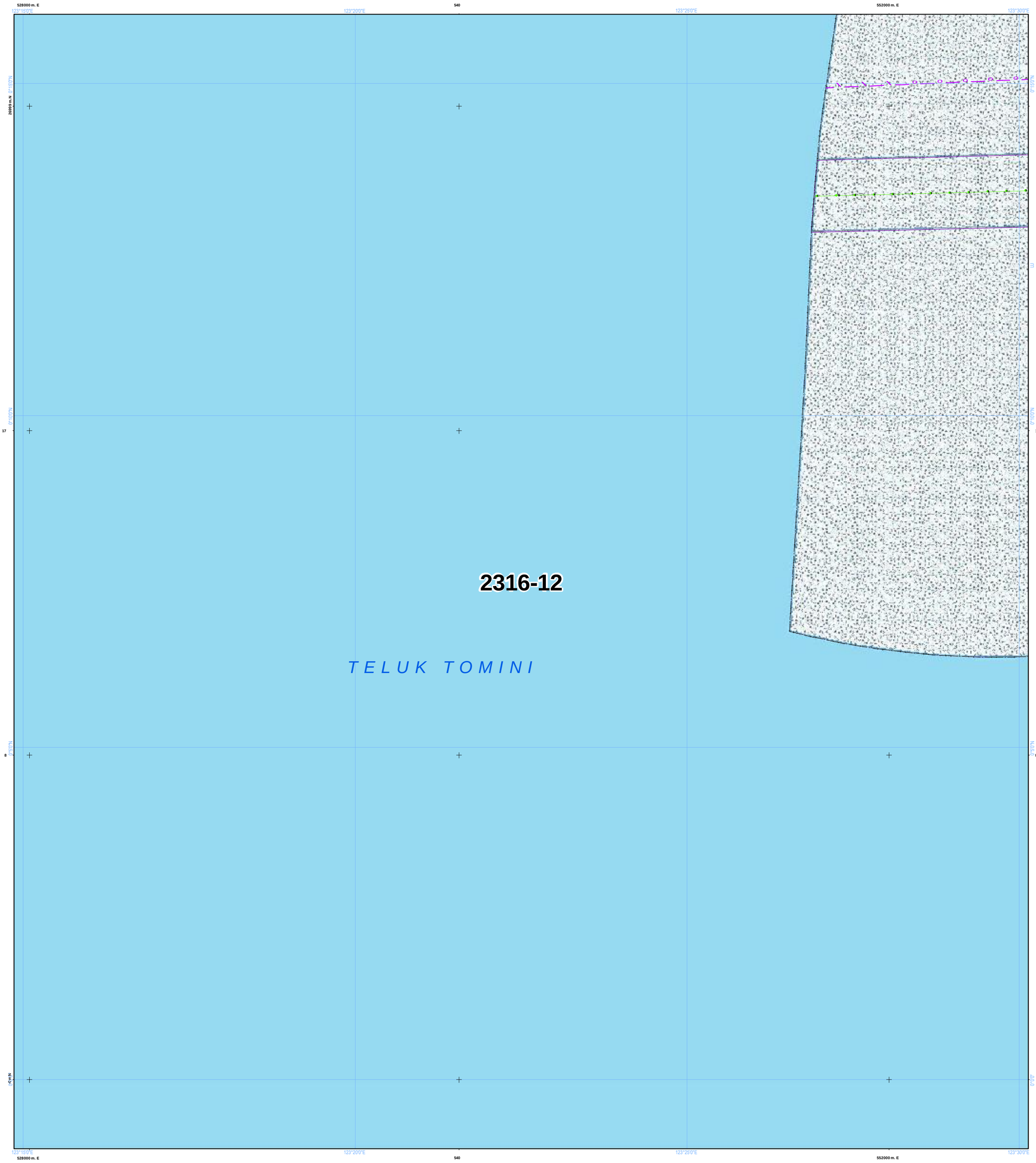

NLP : 2316-12

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

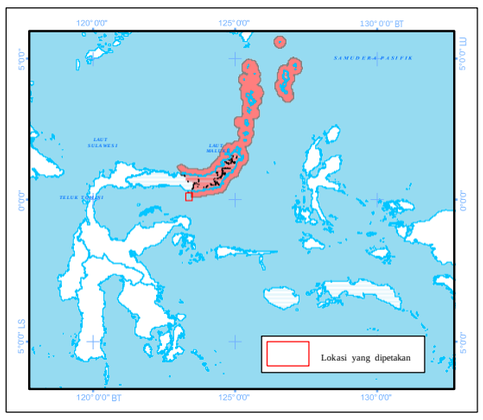

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

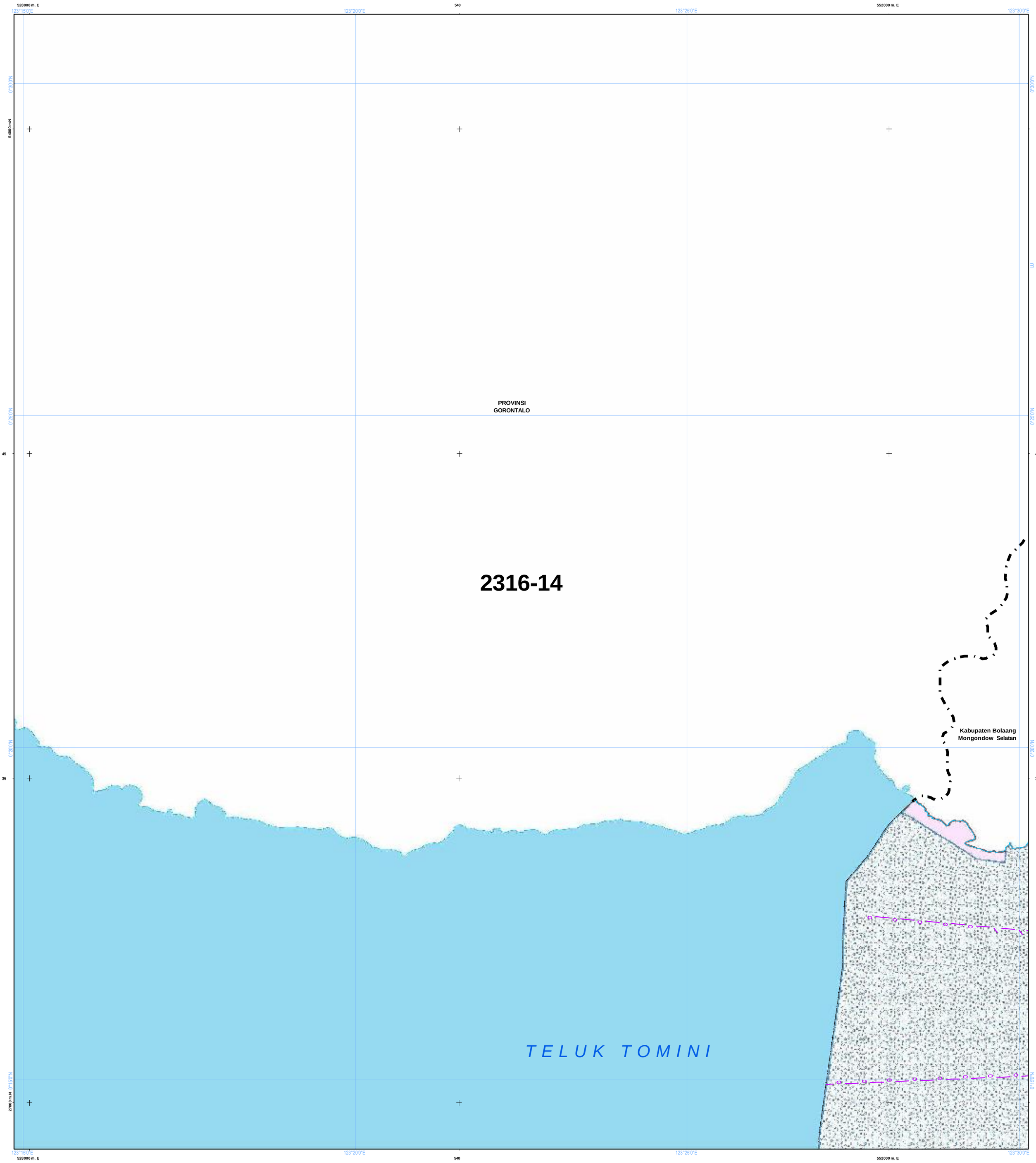

NLP : 2316-14

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

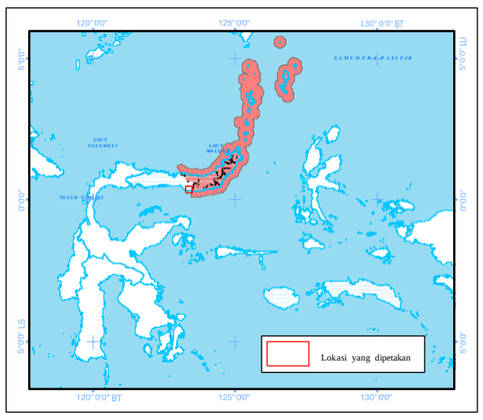

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

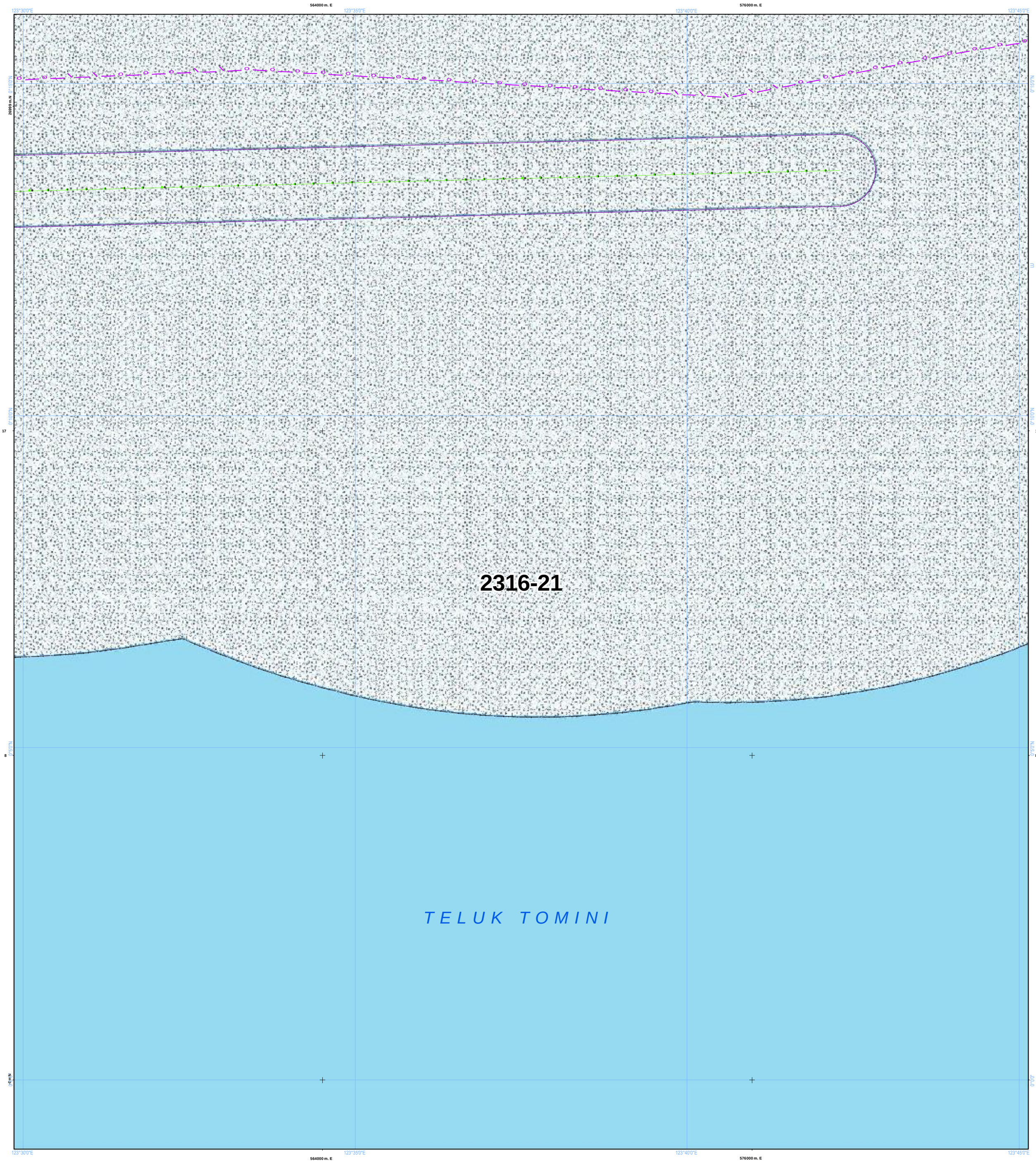

NLP : 2316-21

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

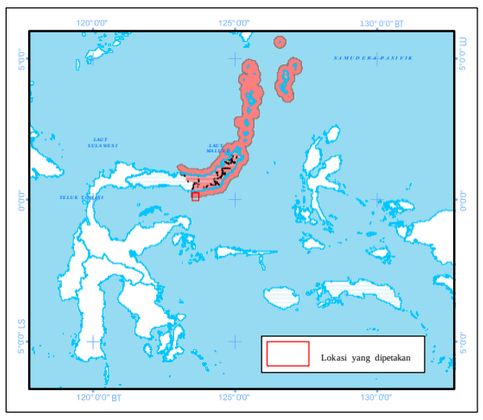

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

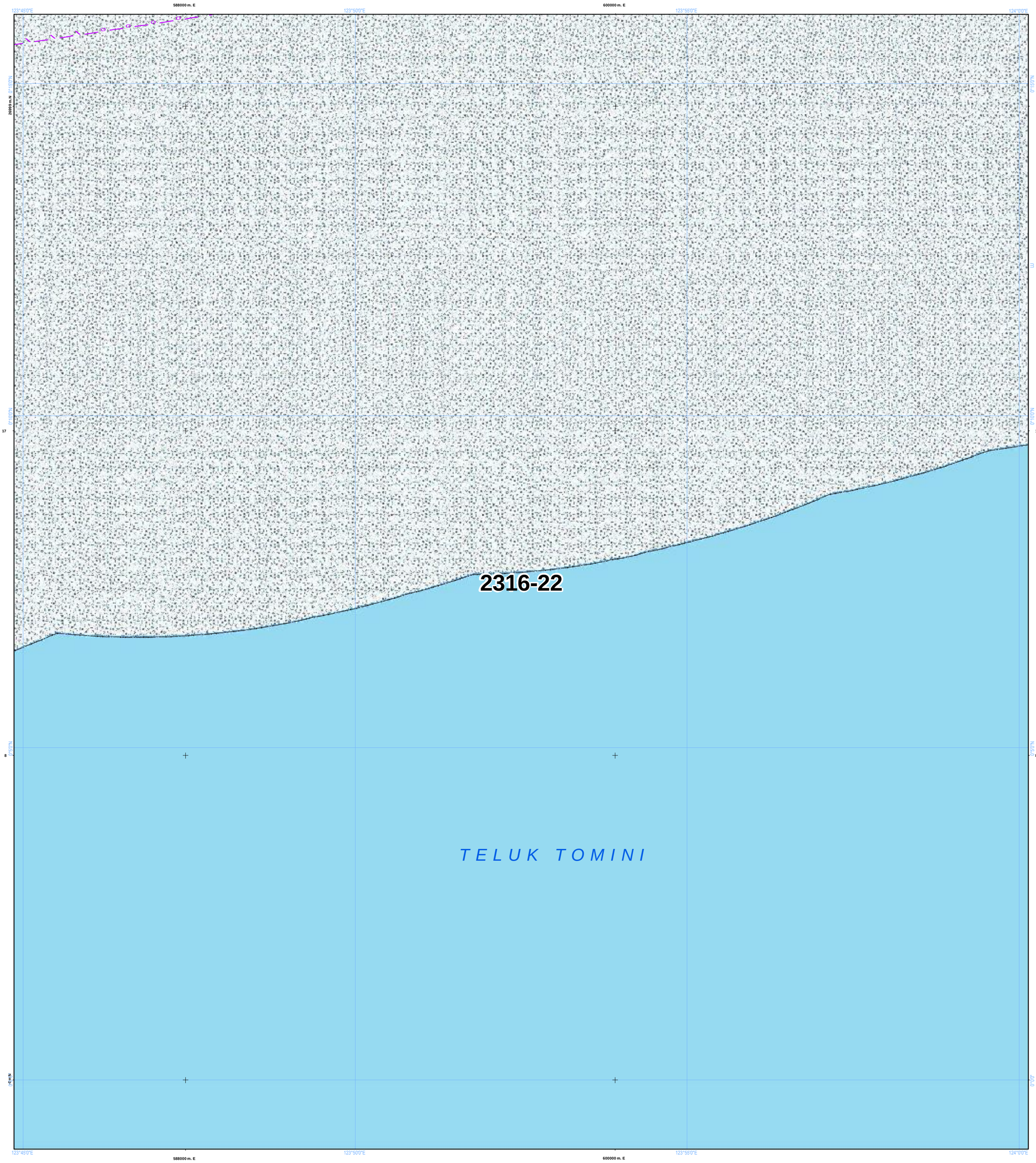

NLP : 2316-22

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

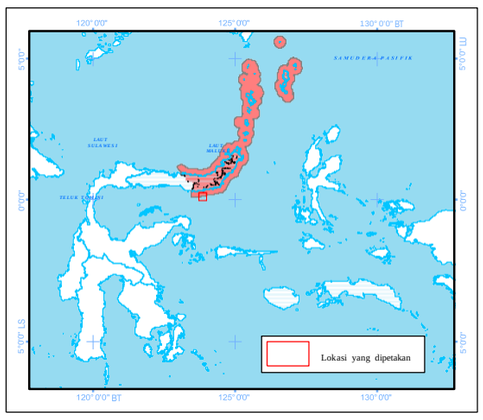

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

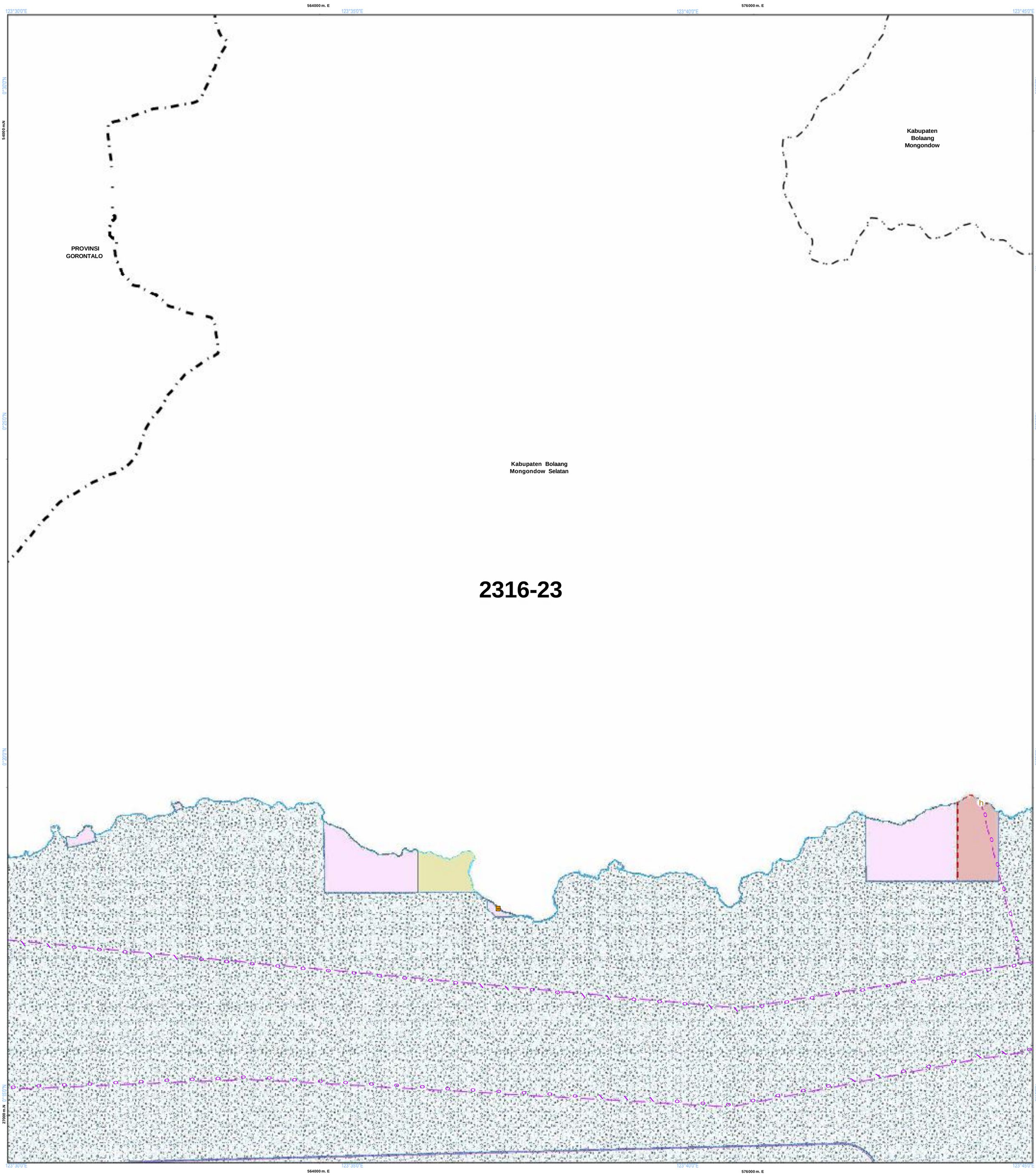

NLP : 2316-23

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

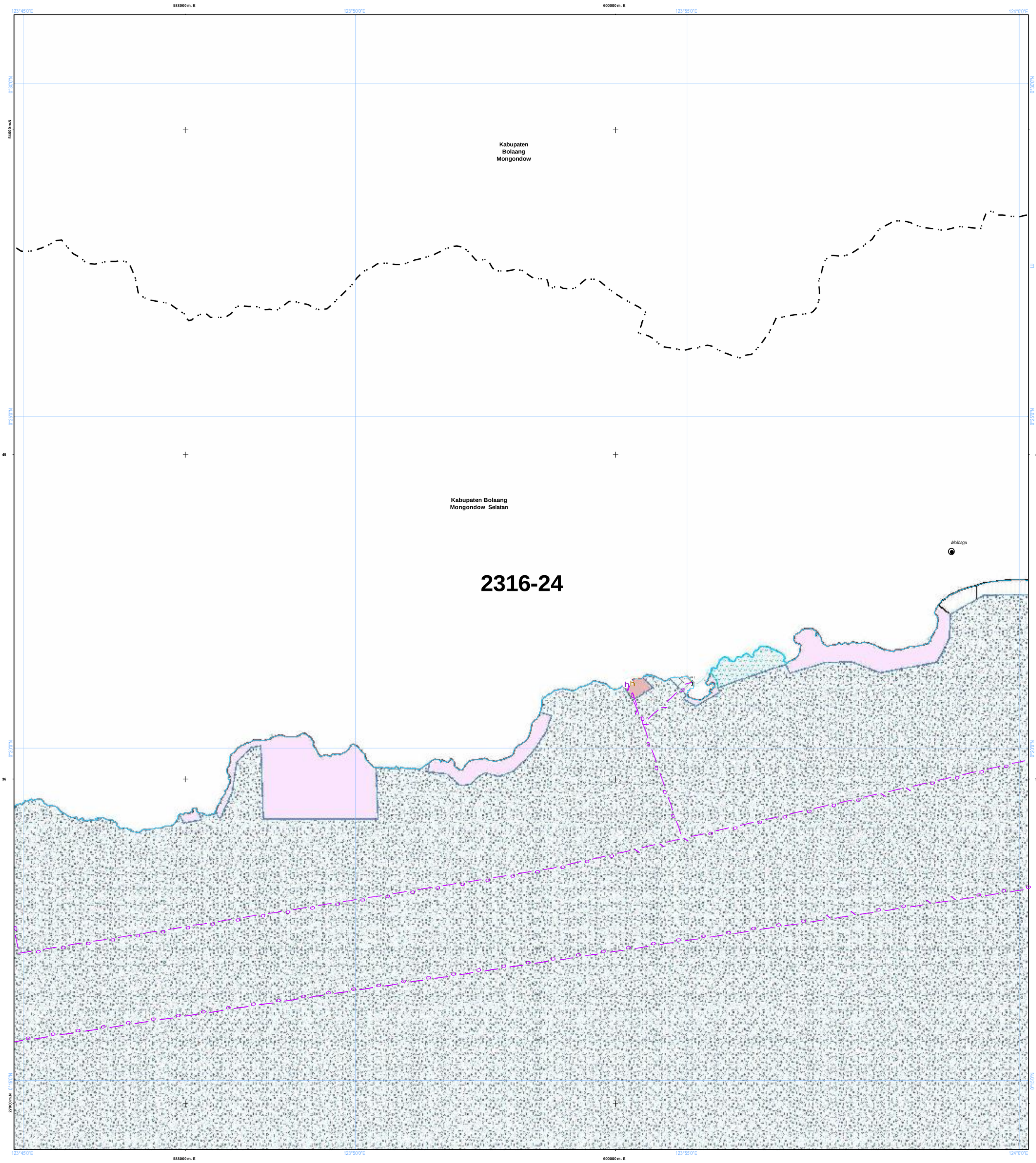

NLP : 2316-24

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

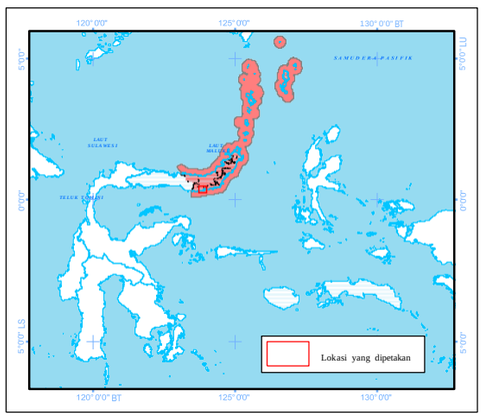

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

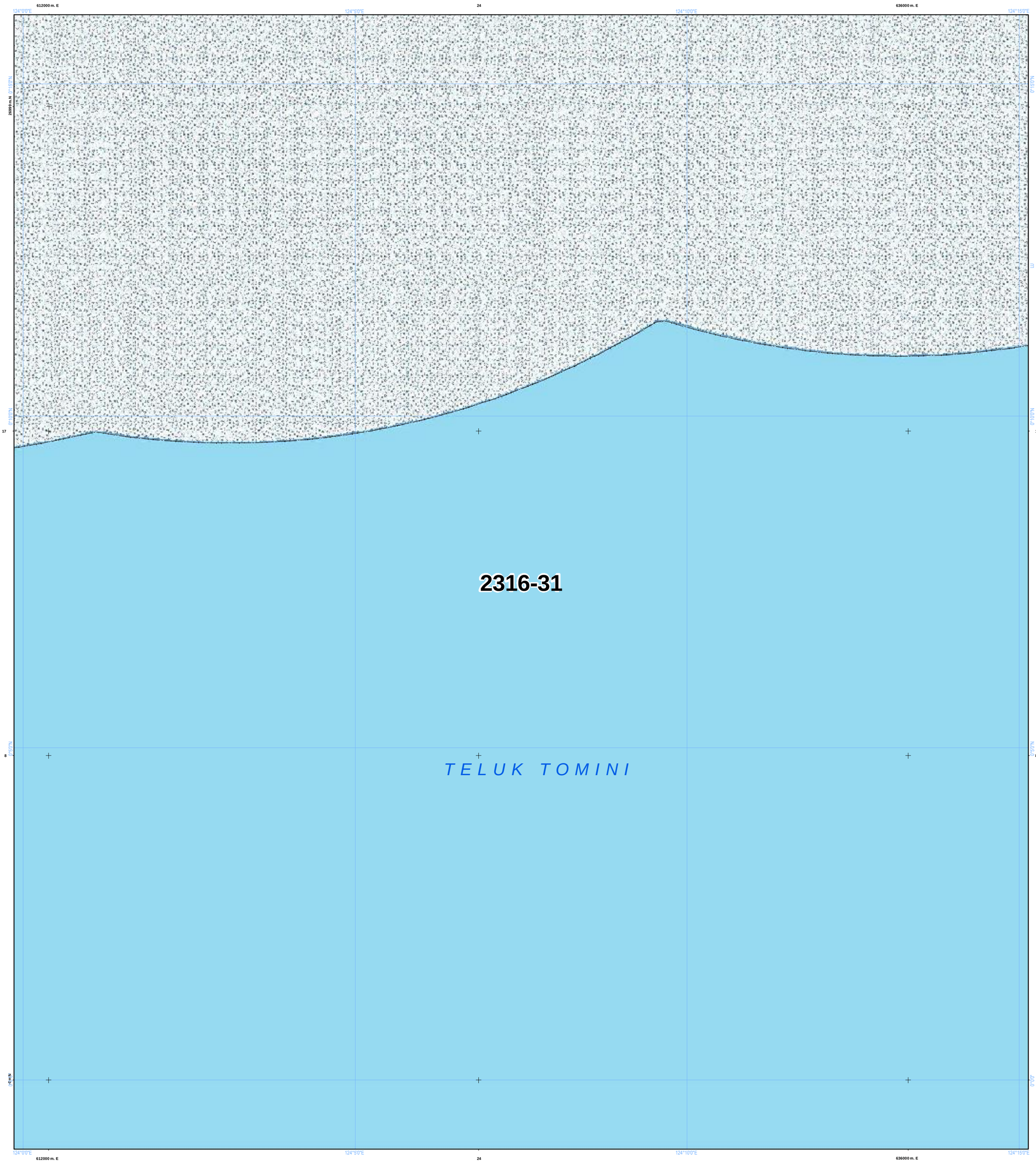

NLP : 2316-31

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

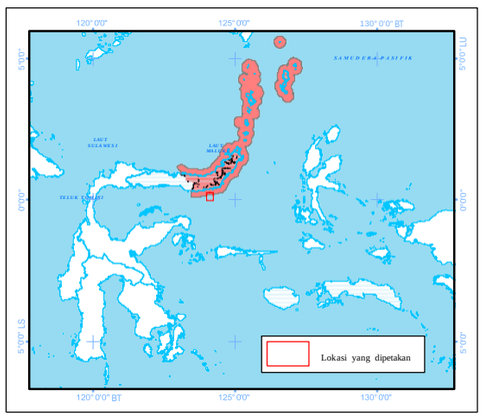

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

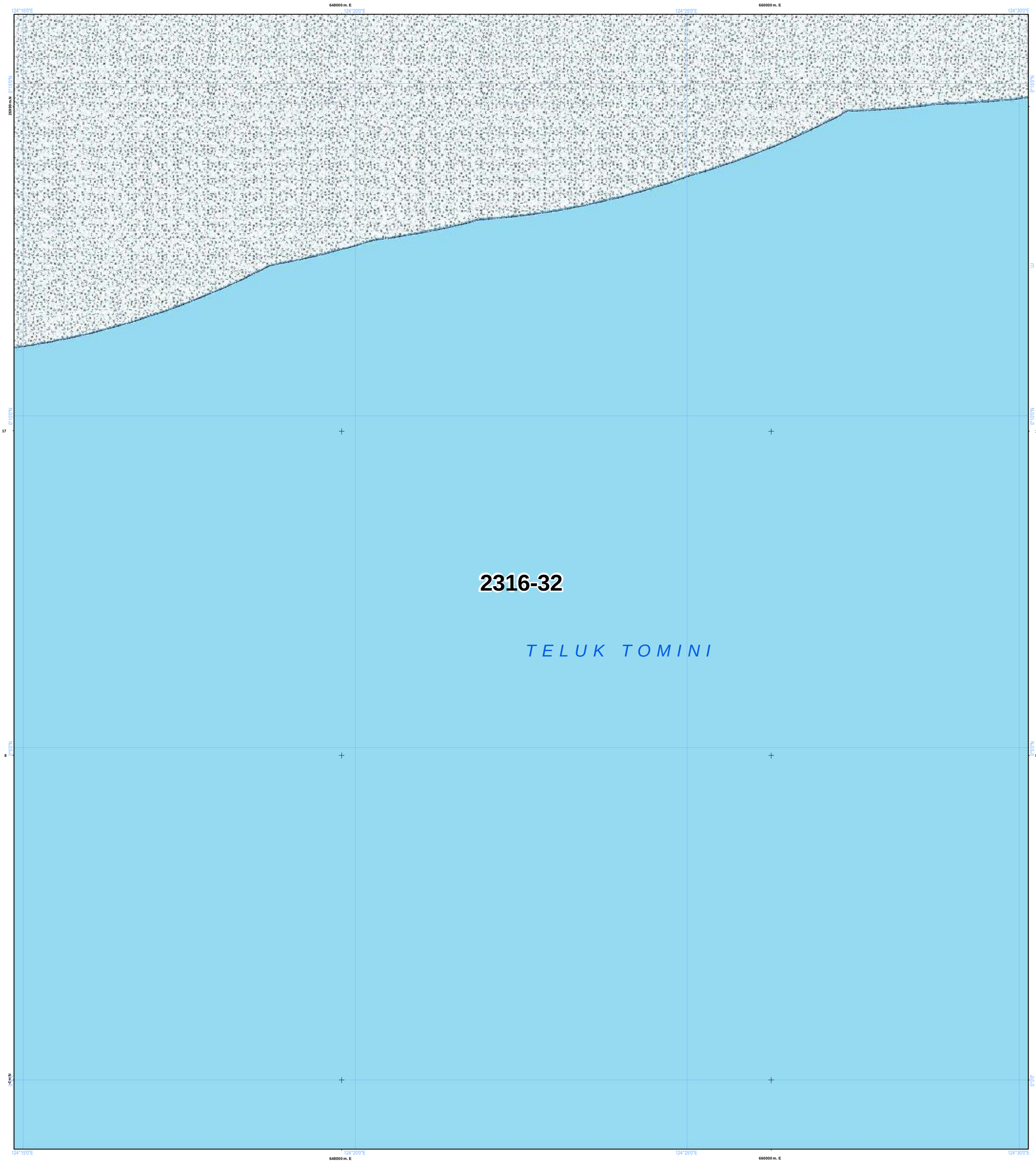

NLP : 2316-32

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

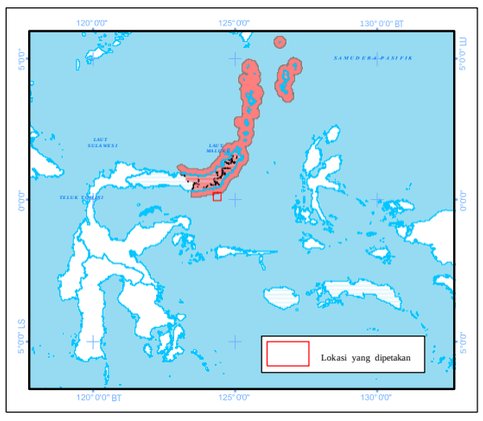

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

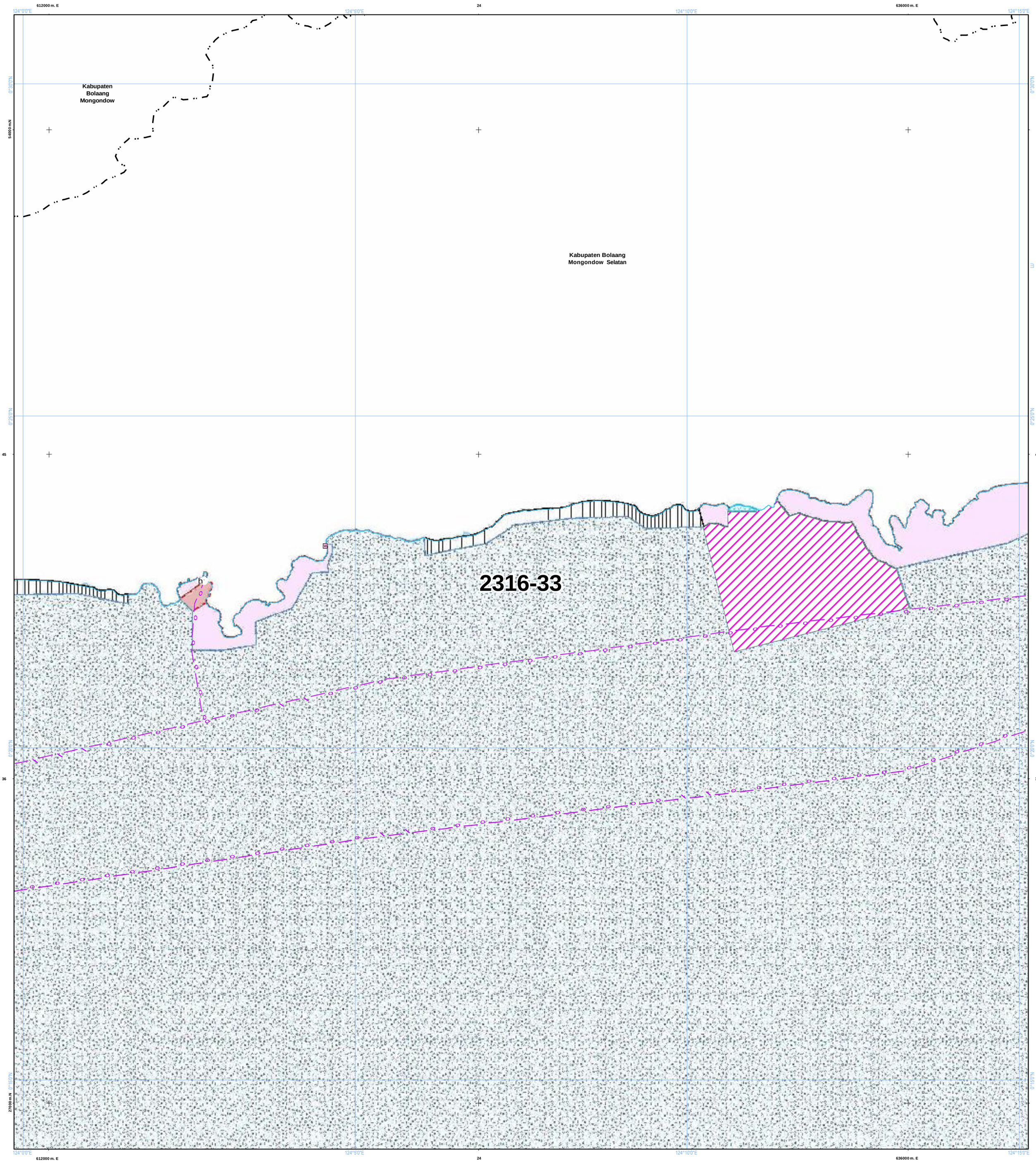

NLP : 2316-33

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

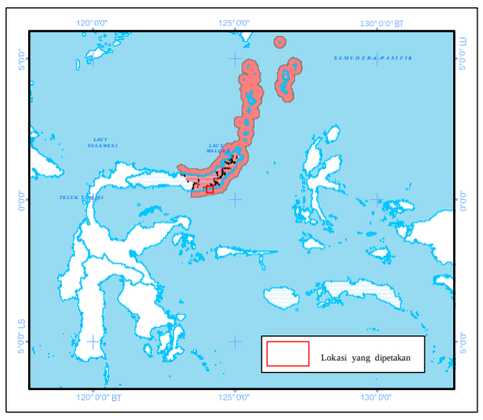

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

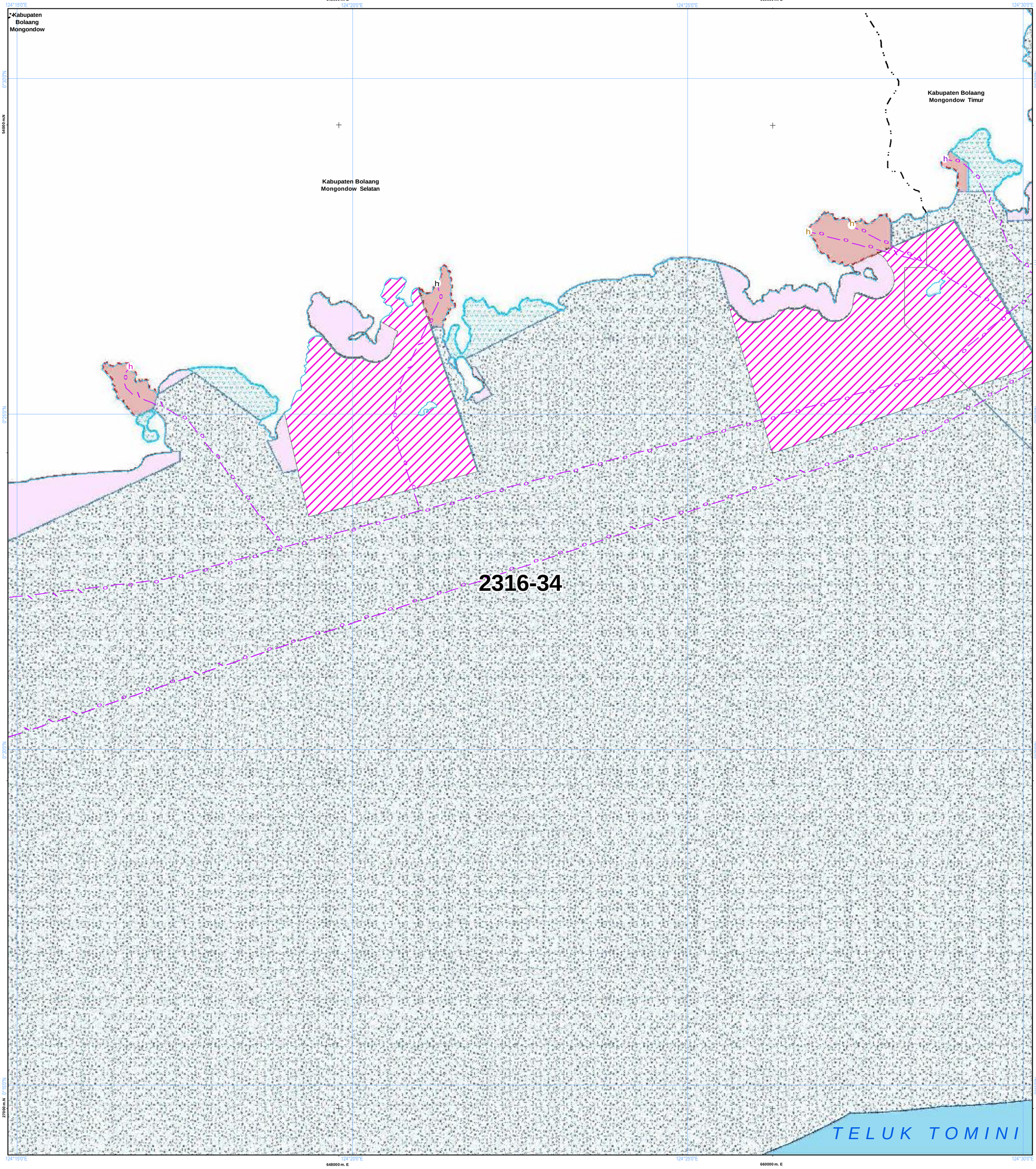

NLP : 2316-34

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

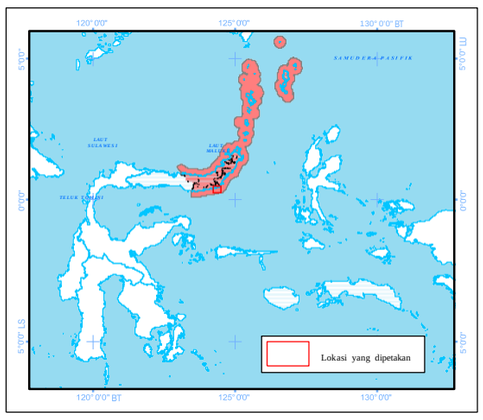

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

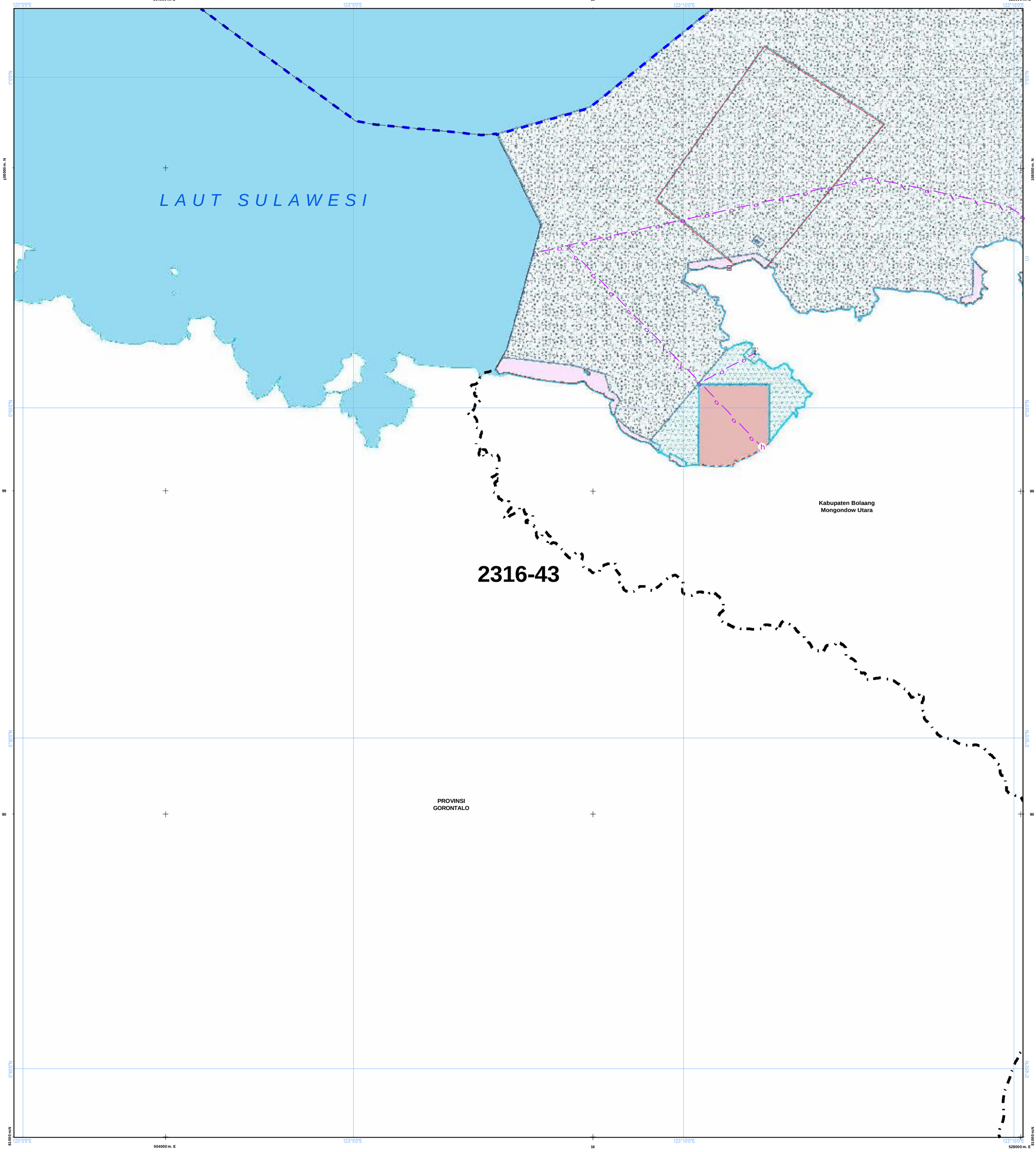

NLP : 2316-43

U SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

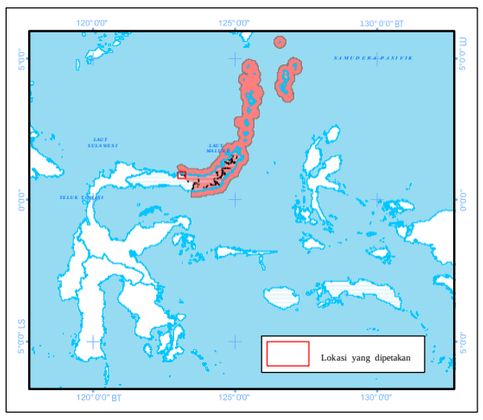

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

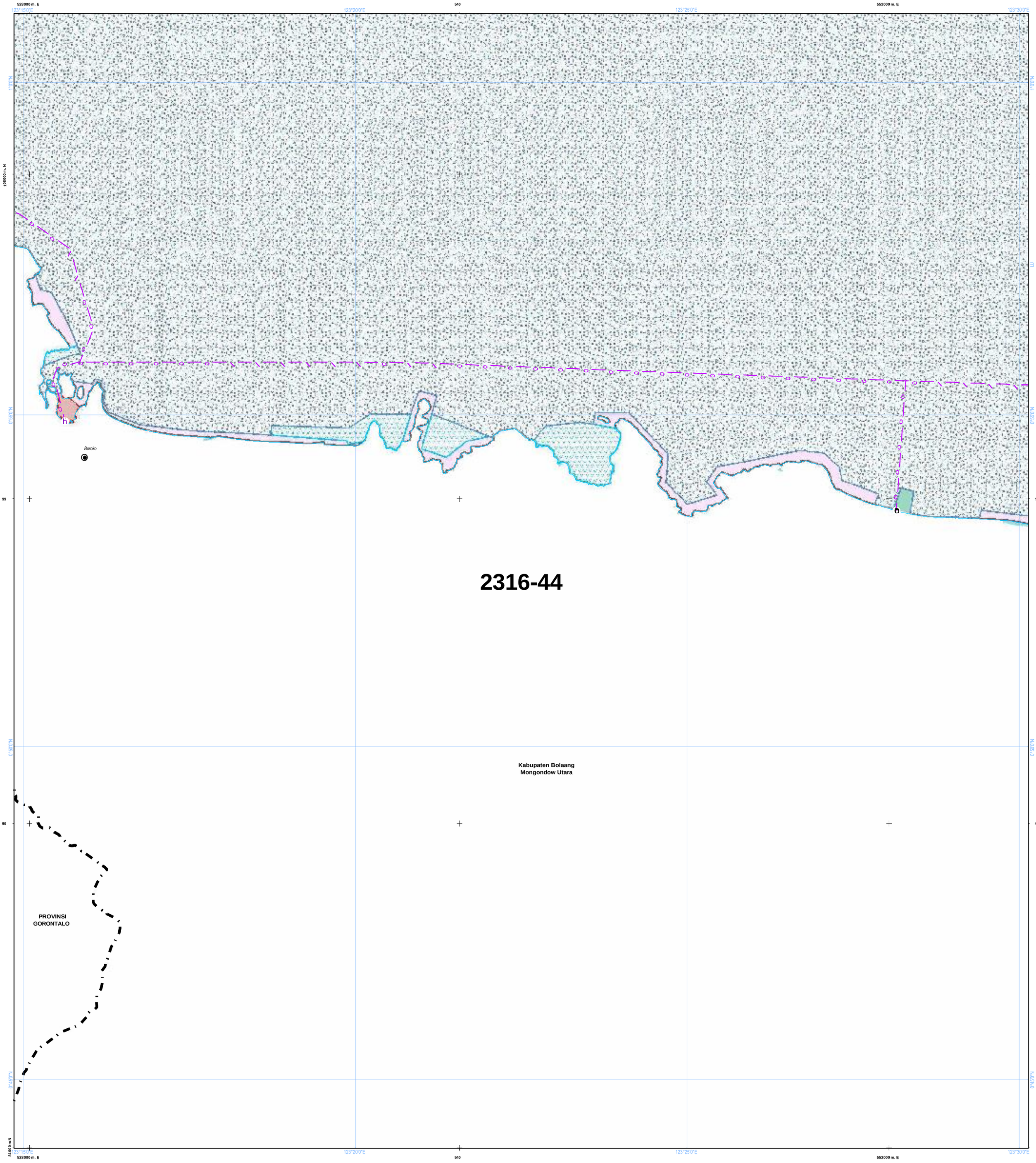

NLP : 2316-44

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

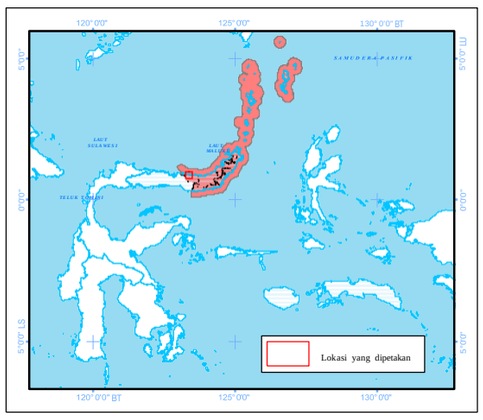

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

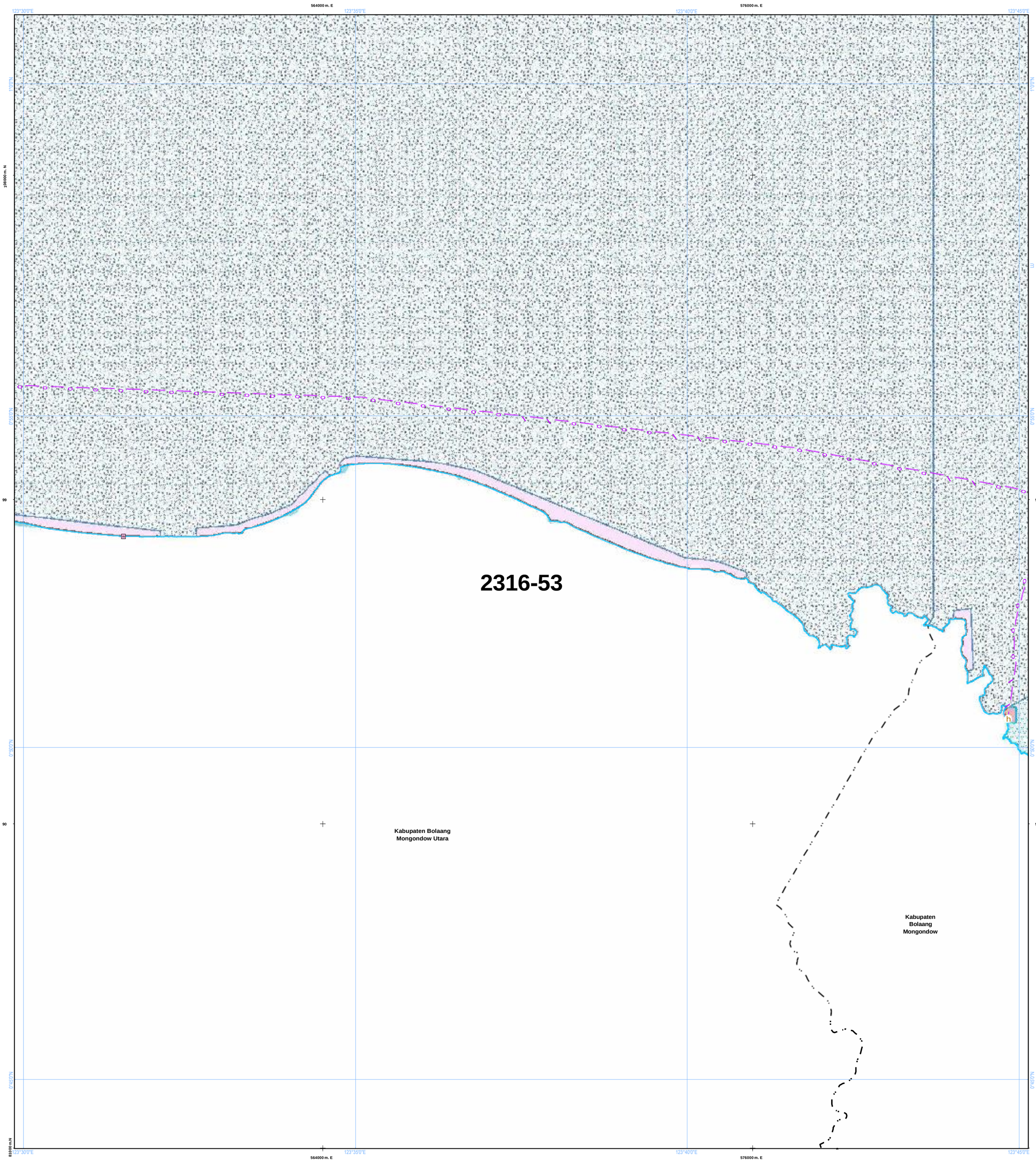

NLP : 2316-53

U SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

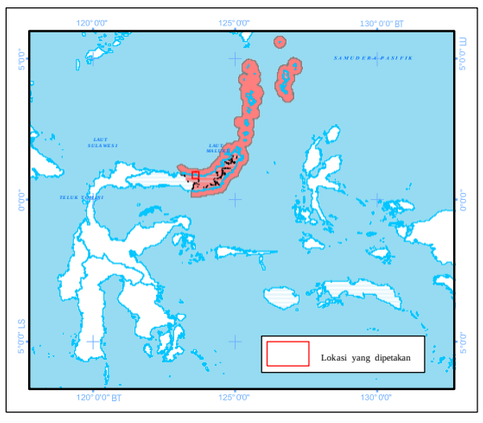

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

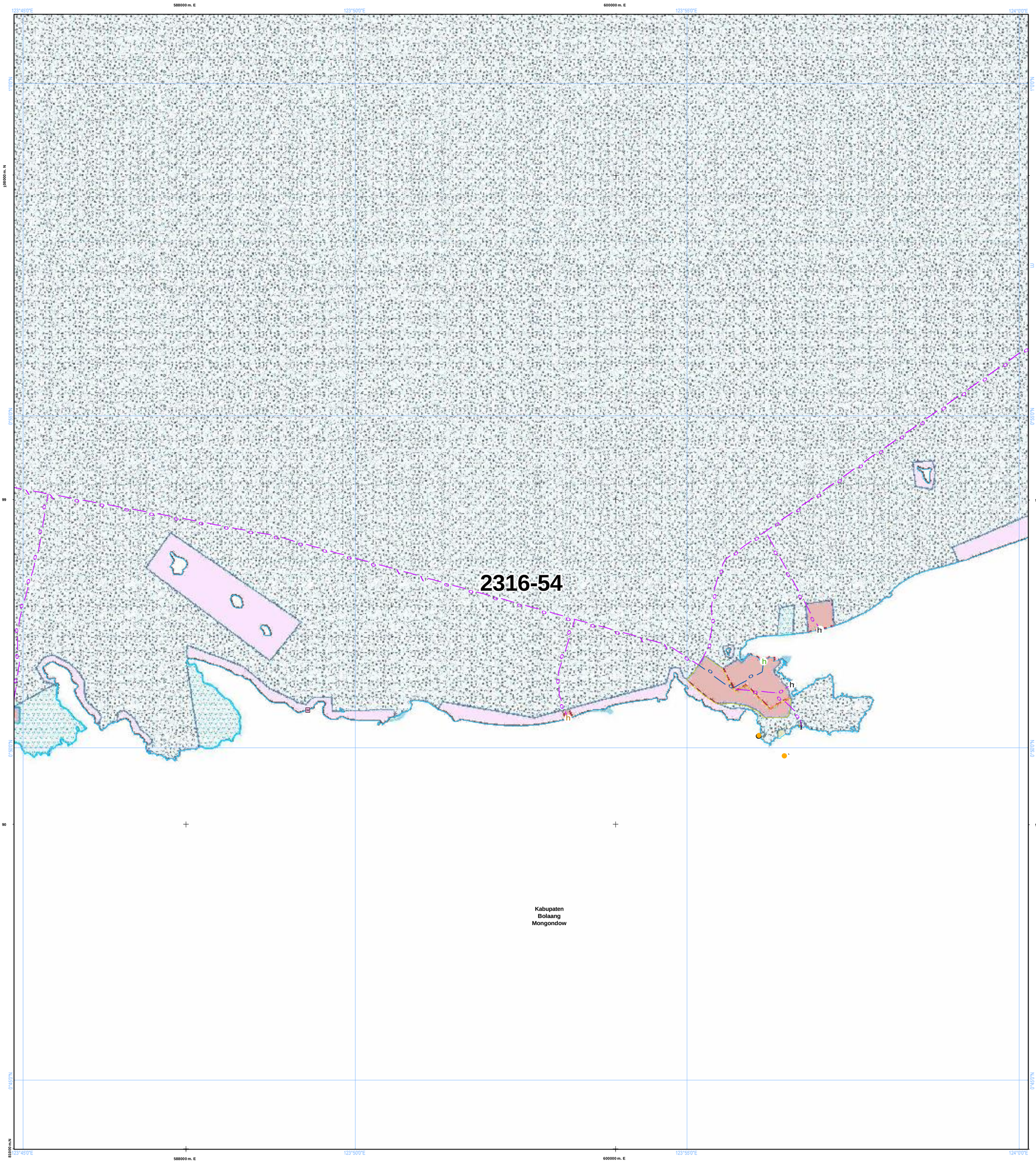

NLP : 2316-54

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

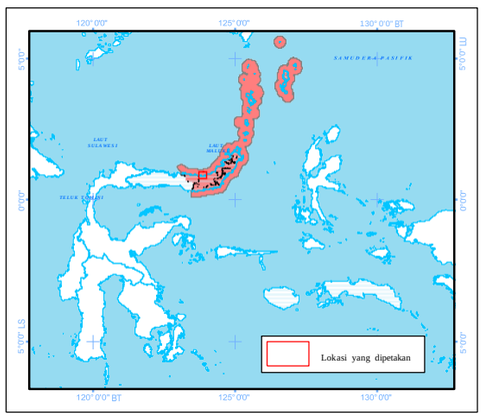

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

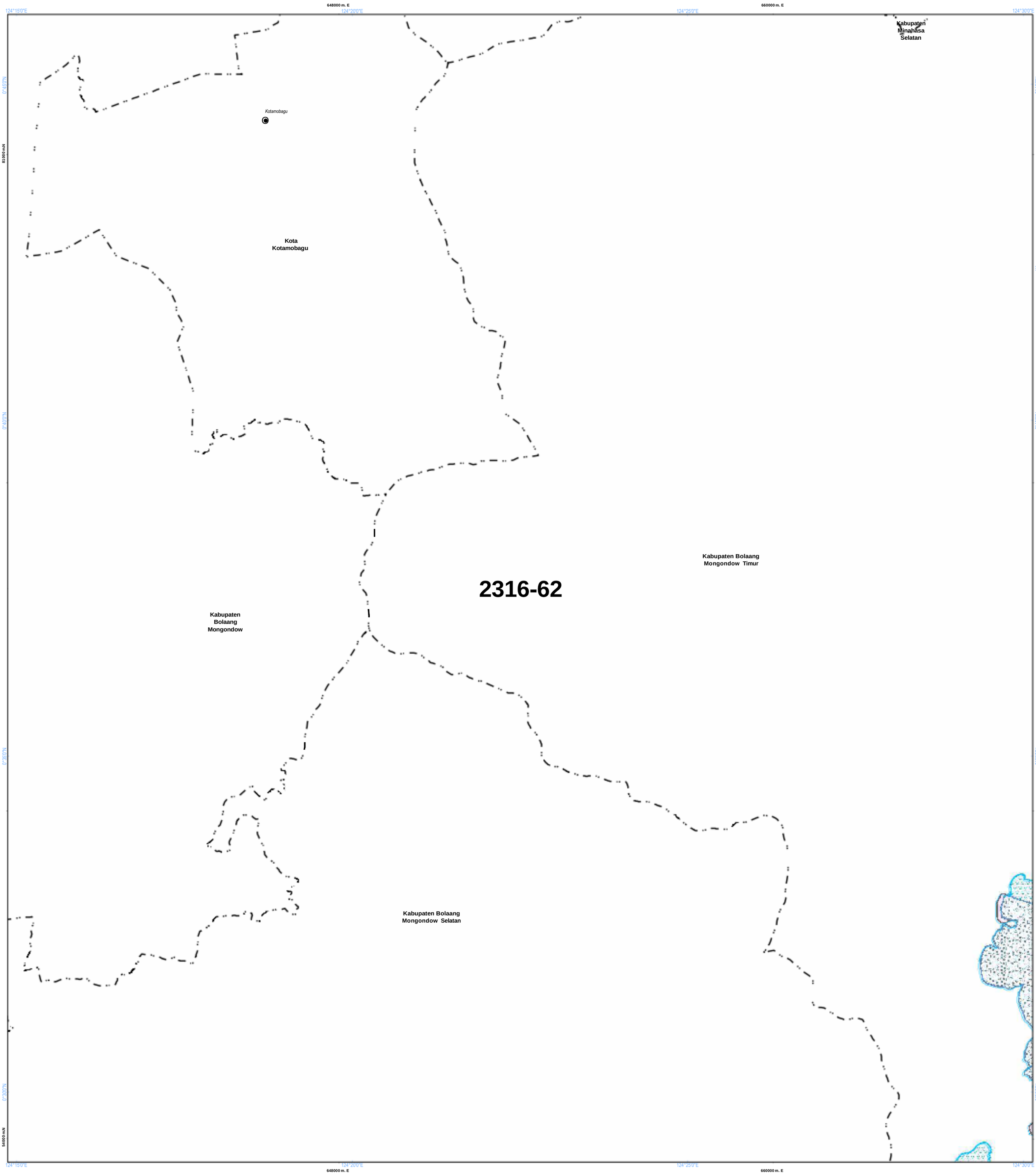

NLP : 2316-62

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

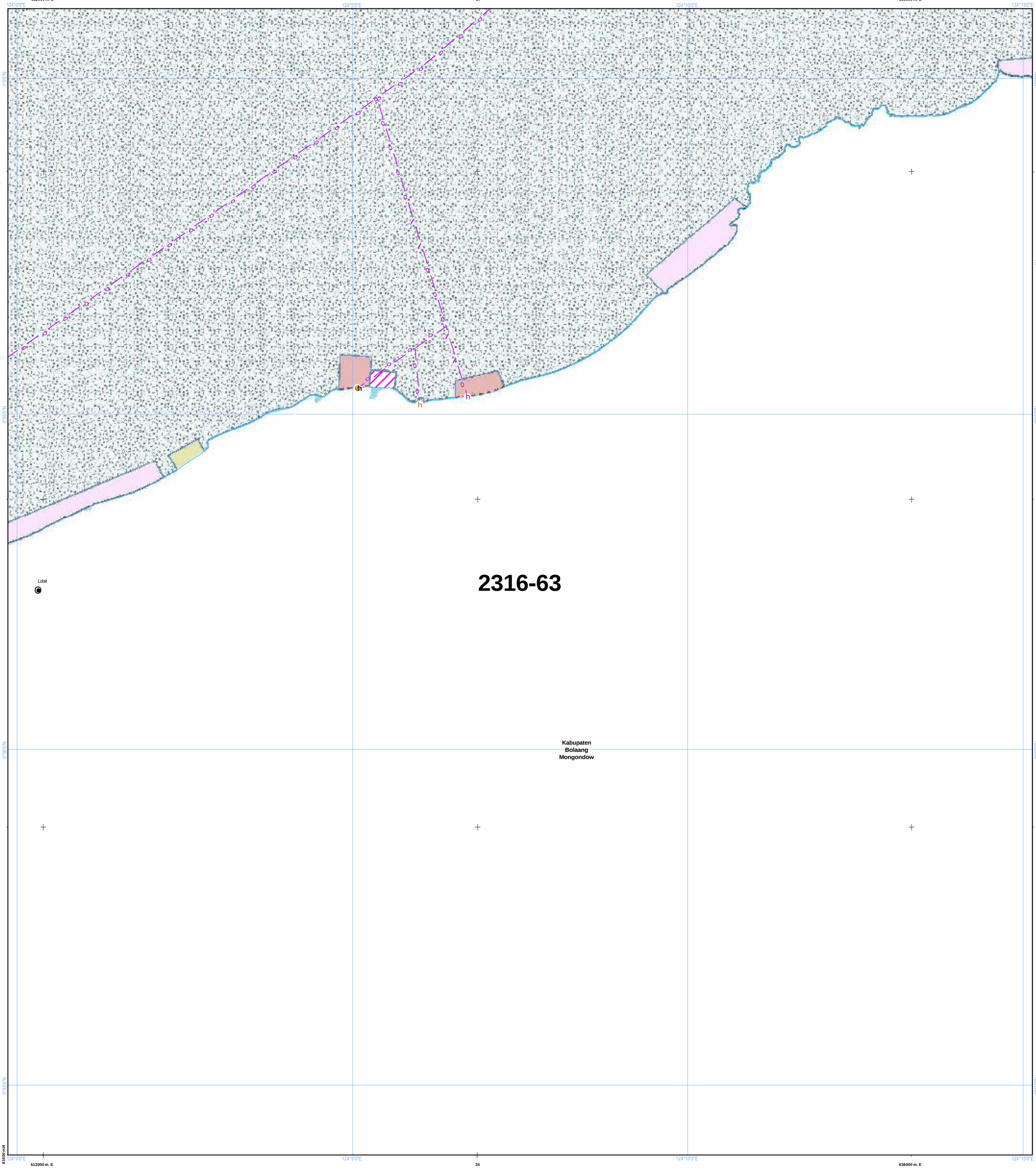

NLP : 2316-63

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

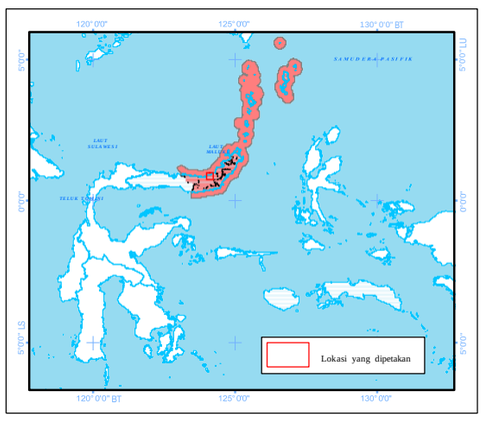

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

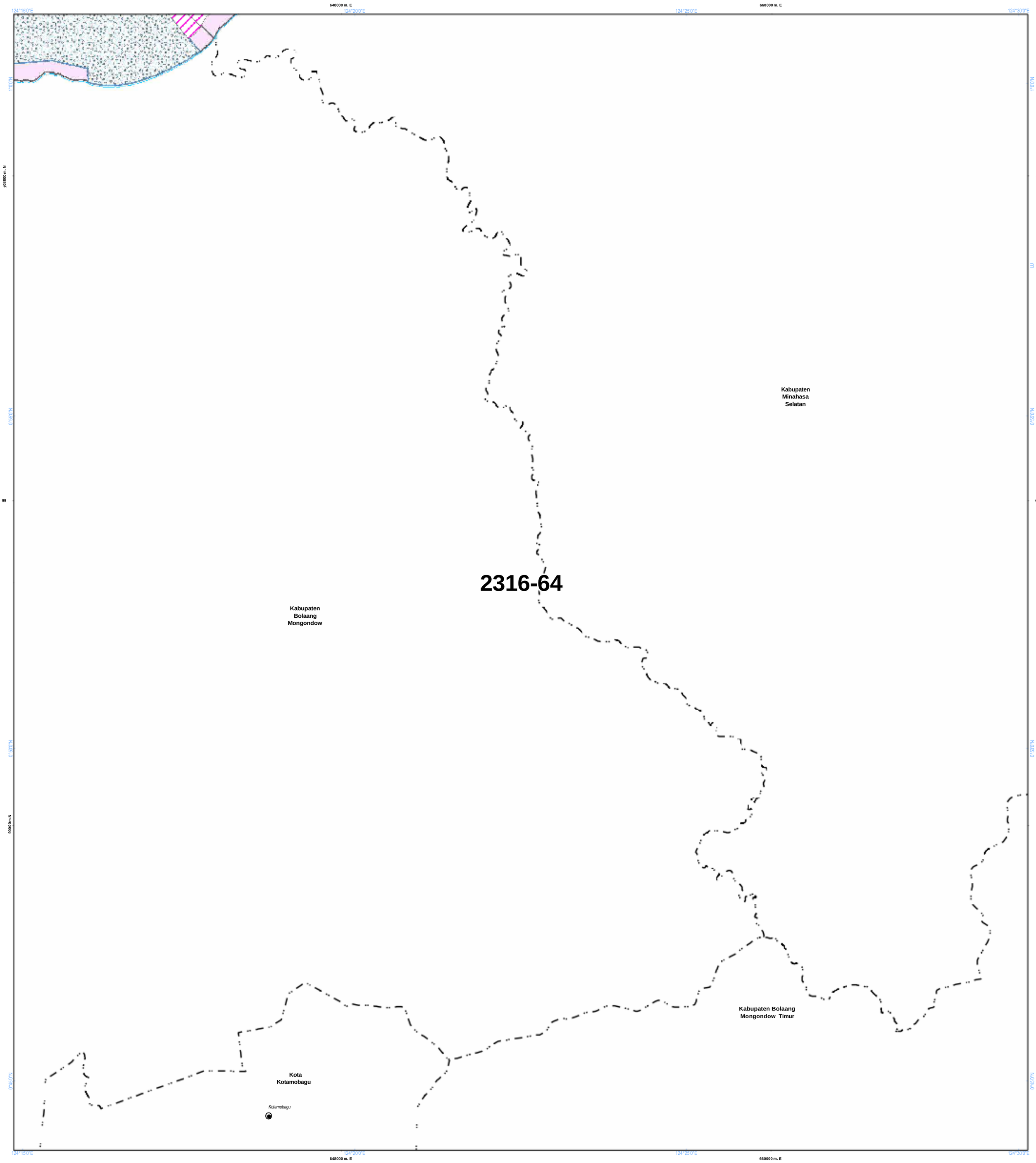

NLP : 2316-64

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

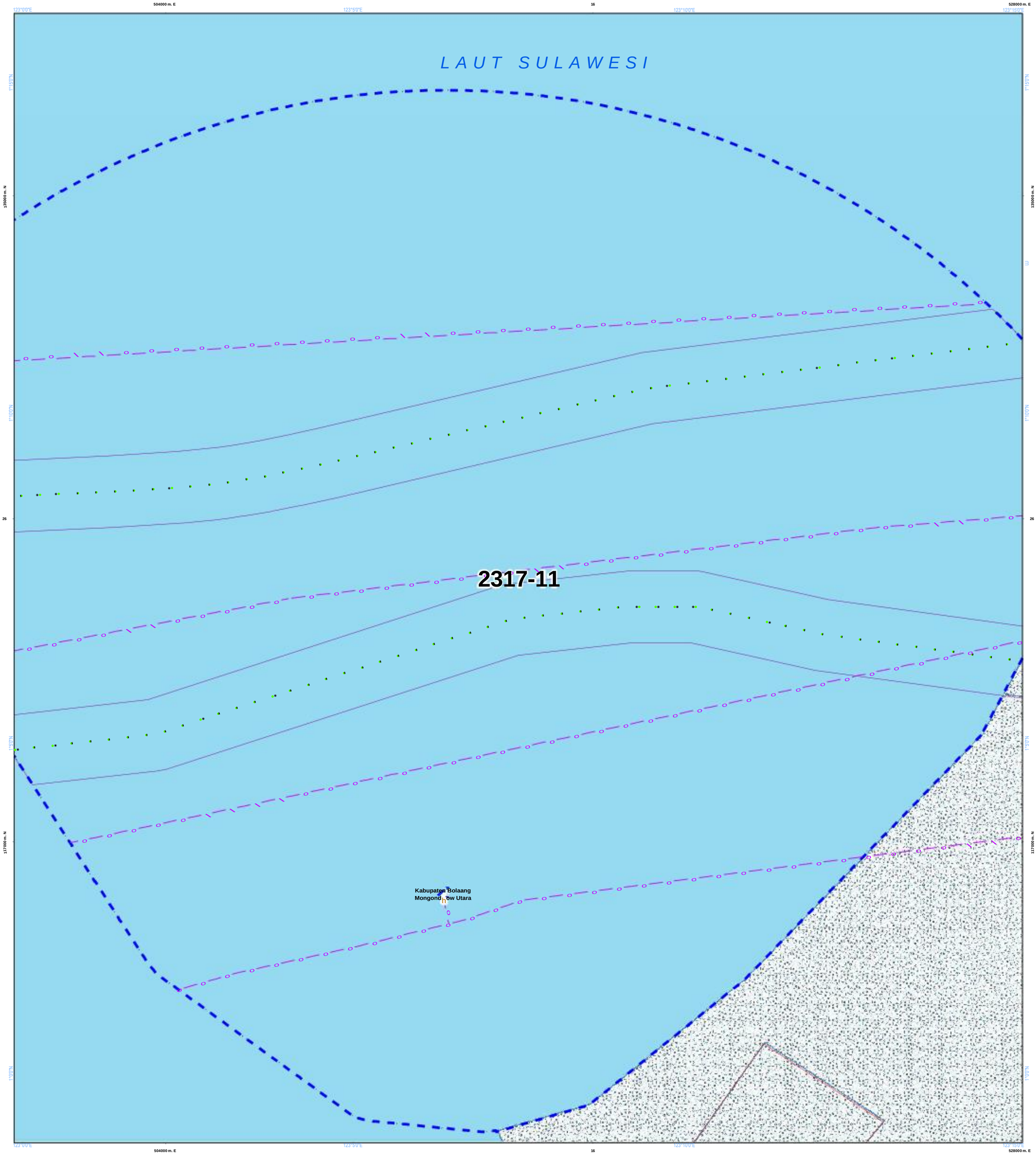

NLP : 2317-11

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

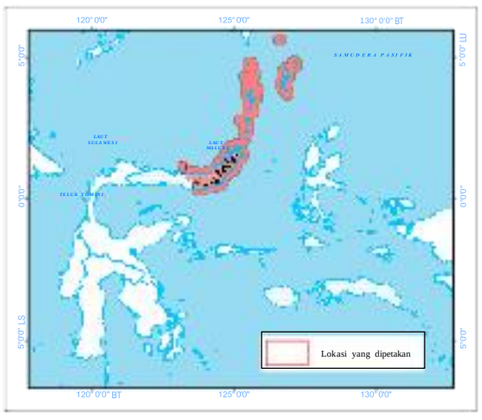

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

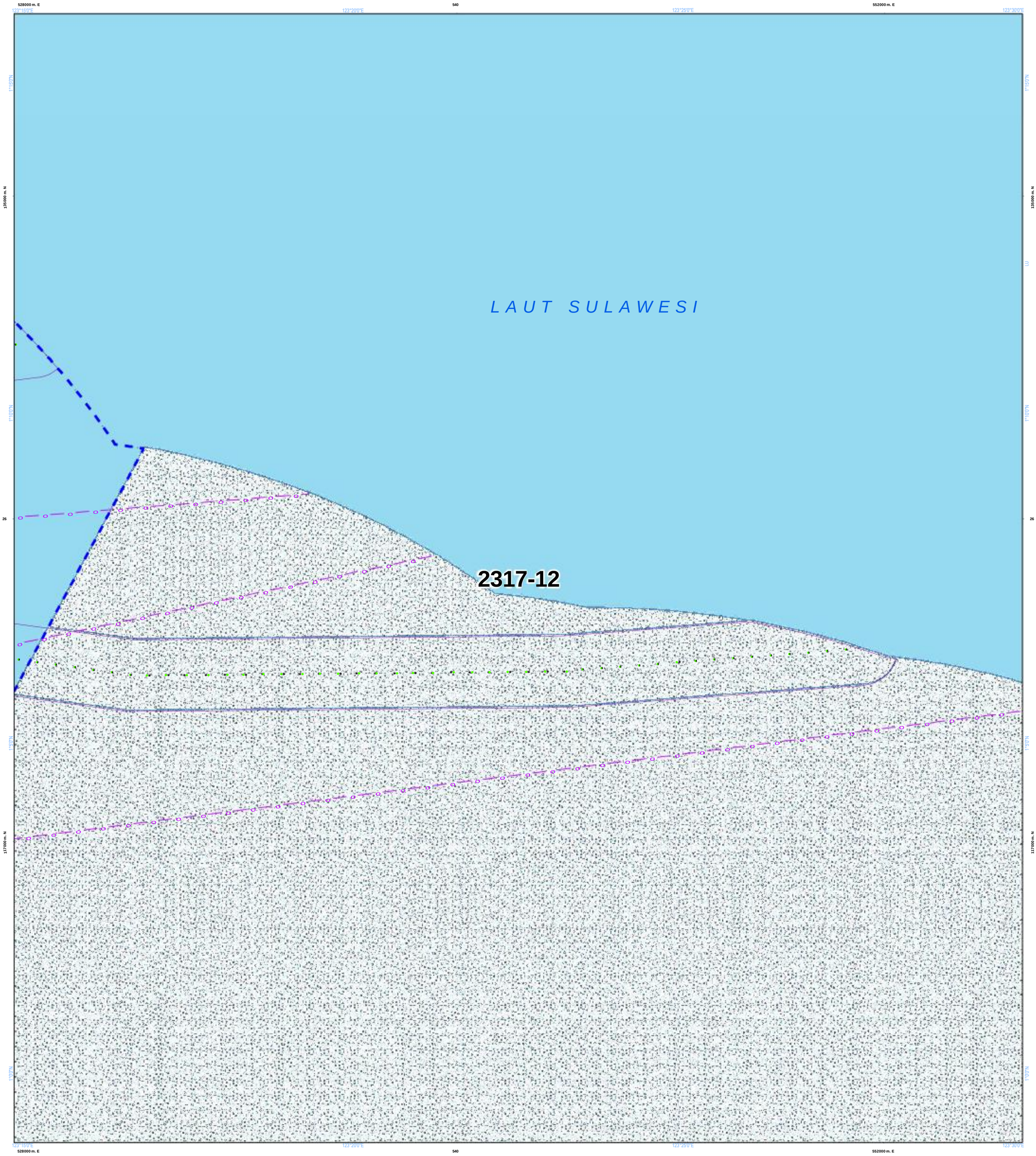

NLP : 2317-12

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

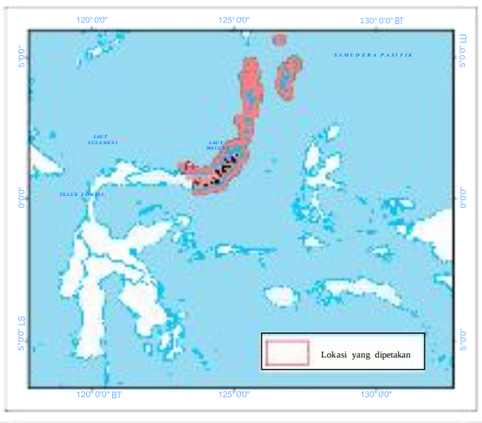

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

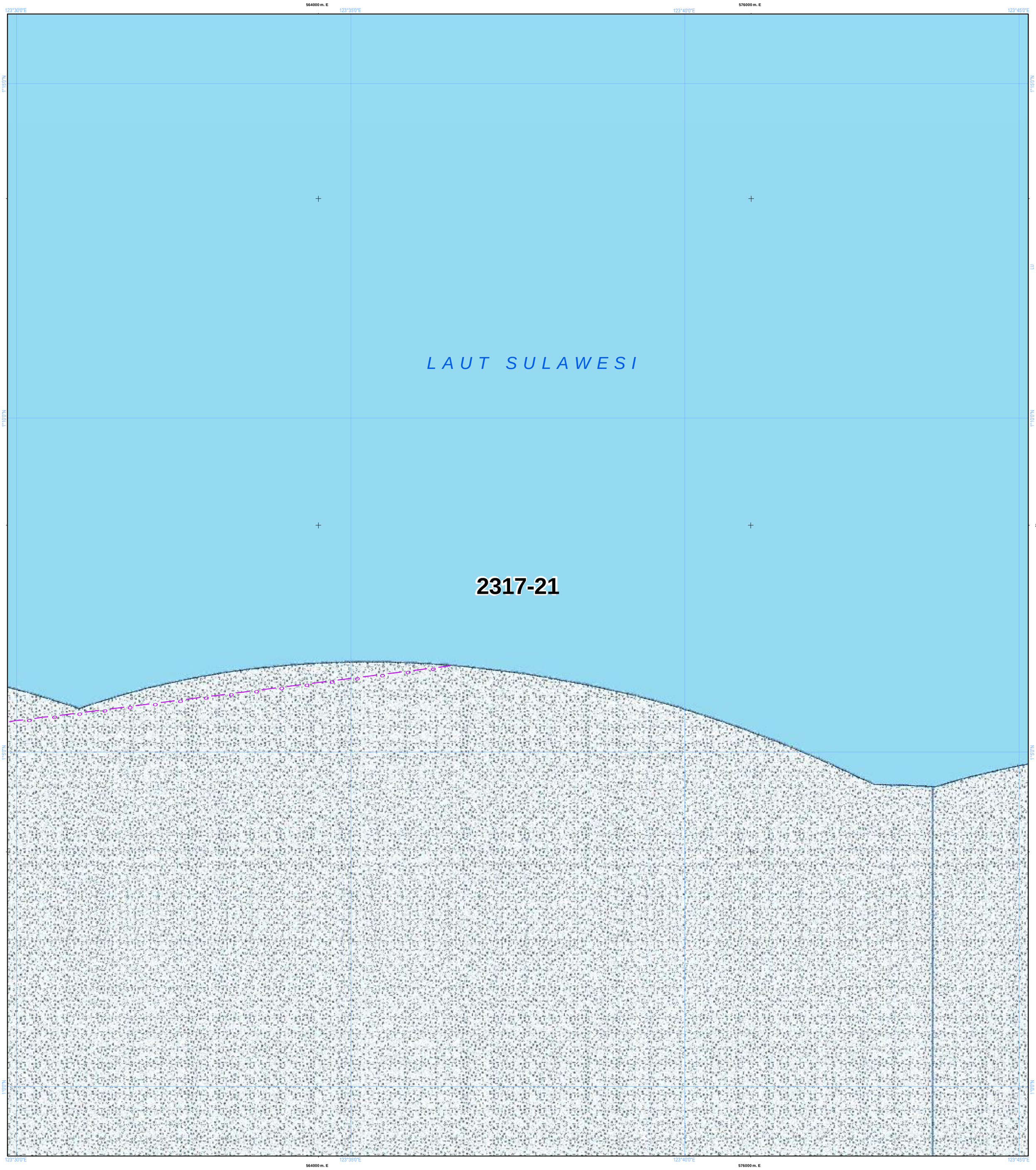

NLP : 2317-21

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

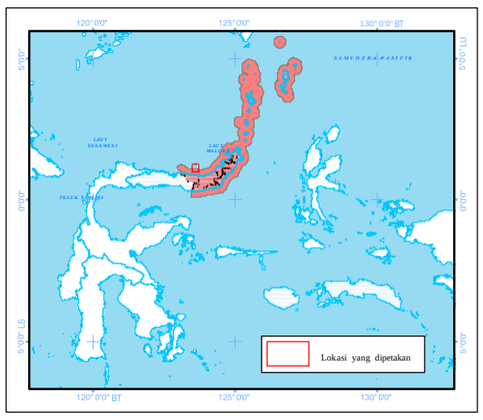

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

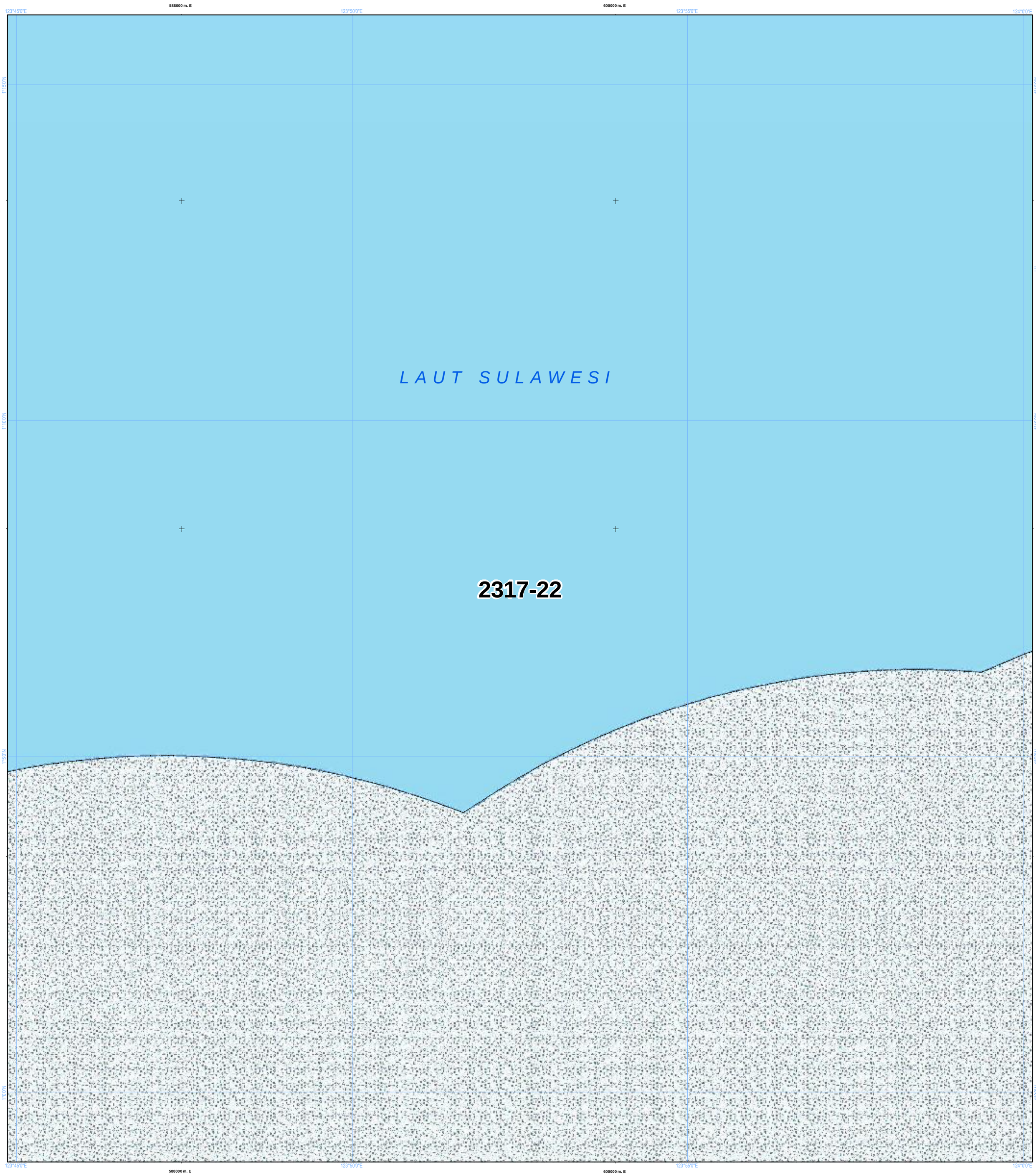

NLP : 2317-22

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

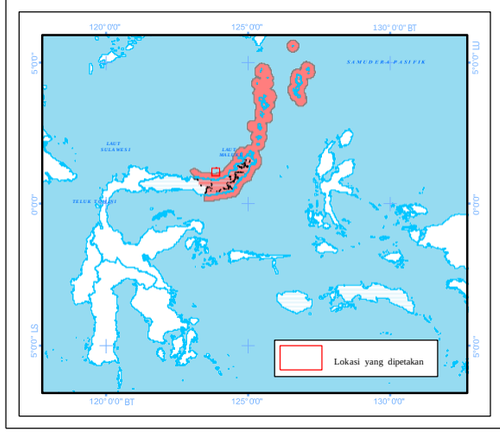

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

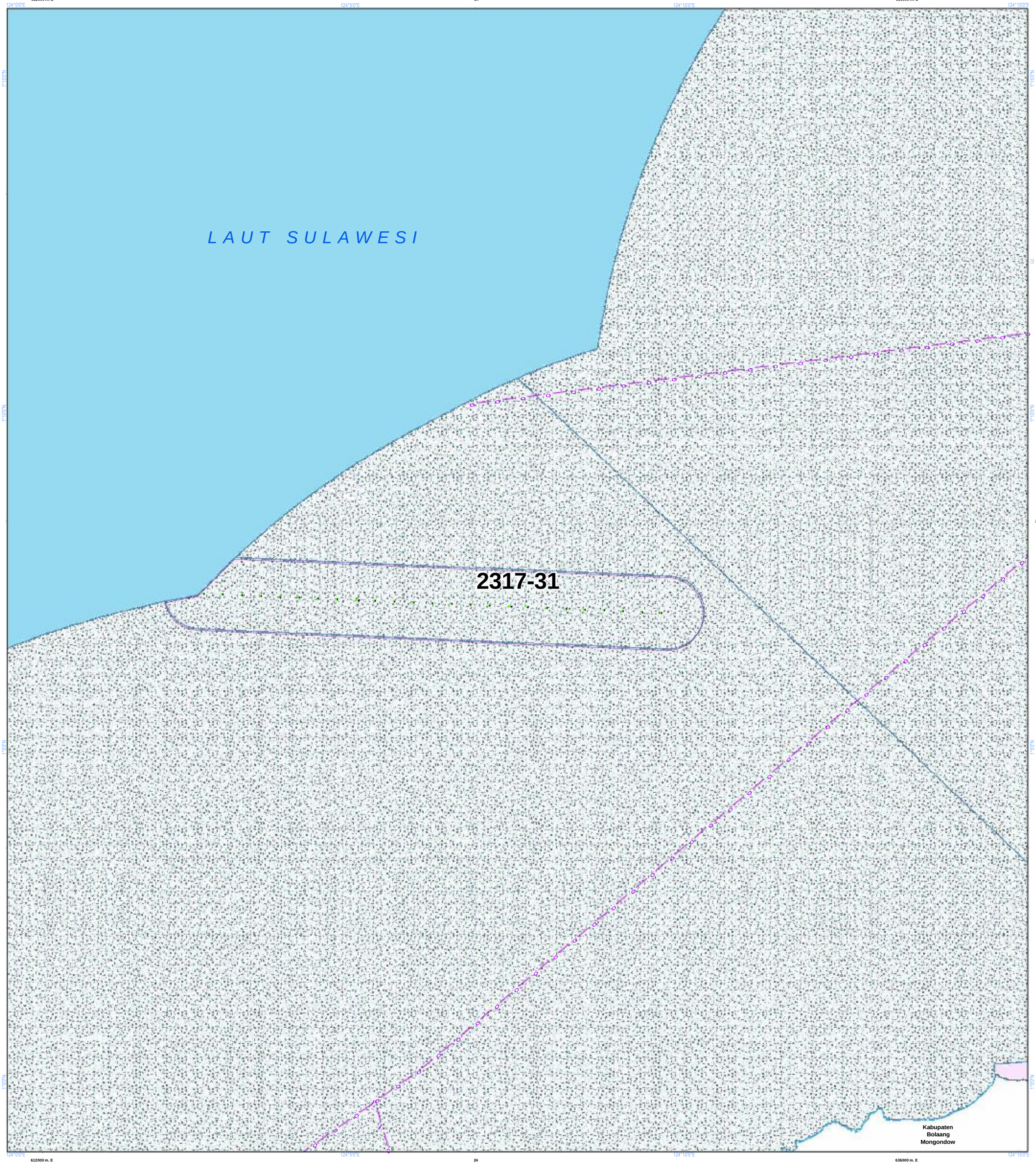

NLP : 2317-31

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

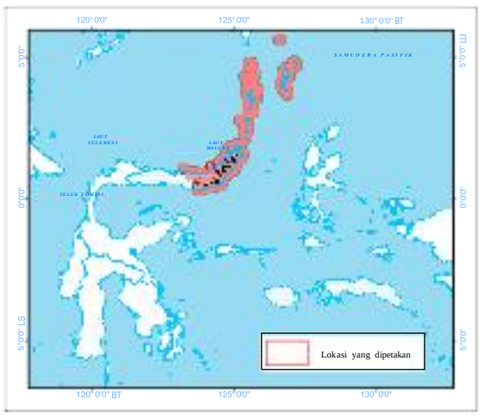

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

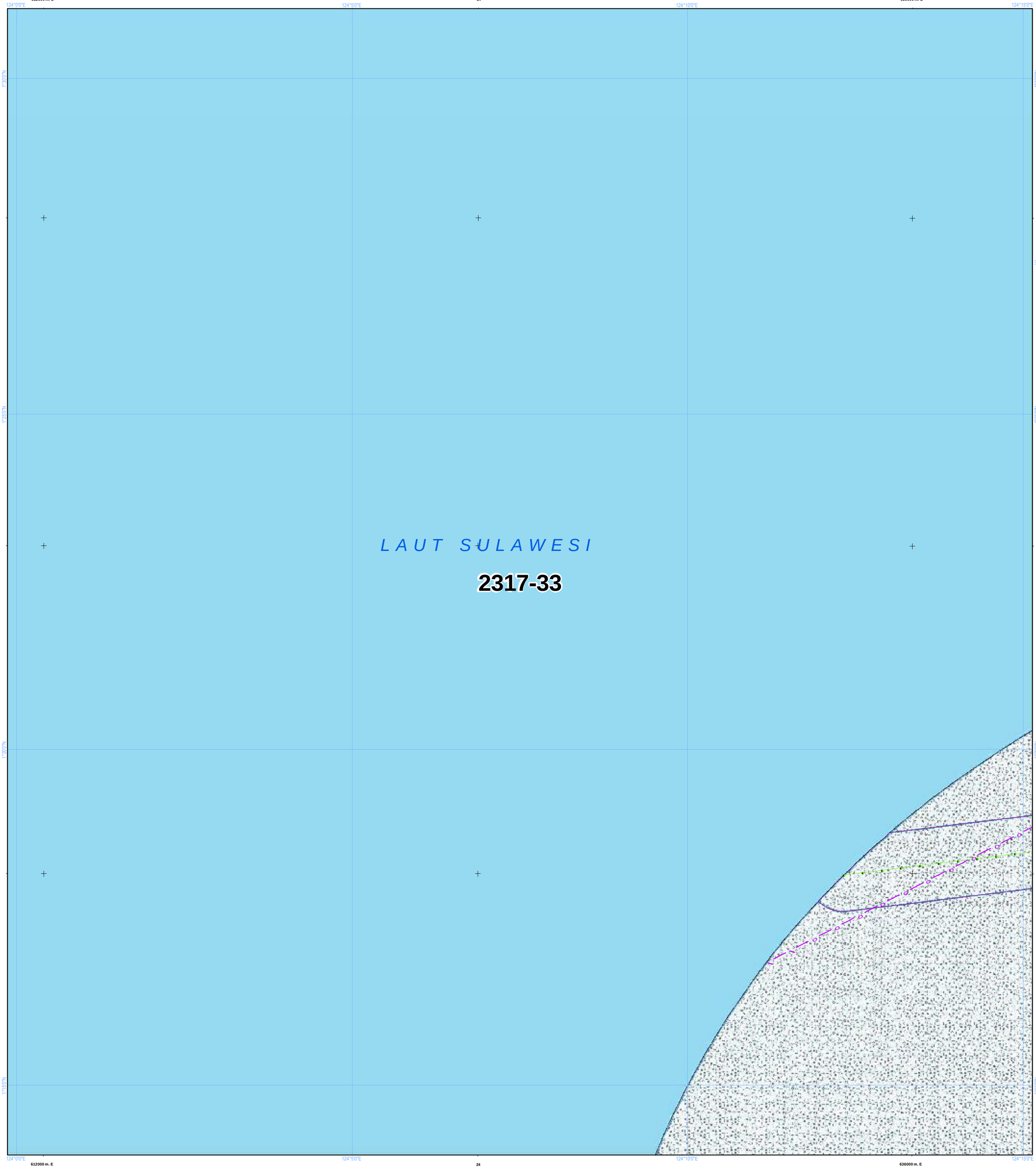

NLP : 2317-33

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

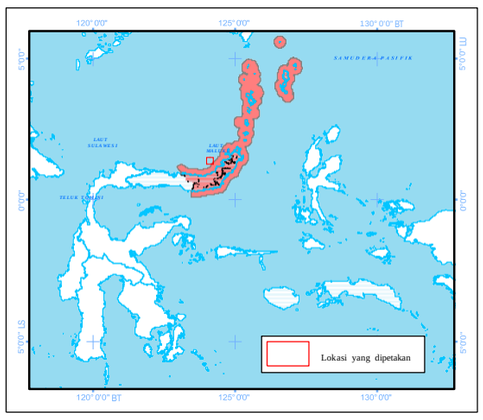

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

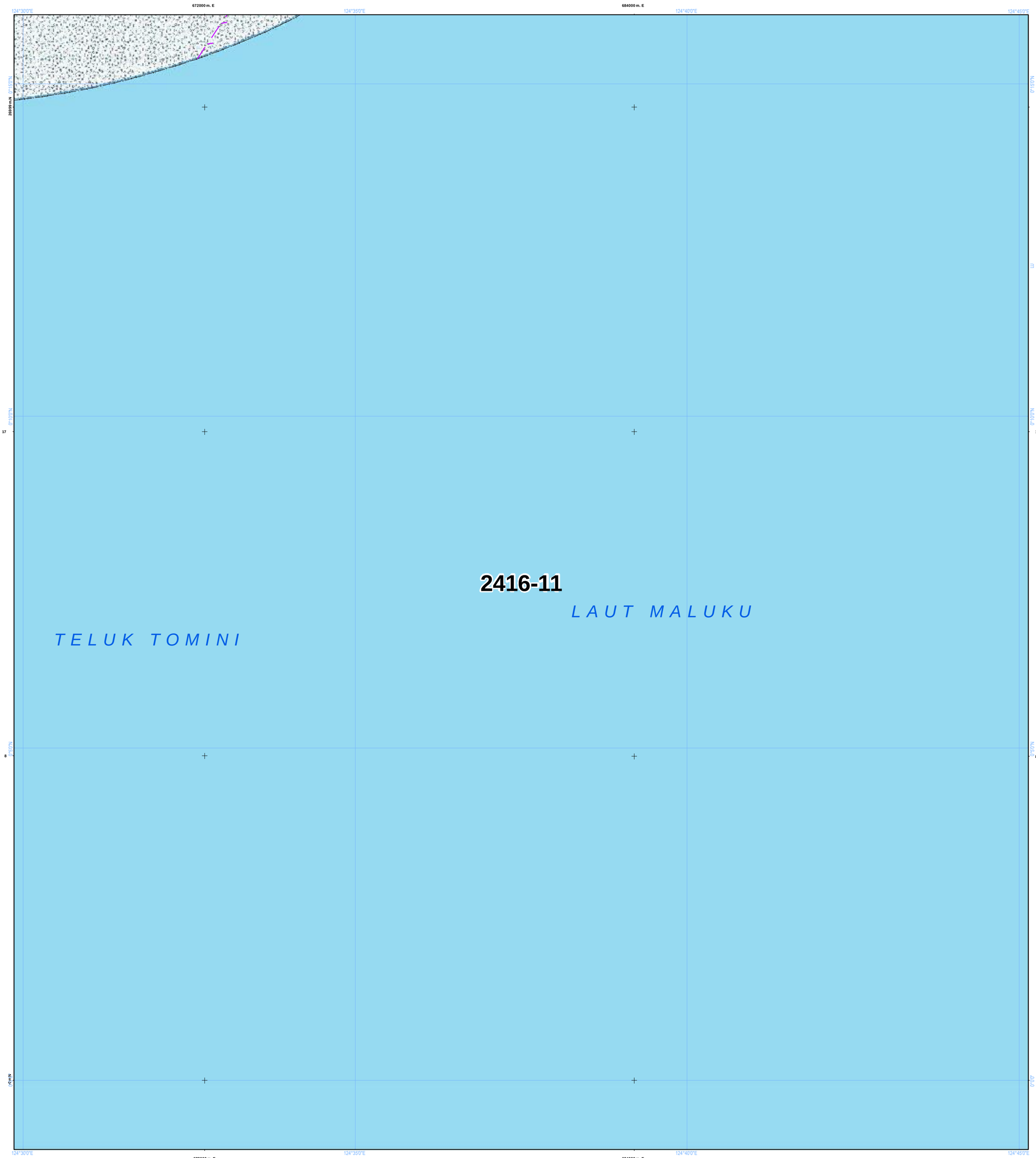

NLP : 2416-11

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

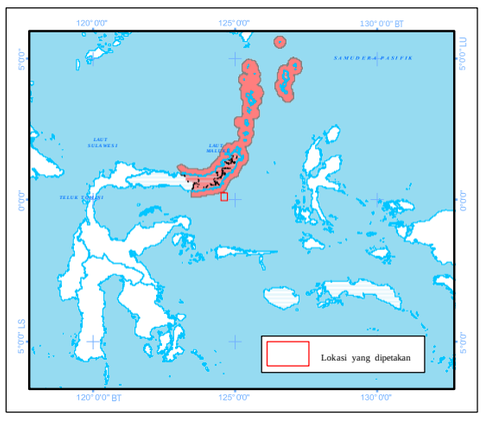

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

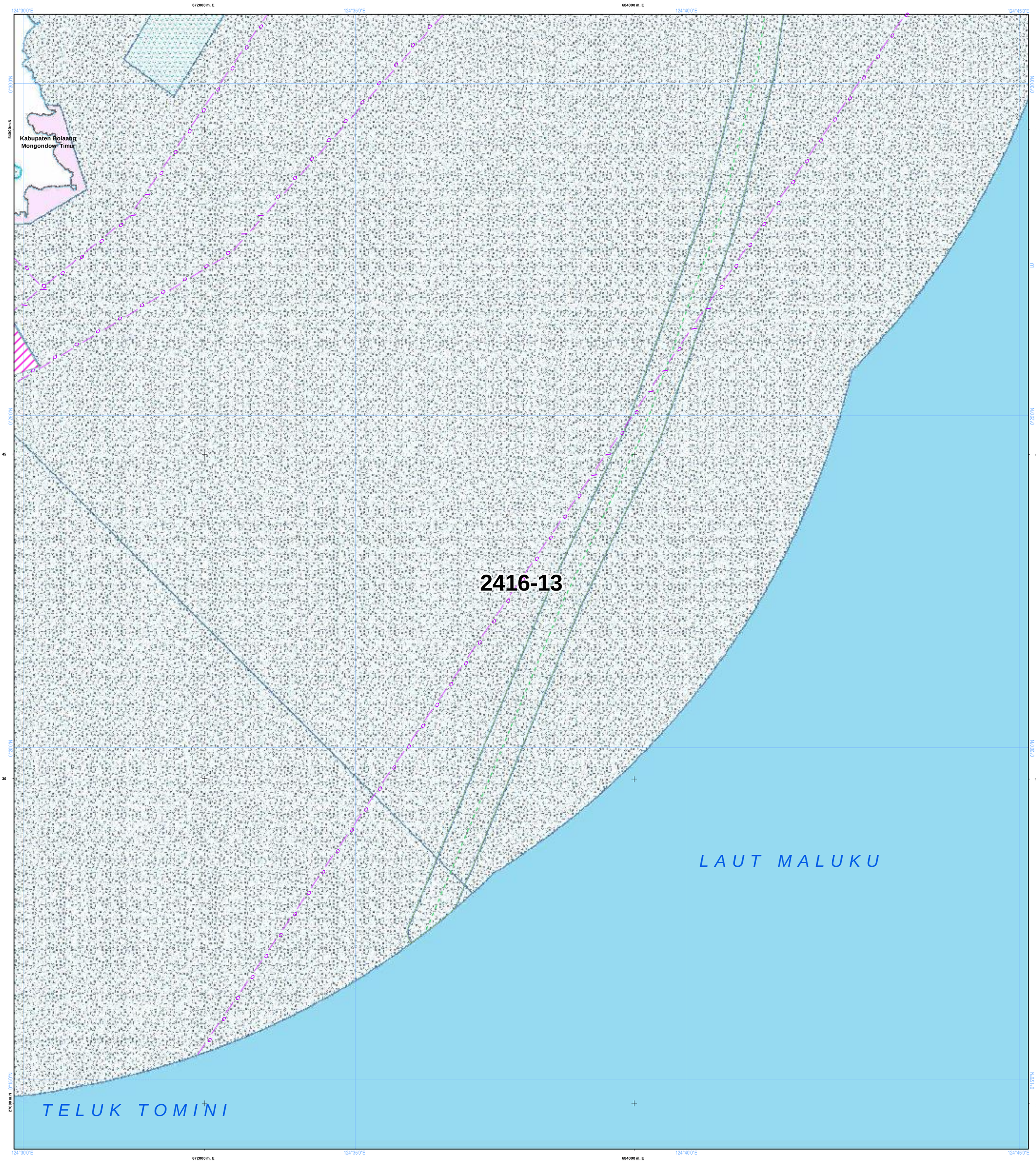

NLP : 2416-13

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

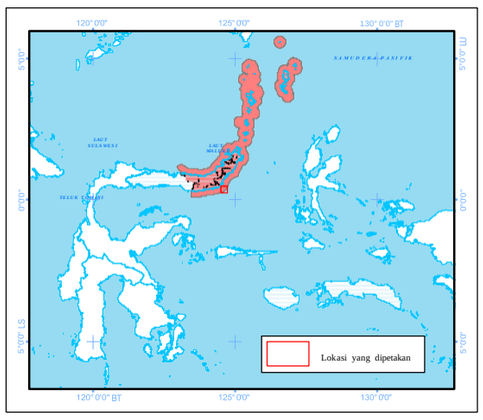

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

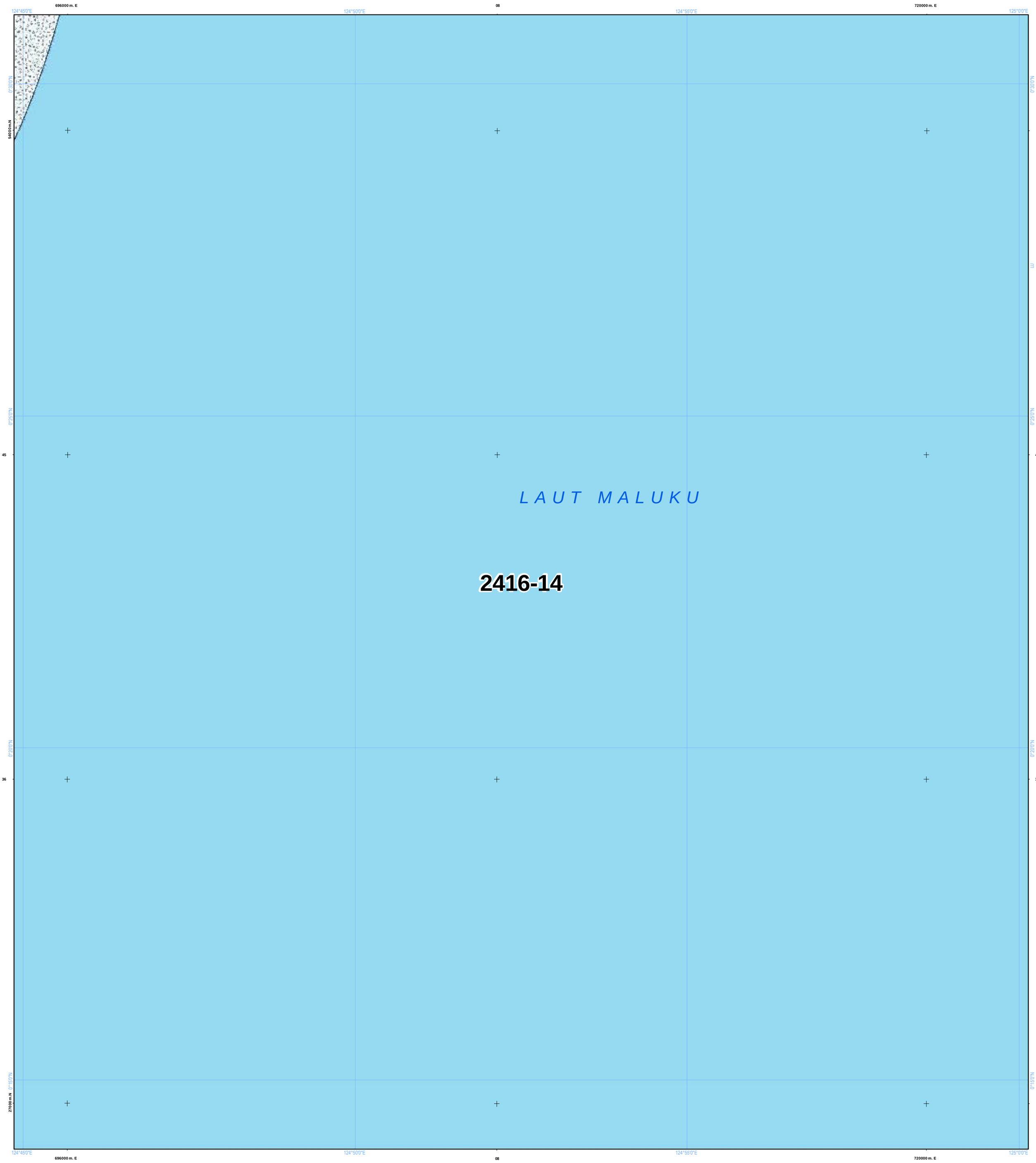

NLP : 2416-14

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

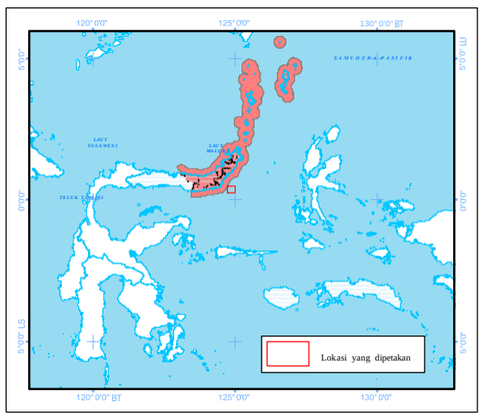

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

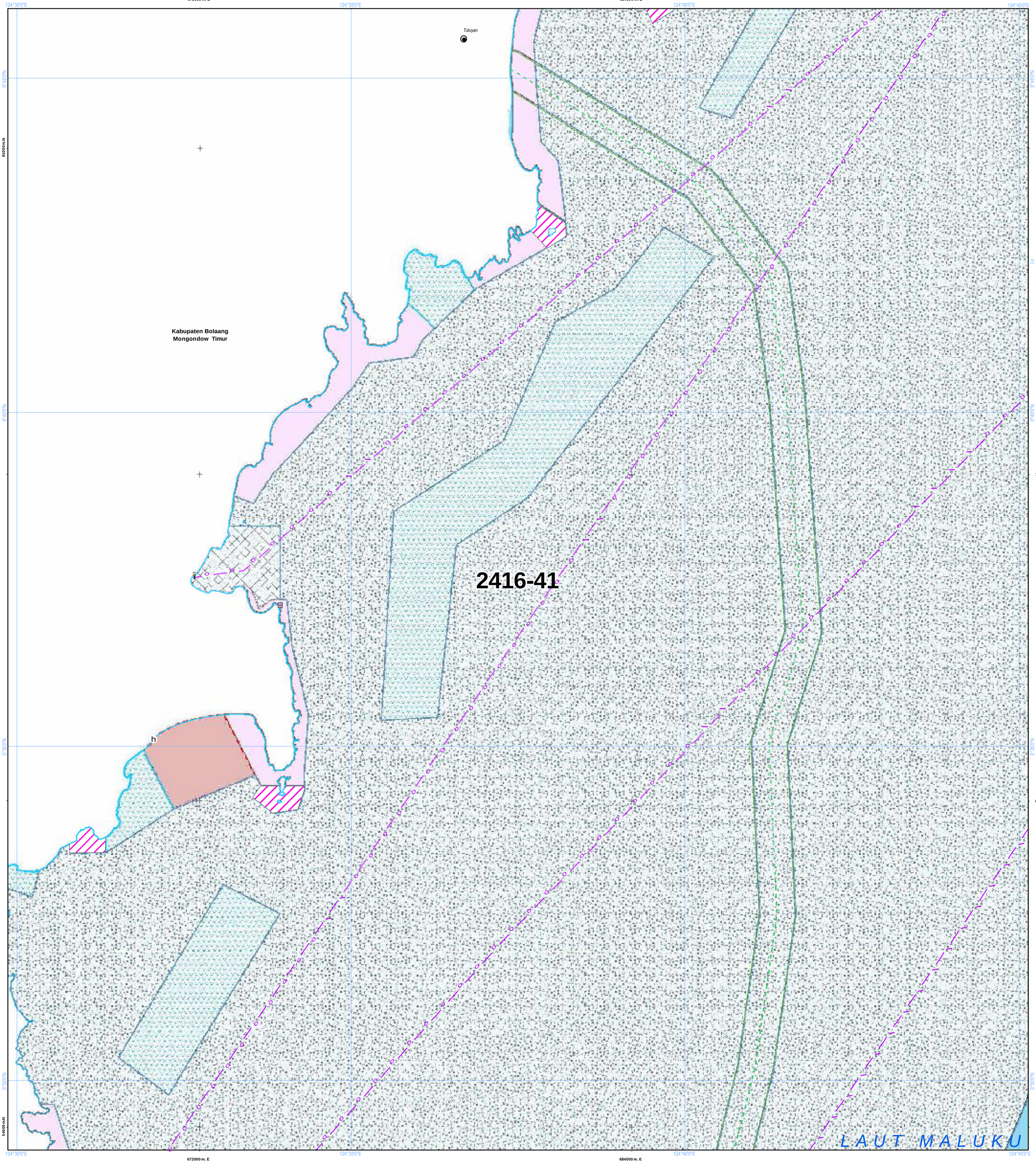

NLP : 2416-41

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

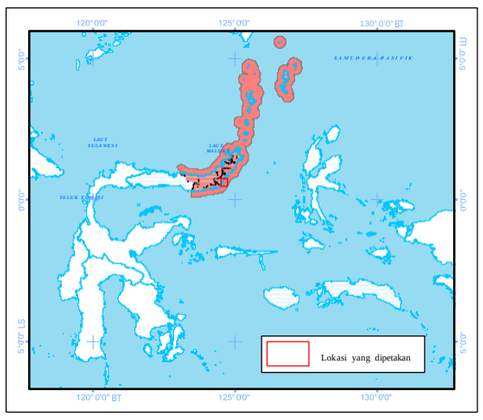

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

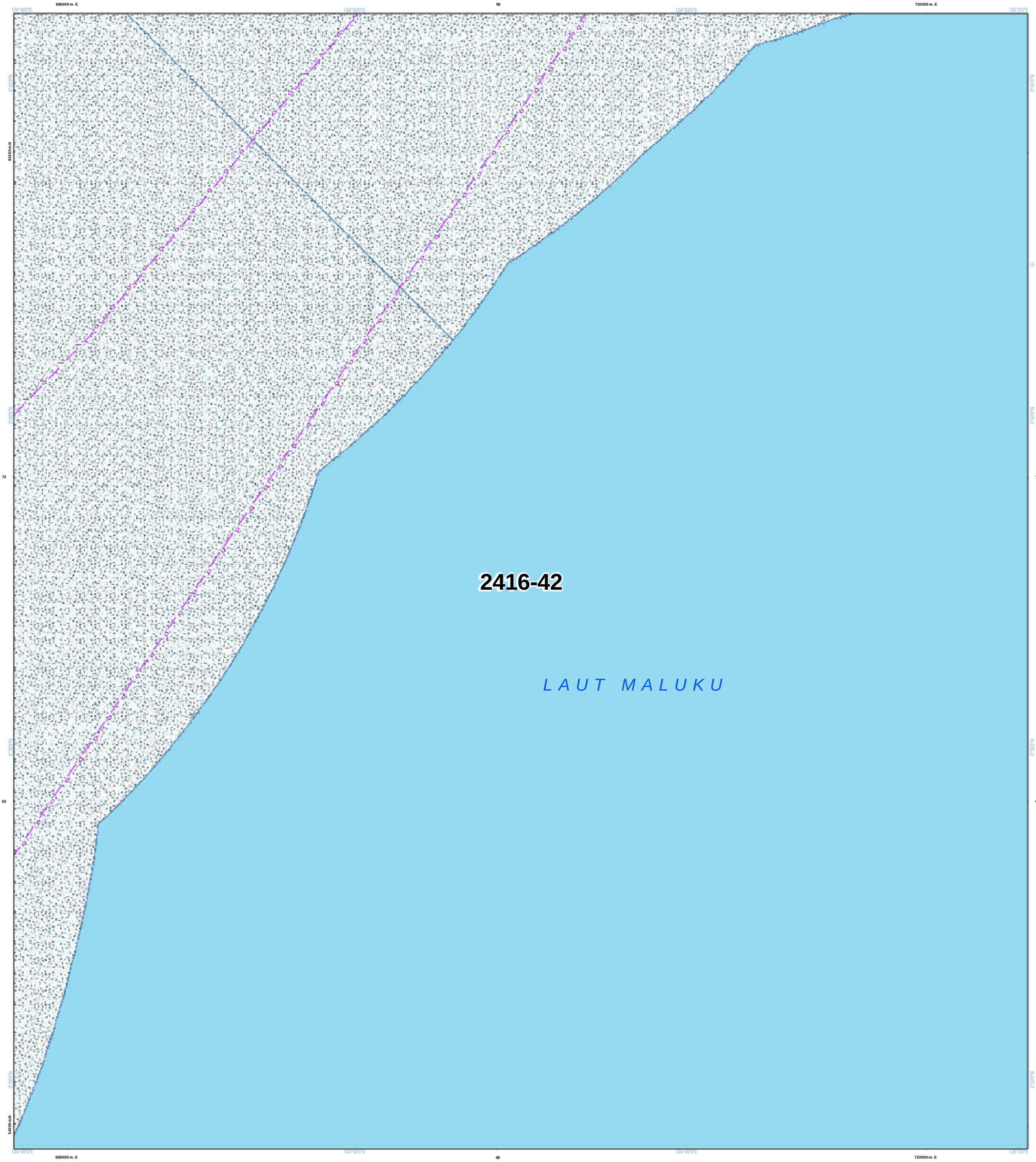

NLP : 2416-42

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

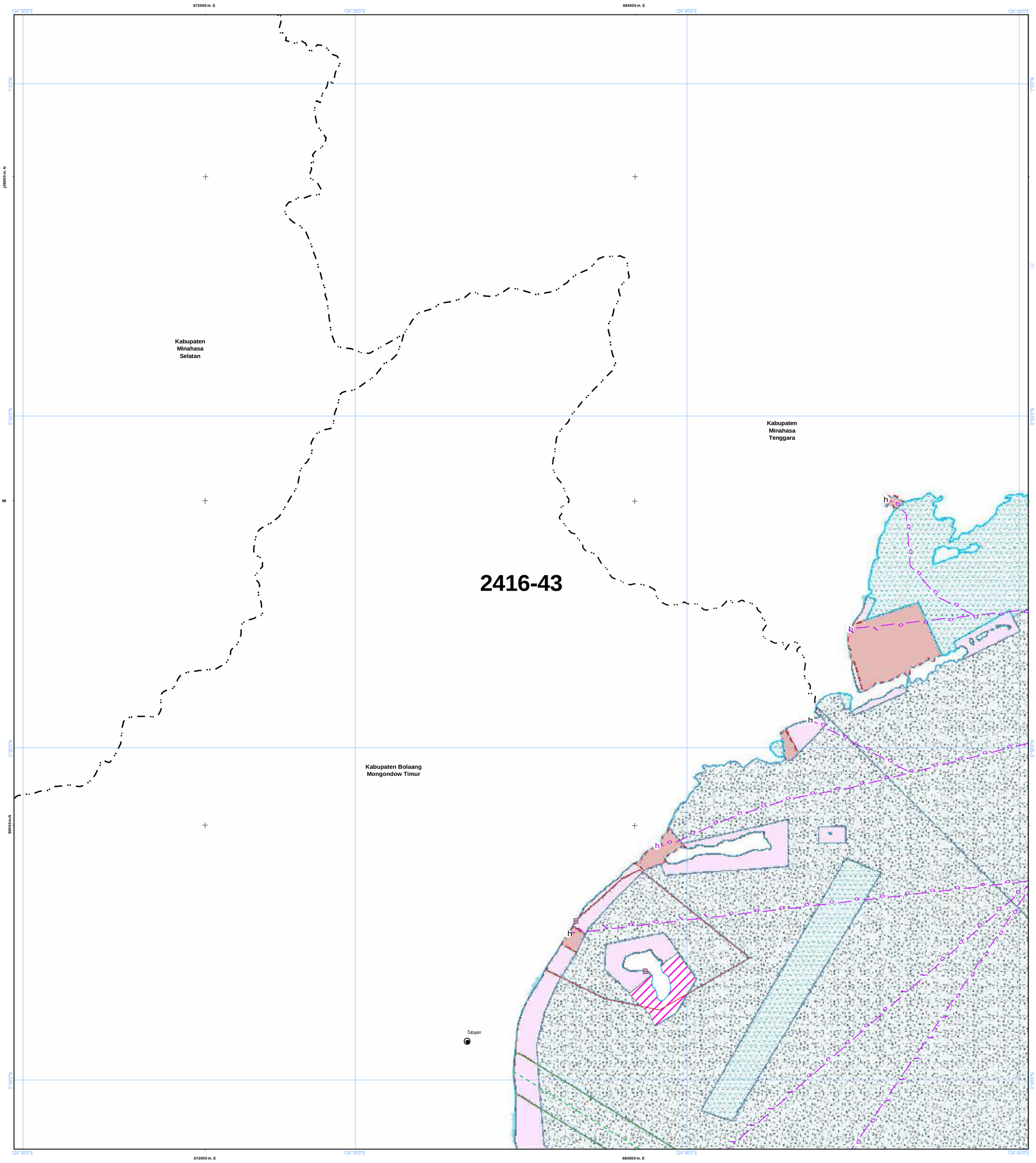

NLP : 2416-43

U SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

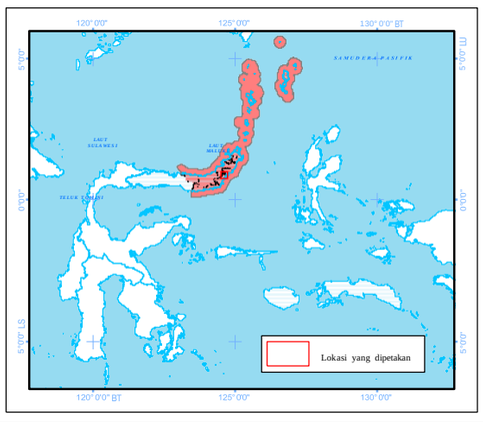

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

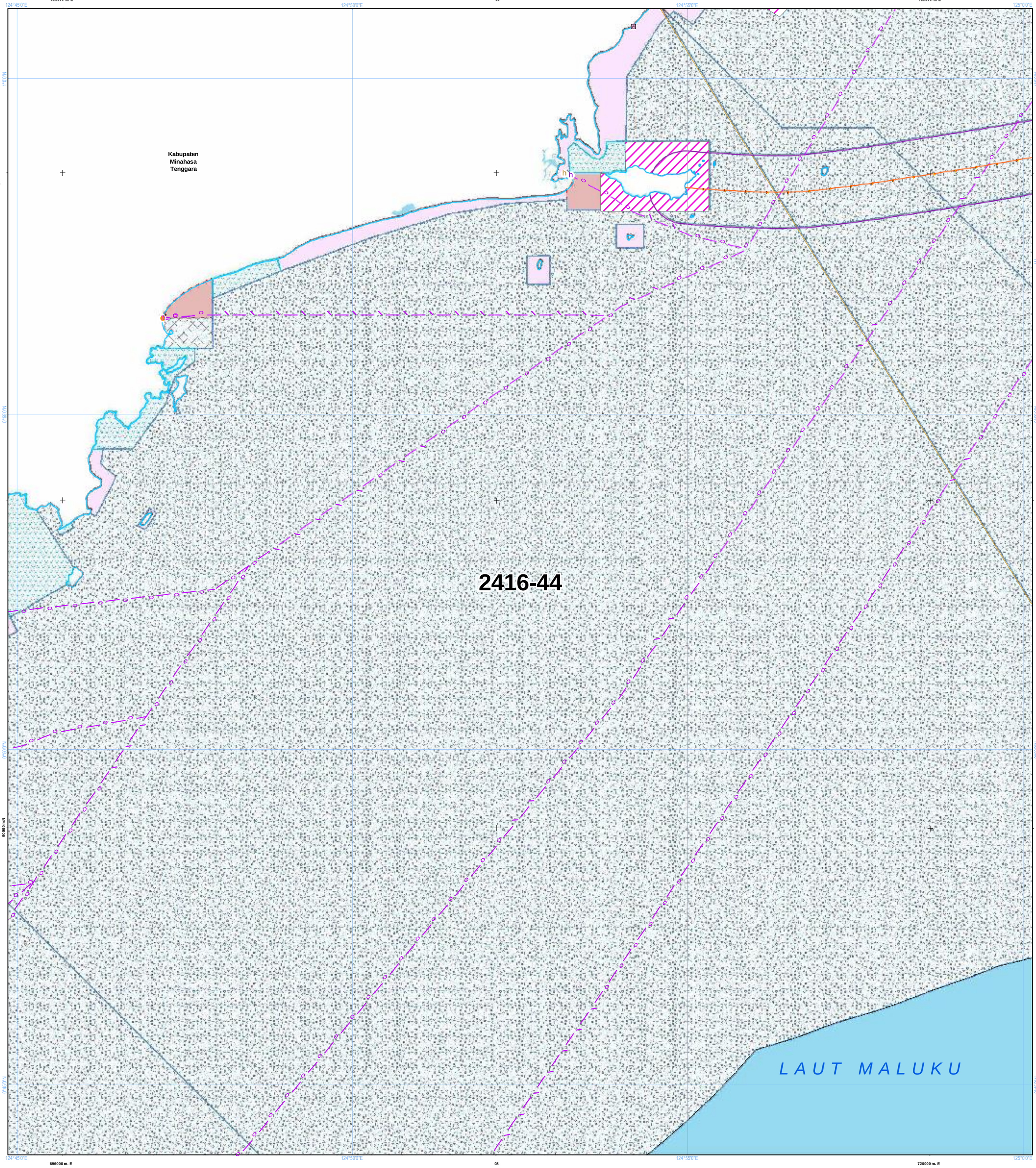

NLP : 2416-44

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

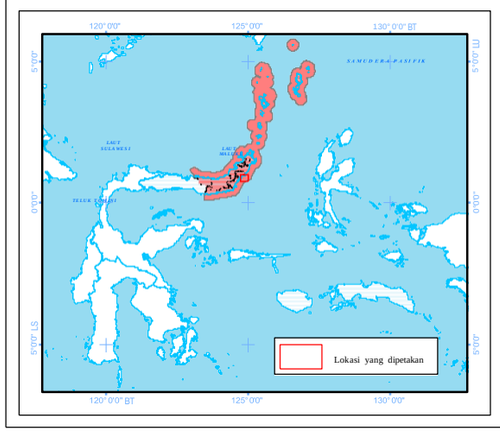

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

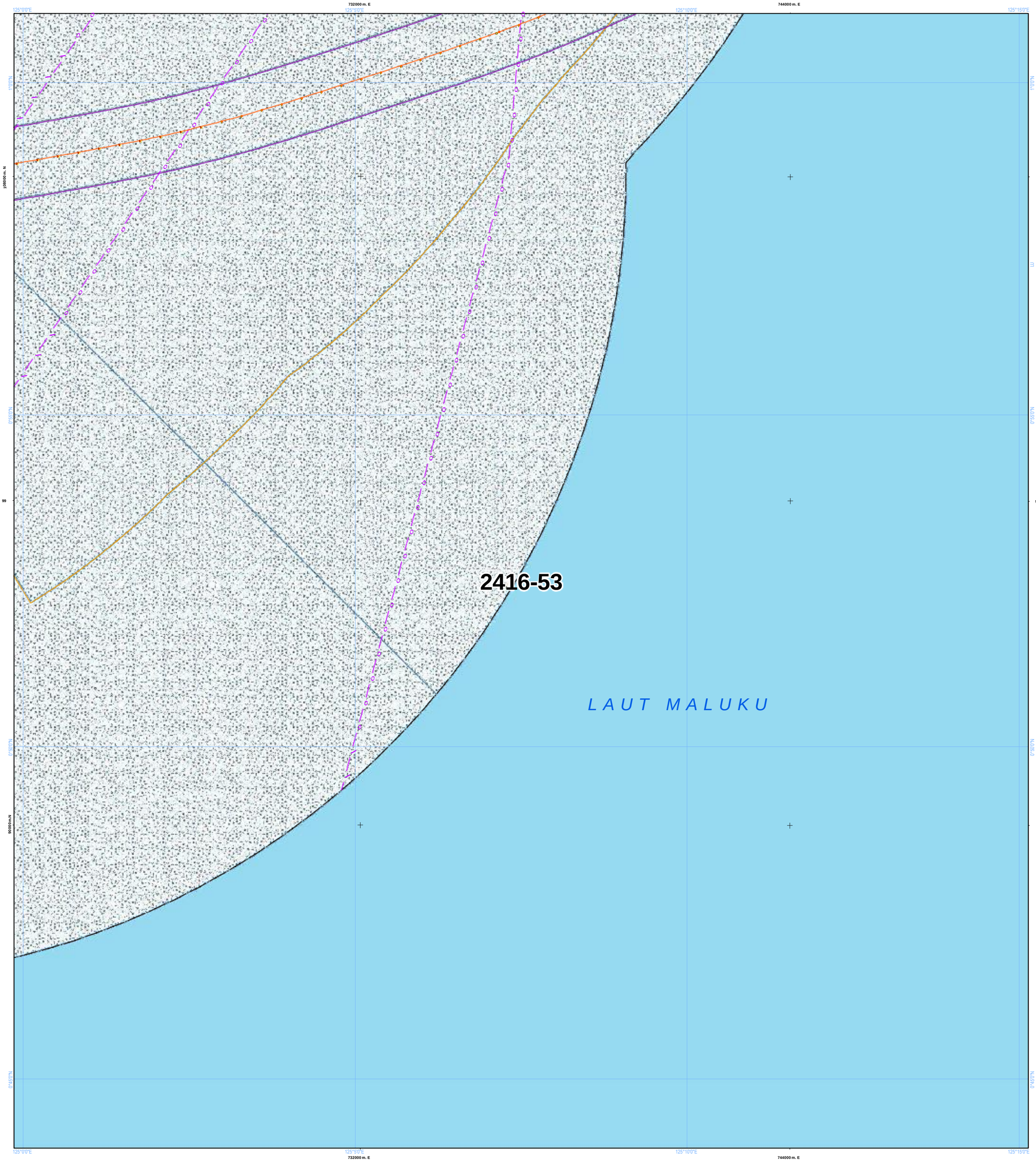

NLP : 2416-53

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

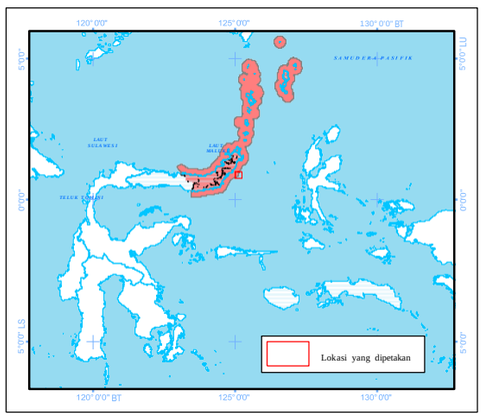

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP PPI Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

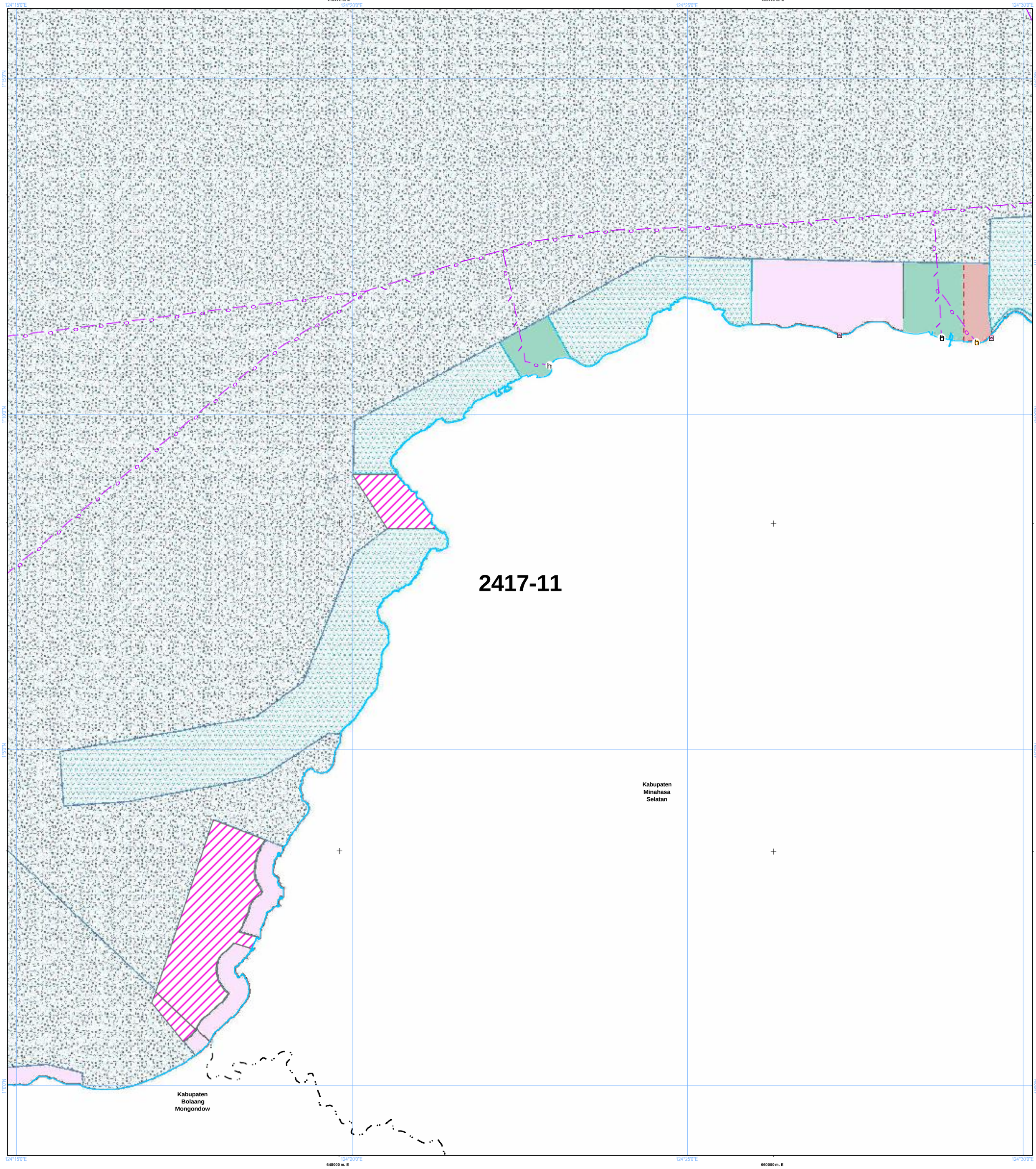

NLP : 2417-11

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

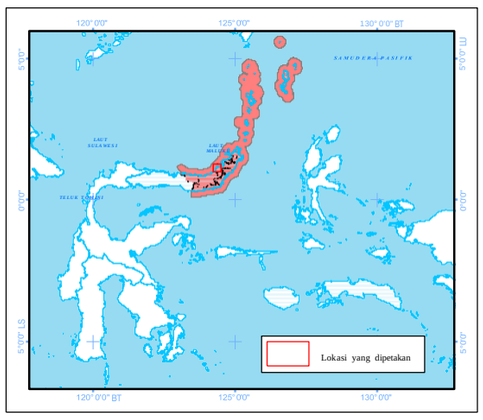

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

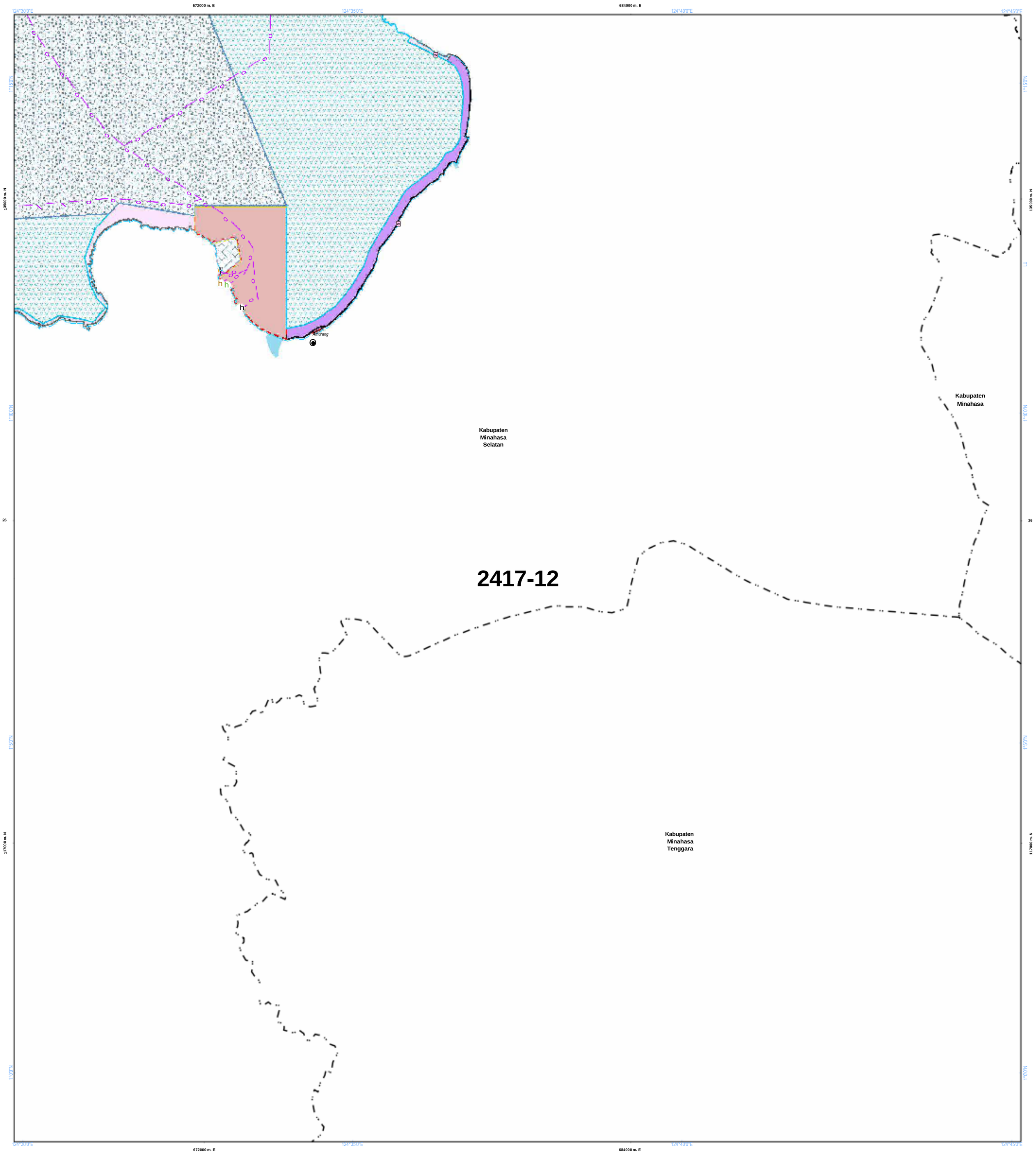

NLP : 2417-12

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

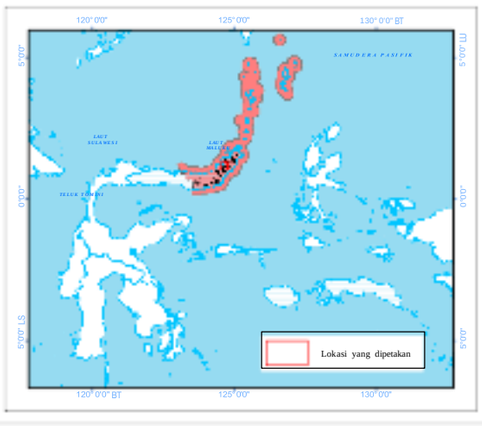

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

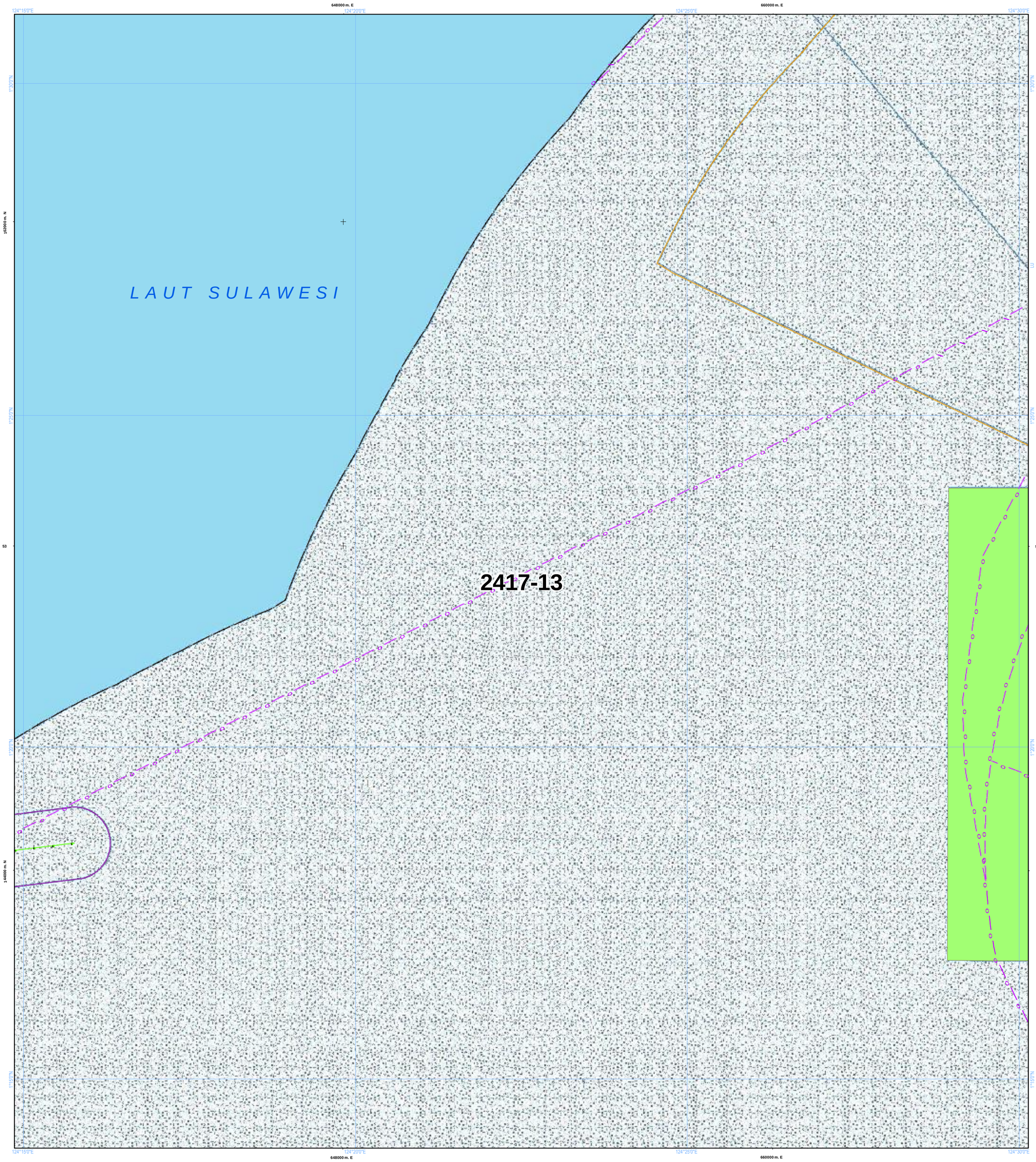

NLP : 2417-13

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

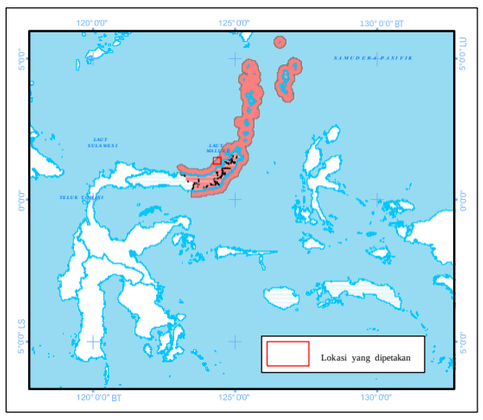

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

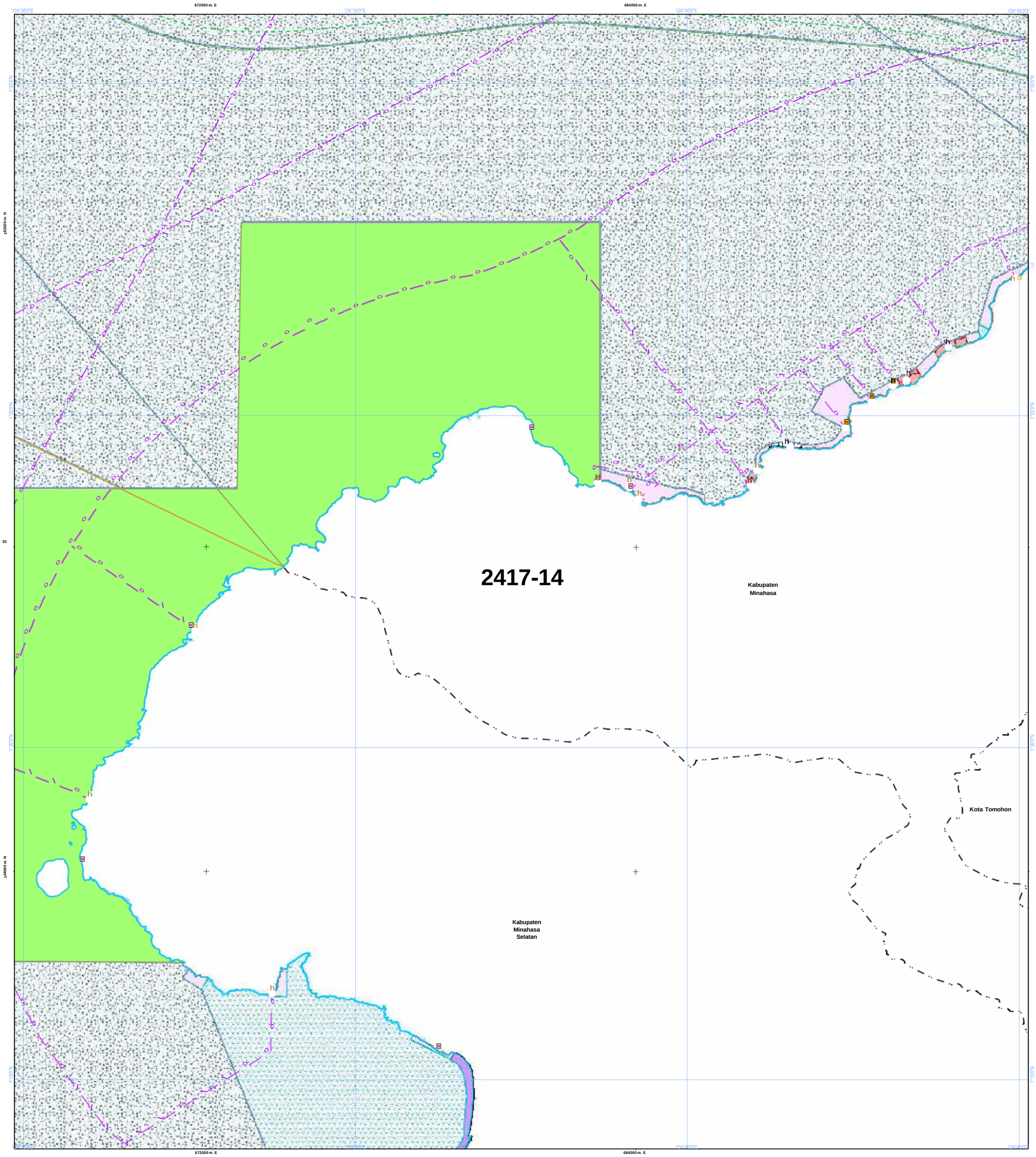

NLP : 2417-14

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

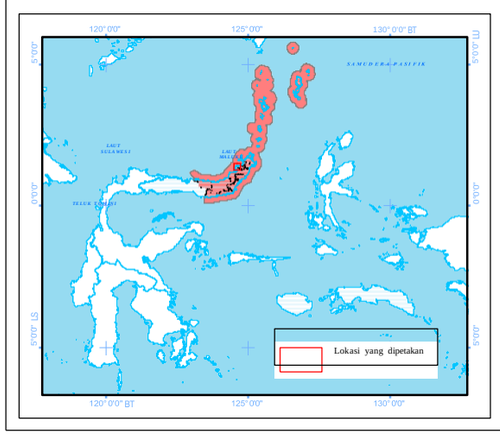

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

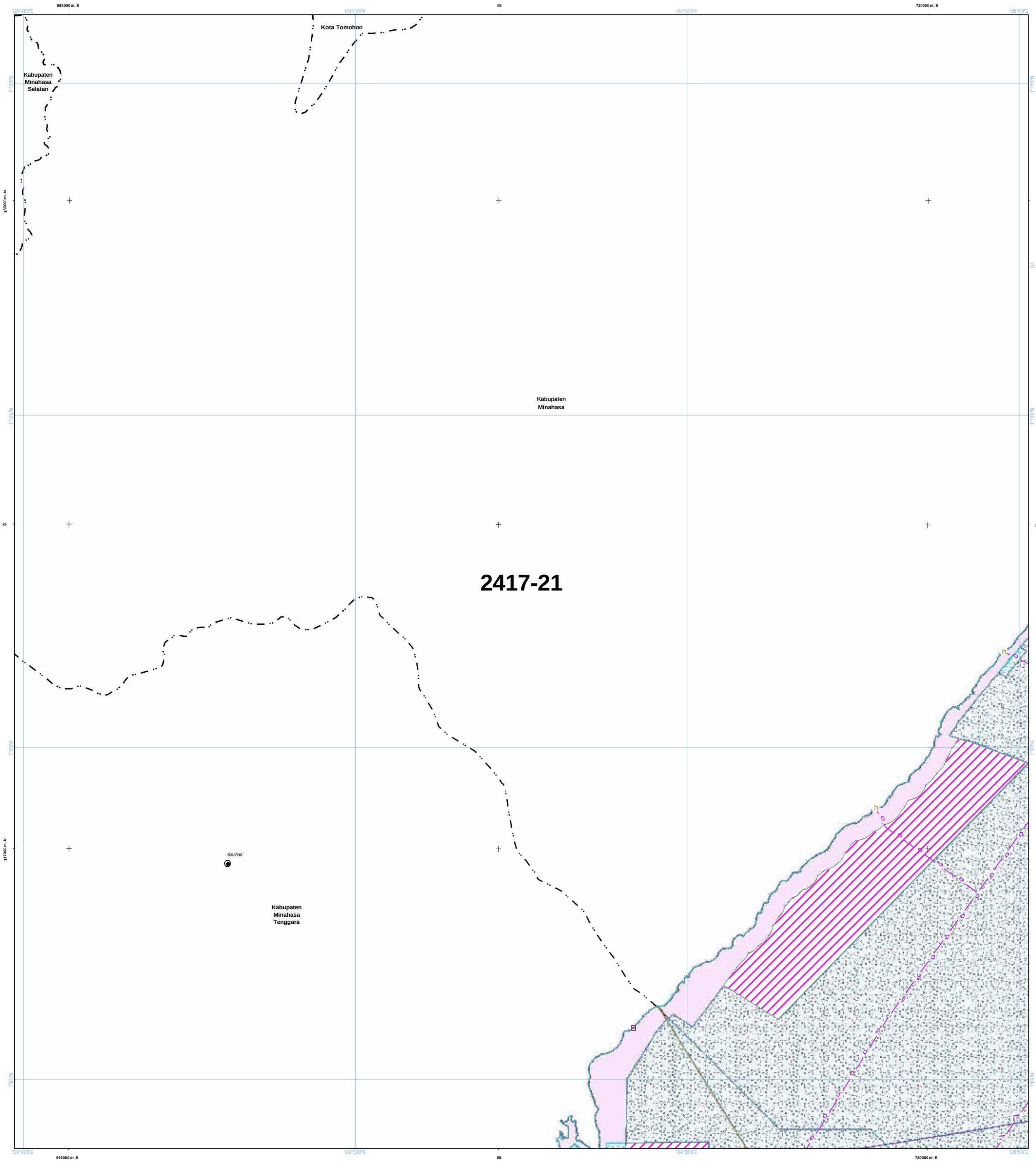

NLP : 2417-21

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

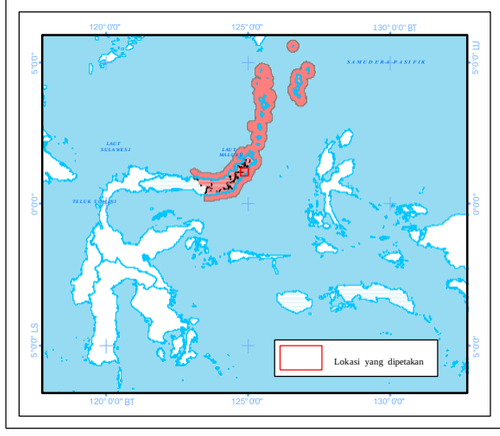

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

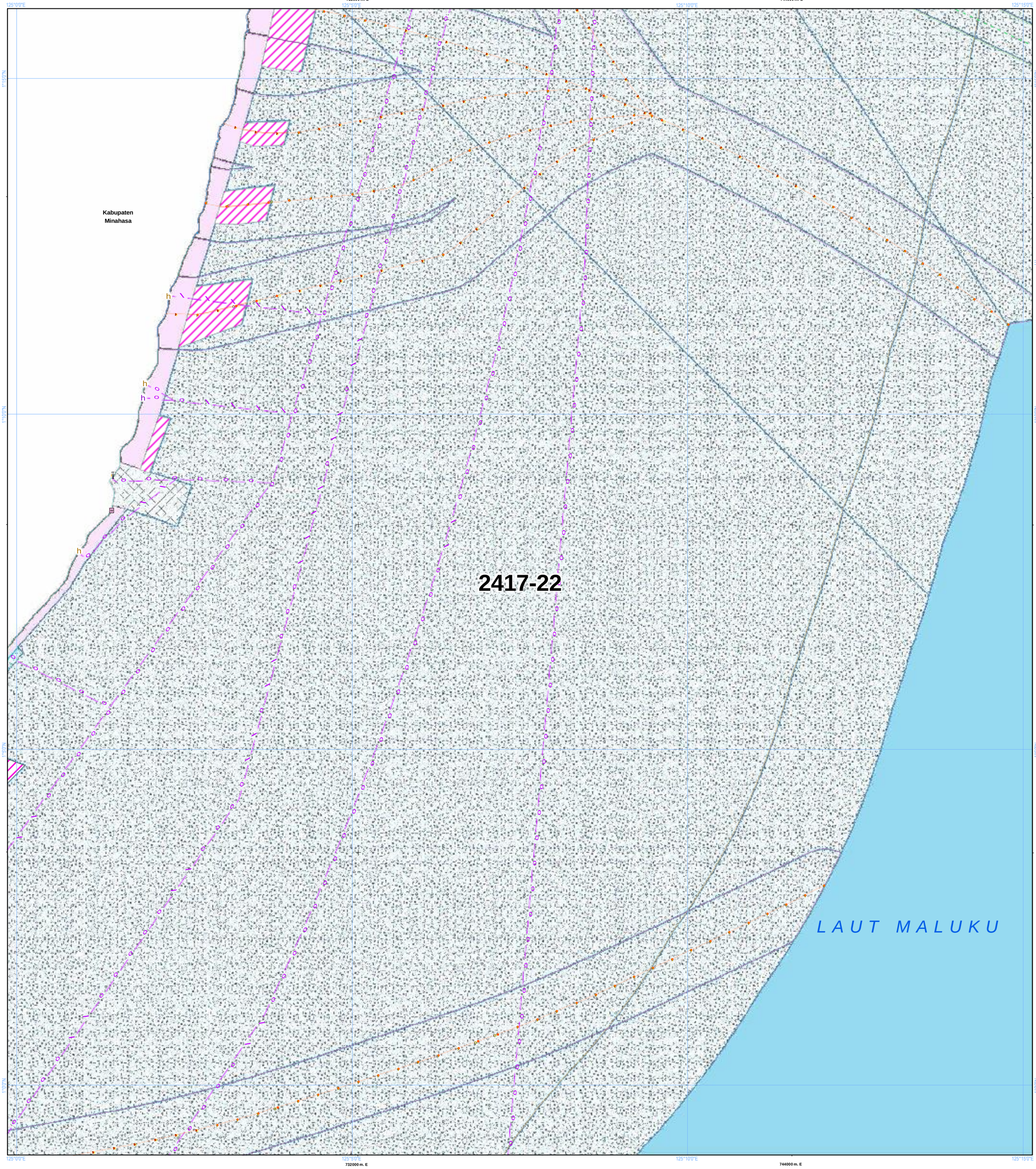

NLP : 2417-22

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

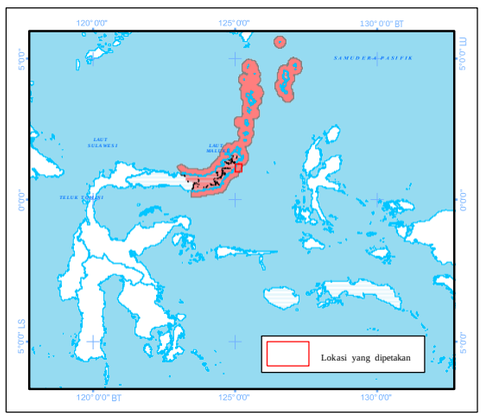

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP PPI Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

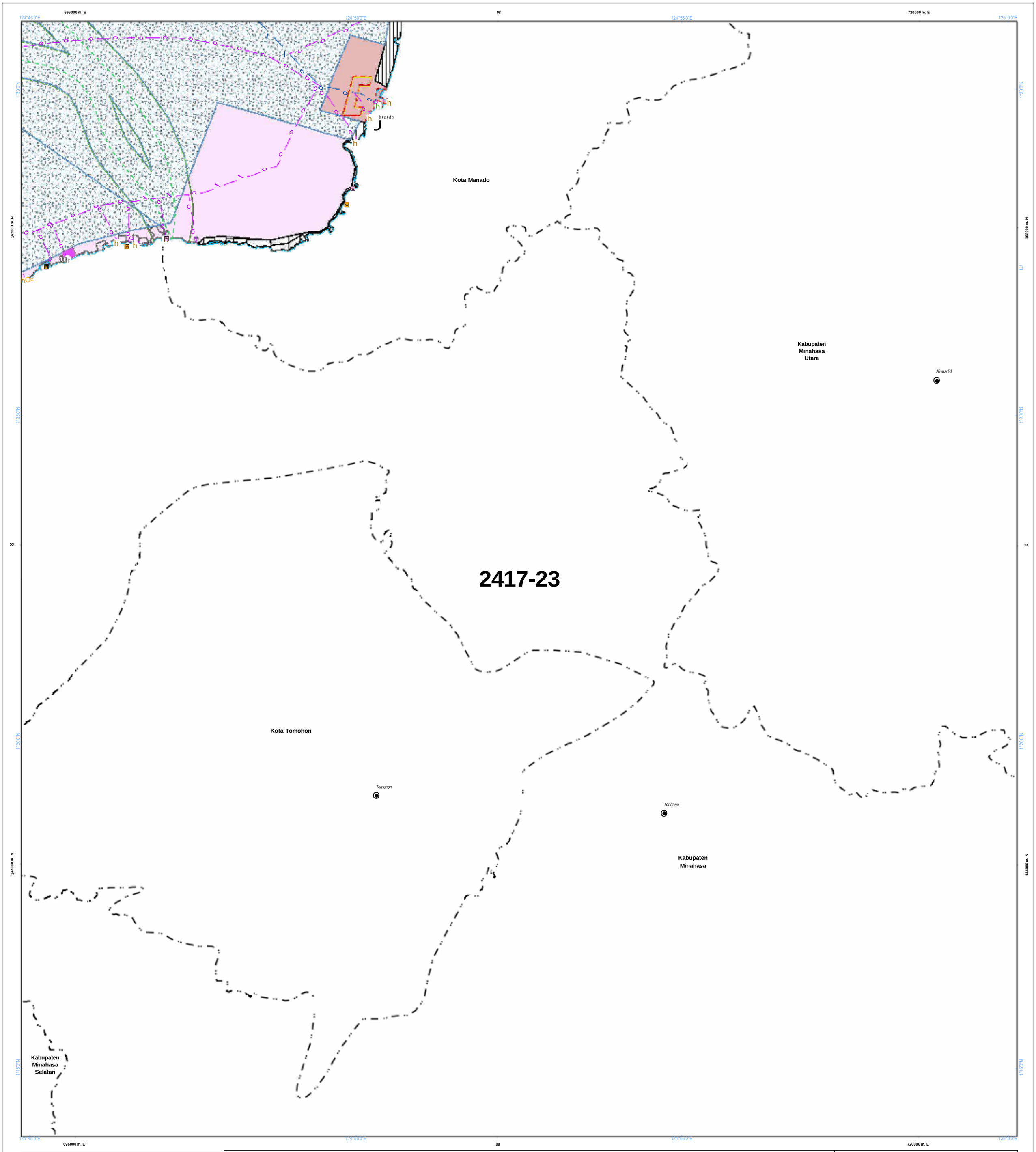

NLP : 2417-23

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

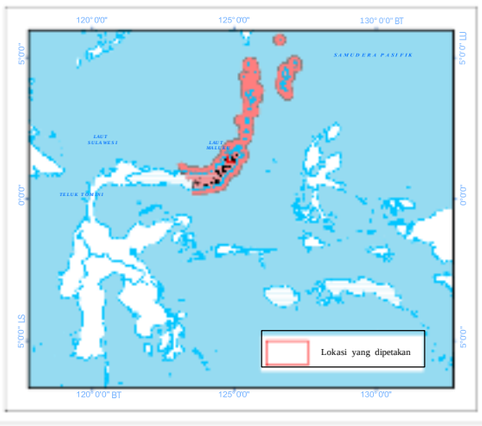

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

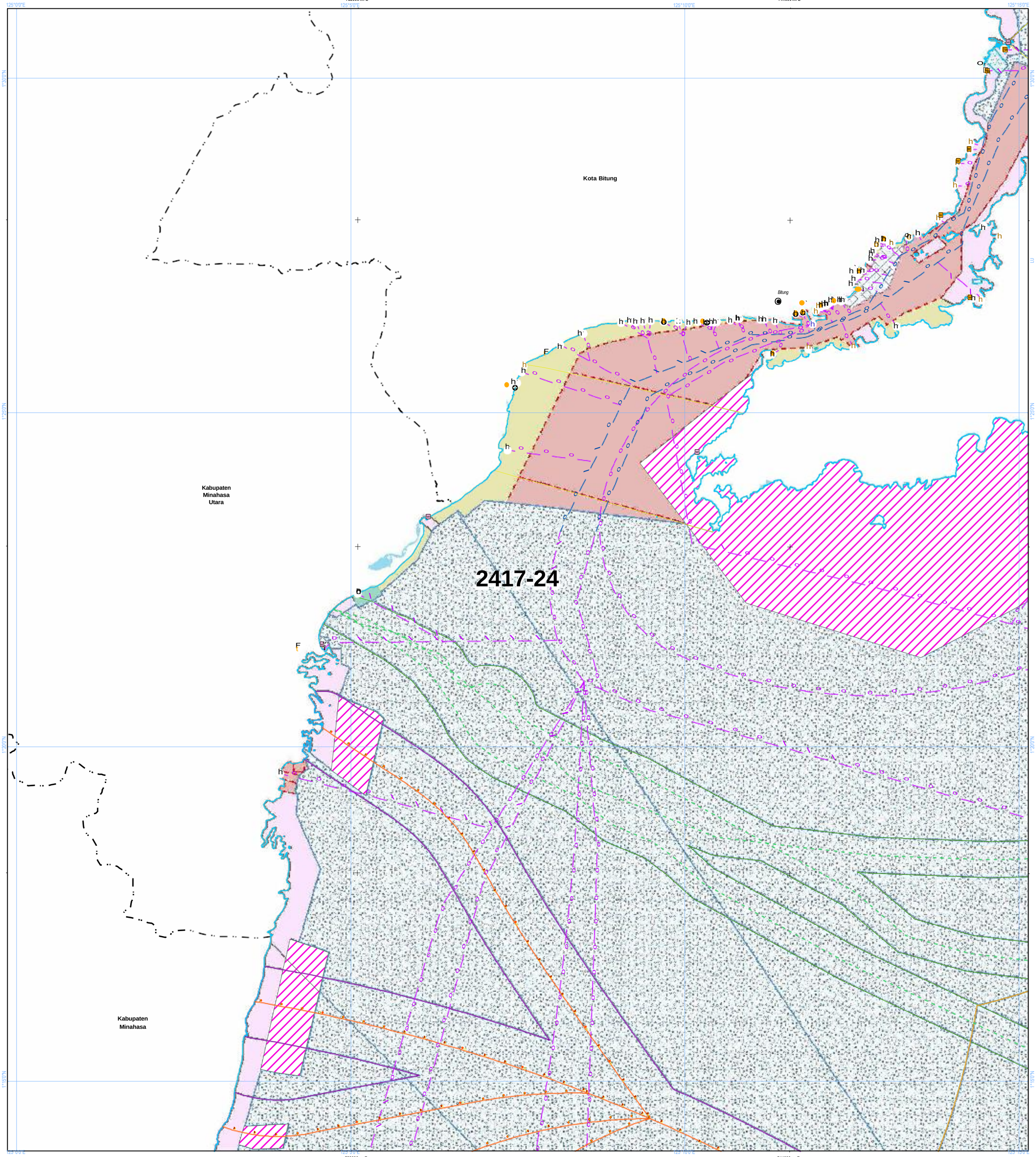

NLP : 2417-24

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

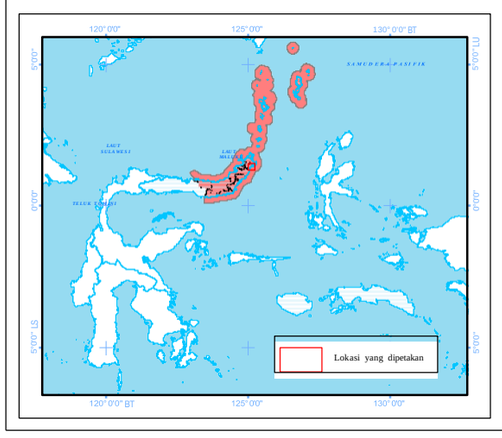

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

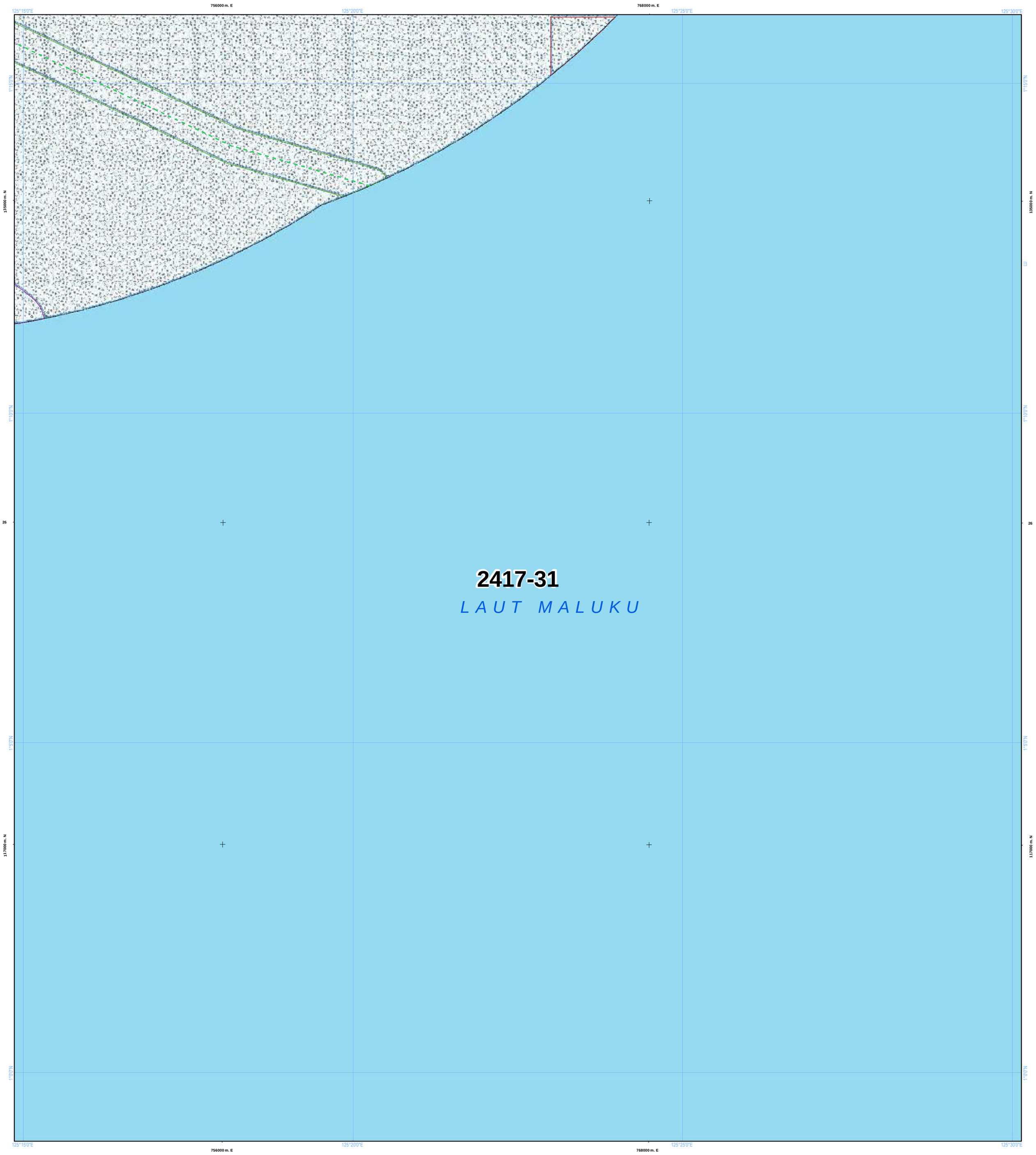

NLP : 2417-31

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

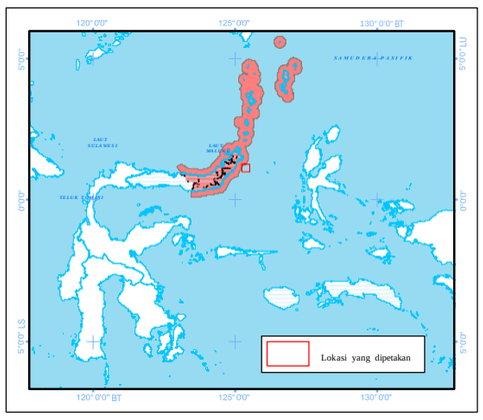

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

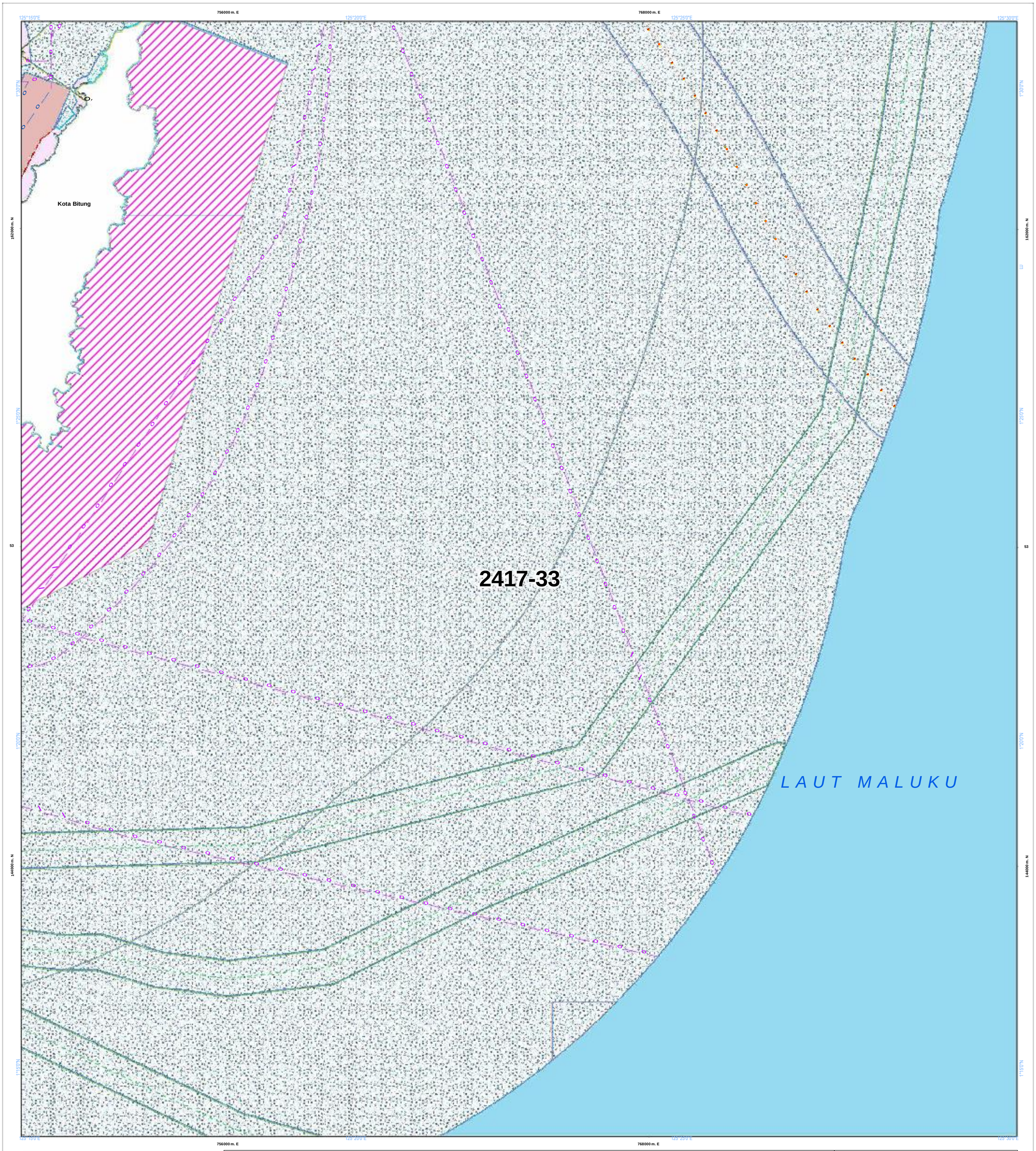

NLP : 2417-33

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

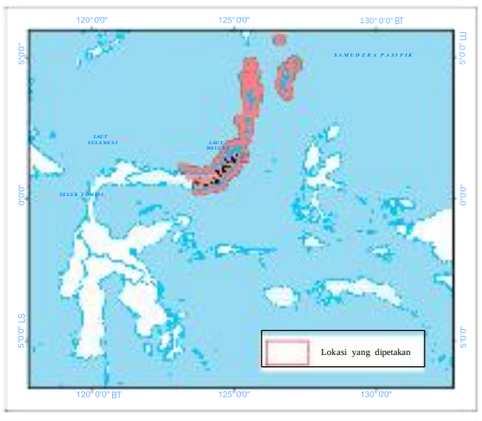

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

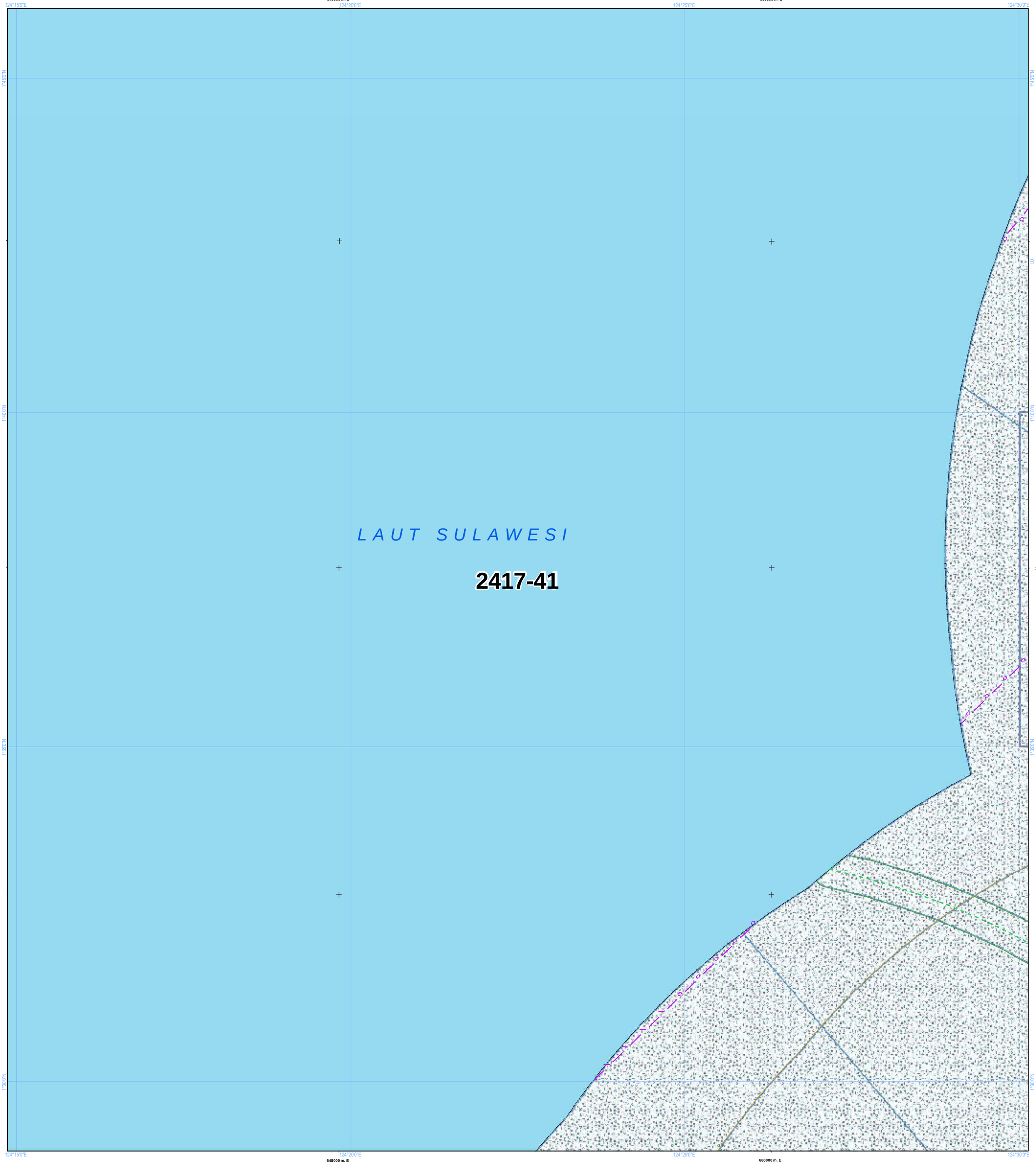

NLP : 2417-41

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

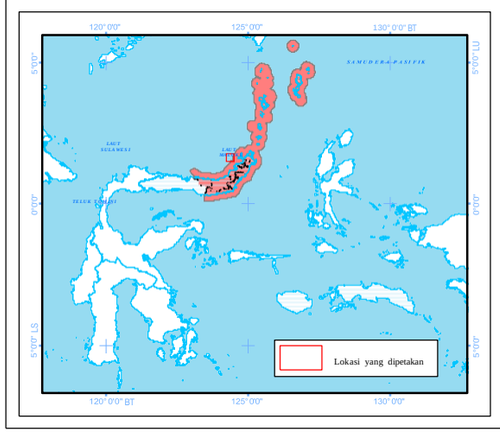

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

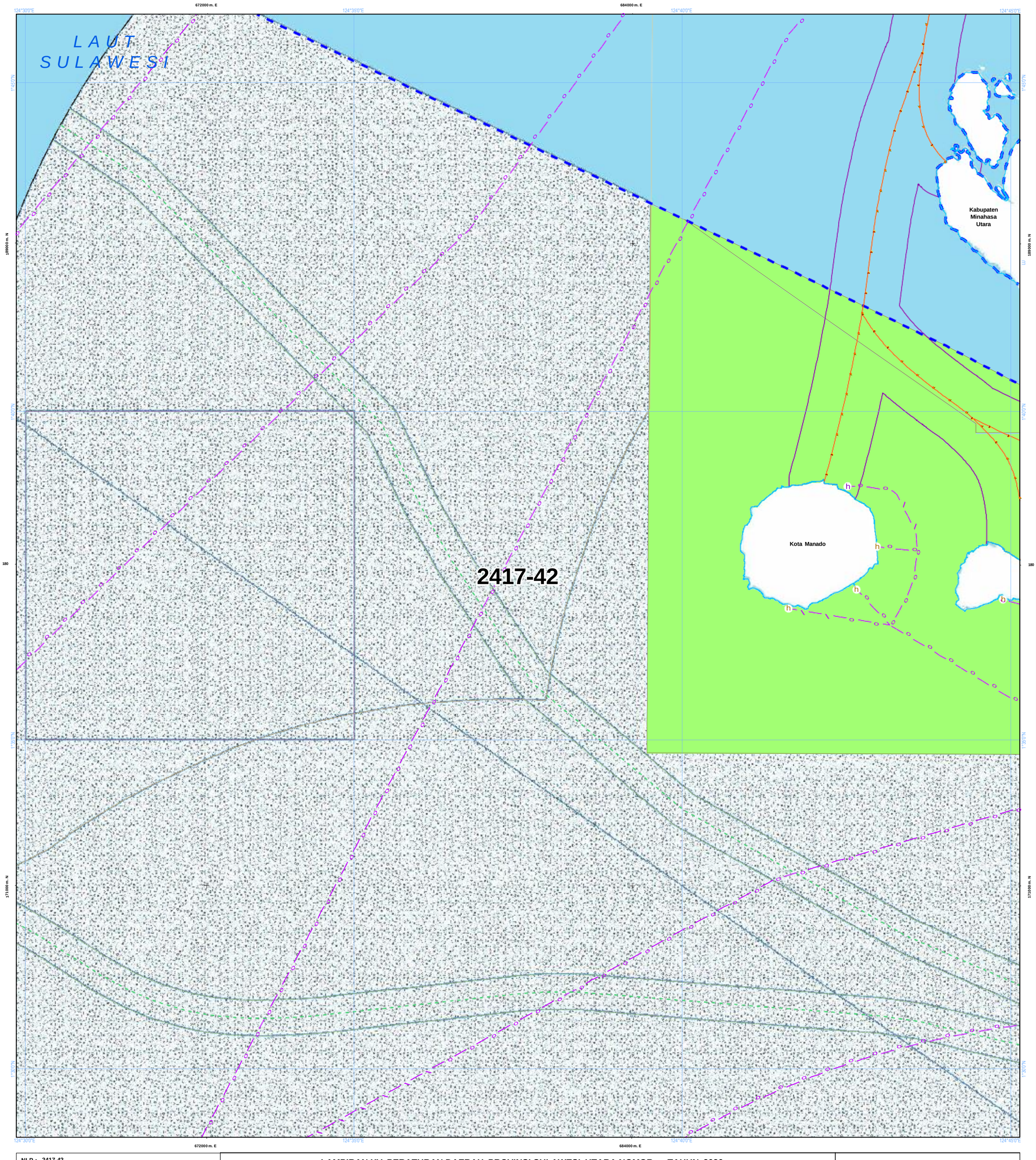

NLP : 2417-42

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

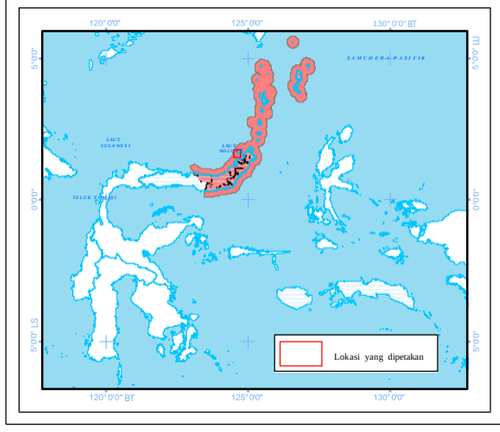

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

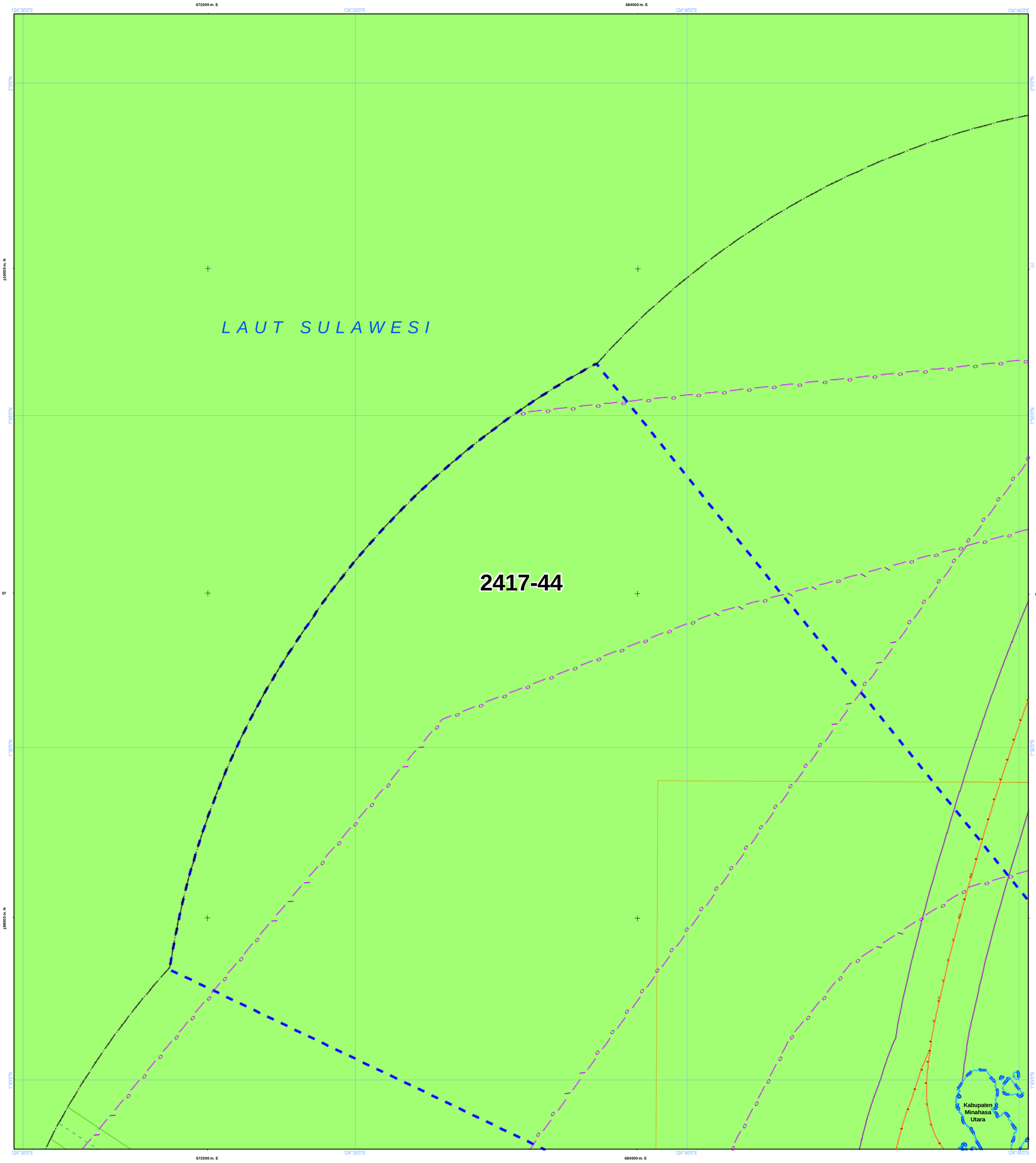

NLP : 2417-44

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

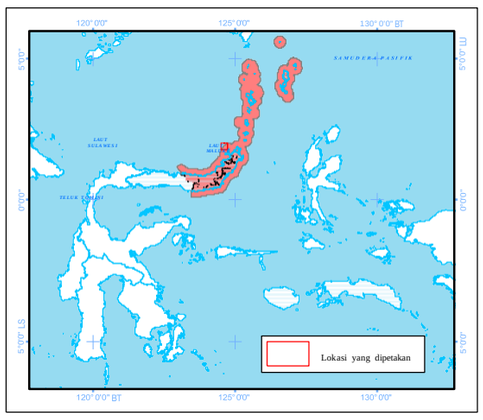

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

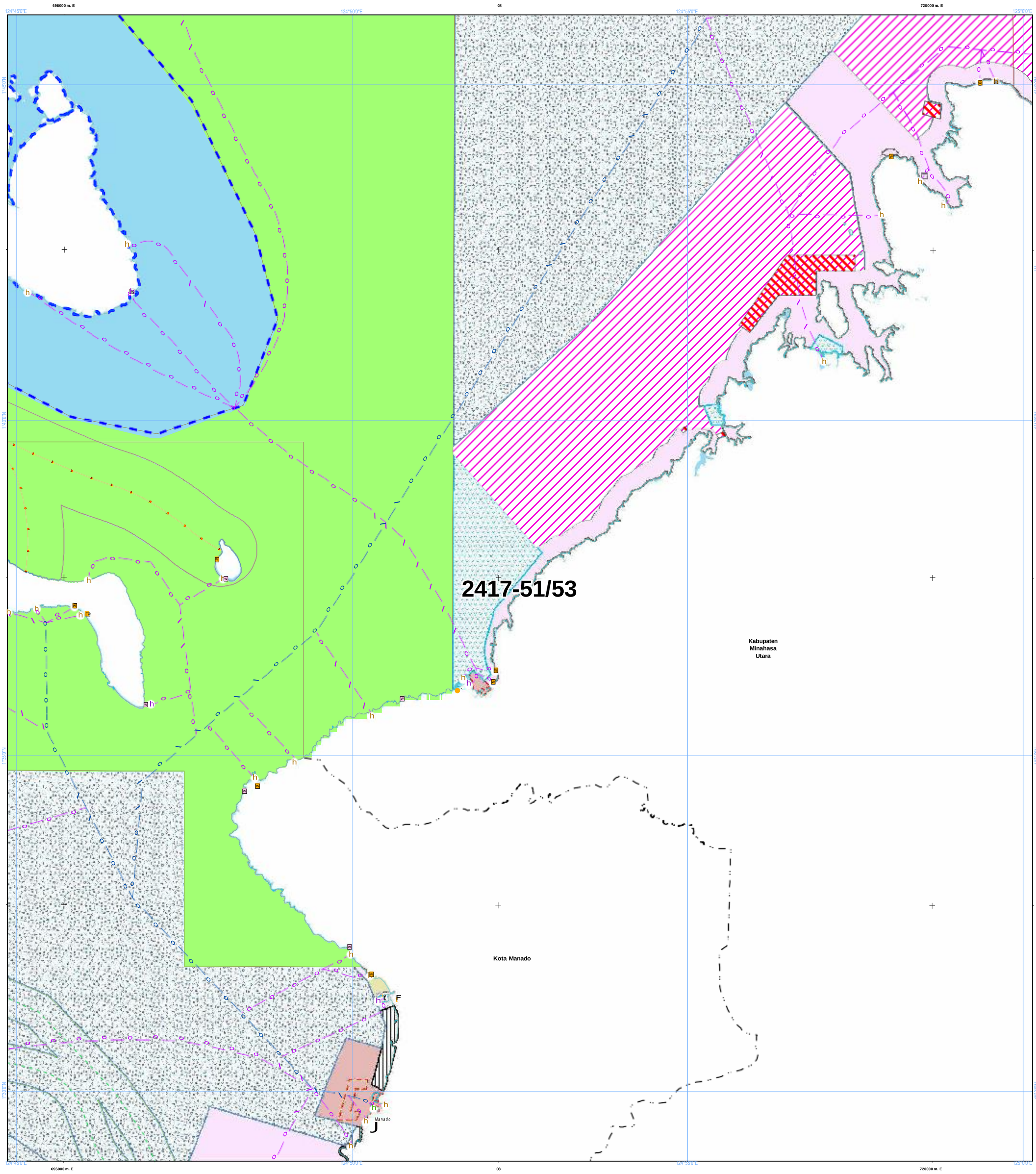

NLP : 2417-51/53

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PE T A PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

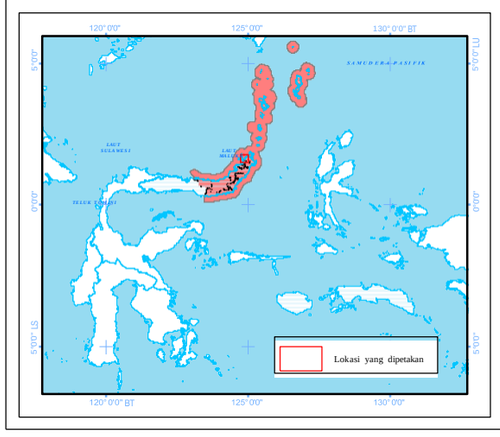

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

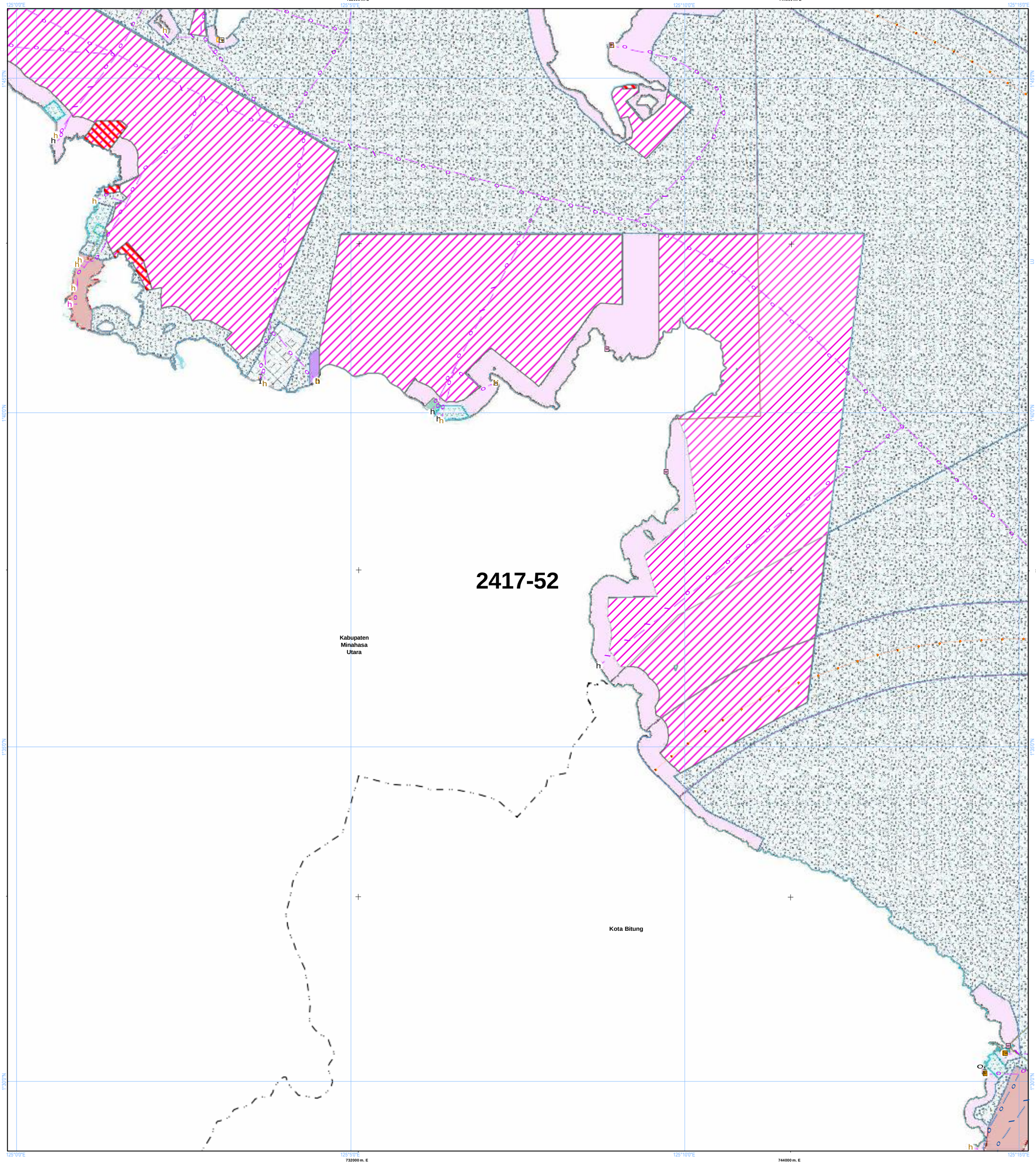

NLP : 2417-52

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

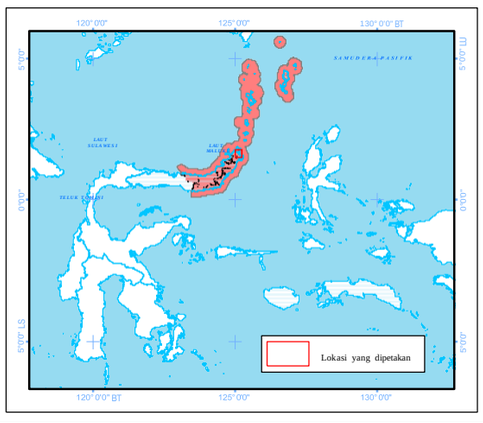

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

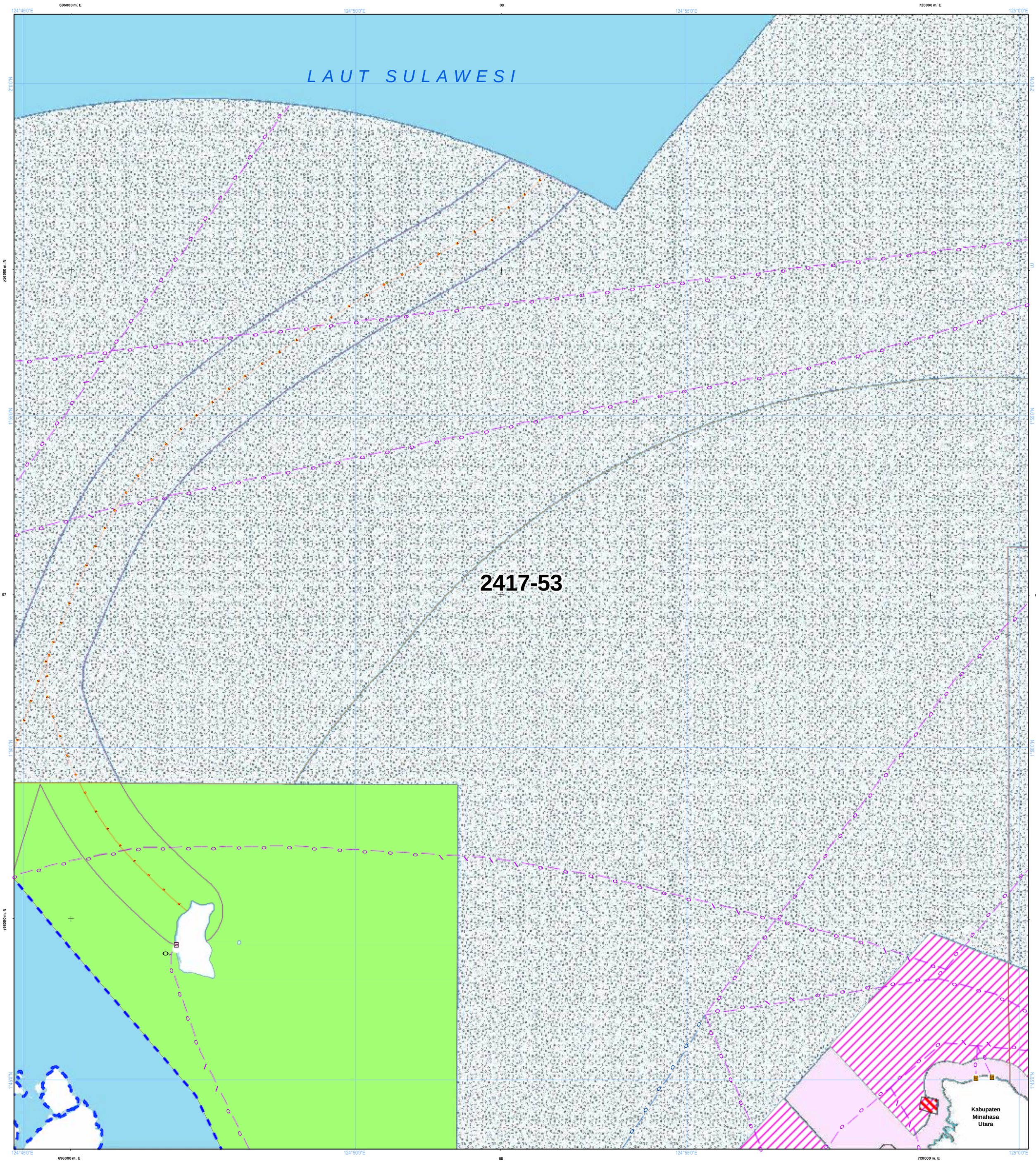

NLP : 2417-53

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

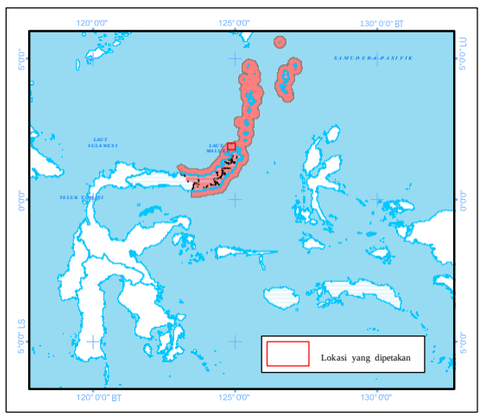

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

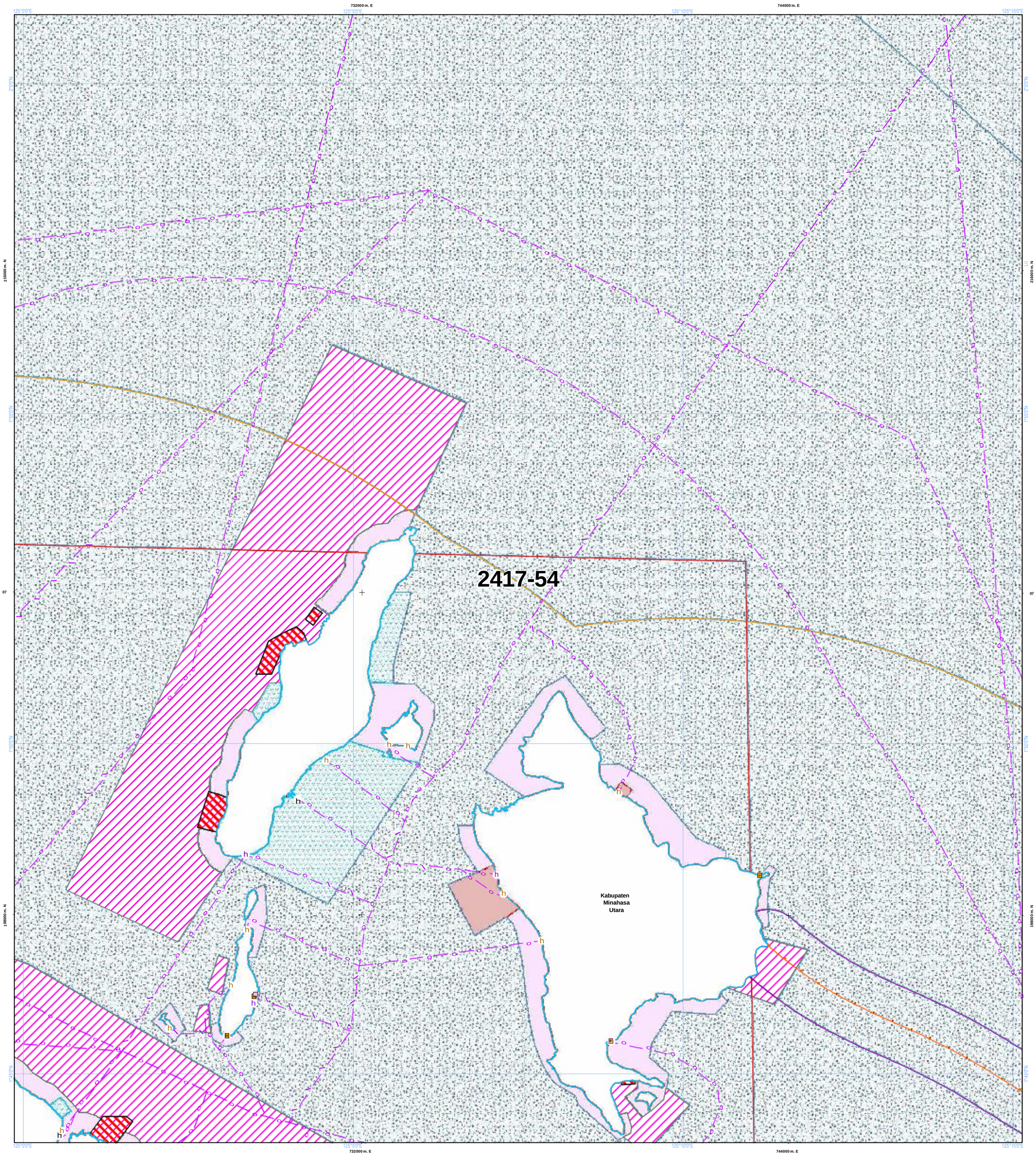

NLP : 2417-54

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

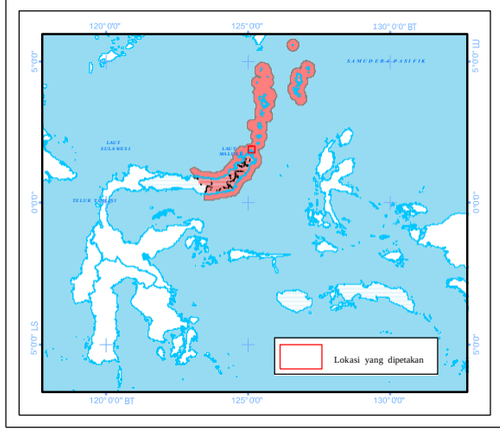

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

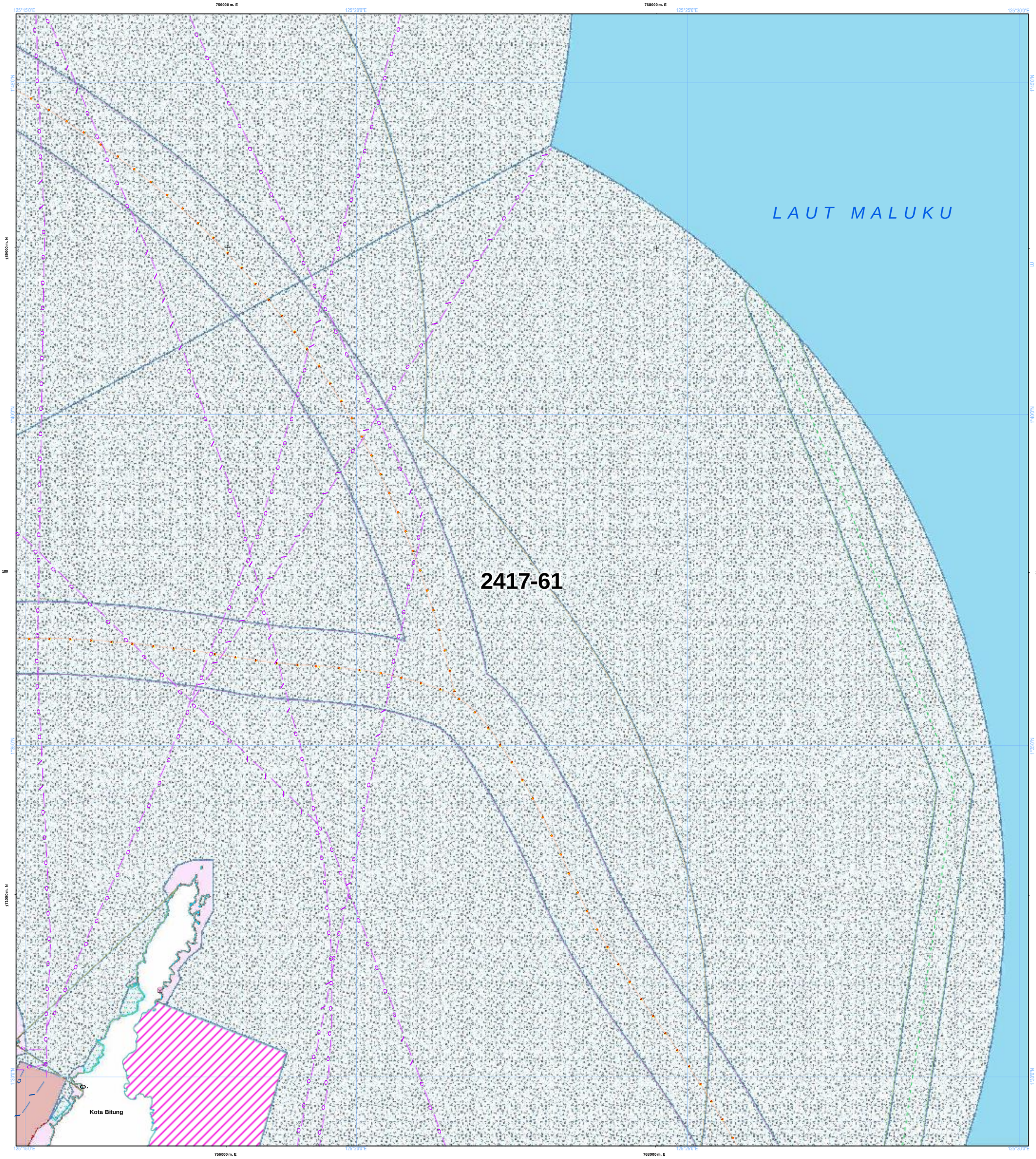

NLP : 2417-61

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

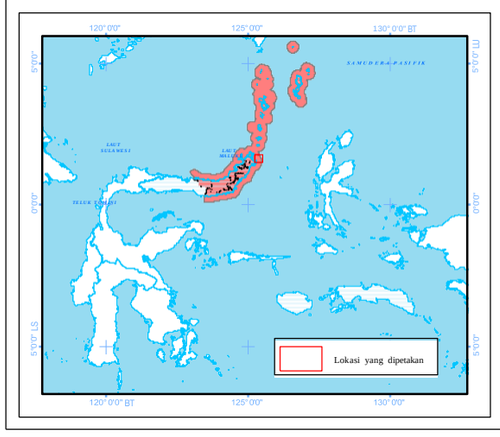

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

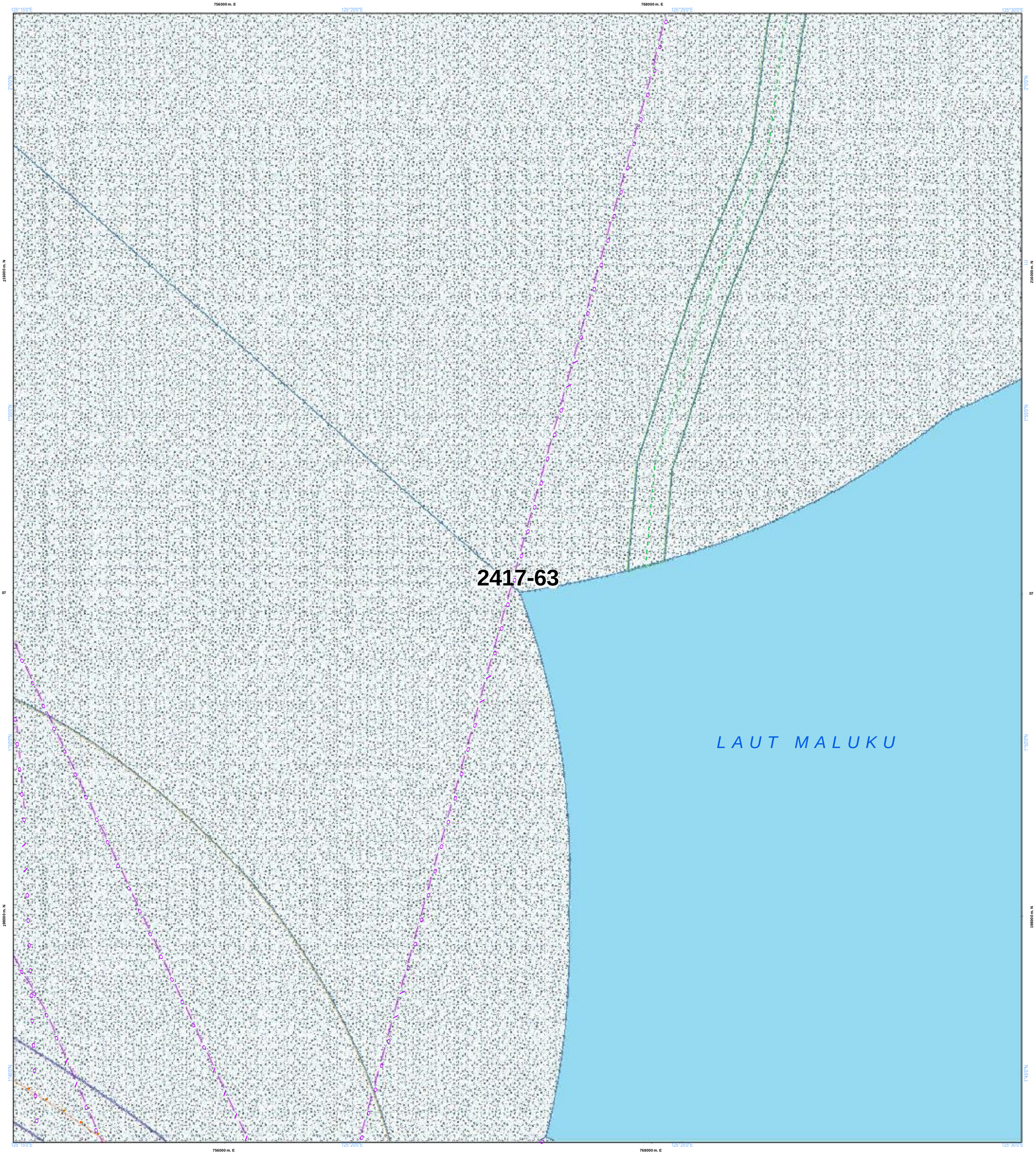

NLP : 2417-63

U SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

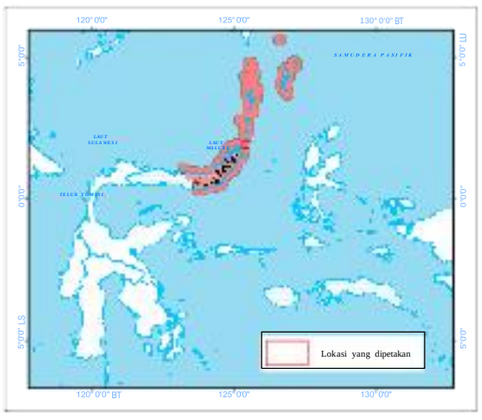

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

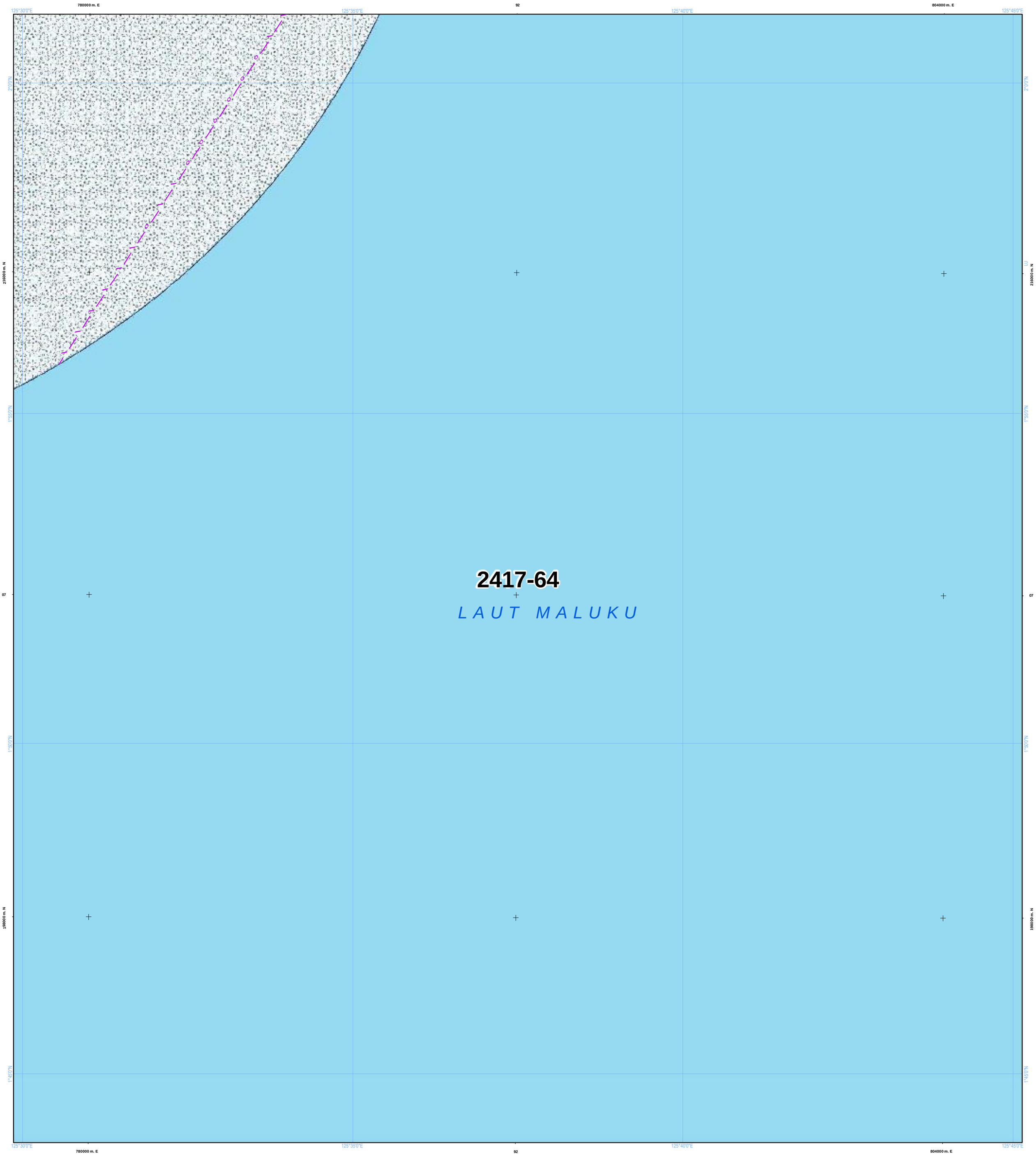

NLP : 2417-64

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

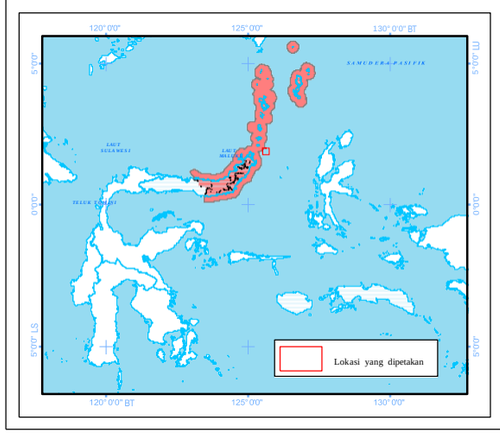

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

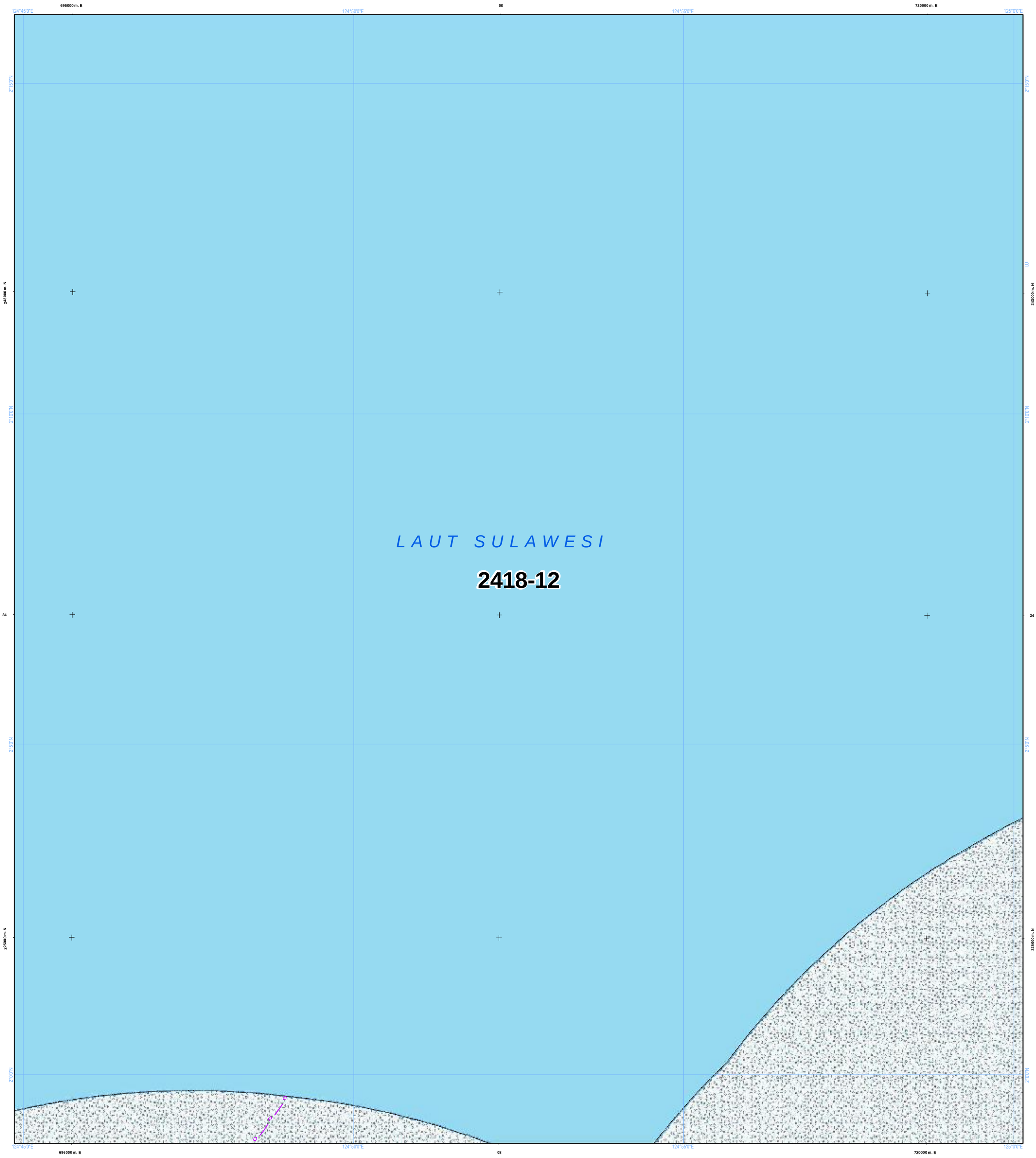

NLP : 2418-12

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

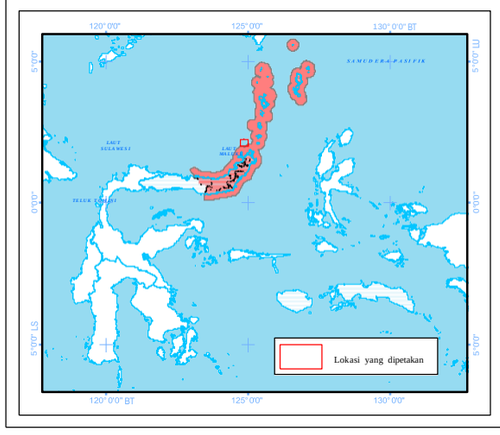

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

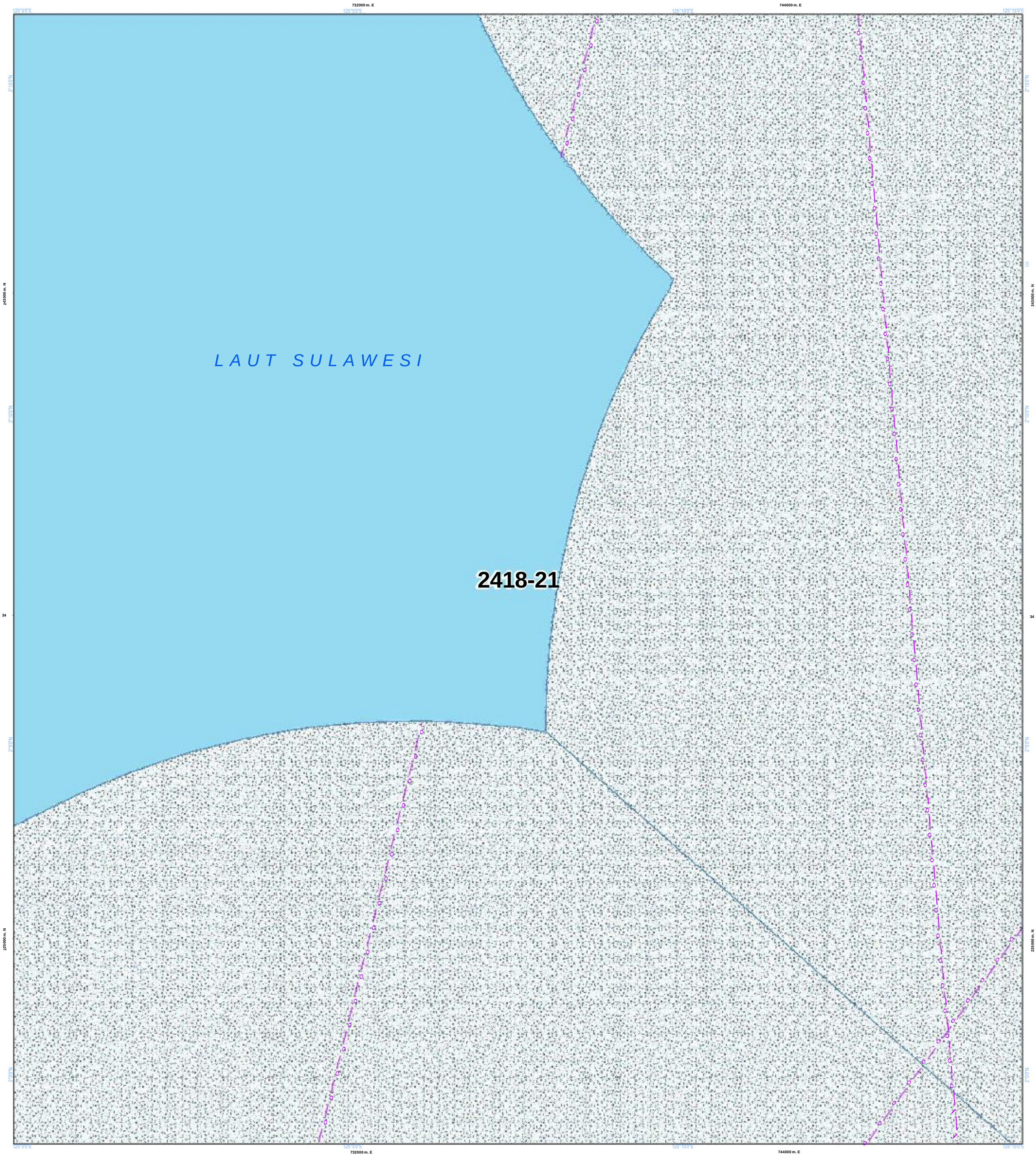

NLP : 2418-21

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

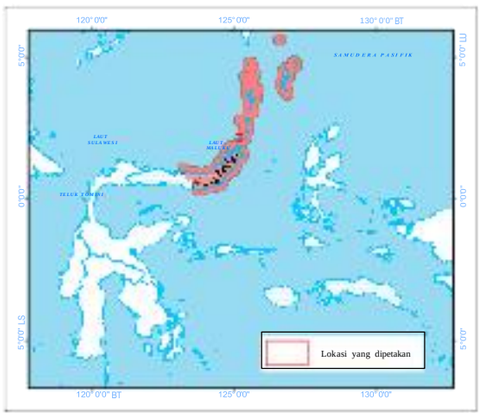

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- K Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

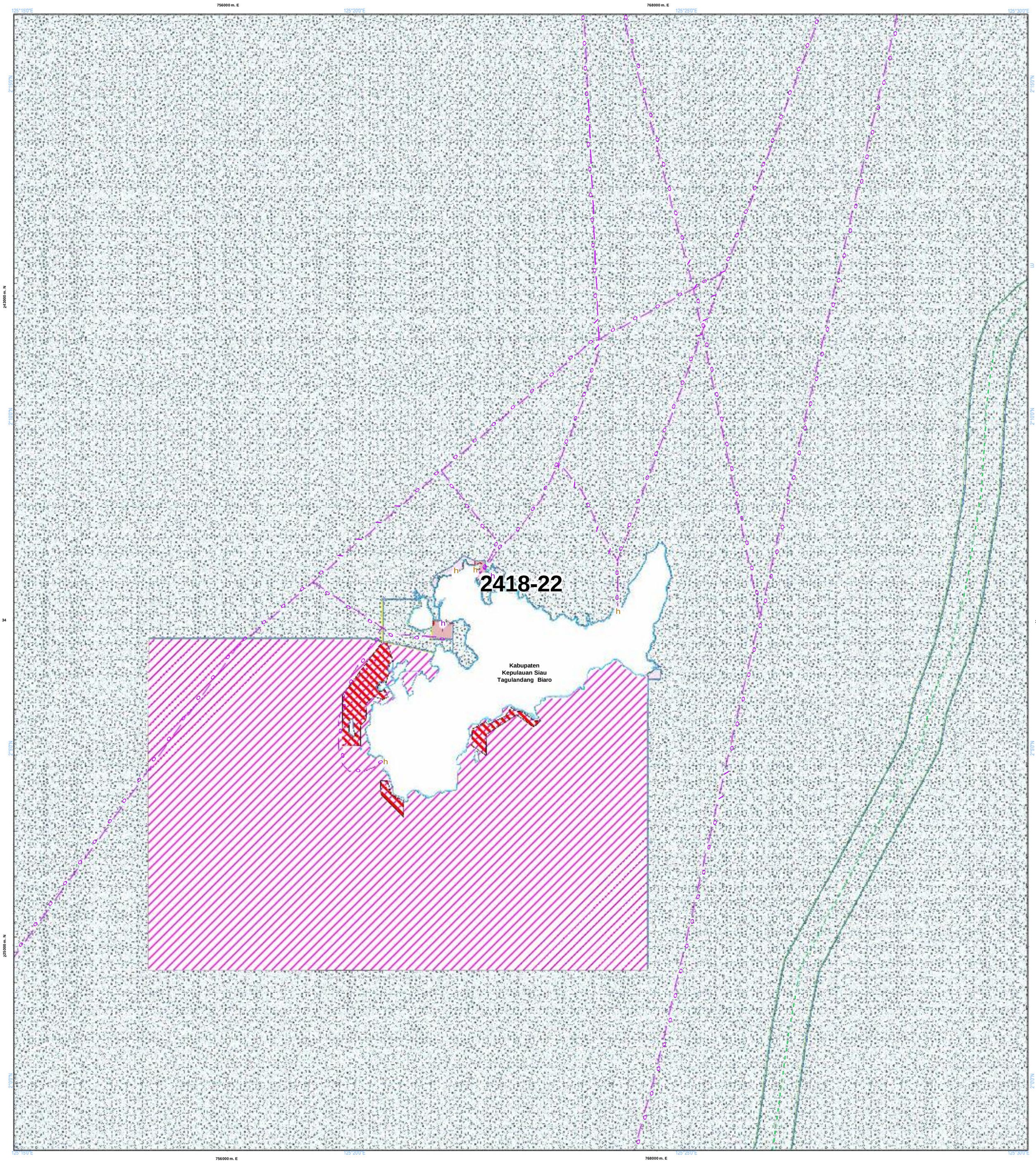

NLP : 2418-22

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

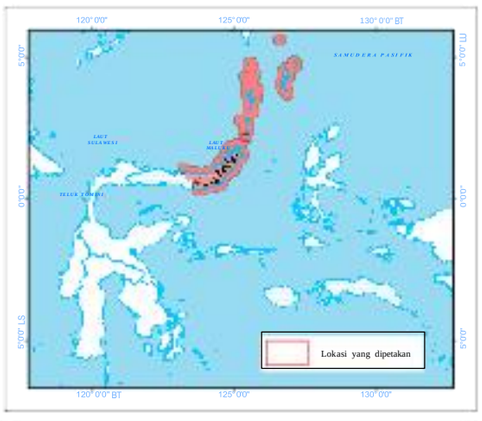

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

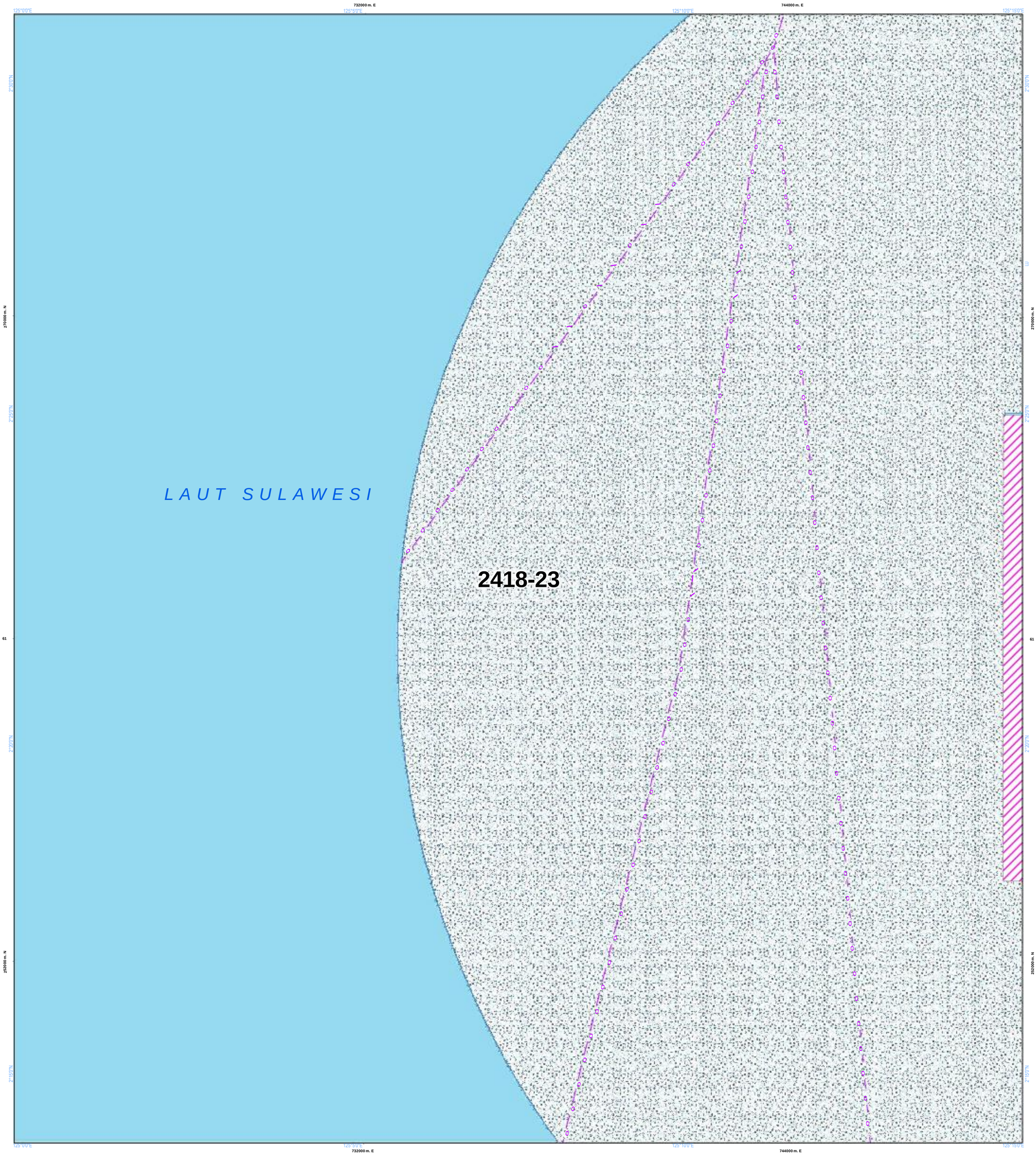

NLP : 2418-23

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

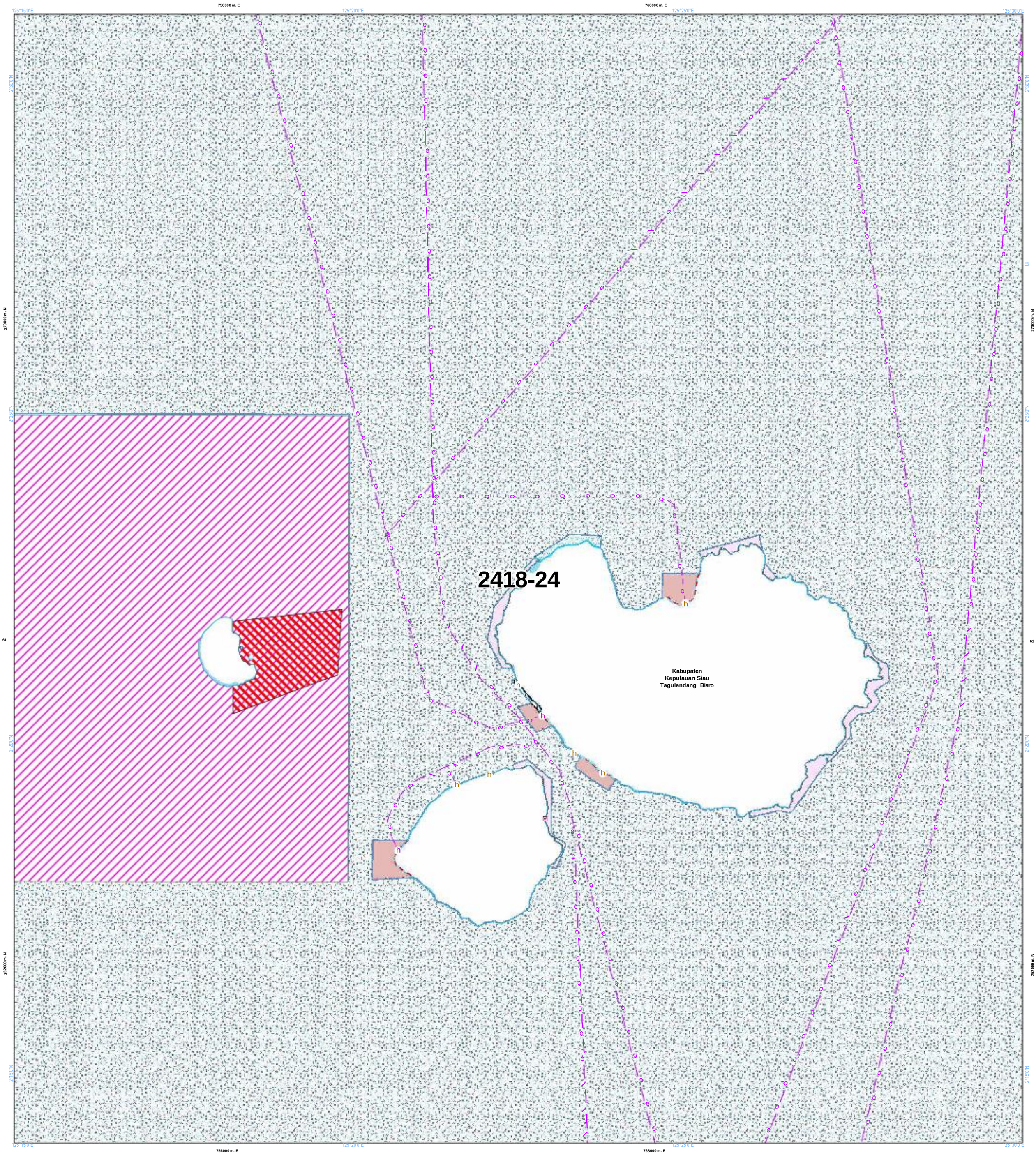

NLP : 2418-24

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

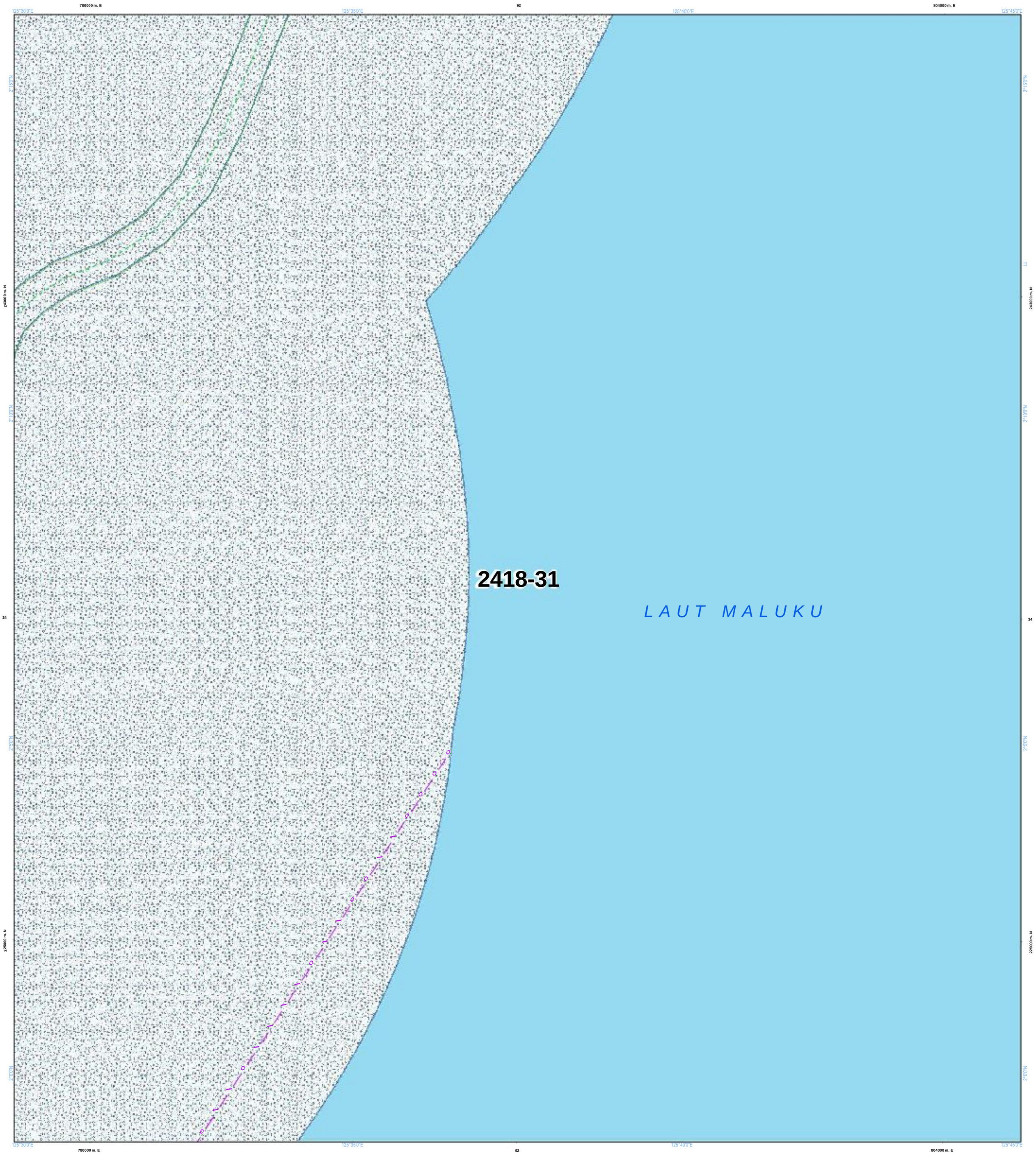

NLP : 2418-31

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

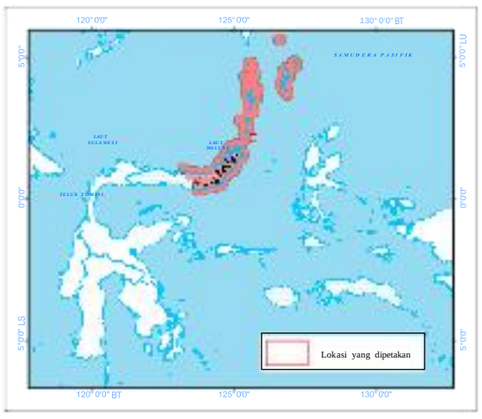

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

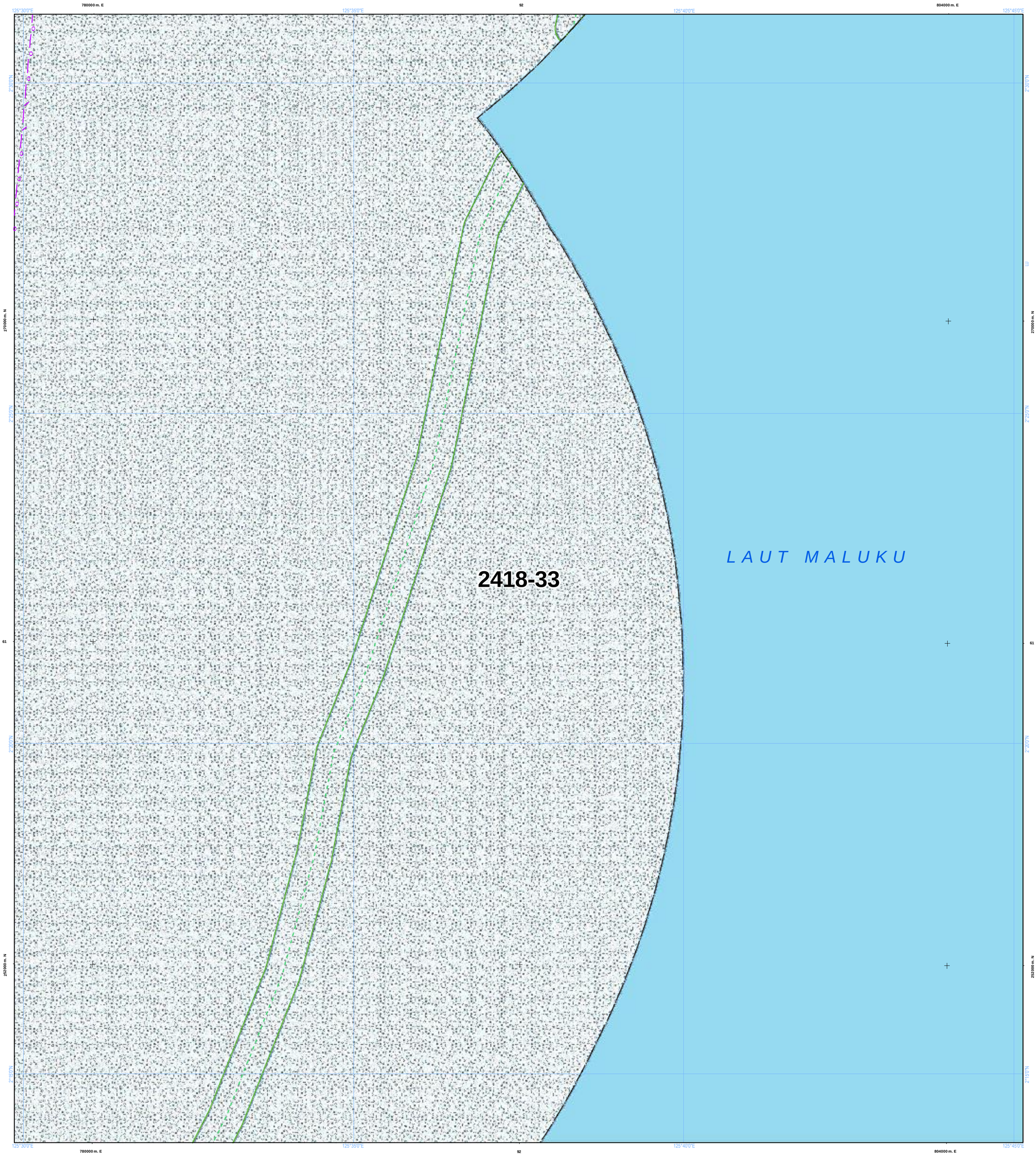

NLP : 2418-33

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

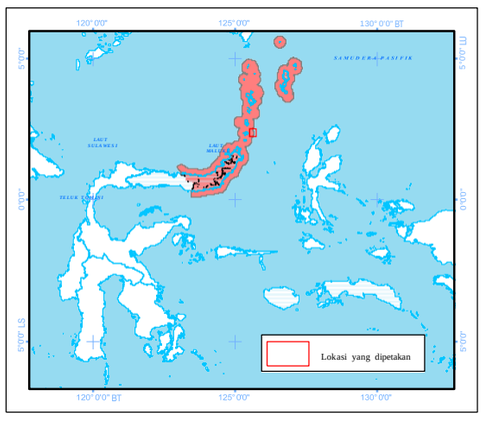

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

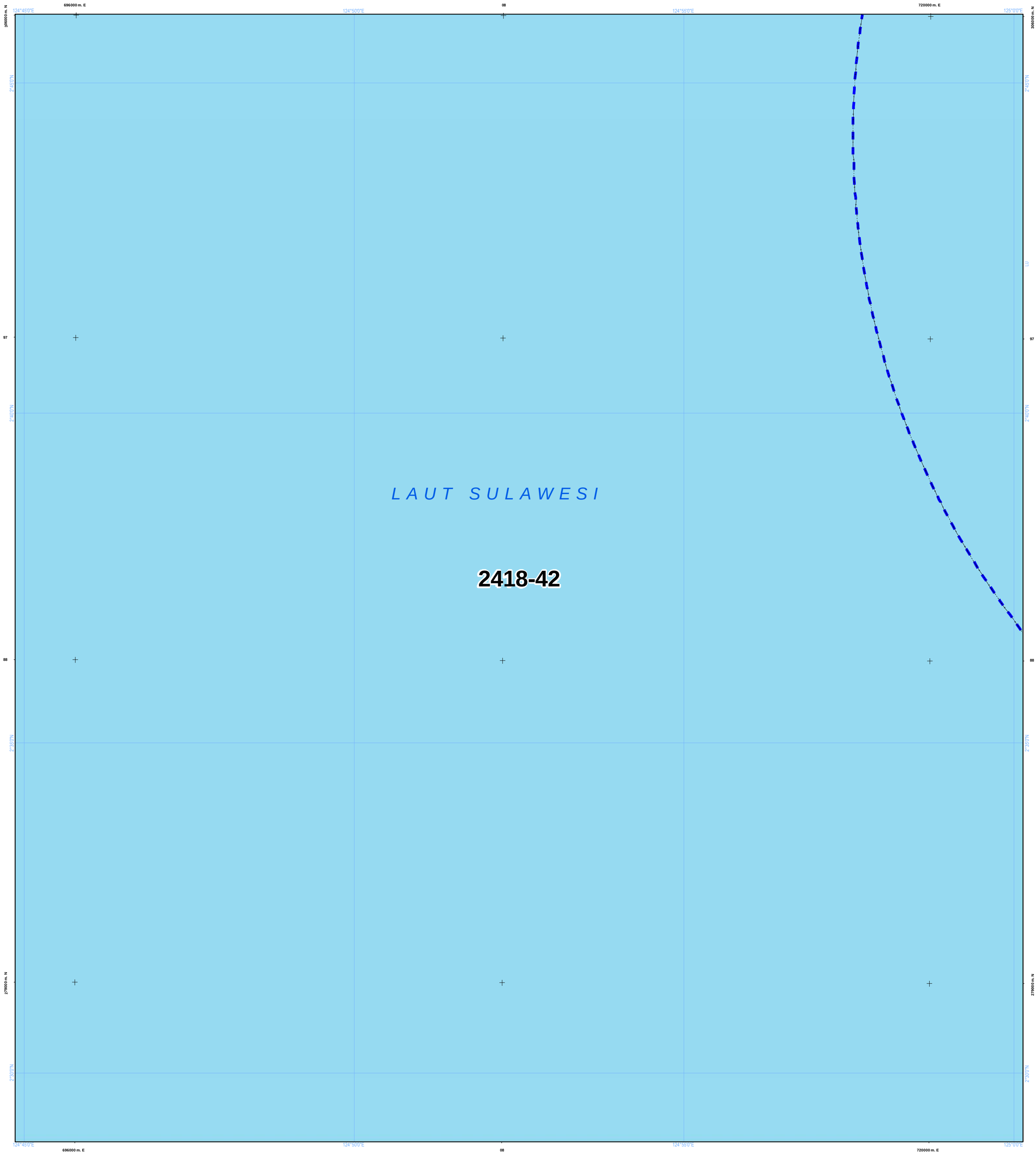

NLP : 2418-42

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

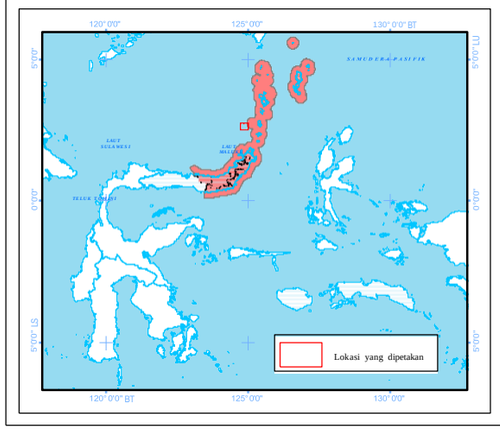

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

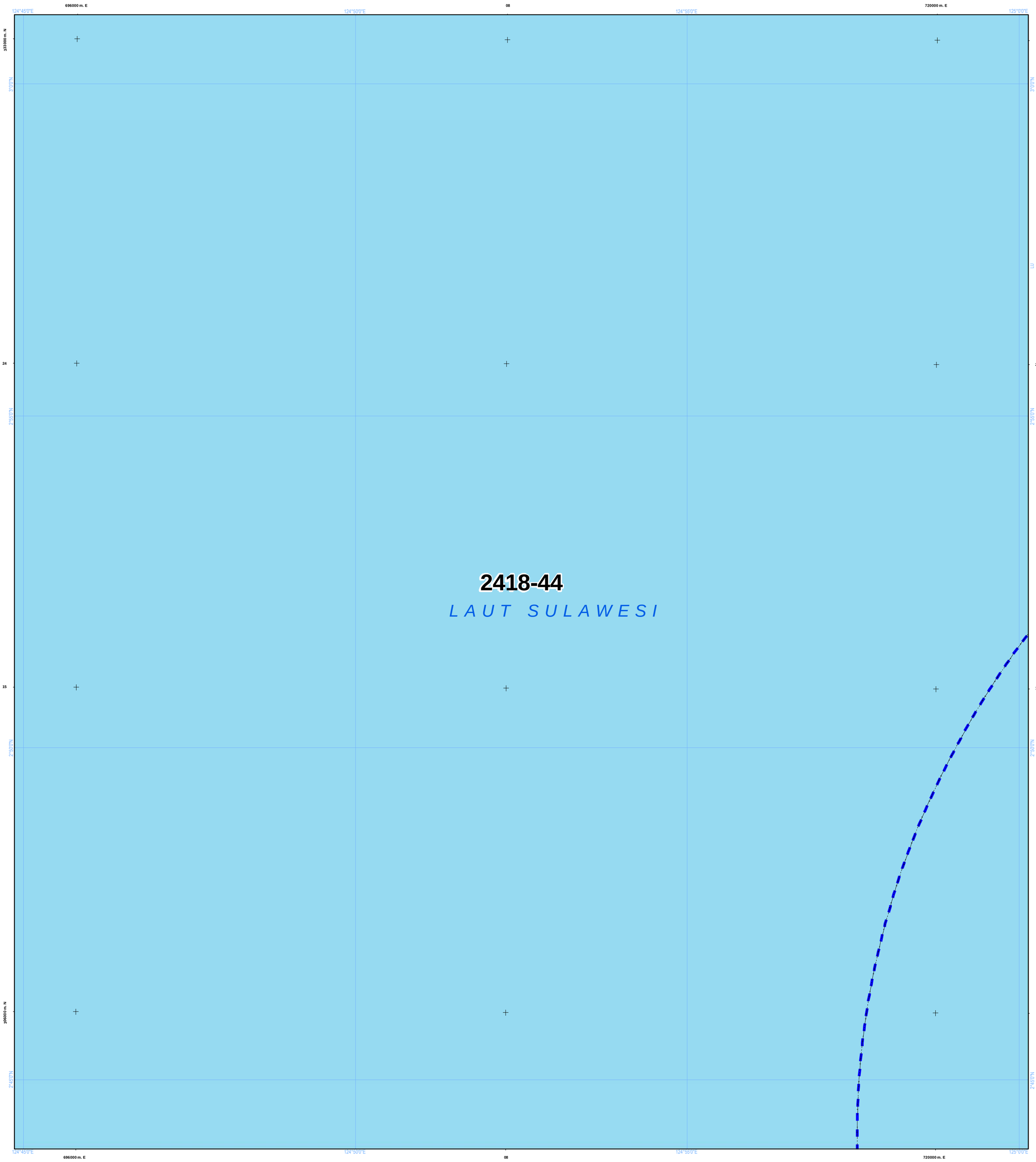

NLP : 2418-44

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

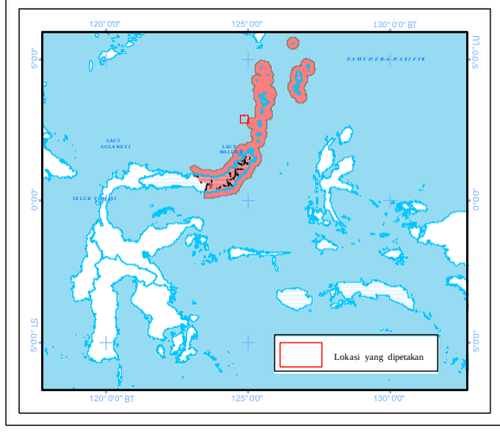

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

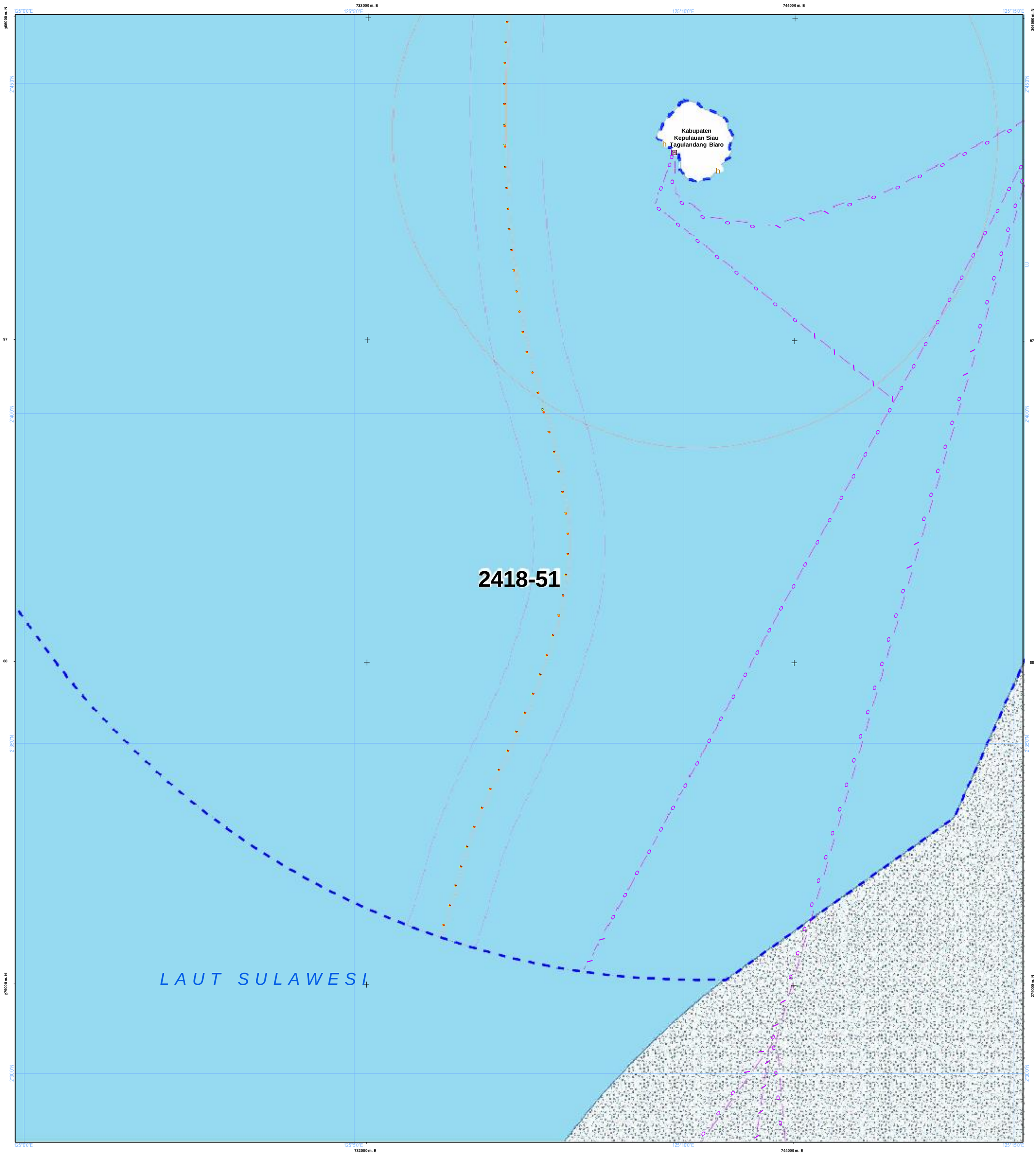

NLP : 2418-51

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

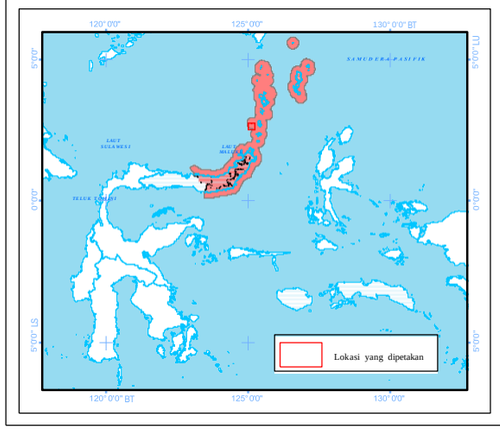

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

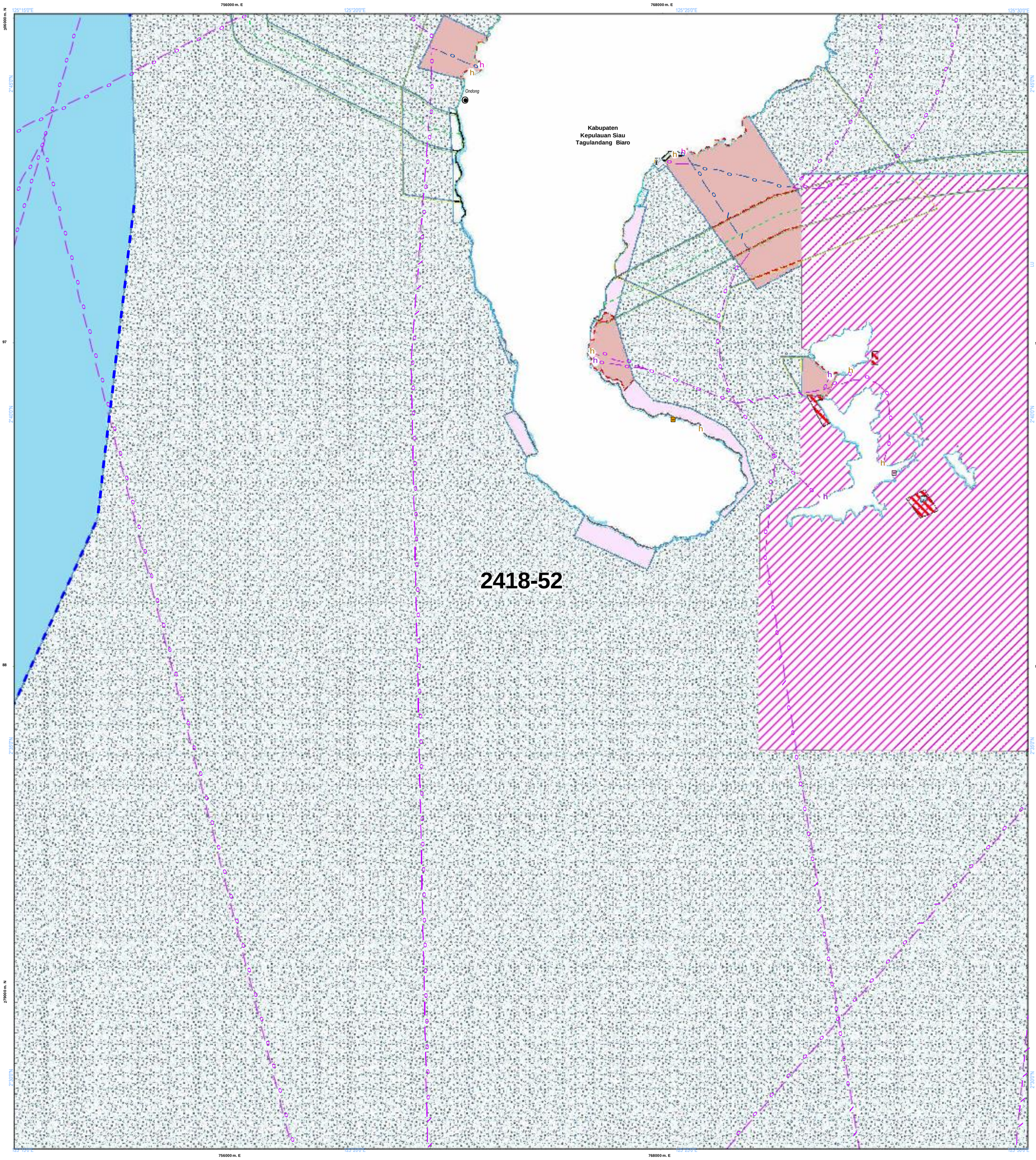

NLP : 2418-52

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

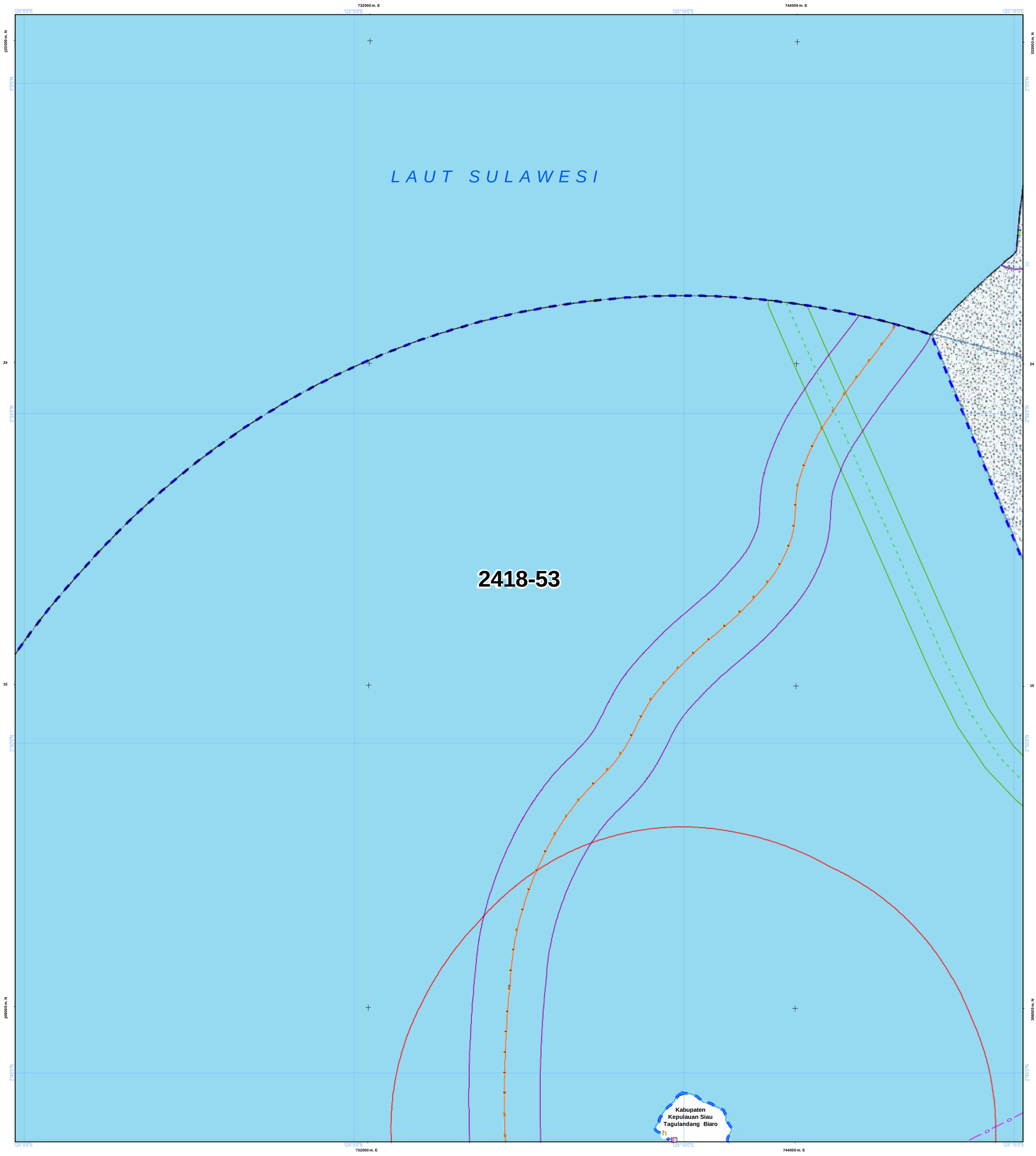

NLP : 2418-53

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

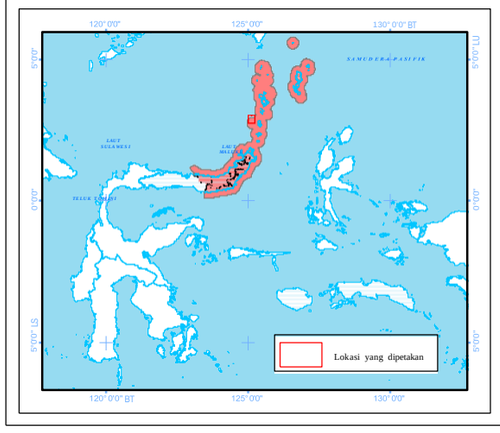

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

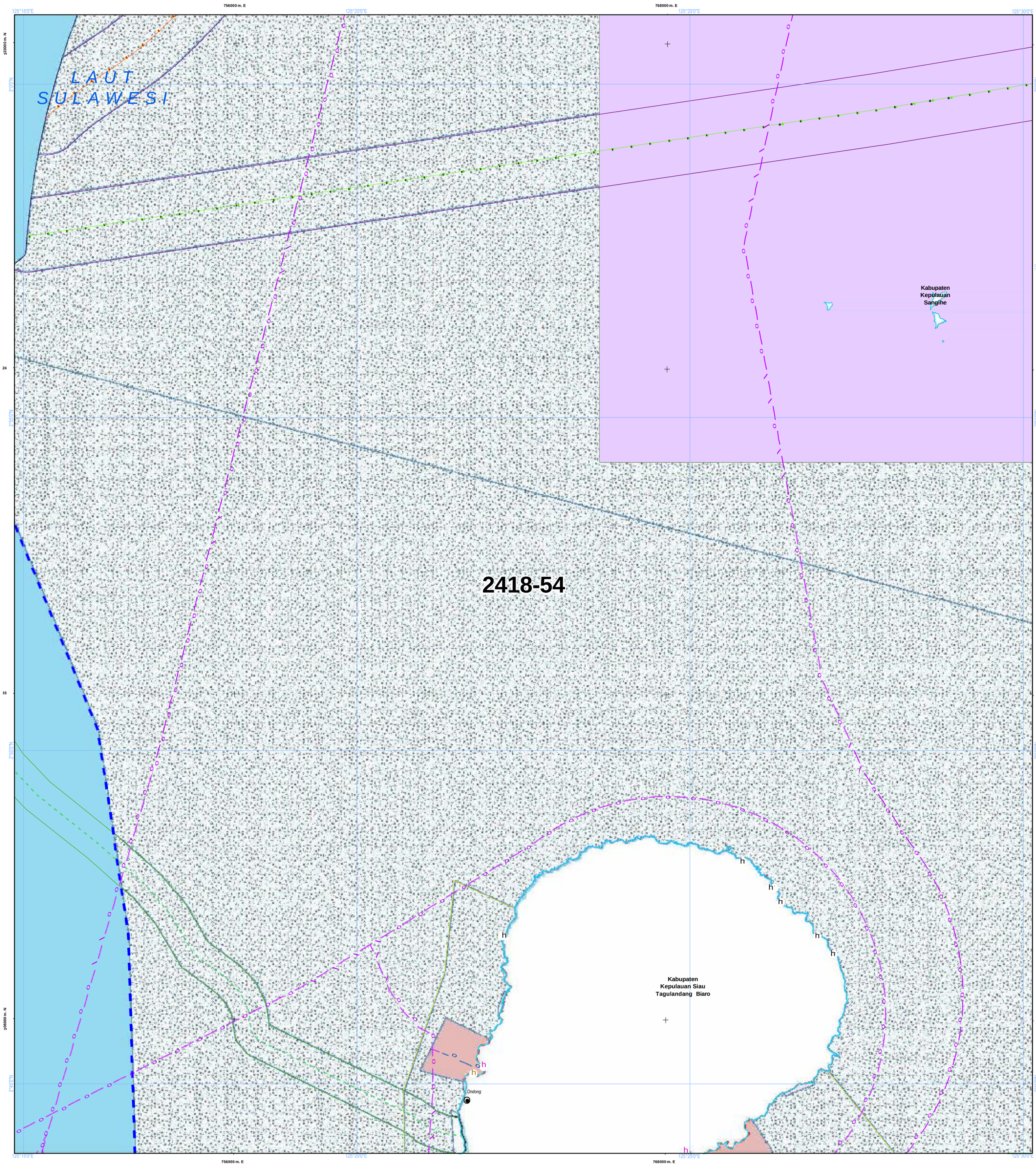

NLP : 2418-54

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

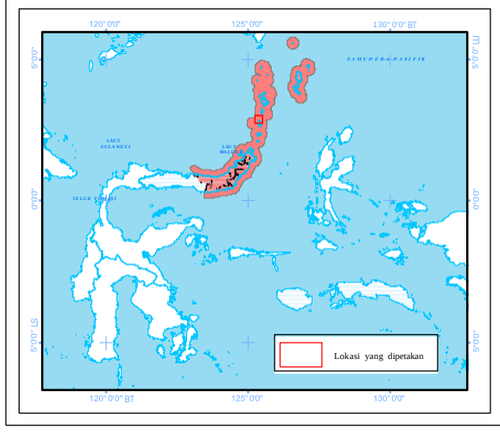

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

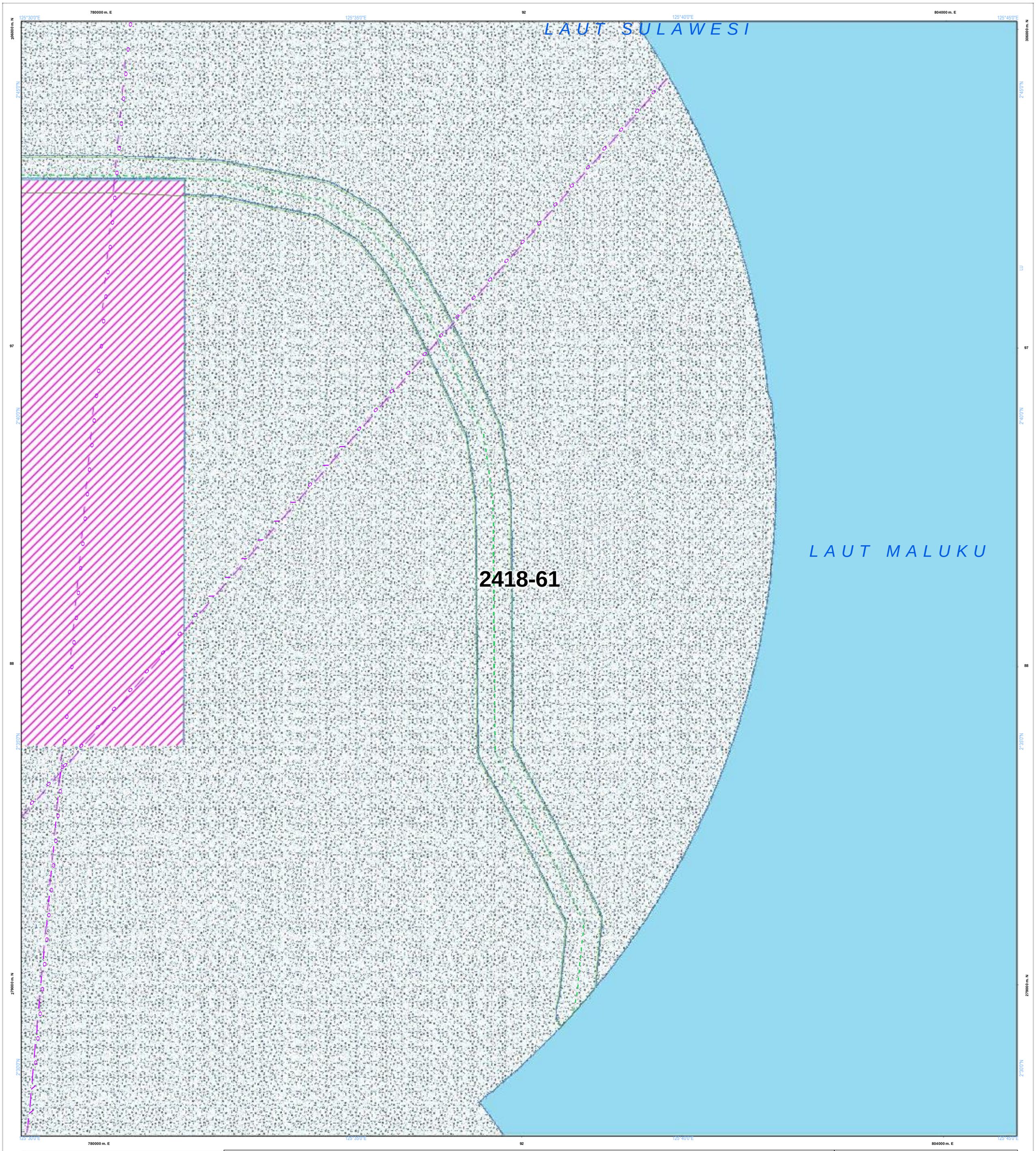

NLP : 2418-61

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

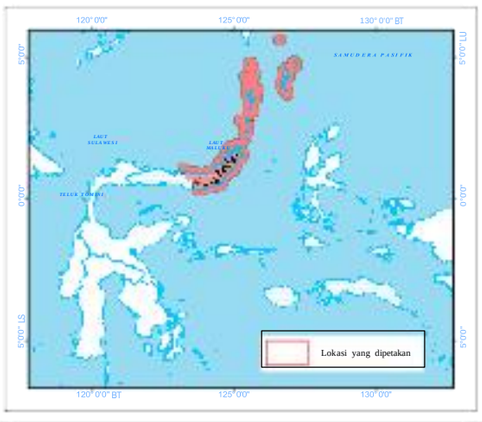

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

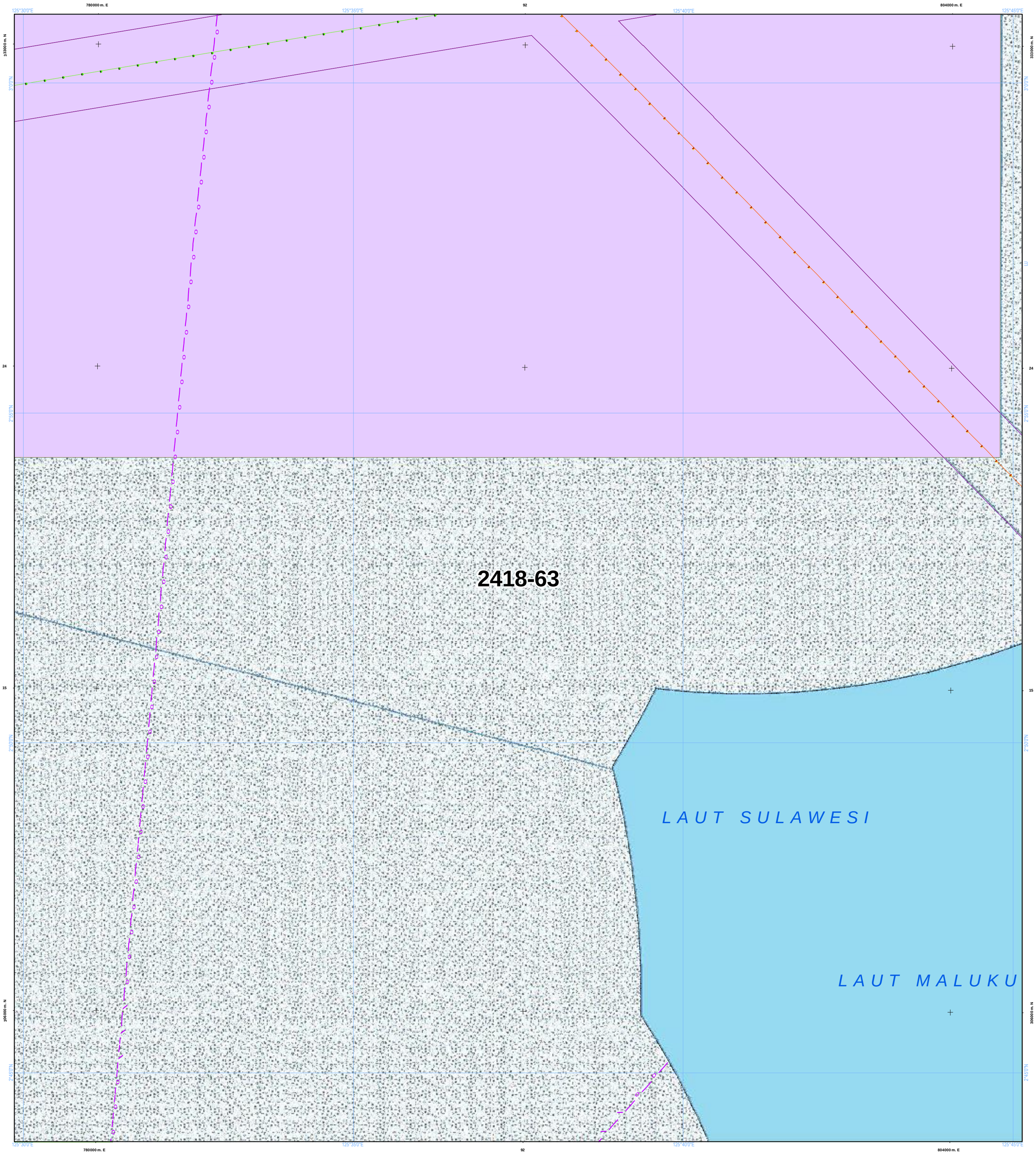

NLP : 2418-63

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

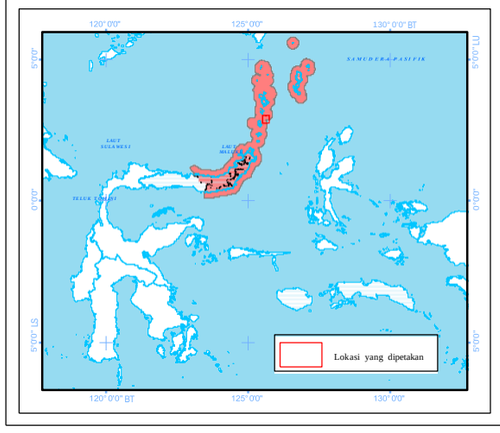

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

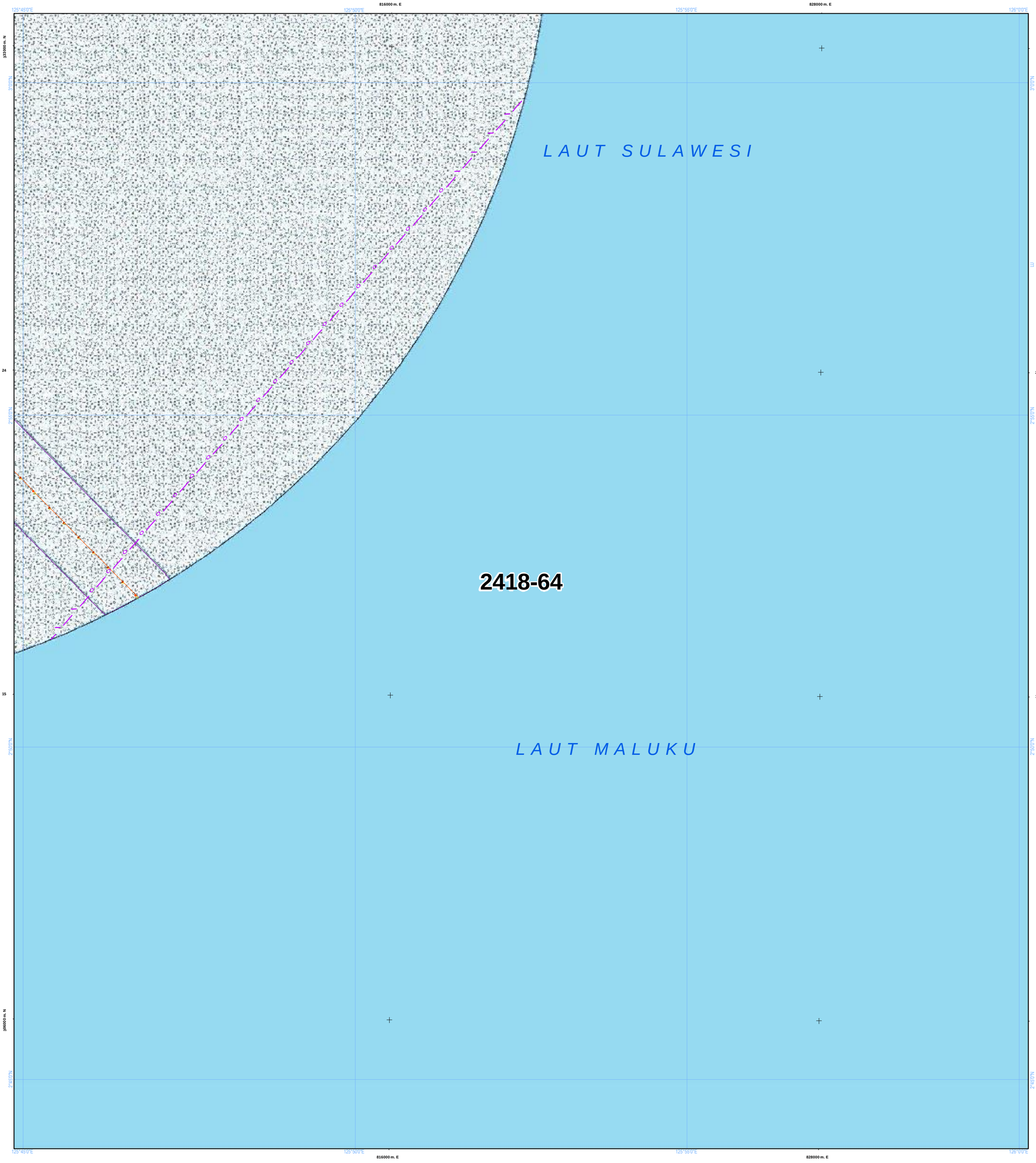

NLP : 2418-64

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

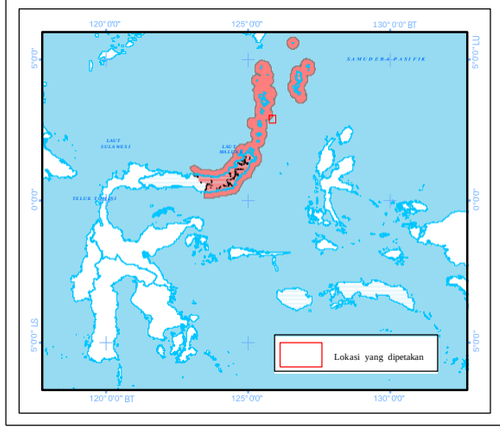

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

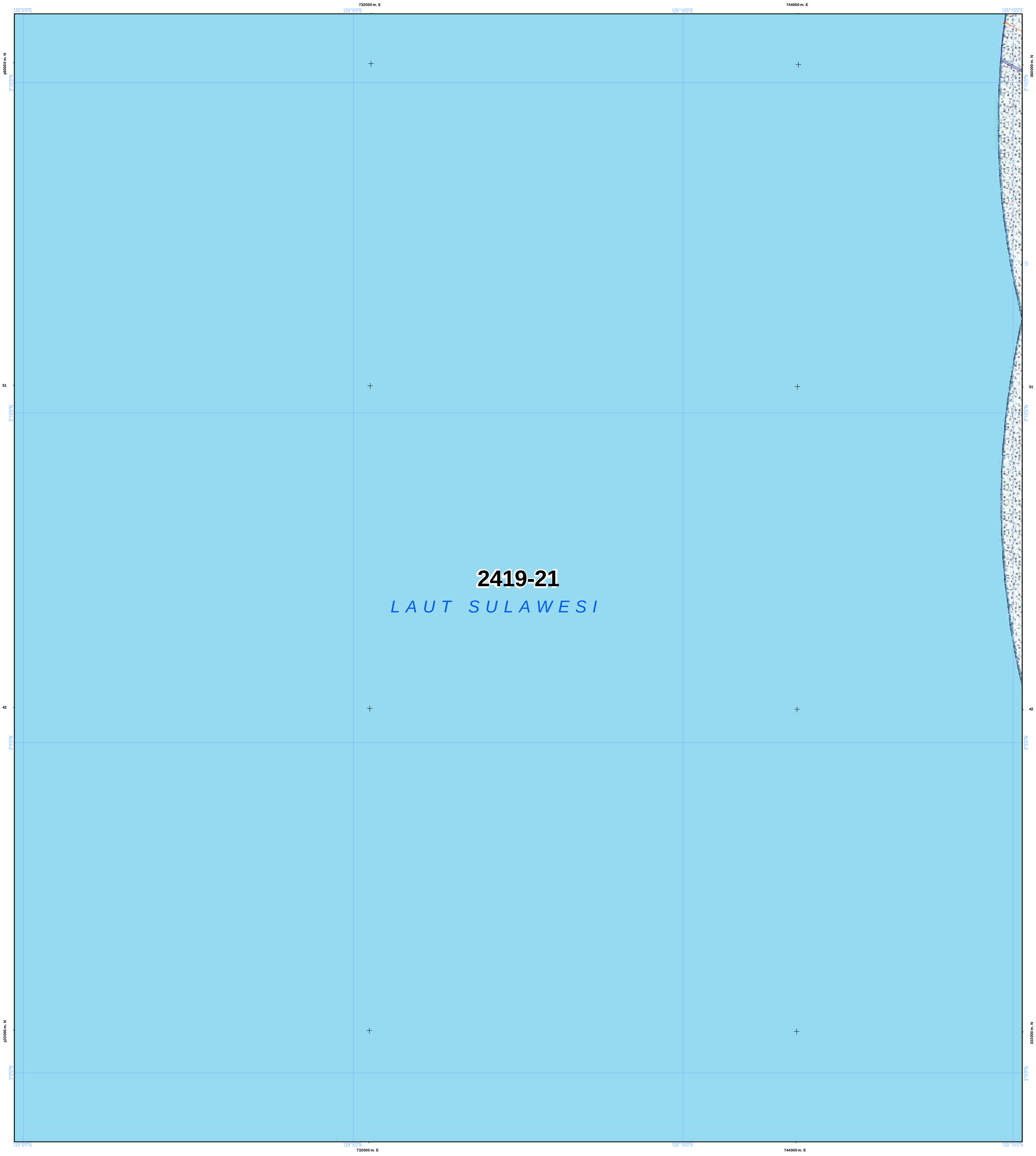

NLP : 2419-21

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

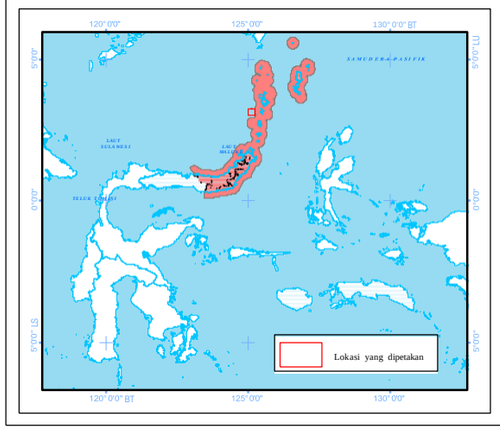

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

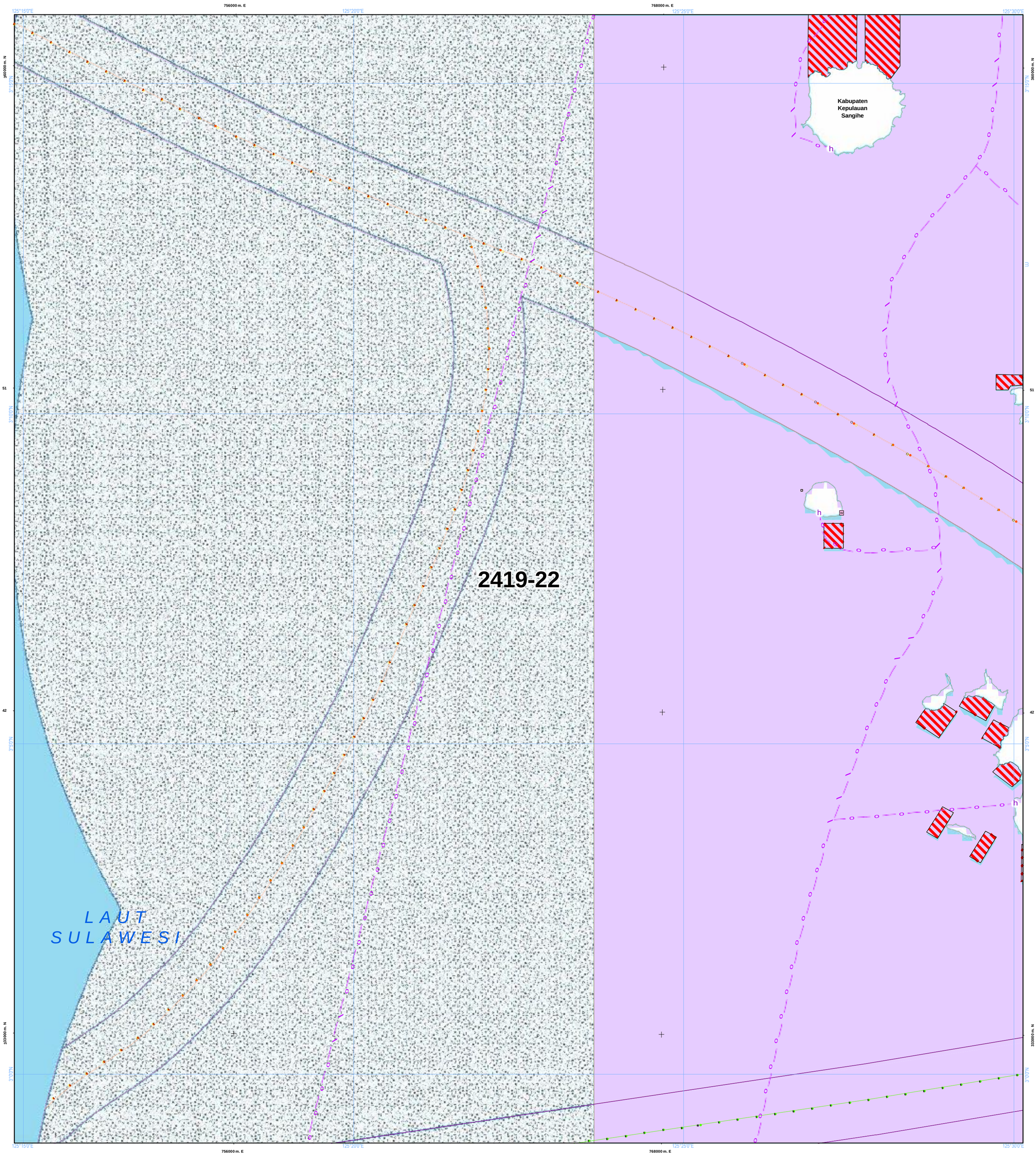

NLP : 2419-22

U SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

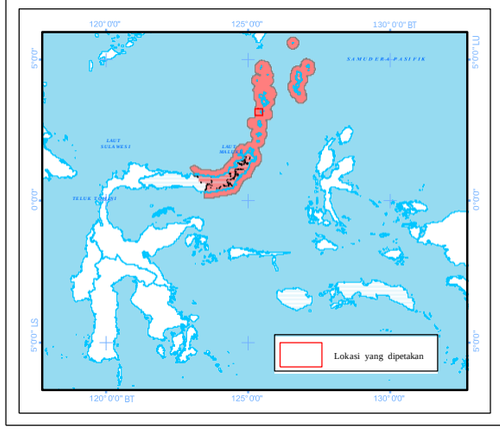

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT
Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT
Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN
Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

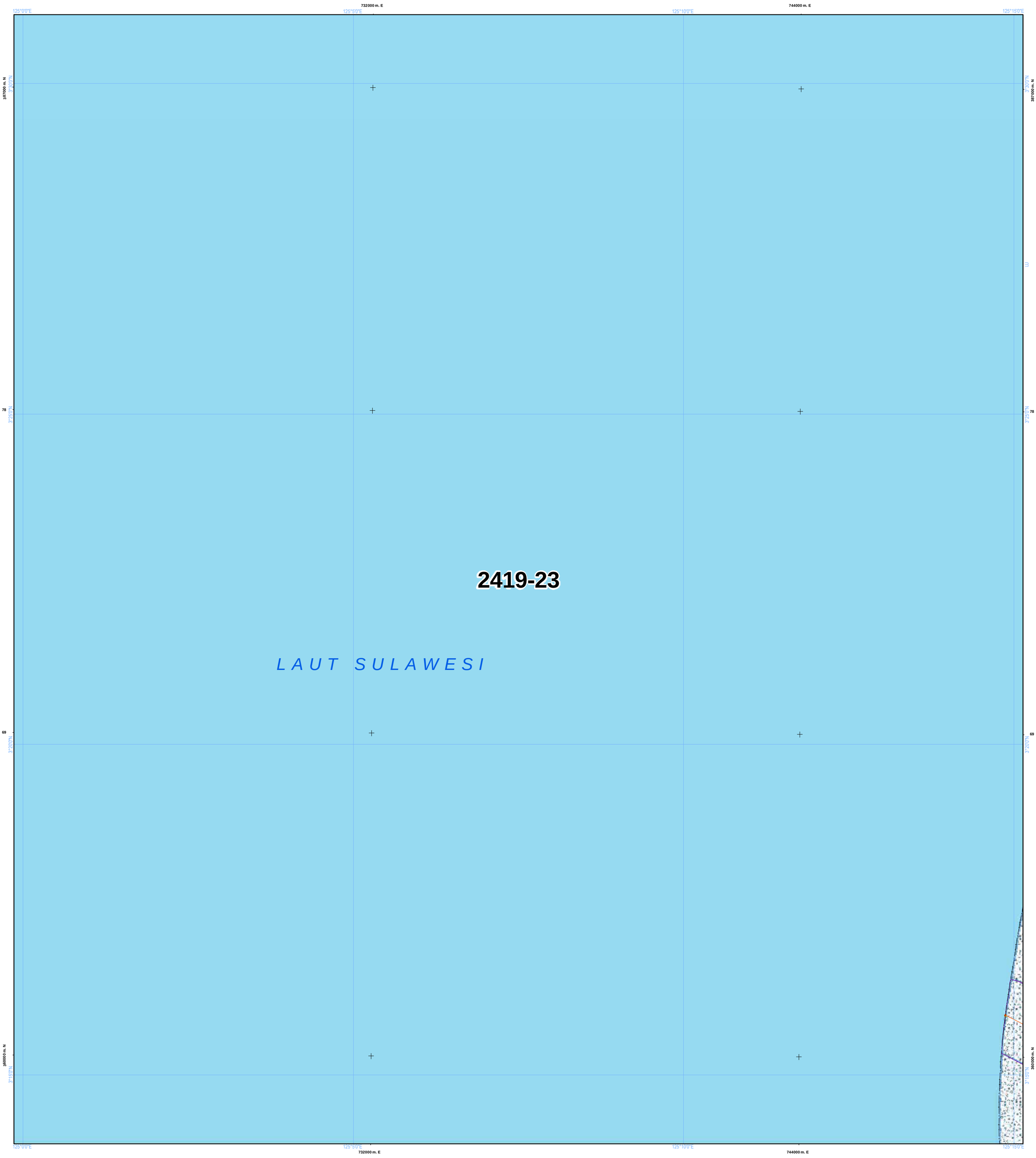

NLP : 2419-23

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

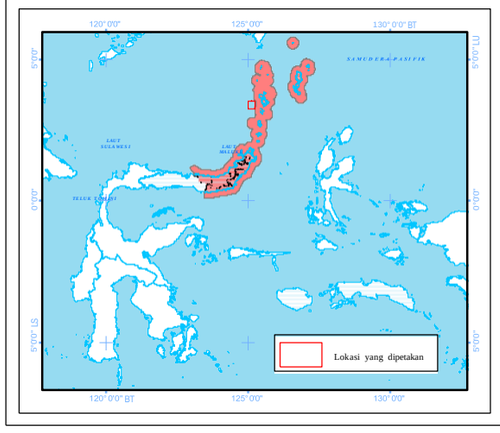

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

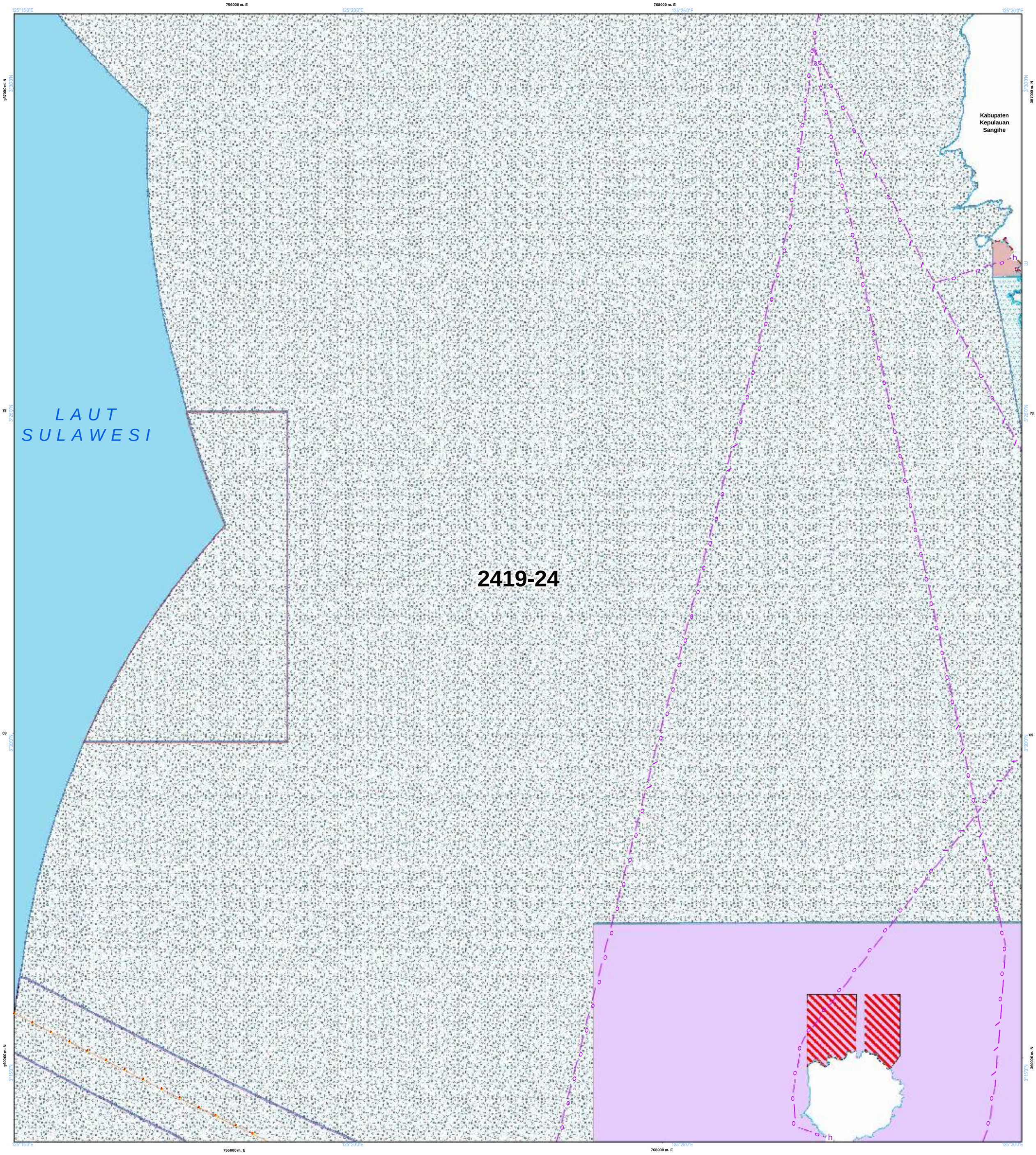

NLP : 2419-24

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

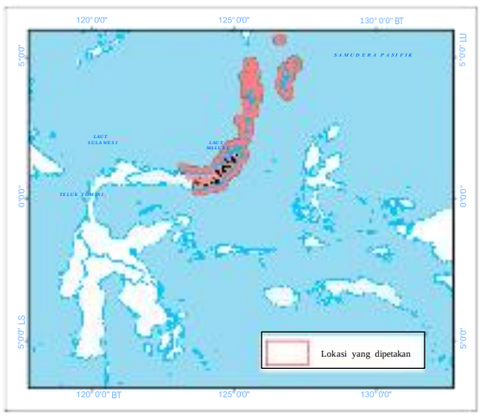

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

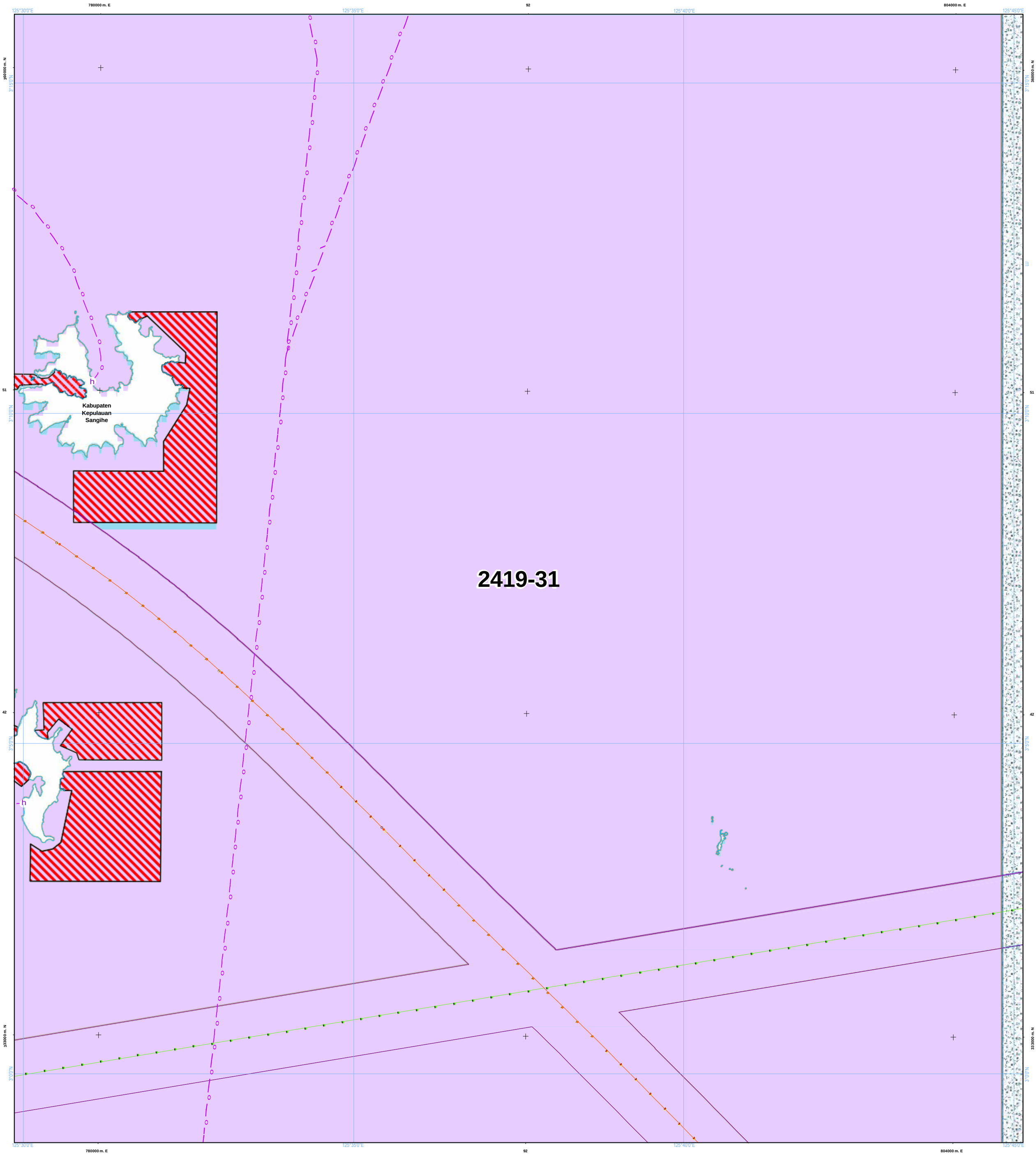

NLP : 2419-31

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

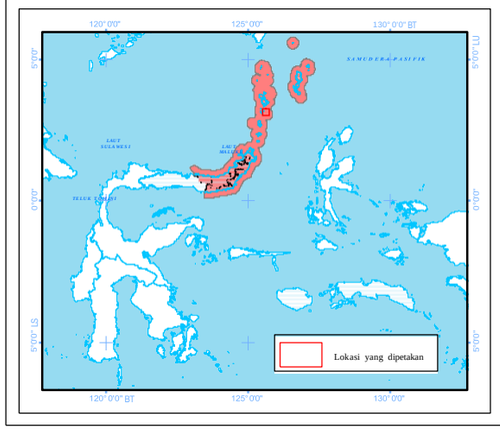

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

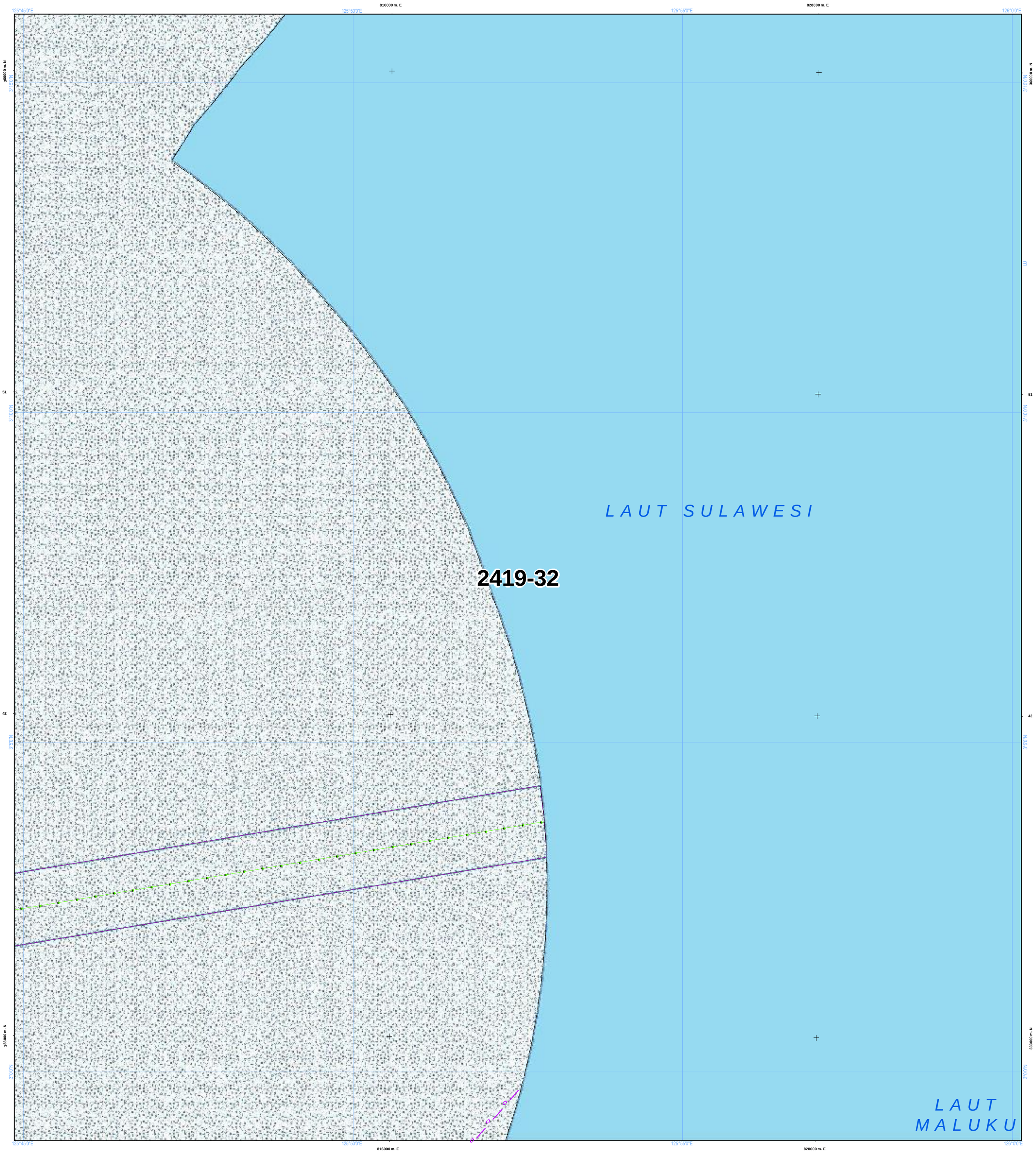

NLP : 2419-32

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

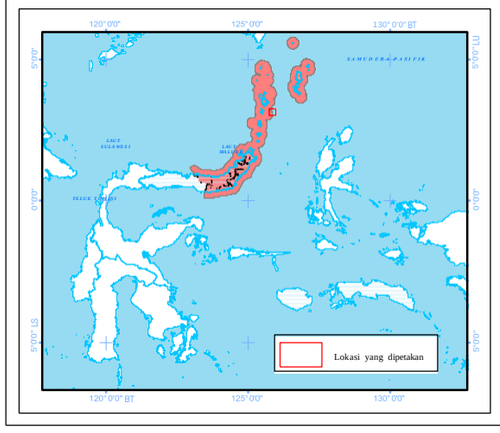

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

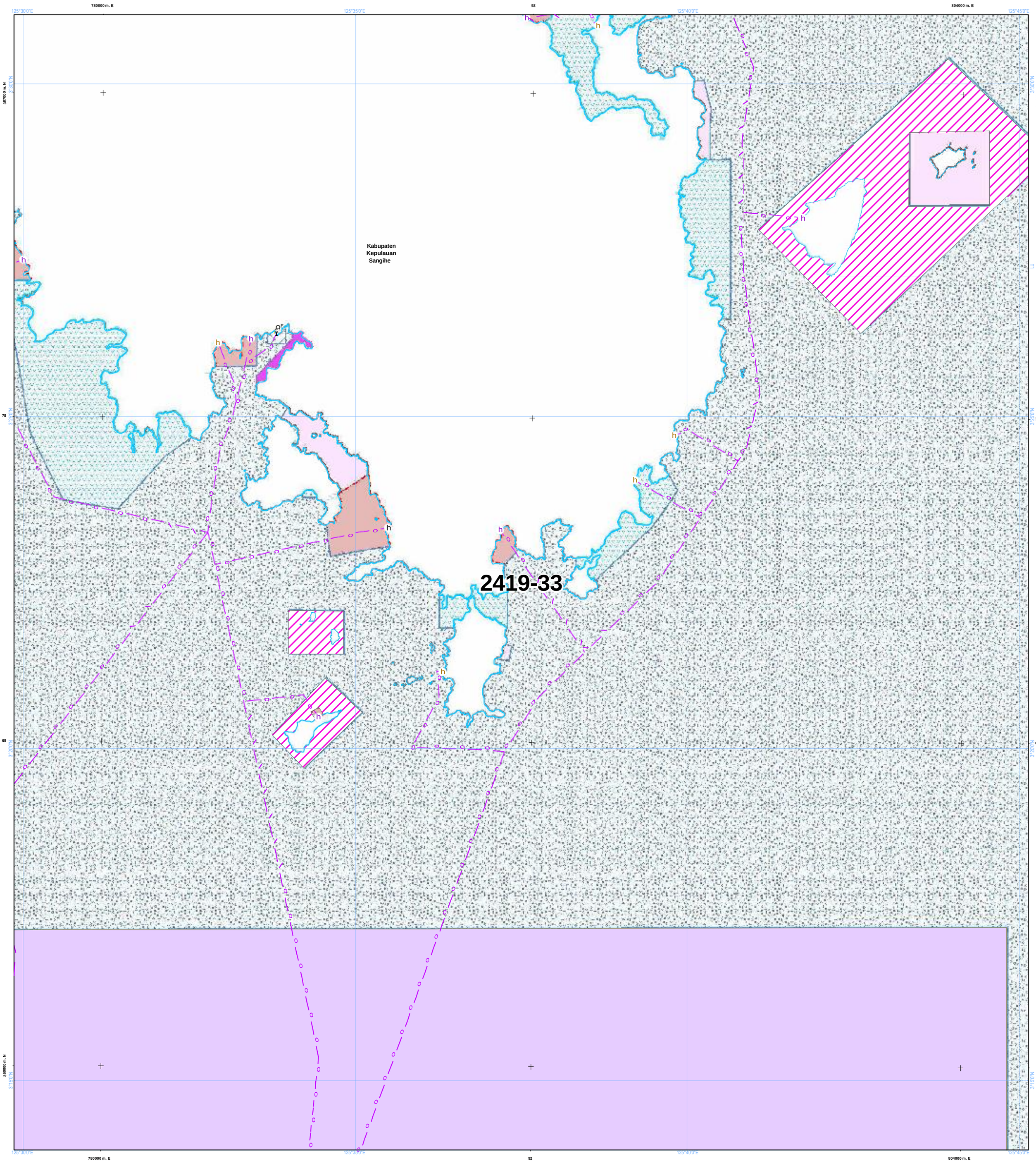

NLP : 2419-33

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

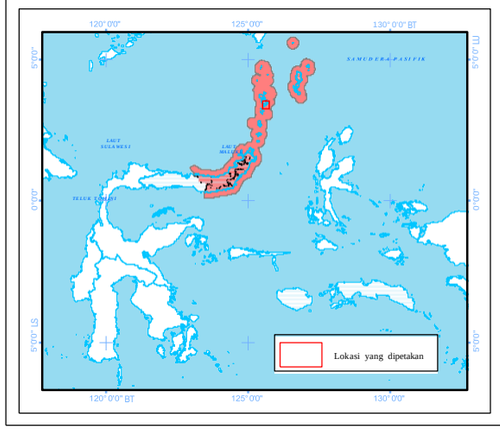

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

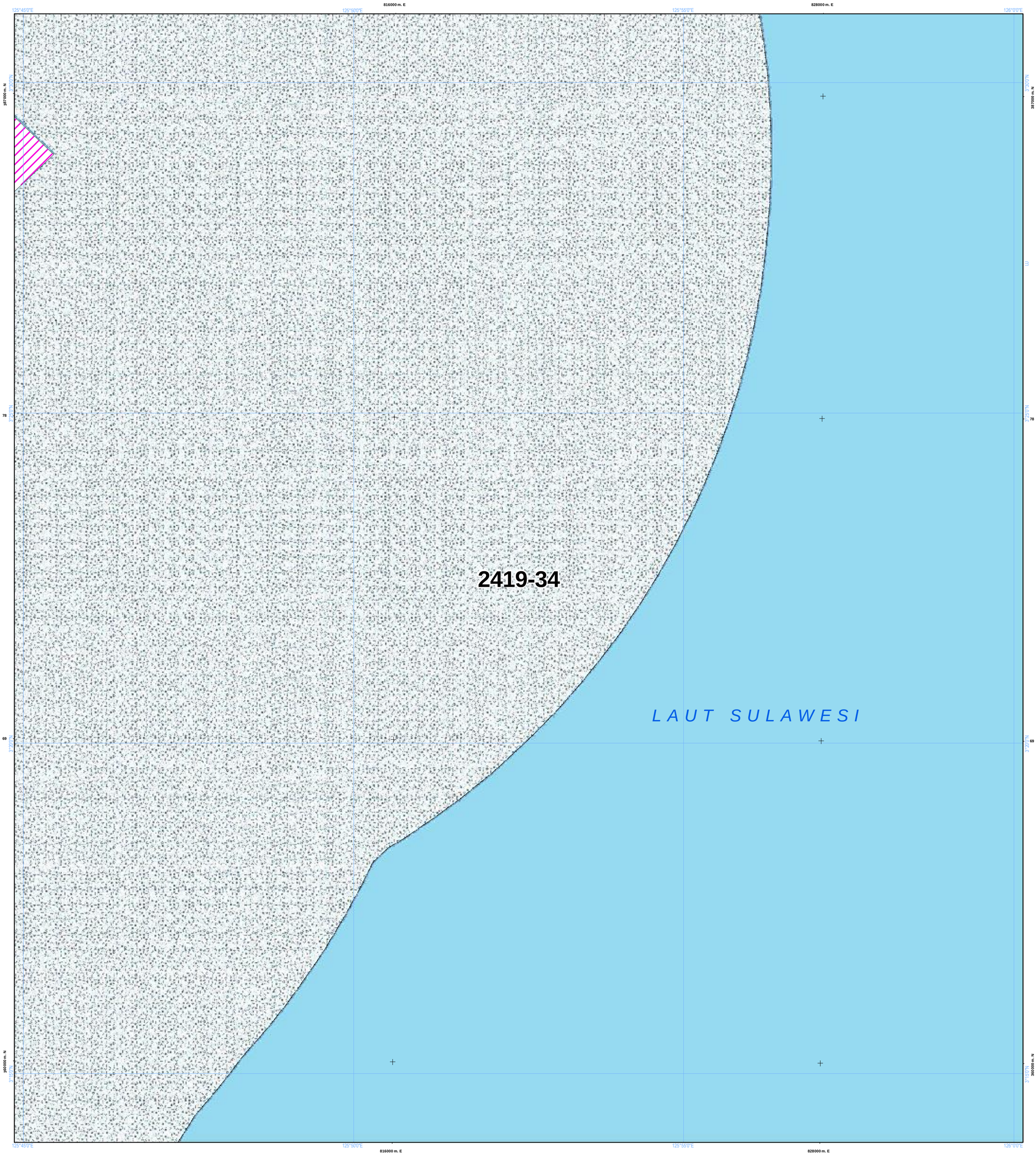

NLP : 2419-34

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

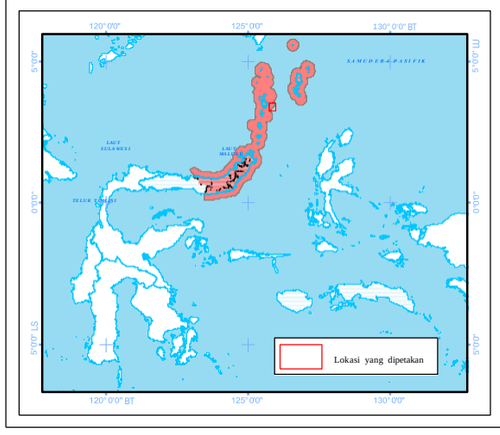

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

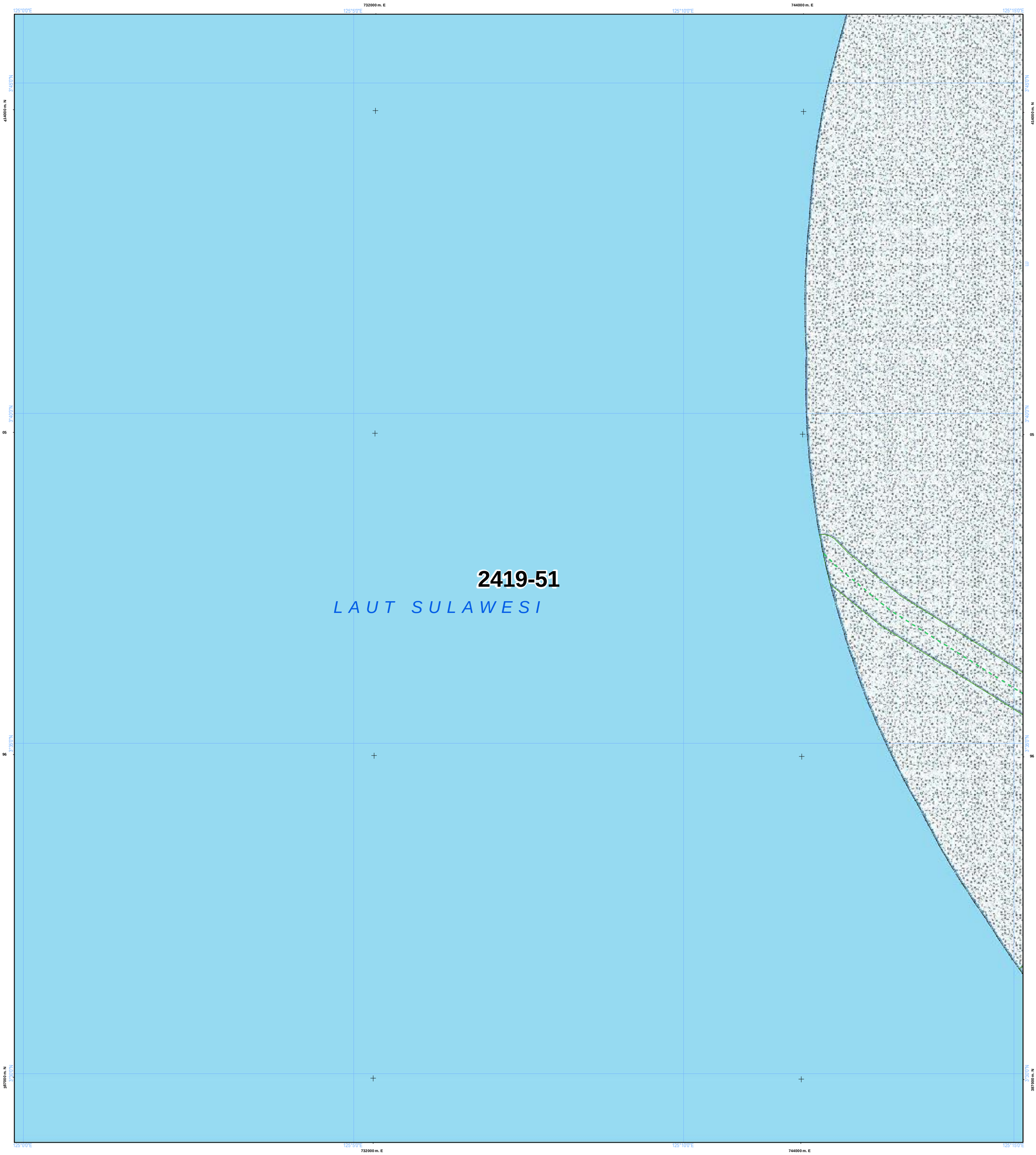

NLP : 2419-51

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

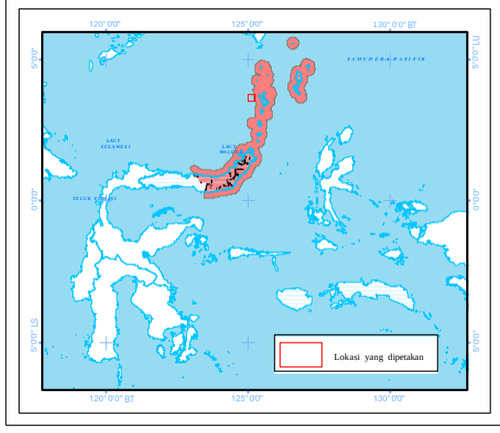

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

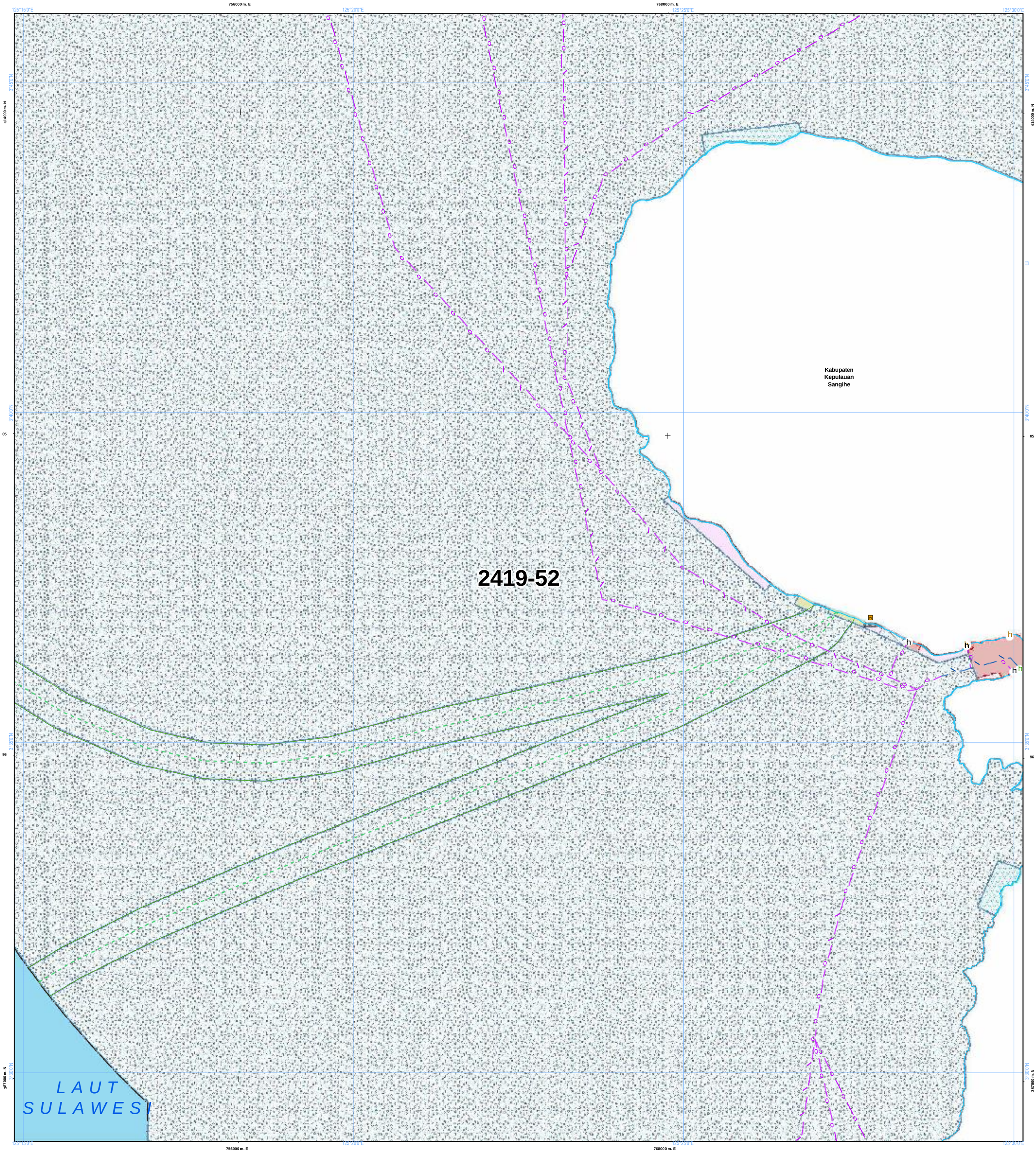

NLP : 2419-52

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

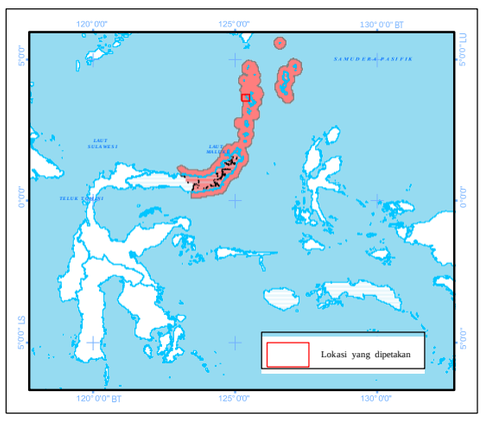

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

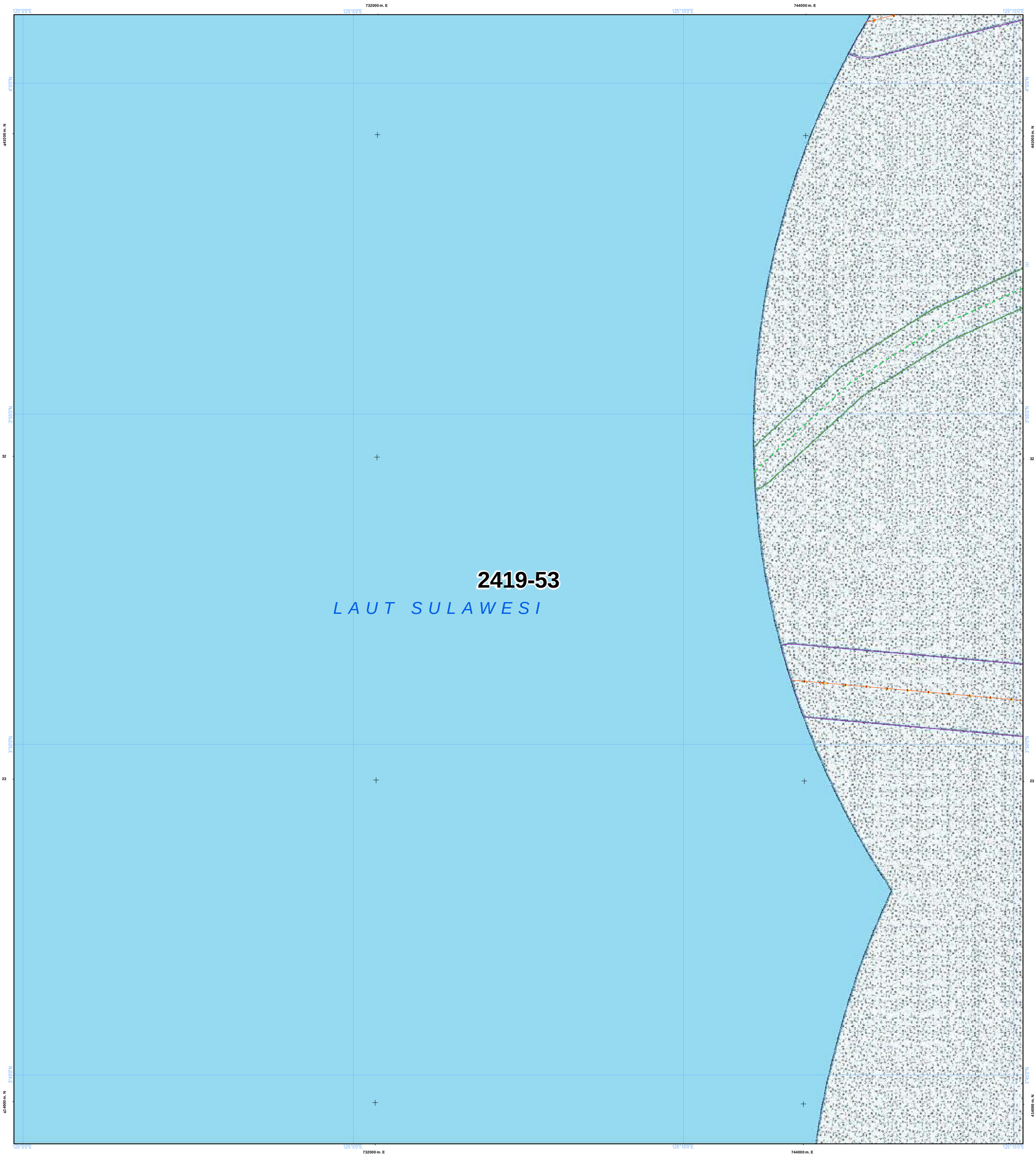

NLP : 2419-53

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

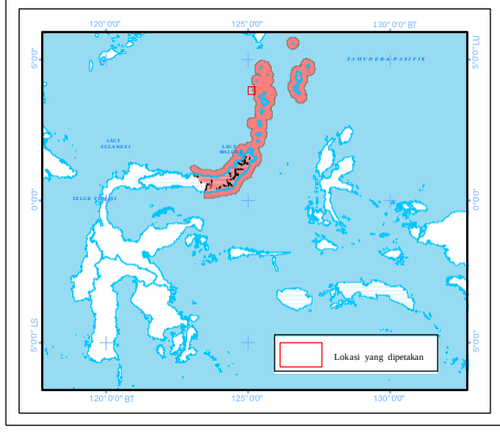

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

NLP : 2419-54

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

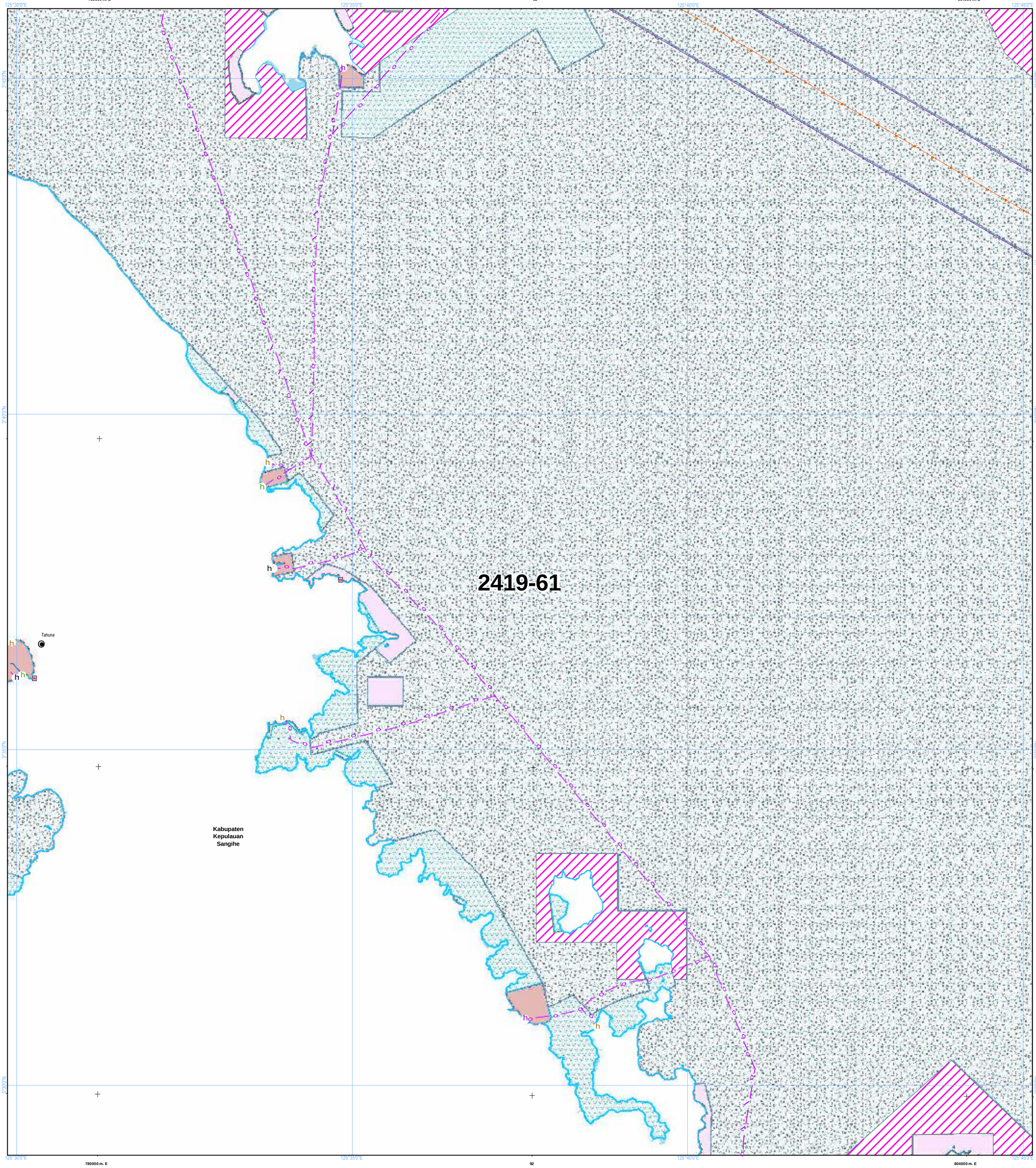

NLP : 2419-61

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

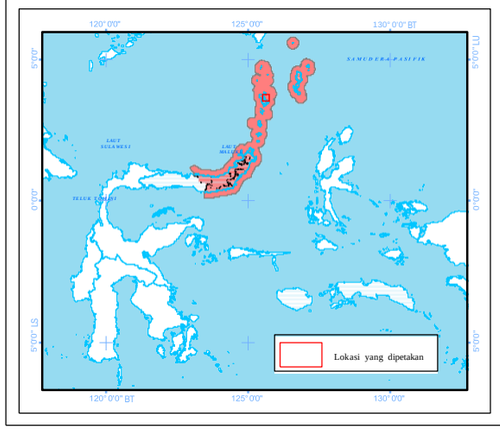

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

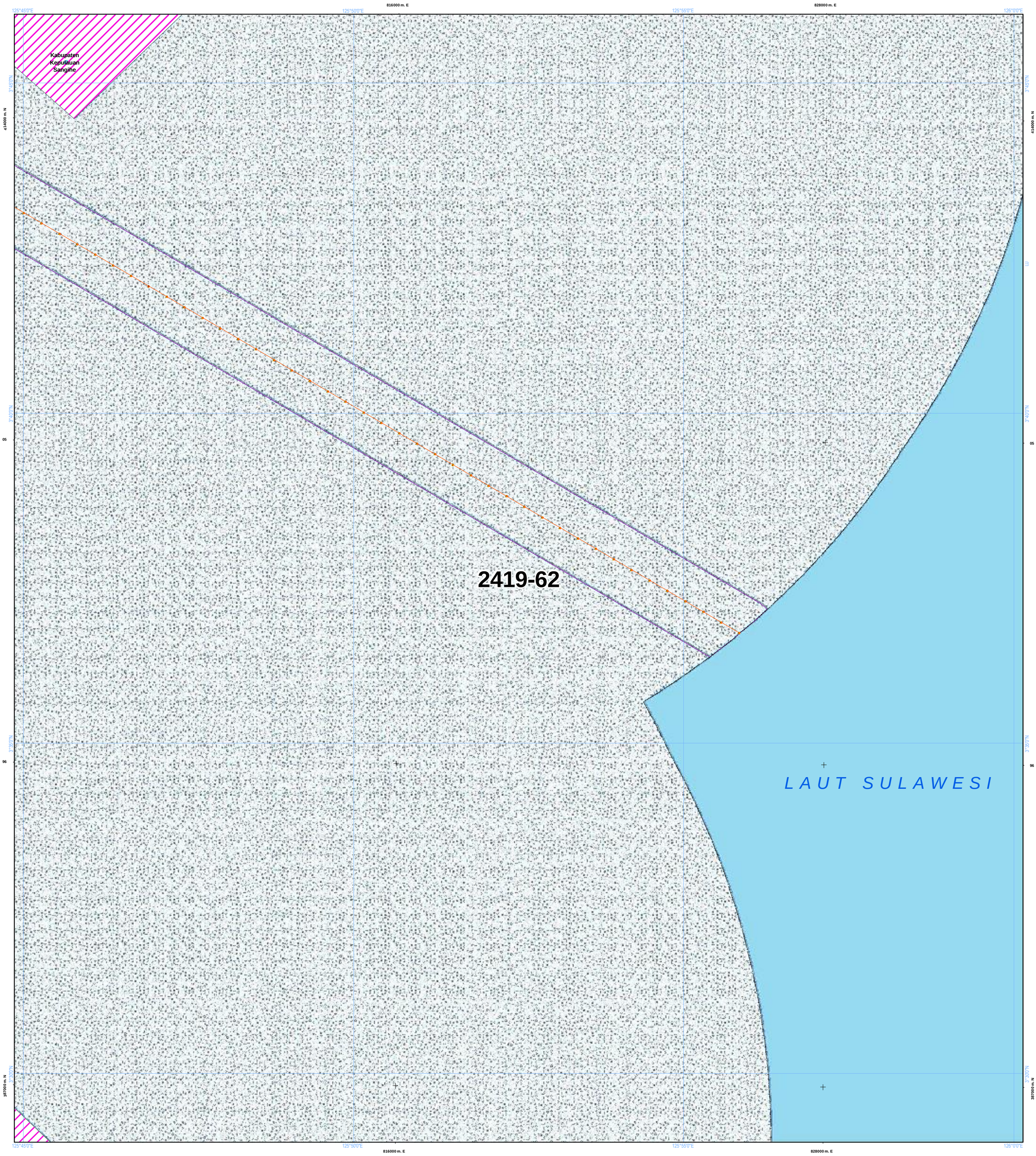

NLP : 2419-62

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

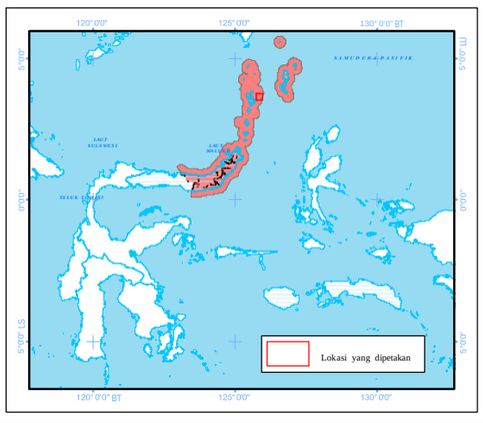

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

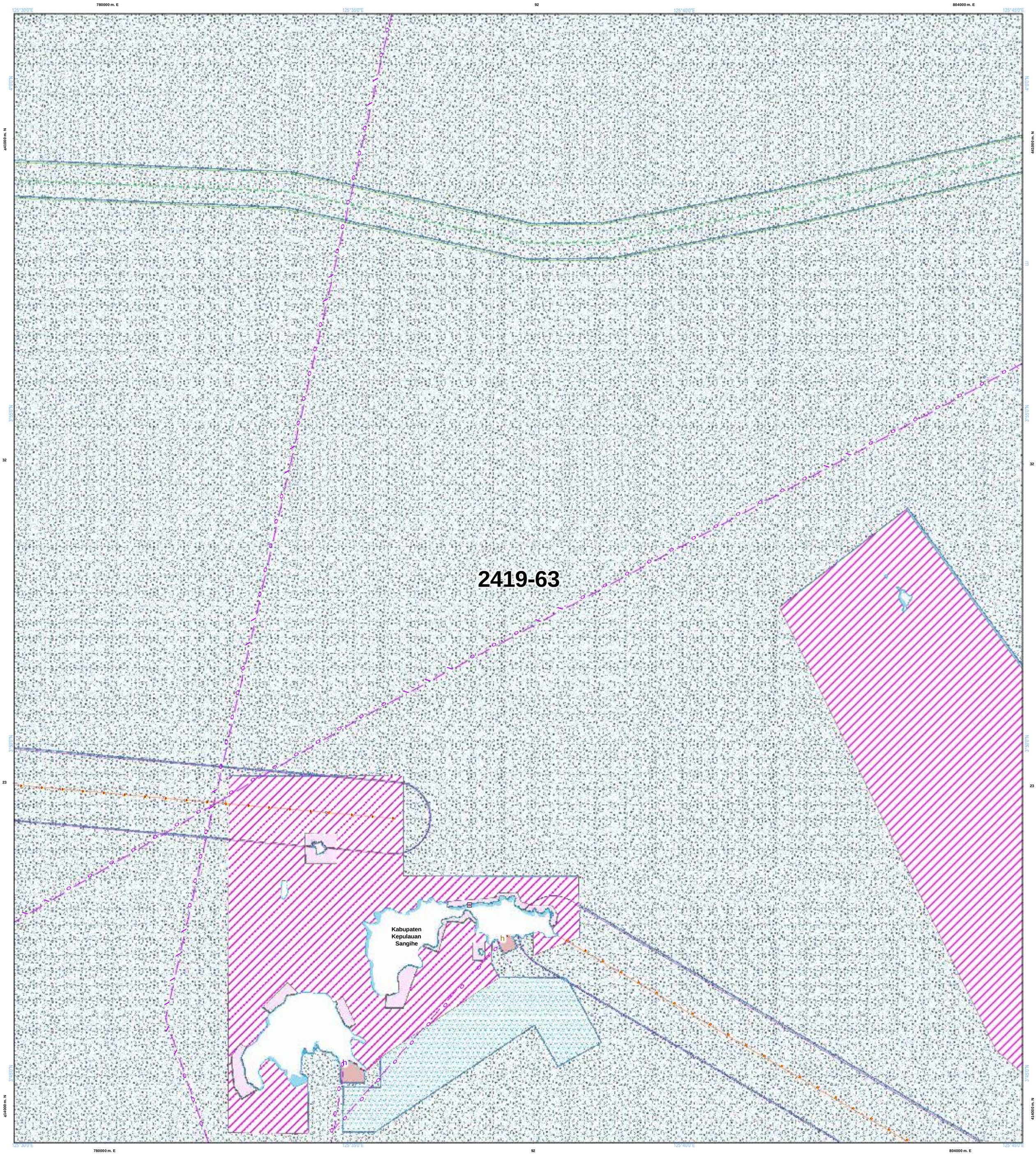

NLP : 2419-63

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

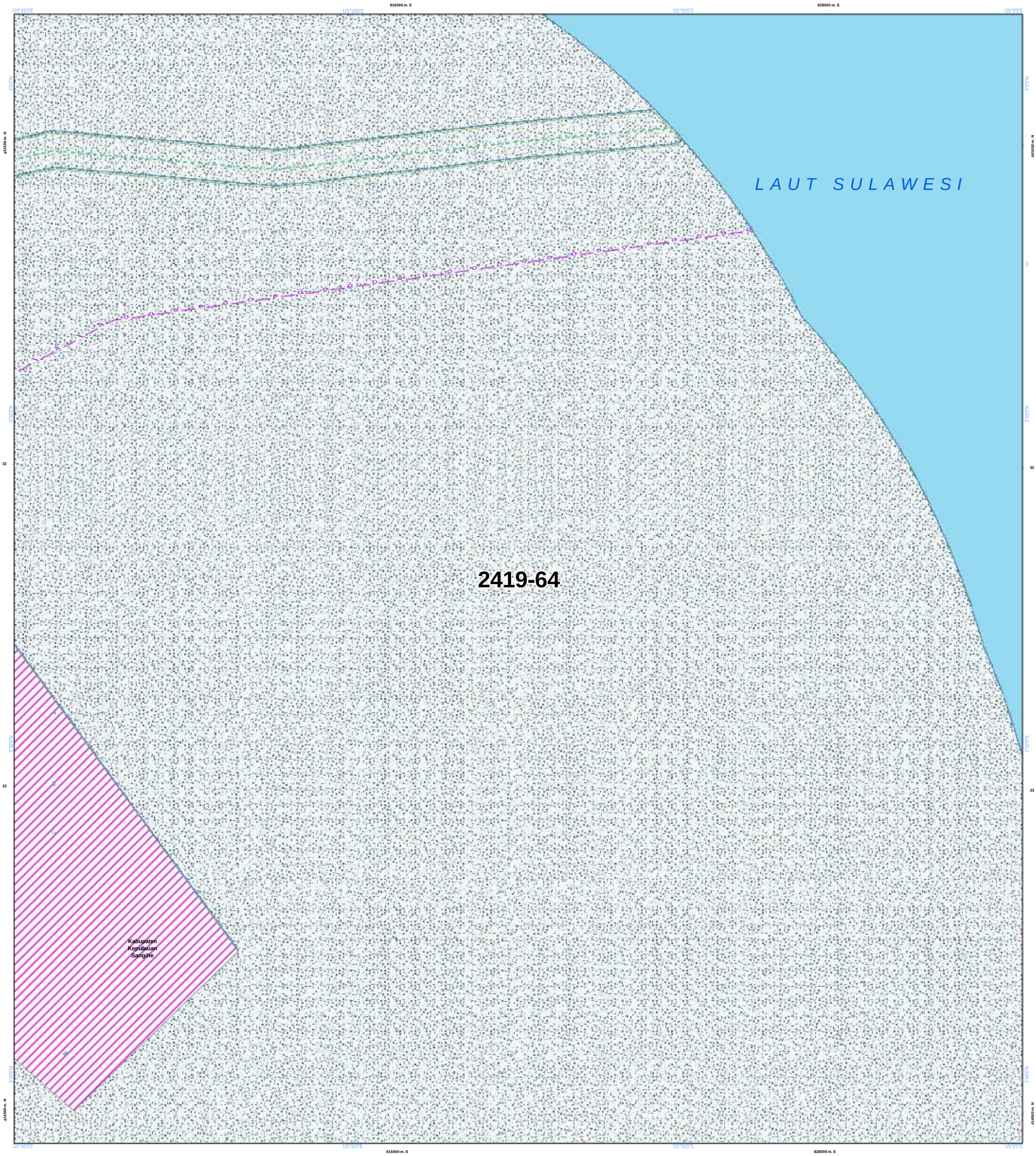

NLP : 2419-64

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

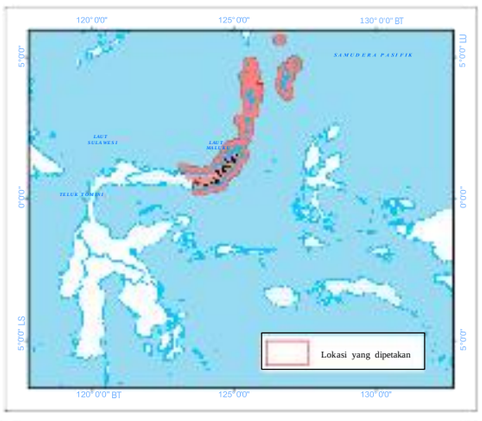

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

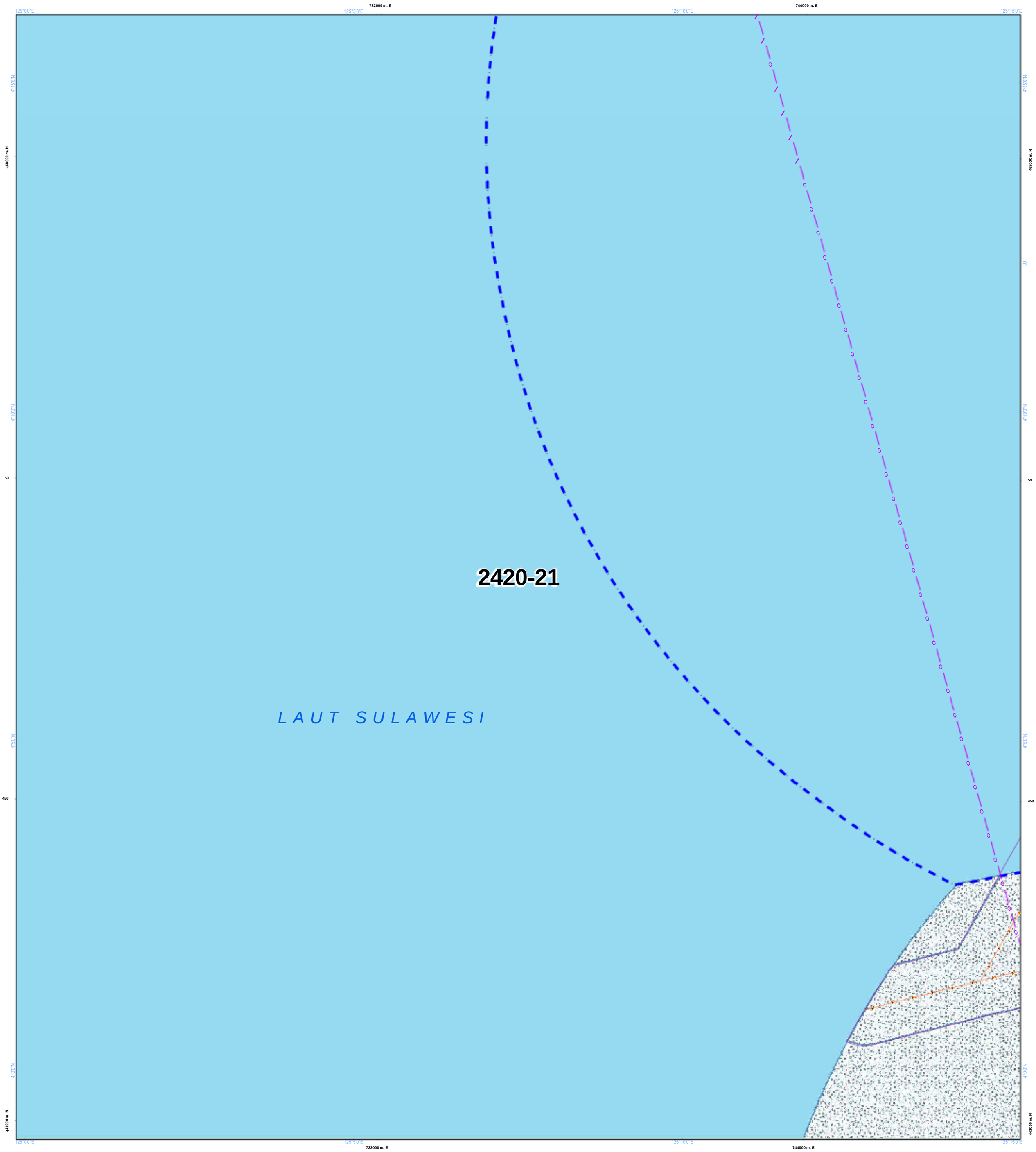

NLP : 2420-21

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

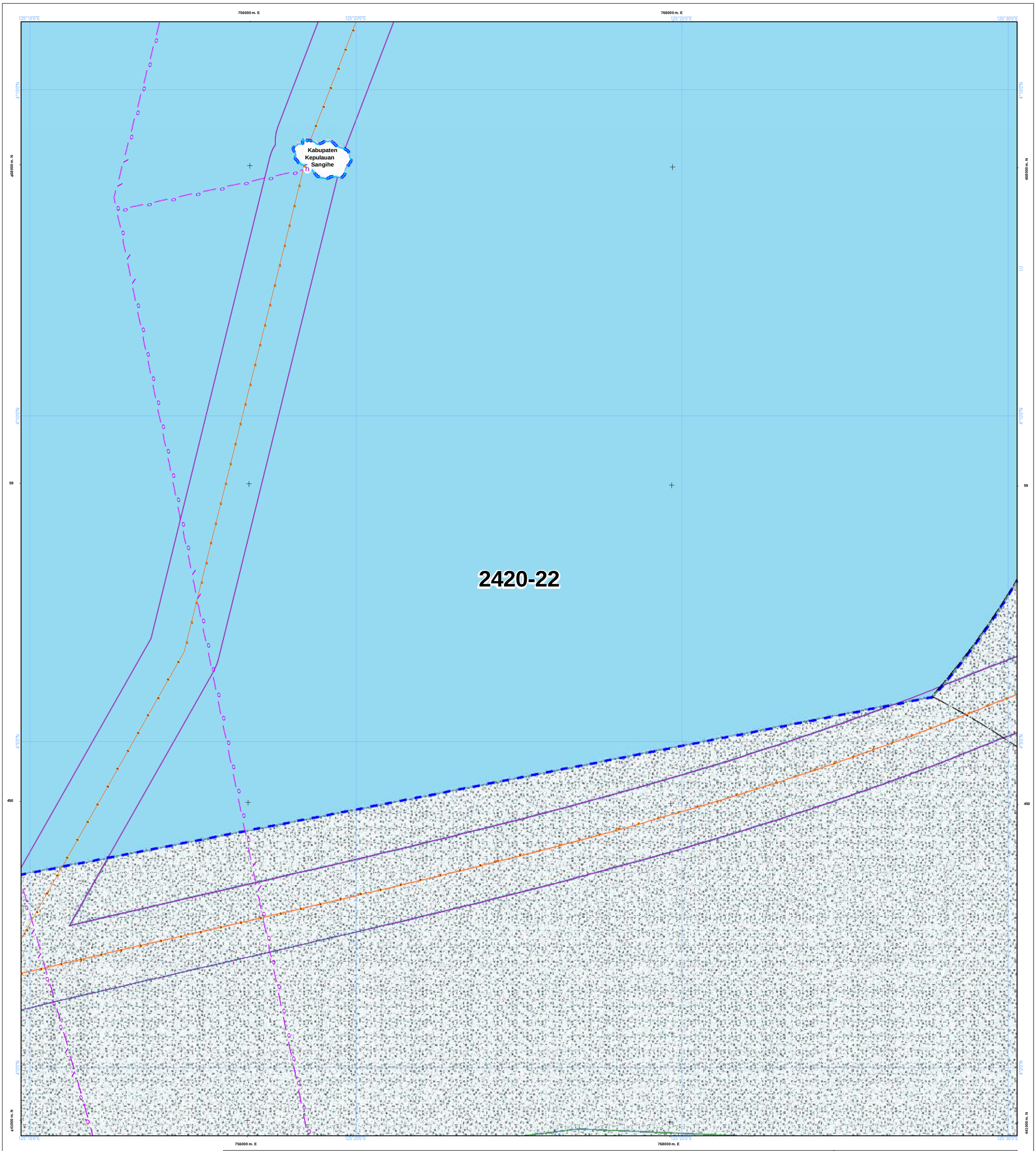

NLP : 2420-22

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

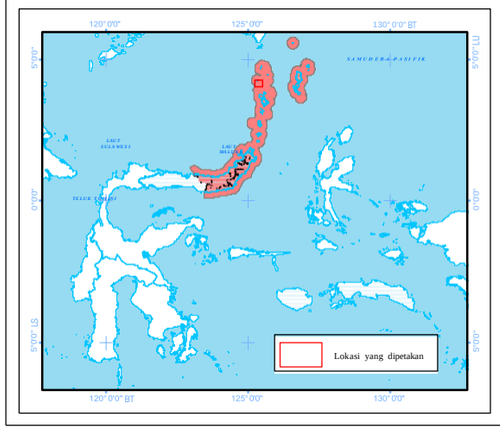

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

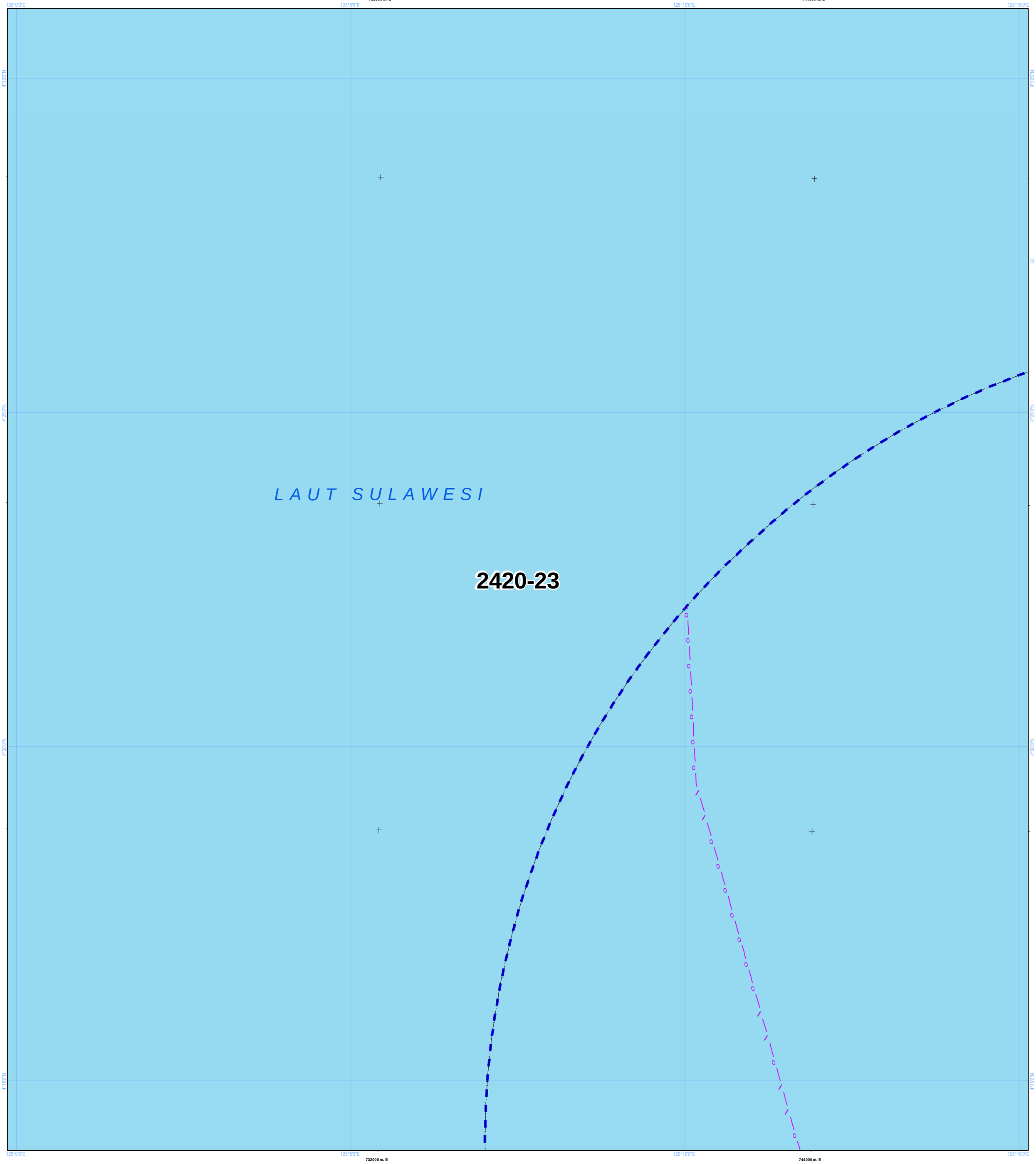

NLP : 2420-23

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

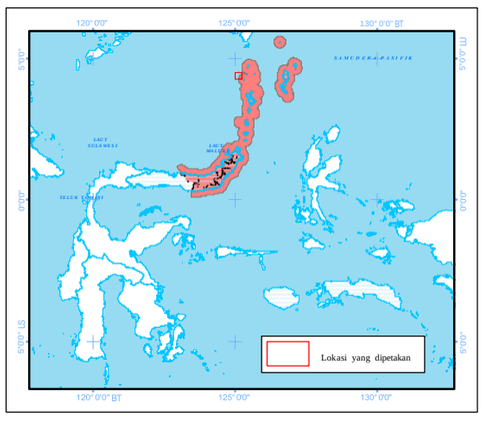

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

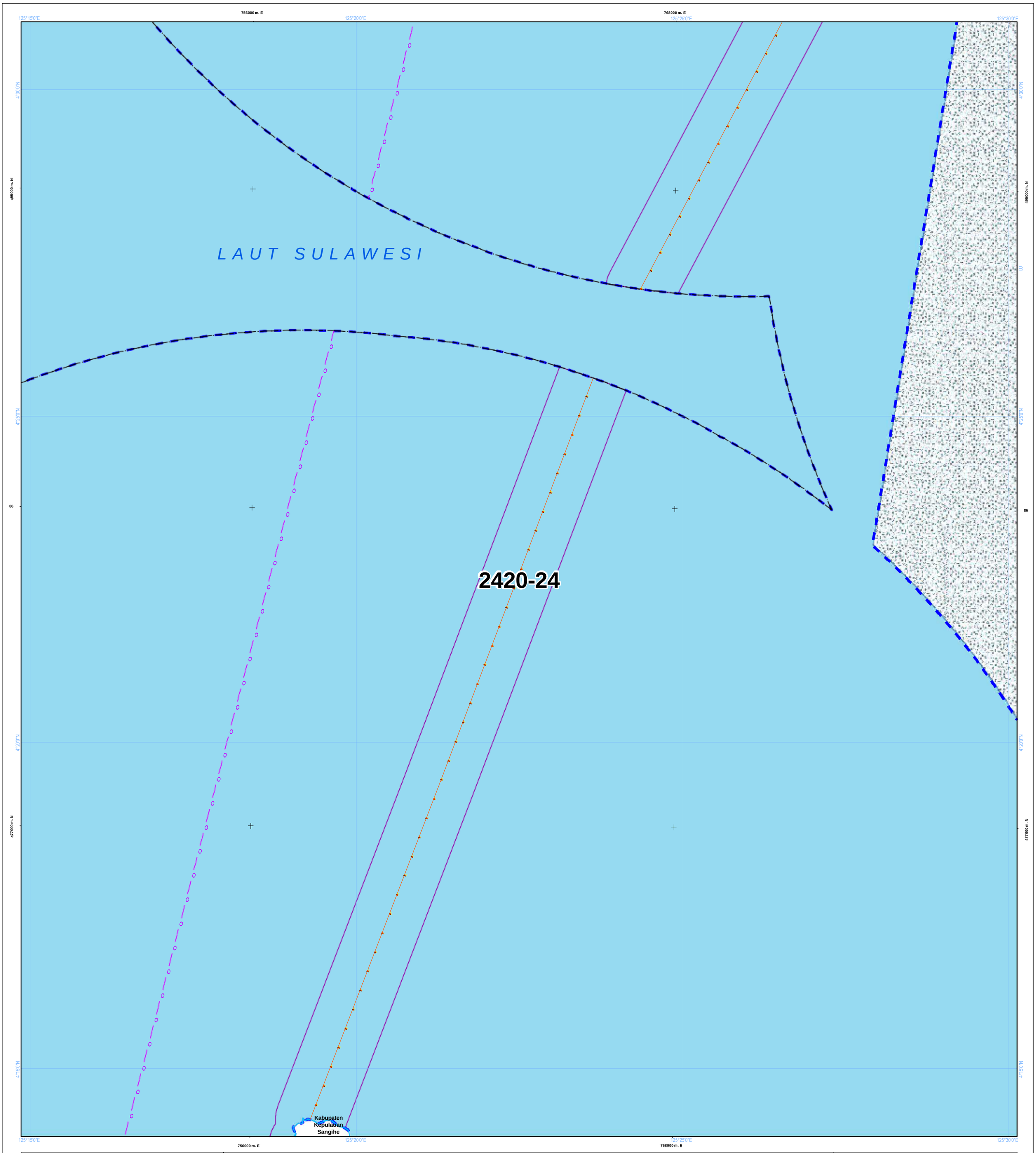

NLP : 2420-24

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

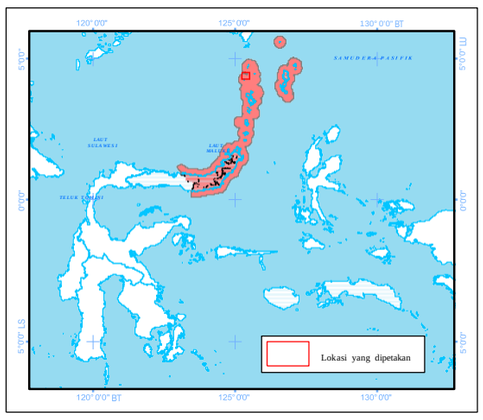

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

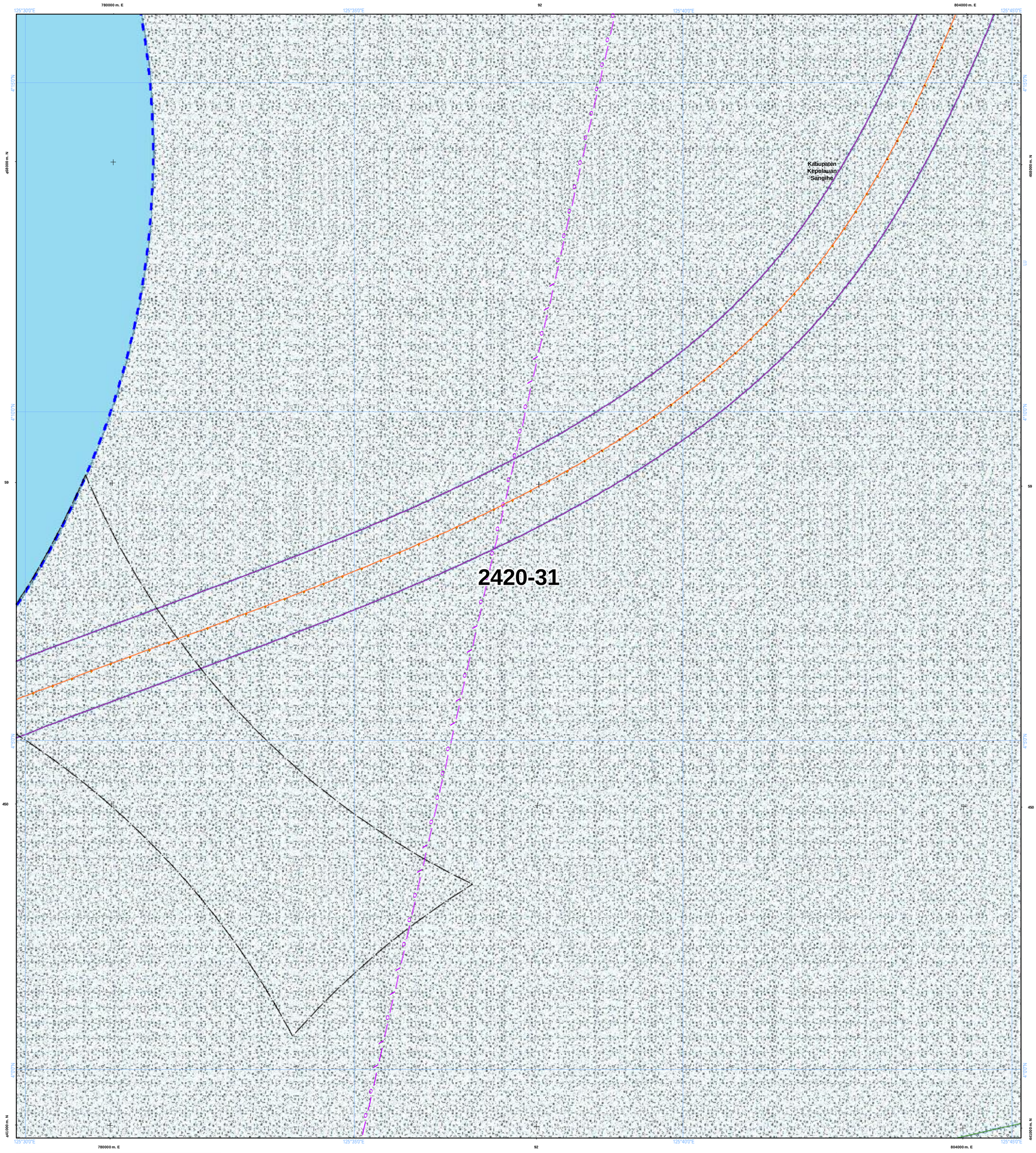

NLP : 2420-31

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

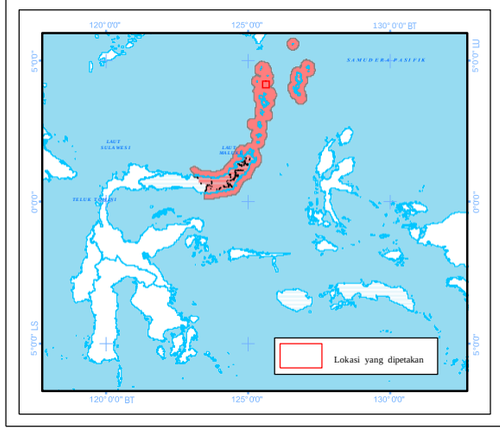

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

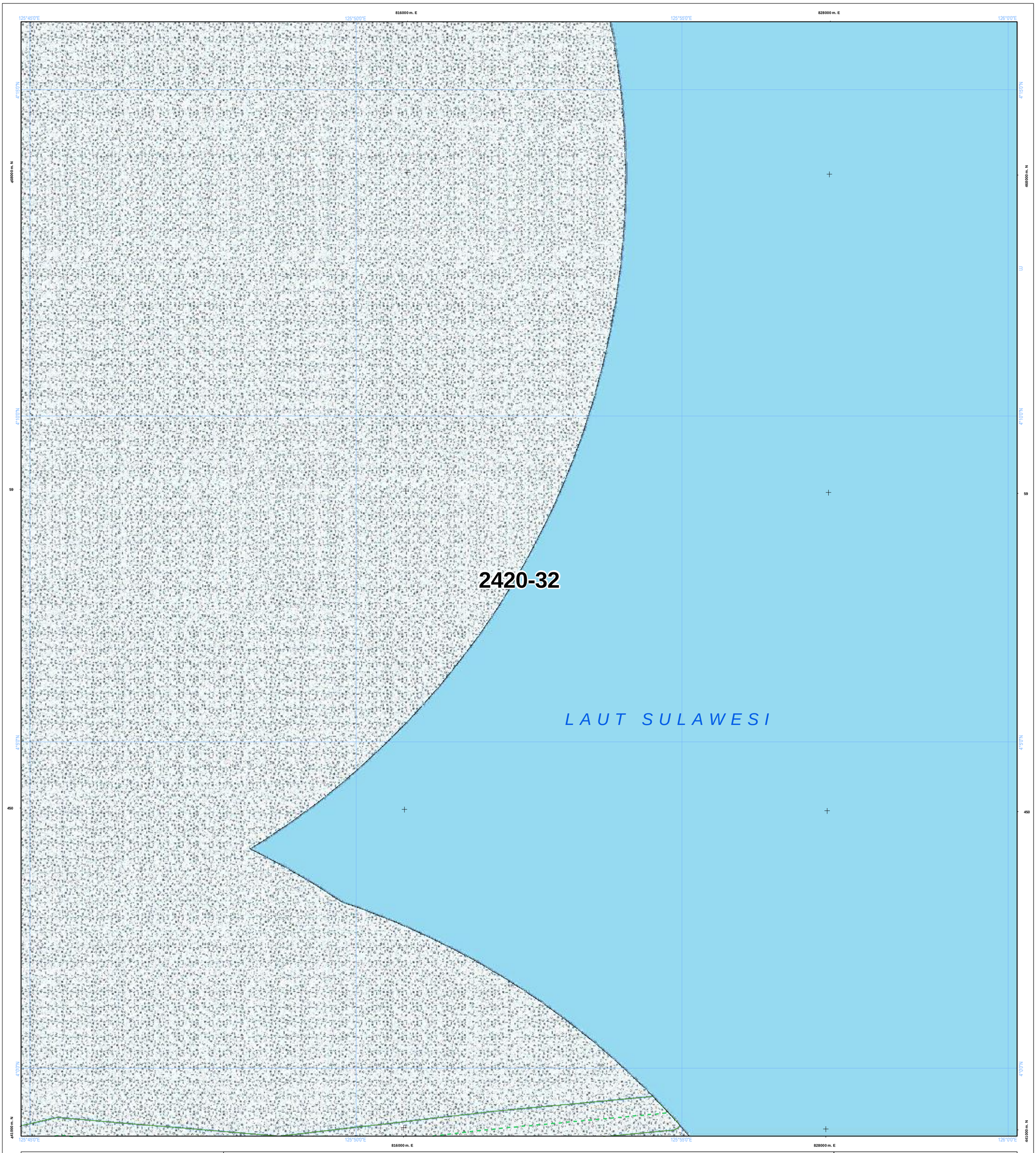

NLP : 2420-32

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

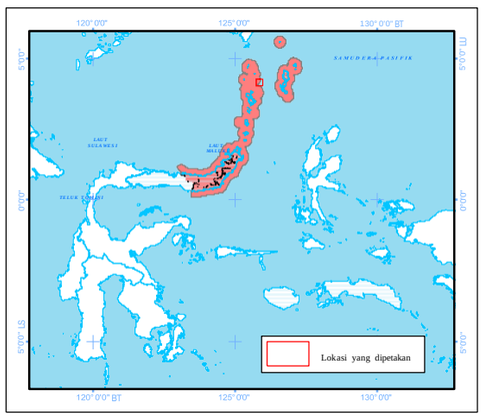

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

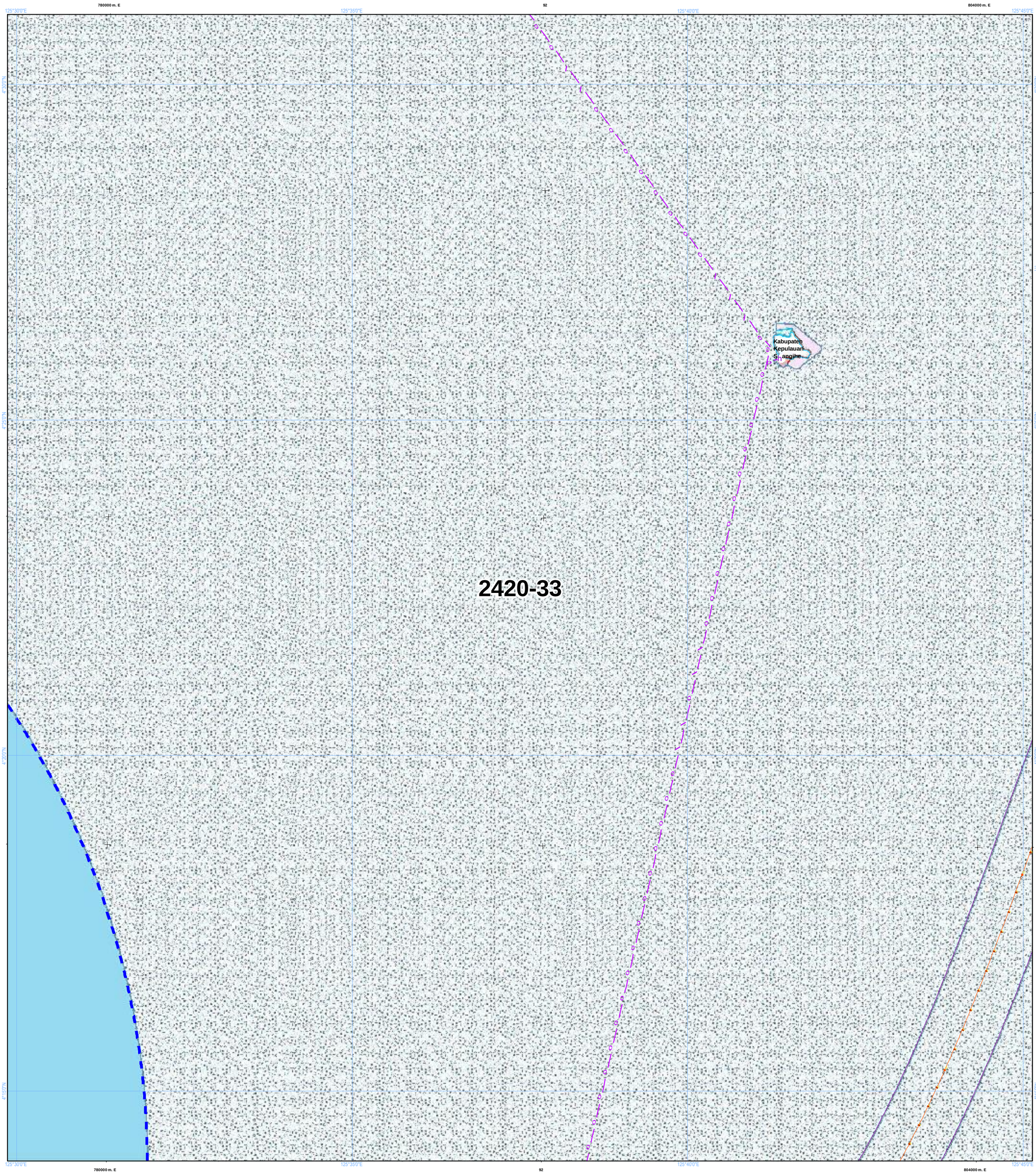

NLP : 2420-33

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

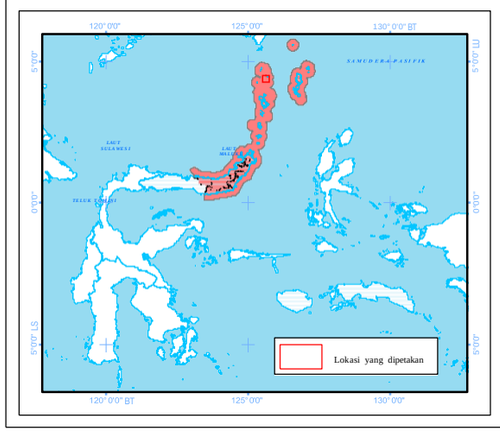

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

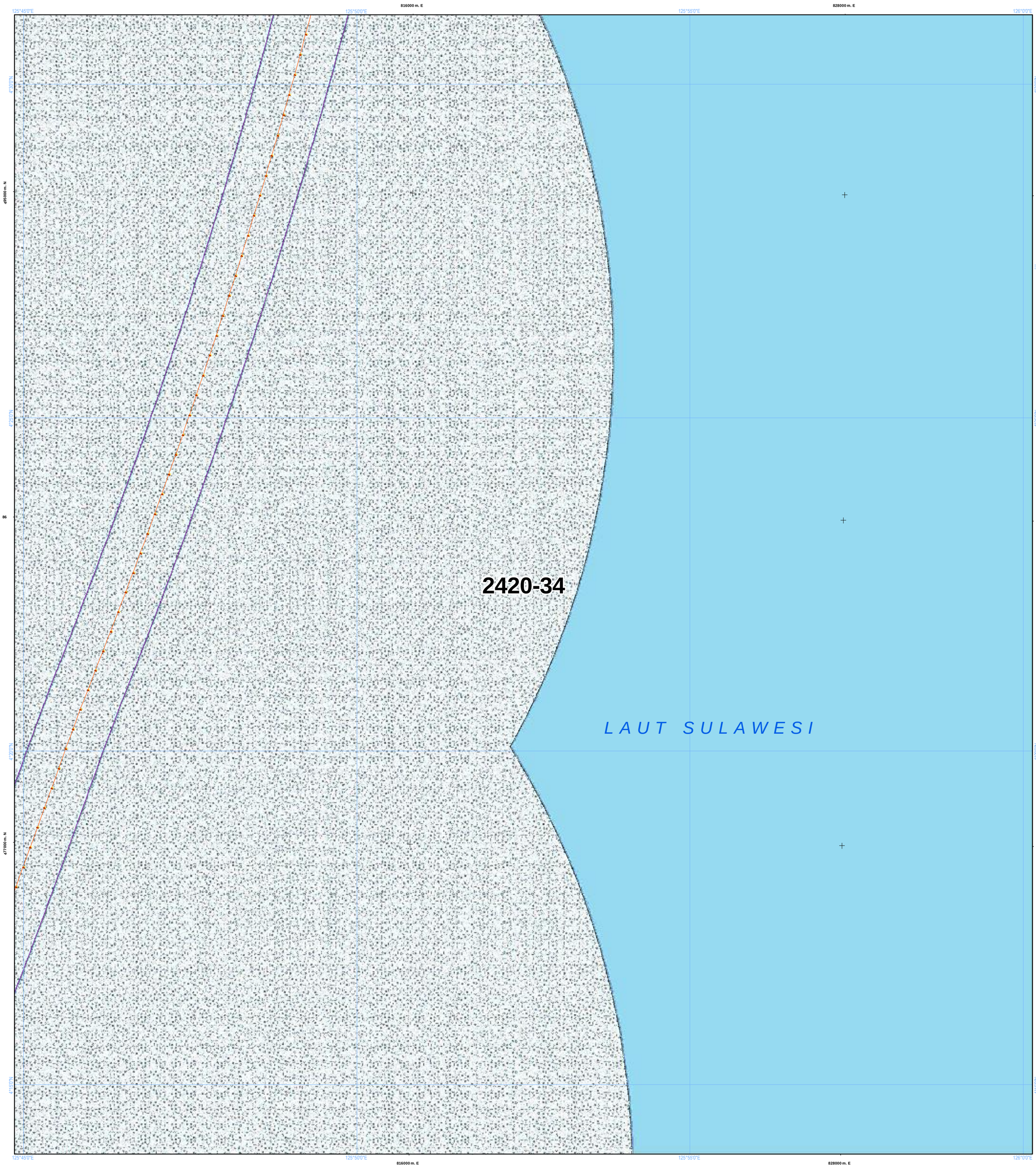

NLP : 2420-34

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

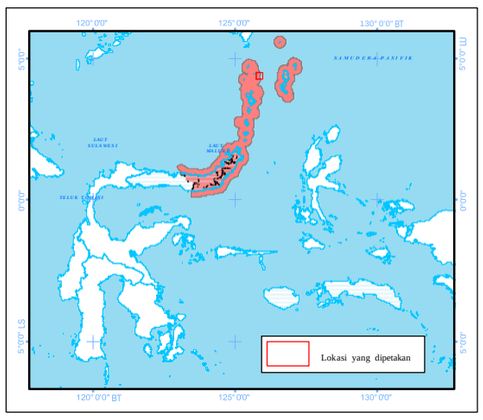

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

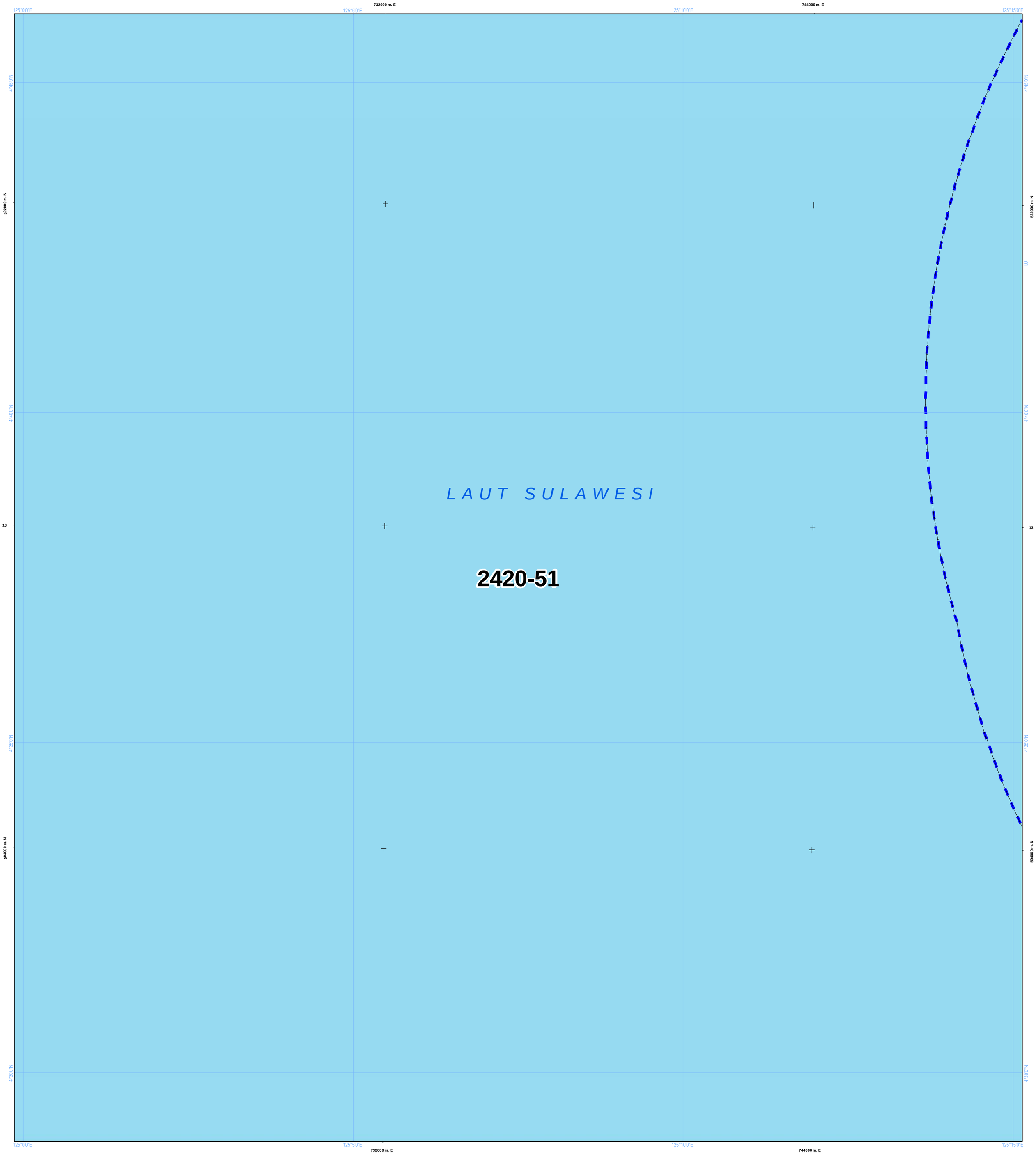

NLP : 2420-51

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

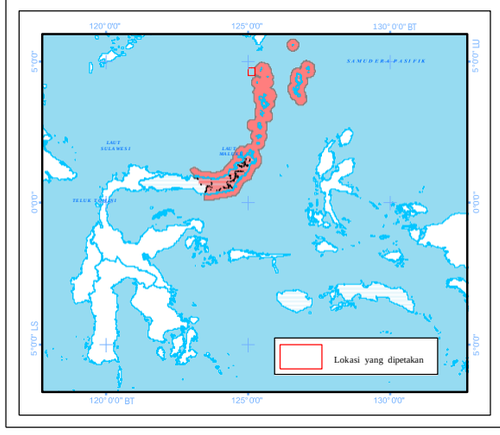

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

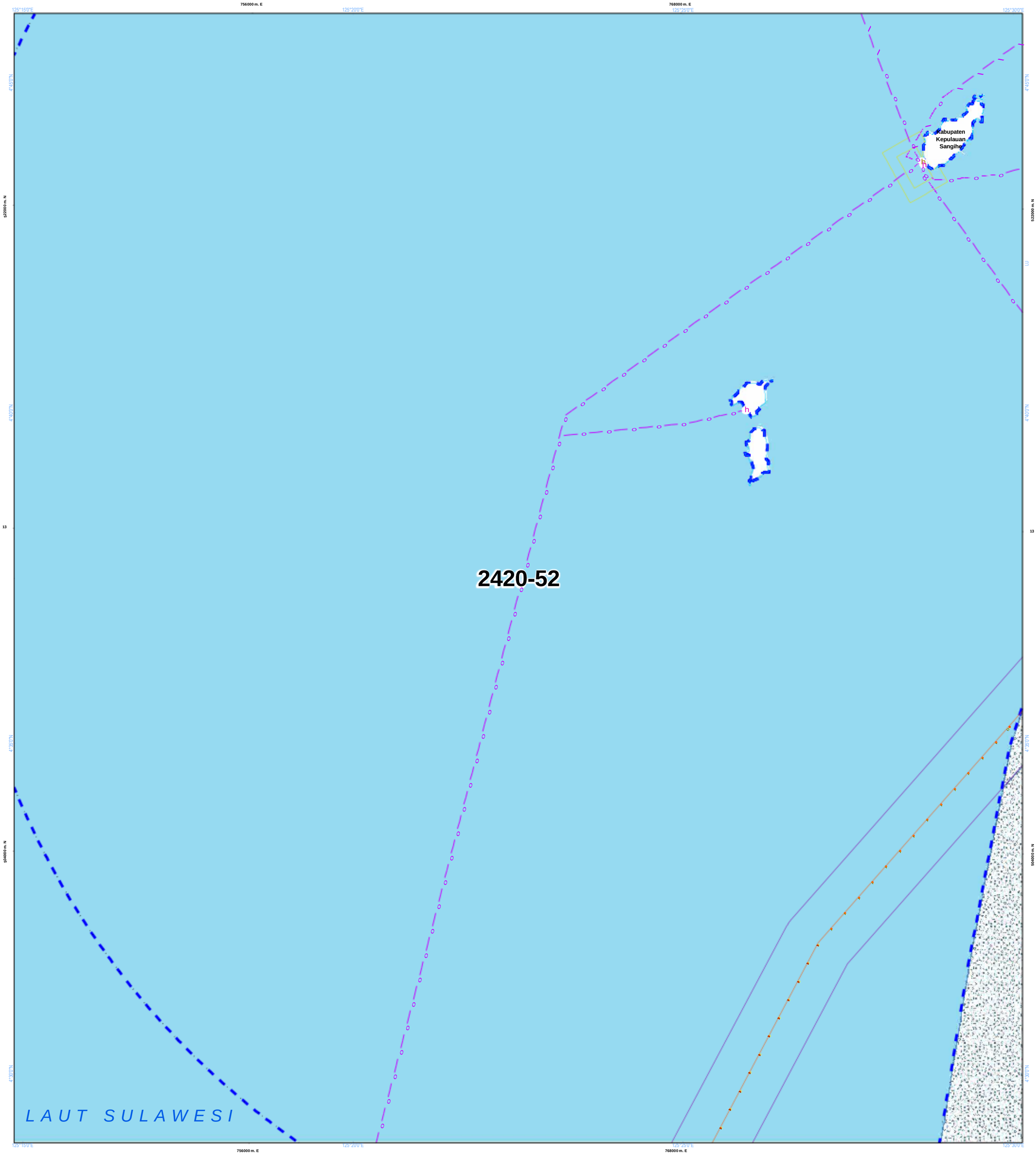

NLP : 2420-52

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

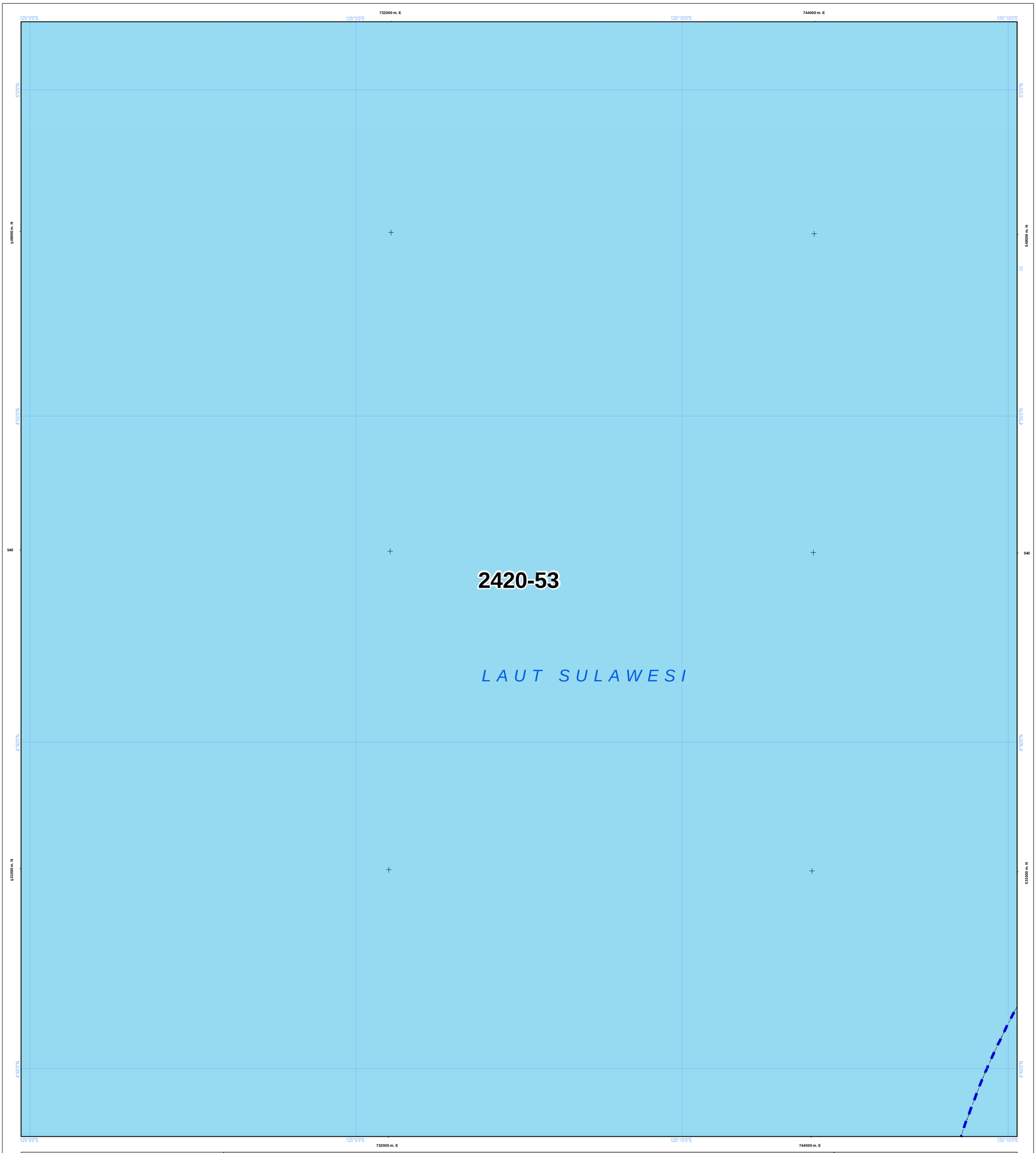

NLP : 2420-53

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

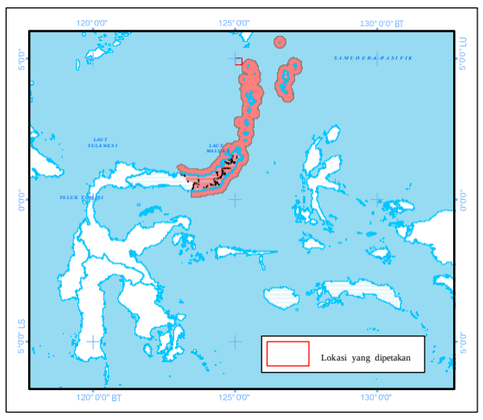

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

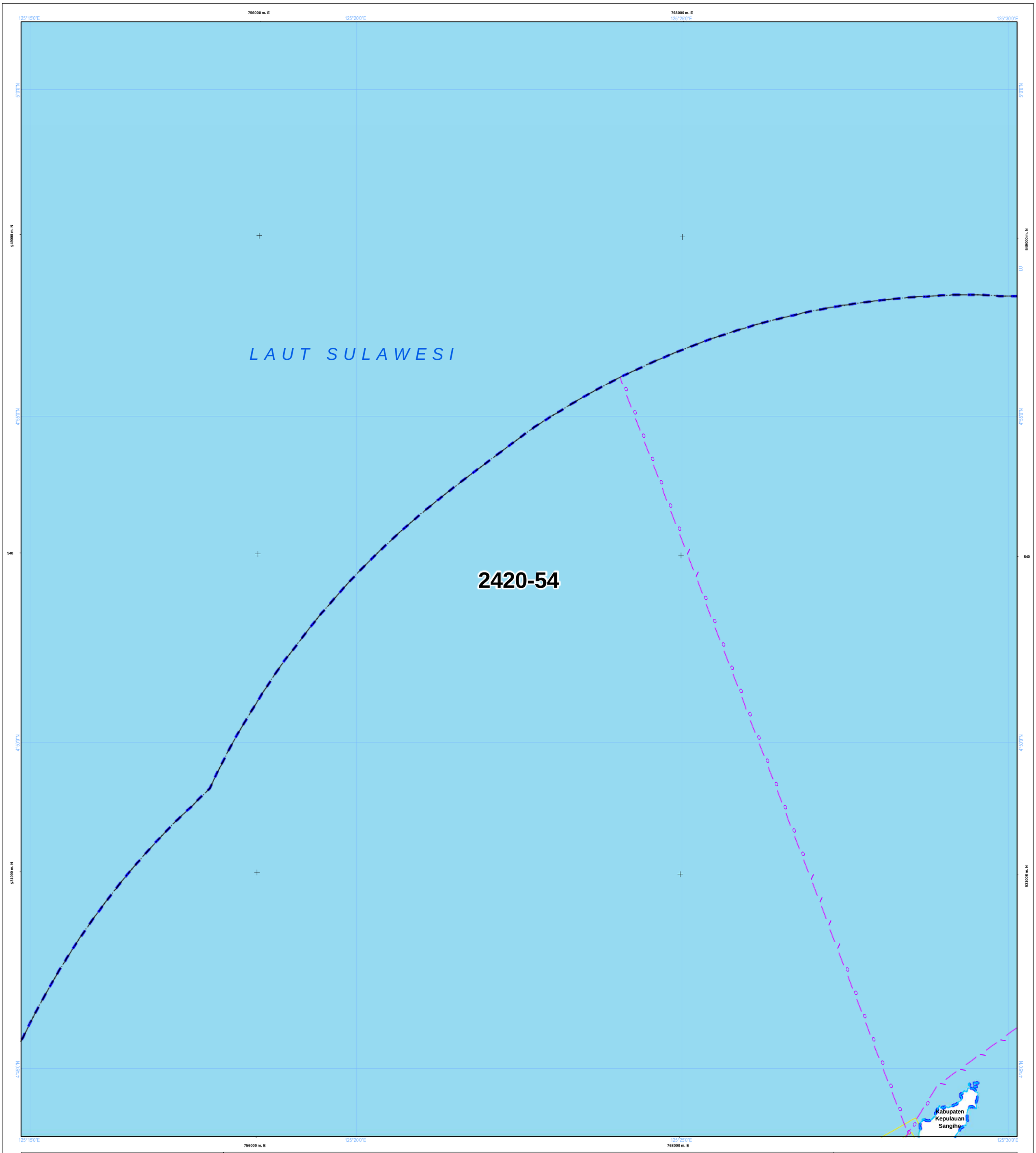

NLP : 2420-54

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

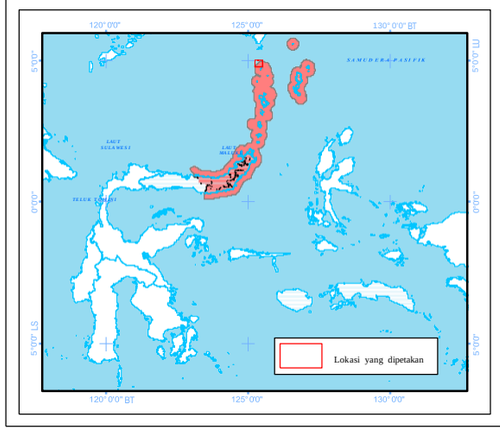

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

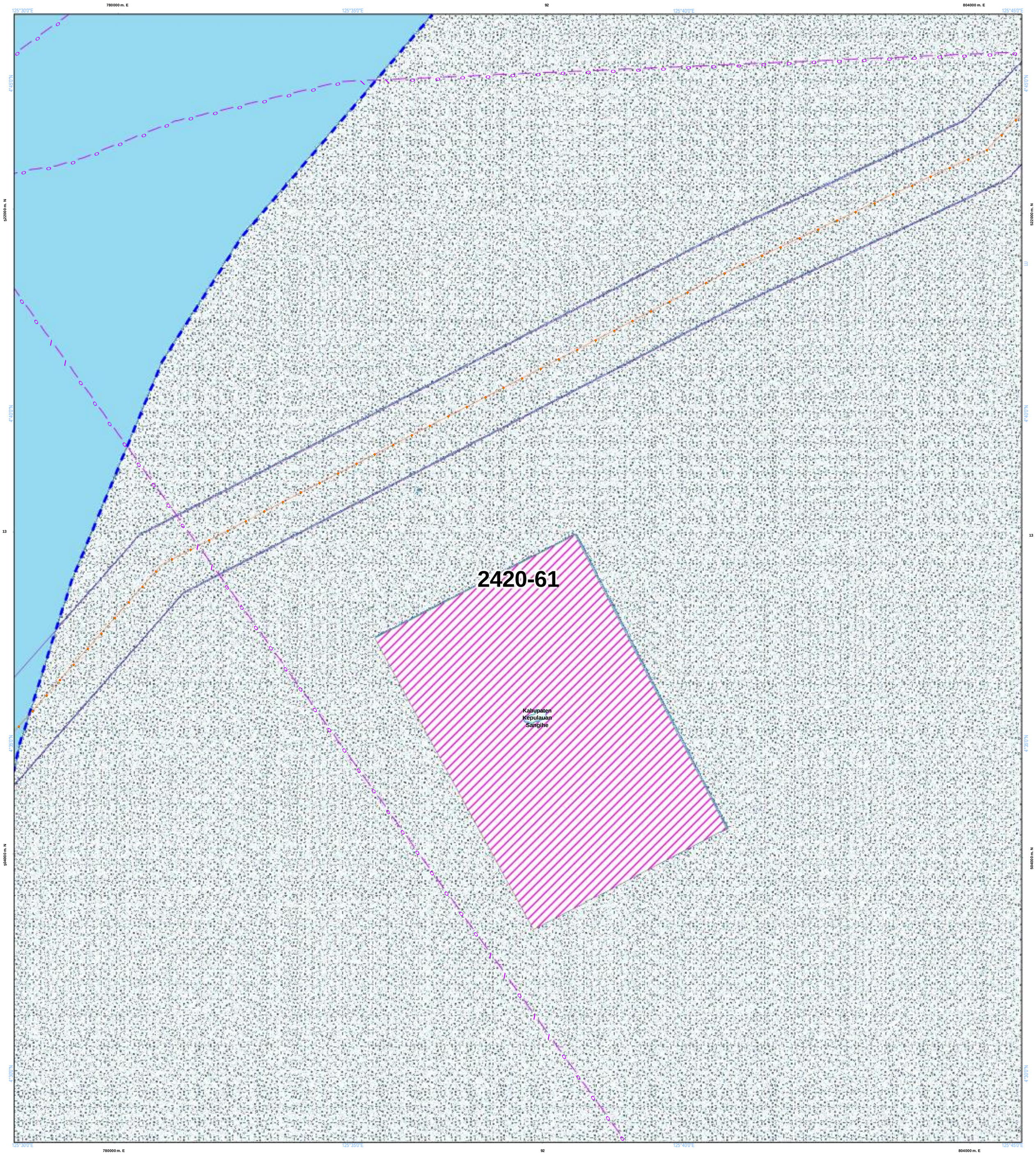

NLP : 2420-61

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

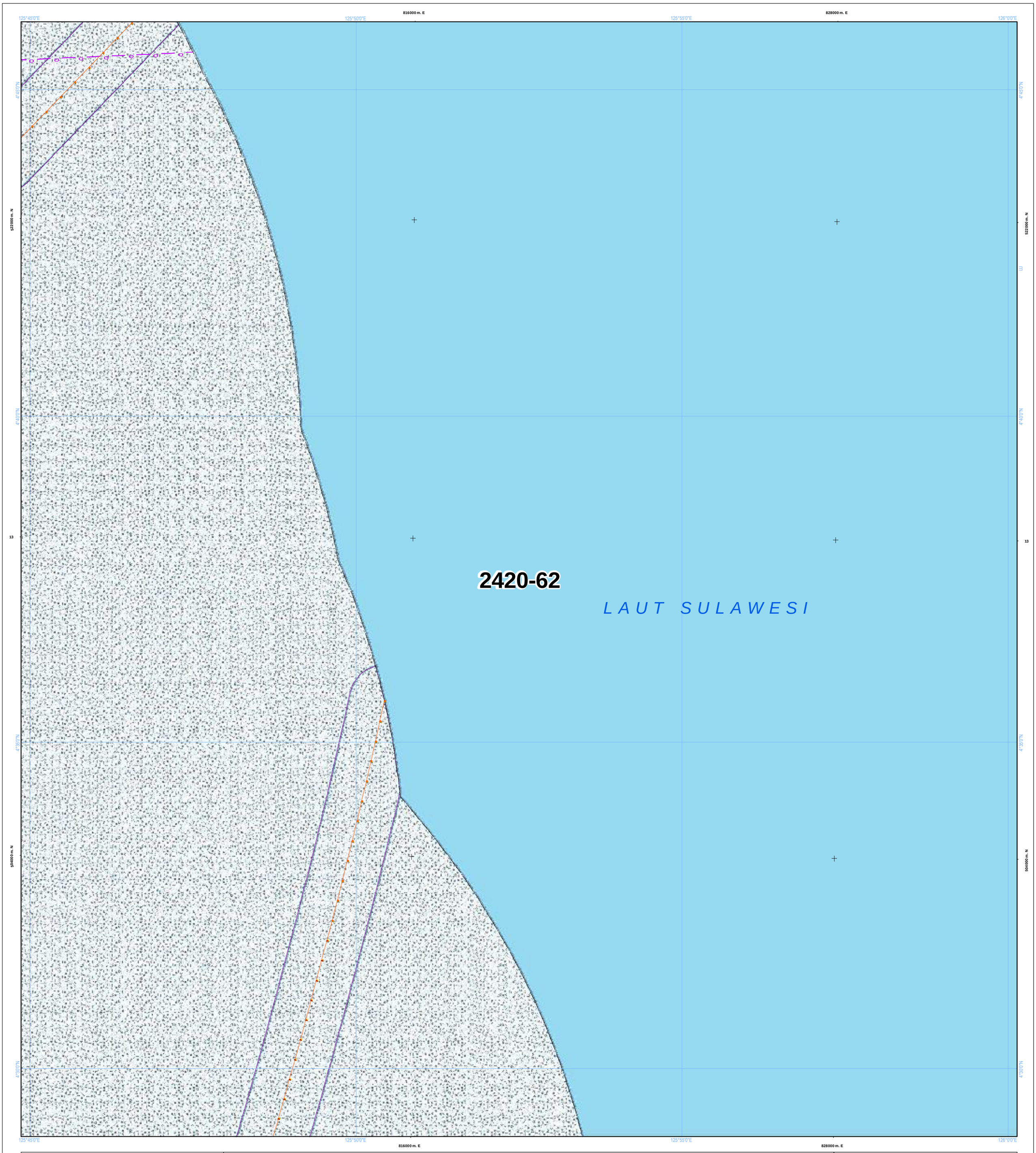

NLP : 2420-62

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

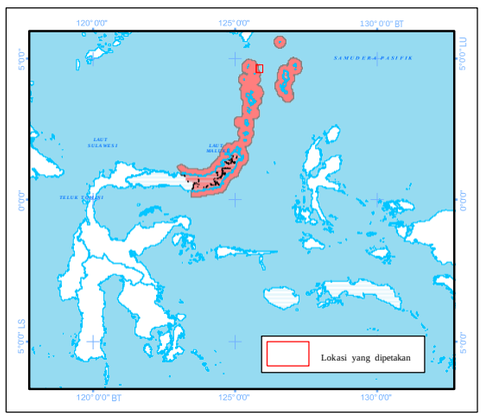

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

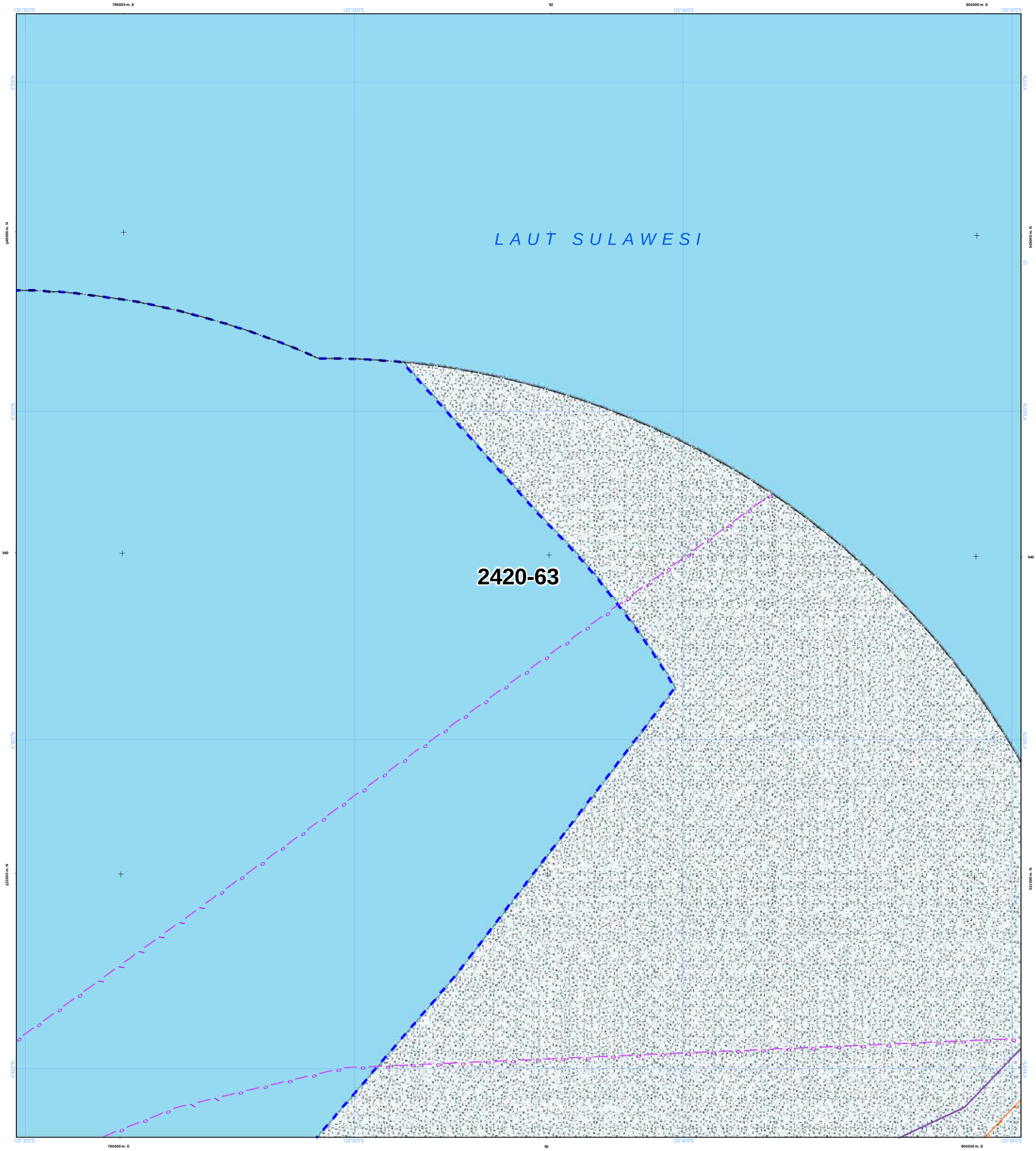

NLP : 2420-63

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

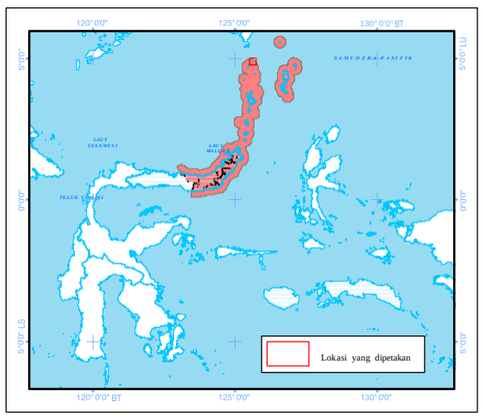

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

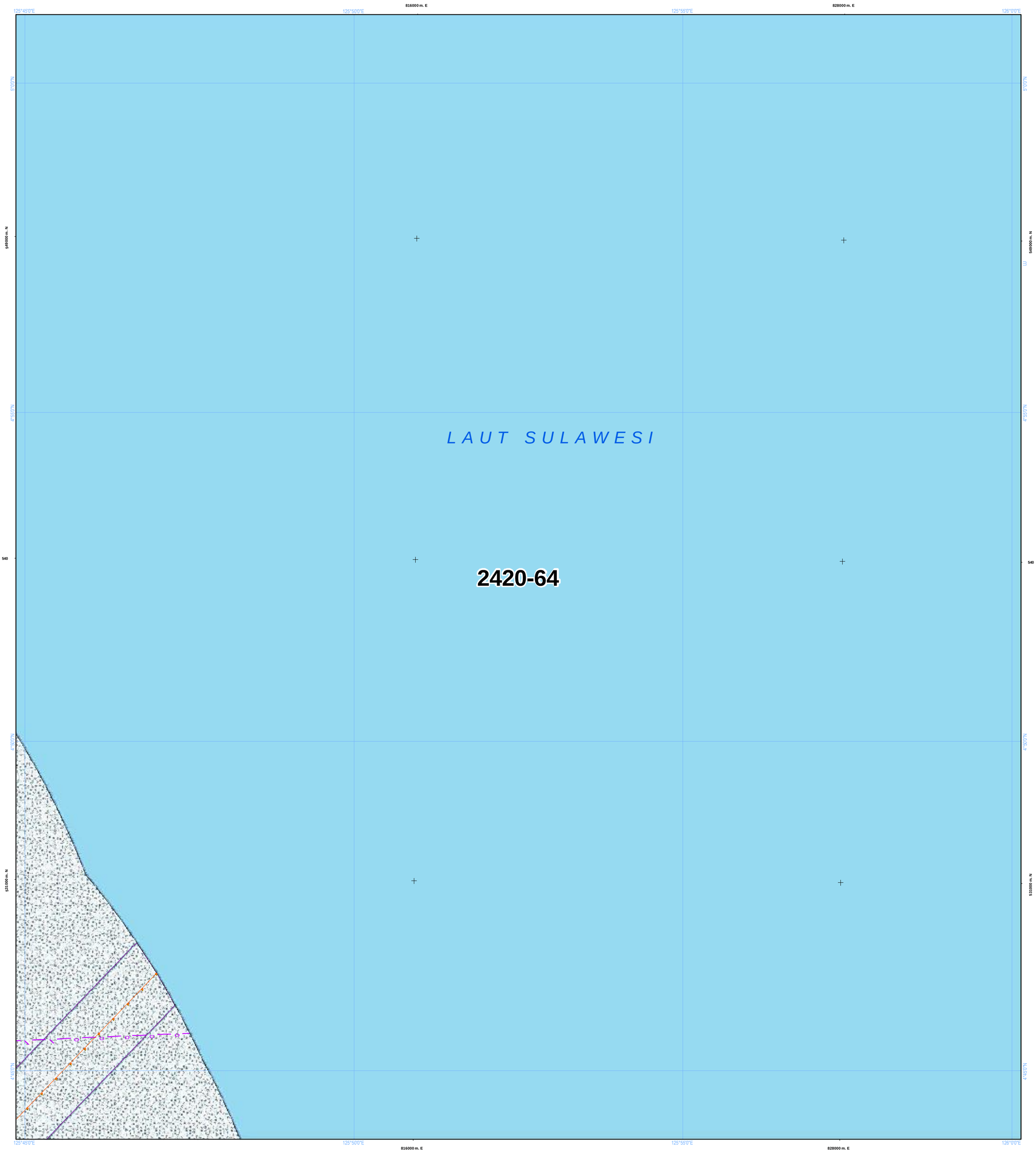

NLP : 2420-64

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

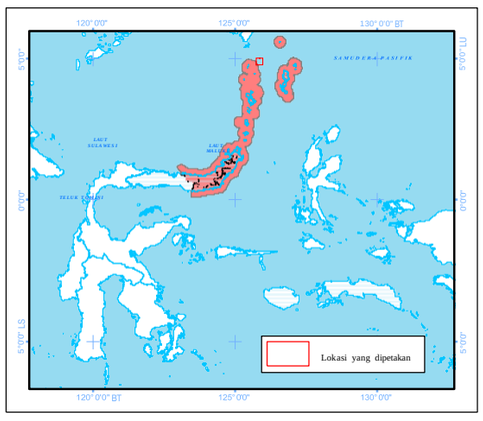

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

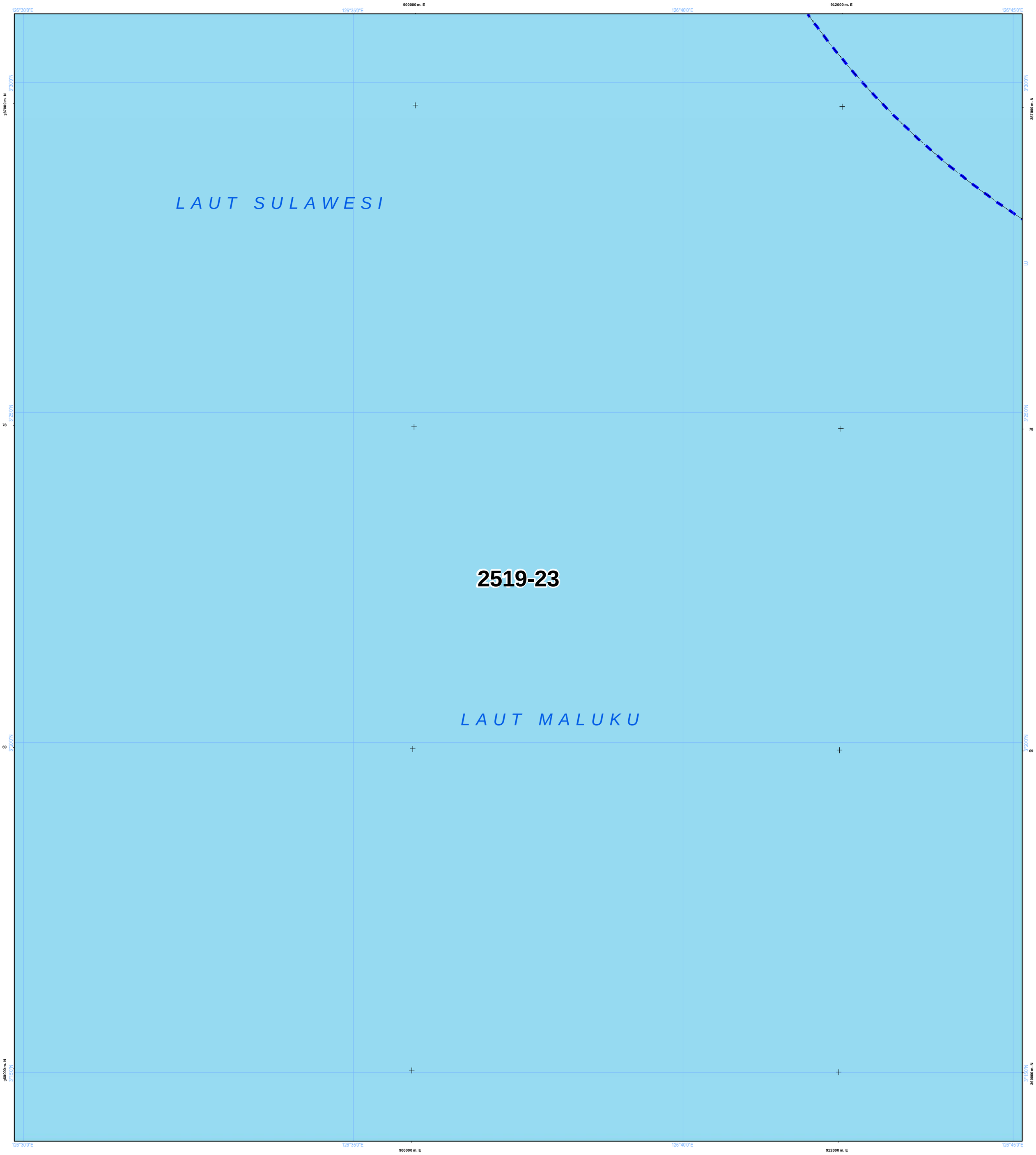

NLP : 2519-23

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

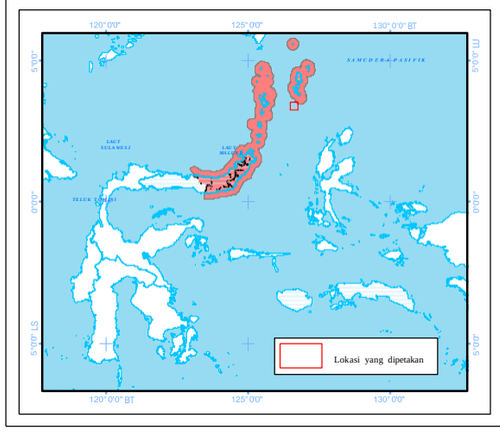

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

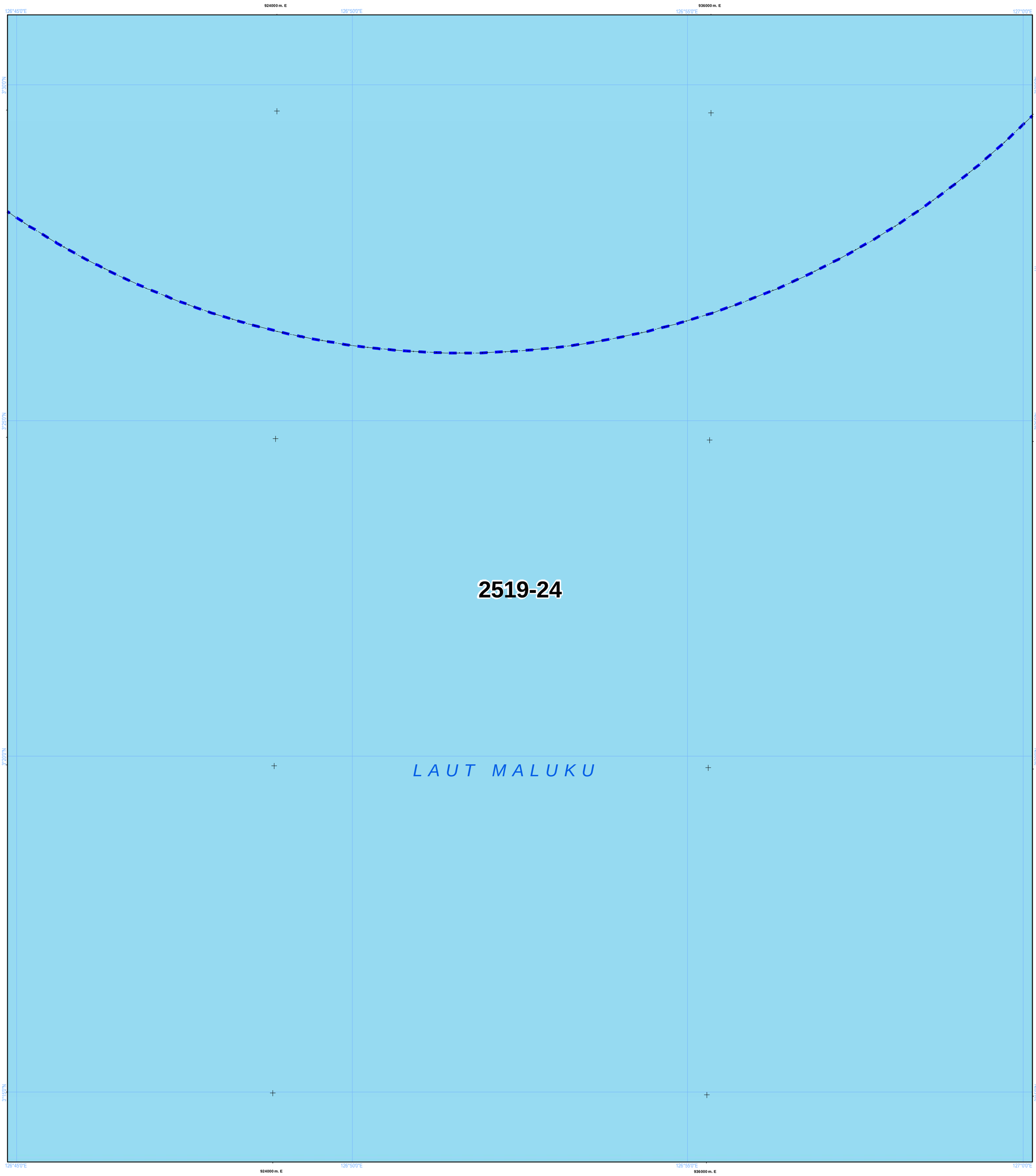

NLP : 2519-24

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

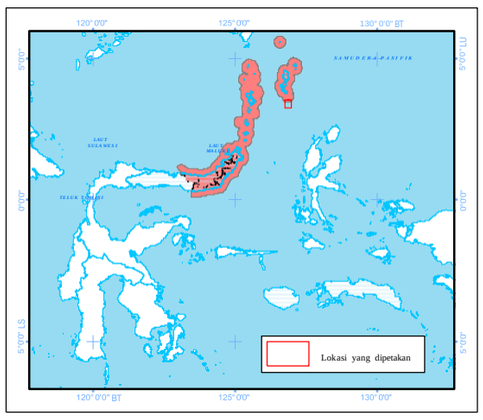

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

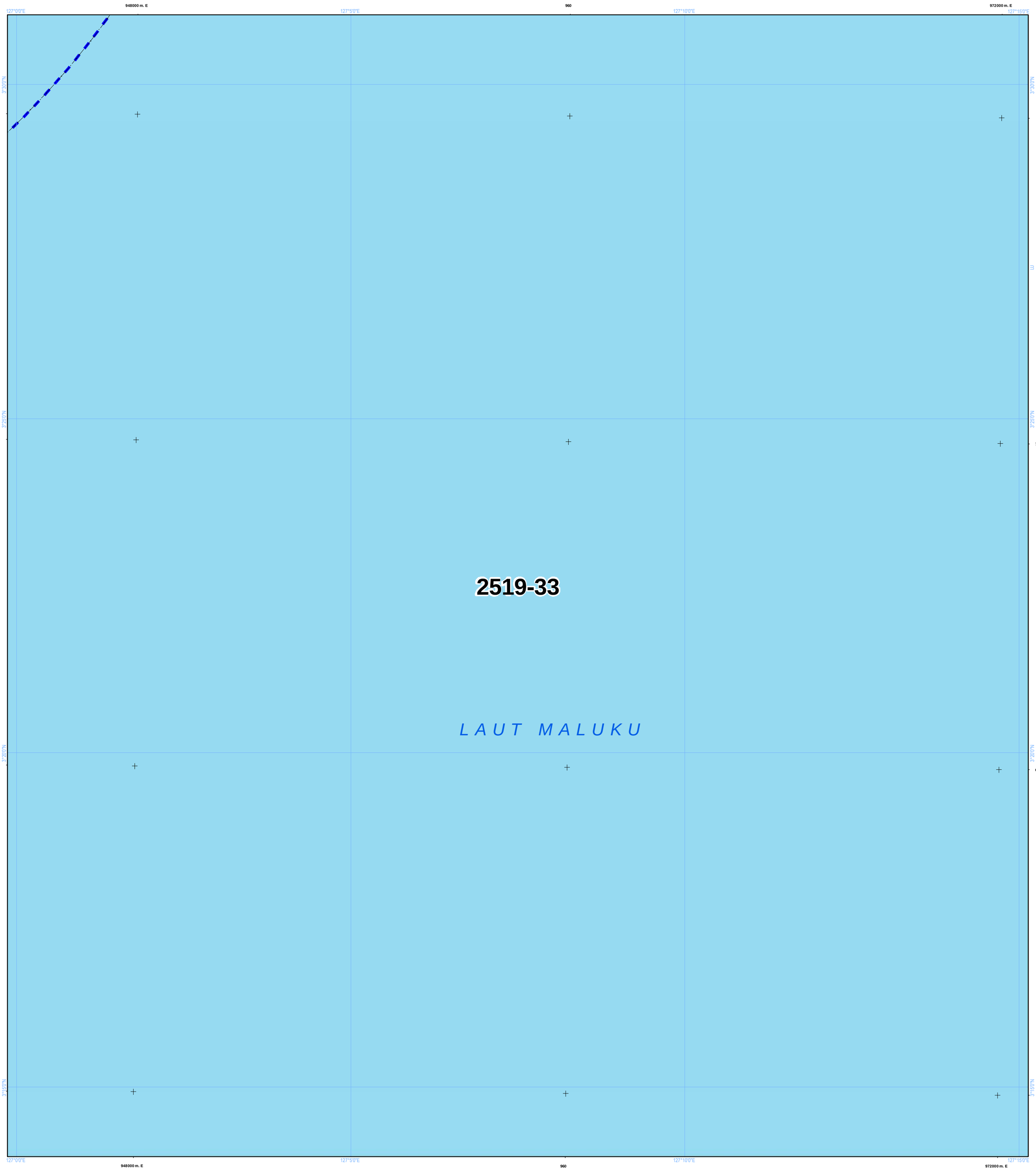

NLP : 2519-33

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

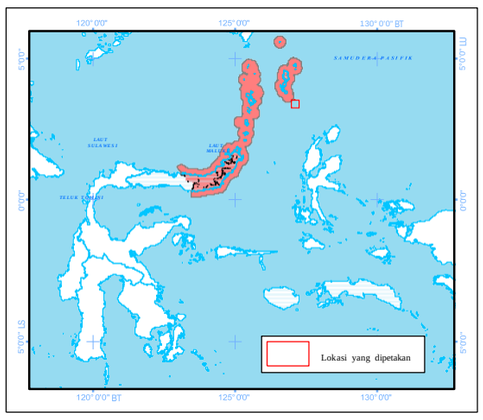

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

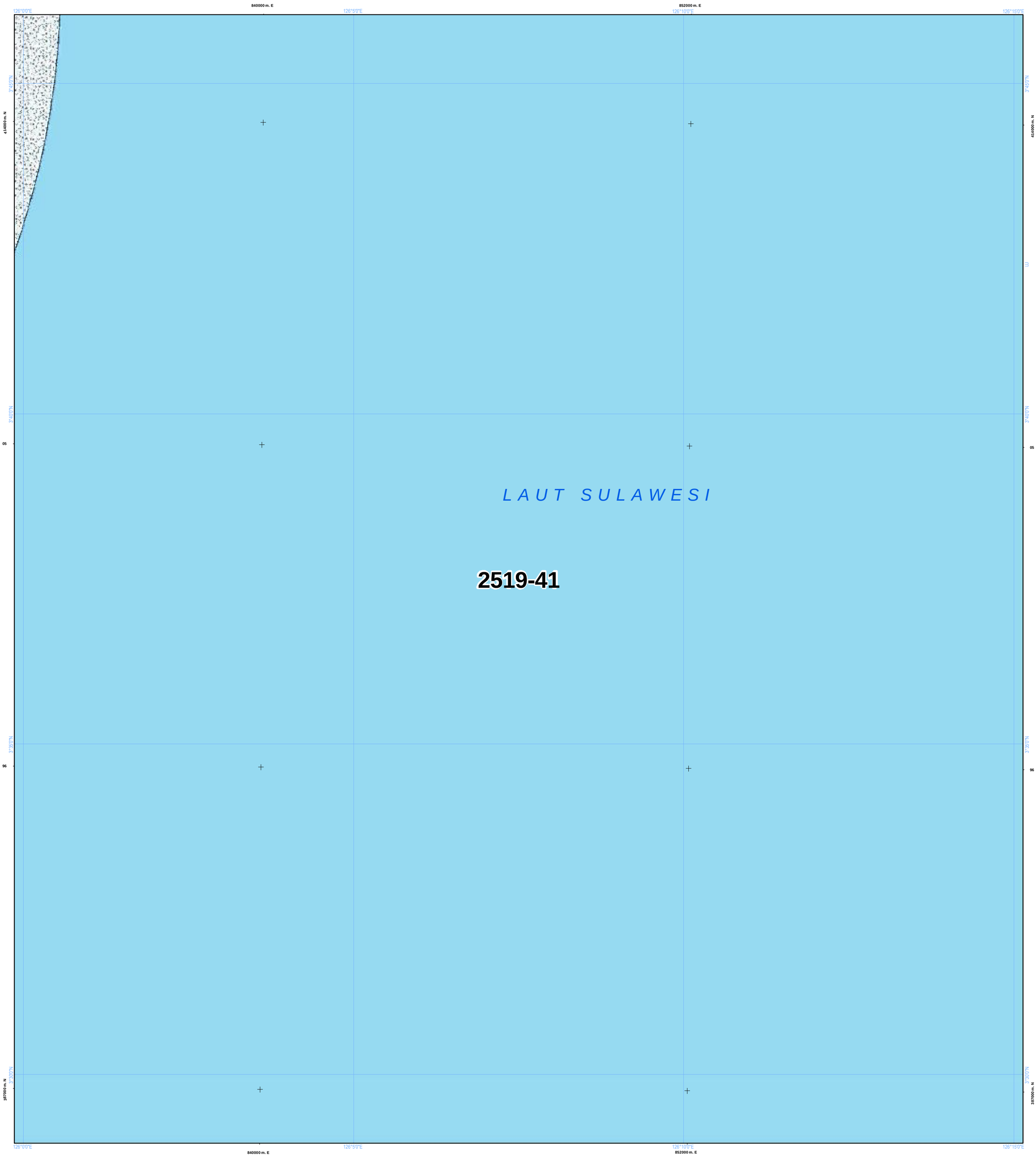

NLP : 2519-41

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

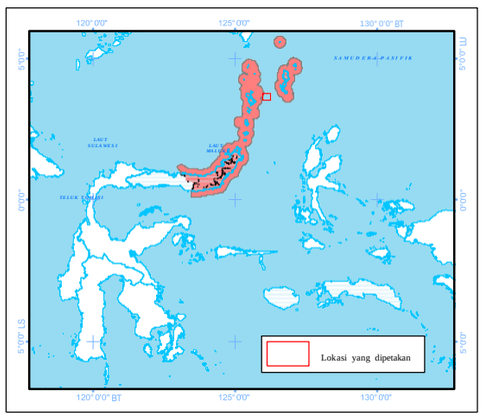

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

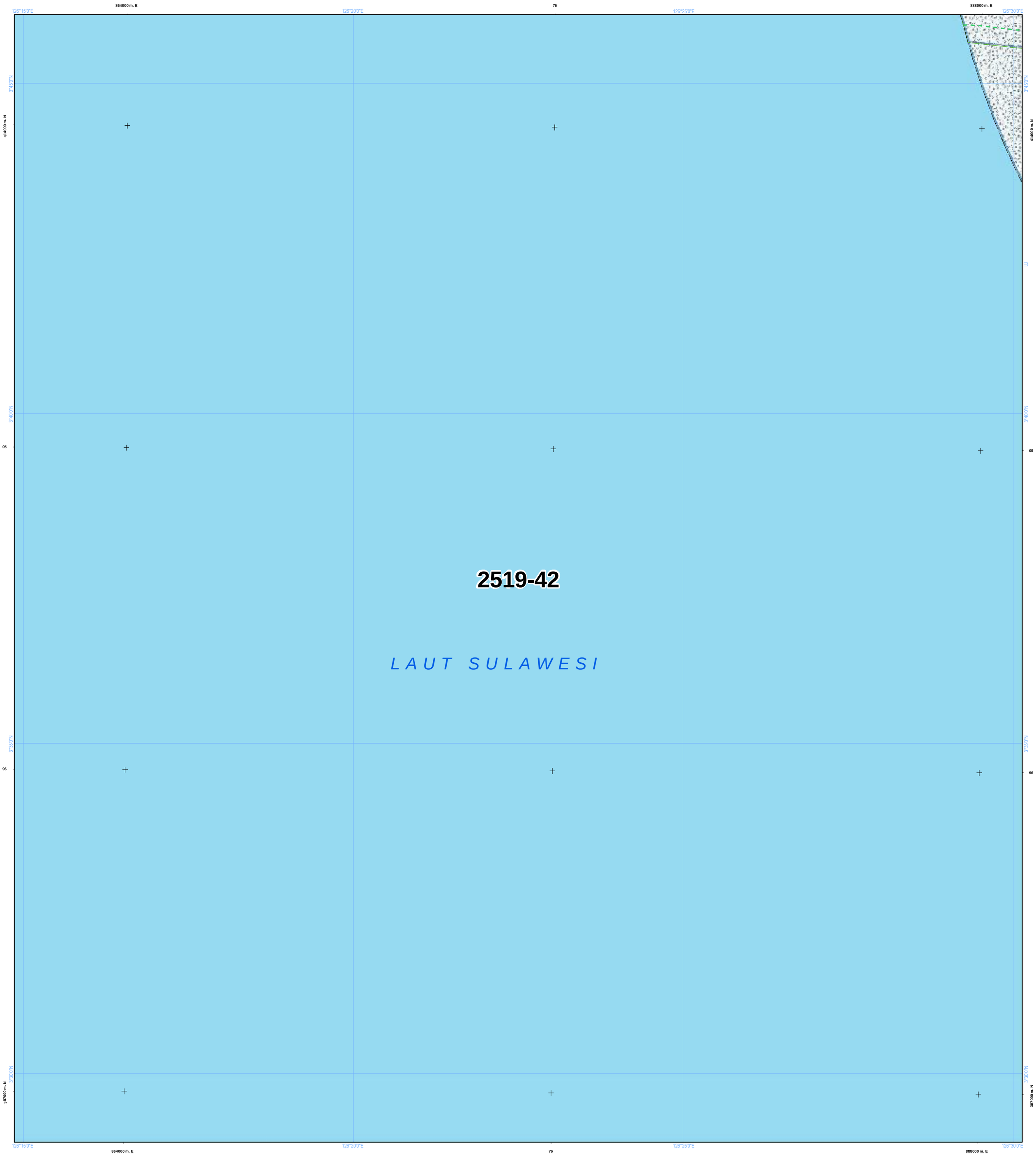

NLP : 2519-42

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

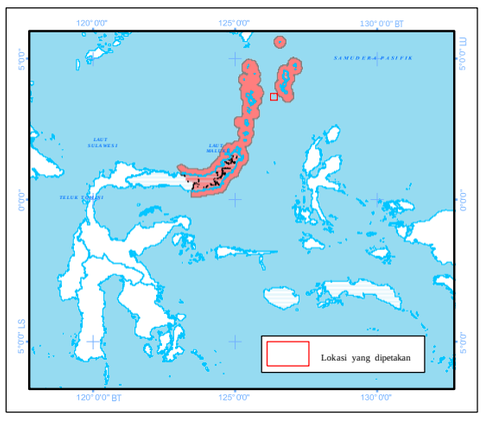

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

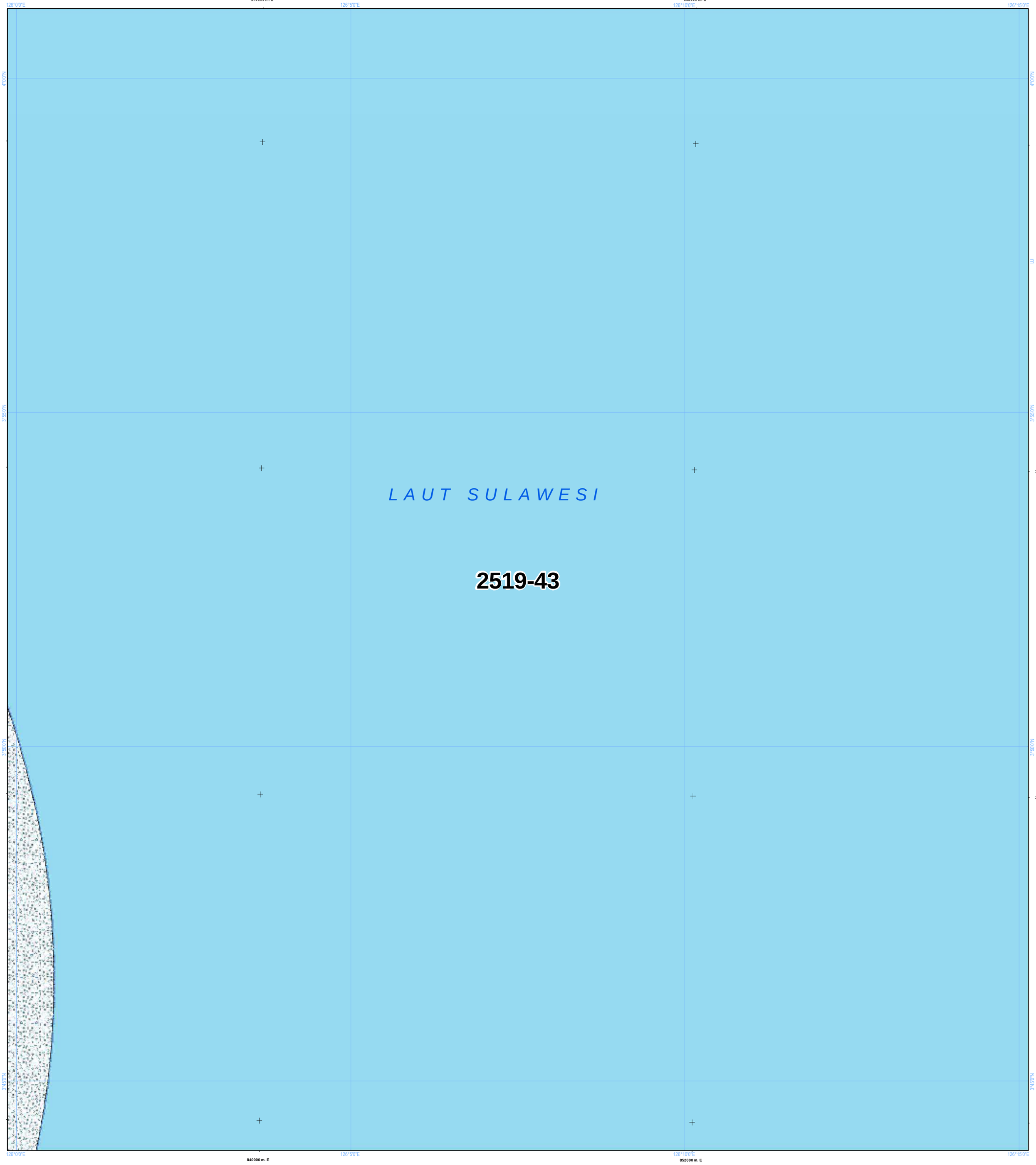

NLP : 2519-43

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

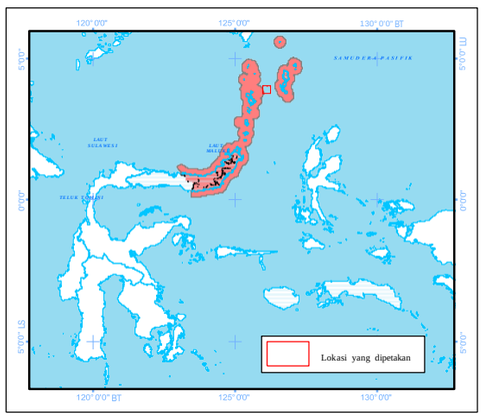

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

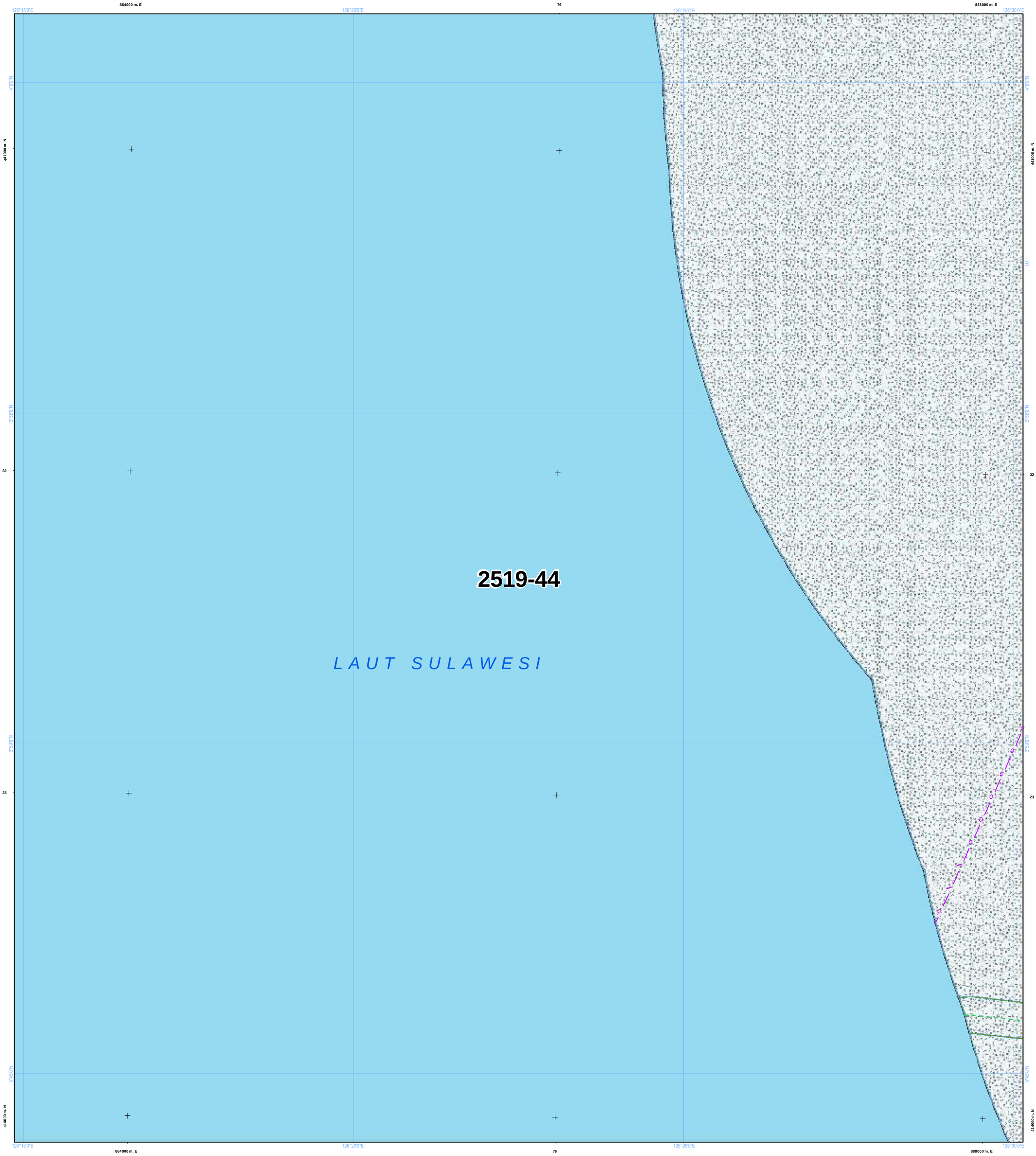

NLP : 2519-44

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

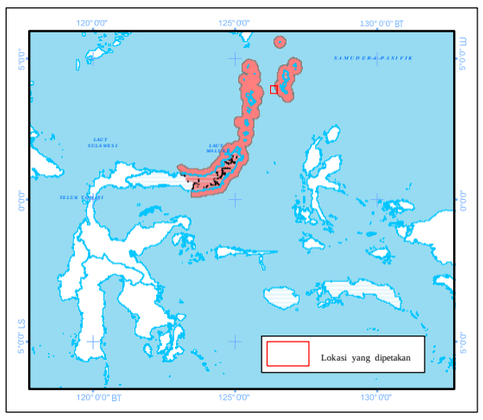

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

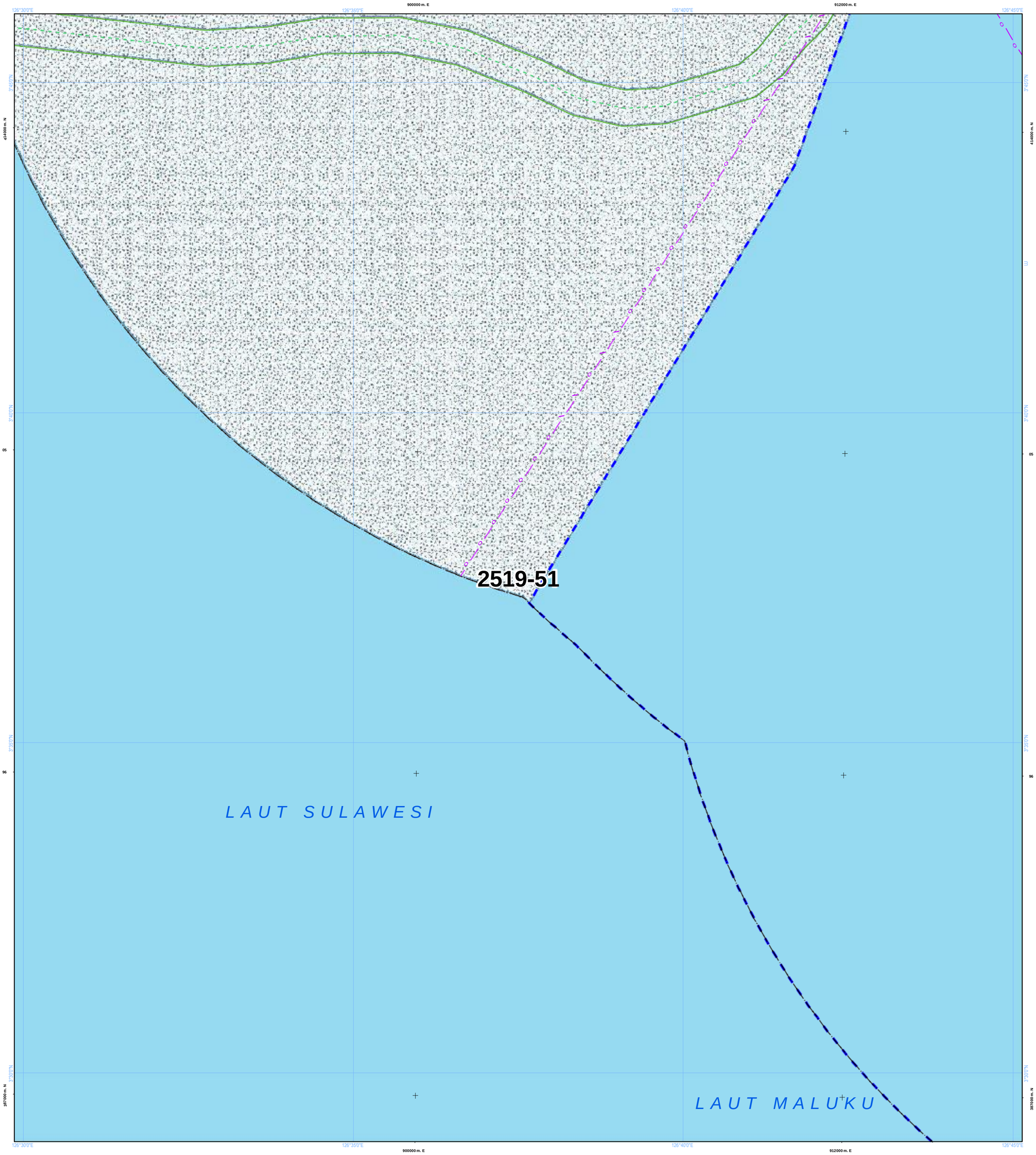

NLP : 2519-51

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

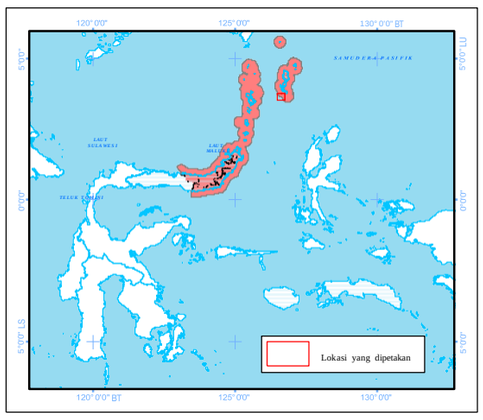

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

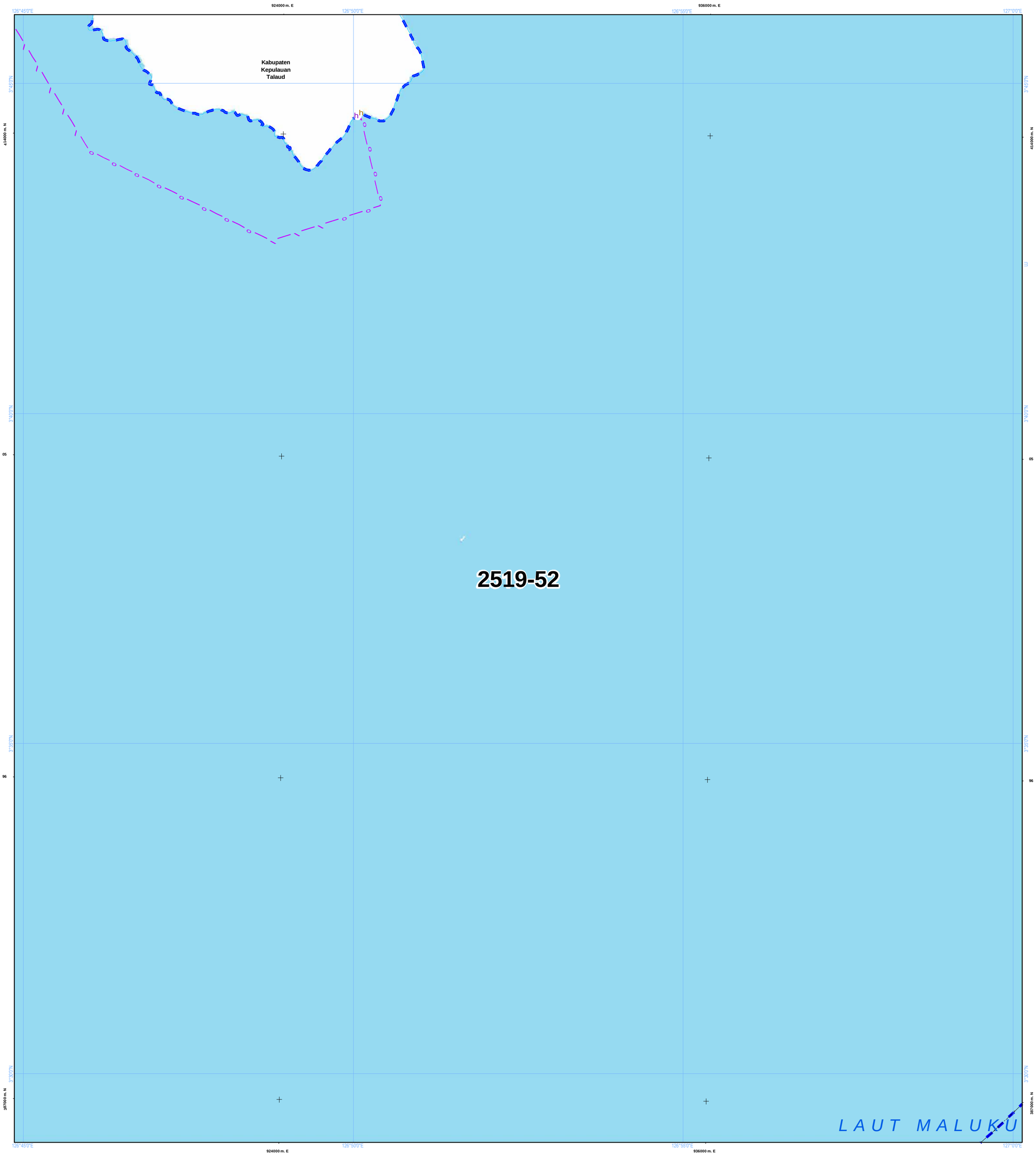

NLP : 2519-52

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

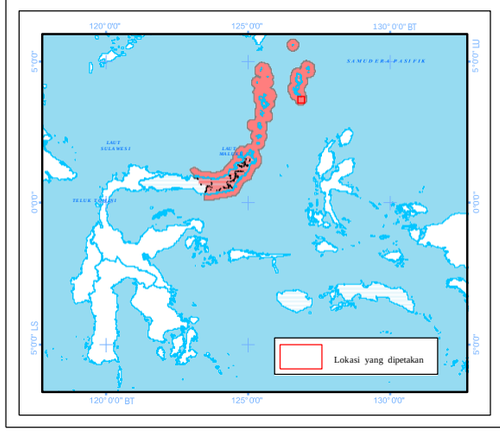

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

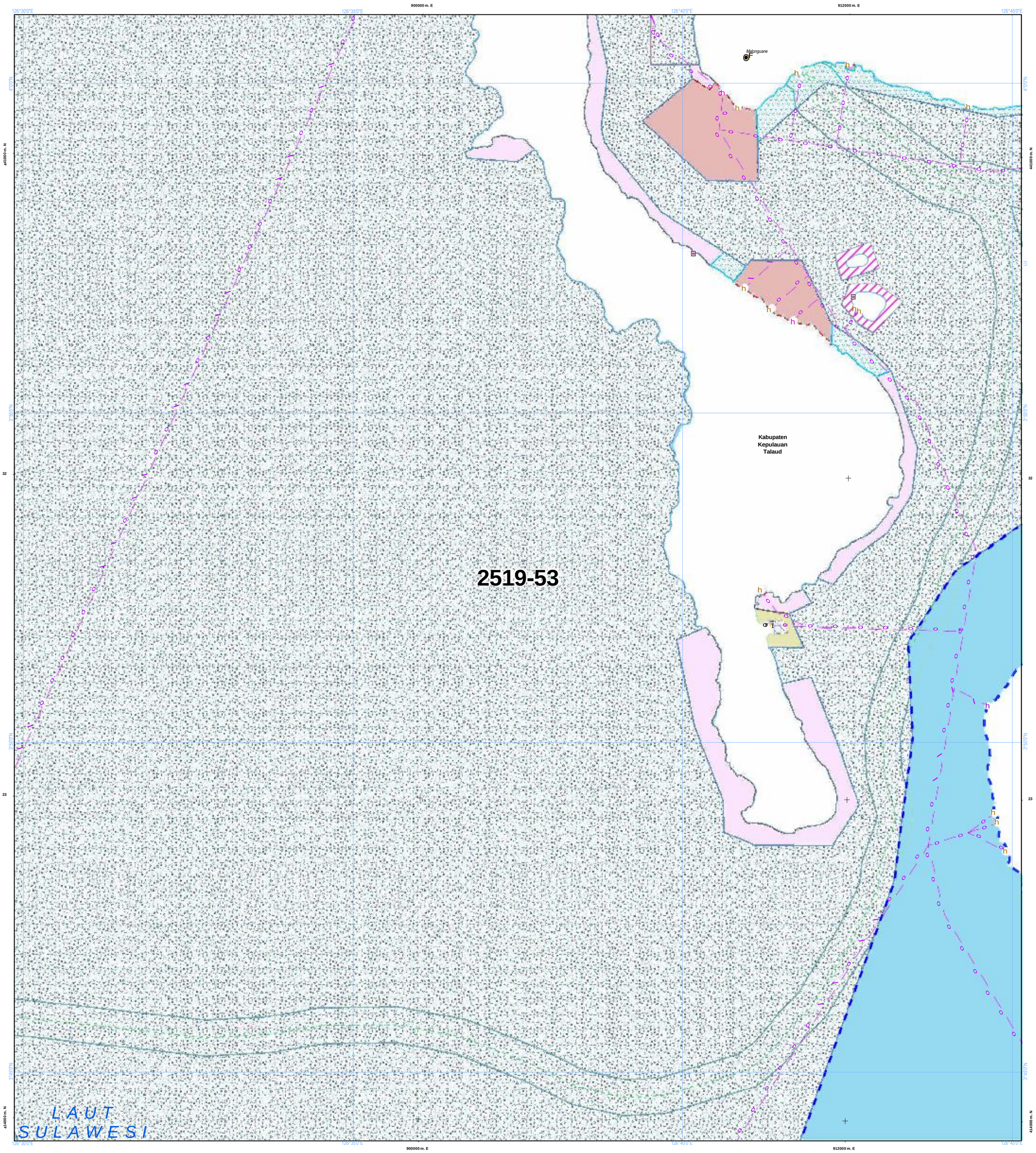

NLP : 2519-53

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

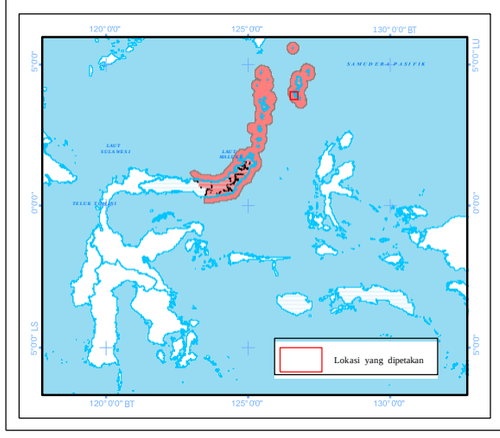

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

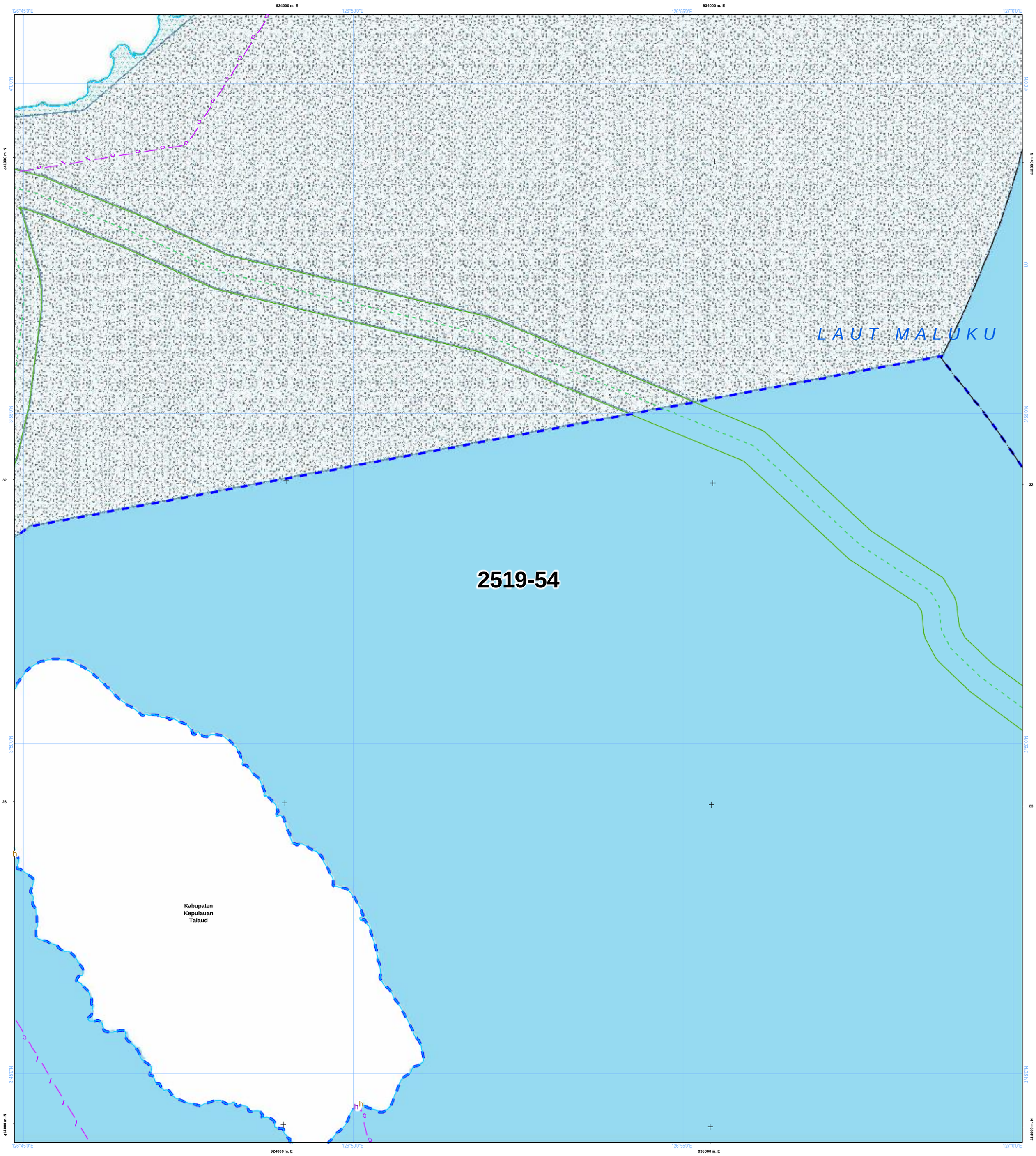

NLP : 2519-54

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

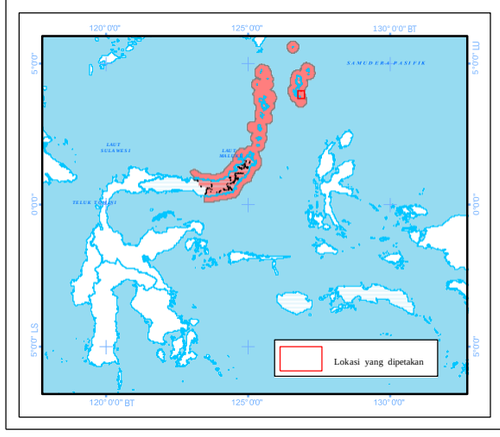

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

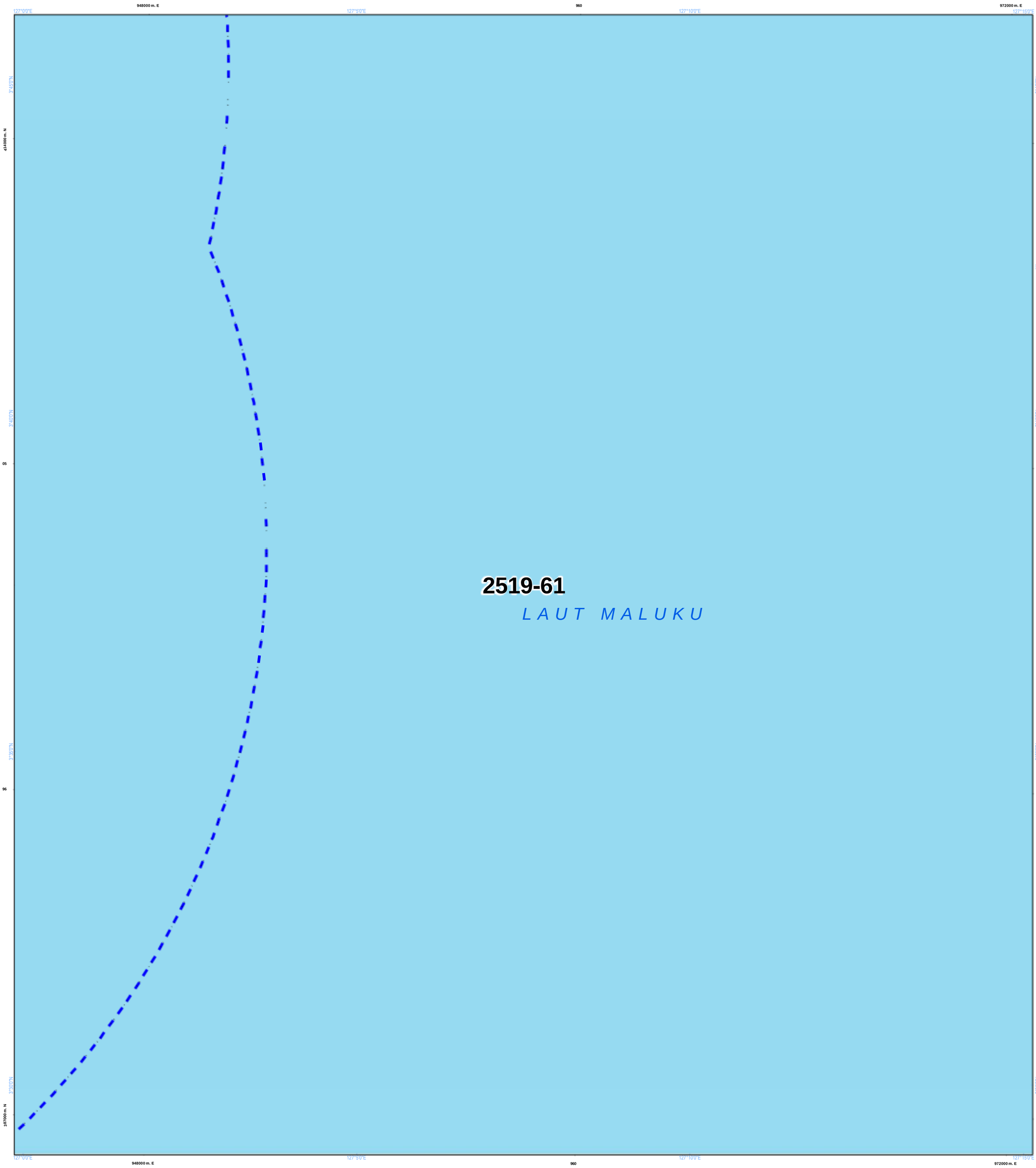

NLP : 2519-61

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

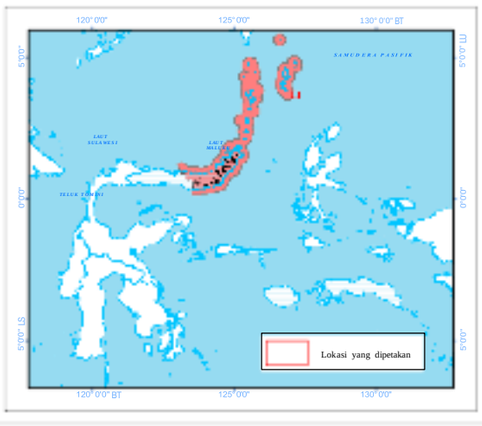

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

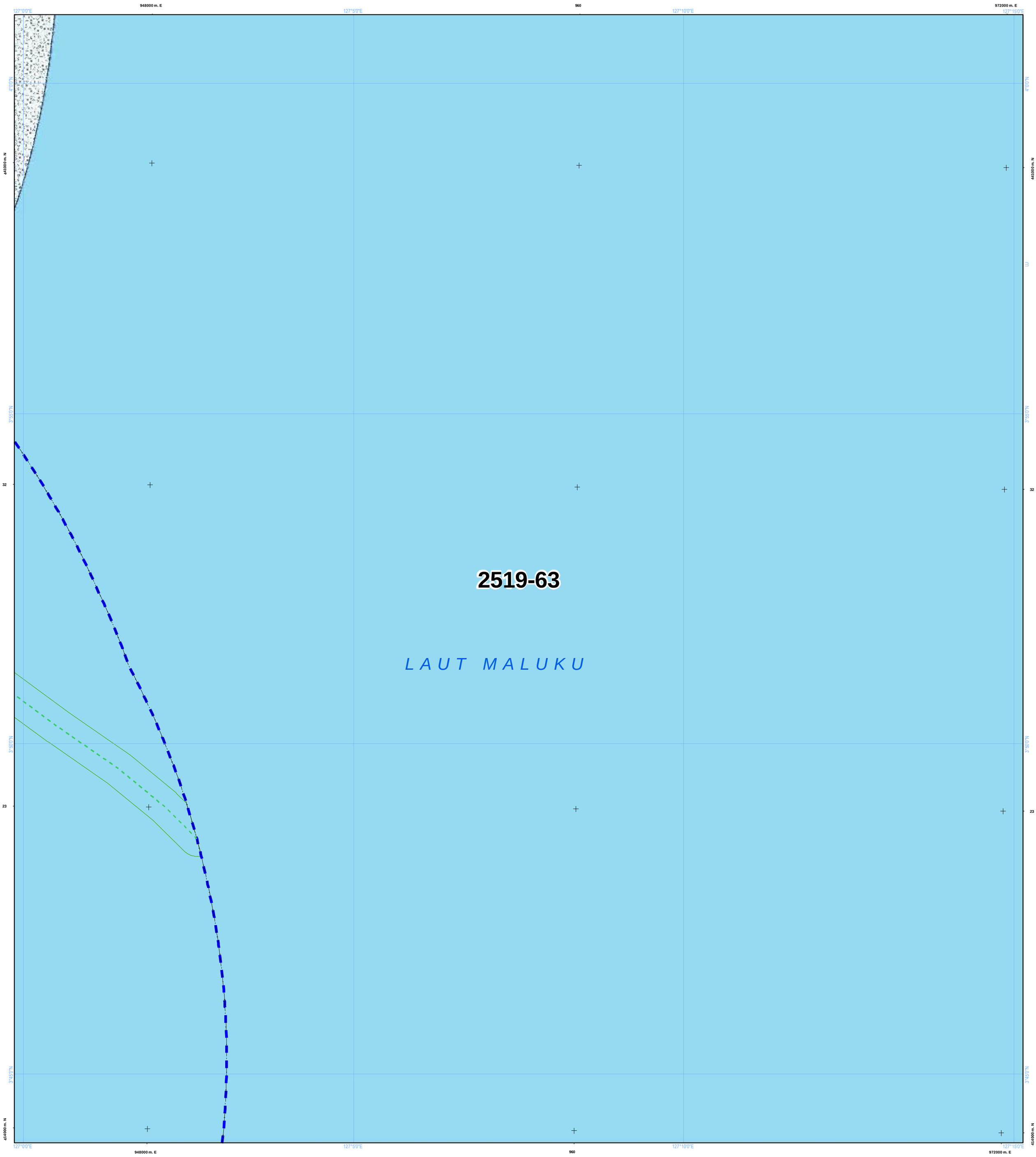

NLP : 2519-63

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

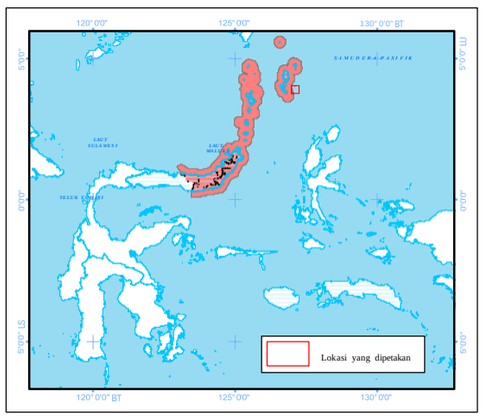

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

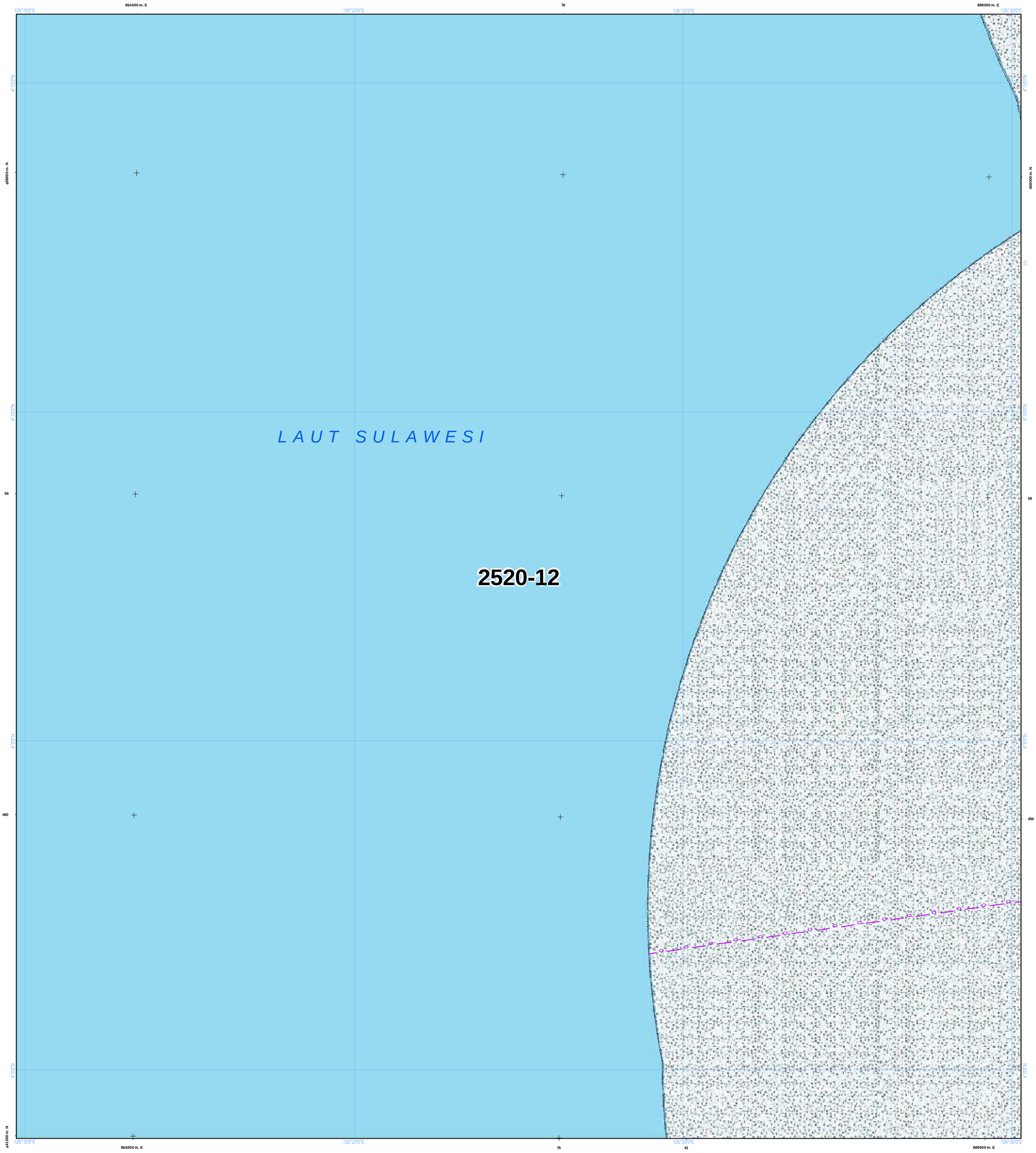

NLP : 2520-12

U SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

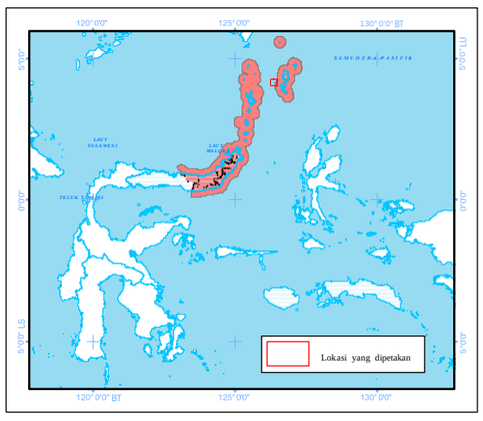

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

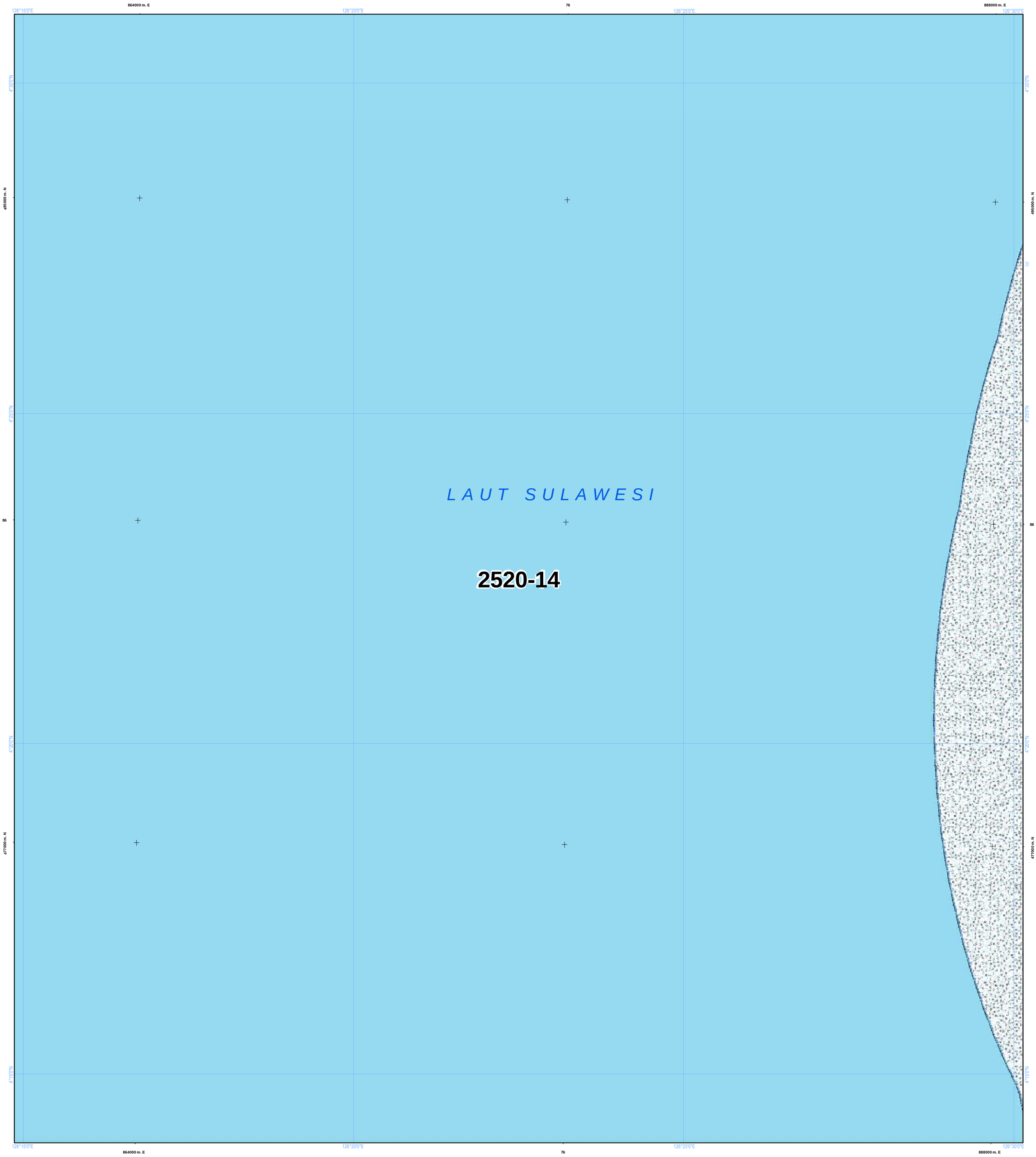

NLP : 2520-14

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

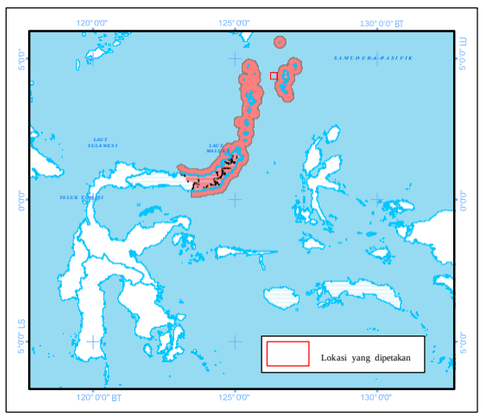

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

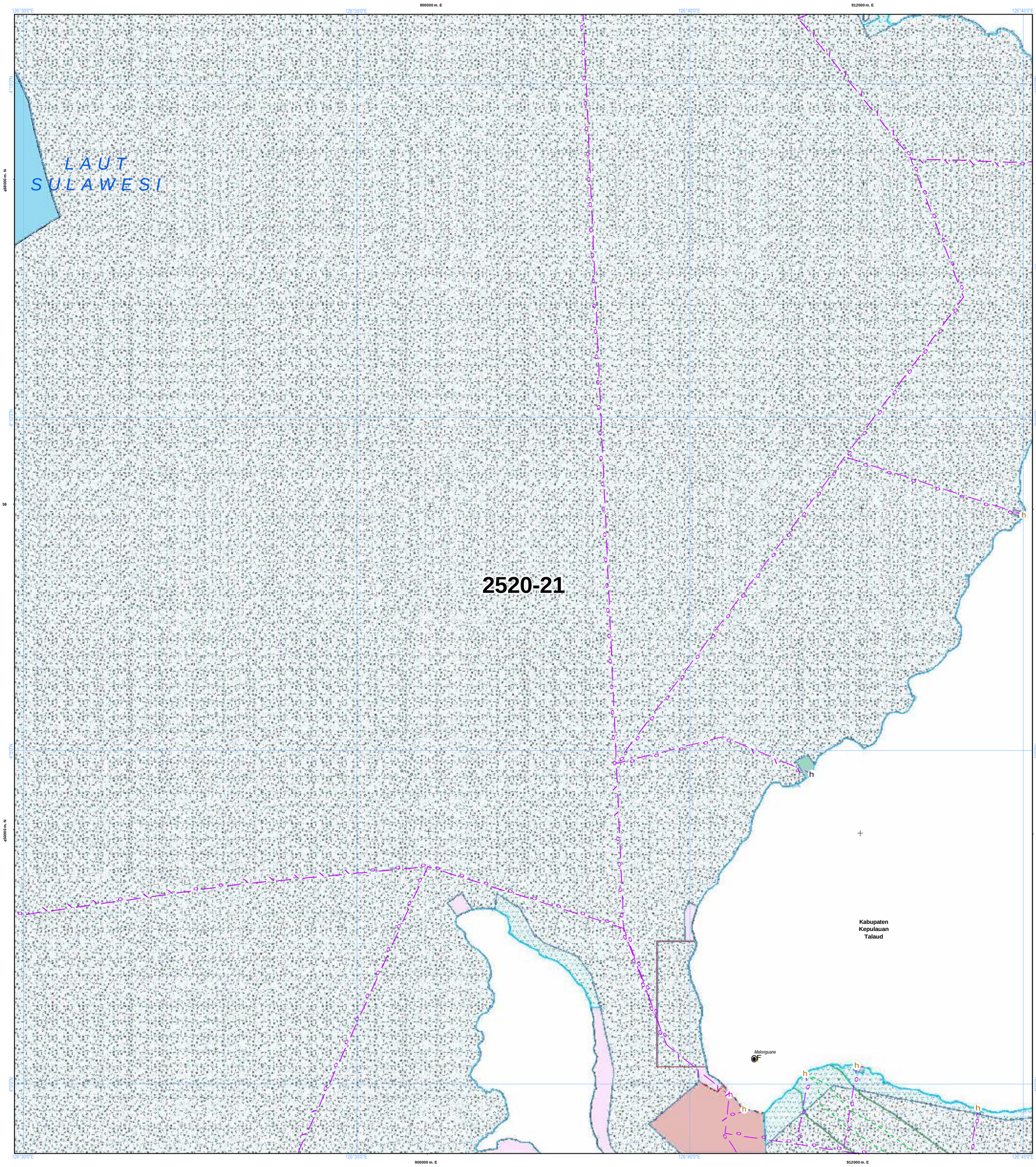

NLP : 2520-21

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

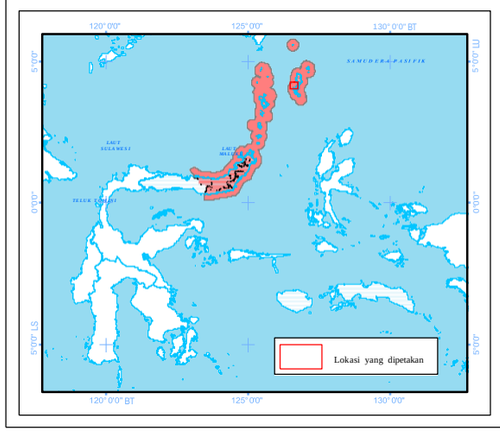

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

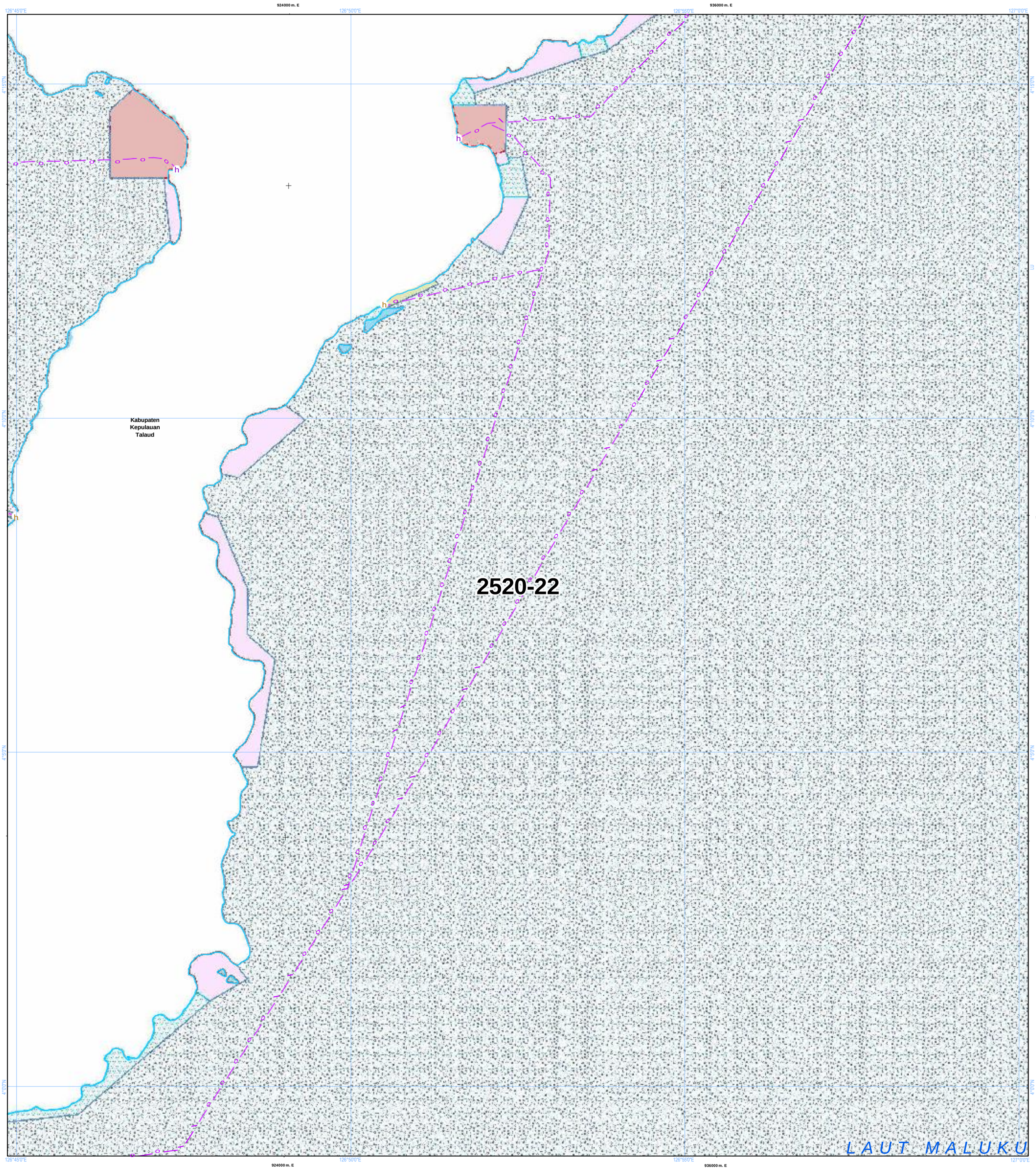

NLP : 2520-22

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

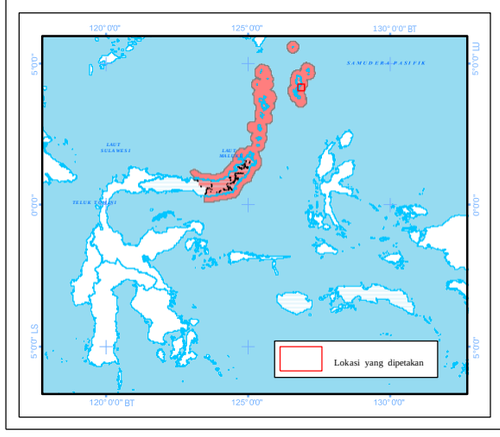

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

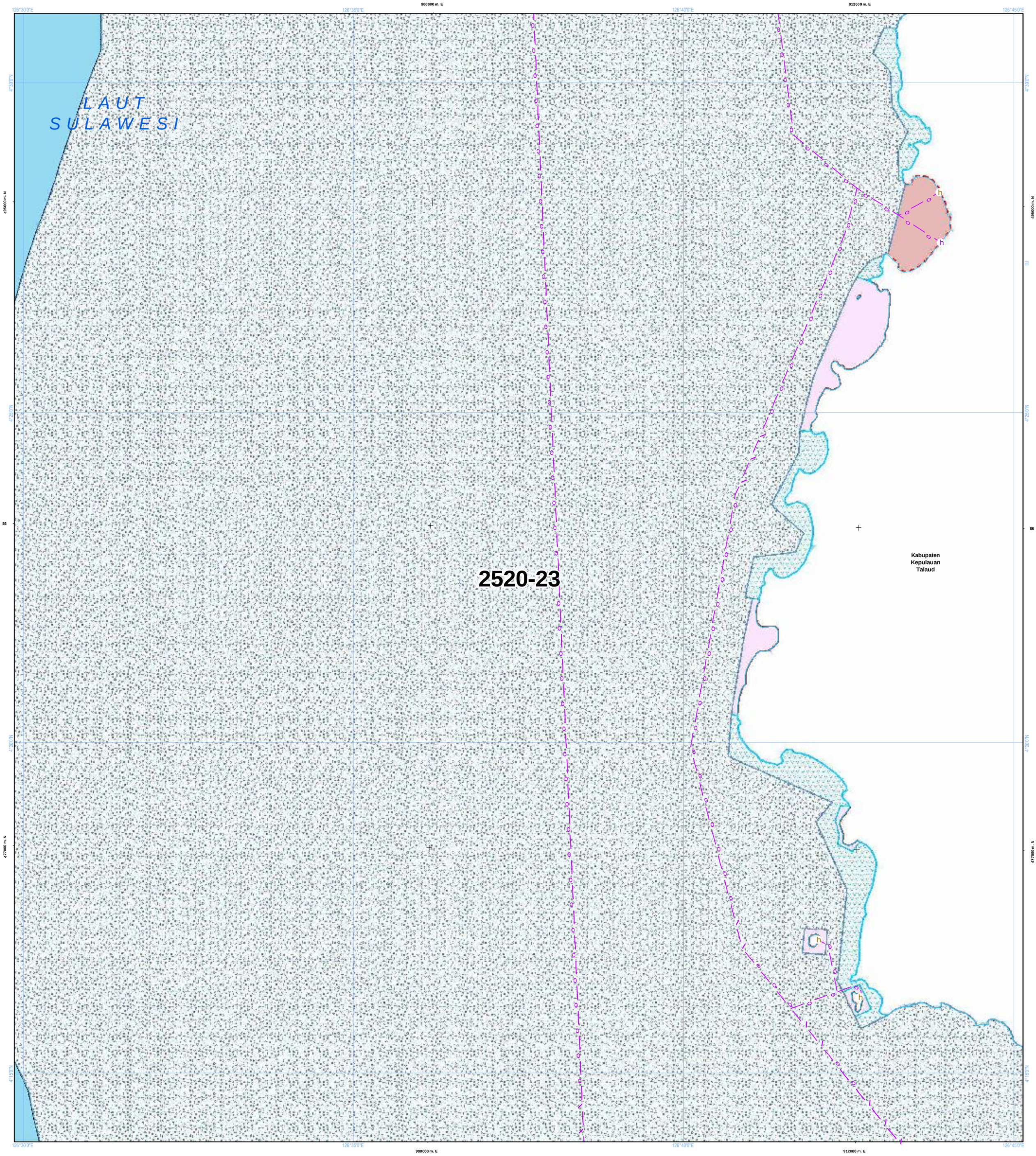

NLP : 2520-23

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

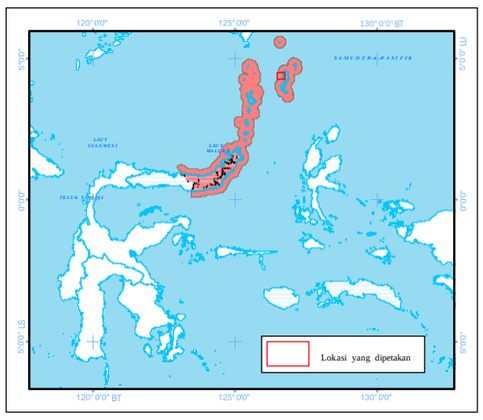

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

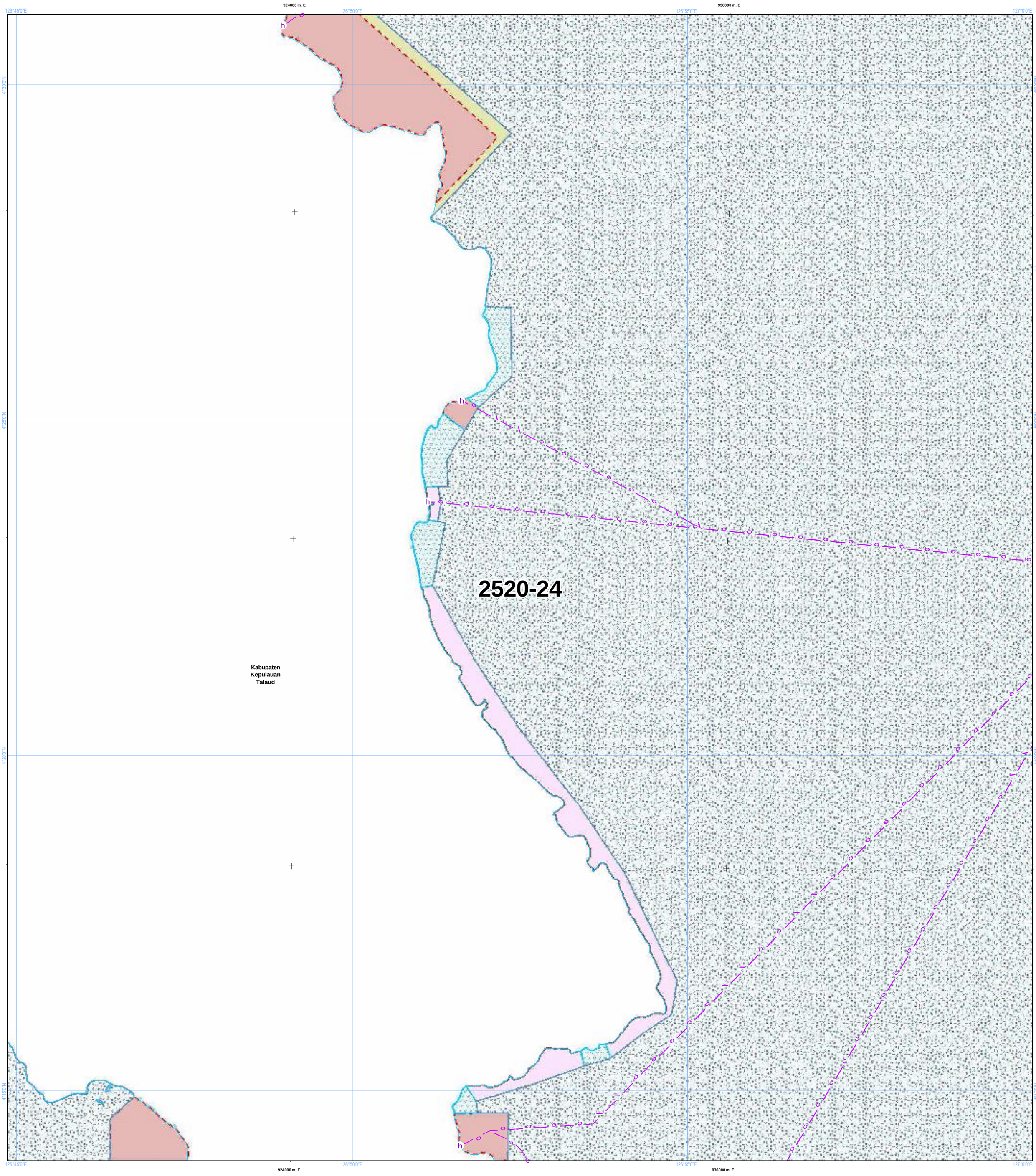

NLP : 2520-24

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

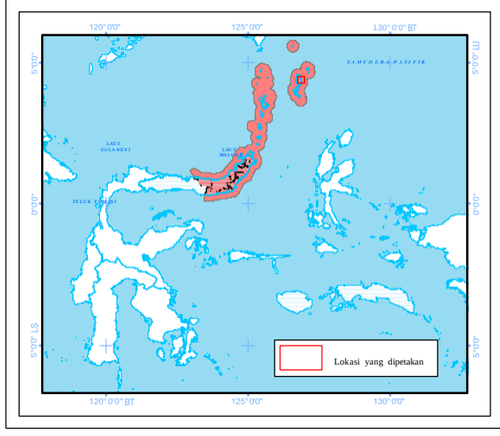

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

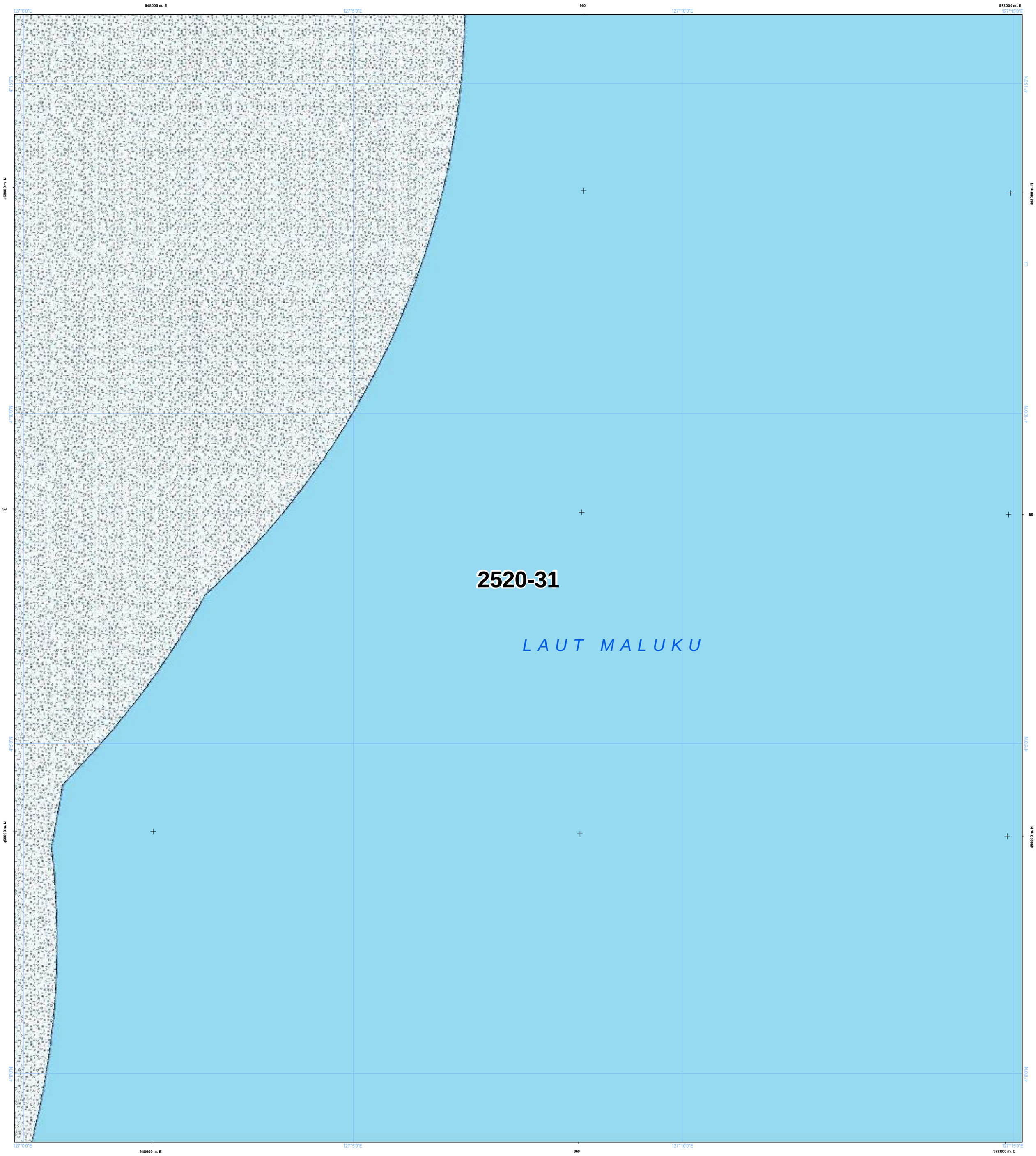

NLP : 2520-31

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

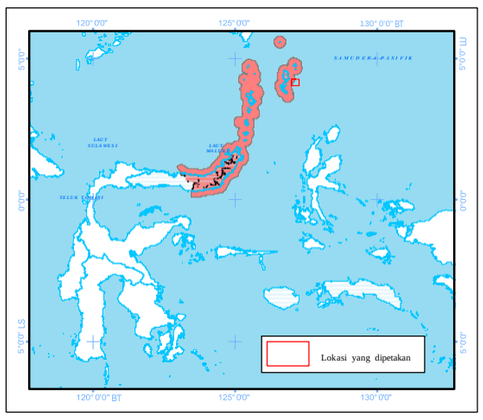

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

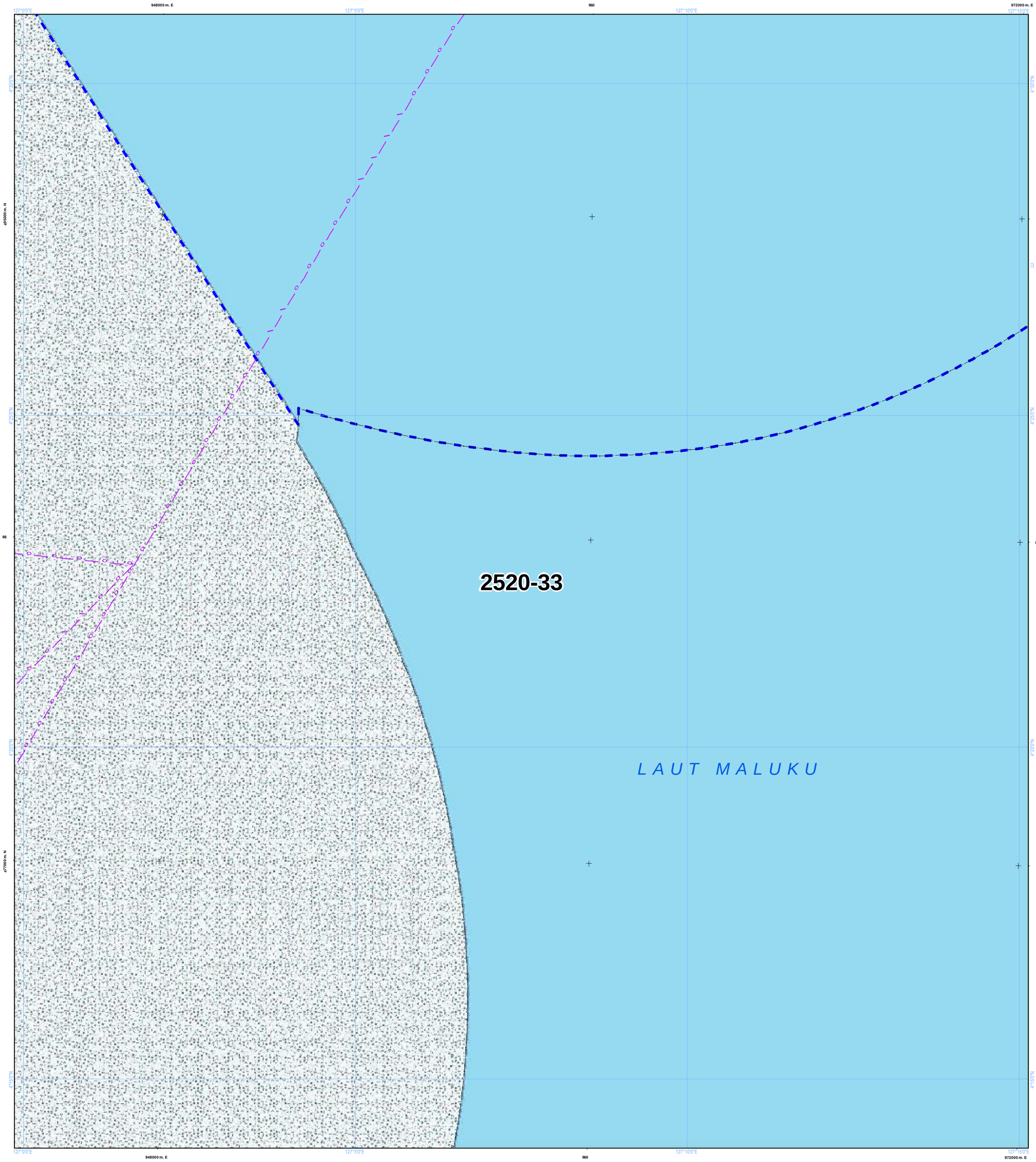

NLP : 2520-33

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

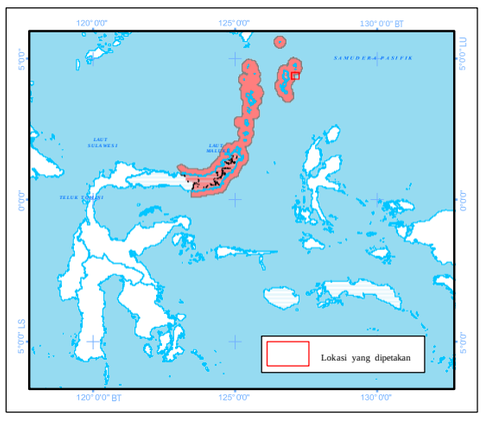

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

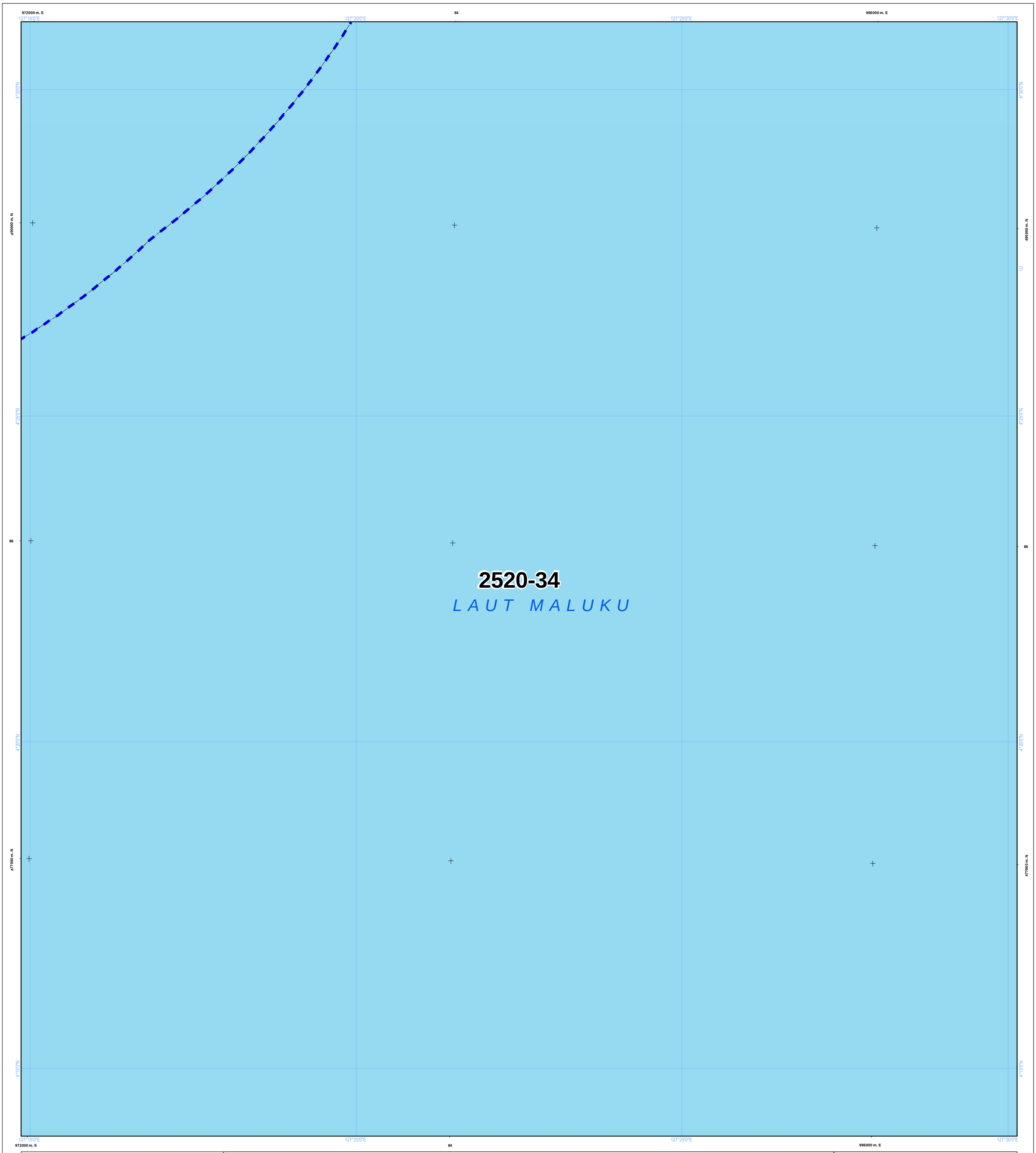

NLP : 2520-34

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

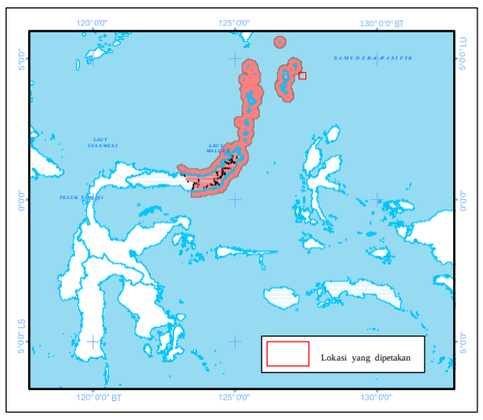

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP PPI Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

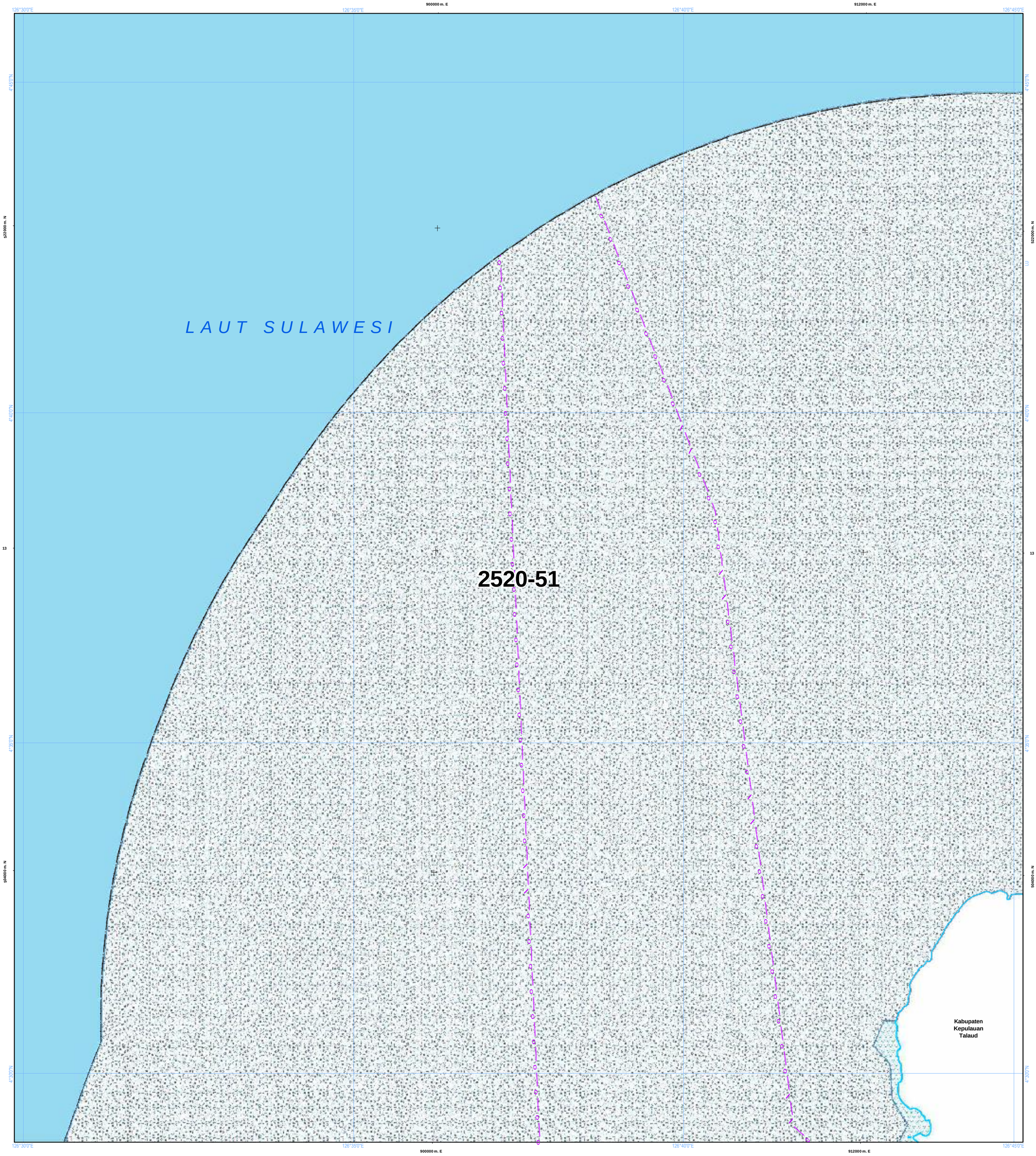

NLP : 2520-51

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

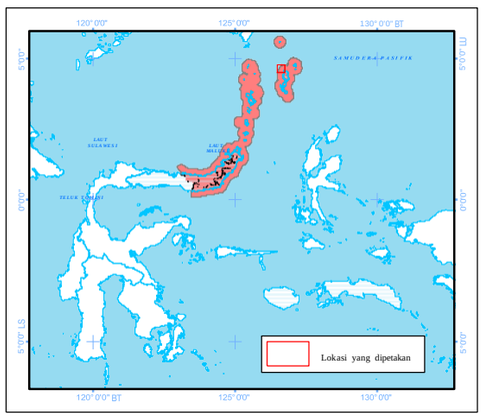

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

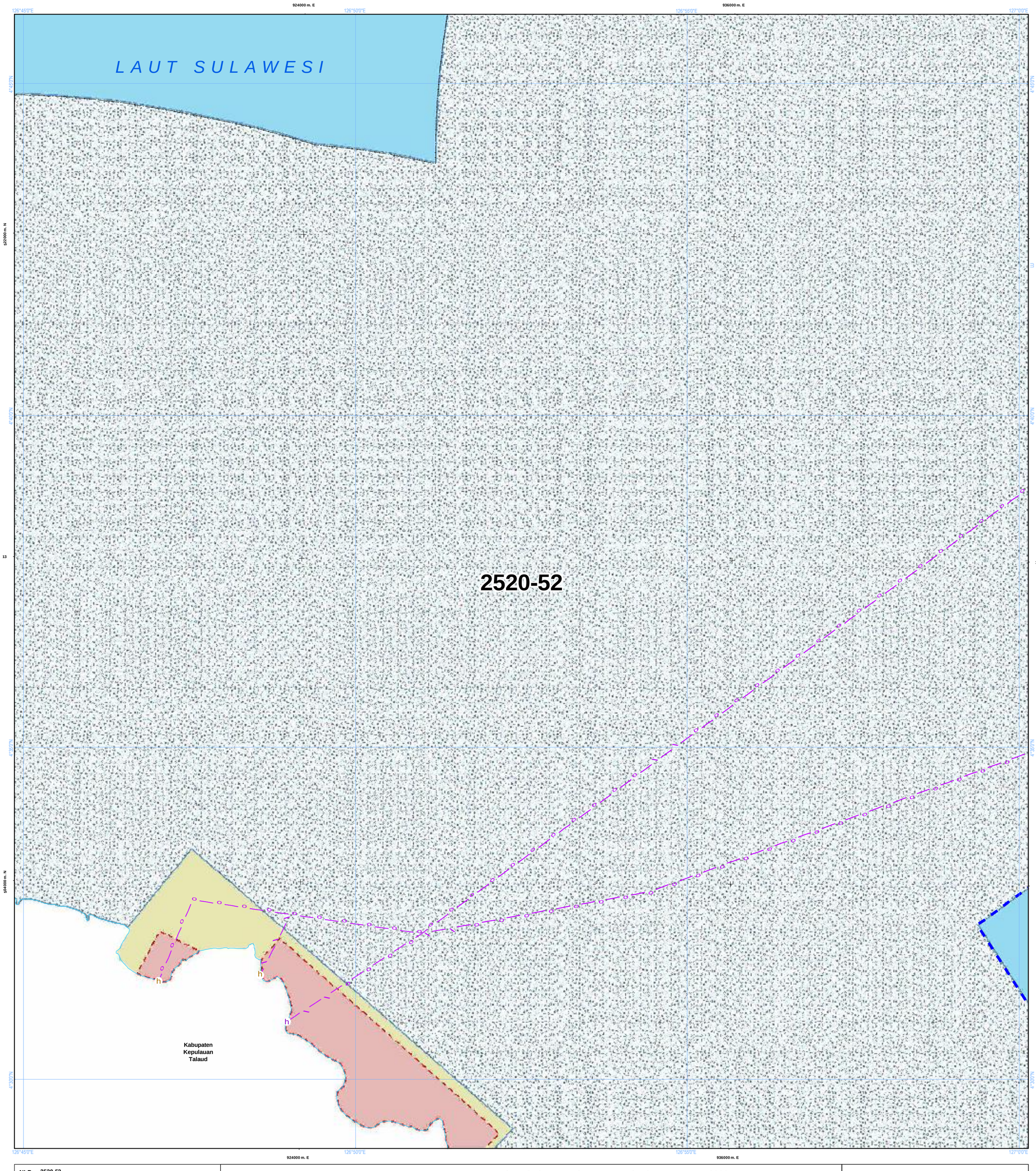

NLP : 2520-52

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

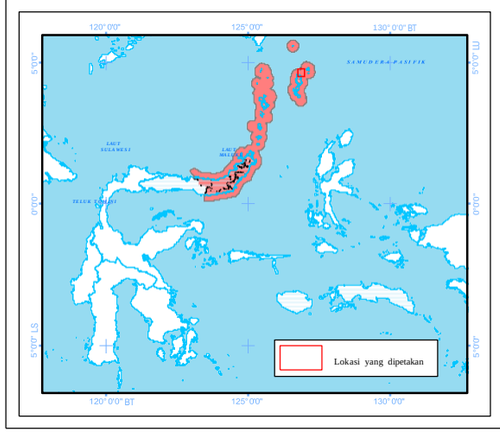

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

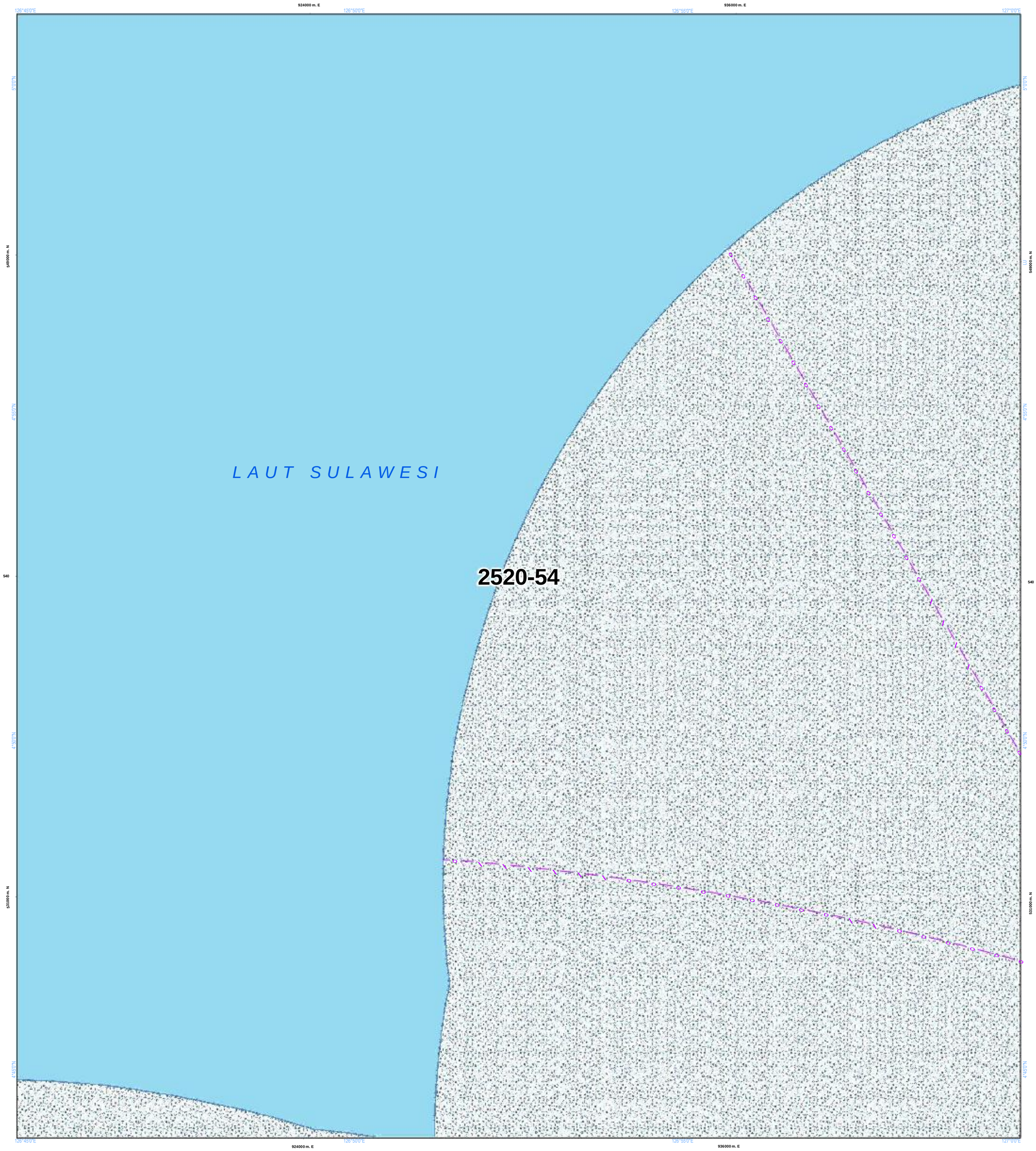

NLP : 2520-54

U SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

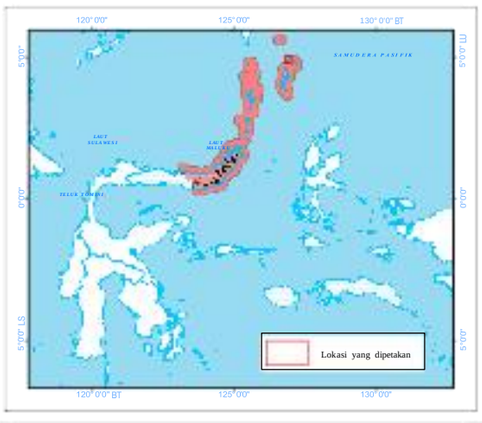

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS
- Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

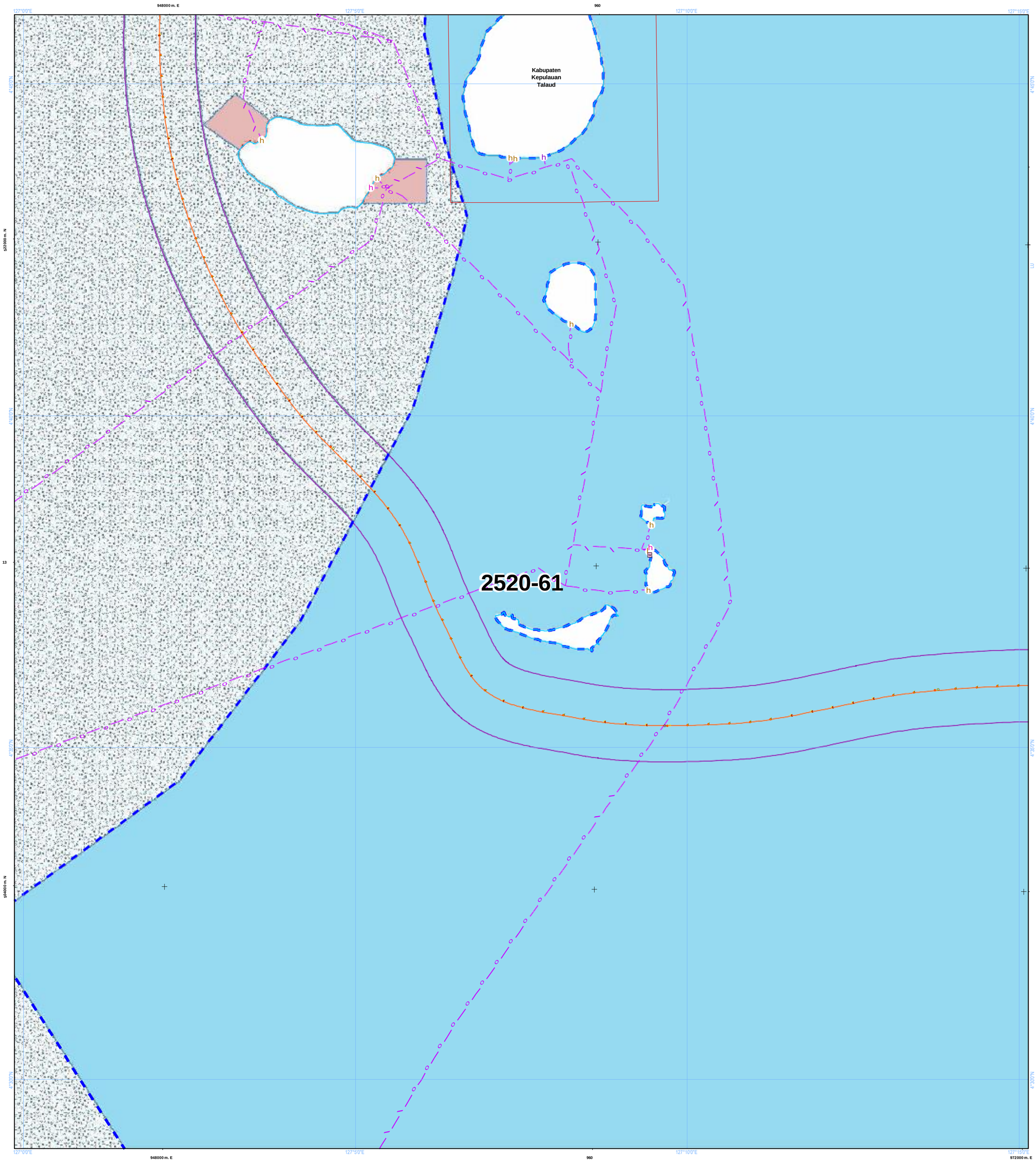

NLP : 2520-61

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

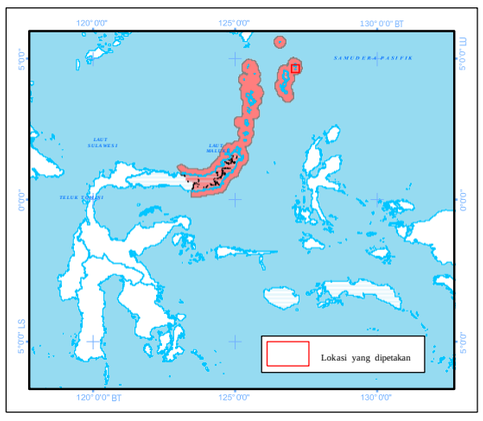

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

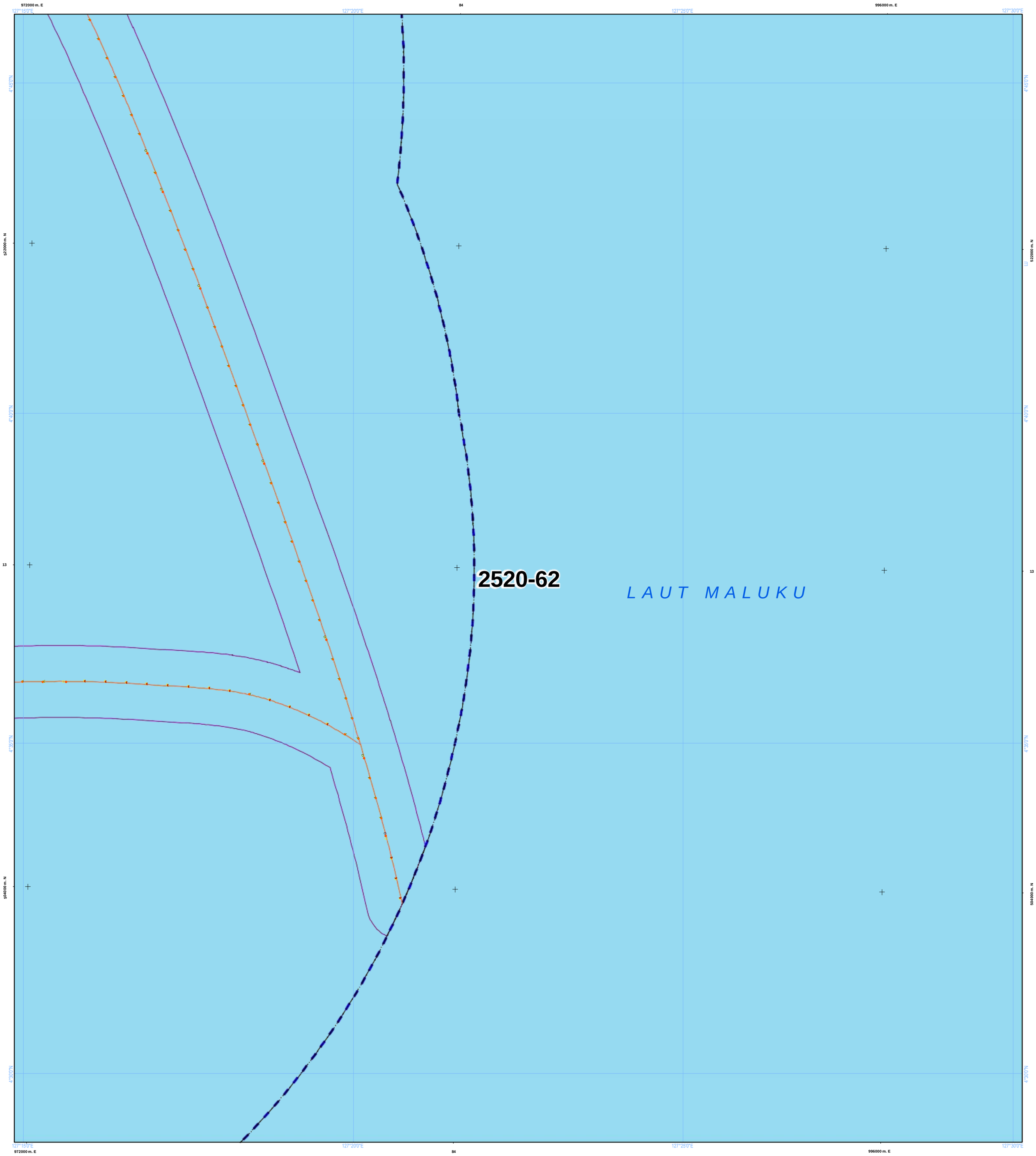

NLP : 2520-62

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

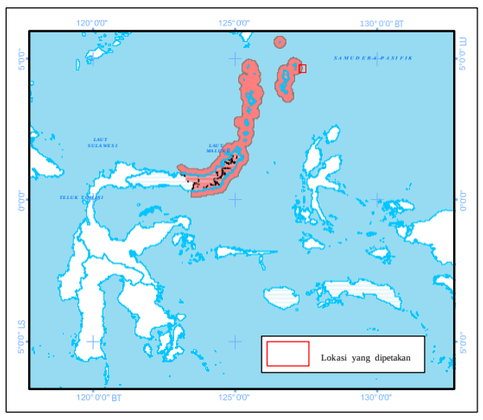

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

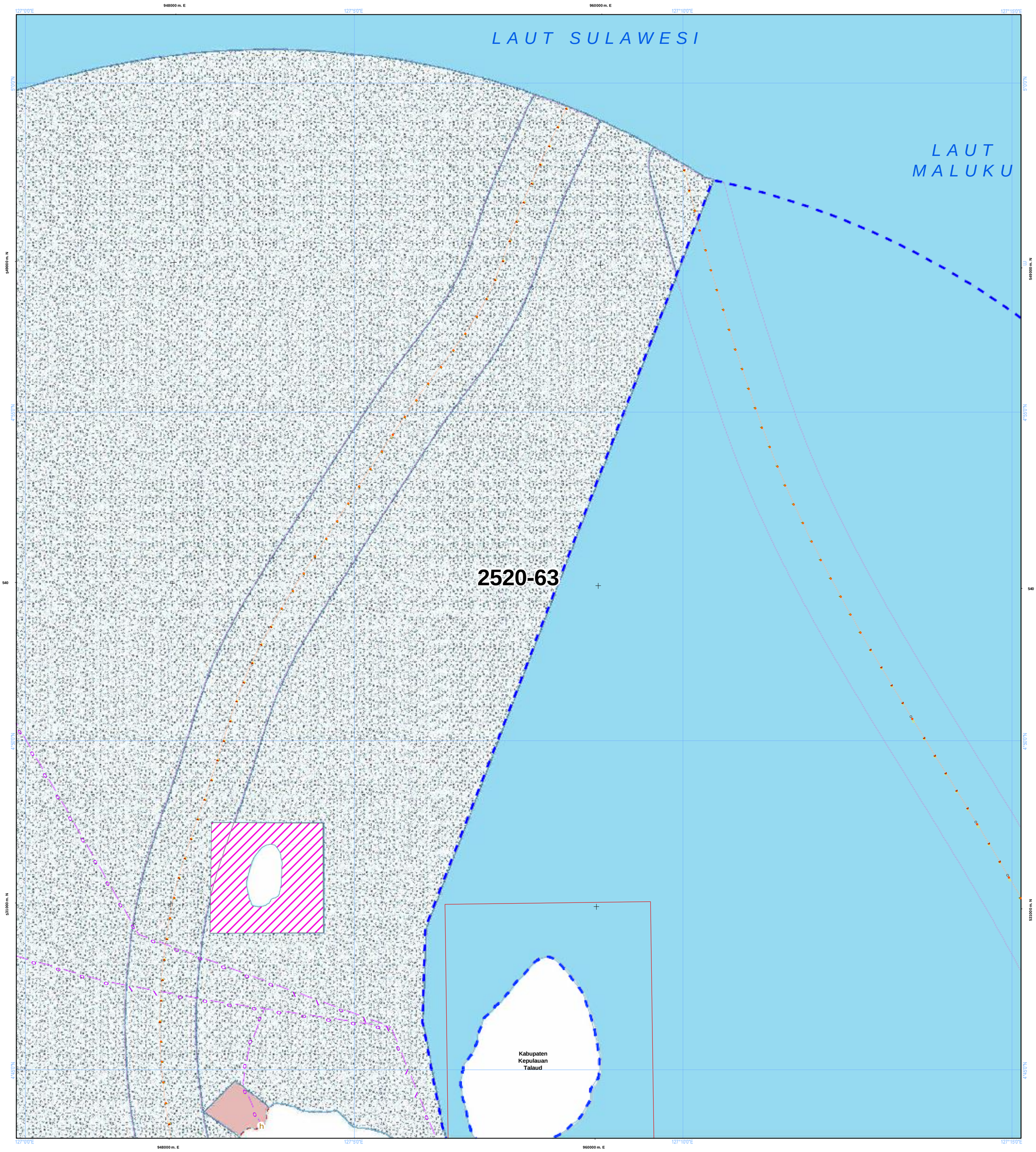

NLP : 2520-63

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

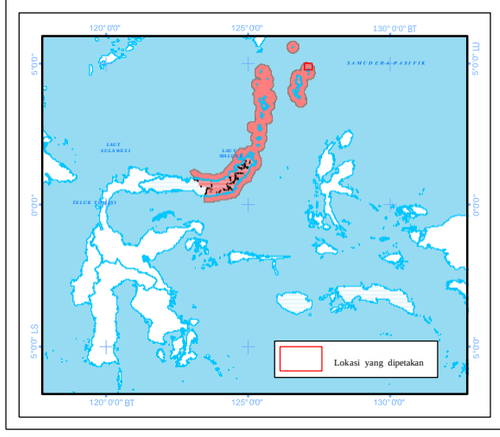

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- G Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

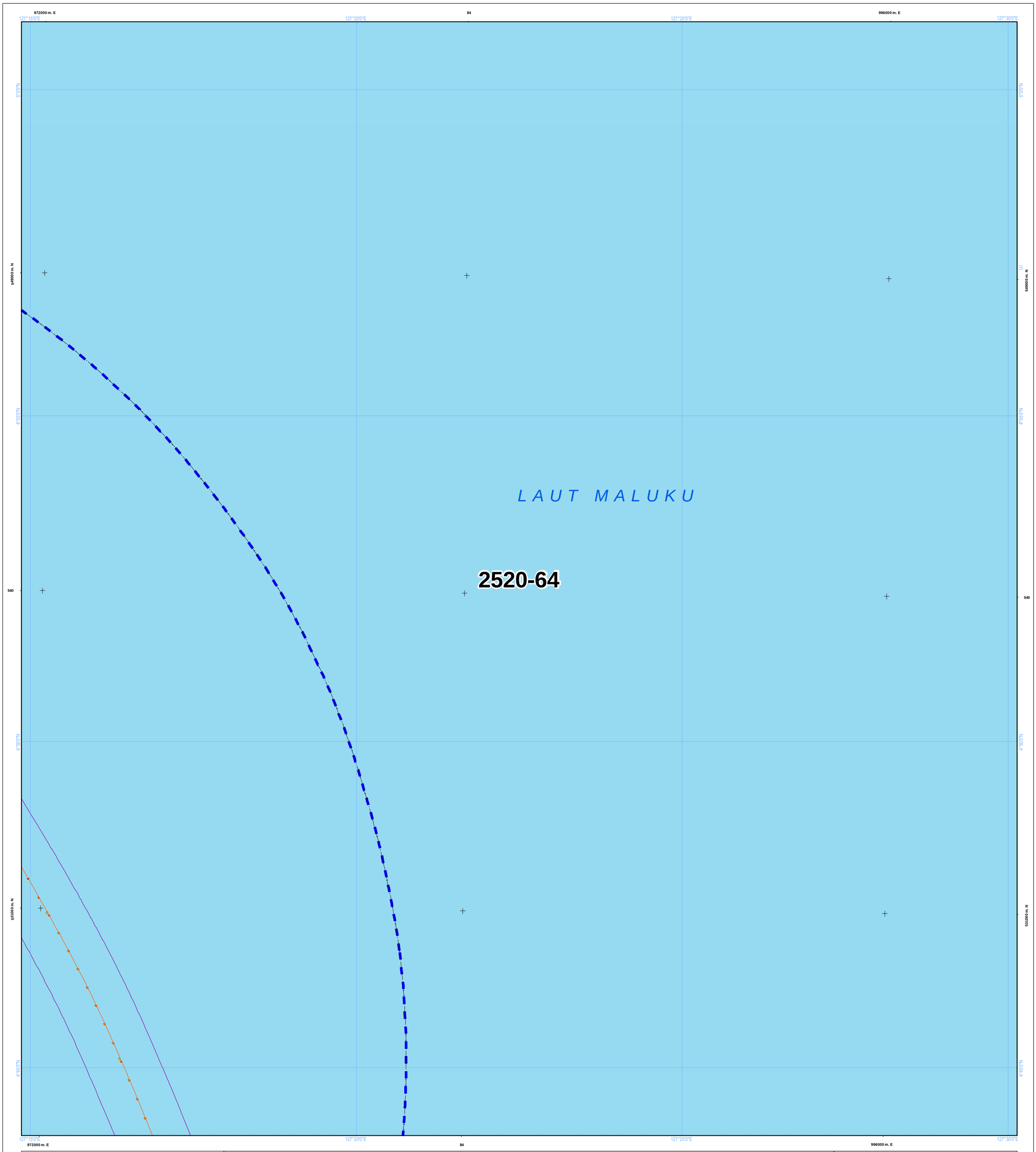

NLP : 2520-64

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

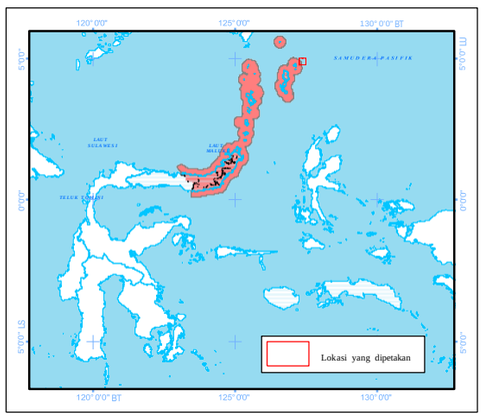

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

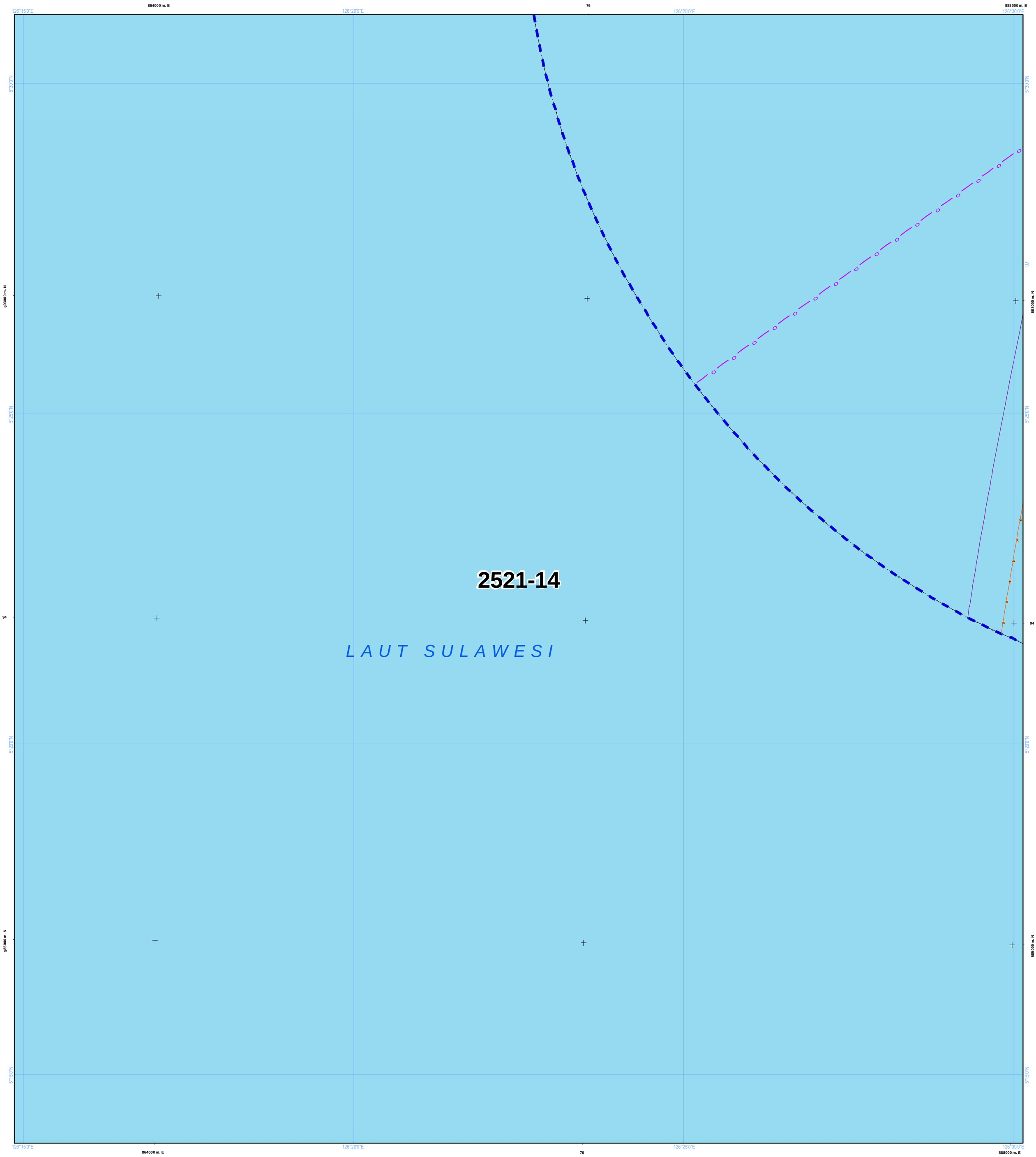

NLP : 2521-14

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

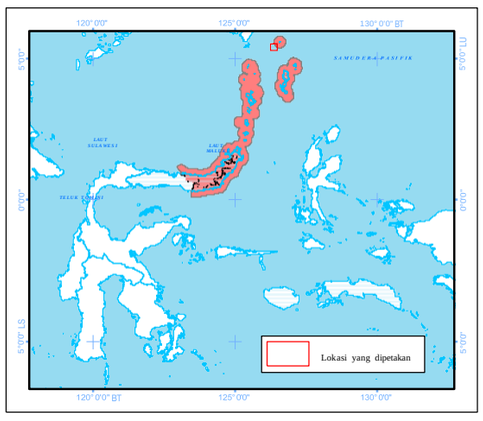

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

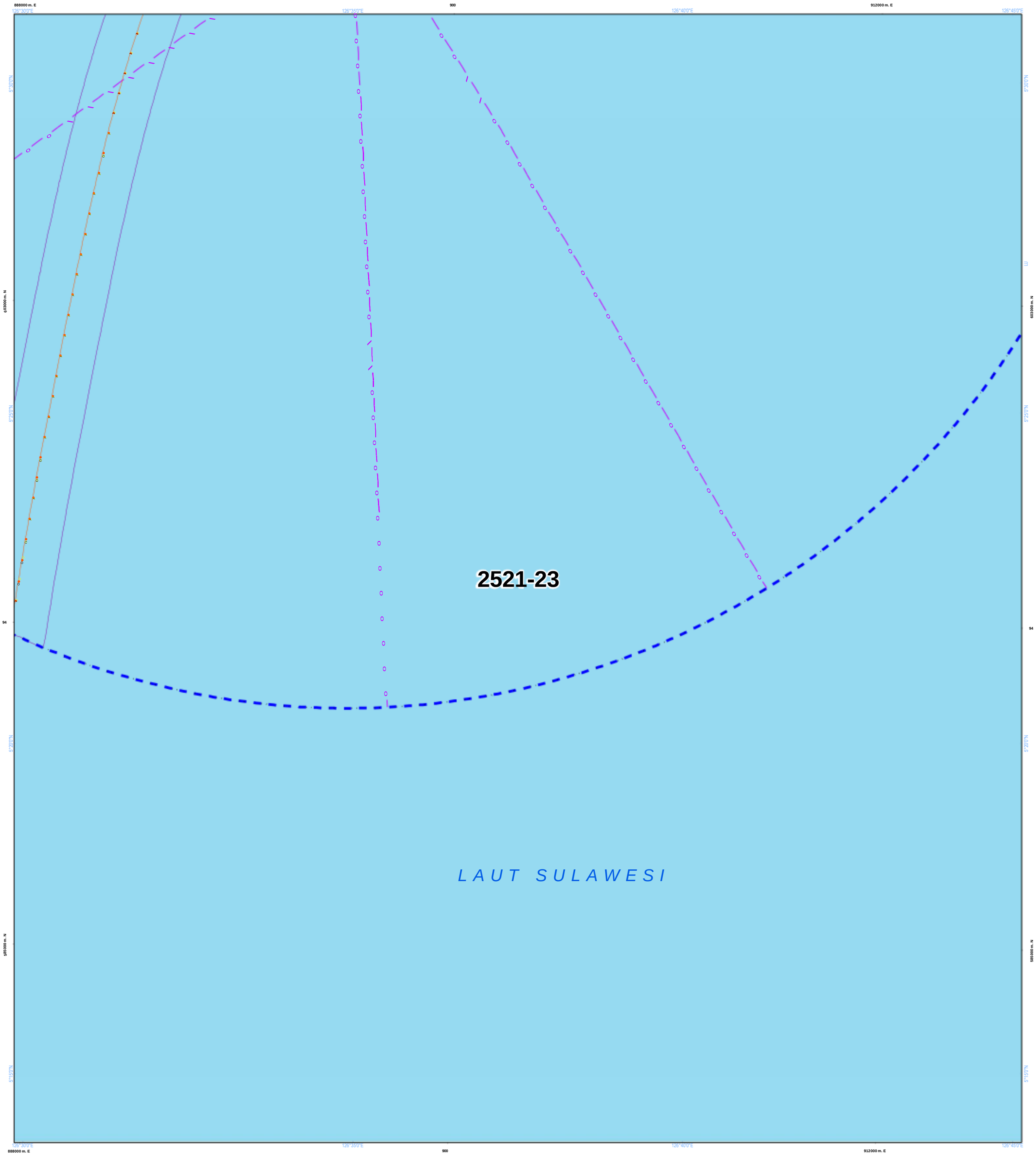

NLP : 2521-23

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

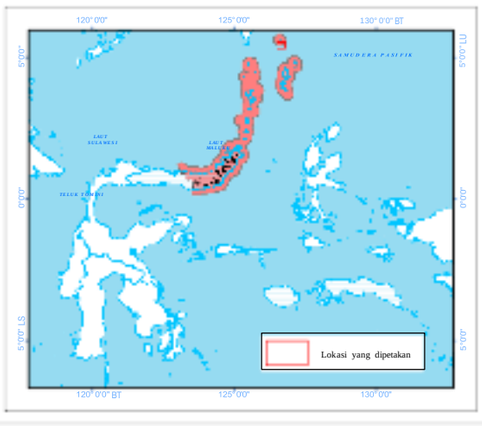

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan
- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan
- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi
- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan
- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum
- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut
- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi
- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus
- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT
- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

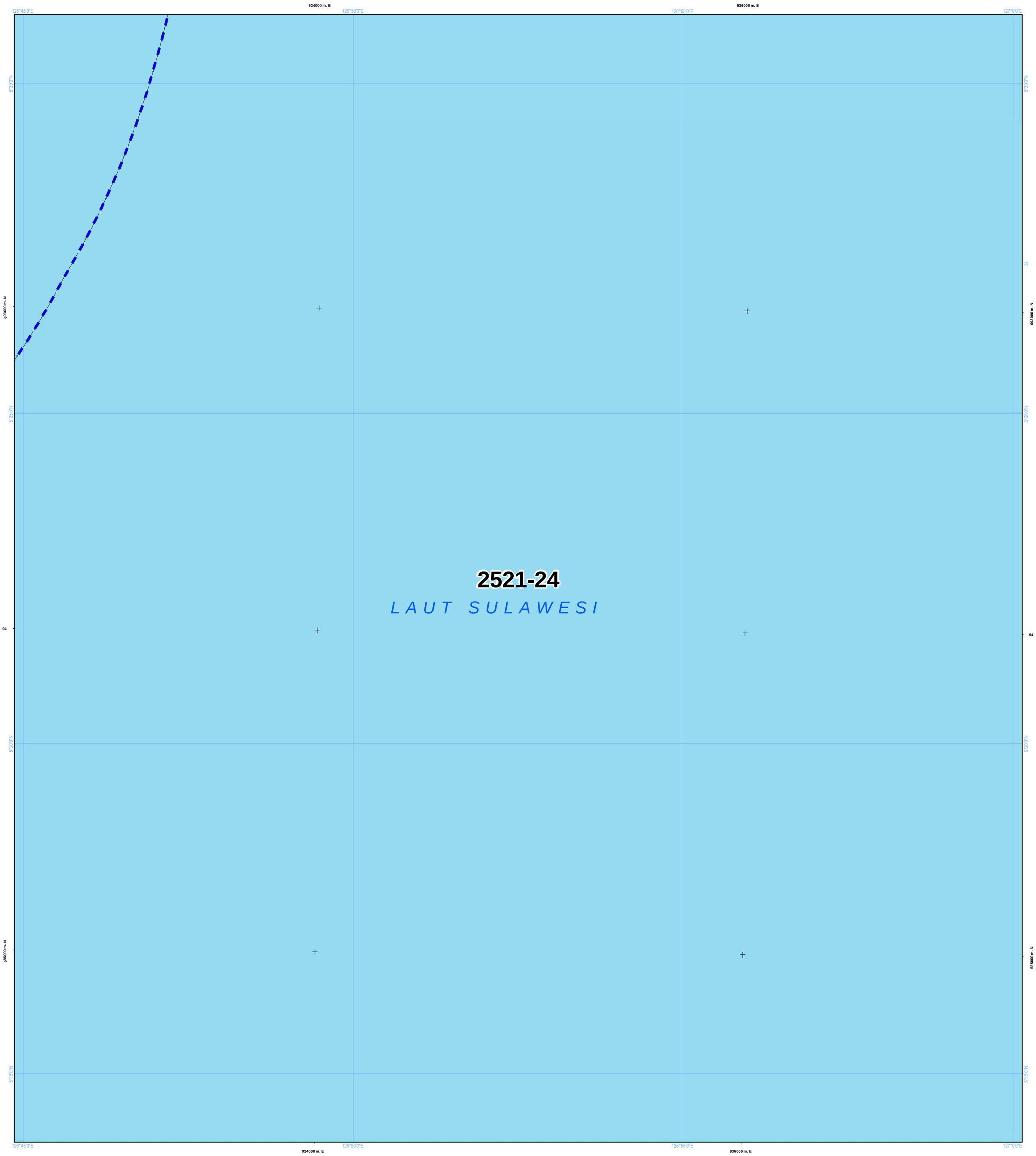

NLP : 2521-24

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

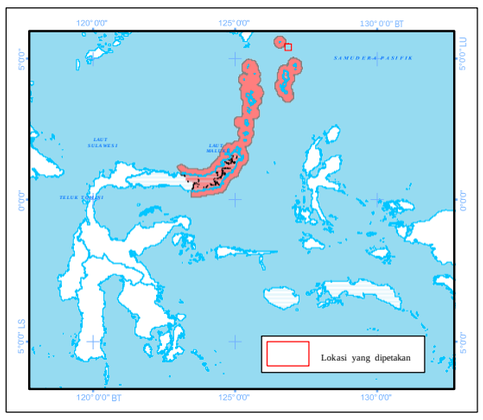

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

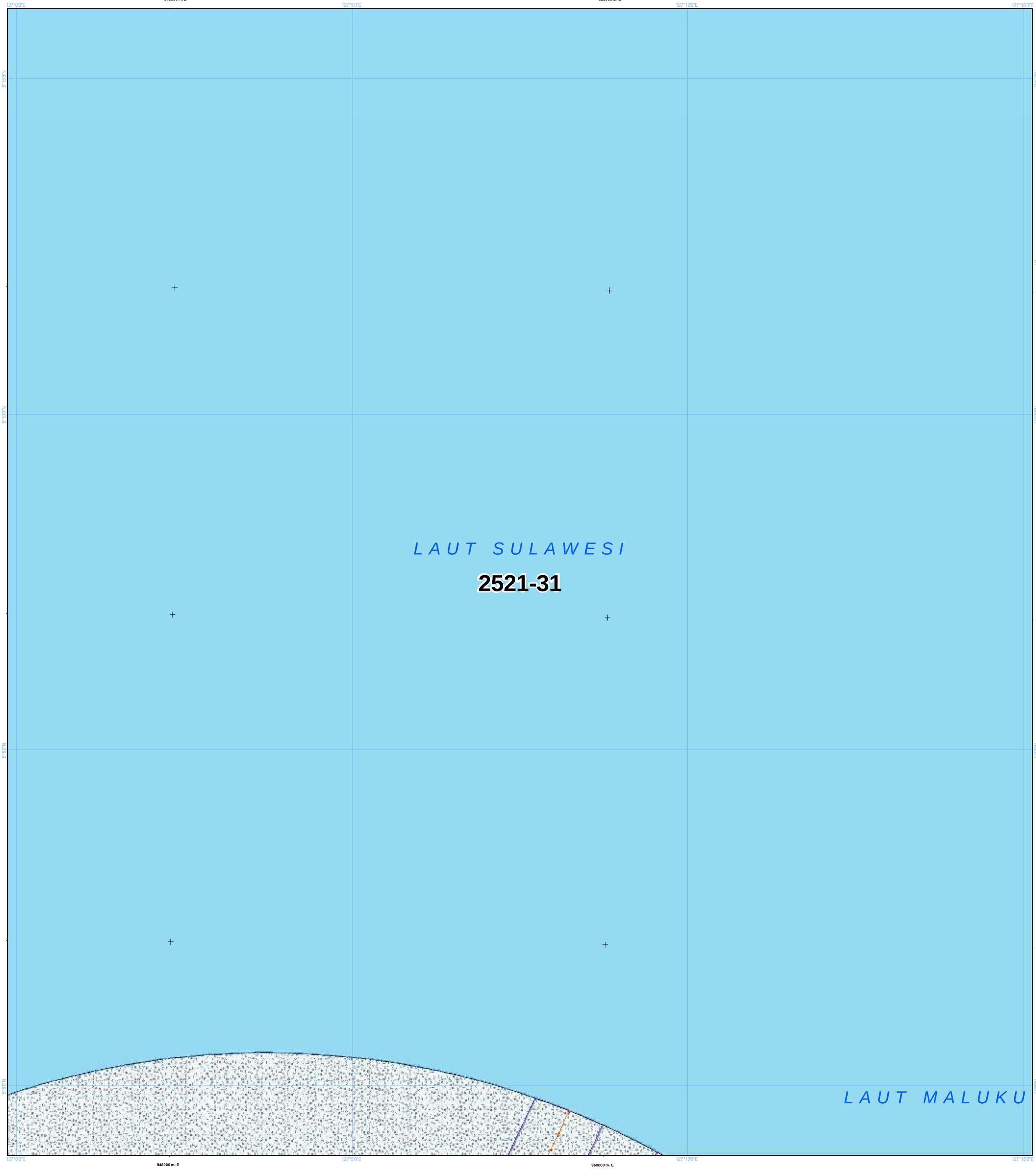

NLP : 2521-31

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

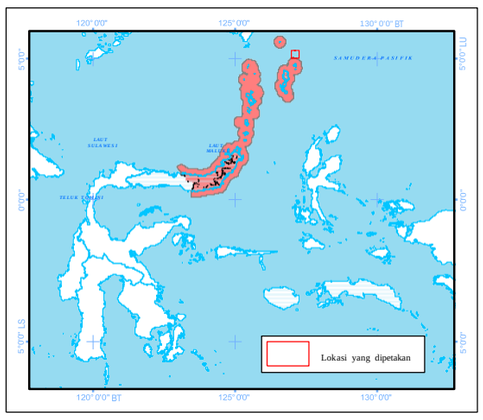

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

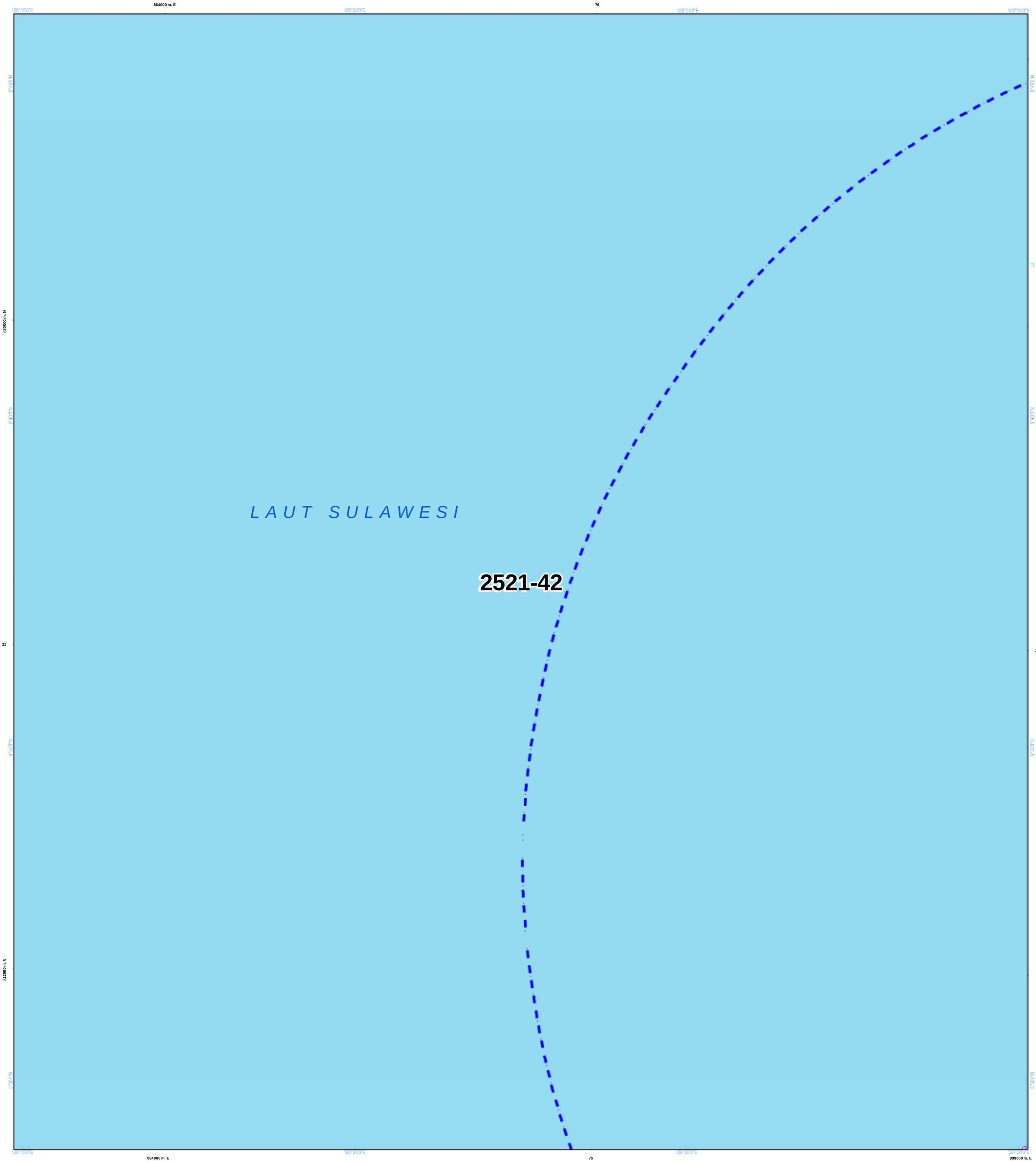

NLP : 2521-42

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

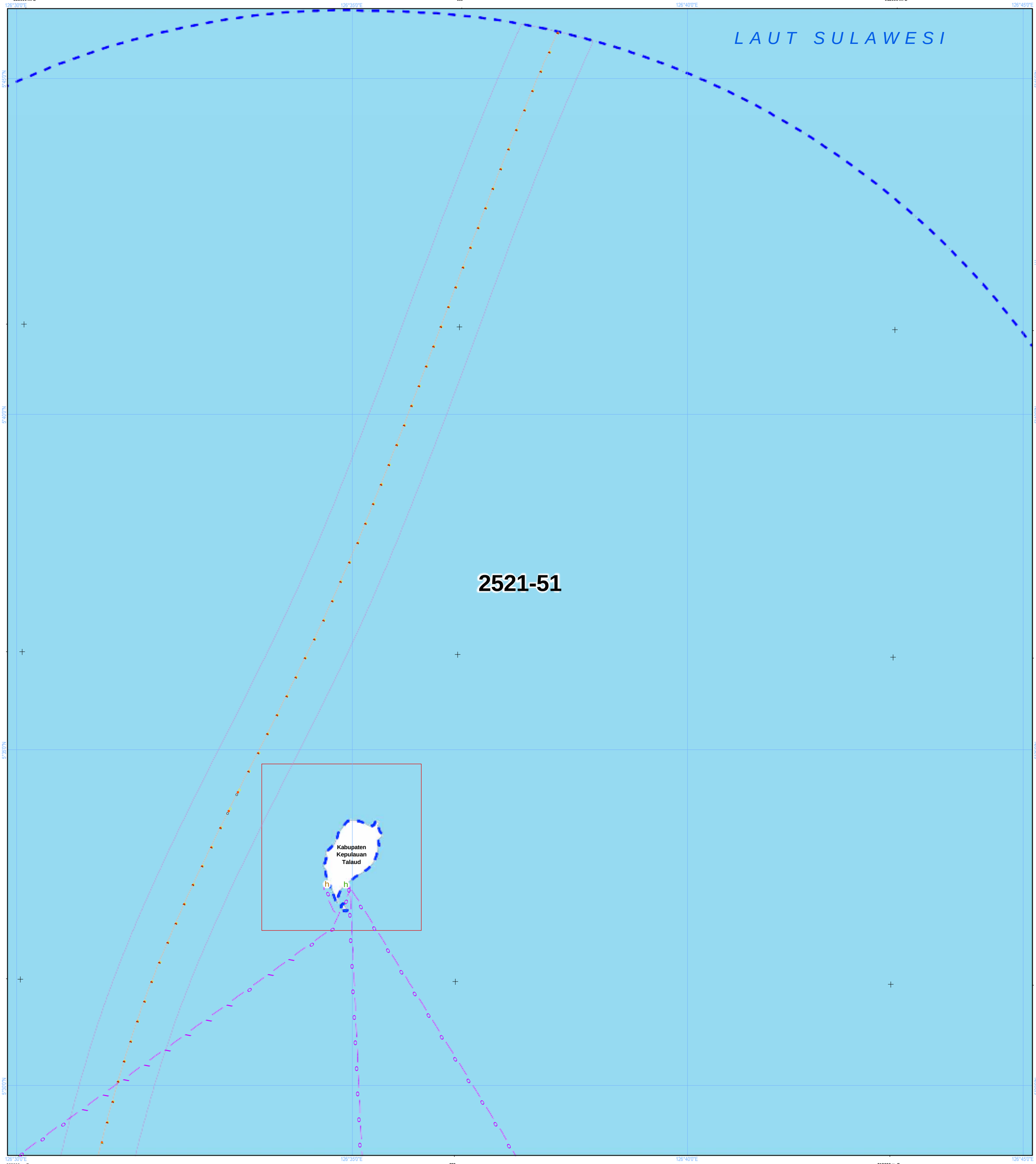

NLP : 2521-51

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

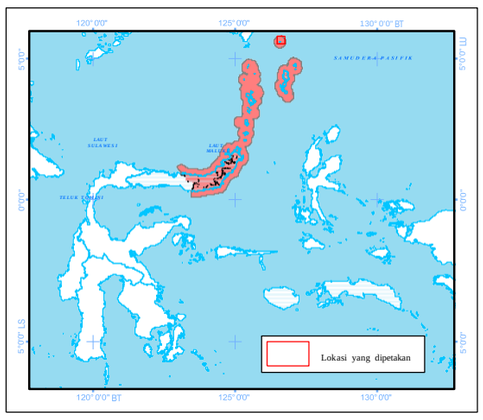

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- h Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

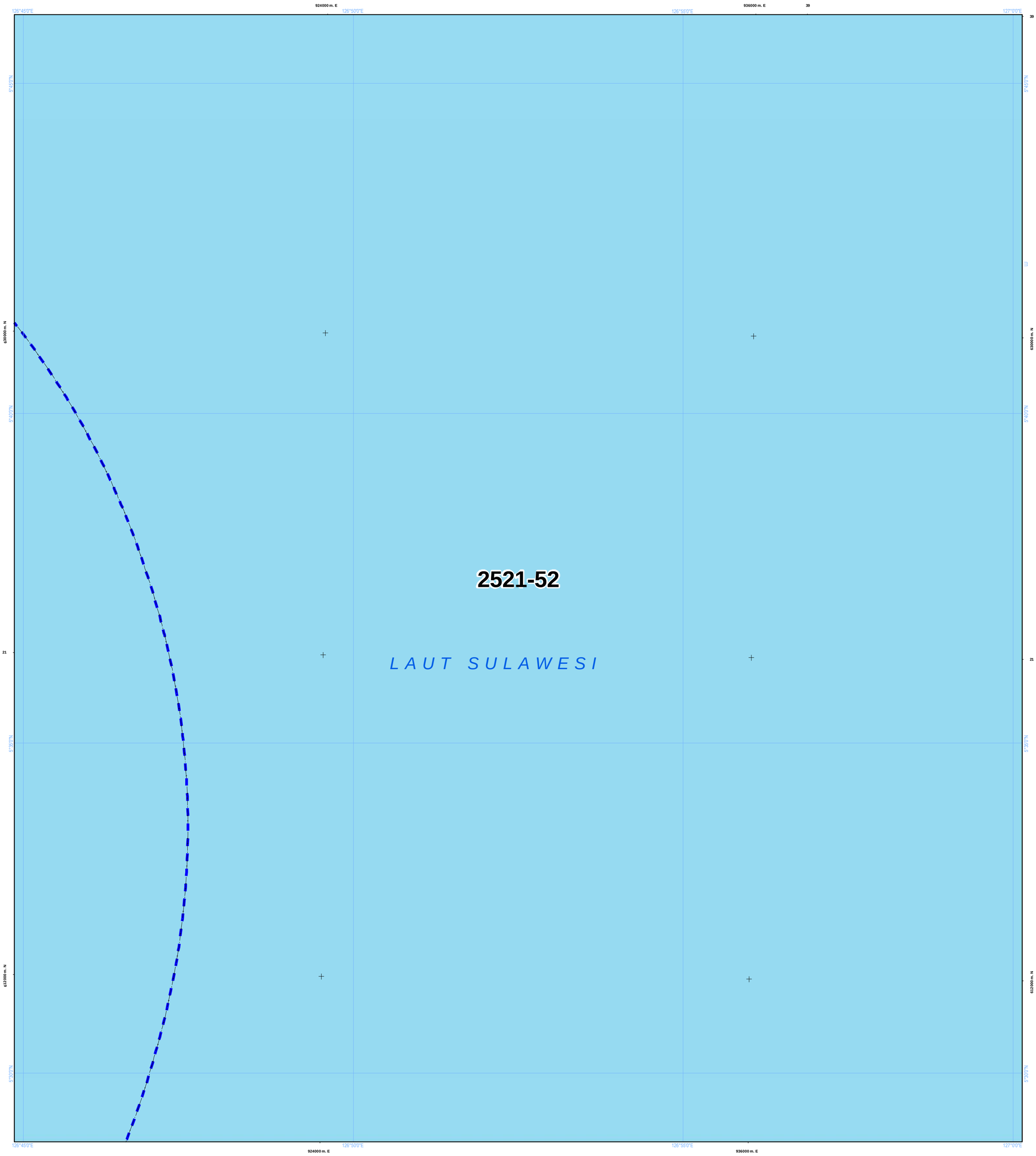

NLP : 2521-52

U

SKALA : 1:50.000

0 1 2 4 Km

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PROVINSI SULAWESI UTARA

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

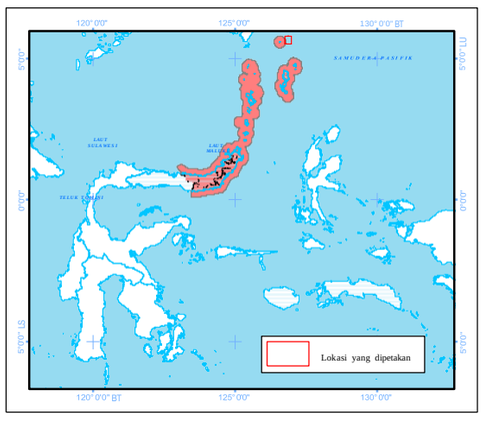

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan

- PPS Pelabuhan Perikanan Samudera
- PPP Pelabuhan Perikanan Pantai
- PPI Pangkalan Pendaratan Ikan
- Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap
- Sentra Kegiatan Perikanan Budidaya
- W Destinasi Pariwisata
- Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Pusat Industri Kelautan dan Perikanan

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Industri Manufaktur
- Industri Pengolahan Ikan

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tinggi
- W Industri Pariwisata

Sistem Jaringan Transportasi

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus
- Pelabuhan Lainnya
- Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Kabel Bawah Laut untuk Telekomunikasi

Perairan

- Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG LAUT

Kawasan Pemanfaatan Umum

- Zona Fasilitas Umum
- Zona Industri
- Zona Pariwisata
- Zona Pelabuhan Laut
- Zona Pelabuhan Perikanan
- Zona Pengelolaan Energi
- Zona Perdagangan Barang dan/atau Jasa
- Zona Perikanan Budidaya
- Zona Perikanan Tangkap
- Zona Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Konservasi di Laut

- Kawasan Konservasi Lainnya
- Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi
- Taman

Batas Pengelolaan Laut Provinsi

- Batas Pengelolaan Laut Provinsi

KETENTUAN KHUSUS YANG BERTAMPALAN

Ketentuan Khusus

- Area Sensitif (PSSA)
- Daerah Larangan Penangkapan Ikan
- Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
- Kawasan Strategis
- Koridor Alur Migrasi Biota Laut
- Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut
- Wilayah Pertahanan dan Keamanan

ALUR MIGRASI BIOTA LAUT

- Alur Migrasi Biota Dilindungi/Terancam Punah Lainnya
- Alur Migrasi Penyu

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU

- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

Berdasarkan Surat Persetujuan Teknis Menteri Kelautan dan Perikanan RIterhadap Materi Teknis Perairan Pesisir di Provinsi Sulawesi Utara No. B.1500/MEN-KP/IX/2023, 19 September 2023.

1. Data Garis Pantai Skala 1:50.000 Updating tahun 2023, Badan Informasi Geospasial (BIG)
2. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:50.000 tahun 2021 Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Peta RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:50.000 tahun 2017 - 2037, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
4. Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara Skala 1:250.000 tahun 2014 - 2034, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Hasil FGD Tingkat Kabupaten dan Provinsi Tahun 2021 - 2022
6. Peta Alur Migrasi Biota (WWF & Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

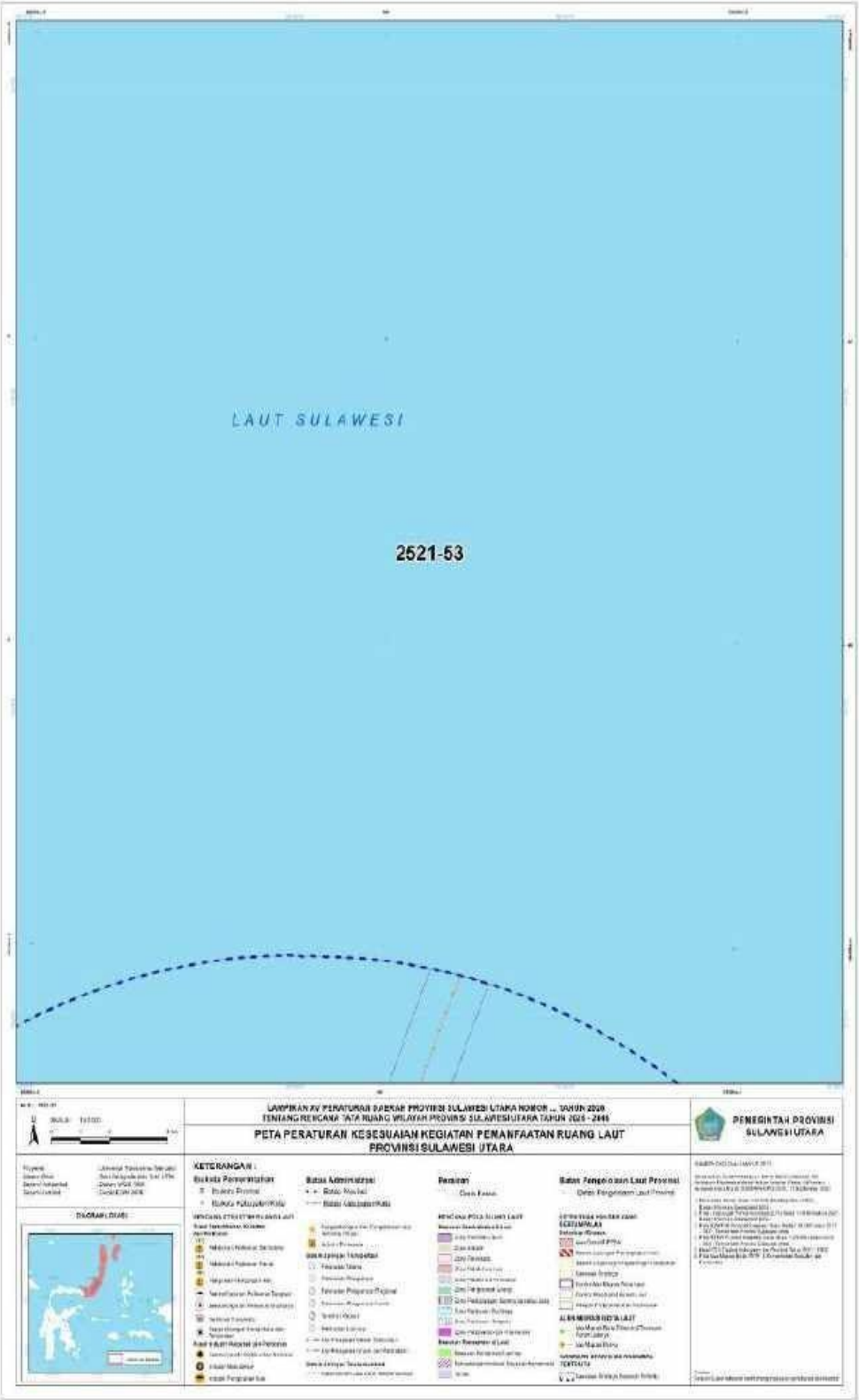

GUBERNUR SULAWESI UTARA

ttd

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

TABEL INDIKASI PROGRAM

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					Tahap 1				Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5
					2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044	2045-2046
A.	**Perwujudan Struktur Ruang**											
1	**Perwujudan Sistem Pusat Permukiman**											
1.1	**Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**											
a.	Pemantapan Fungsi PKN melalui Program Pemanfaatan Ruang	Perkotaan Manado-Bitung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Kerjasama Pendanaan	Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
b.	Pengembangan Kawasan Perkotaan PKN											
c.	Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkotaan											
d.	Peningkatan Fungsi Pelayanan Regional, Nasional, dan Internasional											
e.	Sinkronisasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang											
1.2	**Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah**											
a.	Penetapan Fungsi PKW	PKW Kotamobagu, PKW Tomohon, PKW Tondano	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Kerjasama Pendanaan	Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
b.	Pemantapan Fungsi PKW											
c.	Penegembangan dan Peningkatan Fungsi Kawasan Perkotaan											
d.	Pengembangan Sentra Produksi											
e.	Fasilitasi Penyusunan dan Penetapan RDTR											
f.	Peningkatan Infrastruktur PKW											
g.	Pengembangan Fungsi Pertumbuhan Ekonomi											
h.	Sinkronisasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang											
1.3	**Perwujudan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Kecamatan Perbatasan Prioritas**											
a.	Pemantapan Fungsi PKSN melalui Program Pemanfaatan Ruang	PKSN Melonguane dan Kecamatan Perbatasan Prioritas di Kabupaten Kepulauan Talaud (Kecamatan Damau, Kecaamatan Pulutan, dan Kecamatan Nanusa)	APBN	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, Dinas PUPR Provinsi								
b.	Pengembangan Kawasan PKSN	PKSN Tahuna dan Kecamatan Perbatasan Prioritas di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Kecamatan Kendahe)										
c.	Peningkatan Infrastruktur Kawasan PKSN											
d.	Peningkatan Fungsi Pelayanan Regional, Nasional, dan Internasional											
e.	Sinkronisasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang											
f.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan	Kecamatan Perbatasan Prioritas di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Kecamatan Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Utara)	APBN	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, Dinas PUPR Provinsi								
		Kecamatan Perbatasan Prioritas di Kabupaten Minahasa Utara (Kecamatan Likupang Barat, Kecamatan Wori)										
		Kecamatan Perbatasan Prioritas di Kabupaten Minahasa Selatan (Kecamatan Tatapan, KecamatanTenga, Kecamatan Sinonsayang)										
		Kecamatan Perbatasan Prioritas di Kabupaten Bolaang Mongondow (Kecamatan Bolaang Timur)										
		Kecamatan Perbatasan Prioritas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Kecamatan Bolangitang Barat dan Kecamatan Pinogaluman)										
1.4	**Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal**											
a.	Pemantapan Fungsi PKL	PKL Kawasan Perkotaan Airmadidi, PKL Kawasan Perkotaan Atep Oki, PKL Kawasan Perkotaan Belang, PKL Kawasan Perkotaan Bintauna, PKL Kawasan Perkotaan Buhias Tagulandang, PKL Kawasan Perkotaan Dumoga Timur, PKL Kawasan Perkotaan , PKL Kawasan Perkotaan Langowan, PKL Kawasan Perkotaan Likupang, PKL Kawasan Perkotaan Lirung, PKL Kawasan Perkotaan Lolak, KPN Kawasan Perkotaan Marampit, KPN Kawasan Perkotaan Marore, KPN Kawasan Perkotaan Miangas, PKL Kawasan Perkotaan Modayag, PKL Kawasan Perkotaan Molibagu, PKL Kawasan Perkotaan Ratahan, PKL Kawasan Perkotaan Tamako, PKL Kawasan Perkotaan Tateli, PKL Kawasan Perkotaan Torosik, PKL Kawasan Perkotaan TUANGTIBA, PKL Kawasan Perkotaan Tutuyan, PKL Kawasan Perkotaan Ulu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Kerjasama Pendanaan	Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
b.	Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Kawasan Perkotaan											
c.	Pengembangan Kawasan Perkotaan											
d.	Mendorong Pengembangan Sentra Produksi Komoditas Unggulan											
e.	Fasilitasi Penyusunan dan Penetapan RDTR											
f.	Peningkatan Infrastruktur PKL											
g.	Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang											
2	**Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi**											
2.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Jalan**											
2.1.1	**Perwujudan Jalan Umum**											
2.1.1.1	**Perwujudan Jalan Arteri Primer**											
	a. Pembangunan Jalan Nasional											
1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Jalan	Lingkar Kota Manado (MORR III)	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
		Lingkar Kota Manado (MORR IV)										
		Amurang Bypass (Kapitu-Tumpaan)										
		Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Manado (Jalan Lembong-Pierre Tendean)										
		Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Labuhan Uki										
		Jalan Lingkar Tomohon										
		Jalan Sunset Boulevard										
		Underpass/Simpang Susun Paniki MORR II										
		Flyover Transmart Kairagi										
2)	Penyusunan DED Pembangunan Jalan	Lingkar Kota Manado (MORR III)										
		Lingkar Kota Manado (MORR IV)										
		Amurang Bypass (Kapitu-Tumpaan)										
		Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Manado (Jalan Lembong-Pierre Tendean)										
		Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Labuhan Uki										
		Jalan Lingkar Tomohon										
		Jalan Sunset Boulevard										
		Underpass/Simpang Susun Paniki MORR II										
		Flyover Transmart Kairagi										
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan	Lingkar Kota Manado (MORR III)										
		Lingkar Kota Manado (MORR IV)										
		Amurang Bypass (Kapitu-Tumpaan)										
		Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Manado (Jalan Lembong-Pierre Tendean)										
		Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Labuhan Uki										
		Jalan Lingkar Tomohon										
		Jalan Sunset Boulevard										
		Underpass/Simpang Susun Paniki MORR II										
		Flyover Transmart Kairagi										
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Jalan	Lingkar Kota Manado (MORR III)										
		Lingkar Kota Manado (MORR IV)										
		Amurang Bypass (Kapitu-Tumpaan)										
		Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Manado (Jalan Lembong-Pierre Tendean)										
		Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Labuhan Uki										
		Jalan Lingkar Tomohon										

				Jalan Sunset Boulevard										
				Underpass/Simpang Susun Paniki MORR II										
				Flyover Transmart Kairagi										
			5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan	Lingkar Kota Manado (MORR III)	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kantah Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota							
					Lingkar Kota Manado (MORR IV)									
					Amurang Bypass (Kapitu-Tumpaan)									
					Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Manado (Jalan Lembong-Pierre Tendean)									
					Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Labuhan Uki									
					Jalan Lingkar Tomohon									
					Jalan Sunset Boulevard									
					Underpass/Simpang Susun Paniki MORR II									
					Flyover Transmart Kairagi									
			6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan Jalan	Lingkar Kota Manado (MORR III)									
					Lingkar Kota Manado (MORR IV)									
					Amurang Bypass (Kapitu-Tumpaan)									
					Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Manado (Jalan Lembong-Pierre Tendean)									
					Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Labuhan Uki									
					Jalan Lingkar Tomohon									
					Jalan Sunset Boulevard									
					Underpass/Simpang Susun Paniki MORR II									
					Flyover Transmart Kairagi									
			7)	Pembangunan Jalan	Lingkar Kota Manado (MORR III)	APBN	Kementerian PU							
					Lingkar Kota Manado (MORR IV)									
					Amurang Bypass (Kapitu-Tumpaan)									
					Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Manado (Jalan Lembong-Pierre Tendean)									
					Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Labuhan Uki									
					Jalan Lingkar Tomohon									
					Jalan Sunset Boulevard									
					Underpass/Simpang Susun Paniki MORR II									
					Flyover Transmart Kairagi									
			b. Pelebaran Jalan Nasional Menuju Standar											
			1)	Penyusunan Feasibility Study Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kauditan - Bts. Kota Bitung	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
					Jln. Sompotan (Bitung)									
					Jln. Moh Hatta (Bitung)									
					Jln. Yos Sudarso (Bitung)									
					Jln. W. Maramis (Bitung)									
					Jln. Wolter Monginsidi (Bitung)									
					Airmadidi - Kauditan (By Pass)									
					Bts. Kota Manado - Airmadidi									
					Kairagi - Bts. Kota Manado									
					Jln. Yos Sudarso (Manado)									
					Jln. R. Martadinata (Manado)									
					Jln. Jenderal Sudirman (Manado)									
					Kairagi - Mananget									
					Bts. Kota Manado - Tomohon									
					Jln. Suprapto (Lembong) (Manado)									
					Jln. Samratulangi (Manado)									
					Tomohon - Kawangkoan									
					Kawangkoan - Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan									
					Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan - Tumpaan									
					Tumpaan - Worotican									
					Worotican - Poigar									
					Poigar - Kaiya									
					Kaiya - Maelang									
					Maelang - Bts. Kab. Bolmong/Bolmut									
					Bts. Kab. Bolmong/Bolmut - Biontong									
					Biontong - Atinggola (Bts. Prov. Gorontalo)									
					Akses Terminal Boroko (Kab. Bolaang Mongondow Utara)									
					Airmadidi - Bts. Kota Tondano									
					Jln. W. Maramis (Tondano)									
					Jln. Imam Bonjol (Tondano)									
					Lingkar Kota Manado (MORR I)									
					Lingkar Kota Manado (MORR II)									
					Simpang SBY - Akses Tol Airmadidi									
					Akses Tol Airmadidi - Simpang Tondano									
			2)	Penyusunan DED Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kauditan - Bts. Kota Bitung									
					Jln. Sompotan (Bitung)									
					Jln. Moh Hatta (Bitung)									
					Jln. Yos Sudarso (Bitung)									
					Jln. W. Maramis (Bitung)									
					Jln. Wolter Monginsidi (Bitung)									
					Airmadidi - Kauditan (By Pass)									
					Bts. Kota Manado - Airmadidi									
					Kairagi - Bts. Kota Manado									
					Jln. Yos Sudarso (Manado)									
					Jln. R. Martadinata (Manado)									
					Jln. Jenderal Sudirman (Manado)									
					Kairagi - Mananget									
					Bts. Kota Manado - Tomohon									
					Jln. Suprapto (Lembong) (Manado)									
					Jln. Samratulangi (Manado)									
					Tomohon - Kawangkoan									
					Kawangkoan - Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan									
					Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan - Tumpaan									
					Tumpaan - Worotican									
					Worotican - Poigar									
					Poigar - Kaiya									
					Kaiya - Maelang									
					Maelang - Bts. Kab. Bolmong/Bolmut									
					Bts. Kab. Bolmong/Bolmut - Biontong									
					Biontong - Atinggola (Bts. Prov. Gorontalo)									
					Akses Terminal Boroko (Kab. Bolaang Mongondow Utara)									
					Airmadidi - Bts. Kota Tondano									
					Jln. W. Maramis (Tondano)									
					Jln. Imam Bonjol (Tondano)									
					Lingkar Kota Manado (MORR I)									
					Lingkar Kota Manado (MORR II)									
					Simpang SBY - Akses Tol Airmadidi									
					Akses Tol Airmadidi - Simpang Tondano									
			3)	Penetapan Lokasi Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kauditan - Bts. Kota Bitung									
					Jln. Sompotan (Bitung)									
					Jln. Moh Hatta (Bitung)									
					Jln. Yos Sudarso (Bitung)									
					Jln. W. Maramis (Bitung)									
					Jln. Wolter Monginsidi (Bitung)									
					Airmadidi - Kauditan (By Pass)									
					Bts. Kota Manado - Airmadidi									
					Kairagi - Bts. Kota Manado									
					Jln. Yos Sudarso (Manado)									
					Jln. R. Martadinata (Manado)									
					Jln. Jenderal Sudirman (Manado)									
					Kairagi - Mananget									
					Bts. Kota Manado - Tomohon									
					Jln. Suprapto (Lembong) (Manado)									
					Jln. Samratulangi (Manado)									
					Tomohon - Kawangkoan									
					Kawangkoan - Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan									
					Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan - Tumpaan									
					Tumpaan - Worotican									
					Worotican - Poigar									
					Poigar - Kaiya									

					Kaiya - Maelang										
					Maelang - Bts. Kab. Bolmong/Bolmut										
					Bts. Kab. Bolmong/Bolmut - Biontong										
					Biontong - Atinggola (Bts. Prov. Gorontalo)										
					Akses Terminal Boroko (Kab. Bolaang Mongondow Utara)										
					Airmadidi - Bts. Kota Tondano										
					Jln. W. Maramis (Tondano)										
					Jln. Imam Bonjol (Tondano)										
					Lingkar Kota Manado (MORR I)										
					Lingkar Kota Manado (MORR II)										
					Simpang SBY - Akses Tol Airmadidi										
					Akses Tol Airmadidi - Simpang Tondano										
			4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kauditan - Bts. Kota Bitung	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi								
					Jln. Sompotan (Bitung)										
					Jln. Moh Hatta (Bitung)										
					Jln. Yos Sudarso (Bitung)										
					Jln. W. Maramis (Bitung)										
					Jln. Wolter Monginsidi (Bitung)										
					Airmadidi - Kauditan (By Pass)										
					Bts. Kota Manado - Airmadidi										
					Kairagi - Bts. Kota Manado										
					Jln. Yos Sudarso (Manado)										
					Jln. R. Martadinata (Manado)										
					Jln. Jenderal Sudirman (Manado)										
					Kairagi - Mapanget										
					Bts. Kota Manado - Tomohon										
					Jln. Suprapto (Lembong) (Manado)										
					Jln. Samratulangi (Manado)										
					Tomohon - Kawangkoan										
					Kawangkoan - Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan										
					Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan - Tumpaan										
					Tumpaan - Woroticap										
					Woroticap - Poigar										
					Poigar - Kaiya										
					Kaiya - Maelang										
					Maelang - Bts. Kab. Bolmong/Bolmut										
					Bts. Kab. Bolmong/Bolmut - Biontong										
					Biontong - Atinggola (Bts. Prov. Gorontalo)										
					Akses Terminal Boroko (Kab. Bolaang Mongondow Utara)										
					Airmadidi - Bts. Kota Tondano										
					Jln. W. Maramis (Tondano)										
					Jln. Imam Bonjol (Tondano)										
					Lingkar Kota Manado (MORR I)										
					Lingkar Kota Manado (MORR II)										
					Simpang SBY - Akses Tol Airmadidi										
					Akses Tol Airmadidi - Simpang Tondano										
			5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kauditan - Bts. Kota Bitung	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Kantah Kabupaten/Kota								
					Jln. Sompotan (Bitung)										
					Jln. Moh Hatta (Bitung)										
					Jln. Yos Sudarso (Bitung)										
					Jln. W. Maramis (Bitung)										
					Jln. Wolter Monginsidi (Bitung)										
					Airmadidi - Kauditan (By Pass)										
					Bts. Kota Manado - Airmadidi										
					Kairagi - Bts. Kota Manado										
					Jln. Yos Sudarso (Manado)										
					Jln. R. Martadinata (Manado)										
					Jln. Jenderal Sudirman (Manado)										
					Kairagi - Mapanget										
					Bts. Kota Manado - Tomohon										
					Jln. Suprapto (Lembong) (Manado)										
					Jln. Samratulangi (Manado)										
					Tomohon - Kawangkoan										
					Kawangkoan - Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan										
					Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan - Tumpaan										
					Tumpaan - Woroticap										
					Woroticap - Poigar										
					Poigar - Kaiya										
					Kaiya - Maelang										
					Maelang - Bts. Kab. Bolmong/Bolmut										
					Bts. Kab. Bolmong/Bolmut - Biontong										
					Biontong - Atinggola (Bts. Prov. Gorontalo)										
					Akses Terminal Boroko (Kab. Bolaang Mongondow Utara)										
					Airmadidi - Bts. Kota Tondano										
					Jln. W. Maramis (Tondano)										
					Jln. Imam Bonjol (Tondano)										
					Lingkar Kota Manado (MORR I)										
					Lingkar Kota Manado (MORR II)										
					Simpang SBY - Akses Tol Airmadidi										
					Akses Tol Airmadidi - Simpang Tondano										
			6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kauditan - Bts. Kota Bitung	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Kantah Kabupaten/Kota								
					Jln. Sompotan (Bitung)										
					Jln. Moh Hatta (Bitung)										
					Jln. Yos Sudarso (Bitung)										
					Jln. W. Maramis (Bitung)										
					Jln. Wolter Monginsidi (Bitung)										
					Airmadidi - Kauditan (By Pass)										
					Bts. Kota Manado - Airmadidi										
					Kairagi - Bts. Kota Manado										
					Jln. Yos Sudarso (Manado)										
					Jln. R. Martadinata (Manado)										
					Jln. Jenderal Sudirman (Manado)										
					Kairagi - Mapanget										
					Bts. Kota Manado - Tomohon										
					Jln. Suprapto (Lembong) (Manado)										
					Jln. Samratulangi (Manado)										
					Tomohon - Kawangkoan										
					Kawangkoan - Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan										
					Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan - Tumpaan										
					Tumpaan - Woroticap										
					Woroticap - Poigar										
					Poigar - Kaiya										
					Kaiya - Maelang										
					Maelang - Bts. Kab. Bolmong/Bolmut										
					Bts. Kab. Bolmong/Bolmut - Biontong										
					Biontong - Atinggola (Bts. Prov. Gorontalo)										
					Akses Terminal Boroko (Kab. Bolaang Mongondow Utara)										
					Airmadidi - Bts. Kota Tondano										
					Jln. W. Maramis (Tondano)										
					Jln. Imam Bonjol (Tondano)										
					Lingkar Kota Manado (MORR I)										
					Lingkar Kota Manado (MORR II)										
					Simpang SBY - Akses Tol Airmadidi										
					Akses Tol Airmadidi - Simpang Tondano										
			7)	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kauditan - Bts. Kota Bitung										
					Jln. Sompotan (Bitung)										
					Jln. Moh Hatta (Bitung)										
					Jln. Yos Sudarso (Bitung)										
					Jln. W. Maramis (Bitung)										
					Jln. Wolter Monginsidi (Bitung)										
					Airmadidi - Kauditan (By Pass)										

			Bts. Kota Manado - Airmadidi	APBN	Kementerian PU								
			Kairagi - Bts. Kota Manado										
			Jln. Yos Sudarso (Manado)										
			Jln. R. Martadinata (Manado)										
			Jln. Jenderal Sudirman (Manado)										
			Kairagi - Mapanget										
			Bts. Kota Manado - Tomohon										
			Jln. Suprapto (Lembong) (Manado)										
			Jln. Samratulangi (Manado)										
			Tomohon - Kawangkoan										
			Kawangkoan - Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan										
			Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan - Tumpaan										
			Tumpaan - Worotican										
			Worotican - Poigar										
			Poigar - Kaiya										
			Kaiya - Maelang										
			Maelang - Bts. Kab. Bolmong/Bolmut										
			Bts. Kab. Bolmong/Bolmut - Biontong										
			Biontong - Atinggola (Bts. Prov. Gorontalo)										
			Akses Terminal Boroko (Kab. Bolaang Mongondow Utara)										
			Airmadidi - Bts. Kota Tondano										
			Jln. W. Maramis (Tondano)										
			Jln. Imam Bonjol (Tondano)										
			Lingkar Kota Manado (MORR I)										
			Lingkar Kota Manado (MORR II)										
			Simpang SBY - Akses Tol Airmadidi										
			Akses Tol Airmadidi - Simpang Tondano										
	c. Pemeliharaan Berkala Jalan Nasional												
	1)		Kauditan - Bts. Kota Bitung	APBN	Kementerian PU								
			Jln. Sompotan (Bitung)										
			Jln. Moh Hatta (Bitung)										
			Jln. Yos Sudarso (Bitung)										
			Jln. W. Maramis (Bitung)										
			Jln. Wolter Monginsidi (Bitung)										
			Airmadidi - Kauditan (By Pass)										
			Bts. Kota Manado - Airmadidi										
			Kairagi - Bts. Kota Manado										
			Jln. Yos Sudarso (Manado)										
			Jln. R. Martadinata (Manado)										
			Jln. Jenderal Sudirman (Manado)										
			Kairagi - Mapanget										
			Bts. Kota Manado - Tomohon										
			Jln. Suprapto (Lembong) (Manado)										
			Jln. Samratulangi (Manado)										
			Tomohon - Kawangkoan										
			Kawangkoan - Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan										
			Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan - Tumpaan										
			Tumpaan - Worotican										
			Worotican - Poigar										
			Poigar - Kaiya										
			Kaiya - Maelang										
			Maelang - Bts. Kab. Bolmong/Bolmut										
			Bts. Kab. Bolmong/Bolmut - Biontong										
			Biontong - Atinggola (Bts. Prov. Gorontalo)										
			Akses Terminal Boroko (Kab. Bolaang Mongondow Utara)										
			Airmadidi - Bts. Kota Tondano										
			Jln. W. Maramis (Tondano)										
			Jln. Imam Bonjol (Tondano)										
			Lingkar Kota Manado (MORR I)										
			Lingkar Kota Manado (MORR II)										
			Simpang SBY - Akses Tol Airmadidi										
			Akses Tol Airmadidi - Simpang Tondano										
	d. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan												
	1)		Kauditan - Bts. Kota Bitung	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas PUPR Provinsi								
			Jln. Sompotan (Bitung)										
			Jln. Moh Hatta (Bitung)										
			Jln. Yos Sudarso (Bitung)										
			Jln. W. Maramis (Bitung)										
			Jln. Wolter Monginsidi (Bitung)										
			Airmadidi - Kauditan (By Pass)										
			Bts. Kota Manado - Airmadidi										
			Kairagi - Bts. Kota Manado										
			Jln. Yos Sudarso (Manado)										
			Jln. R. Martadinata (Manado)										
			Jln. Jenderal Sudirman (Manado)										
			Kairagi - Mapanget										
			Bts. Kota Manado - Tomohon										
			Jln. Suprapto (Lembong) (Manado)										
			Jln. Samratulangi (Manado)										
			Tomohon - Kawangkoan										
			Kawangkoan - Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan										
			Bts. Kab. Minahasa/Minahasa Selatan - Tumpaan										
			Tumpaan - Worotican										
			Worotican - Poigar										
			Poigar - Kaiya										
			Kaiya - Maelang										
			Maelang - Bts. Kab. Bolmong/Bolmut										
			Bts. Kab. Bolmong/Bolmut - Biontong										
			Biontong - Atinggola (Bts. Prov. Gorontalo)										
			Akses Terminal Boroko (Kab. Bolaang Mongondow Utara)										
			Airmadidi - Bts. Kota Tondano										
			Jln. W. Maramis (Tondano)										
			Jln. Imam Bonjol (Tondano)										
			Lingkar Kota Manado (MORR I)										
			Lingkar Kota Manado (MORR II)										
			Simpang SBY - Akses Tol Airmadidi										
			Akses Tol Airmadidi - Simpang Tondano										
	e.	Penurunan Status Separuh Ruas Jalan JAP Menjadi Jalan Kabupaten/Kota	Bts. Kota Manado - Tomohon	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas PUPR Provinsi								
			Tumpaan - Worotican										
	f.	Konstruksi Jalan Arteri Primer sebagai Landasan Darurat Pesawat Tempur dalam Situasi Konflik/Perang	Provinsi Sulawesi Utara	APBN, Sumber Pendanaan Lain yang Relevan	Kementerian PU, dan/atau Kerjasama Pendanaan								
	2.1.1.2	**Perwujudan Jalan Kolektor Primer**											
	a. Pembangunan Jalan Nasional												
	1)	Penyusunan *Feasibility Study* Pembangunan Jalan	Ruas Likupang - Girian (Bitung) (Alih Trase)	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
	2)	Penyususnan DED Pembangunan Jalan	Ruas Molobog - Onggunoi (Alih Trase)										
	3)	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan	Ruas Jalan Lingkar Kotamobagu										
			Jalan Boulevard II (Manado)										
			Jalan Trans PPKT Pulau Siau										
			Jalan Trans PPKT Pulau Marore										
			Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Tahuna										
			Akses Terminal Tipe A Liwas										
			Jalan Akses Terminal Tangkoko										
	4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Jalan	Ruas Likupang - Girian (Bitung) (Alih Trase)	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi								
			Ruas Molobog - Onggunoi (Alih Trase)										
			Ruas Jalan Lingkar Kotamobagu										
			Jalan Boulevard II (Manado)										
			Jalan Trans PPKT Pulau Siau										
			Jalan Trans PPKT Pulau Marore										

		Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Tahuna										
		Akses Terminal Tipe A Liwas										
		Jalan Akses Terminal Tangkoko										
	5) Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan	Ruas Likupang - Girian (Bitung) (Alih Trase)	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Kantah Kabupaten/Kota								
	6) Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan Jalan	Ruas Molobog - Onggunoi (Alih Trase)										
		Ruas Jalan Lingkar Kotamobagu										
		Jalan Boulevard II (Manado)										
		Jalan Trans PPKT Pulau Siau										
		Jalan Trans PPKT Pulau Marore										
		Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Tahuna										
		Akses Terminal Tipe A Liwas										
		Jalan Akses Terminal Tangkoko										
	7) Pembangunan	Ruas Likupang - Girian (Bitung) (Alih Trase)	APBN	Kementerian PU								
		Ruas Molobog - Onggunoi (Alih Trase)										
		Ruas Jalan Lingkar Kotamobagu										
		Jalan Boulevard II (Manado)										
		Jalan Trans PPKT Pulau Siau										
		Jalan Trans PPKT Pulau Marore										
		Jalan Akses Pelabuhan Laut (PP) Tahuna										
		Akses Terminal Tipe A Liwas										
		Jalan Akses Terminal Tangkoko										
	b. Pelebaran Jalan Menuju Standar											
	1) Penyusunan *Feasibility Study* Pelebaran Jalan Menuju Standar	Bts. Kota Manado – Tumpaan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
	2) Penyusunan DED Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jln. Monginsidi (Manado)										
		Jln. Bethesda (Manado)										
		Zero Point - Jln. Pierre Tendean (Manado)										
		Jln. Pierre Tendean (Boulevard) (Manado)										
		Wori - Likupang										
		Bts. Kota Manado - Wori										
		Jln. Hasanudin (Manado)										
		Jln. Ks. Tubun (Manado)										
		Jln. Panjaitan (Manado)										
		Jln. Pogidon (Manado)										
		Girian - Kema (Makalisung)										
		Kema - Rumbia										
		Rumbia - Buyat										
		Buyat - Molobog										
		Molobog - Onggunoi										
		Onggunoi - Pinolosian										
		Pinolosian - Molibagu										
		Molibagu - Momalia										
		Momalia – Tahidaa (Bts. Prov. Gorontalo)										
		Bts. Kota Tondano - Tomohon										
		Jln. Samratulangi (Tondano)										
		Jln. Bulovard (Tondano)										
		Worotican - Poopo										
		Poopo - Sinisir										
		Sinisir - Bts. Kota Kotamobagu/Boltim										
		Bts. Kota Kotamobagu/Boltim - Sp. Empat Siliwangi										
		Jln. Gatot Subroto (Kotamobagu)										
		Jln. Adampe Dolot (Kotamobagu)										
		Jln. A. Yani (Kotamobagu)										
		Jln. Sutoyo (Kotamobagu)										
		Jln. Yusuf Hasiru (Kotamobagu)										
		Jln. Siliwangi (Kotamobagu)										
		Bts. Kota Kotamobagu - Doloduo										
		Jln. Kotamobagu - Doloduo (Kotamobagu)										
		Doloduo - Molibagu										
		Bts. Kota Tahuna - Enemawira										
		Jln. Jend. Sudirman (Tahuna)										
		Akhir Jln. Jend. Sudirman - Bts. Kota Tahuna										
		Bts. Kota Tahuna - Rsu Tahuna										
		Naha - Enemawira										
		Bts. Kota Tahuna (Tahuna) - Naha										
		Jln. Kara Manusa (Tahuna)										
		Jln. Apeng Cendera (Tahuna)										
		Bts. Kota Tahuna - Tamako										
		Jln. Marakambo (Tahuna)										
		Jln. Tidore (Tahuna)										
		Enemawira - Manalu - Tamako										
		Beo - Melonguane										
		Beo - Esang										
		Esang - Rainis										
		Melonguane - Rainis										
		Beo - Rainis										
		Kaiya - Kotamobagu										
		Matali - Torosik										
		Langowan - Ratahan - Belang										
		Tondano - Wasian - Kakas - Lagowan - Kawangkoan										
		Jln. Lingkar Miangas										
		Jln. Lingkar Kakorotan										
		Jalan Akses Likupang										
		Likupang - Girian (Bitung)										
	3) Penetapan Lokasi Pelebaran Jalan Menuju Standar	Bts. Kota Manado – Tumpaan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
		Jln. Monginsidi (Manado)										
		Jln. Bethesda (Manado)										
		Zero Point - Jln. Pierre Tendean (Manado)										
		Jln. Pierre Tendean (Boulevard) (Manado)										
		Wori - Likupang										
		Bts. Kota Manado - Wori										
		Jln. Hasanudin (Manado)										
		Jln. Ks. Tubun (Manado)										
		Jln. Panjaitan (Manado)										
		Jln. Pogidon (Manado)										
		Girian - Kema (Makalisung)										
		Kema - Rumbia										
		Rumbia - Buyat										
		Buyat - Molobog										
		Molobog - Onggunoi										
		Onggunoi - Pinolosian										
		Pinolosian - Molibagu										
		Molibagu - Momalia										
		Momalia – Tahidaa (Bts. Prov. Gorontalo)										
		Bts. Kota Tondano - Tomohon										
		Jln. Samratulangi (Tondano)										
		Jln. Bulovard (Tondano)										
		Worotican - Poopo										
		Poopo - Sinisir										
		Sinisir - Bts. Kota Kotamobagu/Boltim										
		Bts. Kota Kotamobagu/Boltim - Sp. Empat Siliwangi										
		Jln. Gatot Subroto (Kotamobagu)										
		Jln. Adampe Dolot (Kotamobagu)										
		Jln. A. Yani (Kotamobagu)										
		Jln. Sutoyo (Kotamobagu)										
		Jln. Yusuf Hasiru (Kotamobagu)										
		Jln. Siliwangi (Kotamobagu)										
		Bts. Kota Kotamobagu - Doloduo										
		Jln. Kotamobagu - Doloduo (Kotamobagu)										
		Doloduo - Molibagu										
		Bts. Kota Tahuna - Enemawira										
		Jln. Jend. Sudirman (Tahuna)										

					Akhir Jln. Jend. Sudirman - Bts. Kota Tahuna									
					Bts. Kota Tahuna - Rsu Tahuna									
					Naha - Enemawira									
					Bts. Kota Tahuna (Tahuna) - Naha									
					Jln. Kara Manusa (Tahuna)									
					Jln. Apeng Cendera (Tahuna)									
					Bts. Kota Tahuna - Tamako									
					Jln. Marakambo (Tahuna)									
					Jln. Tidore (Tahuna)									
					Enemawira - Manalu - Tamako									
					Beo - Melonguane									
					Beo - Esang									
					Esang - Rainis									
					Melongguane - Rainis									
					Beo - Rainis									
					Kaiya - Kotamobagu									
					Matali - Torosik									
					Langowan - Ratahan - Belang									
					Tondano - Wasian - Kakas - Lagowan - Kawangkoan									
					Jln. Lingkar Mangas									
					Jln. Lingkar Kakorotan									
					Jalan Akses Likupang									
					Likupang - Girian (Bitung)									
			4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pelebaran Jalan Menuju Standar	Bts. Kota Manado – Tumpaan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi							
					Jln. Monginsidi (Manado)									
					Jln. Bethesda (Manado)									
					Zero Point - Jln. Pierre Tendean (Manado)									
					Jln. Pierre Tendean (Boulevard) (Manado)									
					Wori - Likupang									
					Bts. Kota Manado - Wori									
					Jln. Hasanudin (Manado)									
					Jln. Ks. Tubun (Manado)									
					Jln. Panjaitan (Manado)									
					Jln. Pogidon (Mpnado)									
					Girian - Kema (Makalisung)									
					Kema - Rumbia									
					Rumbia - Buyat									
					Buyat - Molobog									
					Molobog - Onggunoi									
					Onggunoi - Pinolosian									
					Pinolosian - Molibagu									
					Molibagu - Momalia									
					Momalia – Taludaa (Bts. Prov. Gorontalo)									
					Bts. Kota Tondano - Tomohon									
					Jln. Samratulangi (Tondano)									
					Jln. Bulovard (Tondano)									
					Worotican - Poopo									
					Poopo - Sinisir									
					Sinisir - Bts. Kota Kotamobagu/Boltim									
					Bts. Kota Kotamobagu/Boltim - Sp. Empat Siliwangi									
					Jln. Gatot Subroto (Kotamobagu)									
					Jln. Adampe Dolot (Kotamobagu)									
					Jln. A. Yani (Kotamobagu)									
					Jln. Sutoyo (Kotamobagu)									
					Jln. Yusuf Hasiru (Kotamobagu)									
					Jln. Siliwangi (Kotamobagu)									
					Bts. Kota Kotamobagu - Doloduo									
					Jln. Kotamobagu - Doloduo (Kotamobagu)									
					Doloduo - Molibagu									
					Bts. Kota Tahuna - Enemawira									
					Jln. Jend. Sudirman (Tahuna)									
					Akhir Jln. Jend. Sudirman - Bts. Kota Tahuna									
					Bts. Kota Tahuna - Rsu Tahuna									
					Naha - Enemawira									
					Bts. Kota Tahuna (Tahuna) - Naha									
					Jln. Kara Manusa (Tahuna)									
					Jln. Apeng Cendera (Tahuna)									
					Bts. Kota Tahuna - Tamako									
					Jln. Marakambo (Tahuna)									
					Jln. Tidore (Tahuna)									
					Enemawira - Manalu - Tamako									
					Beo - Melonguane									
					Beo - Esang									
					Esang - Rainis									
					Melongguane - Rainis									
					Beo - Rainis									
					Kaiya - Kotamobagu									
					Matali - Torosik									
					Langowan - Ratahan - Belang									
					Tondano - Wasian - Kakas - Lagowan - Kawangkoan									
					Jln. Lingkar Mangas									
					Jln. Lingkar Kakorotan									
					Jalan Akses Likupang									
					Likupang - Girian (Bitung)									
			5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Menuju Standar	Bts. Kota Manado – Tumpaan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Kantah Kabupaten/Kota							
			6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jln. Monginsidi (Manado)									
					Jln. Bethesda (Manado)									
					Zero Point - Jln. Pierre Tendean (Manado)									
					Jln. Pierre Tendean (Boulevard) (Manado)									
					Wori - Likupang									
					Bts. Kota Manado - Wori									
					Jln. Hasanudin (Manado)									
					Jln. Ks. Tubun (Manado)									
					Jln. Panjaitan (Manado)									
					Jln. Pogidon (Manado)									
					Girian - Kema (Makalisung)									
					Kema - Rumbia									
					Rumbia - Buyat									
					Buyat - Molobog									
					Molobog - Onggunoi									
					Onggunoi - Pinolosian									
					Pinolosian - Molibagu									
					Molibagu - Momalia									
					Momalia – Taludaa (Bts. Prov. Gorontalo)									
					Bts. Kota Tondano - Tomohon									
					Jln. Samratulangi (Tondano)									
					Jln. Bulovard (Tondano)									
					Worotican - Poopo									
					Poopo - Sinisir									
					Sinisir - Bts. Kota Kotamobagu/Boltim									
					Bts. Kota Kotamobagu/Boltim - Sp. Empat Siliwangi									
					Jln. Gatot Subroto (Kotamobagu)									
					Jln. Adampe Dolot (Kotamobagu)									
					Jln. A. Yani (Kotamobagu)									
					Jln. Sutoyo (Kotamobagu)									
					Jln. Yusuf Hasiru (Kotamobagu)									
					Jln. Siliwangi (Kotamobagu)									
					Bts. Kota Kotamobagu - Doloduo									
					Jln. Kotamobagu - Doloduo (Kotamobagu)									
					Doloduo - Molibagu									
					Bts. Kota Tahuna - Enemawira									

					Jln. Jend. Sudirman (Tahuna)									
					Akhir Jln. Jend. Sudirman - Bts. Kota Tahuna									
					Bts. Kota Tahuna - Rsu Tahuna									
					Naha - Enemawira									
					Bts. Kota Tahuna (Tahuna) - Naha									
					Jln. Kara Manusa (Tahuna)									
					Jln. Apeng Cendera (Tahuna)									
					Bts. Kota Tahuna - Tamako									
					Jln. Marakambo (Tahuna)									
					Jln. Tidore (Tahuna)									
					Enemawira - Manalu - Tamako									
					Beo - Melonguane									
					Beo - Esang									
					Esang - Rainis									
					Melongguane - Rainis									
					Beo - Rainis									
					Kaiya - Kotamobagu									
					Matali - Torosik									
					Langowan - Ratahan - Belang									
					Tondano - Wasian - Kakas - Lagowan - Kawangkoan									
					Jln. Lingkar Mangas									
					Jln. Lingkar Kakorotan									
					Jalan Akses Likupang									
					Likupang - Girian (Bitung)									
			7)	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Bts. Kota Manado – Tumpaan	APBN	Kementerian PU							
					Jln. Mongansidi (Manado)									
					Jln. Bethesda (Manado)									
					Zero Point - Jln. Pierre Tendean (Manado)									
					Jln. Pierre Tendean (Boulevard) (Manado)									
					Wori - Likupang									
					Bts. Kota Manado - Wori									
					Jln. Hasanudin (Manado)									
					Jln. Ks. Tubun (Manado)									
					Jln. Panjaitan (Manado)									
					Jln. Pogidon (Manado)									
					Girian - Kema (Makalisung)									
					Kema - Rumbia									
					Rumbia - Buyat									
					Buyat - Molobog									
					Molobog - Onggunoi									
					Onggunoi - Pinolosian									
					Pinolosian - Molibagu									
					Molibagu - Momalia									
					Momalia – Taludaa (Bts. Prov. Gorontalo)									
					Bts. Kota Tondano - Tomohon									
					Jln. Samratulangi (Tondano)									
					Jln. Bulovard (Tondano)									
					Worotican - Poopo									
					Poopo - Sinisir									
					Sinisir - Bts. Kota Kotamobagu/Bolim									
					Bts. Kota Kotamobagu/Bolim - Sp. Empat Siliwangi									
					Jln. Gatot Subroto (Kotamobagu)									
					Jln. Adampe Dolot (Kotamobagu)									
					Jln. A. Yani (Kotamobagu)									
					Jln. Sutoyo (Kotamobagu)									
					Jln. Yusuf Hasiru (Kotamobagu)									
					Jln. Siliwangi (Kotamobagu)									
					Bts. Kota Kotamobagu - Dolodduo									
					Jln. Kotamobagu - Dolodduo (Kotamobagu)									
					Dolodduo - Molibagu									
					Bts. Kota Tahuna - Enemawira									
					Jln. Jend. Sudirman (Tahuna)									
					Akhir Jln. Jend. Sudirman - Bts. Kota Tahuna									
					Bts. Kota Tahuna - Rsu Tahuna									
					Naha - Enemawira									
					Bts. Kota Tahuna (Tahuna) - Naha									
					Jln. Kara Manusa (Tahuna)									
					Jln. Apeng Cendera (Tahuna)									
					Bts. Kota Tahuna - Tamako									
					Jln. Marakambo (Tahuna)									
					Jln. Tidore (Tahuna)									
					Enemawira - Manalu - Tamako									
					Beo - Melonguane									
					Beo - Esang									
					Esang - Rainis									
					Melongguane - Rainis									
					Beo - Rainis									
					Kaiya - Kotamobagu									
					Matali - Torosik									
					Langowan - Ratahan - Belang									
					Tondano - Wasian - Kakas - Lagowan - Kawangkoan									
					Jln. Lingkar Mangas									
					Jln. Lingkar Kakorotan									
					Jalan Akses Likupang									
					Likupang - Girian (Bitung)									
			8)	Penyelesaian Santunan Tanah Pelebaran Jalan Menuju Standar	Bts. Kota Manado – Tumpaan	APBN	Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN							
					Jln. Mongansidi (Manado)									
					Jln. Bethesda (Manado)									
					Zero Point - Jln. Pierre Tendean (Manado)									
					Jln. Pierre Tendean (Boulevard) (Manado)									
					Wori - Likupang									
					Bts. Kota Manado - Wori									
					Jln. Hasanudin (Manado)									
					Jln. Ks. Tubun (Manado)									
					Jln. Panjaitan (Manado)									
					Jln. Pogidon (Manado)									
					Girian - Kema (Makalisung)									
					Kema - Rumbia									
					Rumbia - Buyat									
					Buyat - Molobog									
					Molobog - Onggunoi									
					Onggunoi - Pinolosian									
					Pinolosian - Molibagu									
					Molibagu - Momalia									
					Momalia – Taludaa (Bts. Prov. Gorontalo)									
					Bts. Kota Tondano - Tomohon									
					Jln. Samratulangi (Tondano)									
					Jln. Bulovard (Tondano)									
					Worotican - Poopo									
					Poopo - Sinisir									
					Sinisir - Bts. Kota Kotamobagu/Bolim									
					Bts. Kota Kotamobagu/Bolim - Sp. Empat Siliwangi									
					Jln. Gatot Subroto (Kotamobagu)									
					Jln. Adampe Dolot (Kotamobagu)									
					Jln. A. Yani (Kotamobagu)									
					Jln. Sutoyo (Kotamobagu)									
					Jln. Yusuf Hasiru (Kotamobagu)									
					Jln. Siliwangi (Kotamobagu)									
					Bts. Kota Kotamobagu - Dolodduo									
					Jln. Kotamobagu - Dolodduo (Kotamobagu)									

			Dolodudo - Molibagu									
			Bts. Kota Tahuna - Enemawira									
			Jln. Jend. Sudirman (Tahuna)									
			Akhir Jln. Jend. Sudirman - Bts. Kota Tahuna									
			Bts. Kota Tahuna - Rsu Tahuna									
			Naha - Enemawira									
			Bts. Kota Tahuna (Tahuna) - Naha									
			Jln. Kara Manusa (Tahuna)									
			Jln. Apeng Cendera (Tahuna)									
			Bts. Kota Tahuna - Tamako									
			Jln. Marakambo (Tahuna)									
			Jln. Tidore (Tahuna)									
			Enemawira - Manalu - Tamako									
			Beo - Melonguane									
			Beo - Esang									
			Esang - Rainis									
			Melonguane - Rainis									
			Beo - Rainis									
			Kaiya - Kotamobagu									
			Matali - Torosik									
			Langowan - Ratahan - Belang									
			Tondano - Wasian - Kakas - Langowan - Kawangkoan									
			Jln. Lingkar Miangas									
			Jln. Lingkar Kakorotan									
			Jalan Akses Likupang									
			Likupang - Girian (Bitung)									
	9)	Penurunan Status Separuh Ruas Jalan JKP Menjadi Jalan Kabupaten/Kota	Ruas Likupang - Girian (Bitung) (Alih Trase)	APBN	Kementerian PU							
			Ruas Malobog - Onggunoi (Alih Trase)									
	c. Pembangunan Jalan Provinsi											
	1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Jalan	Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
	2)	Penyusunan DED Pembangunan Jalan	Togid - Kokapoy - Kakenturan									
			Tolondadu - Salongo									
			Ring Road II - Paniki									
			Bandara - Likupang (Alternatif)									
			Papakelan - Tanggari - Tonsealama									
			Atep - Wongkai - Pangu									
			Tateli - Agotey - Kakaskasen									
			Boulevard Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud									
	3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
			Togid - Kokapoy - Kakenturan									
			Tolondadu - Salongo									
			Ring Road II - Paniki									
			Bandara - Likupang (Alternatif)									
			Papakelan - Tanggari - Tonsealama									
			Atep - Wongkai - Pangu									
			Tateli - Agotey - Kakaskasen									
			Boulevard Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud									
	4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Jalan	Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi							
			Togid - Kokapoy - Kakenturan									
			Tolondadu - Salongo									
			Ring Road II - Paniki									
			Bandara - Likupang (Alternatif)									
			Papakelan - Tanggari - Tonsealama									
			Atep - Wongkai - Pangu									
			Tateli - Agotey - Kakaskasen									
			Boulevard Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud									
	5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan	Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen	APBD Provinsi, APBN Kabupaten/Kota	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Kantah Kabupaten/Kota							
	6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan Jalan	Togid - Kokapoy - Kakenturan									
			Tolondadu - Salongo									
			Ring Road II - Paniki									
			Bandara - Likupang (Alternatif)									
			Papakelan - Tanggari - Tonsealama									
			Atep - Wongkai - Pangu									
			Tateli - Agotey - Kakaskasen									
			Boulevard Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud									
	7)	Pembangunan Jalan	Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen	APBD Provinsi, APBN Kabupaten/Kota	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota							
			Togid - Kokapoy - Kakenturan									
			Tolondadu - Salongo									
			Ring Road II - Paniki									
			Bandara - Likupang (Alternatif)									
			Papakelan - Tanggari - Tonsealama									
			Atep - Wongkai - Pangu									
			Tateli - Agotey - Kakaskasen									
			Boulevard Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud									
	d. Pelebaran Jalan Provinsi Menuju Standar											
	1)	Penyusunan Feasibility Study Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kauditan - Kema	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
	2)	Penyusunan DED Pelebaran Jalan Menuju Standar	Ulu - Ondong - Talawid - Bandara									
			Ratahan - Amurang									
			Modayag - Molobog									
			Makalisung - Kombi - Toliang Oki									
			Manado - Tongkaina - Wori									
			Tondano - Remboken - Kakas									
			Tondano - Kembes - Manado									
			Sonder - Tincep - Maruasey									
			Tomohon - Tanawangko									
			Tanawangko - Kumu - Popontolen									
			Pinogaluman - Dumoga									
			Wasian - Simbel - Wailang									
			Mapanget - Molas (Manado)									
			Tateli - Klabat - Danowudu									
			Pontak - Kalait - Lobu									
			Pontodon - Insil - Palelon									
			Akses Kek Bitung									
			Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen									
			Togid - Kokapoy - Kakenturan									
			Ponompiaan - Serasi - Totabuan									
			Inomunga - Komus - Tuntung									
			Laine - Ngalipaeng - Pintareng									
			Pintareng - Manalu									
			Lenganeng - Raku - Naha									
			Langowan - Atep - Temboan									
			Remboken - Kawangkoan									
			Lirung - Kalongan - Balang									
			Lirung - Balang									
			Lirung - Bitunuris									
			Tarohan - Pulutan									
			Jln. Samratulangi (Manado)									
			Jln. Ahmad Yani (Manado)									
			Warembungan - Simpang Tiga Desa Sea (Tugu)									
			Dimembe - Paniki									
			Matungkas - Paniki									
			Kalasey - Sea									
			Jln. Lingkar Tomohon - Rurukan - Sasaran									
			Simpang Tiga Tataaran - Umima - Tondano									
			Kasuang - Patar Tataaran - Remboken									
			Liwutung - Tababo									
			Imandi - Tambun - Uluan									
			Tolondadu - Salongo									
			Ring Road II - Paniki									
			Kolongan - Kuwil - Sawangan									

					Paniki - Soekarno										
					Akses Pariwisata Pantai Paal - Kinunang										
					Batas Kota Manado - Mapanget										
					Bandara - Likupang (Alternatif)										
					Jalan Akses Tpa Regional										
					Leleko - Kasuratan - Leilem										
					Sukur - Zero Point Minut										
					Zero Point Minut - Tatelu										
					Wasian - Likupang										
					Kawangkoan - Ir. Soekarno										
					Ir. Soekarno - Matungkas										
					Papakelan - Tanggari - Tonsealama										
					Ir. Soekarno										
					Kuwil - Malendeng										
					Atep - Wongkai - Pangu										
					Sinsingon - Mobuya - Wulurmahatus										
					Paniki Atas - Mapanget										
					Tateli - Agotey - Kakaskasen										
					Pineleng - Kali - Kakaskasen										
					Kaleosan - Rumengkor										
					Tohuaya - Popodu										
					Lobong - Passi - Bilalang - Biga										
					Sangkub Timur - Sidodadi - Sukamakmur - Sangkub										
			3)	Penetapan Lokasi Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kauditan - Kema	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Ulu - Ondong - Talawid - Bandara										
					Ratahan - Amurang										
					Modayag - Molobog										
					Makalisung - Kombi - Tolang Oki										
					Manado - Tongkaina - Wori										
					Tondano - Remboken - Kakas										
					Tondano - Kembes - Manado										
					Sonder - Tincep - Maruasey										
					Tomohon - Tanawangko										
					Tanawangko - Kumu - Popontolen										
					Pinogaluman - Dumoga										
					Wasian - Sinbel - Wailang										
					Mapanget - Molas (Manado)										
					Tatelu - Klabat - Danowudu										
					Pontak - Kalait - Lobu										
					Pontodon - Insil - Palelon										
					Akses Kek Bitung										
					Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen										
					Togid - Kokapoy - Kakenturan										
					Ponompian - Serasi - Totabuan										
					Inomunga - Komus - Tuntung										
					Laine - Ngalipaeng - Pantareng										
					Pintareng - Manalu										
					Lenganeng - Raku - Naha										
					Langowan - Atep - Temboan										
					Remboken - Kawangkoan										
					Lirung - Kalongan - Balang										
					Lirung - Balang										
					Lirung - Bitunuris										
					Tarohan - Pulutan										
					Jln. Samratulangi (Manado)										
					Jln. Ahmad Yani (Manado)										
					Warembungan - Simpang Tiga Desa Sea (Tugu)										
					Dimembe - Paniki										
					Matungkas - Paniki										
					Kalasey - Sea										
					Jln. Lingkar Tomohon - Rurukan - Sasaran										
					Simpang Tiga Tataaran - Unima - Tondano										
					Kasuang - Patar Tataaran - Remboken										
					Liwutung - Tababo										
					Imandi - Tambun - Ulaan										
					Tolondadu - Salonso										
					Ring Road II - Paniki										
					Kolongan - Kuwil - Sawangan										
					Paniki - Soekarno										
					Akses Pariwisata Pantai Paal - Kinunang										
					Batas Kota Manado - Mapanget										
					Bandara - Likupang (Alternatif)										
					Jalan Akses Tpa Regional										
					Leleko - Kasuratan - Leilem										
					Sukur - Zero Point Minut										
					Zero Point Minut - Tatelu										
					Wasian - Likupang										
					Kawangkoan - Ir. Soekarno										
					Ir. Soekarno - Matungkas										
					Papakelan - Tanggari - Tonsealama										
					Ir. Soekarno										
					Kuwil - Malendeng										
					Atep - Wongkai - Pangu										
					Sinsingon - Mobuya - Wulurmahatus										
					Paniki Atas - Mapanget										
					Tateli - Agotey - Kakaskasen										
					Pineleng - Kali - Kakaskasen										
					Kaleosan - Rumengkor										
					Tohuaya - Popodu										
					Lobong - Passi - Bilalang - Biga										
					Sangkub Timur - Sidodadi - Sukamakmur - Sangkub										
			4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pelebaran Jalan Menuju Standar	Kauditan - Kema										
					Ulu - Ondong - Talawid - Bandara										
					Ratahan - Amurang										
					Modayag - Molobog										
					Makalisung - Kombi - Tolang Oki										
					Manado - Tongkaina - Wori										
					Tondano - Remboken - Kakas										
					Tondano - Kembes - Manado										
					Sonder - Tincep - Maruasey										
					Tomohon - Tanawangko										
					Tanawangko - Kumu - Popontolen										
					Pinogaluman - Dumoga										
					Wasian - Sinbel - Wailang										
					Mapanget - Molas (Manado)										
					Tatelu - Klabat - Danowudu										
					Pontak - Kalait - Lobu										
					Pontodon - Insil - Palelon										
					Akses Kek Bitung										
					Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen										
					Togid - Kokapoy - Kakenturan										
					Ponompian - Serasi - Totabuan										
					Inomunga - Komus - Tuntung										
					Laine - Ngalipaeng - Pantareng										
					Pintareng - Manalu										
					Lenganeng - Raku - Naha										
					Langowan - Atep - Temboan										
					Remboken - Kawangkoan										
					Lirung - Kalongan - Balang										

				Lirung - Balang	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi							
				Lirung - Bitunuris									
				Tarohan - Pulutan									
				Jln. Samratulangi (Manado)									
				Jln. Ahmad Yani (Manado)									
				Warembungan - Simpang Tiga Desa Sea (Tugu)									
				Dimembe - Paniki									
				Matungkas - Paniki									
				Kalasey - Sea									
				Jln. Lingkar Tomohon - Rurukan - Sasaran									
				Simpang Tiga Tataaran - Unima - Tondano									
				Kasuang - Patar Tataaran - Remboken									
				Liwutung - Tababo									
				Imandi - Tambun - Uluan									
				Tolondadu - Salongo									
				Ring Road II - Paniki									
				Kolongan - Kuwil - Sawangan									
				Paniki - Soekarno									
				Akses Pariwisata Pantai Paal - Kinunang									
				Batas Kota Manado - Mapanget									
				Bandara - Likupang (Alternatif)									
				Jalan Akses Tpa Regional									
				Leleko - Kasuratan - Leilem									
				Sukur - Zero Point Minut									
				Zero Point Minut - Tatelu									
				Wasian - Likupang									
				Kawangkoan - Ir. Soekarno									
				Ir. Soekarno - Matungkas									
				Panakelan - Tanggari - Tonsealama									
				Ir. Soekarno									
				Kuwil - Malendeng									
				Atep - Wongkai - Pangu									
				Sinsinnon - Mobuya - Wulurmahatus									
				Paniki Atas - Mapanget									
				Tateli - Agotey - Kakaskasen									
				Pineleng - Kali - Kakaskasen									
				Kaleosan - Rumengkor									
				Toluaya - Popodu									
				Lobong - Passi - Bilalang - Biga									
				Sangkub Timur - Sidodadi - Sukamakmur - Sangkub									
	5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pelebaran Jalan Menuju Standar		Kauditan - Kema	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota							
	6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pelebaran Jalan Menuju Standar		Ulu - Ondong - Talawid - Bandara									
				Ratahan - Amurang									
				Modayag - Molobog									
				Makalisung - Kombi - Toliang Oki									
				Manado - Tongkaina - Wori									
				Tondano - Remboken - Kakas									
				Tondano - Kembes - Manado									
				Sonder - Tincep - Maruasey									
				Tomohon - Tanawangko									
				Tanawangko - Kumu - Popontolen									
				Pinogaluman - Dumoga									
				Wasian - Simbel - Wailang									
				Mapanget - Molas (Manado)									
				Tatelu - Klabat - Danowudu									
				Pontak - Kalait - Lobu									
				Pontodon - Insil - Paklon									
				Akses Kek Bitung									
				Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen									
				Togid - Kokapoy - Kakenturan									
				Ponompiaan - Serasi - Totabuan									
				Inomunga - Komus - Tuntung									
				Laine - Ngalipaeng - Pintareng									
				Pintareng - Manalu									
				Lenganeng - Raku - Naha									
				Langowan - Atep - Temboan									
				Remboken - Kawangkoan									
				Lirung - Kalongan - Balang									
				Lirung - Balang									
				Lirung - Bitunuris									
				Tarohan - Pulutan									
				Jln. Samratulangi (Manado)									
				Jln. Ahmad Yani (Manado)									
				Warembungan - Simpang Tiga Desa Sea (Tugu)									
				Dimembe - Paniki									
				Matungkas - Paniki									
				Kalasey - Sea									
				Jln. Lingkar Tomohon - Rurukan - Sasaran									
				Simpang Tiga Tataaran - Unima - Tondano									
				Kasuang - Patar Tataaran - Remboken									
				Liwutung - Tababo									
				Imandi - Tambun - Uluan									
				Tolondadu - Salongo									
				Ring Road II - Paniki									
				Kolongan - Kuwil - Sawangan									
				Paniki - Soekarno									
				Akses Pariwisata Pantai Paal - Kinunang									
				Batas Kota Manado - Mapanget									
				Bandara - Likupang (Alternatif)									
				Jalan Akses Tpa Regional									
				Leleko - Kasuratan - Leilem									
				Sukur - Zero Point Minut									
				Zero Point Minut - Tatelu									
				Wasian - Likupang									
				Kawangkoan - Ir. Soekarno									
				Ir. Soekarno - Matungkas									
				Panakelan - Tanggari - Tonsealama									
				Ir. Soekarno									
				Kuwil - Malendeng									
				Atep - Wongkai - Pangu									
				Sinsinnon - Mobuya - Wulurmahatus									
				Paniki Atas - Mapanget									
				Tateli - Agotey - Kakaskasen									
				Pineleng - Kali - Kakaskasen									
				Kaleosan - Rumengkor									
				Toluaya - Popodu									
				Lobong - Passi - Bilalang - Biga									
				Sangkub Timur - Sidodadi - Sukamakmur - Sangkub									
	7)	Pelebaran Jalan Menuju Standar		Kauditan - Kema	APBN	Kementerian PU							
				Ulu - Ondong - Talawid - Bandara									
				Ratahan - Amurang									
				Modayag - Molobog									
				Makalisung - Kombi - Toliang Oki									
				Manado - Tongkaina - Wori									
				Tondano - Remboken - Kakas									
				Tondano - Kembes - Manado									
				Sonder - Tincep - Maruasey									
				Tomohon - Tanawangko									
				Tanawangko - Kumu - Popontolen									

					Pinogaluman - Dumoga										
					Wasian - Sambel - Wailang										
					Mapanget - Molas (Manado)										
					Tatelu - Klabat - Danowudu										
					Pontak - Kalait - Lobu										
					Pontodon - Insil - Palelon										
					Akses Kek Bitung										
					Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen										
					Togid - Kokapov - Kakenturan										
					Ponompiaan - Serasi - Totabuan										
					Inomunga - Komus - Tuntung										
					Laine - Ngalipaeng - Pintareng										
					Pintareng - Manalu										
					Lenganeng - Raku - Naha										
					Langowan - Atep - Temboan										
					Remboken - Kawangkoan										
					Lirung - Kalongan - Balang										
					Lirung - Balang										
					Lirung - Bitunuris										
					Tarohan - Pulutan										
					Jln. Samratulangi (Manado)										
					Jln. Ahmad Yani (Manado)										
					Warembungan - Simpang Tiga Desa Sea (Tugu)										
					Dimembe - Paniki										
					Matungkas - Paniki										
					Kalasey - Sea										
					Jln. Lingkar Tomohon - Rurukan - Sasaran										
					Simpang Tiga Tataaran - Unima - Tondano										
					Kasuang - Patar Tataaran - Remboken										
					Liwutung - Tababo										
					Imandi - Tambun - Uluan										
					Tolondadu - Salongo										
					Ring Road II - Paniki										
					Kolongan - Kuwil - Sawangan										
					Paniki - Soekarno										
					Akses Pariwisata Pantai Paal - Kinunang										
					Batas Kota Manado - Mapanget										
					Bandara - Likupang (Alternatif)										
					Jalan Akses Tpa Regional										
					Leleko - Kasuratan - Leilem										
					Sukur - Zero Point Minut										
					Zero Point Minut - Tatelu										
					Wasian - Likupang										
					Kawangkoan - Ir. Soekarno										
					Ir. Soekarno - Matungkas										
					Papakelan - Tanggari - Tonsealama										
					Ir. Soekarno										
					Kuwil - Malendeng										
					Atep - Wongkai - Pangu										
					Singsingon - Mobuya - Wulurmahatus										
					Paniki Atas - Mapanget										
					Tateli - Agotey - Kakaskasen										
					Pineleng - Kali - Kakaskasen										
					Kaleosan - Rumengkor										
					Toluaya - Popodu										
					Lobong - Passi - Bilalang - Biga										
					Sangkub Timur - Sidodadi - Sukamaknur - Sangkub										
			8)	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi	Kauditan - Kema	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Ulu - Ondong - Talawid - Bandara										
					Ratahan - Amurang										
					Modayag - Molobog										
					Makalisung - Kombi - Toliang Oki										
					Manado - Tongkaina - Wori										
					Tondano - Remboken - Kakas										
					Tondano - Kembes - Manado										
					Sonder - Tincep - Maruasey										
					Tomohon - Tanawangko										
					Tanawangko - Kumu - Ponontolen										
					Pinogaluman - Dumoga										
					Wasian - Sambel - Wailang										
					Mapanget - Molas (Manado)										
					Tatelu - Klabat - Danowudu										
					Pontak - Kalait - Lobu										
					Pontodon - Insil - Palelon										
					Akses Kek Bitung										
					Rumoong Bawah - Elusan - Tewasen										
					Togid - Kokapov - Kakenturan										
					Ponompiaan - Serasi - Totabuan										
					Inomunga - Komus - Tuntung										
					Laine - Ngalipaeng - Pintareng										
					Pintareng - Manalu										
					Lenganeng - Raku - Naha										
					Langowan - Atep - Temboan										
					Remboken - Kawangkoan										
					Lirung - Kalongan - Balang										
					Lirung - Balang										
					Lirung - Bitunuris										
					Tarohan - Pulutan										
					Jln. Samratulangi (Manado)										
					Jln. Ahmad Yani (Manado)										
					Warembungan - Simpang Tiga Desa Sea (Tugu)										
					Dimembe - Paniki										
					Matungkas - Paniki										
					Kalasey - Sea										
					Jln. Lingkar Tomohon - Rurukan - Sasaran										
					Simpang Tiga Tataaran - Unima - Tondano										
					Kasuang - Patar Tataaran - Remboken										
					Liwutung - Tababo										
					Imandi - Tambun - Uluan										
					Tolondadu - Salongo										
					Ring Road II - Paniki										
					Kolongan - Kuwil - Sawangan										
					Paniki - Soekarno										
					Akses Pariwisata Pantai Paal - Kinunang										
					Batas Kota Manado - Mapanget										
					Bandara - Likupang (Alternatif)										
					Jalan Akses Tpa Regional										
					Leleko - Kasuratan - Leilem										
					Sukur - Zero Point Minut										
					Zero Point Minut - Tatelu										
					Wasian - Likupang										
					Kawangkoan - Ir. Soekarno										
					Ir. Soekarno - Matungkas										
					Papakelan - Tanggari - Tonsealama										
					Ir. Soekarno										
					Kuwil - Malendeng										
					Atep - Wongkai - Pangu										
					Singsingon - Mobuya - Wulurmahatus										
					Paniki Atas - Mapanget										
					Tateli - Agotey - Kakaskasen										
					Pineleng - Kali - Kakaskasen										

		Kaleosan - Rumengkor										
		Tolauya - Popodu										
		Lobong - Pasai - Bilalang - Biga										
		Sangkub Timur - Sidodadi - Sukamakmur - Sangkub										
9)	Peningkatan Status Jalan menjadi Jalan Kolektor Primer 1	Lirung - Kalongan - Balang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta, Sumber Pendanaan Lain yang Relevan	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan								
		Lirung - Balang										
		Lirung - Bitunuris										
2.1.1.3	**Perwujudan Jalan Lokal Primer**											
a. Pembangunan Jalan Lokal Primer												
1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Jalan	Boulevard Lirung di Kabupaten Kepulauan Taland	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
2)	Penyususnan DED Pembangunan Jalan	Ruas Jalan Lingkar Kotamobagu										
		Jalan Manado - Langowan										
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan	Boulevard Lirung di Kabupaten Kepulauan Taland	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
		Ruas Jalan Lingkar Kotamobagu										
		Jalan Manado - Langowan										
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Jalan	Boulevard Lirung di Kabupaten Kepulauan Taland	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas								
		Ruas Jalan Lingkar Kotamobagu										
		Jalan Manado - Langowan										
5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan	Boulevard Lirung di Kabupaten Kepulauan Taland	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota,								
6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan Jalan	Ruas Jalan Lingkar Kotamobagu										
		Jalan Manado - Langowan	APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas								
7)	Pembangunan Jalan Lokal Primer	Boulevard Lirung di Kabupaten Kepulauan Taland	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PU, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
		Ruas Jalan Lingkar Kotamobagu										
		Jalan Manado - Langowan	APBD Provinsi	Kementerian PU, Dinas								
8)	Peningkatan Status Jalan menjadi Kolektor Primer	Dalam Kawasan Pananaru	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
		Dalam Kota Likupang 12										
		Dalam Kota Likupang 13										
		Dalam Kota Melonguane										
		Dalam Kota Salibabu										
		Dalam Kota Ulu										
		Jalan Akses Pangkalan Pendaratan Ikan Tondano										
		Jalan Akses Pelabuan Perikanan Ikan Sauk										
		Jalan Akses Pelabuhan Likupang										
		Jalan Akses Pelabuhan Munte/Likupang Barat										
		Jalan Akses Pelabuhan Perikanan Ikan Atep Oki										
		Jalan Akses Pelabuhan Perikanan Ikan Dagho										
		Jalan Akses Terminal "Tumatenden" Airmadidi										
		Jalan Dalam IKK Tabukan Utara										
		Jalan Dalam Kota Langowan Timur										
		Jalan Dalam Kota Langowan Utara										
		Jalan Dalam Kota Tondano Barat										
		Jalan Desa Jiko Port										
		Jalan Masuk Bandara Naha										
		Jl. Pande Bulan										
		Jl. Pasar Beriman I										
		Jl. Puskesmas-Pasar Beriman										
		Jln. Rajawali										
		Jln. Terminal Paal Dua										
		Jln. Tolour										
		Jln. Tonsawang										
		Kema-Batu Nona										
		Komus I-Tanjung Sidupa I										
		Komus I-Tanjung Sidupa II										
		Munte-Bulutui										
		Ruas Jalan Dudepo Barat I dan										
		Ulu-Ondong (LU)										
		Peningkatan Status Jalan Lingkar Pulau Salibabu	APBN	Kementerian PU								
2.1.2	**Perwujudan Jalan Tol**											
a. Pembangunan Jalan Tol												
1)	Penyusunan *Feasibility Study* Pembangunan Jalan Tol	Amurang - Kaiya	APBD Provinsi, Swasta, Sumber Pendanaan Lain yang Relevan	Dinas PUPR Provinsi, dan/atau Kerjasama Pendanaan								
2)	Penyusunan DED Pembangunan Jalan Tol	Kairagi - Mapanget										
		Kaiya - Atingola										
		Manado - Tomohon										
		Tomohon - Amurang										
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol	Amurang - Kaiya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta, Sumber Pendanaan Lain yang Relevan	Dinas PUPR Provinsi, dan/atau Kerjasama Pendanaan								
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Jalan Tol	Kairagi - Mapanget										
		Kaiya - Atingola										
		Manado - Tomohon										
		Tomohon - Amurang										
5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol	Amurang - Kaiya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta, Sumber Pendanaan Lain yang Relevan	Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPRD Kabupaten/Kota, Kantah Kabupaten/Kota,								
6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan Jalan Tol	Kairagi - Mapanget										
		Kaiya - Atingola										
		Manado - Tomohon										
		Tomohon - Amurang										
7)	Pembangunan Jalan Tol	Amurang - Kaiya	APBN, Swasta, Sumber Pendanaan Lain yang Relevan	Kementerian PU dan/atau Kerjasama Pendanaan								
		Kairagi - Mapanget										
		Kaiya - Atingola										
		Manado - Tomohon										
		Tomohon - Amurang										
8)	Pemeliharaan Berkala Jalan Tol	Manado - Bitung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta, Sumber Pendanaan Lain yang Relevan	Kementerian PU, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPRD Kabupaten/Kota, dan/atau Kerjasama Pendanaan								
		Amurang - Kaiya										
		Kairagi - Mapanget										
		Kaiya - Atingola										
		Manado - Tomohon										
		Tomohon - Amurang										
9)	Konstruksi Jalan Tol sebagai Landasan Darurat Pesawat Tempur dalam Situasi	Provinsi Sulawesi Utara	APBN, Sumber	Kementerian PU,								
2.1.3	**Perwujudan Terminal Penumpang**											
2.1.3.1	**Perwujudan Terminal Penumpang Tipe A**											
a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang												
1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Terminal Penumpang Tipe A Likupang di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi, Swasta, Sumber Pendanaan Lain yang Relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi								
2)	Penyusunan DED Pembangunan	Terminal Penumpang Tipe A Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Terminal Penumpang Tipe A Likupang di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi, Swasta, Sumber	Kementerian Perhubungan, Dinas								
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Terminal Penumpang Tipe A Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Terminal Penumpang Tipe A Likupang di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota,	Kementerian Perhubungan, Dinas								
		Terminal Penumpang Tipe A Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Terminal Penumpang Tipe A Likupang di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta, Sumber Pendanaan Lain yang	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Kantah Kabupaten/Kota								
7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Terminal Penumpang Tipe A Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
8)	Pembangunan	Terminal Penumpang Tipe A Likupang di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta, Sumber Pendanaan Lain yang Relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi								
		Terminal Penumpang Tipe A Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Penunjang)												
1)	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Terminal Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow;	APBN	Kementerian								

		Terminal Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;	APBN	Perhubungan								
		Terminal Liwas di Kota Manado;										
		Terminal Malalayang di Kota Manado; dan	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan								
		Terminal Tangkoko di Kota Bitung.	APBN	Kementerian								
2.1.3.2	**Perwujudan Terminal Penumpang Tipe B**											
a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang												
1)	Penyusunan Feasibility Pembangunan	Terminal Tipe B Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi								
2)	Penyusunan DED Pembangunan	Terminal Tipe B Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara										
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Terminal Tipe B Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi								
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Terminal Tipe B Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara										
5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Terminal Tipe B Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi								
		Terminal Tipe B Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara										
6)	Penyusunan Dokumen Pengadaaan Tanah Pembangunan	Terminal Tipe B Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi, Kantah Kabupaten/Kota								
7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Terminal Tipe B Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara										
8)	Pembangunan	Terminal Tipe B Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi								
		Terminal Tipe B Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara										
b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)												
1)	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Terminal "Beriman" Tomohon di Kota Tomohon;	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi								
		Terminal "Bonawang" di Kota Kotamobagu;										
		Terminal "Linekepan" Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;										
		Terminal "Maesaan"Langowan di Kabupaten Minahasa;										
		Terminal "Tumatenden" Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara;										
		Terminal Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;										
		Terminal Karombasan di Kota Manado;										
		Terminal Kawangkoan di Kabupaten Minahasa;										
		Terminal Paal Dua di Kota Manado; dan										
		Terminal Tondano di Kabupaten Minahasa.										
2.1.4	**Perwujudan Terminal Barang**											
a. Pembangunan Terminal Barang yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang												
1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Terminal Barang Bitung di Kota Bitung	ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
2)	Penyusunan DED Pembangunan	Terminal Barang Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow										
		Terminal Barang Kotamobagu di Kota Kotamobagu										
		Terminal Barang Liwas di Kota Manado										
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Terminal Barang Bitung di Kota Bitung	ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Terminal Barang Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow										
5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Terminal Barang Kotamobagu di Kota Kotamobagu										
		Terminal Barang Liwas di Kota Manado										
6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Terminal Barang Bitung di Kota Bitung	ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Kantah Kabupaten/Kota								
7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Terminal Barang Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow										
		Terminal Barang Kotamobagu di Kota Kotamobagu										
		Terminal Barang Liwas di Kota Manado										
8)	Pembangunan	Terminal Barang Bitung di Kota Bitung	APBN, ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
		Terminal Barang Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow										
		Terminal Barang Kotamobagu di Kota Kotamobagu										
		Terminal Barang Liwas di Kota Manado										
2.1.5	**Perwujudan Jembatan Timbang**											
a. Pemeliharaan Rutin Jembatan Timbang												
1)	Pemeliharaan Rutin	Jembatan Timbang Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan	ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
		Jembatan Timbang Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondow										
		Jembatan Timbang Pineleng di Kabupaten Minahasa										
		Jembatan Timbang Wangurer-Bitung di Kota Bitung										
2.1.6	**Perwujudan Jembatan**											
a. Pembangunan Jembatan												
1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Jembatan Bitung - Lembeh di Kota Bitung		Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi,								

			2)	Penyusunan DED Pembangunan	Jembatan Penghubung Pulau Likri di Kabupaten Minahasa	ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
					Jembatan UP Winangun, Manado - Tomohon RR di Kota Manado, Kota Tomohon									
			3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Jembatan Bitung - Lembeh di Kota Bitung	APBN, ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
			4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Jembatan Penghubung Pulau Likri di Kabupaten Minahasa									
					Jembatan UP Winangun, Manado - Tomohon RR di Kota Manado, Kota Tomohon									
			5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Jembatan Bitung - Lembeh di Kota Bitung	ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Kantah Kabupaten/Kota								
					Jembatan Penghubung Pulau Likri di Kabupaten Minahasa									
					Jembatan UP Winangun, Manado - Tomohon RR di Kota Manado, Kota Tomohon									
			6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Jembatan Bitung - Lembeh di Kota Bitung	ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Kantah Kabupaten/Kota								
					Jembatan Penghubung Pulau Likri di Kabupaten Minahasa									
					Jembatan UP Winangun, Manado - Tomohon RR di Kota Manado, Kota Tomohon									
			7)	Pembangunan	Jembatan Bitung - Lembeh di Kota Bitung	APBN, ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
					Jembatan Penghubung Pulau Likri di Kabupaten Minahasa									
					Jembatan UP Winangun, Manado - Tomohon RR di Kota Manado, Kota Tomohon									
			8)	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jembatan 14 Pebruari Di Kabupaten Minahasa Selatan	APBN, ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian PU, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
					Jembatan Adou Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Jembatan Adou I Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Jembatan Agogong Di Kabupaten Minahasa									
					Jembatan Aha Patung I Di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Jembatan Aha Patung II Di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Jembatan Aha Patung III Di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Jembatan Air Buang Di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Jembatan Air Diam Di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Jembatan Air Jatuh Di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Jembatan Air Jatuh Di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Jembatan Air Merah Di Kabupaten Minahasa									
					Jembatan Air Panas Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Jembatan Air Panas Di Kabupaten Minahasa									
					Jembatan Air Sonder Di Kabupaten Minahasa									
					Jembatan Airmadidi Di Kabupaten Minahasa Utara									
					Jembatan Akembawi I Di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Jembatan Akembawi II Di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Jembatan Akembawi III Di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Jembatan Akembuala Di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Jembatan Aleko Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Alumu Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Ambia Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Ambuna Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Amituan Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Ammat Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Ammat I Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Ampera Di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Jembatan Ampera Di Kota Kotamobagu									
					Jembatan Ampera I Di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Jembatan Andaaran I Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Andaaran II Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Andaarantabang Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Angges Di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Jembatan Anggun Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Arane Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Arangaca I Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Arangaca II Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Arangio Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Arombar Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Assu I Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Assu II Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Atep Oki Di Kabupaten Minahasa									
					Jembatan Atep Wangko Di Kabupaten Minahasa									
					Jembatan Aurucca Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Awawana Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Awelas Di Kabupaten Minahasa									
					Jembatan Awit I Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Awit II Di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Jembatan Ayong Di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Jembatan Babo Di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Jembatan Badaro I Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Jembatan Badaro II Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

					Jembatan Tobongon V Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Jembatan Togid Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Jembatan Togit Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Jembatan Togit I Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Jembatan Toliang Oki 1 Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Toliang Oki Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Tolondadu 1 Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tolondadu 2 Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tolontoyon I Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tolontoyon II Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tolontoyon III Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Toloun Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Tohaya I Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tohaya II Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tolundadu Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tolundadu I Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tolutu Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tolutu II Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tolutu III Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tombolikat Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Jembatan Tompaso Baru Di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Jembatan Tonelet Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Tongile Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Tongkaina Di Kota Manado										
					Jembatan Tongsile II Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Tongsile IV Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tongsile V Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tonsaru Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Tonsile III Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tontalete Di Kabupaten Minahasa Utara										
					Jembatan Torosik Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Torosik I Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Tosuraya 2 Di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Jembatan Tosuraya Di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Jembatan Totabuan Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Totabuan Di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Jembatan Totabuan I Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Tote II Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Jembatan Tote Iil Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Jembatan Toto Di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Jembatan Totoka I Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Totoka II Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Jembatan Totombatu Di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Jembatan Toubeke Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Tougela Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Toulusan Di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Jembatan Tule Di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Jembatan Tule I Di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Jembatan Tumacakal Di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Jembatan Tumano Di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Jembatan Tumpaan Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Tuntung Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Jembatan Tutuyan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Jembatan Tuunan Di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Jembatan Tuyat Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Ulele Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Ulu I Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Jembatan Ulu II Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Jembatan Ulu III Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Jembatan Ulu IV Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Jembatan Ulu V Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Jembatan Ulu VII Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					jembatan UP Winangun, Manado - Tomohon RR										
					Jembatan Urongo Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Uuan 1 Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Uuan 2 Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Uuan 3 Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Uuan Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Wakan I Di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Jembatan Wakan II Di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Jembatan Wakat III Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Jembatan Wakat IV Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Jembatan Walaimbang Di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Jembatan Walensori Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Wakeo Di Kabupaten Minahasa Utara										
					Jembatan Wanea Di Kota Manado										
					Jembatan Wangurer Di Kabupaten Minahasa Utara										
					Jembatan Waratung Di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Jembatan Warukapas Di Kabupaten Minahasa Utara										
					Jembatan Wasian 1 Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Wasian 2 Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Wasian Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Watudaney Di Kabupaten Minahasa Utara										
					Jembatan Watuwerung Di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Jembatan Watuwerung I Di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Jembatan Wawesesni Di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Jembatan Wengkol Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Werdi Agung 1 Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Werdi Agung 2 Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Werdi Agung 3 Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Weweken Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Wiau 1 Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Wiau Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Wiau Di Kota Tomohon										
					Jembatan Wida Di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Jembatan Winaleran Di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Jembatan Winebetan Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Waneru Di Kabupaten Minahasa Utara										
					Jembatan Wanuner Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Wiso Di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Jembatan Wolaang Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Worotican 1 Di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Jembatan Worotican Di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Jembatan Wotu Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Wotu I Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Jembatan Wowontulap 1 Di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Jembatan Wowontulap 2 Di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Jembatan Wowontulap 3 Di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Jembatan Wowontulap 4 Di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Jembatan Wunong Di Kabupaten Minahasa										
					Jembatan Wuwuo Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Jembatan Yoyapan Di Kabupaten Bolaang Mongondow										
2.2	**Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api**														
	2.2.1	**Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api**													
	a. Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi														
		1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Lintas Manado - Bitung	APBN	Kementerian Perhubungan									
		2)	Penyusunan DED Pembangunan	Lintas Bitung-Gorontalo-Isimu Lintas Malalayang - Wenang - Paal Dua - Mapanget Light Rapid Transit di Kota Manado lintas Malalayang – Wenang – Paal Dua –											
		3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Lintas Manado - Bitung											

		4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Lintas Bitung-Gorontalo-Isimu Lintas Malalayang - Wenang - Paal Dua - Mapanget Light Rapid Transit di Kota Manado lintas Malalayang – Wenang – Paal Dua –	APBN	Kementerian Perhubungan								
		5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Lintas Manado - Bitung	APBN, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian Perhubungan, Kantah Kabupaten/Kota								
		6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Lintas Bitung-Gorontalo-Isimu Lintas Malalayang - Wenang - Paal Dua - Mapanget Light Rapid Transit di Kota Manado lintas Malalayang – Wenang – Paal Dua –										
		7)	Pembangunan	Lintas Manado - Bitung Lintas Bitung-Gorontalo-Isimu Lintas Malalayang - Wenang - Paal Dua - Mapanget Light Rapid Transit di Kota Manado lintas Malalayang – Wenang – Paal Dua –	APBN	Kementerian Perhubungan								
	2.2.2		**Perwujudan Stasiun Kereta Api**											
	a. Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi													
		1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Stasiun Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara stasiun Barang Liwas di Kota Manado; Stasiun Bitung Kota di Kota Bitung Stasiun Girian di Kabupaten Minahasa Utara Stasiun Manado di Kota Manado Stasiun Pelabuhan Bitung di Kota Bitung stasiun Bandara di Kota Manado; stasiun GPI di Kota Manado; stasiun Kalasey di Kabupaten Minahasa; stasiun Malalayang di Kota Manado; stasiun Mantos di Kota Manado; stasiun Mega Mas di Kota Manado; stasiun Paal Dua di Kota Manado; stasiun Ranomuut di Kota Manado; stasiun RSUP Prof. Kandouw di Kota Manado; stasiun Tikala Ares di Kota Manado; stasiun Transmart di Kota Manado; dan stasiun Zero Point di Kota Manado. Stasiun Kereta Api Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan Stasiun Kereta Api Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara Stasiun Kereta Api Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Stasiun Kereta Api Bolaang Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Stasiun Kereta Api Dumoga Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow Stasiun Kereta Api Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Stasiun Kereta Api Kakas di Kabupaten Minahasa Stasiun Kereta Api Kema di Kabupaten Minahasa Tenggara Stasiun Kereta Api Likupang Selatan di Kabupaten Minahasa Utara Stasiun Kereta Api Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow Stasiun Kereta Api Lolayan di Kabupaten Bolaang Mongondow Stasiun Kereta Api Maliidir di Kota Bitung Stasiun Kereta Api Manado Bitung 1 di Kota Manado, Kota Bitung Stasiun Kereta Api Manado Bitung 2 di Kota Manado, Kota Bitung Stasiun Kereta Api Manado Bitung 3 di Kota Manado, Kota Bitung Stasiun Kereta Api Manado Bitung 4 di Kota Manado, Kota Bitung Stasiun Kereta Api Mandolang di Kabupaten Minahasa Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Bandara di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit GPI di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Malalayang Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mantos di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mega Mas di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Paal Dua di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Ranomuut di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit RSUP Prof. Kandouw di Kota Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Tikala Ares di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Transmart di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Zero Point di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Barang Liwas di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Kalasey di Kota Manado Stasiun Kereta Api Pinogaluman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Stasiun Kereta Api Pinolosian Tengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Stasiun Kereta Api Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow Stasiun Kereta Api Ratahan Timur di Kabupaten Minahasa Tenggara Stasiun Kereta Api Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
			Pembangunan Autonomous Rail Rapid Transit(ART, Kereta/Trem tanpa Rel/Virtual Track) Malalayang-Bandara Sam Ratulangi		APBN, ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
		2)	Penyusunan DED Pembangunan	Stasiun Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara stasiun Barang Liwas di Kota Manado; Stasiun Bitung Kota di Kota Bitung Stasiun Girian di Kabupaten Minahasa Utara Stasiun Manado di Kota Manado Stasiun Pelabuhan Bitung di Kota Bitung stasiun Bandara di Kota Manado; stasiun GPI di Kota Manado; stasiun Kalasey di Kabupaten Minahasa; stasiun Malalayang di Kota Manado; stasiun Mantos di Kota Manado; stasiun Mega Mas di Kota Manado; stasiun Paal Dua di Kota Manado; stasiun Ranomuut di Kota Manado; stasiun RSUP Prof. Kandouw di Kota Manado; stasiun Tikala Ares di Kota Manado; stasiun Transmart di Kota Manado; dan stasiun Zero Point di Kota Manado. Stasiun Kereta Api Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan Stasiun Kereta Api Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara Stasiun Kereta Api Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Stasiun Kereta Api Bolaang Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Stasiun Kereta Api Dumoga Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow Stasiun Kereta Api Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Stasiun Kereta Api Kakas di Kabupaten Minahasa Stasiun Kereta Api Kema di Kabupaten Minahasa Tenggara Stasiun Kereta Api Likupang Selatan di Kabupaten Minahasa Utara Stasiun Kereta Api Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow Stasiun Kereta Api Lolayan di Kabupaten Bolaang Mongondow Stasiun Kereta Api Maliidir di Kota Bitung Stasiun Kereta Api Manado Bitung 1 di Kota Manado, Kota Bitung Stasiun Kereta Api Manado Bitung 2 di Kota Manado, Kota Bitung Stasiun Kereta Api Manado Bitung 3 di Kota Manado, Kota Bitung Stasiun Kereta Api Manado Bitung 4 di Kota Manado, Kota Bitung Stasiun Kereta Api Mandolang di Kabupaten Minahasa Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Bandara di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit GPI di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Malalayang Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mantos di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mega Mas di Kota Manado Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Paal Dua di Kota Manado	APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								

				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Ranomuut di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit RSUP Prof. Kandouw di Kota										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Tikala Ares di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Transmart di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Zero Point di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Barang Liwas di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Kalasey di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Pinogaluman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Stasiun Kereta Api Pinolosian Tengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
				Stasiun Kereta Api Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Stasiun Kereta Api Ratahan Timur di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Stasiun Kereta Api Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
				Pembangunan Autonomous Rail Rapid Transit(ART, Kereta/Trem tanpa Rel/Virtual Track) Malalayang-Bandara Sam Ratulangi	APBN, ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
		3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Stasiun Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
				stasiun Barang Liwas di Kota Manado;										
				Stasiun Bitung Kota di Kota Bitung										
				Stasiun Girian di Kabupaten Minahasa Utara										
				Stasiun Manado di Kota Manado										
				Stasiun Pelabuhan Bitung di Kota Bitung										
				stasiun Bandara di Kota Manado;										
				stasiun GPI di Kota Manado;										
				stasiun Kalasey di Kabupaten Minahasa;										
				stasiun Malalayang di Kota Manado;										
				stasiun Mantos di Kota Manado;										
				stasiun Mega Mas di Kota Manado;										
				stasiun Paal Dua di Kota Manado;										
				stasiun Ranomuut di Kota Manado;										
				stasiun RSUP Prof. Kandouw di Kota Manado;										
				stasiun Tikala Ares di Kota Manado;										
				stasiun Transmart di Kota Manado; dan										
				stasiun Zero Point di Kota Manado.										
				Stasiun Kereta Api Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Stasiun Kereta Api Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Stasiun Kereta Api Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Stasiun Kereta Api Bolaang Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
				Stasiun Kereta Api Dumoga Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Stasiun Kereta Api Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Stasiun Kereta Api Kakas di Kabupaten Minahasa										
				Stasiun Kereta Api Kema di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Stasiun Kereta Api Likupang Selatan di Kabupaten Minahasa Utara										
				Stasiun Kereta Api Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Stasiun Kereta Api Lolayan di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Stasiun Kereta Api Madidir di Kota Bitung										
				Stasiun Kereta Api Manado Bitung 1 di Kota Manado, Kota Bitung										
				Stasiun Kereta Api Manado Bitung 2 di Kota Manado, Kota Bitung										
				Stasiun Kereta Api Manado Bitung 3 di Kota Manado, Kota Bitung										
				Stasiun Kereta Api Manado Bitung 4 di Kota Manado, Kota Bitung										
				Stasiun Kereta Api Mandolang di Kabupaten Minahasa										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Bandara di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit GPI di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Malalayang Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mantos di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mega Mas di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Paal Dua di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Ranomuut di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit RSUP Prof. Kandouw di Kota										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Tikala Ares di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Transmart di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Zero Point di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Barang Liwas di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Kalasey di Kota Manado										
				Stasiun Kereta Api Pinogaluman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Stasiun Kereta Api Pinolosian Tengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
				Stasiun Kereta Api Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Stasiun Kereta Api Ratahan Timur di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Stasiun Kereta Api Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
				Pembangunan Autonomous Rail Rapid Transit(ART, Kereta/Trem tanpa Rel/Virtual Track) Malalayang-Bandara Sam Ratulangi	APBN, ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
		4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Stasiun Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas								
				stasiun Barang Liwas di Kota Manado;										
				Stasiun Bitung Kota di Kota Bitung										
				Stasiun Girian di Kabupaten Minahasa Utara										
				Stasiun Manado di Kota Manado										
				Stasiun Pelabuhan Bitung di Kota Bitung										
				stasiun Bandara di Kota Manado;										
				stasiun GPI di Kota Manado;										
				stasiun Kalasey di Kabupaten Minahasa;										
				stasiun Malalayang di Kota Manado;										
				stasiun Mantos di Kota Manado;										
				stasiun Mega Mas di Kota Manado;										
				stasiun Paal Dua di Kota Manado;										
				stasiun Ranomuut di Kota Manado;										
				stasiun RSUP Prof. Kandouw di Kota Manado;										
				stasiun Tikala Ares di Kota Manado;										
				stasiun Transmart di Kota Manado; dan										
				stasiun Zero Point di Kota Manado.										
				Stasiun Kereta Api Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Stasiun Kereta Api Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Stasiun Kereta Api Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Stasiun Kereta Api Bolaang Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
				Stasiun Kereta Api Dumoga Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Stasiun Kereta Api Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Stasiun Kereta Api Kakas di Kabupaten Minahasa										
				Stasiun Kereta Api Kema di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Stasiun Kereta Api Likupang Selatan di Kabupaten Minahasa Utara										
				Stasiun Kereta Api Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow										

					Stasiun Kereta Api Lolayan di Kabupaten Bolaang Mongondow		Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota							
					Stasiun Kereta Api Madidir di Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 1 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 2 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 3 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 4 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Mandolang di Kabupaten Minahasa									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Bandara di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit GPI di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Malalayang Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mantos di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mega Mas di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Paal Dua di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Ranomuut di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit RSUP Prof. Kandouw di Kota									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Tikala Ares di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Transmart di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Zero Point di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Barang Liwas di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Kalasey di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Pinogaluman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Stasiun Kereta Api Pinolosian Tengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Stasiun Kereta Api Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Ratahan Timur di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Stasiun Kereta Api Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
			5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Pembangunan Autonomous Rail Rapid Transit(ART, Kereta/Trem tanpa Rel/Virtual	APBN, ABPD	Kementerian							
					Stasiun Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota							
					stasiun Barang Liwas di Kota Manado;									
					Stasiun Bitung Kota di Kota Bitung									
					Stasiun Girian di Kabupaten Minahasa Utara									
					Stasiun Manado di Kota Manado									
					Stasiun Pelabuhan Bitung di Kota Bitung									
					stasiun Bandara di Kota Manado;									
					stasiun GPI di Kota Manado;									
					stasiun Kalasey di Kabupaten Minahasa;									
					stasiun Malalayang di Kota Manado;									
					stasiun Mantos di Kota Manado;									
					stasiun Mega Mas di Kota Manado;									
					stasiun Paal Dua di Kota Manado;									
					stasiun Ranomuut di Kota Manado;									
					stasiun RSUP Prof. Kandouw di Kota Manado;									
					stasiun Tikala Ares di Kota Manado;									
					stasiun Transmart di Kota Manado; dan									
					stasiun Zero Point di Kota Manado.									
					Stasiun Kereta Api Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan									
					Stasiun Kereta Api Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Stasiun Kereta Api Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Stasiun Kereta Api Bolaang Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Stasiun Kereta Api Dumoga Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Stasiun Kereta Api Kakas di Kabupaten Minahasa									
					Stasiun Kereta Api Kema di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Stasiun Kereta Api Likupang Selatan di Kabupaten Minahasa Utara									
					Stasiun Kereta Api Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Lolayan di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Madidir di Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 1 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 2 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 3 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 4 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Mandolang di Kabupaten Minahasa									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Bandara di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit GPI di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Malalayang Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mantos di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mega Mas di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Paal Dua di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Ranomuut di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit RSUP Prof. Kandouw di Kota									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Tikala Ares di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Transmart di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Zero Point di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Barang Liwas di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Kalasey di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Pinogaluman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Stasiun Kereta Api Pinolosian Tengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Stasiun Kereta Api Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Ratahan Timur di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Stasiun Kereta Api Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Pembangunan Autonomous Rail Rapid Transit(ART, Kereta/Trem tanpa Rel/Virtual Track) Malalayang-Bandara Sam Ratulangi	APBN, ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota							
			6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Stasiun Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas							
					stasiun Barang Liwas di Kota Manado;									
					Stasiun Bitung Kota di Kota Bitung									
					Stasiun Girian di Kabupaten Minahasa Utara									
					Stasiun Manado di Kota Manado									
					Stasiun Pelabuhan Bitung di Kota Bitung									
					stasiun Bandara di Kota Manado;									
					stasiun GPI di Kota Manado;									
					stasiun Kalasey di Kabupaten Minahasa;									
					stasiun Malalayang di Kota Manado;									
					stasiun Mantos di Kota Manado;									
					stasiun Mega Mas di Kota Manado;									
					stasiun Paal Dua di Kota Manado;									
					stasiun Ranomuut di Kota Manado;									
					stasiun RSUP Prof. Kandouw di Kota Manado;									
					stasiun Tikala Ares di Kota Manado;									
					stasiun Transmart di Kota Manado; dan									
					stasiun Zero Point di Kota Manado.									
					Stasiun Kereta Api Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan									
					Stasiun Kereta Api Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Stasiun Kereta Api Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Stasiun Kereta Api Bolaang Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Stasiun Kereta Api Dumoga Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Stasiun Kereta Api Kakas di Kabupaten Minahasa									
					Stasiun Kereta Api Kema di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Stasiun Kereta Api Likupang Selatan di Kabupaten Minahasa Utara									
					Stasiun Kereta Api Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow									

					Stasiun Kereta Api Lolayan di Kabupaten Bolaang Mongondow		Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota							
					Stasiun Kereta Api Madidir di Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 1 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 2 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 3 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 4 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Mandolang di Kabupaten Minahasa									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Bandara di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit GPI di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Malalayang Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mantos di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mega Mas di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Paal Dua di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Ranomuut di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit RSUP Prof. Kandouw di Kota									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Tikala Ares di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Transmart di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Zero Point di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Barang Liwas di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Kalasey di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Pinogaluman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Stasiun Kereta Api Pinolosian Tengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Stasiun Kereta Api Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Ratahan Timur di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Stasiun Kereta Api Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Pembangunan Autonomous Rail Rapid Transit(ART, Kereta/Trem tanpa Rel/Virtual Track) Malalayang-Bandara Sam Ratulangi	APBN, ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
			7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Stasiun Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Kantah Kabupaten/Kota								
					stasiun Barang Liwas di Kota Manado;									
					Stasiun Bitung Kota di Kota Bitung									
					Stasiun Girian di Kabupaten Minahasa Utara									
					Stasiun Manado di Kota Manado									
					Stasiun Pelabuhan Bitung di Kota Bitung									
					stasiun Bandara di Kota Manado;									
					stasiun GPI di Kota Manado;									
					stasiun Kalasey di Kabupaten Minahasa;									
					stasiun Malalayang di Kota Manado;									
					stasiun Mantos di Kota Manado;									
					stasiun Mega Mas di Kota Manado;									
					stasiun Paal Dua di Kota Manado;									
					stasiun Ranomuut di Kota Manado;									
					stasiun RSUP Prof. Kandouw di Kota Manado;									
					stasiun Tikala Ares di Kota Manado;									
					stasiun Transmart di Kota Manado; dan									
					stasiun Zero Point di Kota Manado.									
					Stasiun Kereta Api Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan									
					Stasiun Kereta Api Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Stasiun Kereta Api Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Stasiun Kereta Api Bolaang Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Stasiun Kereta Api Dumoga Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Stasiun Kereta Api Kakas di Kabupaten Minahasa									
					Stasiun Kereta Api Kema di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Stasiun Kereta Api Likupang Selatan di Kabupaten Minahasa Utara									
					Stasiun Kereta Api Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Lolayan di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Madidir di Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 1 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 2 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 3 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 4 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Mandolang di Kabupaten Minahasa									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Bandara di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit GPI di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Malalayang Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mantos di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mega Mas di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Paal Dua di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Ranomuut di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit RSUP Prof. Kandouw di Kota									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Tikala Ares di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Transmart di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Zero Point di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Barang Liwas di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Kalasey di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Pinogaluman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Stasiun Kereta Api Pinolosian Tengah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Stasiun Kereta Api Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Ratahan Timur di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Stasiun Kereta Api Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Pembangunan Autonomous Rail Rapid Transit(ART, Kereta/Trem tanpa Rel/Virtual Track) Malalayang-Bandara Sam Ratulangi	APBN, ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
			8)	Pembangunan	Stasiun Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara									
					stasiun Barang Liwas di Kota Manado;									
					Stasiun Bitung Kota di Kota Bitung									
					Stasiun Girian di Kabupaten Minahasa Utara									
					Stasiun Manado di Kota Manado									
					Stasiun Pelabuhan Bitung di Kota Bitung									
					stasiun Bandara di Kota Manado;									
					stasiun GPI di Kota Manado;									
					stasiun Kalasey di Kabupaten Minahasa;									
					stasiun Malalayang di Kota Manado;									
					stasiun Mantos di Kota Manado;									
					stasiun Mega Mas di Kota Manado;									
					stasiun Paal Dua di Kota Manado;									
					stasiun Ranomuut di Kota Manado;									
					stasiun RSUP Prof. Kandouw di Kota Manado;									

					stasiun Tikala Ares di Kota Manado;	APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
					stasiun Transmart di Kota Manado; dan									
					stasiun Zero Point di Kota Manado.									
					Stasiun Kereta Api Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan									
					Stasiun Kereta Api Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Stasiun Kereta Api Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Stasiun Kereta Api Bolaang Uki di Kabupaten Bolsang Mongondow Selatan									
					Stasiun Kereta Api Dumoga Timur di Kabupaten Bolsang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Stasiun Kereta Api Kakas di Kabupaten Minahasa									
					Stasiun Kereta Api Kema di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Stasiun Kereta Api Likupang Selatan di Kabupaten Minahasa Utara									
					Stasiun Kereta Api Lolak di Kabupaten Bolsang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Lolayan di Kabupaten Bolsang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Madidir di Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 1 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 2 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 3 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Manado Bitung 4 di Kota Manado, Kota Bitung									
					Stasiun Kereta Api Mandolang di Kabupaten Minahasa									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Bandara di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit GPI di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Malalayang Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mantos di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Mega Mas di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Paal Dua di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Ranomuut di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit RSUP Prof. Kandouw di Kota									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Tikala Ares di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Transmart di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Zero Point di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Barang Liwas di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Perkotaan Light Rail Transit Kalissey di Kota Manado									
					Stasiun Kereta Api Pinoyalunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Stasiun Kereta Api Pinolosian Tengah di Kabupaten Bolsang Mongondow Selatan									
					Stasiun Kereta Api Poigar di Kabupaten Bolsang Mongondow									
					Stasiun Kereta Api Ratahan Timur di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Stasiun Kereta Api Tutuyan di Kabupaten Bolsang Mongondow Timur									
					Pembangunan Autonomous Rail Rapid Transit(ART, Kereta/Trem tanpa Rel/Virtual Track) Malalayang-Bandara Sam Ratulangi	APBN, ABPD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Sumber Pembiayaan Lain yang relevan	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
2.3	**Perwujudan Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan**													
	2.3.1	**Perwujudan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi**												
	a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antarprovinsi													
		1)	Pelaksanaan Studi Kelayakan		Amurang-Samarinda;	APBN	Kementerian Perhubungan							
					Amurang-Toli-toli-Tarakan;									
					Bitung-Gorua (Tobelo, Maluku Utara);									
					Bitung-Luwuk (Sulawesi Tengah);									
					Bitung-Molibagu/Torosik-Gorontalo;									
					Bitung-Paginana (Sulteng);									
					Bitung-Sanana (Maluku Utara); dan									
					Bitung-Ternate (Maluku Utara)									
		2)	Survei dan Pemetaan		Amurang-Samarinda;	APBN	Kementerian Perhubungan							
					Amurang-Toli-toli-Tarakan;									
					Bitung-Gorua (Tobelo, Maluku Utara);									
					Bitung-Luwuk (Sulawesi Tengah);									
					Bitung-Molibagu/Torosik-Gorontalo;									
					Bitung-Paginana (Sulteng);									
					Bitung-Sanana (Maluku Utara); dan									
					Bitung-Ternate (Maluku Utara)									
		3)	Analisis Resiko		Amurang-Samarinda;	APBN	Kementerian Perhubungan							
					Amurang-Toli-toli-Tarakan;									
					Bitung-Gorua (Tobelo, Maluku Utara);									
					Bitung-Luwuk (Sulawesi Tengah);									
					Bitung-Molibagu/Torosik-Gorontalo;									
					Bitung-Paginana (Sulteng);									
					Bitung-Sanana (Maluku Utara); dan									
					Bitung-Ternate (Maluku Utara)									
		4)	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Provinsi		Amurang-Samarinda;	APBN	Kementerian Perhubungan							
					Amurang-Toli-toli-Tarakan;									
					Bitung-Gorua (Tobelo, Maluku Utara);									
					Bitung-Luwuk (Sulawesi Tengah);									
					Bitung-Molibagu/Torosik-Gorontalo;									
					Bitung-Paginana (Sulteng);									
					Bitung-Sanana (Maluku Utara); dan									
					Bitung-Ternate (Maluku Utara)									
	2.3.2	**Perwujudan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/ Kota dalam Provinsi**												
	a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
		1)	Pelaksanaan Studi Kelayakan		Biaro-Minanga (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)	APBN	Kementerian Perhubungan							
					Bitung-Minanga (Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)									
					Buhias-Sawang (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)									
					Kawaluso-Marore (Kabupaten Kepulauan Sangihe)									
					Likupang-Tahuna (Kabupaten Kepulauan Sangihe)									
					Makalehi-Sawang (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)									
					Melonguane-Musi (Kabupaten Kepulauan Talaud)									
					Minanga-Buhias (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)									
					Minanga-Makalehi (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)									
					Munte-Manado-Pulau Gangga-Pulau Mantehage (Minahasa Utara)-Bitung (Kabupaten									
					Musi-Mangaran (Kabupaten Kepulauan Talaud)									
					Pananaru-Kawaluso (Kabupaten Kepulauan Sangihe)									
					Sawang-Pananaru (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten									
		2)	Survei dan Pemetaan		Biaro-Minanga (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)	APBN	Kementerian Perhubungan							
					Bitung-Minanga (Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)									
					Buhias-Sawang (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)									
					Kawaluso-Marore (Kabupaten Kepulauan Sangihe)									
					Likupang-Tahuna (Kabupaten Kepulauan Sangihe)									
					Makalehi-Sawang (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)									
					Melonguane-Musi (Kabupaten Kepulauan Talaud)									
					Minanga-Buhias (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)									
					Minanga-Makalehi (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)									
					Munte-Manado-Pulau Gangga-Pulau Mantehage (Minahasa Utara)-Bitung (Kabupaten									
					Musi-Mangaran (Kabupaten Kepulauan Talaud)									
					Pananaru-Kawaluso (Kabupaten Kepulauan Sangihe)									
					Sawang-Pananaru (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten									
		3)	Analisis Resiko Pembangunan		Biaro-Minanga (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)		Kementerian							
					Bitung-Minanga (Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)									
					Buhias-Sawang (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)									
					Kawaluso-Marore (Kabupaten Kepulauan Sangihe)									
					Likupang-Tahuna (Kabupaten Kepulauan Sangihe)									
					Makalehi-Sawang (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)									

		Melonguane-Musi (Kabupaten Kepulauan Talaud)	APBN	Kementerian Perhubungan								
		Minanga-Buhias (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)										
		Minanga-Makalehi (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)										
		Munte-Manado-Pulau Gangga-Pulau Mantehage (Minahasa Utara)-Bitung (Kabupaten										
		Musi-Mangaran (Kabupaten Kepulauan Talaud)										
		Pananaru-Kawaluso (Kabupaten Kepulauan Sangihe)										
		Sawang-Pananaru (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten										
	4) Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antarkabupaten/ Kota dalam Provinsi	Biaro-Minanga (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)	APBN	Kementerian Perhubungan								
		Bitung-Minanga (Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)										
		Buhias-Sawang (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)										
		Kawaluso-Marore (Kabupaten Kepulauan Sangihe)										
		Likupang-Tahuna (Kabupaten Kepulauan Sangihe)										
		Makalehi-Sawang (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)										
		Melonguane-Musi (Kabupaten Kepulauan Talaud)										
		Minanga-Buhias (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)										
		Minanga-Makalehi (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)										
		Munte-Manado-Pulau Gangga-Pulau Mantehage (Minahasa Utara)-Bitung (Kabupaten										
		Musi-Mangaran (Kabupaten Kepulauan Talaud)										
		Pananaru-Kawaluso (Kabupaten Kepulauan Sangihe)										
		Sawang-Pananaru (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten										
	a. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Antarkabupaten/ Kota dalam Provinsi											
	1) Pengawasan dan Pemeliharaan	Amurang-Biaro (Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau	APBN	Kementerian Perhubungan								
	2) Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Amurang-Pananaru (Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe)										
		Amurang-Pananaru (Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud)										
		Bitung-Biaro (Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Talaud)										
		Bitung-Melonguane (Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)										
		bitung-Pananaru (Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Sangihe)										
		Bitung-Pulau Lembeh (Kota Bitung)										
		Bitung-Siau (Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)										
		Bitung-Tagulandang (Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)										
		Likupang-Biaro (Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)										
		Likupang-Melonguane (Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud)										
		Likupang-Tahuna (Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe)										
		Marampit-Miangas (Kabupaten Kepulauan Talaud)										
		Melonguane-Marampit (Kabupaten Kepulauan Talaud)										
		Pananaru-Melonguane (Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe)										
	2.3.3 Perwujudan Pelabuhan Sungai dan Danau											
	a. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
	1) Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Dermaga Danau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Sitaro	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi								
	2) Penyusunan DED Pembangunan	Dermaga Danau Moat di Kabupaten Minahasa Selatan/Kabupaten Bolaang										
		Dermaga Danau Tondok di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
	3) Penetapan Lokasi Pembangunan	Dermaga Danau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Sitaro	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi								
	4) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Dermaga Danau Moat di Kabupaten Minahasa Selatan/Kabupaten Bolaang										
	5) Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Dermaga Danau Tondok di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
	6) Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Dermaga Danau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Sitaro	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Kantah Kabupaten/Kota								
	7) Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Dermaga Danau Moat di Kabupaten Minahasa Selatan/Kabupaten Bolaang										
		Dermaga Danau Tondok di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
	8) Pembangunan	Dermaga Danau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Sitaro	APBN	Kementerian Perhubungan								
		Dermaga Danau Moat di Kabupaten Minahasa Selatan/Kabupaten Bolaang										
		Dermaga Danau Tondok di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
	b. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											
	1) Peningkatan Infrastruktur	Dermaga Danau Linouw di Kota Tomohon	APBN	Kementerian Perhubungan								
		Dermaga Danau Tondano di Kabupaten Minahasa										
	2.3.4 Perwujudan Pelabuhan Penyeberangan											
	a. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional											
	1) Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Pelabuhan Penyeberangan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi								
		Pelabuhan Penyeberangan Buhias di Kabupaten Minahasa Utara										
		Pelabuhan Penyeberangan Bunaken di Kota Manado										
		Pelabuhan Penyeberangan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Pelabuhan Penyeberangan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Pelabuhan Penyeberangan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Pelabuhan Penyeberangan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Pelabuhan Penyeberangan Manado Tua di Kota Manado										
		Pelabuhan Penyeberangan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Pelabuhan Penyeberangan Siladen di Kota Manado										
		Pelabuhan Penyeberangan Talise di Kabupaten Minahasa Utara										
		Pelabuhan Penyeberangan Manado (Megamas) di Kota Manado										
		Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Peta di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Lipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Mahangetang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Pulau Salebabu di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Malalayang di Kota Manado										
		Malalayang di Kabupaten Minahasa										
		Mahangiang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
	2) Penyusunan DED Pembangunan	Pelabuhan Penyeberangan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi								
		Pelabuhan Penyeberangan Buhias di Kabupaten Minahasa Utara										
		Pelabuhan Penyeberangan Bunaken di Kota Manado										
		Pelabuhan Penyeberangan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Pelabuhan Penyeberangan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Pelabuhan Penyeberangan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Pelabuhan Penyeberangan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Pelabuhan Penyeberangan Manado Tua di Kota Manado										
		Pelabuhan Penyeberangan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Pelabuhan Penyeberangan Siladen di Kota Manado										
		Pelabuhan Penyeberangan Talise di Kabupaten Minahasa Utara										
		Pelabuhan Penyeberangan Manado (Megamas) di Kota Manado										
		Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Peta di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Lipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Mahangetang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Pulau Salebabu di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Malalayang di Kota Manado										
		Malalayang di Kabupaten Minahasa										
		Mahangiang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
	3) Penetapan Lokasi Pembangunan	Pelabuhan Penyeberangan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Pelabuhan Penyeberangan Buhias di Kabupaten Minahasa Utara										
		Pelabuhan Penyeberangan Bunaken di Kota Manado										
		Pelabuhan Penyeberangan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Pelabuhan Penyeberangan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Pelabuhan Penyeberangan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Pelabuhan Penyeberangan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Pelabuhan Penyeberangan Manado Tua di Kota Manado										

					Pelabuhan Penyeberangan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi							
					Pelabuhan Penyeberangan Siladen di Kota Manado									
					Pelabuhan Penyeberangan Talise di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pelabuhan Penyeberangan Manado (Megamas) di Kota Manado									
					Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Peta di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Lipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Mahangetang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pulau Salebabu di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Malalayang di Kota Manado									
					Malalayang di Kabupaten Minahasa									
					Mahangiang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
				4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Pelabuhan Penyeberangan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi						
						Pelabuhan Penyeberangan Buhias di Kabupaten Minahasa Utara								
						Pelabuhan Penyeberangan Bunaken di Kota Manado								
						Pelabuhan Penyeberangan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Pelabuhan Penyeberangan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Pelabuhan Penyeberangan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Pelabuhan Penyeberangan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
						Pelabuhan Penyeberangan Manado Tua di Kota Manado								
						Pelabuhan Penyeberangan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
						Pelabuhan Penyeberangan Siladen di Kota Manado								
						Pelabuhan Penyeberangan Talise di Kabupaten Minahasa Utara								
						Pelabuhan Penyeberangan Manado (Megamas) di Kota Manado								
						Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Peta di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Lipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Mahangetang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Pulau Salebabu di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Malalayang di Kota Manado								
						Malalayang di Kabupaten Minahasa								
						Mahangiang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
				5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Pelabuhan Penyeberangan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi						
						Pelabuhan Penyeberangan Buhias di Kabupaten Minahasa Utara								
						Pelabuhan Penyeberangan Bunaken di Kota Manado								
						Pelabuhan Penyeberangan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Pelabuhan Penyeberangan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Pelabuhan Penyeberangan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Pelabuhan Penyeberangan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
						Pelabuhan Penyeberangan Manado Tua di Kota Manado								
						Pelabuhan Penyeberangan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
						Pelabuhan Penyeberangan Siladen di Kota Manado								
						Pelabuhan Penyeberangan Talise di Kabupaten Minahasa Utara								
						Pelabuhan Penyeberangan Manado (Megamas) di Kota Manado								
						Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Peta di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Lipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Mahangetang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Pulau Salebabu di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Malalayang di Kota Manado								
						Malalayang di Kabupaten Minahasa								
						Mahangiang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
				6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah	Pelabuhan Penyeberangan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Provinsi, Kantah Kabupaten/Kota						
						Pelabuhan Penyeberangan Buhias di Kabupaten Minahasa Utara								
						Pelabuhan Penyeberangan Bunaken di Kota Manado								
						Pelabuhan Penyeberangan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Pelabuhan Penyeberangan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Pelabuhan Penyeberangan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Pelabuhan Penyeberangan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
						Pelabuhan Penyeberangan Manado Tua di Kota Manado								
						Pelabuhan Penyeberangan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
						Pelabuhan Penyeberangan Siladen di Kota Manado								
						Pelabuhan Penyeberangan Talise di Kabupaten Minahasa Utara								
						Pelabuhan Penyeberangan Manado (Megamas) di Kota Manado								
						Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Peta di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Lipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Mahangetang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Pulau Salebabu di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Malalayang di Kota Manado								
						Malalayang di Kabupaten Minahasa								
						Mahangiang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
				g.	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Pelabuhan Penyeberangan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Provinsi, Kantah Kabupaten/Kota						
						Pelabuhan Penyeberangan Buhias di Kabupaten Minahasa Utara								
						Pelabuhan Penyeberangan Bunaken di Kota Manado								
						Pelabuhan Penyeberangan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Pelabuhan Penyeberangan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Pelabuhan Penyeberangan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Pelabuhan Penyeberangan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
						Pelabuhan Penyeberangan Manado Tua di Kota Manado								
						Pelabuhan Penyeberangan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
						Pelabuhan Penyeberangan Siladen di Kota Manado								
						Pelabuhan Penyeberangan Talise di Kabupaten Minahasa Utara								
						Pelabuhan Penyeberangan Manado (Megamas) di Kota Manado								
						Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Peta di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Lipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Mahangetang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
						Pulau Salebabu di Kabupaten Kepulauan Talaud								
						Malalayang di Kota Manado								
						Malalayang di Kabupaten Minahasa								
						Mahangiang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
				h.	Pembangunan	Pelabuhan Penyeberangan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan								
						Pelabuhan Penyeberangan Buhias di Kabupaten Minahasa Utara								
						Pelabuhan Penyeberangan Bunaken di Kota Manado								
						Pelabuhan Penyeberangan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud								

					Pelabuhan Penyeberangan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi							
					Pelabuhan Penyeberangan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pelabuhan Penyeberangan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Pelabuhan Penyeberangan Manado Tua di Kota Manado									
					Pelabuhan Penyeberangan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Pelabuhan Penyeberangan Siladen di Kota Manado									
					Pelabuhan Penyeberangan Talise di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pelabuhan Penyeberangan Manado (Megamas) di Kota Manado									
					Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Peta di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Lipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Mahanegtang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pulau Salebabu di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Malalayang di Kota Manado									
					Malalayang di Kabupaten Minahasa									
					Mahangiang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
			i.	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha	Pelabuhan Penyeberangan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Pelabuhan Penyeberangan Buhias di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pelabuhan Penyeberangan Bunaken di Kota Manado									
					Pelabuhan Penyeberangan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pelabuhan Penyeberangan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pelabuhan Penyeberangan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pelabuhan Penyeberangan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Pelabuhan Penyeberangan Manado Tua di Kota Manado									
					Pelabuhan Penyeberangan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Pelabuhan Penyeberangan Siladen di Kota Manado									
					Pelabuhan Penyeberangan Talise di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pelabuhan Penyeberangan Manado (Megamas) di Kota Manado									
					Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Peta di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Lipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Mahanegtang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pulau Salebabu di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Malalayang di Kota Manado									
					Malalayang di Kabupaten Minahasa									
					Mahangiang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
		b. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
			1)	Peningkatan Infrastruktur	Pelabuhan Penyeberangan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi							
			2)	Peningkatan Fasilitas Penyimpanan dan Gudang	Pelabuhan Penyeberangan Bitung di Kota Bitung									
			3)	Perluasan Area Parkir	Pelabuhan Penyeberangan Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud									
			4)	Pengembangan Akses Jalan dan Jembatan	Pelabuhan Penyeberangan Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
			5)	Peningkatan Sistem Teknologi Informasi	Pelabuhan Penyeberangan Kawahaso di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			6)	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Lainnya	pelabuhan penyeberangan Likupang di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pelabuhan Penyeberangan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pelabuhan Penyeberangan Mangarang di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pelabuhan Penyeberangan Pananaru di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pelabuhan Penyeberangan Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Pelabuhan Penyeberangan Lembeh di Kota Bitung									
					Pelabuhan Penyeberangan Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pelabuhan Penyeberangan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pelabuhan Penyeberangan Musi di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pelabuhan Penyeberangan Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang									
2.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Transpoprtasi Laut**													
	2.4.1	**Perwujudan Pelabuhan Laut**												
	2.4.1.1	**Perwujudan Pelabuhan Utama**												
	a. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Utama													
			1)	Peningkatan Infrastruktur	Pelabuhan Bitung di Kota Bitung	APBN	Kementerian Perhubungan							
			2)	Peningkatan Fasilitas Penyimpanan dan Gudang										
			3)	Perluasan Area Parkir										
			4)	Pengembangan Akses Jalan dan Jembatan										
			5)	Peningkatan Sistem Teknologi Informasi										
			6)	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Lainnya										
	2.4.1.2	**Perwujudan Pelabuhan Pengumpul**												
	a. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul													
			1)	Peningkatan Infrastruktur	Pelabuhan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;	APBN	Kementerian Perhubungan							
			2)	Peningkatan Fasilitas Penyimpanan dan Gudang	Pelabuhan Labuhan Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow;									
			3)	Perluasan Area Parkir	Pelabuhan Manado di Kota Manado;									
			4)	Pengembangan Akses Jalan dan Jembatan	Pelabuhan Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;									
			5)	Peningkatan Sistem Teknologi Informasi	Pelabuhan Petta di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan									
			6)	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Lainnya	Pelabuhan Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
	2.4.1.3	**Perwujudan Pelabuhan Pengumpan**												
	a. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan													
			1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Pelabuhan Babelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi							
			2)	Penyusunan DED Pembangunan	Pelabuhan Bangka di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pelabuhan Bentung di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pelabuhan Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Pelabuhan Bunaken di Kota Manado									
					Pelabuhan Damao di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pelabuhan Gangga di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pelabuhan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pelabuhan Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Pelabuhan Kora-Kora di Kabupaten Minahasa									
					Pelabuhan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Pelabuhan Montehage di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pelabuhan Nain di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pelabuhan P. Beng Darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pelabuhan P. Manado Tua di Kota Manado									
					Pelabuhan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Pelabuhan Pananaru di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pelabuhan Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pelabuhan Ratatotok di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Pelabuhan Salangka di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Pelabuhan Siladen di Kota Manado									
					Pelabuhan Talise di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pelabuhan Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pelabuhan Tanawangko di Kabupaten Minahasa									
					Pelabuhan Tumbak di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Pelabuhan Tumumpa di Kota Manado									
					Pelabuhan Tutuyan - Jikoblanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Pelabuhan Wori di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pelabuhan Likupang di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pelabuhan Pengumpan Lokal Air Tembaga di Kota Bitung									
					Pelabuhan Pengumpan Lokal Bentenan di Kabupaten Minahasa									
					Pelabuhan Pengumpan Lokal Bukide di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pelabuhan Pengumpan Lokal Intata di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pelabuhan Pengumpan Lokal Kema di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pelabuhan Pengumpan Lokal Manalu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pelabuhan Pengumpan Lokal P. Beng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pelabuhan Pengumpan Lokal P. Mahangetang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pulau Tinakareng di Kabupaten Kepulauan Sangihe									

		Pelabuhan Pengumpan Lokal Tuntun di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Pelabuhan Babelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi, DLH Provinsi							
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Pelabuhan Bangka di Kabupaten Minahasa Utara									
5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Pelabuhan Bentung di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
		Pelabuhan Bunaken di Kota Manado									
		Pelabuhan Damao di Kabupaten Kepulauan Talaud									
		Pelabuhan Gangga di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud									
		Pelabuhan Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Pelabuhan Kora-Kora di Kabupaten Minahasa									
		Pelabuhan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Pelabuhan Montehage di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Nain di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan P. Beng Darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan P. Manado Tua di Kota Manado									
		Pelabuhan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
		Pelabuhan Pananaru di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud									
		Pelabuhan Ratatotok di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		Pelabuhan Salangka di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
		Pelabuhan Siladen di Kota Manado									
		Pelabuhan Talise di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Tanawangko di Kabupaten Minahasa									
		Pelabuhan Tumbak di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		Pelabuhan Tumumpa di Kota Manado									
		Pelabuhan Tutuyan - Jikoblanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
		Pelabuhan Wori di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Likupang di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Air Tembaga di Kota Bitung									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Bentenan di Kabupaten Minahasa									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Bukide di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Intata di Kabupaten Kepulauan Talaud									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Kema di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Manalu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal P. Beng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal P. Mahanegtang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pulau Tinakareng di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Tuntun di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Pelabuhan Babelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan Provinsi, Kantah Kabupaten/Kota							
7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Pelabuhan Bangka di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Bentung di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
		Pelabuhan Bunaken di Kota Manado									
		Pelabuhan Damao di Kabupaten Kepulauan Talaud									
		Pelabuhan Gangga di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud									
		Pelabuhan Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Pelabuhan Kora-Kora di Kabupaten Minahasa									
		Pelabuhan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Pelabuhan Montehage di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Nain di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan P. Beng Darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan P. Manado Tua di Kota Manado									
		Pelabuhan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
		Pelabuhan Pananaru di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud									
		Pelabuhan Ratatotok di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		Pelabuhan Salangka di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
		Pelabuhan Siladen di Kota Manado									
		Pelabuhan Talise di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Tanawangko di Kabupaten Minahasa									
		Pelabuhan Tumbak di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		Pelabuhan Tumumpa di Kota Manado									
		Pelabuhan Tutuyan - Jikoblanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
		Pelabuhan Wori di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Likupang di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Air Tembaga di Kota Bitung									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Bentenan di Kabupaten Minahasa									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Bukide di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Intata di Kabupaten Kepulauan Talaud									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Kema di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Manalu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal P. Beng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal P. Mahanegtang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pulau Tinakareng di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Tuntun di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
8)	Pembangunan	Pelabuhan Babelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi							
9)	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha	Pelabuhan Bangka di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Bentung di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
		Pelabuhan Bunaken di Kota Manado									
		Pelabuhan Damao di Kabupaten Kepulauan Talaud									
		Pelabuhan Gangga di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud									
		Pelabuhan Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Pelabuhan Kora-Kora di Kabupaten Minahasa									
		Pelabuhan Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Pelabuhan Montehage di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Nain di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan P. Beng Darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan P. Manado Tua di Kota Manado									
		Pelabuhan Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
		Pelabuhan Pananaru di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud									
		Pelabuhan Ratatotok di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		Pelabuhan Salangka di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
		Pelabuhan Siladen di Kota Manado									
		Pelabuhan Talise di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Tanawangko di Kabupaten Minahasa									
		Pelabuhan Tumbak di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		Pelabuhan Tumumpa di Kota Manado									
		Pelabuhan Tutuyan - Jikoblanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
		Pelabuhan Wori di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Likupang di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Air Tembaga di Kota Bitung									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Bentenan di Kabupaten Minahasa									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Bukide di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Intata di Kabupaten Kepulauan Talaud									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Kema di Kabupaten Minahasa Utara									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Manalu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal P. Beng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal P. Mahanegtang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pulau Tinakareng di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Pelabuhan Pengumpan Lokal Tuntun di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
b. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan											
1)	Peningkatan Infrastruktur	Pelabuhan Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud									
2)	Peningkatan Fasilitas Penyimpanan dan Gudang	Pelabuhan Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									

		3) Perluasan Area Parkir	Pelabuhan Buhias di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi						
		4) Pengembangan Akses Jalan dan Jembatan	Pelabuhan Bukide di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
		5) Peningkatan Sistem Teknologi Informasi	Pelabuhan Dapalan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
		6) Pengembangan Fasilitas Pelayanan Lainnya	Pelabuhan Essang di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Pengumpan Lokal Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Pelabuhan Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Pelabuhan Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Pelabuhan Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur								
			PelabuhanLipang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Pelabuhan Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
			Pelabuhan Mangarang di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Pelabuhan Ngalipaeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Pelabuhan Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Pelabuhan Sawang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
			Pelabuhan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara								
			Pelabuhan Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Pelabuhan Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Pelabuhan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Munte/Likupang Barat di Kabupaten Minahasa Utara								
			Pelabuhan Pehe di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
			Pelabuhan Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
			Pelabuhan Tg. Sidupa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara								
			Pelabuhan Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan								
			Pelabuhan Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro								
		2.4.1.4 Perwujudan Terminal Khusus									
		a. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan									
		1) Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Dermaga Nelayan Desa Parentek Kecamatan Lembean Timur di Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Swasta						
		2) Penyusunan DED Pembangunan	Dermaga Nelayan Desa Tumpaan Kecamatan Kakas di Kabupaten Minahasa								
			Dermaga Nelayan Kamenti Desa Kapataran Satu Kecamatan Lembean Timur di								
			Dermaga Nelayan Pasolo Desa Bukit Tinggi Kecamatan Kakas Barat di Kabupaten								
			Dermaga Nelayan Touloun Desa Lalumpe Kecamatan Kombi di Kabupaten Minahasa								
			Dermaga Pariwisata Desa Balirangeng Siau Timur Selatan di Kabupaten Kepulauan								
			Dermaga Pariwisata Desa Barangka Pehe Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau								
			Dermaga Pariwisata Desa Makalehi Siau Barat di Kabupaten Kepulauan Siau								
			Dermaga Pariwisata Pantai Bira Desa Lamanggo Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau								
			Dermaga Pariwisata Pulau Bongkil di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara								
			Pelabuhan Kinabuhutan di Kabupaten Minahasa Utara								
			Pelabuhan Pariwisata 2 Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten								
			Pelabuhan Pariwisata Desa Sara Besar di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Pariwisata Nusa Dolom di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Pariwisata Nusa Tofor di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Pariwisata Pulau Intata di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Desa Alo di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Desa Bengketang Kecamatan Tabukan Utara di Kabupaten								
			Pelabuhan Rakyat Desa Bukide Timur Kecamatan Nusa Tabukan di Kabupaten								
			Pelabuhan Rakyat Desa Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Desa Lirung Matane di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara di								
			Pelabuhan Rakyat Desa Talengen Kecamatan Tabukan Tengah di Kabupaten								
			Pelabuhan Rakyat Desa Taturan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Lahie di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Lahihe di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Mala di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Terminal Khusus Dermaga Bakamla Sensong Kecamatan Tabukan Tengah di								
			Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Apelawo Siau Timur di								
			Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Bukide Siau Timur di Kabupaten								
			Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Deahe Siau Timur di Kabupaten								
			Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Hiang Siau Barat Utara di								
			Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Lia Siau Timur di Kabupaten								
			Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Nameng Siau Barat Utara di								
			Terminal Khusus Industri Pengolahan Ikan Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan								
			Terminal Khusus Pertambangan Nuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur								
			Terminal Khusus Stasiun PSDKP Sawang Bendar Kecamatan Tahuna di Kabupaten								
		3) Penetapan Lokasi Pembangunan	Dermaga Nelayan Desa Parentek Kecamatan Lembean Timur di Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Swasta						
		4) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Dermaga Nelayan Desa Tumpaan Kecamatan Kakas di Kabupaten Minahasa								
		5) Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Dermaga Nelayan Kamenti Desa Kapataran Satu Kecamatan Lembean Timur di								
			Dermaga Nelayan Pasolo Desa Bukit Tinggi Kecamatan Kakas Barat di Kabupaten								
			Dermaga Nelayan Touloun Desa Lalumpe Kecamatan Kombi di Kabupaten Minahasa								
			Dermaga Pariwisata Desa Balirangeng Siau Timur Selatan di Kabupaten Kepulauan								
			Dermaga Pariwisata Desa Barangka Pehe Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau								
			Dermaga Pariwisata Desa Makalehi Siau Barat di Kabupaten Kepulauan Siau								
			Dermaga Pariwisata Pantai Bira Desa Lamanggo Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau								
			Dermaga Pariwisata Pulau Bongkil di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara								
			Pelabuhan Kinabuhutan di Kabupaten Minahasa Utara								
			Pelabuhan Pariwisata 2 Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten								
			Pelabuhan Pariwisata Desa Sara Besar di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Pariwisata Nusa Dolom di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Pariwisata Nusa Tofor di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Pariwisata Pulau Intata di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Desa Alo di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Desa Bengketang Kecamatan Tabukan Utara di Kabupaten								
			Pelabuhan Rakyat Desa Bukide Timur Kecamatan Nusa Tabukan di Kabupaten								
			Pelabuhan Rakyat Desa Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Desa Lirung Matane di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara di								
			Pelabuhan Rakyat Desa Talengen Kecamatan Tabukan Tengah di Kabupaten								
			Pelabuhan Rakyat Desa Taturan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Lahie di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Lahihe di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pelabuhan Rakyat Mala di Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Terminal Khusus Dermaga Bakamla Sensong Kecamatan Tabukan Tengah di								
			Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Apelawo Siau Timur di								
			Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Bukide Siau Timur di Kabupaten								
			Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Deahe Siau Timur di Kabupaten								
			Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Hiang Siau Barat Utara di								
			Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Lia Siau Timur di Kabupaten								
			Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Nameng Siau Barat Utara di								
			Terminal Khusus Industri Pengolahan Ikan Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan								
			Terminal Khusus Pertambangan Nuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur								
			Terminal Khusus Stasiun PSDKP Sawang Bendar Kecamatan Tahuna di Kabupaten								
		6) Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Dermaga Nelayan Desa Parentek Kecamatan Lembean Timur di Kabupaten Minahasa								
		7) Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Dermaga Nelayan Desa Tumpaan Kecamatan Kakas di Kabupaten Minahasa								
			Dermaga Nelayan Kamenti Desa Kapataran Satu Kecamatan Lembean Timur di								
			Dermaga Nelayan Pasolo Desa Bukit Tinggi Kecamatan Kakas Barat di Kabupaten								
			Dermaga Nelayan Touloun Desa Lalumpe Kecamatan Kombi di Kabupaten Minahasa								
			Dermaga Pariwisata Desa Balirangeng Siau Timur Selatan di Kabupaten Kepulauan								
			Dermaga Pariwisata Desa Barangka Pehe Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau								
			Dermaga Pariwisata Desa Makalehi Siau Barat di Kabupaten Kepulauan Siau								
			Dermaga Pariwisata Pantai Bira Desa Lamanggo Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau								
			Dermaga Pariwisata Pulau Bongkil di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara								

					Pelabuhan Kinabuhutan di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten /Kota, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Kantah Kabupaten/Kota, Swasta								
					Pelabuhan Pariwisata 2 Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Sara Besar di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Pariwisata Nusa Dolom di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Pariwisata Nusa Tofor di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Pariwisata Pulau Intata di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Desa Alo di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Desa Bengketang Kecamatan Tabukan Utara di Kabupaten										
					Pelabuhan Rakyat Desa Bukide Timur Kecamatan Nusa Tabukan di Kabupaten										
					Pelabuhan Rakyat Desa Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Desa Lirung Matane di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara di										
					Pelabuhan Rakyat Desa Talengen Kecamatan Tabukan Tengah di Kabupaten										
					Pelabuhan Rakyat Desa Taturan di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Lahue di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Lahihe di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Mala di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Terminal Khusus Dermaga Bakamla Sensong Kecamatan Tabukan Tengah di										
					Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Apelawo Siau Timur di										
					Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Bukide Siau Timur di Kabupaten										
					Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Deahe Siau Timur di Kabupaten										
					Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Hiung Siau Barat Utara di										
					Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Lia Siau Timur di Kabupaten										
					Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Nameng Siau Barat Utara di										
					Terminal Khusus Industri Pengolahan Ikan Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan										
					Terminal Khusus Pertambangan Nuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Terminal Khusus Stasiun PSDKP Sawang Bendar Kecamatan Tahuna di Kabupaten										
			8)	Pembangunan	Dermaga Nelayan Desa Parentek Kecamatan Lembean Timur di Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Swasta								
					Dermaga Nelayan Desa Tumpaan Kecamatan Kakas di Kabupaten Minahasa										
					Dermaga Nelayan Kamenti Desa Kapataran Satu Kecamatan Lembean Timur di										
					Dermaga Nelayan Pasolo Desa Bukit Tinggi Kecamatan Kakas Barat di Kabupaten										
					Dermaga Nelayan Toulaan Desa Lahunge Kecamatan Kombi di Kabupaten Minahasa										
					Dermaga Pariwisata Desa Balianggeng Siau Timur Selatan di Kabupaten Kepulauan										
					Dermaga Pariwisata Desa Barangka Pehe Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau										
					Dermaga Pariwisata Desa Makalehi Siau Barat di Kabupaten Kepulauan Siau										
					Dermaga Pariwisata Pantai Bira Desa Lamangego Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau										
					Dermaga Pariwisata Pulau Bongkil di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Pelabuhan Kinabuhutan di Kabupaten Minahasa Utara										
					Pelabuhan Pariwisata 2 Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Sara Besar di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Pariwisata Nusa Dolom di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Pariwisata Nusa Tofor di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Pariwisata Pulau Intata di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Desa Alo di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Desa Bengketang Kecamatan Tabukan Utara di Kabupaten										
					Pelabuhan Rakyat Desa Bukide Timur Kecamatan Nusa Tabukan di Kabupaten										
					Pelabuhan Rakyat Desa Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Desa Lirung Matane di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara di										
					Pelabuhan Rakyat Desa Talengen Kecamatan Tabukan Tengah di Kabupaten										
					Pelabuhan Rakyat Desa Taturan di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Lahue di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Lahihe di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pelabuhan Rakyat Mala di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Terminal Khusus Dermaga Bakamla Sensong Kecamatan Tabukan Tengah di										
					Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Apelawo Siau Timur di										
					Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Bukide Siau Timur di Kabupaten										
					Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Deahe Siau Timur di Kabupaten										
					Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Hiung Siau Barat Utara di										
					Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Lia Siau Timur di Kabupaten										
					Terminal Khusus Dermaga Evakuasi Bencana Desa Nameng Siau Barat Utara di										
					Terminal Khusus Industri Pengolahan Ikan Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan										
					Terminal Khusus Pertambangan Nuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Terminal Khusus Stasiun PSDKP Sawang Bendar Kecamatan Tahuna di Kabupaten										
			b. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Terminal Khusus												
			1)	Peningkatan Infrastruktur	Dermaga Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi, Swasta								
			2)	Peningkatan Fasilitas Penyimpanan dan Gudang	Dermaga Nelayan Desa Tateli Tiga Kecamatan Mandolang di Kabupaten Minahasa										
			3)	Perluasan Area Parkir	Dermaga Pariwisata 1 Kelurahan Makawidey Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung										
			4)	Pengembangan Akses Jalan dan Jembatan	Dermaga Pariwisata 2 Kelurahan Makawidey Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung										
			5)	Peningkatan Sistem Teknologi Informasi	Dermaga Pariwisata Desa Paputungan Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten										
			6)	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Lainnya	Dermaga Pariwisata Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur di Kabupaten Minahasa										
					Dermaga Pariwisata Kelurahan Balehumara Tagulandang di Kabupaten Kepulauan										
					Dermaga Pariwisata Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari di Kota Bitung										
					Dermaga Pariwisata Kelurahan Tarorane Siau Timur di Kabupaten Kepulauan Siau										
					Dermaga Pariwisata Pintu Kota Kecil Kelurahan Batu Kota Kecamatan Lembeh Utara										
					Dermaga Rakyat Kelurahan Talise Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten Minahasa										
					Dermaga Tugu Wisata Trikora Kelurahan Batulubang Kecamatan Lembeh Selatan di										
					Pelabuhan Pariwisata 1 Desa Gangga I Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten										
					Pelabuhan Pariwisata 1 Desa Kima Bajo Kecamatan Wori di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata 1 Desa Mokupa Kecamatan Tombariri di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata 1 Desa Poopoh Kecamatan Tombariri di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata 1 Desa Tambala Kecamatan Tombariri di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata 1 Kalasey Satu Kecamatan Mandolang di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata 1 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan di Kota										
					Pelabuhan Pariwisata 1 Kelurahan Kasawari Aertembaga di Kota Bitung										
					Pelabuhan Pariwisata 1 Kelurahan Makawidey Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung										
					Pelabuhan Pariwisata 1 Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken di Kota Manado										
					Pelabuhan Pariwisata 1 Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung										
					Pelabuhan Pariwisata 2 Desa Gangga I Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten										
					Pelabuhan Pariwisata 2 Desa Kima Bajo Kecamatan Wori di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata 2 Desa Mokupa Kecamatan Tombariri di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata 2 Desa Poopoh Kecamatan Tombariri di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata 2 Desa Tarabitan Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten										
					Pelabuhan Pariwisata 2 Kalasey Satu Kecamatan Mandolang di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata 2 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan di Kota										
					Pelabuhan Pariwisata 2 Kelurahan Kasawari Aertembaga di Kota Bitung										
					Pelabuhan Pariwisata 2 Kelurahan Makawidey Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung										
					Pelabuhan Pariwisata 2 Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang di Kota										
					Pelabuhan Pariwisata 2 Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken di Kota Manado										
					Pelabuhan Pariwisata 2 Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung										
					Pelabuhan Pariwisata 3 Desa Kalasey Satu Kecamatan Mandolang di Kabupaten										
					Pelabuhan Pariwisata 3 Desa Poopoh Kecamatan Tombariri di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Bahoi Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Ehe Kecamatan Likupang Timur di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Gangga I Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Libas Kecamatan Likupang Timur di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur di Kabupaten										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Lirung Satu Kecamatan Lirung di Kabupaten Kepulauan										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Maen Kecamatan Likupang Timur di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Nunuka Raya Kecamatan Tomini di Kabupaten Bolaang										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Peniaungan Kecamatan Pinolosian Timur di Kabupaten										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Salibabu Kecamatan Salibabu di Kabupaten Kepulauan										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Serei Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Tarabitan Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Wawontulap Kecamatan Tatapaan di Kabupaten Minahasa										
					Pelabuhan Pariwisata Desa Wori Kecamatan Wori di Kabupaten Minahasa Utara										
					Pelabuhan Pariwisata Kelurahan Alung Banua Kecamatan Bunaken Kepulauan di Kota										

Pelabuhan Pariwisata Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang di Kota Manado
Pelabuhan Pariwisata Kelurahan Pintu Kota Kecamatan Lembeh Utara di Kota Bitung
Pelabuhan Pariwisata Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken di Kota Manado
Pelabuhan Pariwisata Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang di Kota
Pelabuhan Pariwisata Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang di Kota Manado
Pelabuhan Rakyat Boulevard Kelurahan Sawangbendar di Kabupaten Kepulauan
Pelabuhan Rakyat Boulevard Tanah Abang Kelurahan Sawangbendar di Kabupaten
Pelabuhan Rakyat Desa Bajo Kecamatan Tatapaan di Kabupaten Minahasa Selatan
Pelabuhan Rakyat Desa Bango Kecamatan Wori di Kabupaten Minahasa Utara
Pelabuhan Rakyat Desa Batunderang Kecamatan Manganitu Selatan di Kabupaten
Pelabuhan Rakyat Desa Buang Kecamatan Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau
Pelabuhan Rakyat Desa Buhias Kecamatan Wori di Kabupaten Minahasa Utara
Pelabuhan Rakyat Desa Bulo Kecamatan Tabukan Selatan di Kabupaten Kepulauan
Pelabuhan Rakyat Desa Bulutui 1 Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten Minahasa
Pelabuhan Rakyat Desa Bulutui 2 Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten Minahasa
Pelabuhan Rakyat Desa Damau Kecamatan Damau di Kabupaten Kepulauan Talaud
Pelabuhan Rakyat Desa Gangga I Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten Minahasa
Pelabuhan Rakyat Desa Gangga II Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten
Pelabuhan Rakyat Desa Ilipon Kecamatan Pinolosian Timur di Kabupaten Bolaang
Pelabuhan Rakyat Desa Inobonto Kecamatan Bolaang di Kabupaten Bolaang
Pelabuhan Rakyat Desa Jayakarsa Kecamatan Wori di Kabupaten Minahasa Utara
Pelabuhan Rakyat Desa Karungo Kecamatan Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau
Pelabuhan Rakyat Desa Kiama Kecamatan Melonguanae di Kabupaten Kepulauan
Pelabuhan Rakyat Desa Kinabuhutan Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten
Pelabuhan Rakyat Desa Kulu Kecamatan Wori di Kabupaten Minahasa Utara
Pelabuhan Rakyat Desa Mala Timur Kecamatan Melonguane di Kabupaten Kepulauan
Pelabuhan Rakyat Desa Mangaran Kecamatan Kabaruan di Kabupaten Kepulauan
Pelabuhan Rakyat Desa Mantehage III Tinongko Kecamatan Wori di Kabupaten
Pelabuhan Rakyat Desa Matole Kecamatan Siau Timur Selatan di Kabupaten
Pelabuhan Rakyat Desa Mawira Kecamatan Manganitu Selatan di Kabupaten
Pelabuhan Rakyat Desa Pahepa Kecamatan Siau Timur Selatan di Kabupaten
Pelabuhan Rakyat Desa Pangi Timur Kecamatan Sang Tombolang di Kabupaten
Pelabuhan Rakyat Desa Pehe Kecamatan Siau Barat di Kabupaten Kepulauan Siau
Pelabuhan Rakyat Desa Pumpente Kecamatan Tagulandang di Kabupaten Kepulauan
Pelabuhan Rakyat Desa Sondaken Kecamatan Tatapaan di Kabupaten Minahasa
Pelabuhan Rakyat Desa Tambun Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten Minahasa
Pelabuhan Rakyat Desa Tapile Kecamatan Siau Timur Selatan di Kabupaten
Pelabuhan Rakyat Desa Tarohan Kecamatan Beo Selatan di Kabupaten Kepulauan
Pelabuhan Rakyat Desa Tiwoho Kecamatan Wori di Kabupaten Minahasa Utara
Pelabuhan Rakyat Kelurahan Alung Banua Kecamatan Bunaken Kepulauan di Kota
Pelabuhan Rakyat Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken Kepulauan di
Pelabuhan Rakyat Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
Pelabuhan Rakyat Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken di Kota Manado
Pelabuhan Rakyat Likupang di Kabupaten Minahasa Utara
Pelabuhan Rakyat Papindang Kelurahan Manado Tua Satu Kecamatan Bunaken
Pelabuhan Rakyat Pulau Mangupun Kelurahan Marampit Kecamatan Nanusa di
Tambatan Nelayan Desa Ayong Kecamatan Sang Tombolang di Kabupaten Bolaang
Tambatan Perahu Nelayan Desa Tumbak Kecamatan Pusomaen di Kabupaten
Terminal Khusus Bakamla Bitung di Kota Bitung
Terminal Khusus Bakamla Zona Maritim Tengah Likupang Desa Serei Kecamatan
Terminal Khusus Industri 1 Desa Wineru Likupang Timur di Kabupaten Minahasa
Terminal Khusus Industri 2 Desa Wineru Likupang Timur di Kabupaten Minahasa
Terminal Khusus Industri Desa Buyat Selatan Kecamatan Kotabunan di Kabupaten
Terminal Khusus Industri Desa Koha Kecamatan Mandolang di Kabupaten Minahasa
Terminal Khusus Industri Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak di Kabupaten Bolaang
Terminal Khusus Industri Desa Sapa Barat Kecamatan Tenga di Kabupaten Minahasa
Terminal Khusus Industri Desa Sologi Kecamatan Lolak di Kabupaten Bolaang
Terminal Khusus Industri Desa Talise Kecamatan Likupang Barat di Kabupaten
Terminal Khusus industri Kelurahan Paudean Kecamatan Lembeh Selatan di Kota
Terminal Khusus Lab Basah Desa Kampung Ambong di Kabupaten Minahasa Utara
Terminal Khusus Niaga Minyak bumi dan Gas Bumi Tahuna Timur di Kabupaten
Terminal Khusus Pariwisata 2 Desa Tambala Kecamatan Tombariri di Kabupaten
Terminal Khusus Pariwisata Desa Koha Kecamatan Mandolang di Kabupaten
Terminal Khusus Pariwisata Desa Tateli Dua Kecamatan Mandolang di Kabupaten
Terminal Khusus Pariwisata Kelurahan Batukota Kecamatan Lembeh Utara di Kota
Terminal Khusus Penunjang Industri Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak di
Terminal Khusus Perikanan Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga di
Terminal Khusus Pertambangan Desa Koha Kecamatan Mandolang di Kabupaten
Terminal Khusus Pertambangan Desa Matandoi Kecamatan Pinolosian Timur di
Terminal Khusus Pertambangan Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan di
Terminal Khusus Pertambangan Desa Ratatotok Utara Kecamatan Ratatotok di
Terminal Khusus Pertambangan Desa Rinondoran Kecamatan Likupang Timur di
Terminal Khusus PLTU Desa Binjeita II Kecamatan Bolangitang Timur di Kabupaten
Terminal Khusus PLTU Desa Kema I Kecamatan Kema di Kabupaten Minahasa
Terminal Khusus PLTU Sulut II Desa Tawaang Kecamatan Tenga di Kabupaten
Terminal Khusus PLTU Talaud Desa Tarun Selatan Kecamatan Melonguane di
Terminal Khusus Politeknik Desa Tawaang Timur Kecamatan Tenga di Kabupaten
Terminal Khusus Pos TNI AL Tabilaa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Terminal Khusus PSDKP Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga di
Terminal Khusus TNI AD Yonif Raider 712/WT Kompi Senapan C Desa Tateli Satu
Terminal Khusus TNI AL Lapango Kecamatan Manganitu Selatan di Kabupaten
Terminal Khusus TNI AL Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe
Terminal Khusus Wisata Kebun Binatang Tandurusa di Kota Bitung
Terminal KhususDermaga Pertambangan Desa Lilang Kecamatan Kema di Kabupaten
TUKS BBM 1 Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS BBM 2 Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS Distrik Navigasi Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 1 Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 1 Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 1 Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS Industri 1 Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS Industri 1 Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS Industri 1 Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS Industri 1 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS Industri 1 Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 1 Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 2 Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 2 Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 2 Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS Industri 2 Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS Industri 2 Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS Industri 2 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS Industri 2 Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 2 Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 3 Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 3 Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 3 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS Industri 4 Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 4 Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 4 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS Industri 5 Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri 5 Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir di Kota Bitung
TUKS Industri 6 Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri Desa Kawangkoan Bawah Kecamatan Amurang Barat di Kabupaten
TUKS Industri Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa di Kota Bitung
TUKS Industri Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian di Kota Bitung
TUKS Industri Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Lembeh Selatan di Kota Bitung
TUKS Industri Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari di Kota Bitung
TUKS Industri Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung
TUKS Industri Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari di Kota Bitung
TUKS Industri Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir di Kota Bitung

			TUKS Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi 1 Kelurahan Bitung Barat Satu Kecamatan										
			TUKS Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi 2 Kelurahan Bitung Barat Satu Kecamatan										
			TUKS Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan										
			TUKS Pariwisata Kelurahan Mawali Kecamatan Lembeh Utara di Kota Bitung										
			TUKS Penyalur Bahan Bakar Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir di Kota										
			TUKS Politeknik Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung										
			TUKS TNI AL Bitung di Kota Bitung										
			TUKS TNI AL Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung										
			TUKSDermaga Pariwisata Tandurusa Kecamatan Aertembaga di Kota Bitung										
			TUKSDermaga Pol Air Polda Sulut Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga di										
		2.4.1.5	**Perwujudan Pelabuhan Perikanan**										
		2.4.1.5.1	**Perwujudan Pelabuhan Perikanan Samudera**										
		a. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi											
		1)	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung di Kota Bitung	APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan							
				Pelabuhan Perikanan Samudera Likupang di Kabupaten Minahasa Utara									
		2.4.1.5.2	**Perwujudan Pelabuhan Perikanan Pantai**										
		a. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai											
		1)	Pengembangan Sarana dan Prasarana	Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa di Kota Manado	APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan							
		2)	Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kabupaten Bolaang Mongondow									
		2.4.1.5.3	**Perwujudan Pangkalan Pendaratan Ikan**										
		a. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan											
		1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Pangkalan Pendaratan Ikan Tanawangko di Kabupaten Minahasa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kantah Kabupaten/Kota							
		2)	Penyusunan DED Pembangunan										
		3)	Penetapan Lokasi Pembangunan										
		4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup										
		5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan										
		6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan										
		7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan										
		8)	Pembangunan										
		b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan											
		1)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan	Pangkalan Pendaratan Ikan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan	APBN	Kementerian Perhubungan							
				Pangkalan Pendaratan Ikan Aten Oki di Kabupaten Minahasa									
				Pangkalan Pendaratan Ikan Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Pangkalan Pendaratan Ikan Dagho di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Pangkalan Pendaratan Ikan Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
				Pangkalan Pendaratan Ikan Jiko di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Pangkalan Pendaratan Ikan Kema di Kabupaten Minahasa Utara									
				Pangkalan Pendaratan Ikan Salibabu di Kabupaten Minahasa									
				Pangkalan Pendaratan Ikan Sauk di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Pangkalan Pendaratan Ikan Tamiang Siduna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
				Pangkalan Pendaratan Ikan Tondano di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Pangkalan Pendaratan Ikan Ulu di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
		c. Pembangunan Cold Storage											
		1)	Penyusunan DED Pembangunan	Cold Storage Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sitaro	APBN, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian Perhubungan, Kantah Kabupaten/Kota							
		2)	Penetapan Lokasi Pembangunan										
		3)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup										
		4)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan										
		5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan										
		6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan										
		7)	Pembangunan										
		2.4.2	**Perwujudan Alur Pelayaran di Laut**										
		2.4.2.1	**Perwujudan Alur Pelayaran Umum dan Perlintas**										
		a. Pengawasan dan Pemeliharaan Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan											
		1)	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Alur Pelayaran Nasional	APBN	Kementerian Perhubungan							
		2)	Pengawasan dan Pemeliharaan										
		2.4.2.2	**Perwujudan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan**										
		a. Pengawasan dan Pemeliharaan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan											
		1)	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Bitung;	APBN	Kementerian Perhubungan							
		2)	Pengawasan dan Pemeliharaan	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Manado dan Pulau Bunaken;									
				Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Labuan Uki; dan									
				Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Tahuna.									
2.5		**Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus**											
		2.5.1	**Perwujudan Bandar Udara Pengumpul**										
		a.	Pengembangan Sarana Dan Prasarana	Bandar Udara Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud	BUMN	BUMN							
				Bandar Udara Sam Ratulangi di Kota Manado, di Kabupaten Minahasa Utara									
		b. Pembangunan Bandar Udara Pengumpul											
		1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Bandar Udara Pulau Lembeh di Kota Bitung	APBN, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian Perhubungan, Kantah Kabupaten/Kota							
		2)	Penyusunan DED Pembangunan										
		3)	Penetapan Lokasi Pembangunan										
		4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup										
		5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan										
		6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan										
		7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan										
		8)	Pembangunan										
		2.5.1	**Perwujudan Bandar Udara Pengumpan**										
		a.	Pengembangan Sarana Dan Prasarana	Bandar Udara Bolaang Mongondow di Kabupaten Kepuluaan Bolaang Mongondow	BUMN	BUMN							
				Bandar Udara Mangas di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Bandar Udara Naha di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Bandara Udara Sitaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
		2.5.3	**Perwujudan Bandar Udara Khusus**										
		a. Pembangunan Bandar Udara Khusus											
		1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Bandar Udara Marampit di Kabupaten Kepuluaan Talaud	BUMN	BUMN							
		2)	Penyusunan DED Pembangunan	Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Pulau Marampit di Kabupaten	APBN dan Swasta	Kementerian Perhubungan, Swasta							
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Pulau Karakitang di Kabupaten									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Pulau Biaro									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Likupang di Kabupaten Minahasa									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Taman Nasional Bunaken di Kota									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Danau Tondano									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Danau Moat di Kabupaten Minahasa									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Salongo di Kabupaten Bolaang									
		3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Bandar Udara Marampit di Kabupaten Kepuluaan Talaud	BUMN	BUMN							
		4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Pulau Marampit di Kabupaten	APBN dan Swasta	Kementerian Perhubungan, Swasta							
		5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Pulau Karakitang di Kabupaten									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Pulau Biaro									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Likupang di Kabupaten Minahasa									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Taman Nasional Bunaken di Kota									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Danau Tondano									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Danau Moat di Kabupaten Bolaang									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Salongo di Kabupaten Bolaang									
		6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Bandar Udara Marampit di Kabupaten Kepuluaan Talaud	BUMN	BUMN							
		7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Pulau Marampit di Kabupaten	APBN, APBD Kabupaten/Kota, Swasta	Kementerian Perhubungan, Kantah Kabupaten/Kota, Swasta							
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Pulau Karakitang di Kabupaten									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Pulau Biaro									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Likupang di Kabupaten Minahasa									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Taman Nasional Bunaken di Kota									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Danau Tondano									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Danau Moat di Kabupaten Bolaang									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Salongo di Kabupaten Bolaang									
		8)	Pembangunan	Bandar Udara Marampit di Kabupaten Kepuluaan Talaud	BUMN	BUMN							
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Pulau Marampit di Kabupaten									
				Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Pulau Karakitang di Kabupaten									

					Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Pulau Biaro	APBN dan Swasta	Kementerian Perhubungan, Swasta							
					Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Likupang di Kabupaten Minahasa									
					Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Taman Nasional Bunaken di Kota									
					Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Danau Tondano									
					Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Danau Moat di Kabupaten Bolaang									
					Water Aerodrome dalam Multi-Airport System Salongo di Kabupaten Bolaang									
3	**Perwujudan Sistem Jaringan Energi**													
	3.1	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**												
		3.1.1	**Perwujudan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**											
		a.	Pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		Depot Bahan Bakar *Liquefied Petroleum Gas* Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan	APBN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral							
					Depot Bahan Bakar Minyak Paceda di Kota Bitung									
					Jaringan DPPU Sam Ratulangi di Kota Manado									
					Jaringan Fuel Terminal Bitung di Kota Bitung									
					Jaringan Fuel Terminal Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		3.1.2	**Perwujudan Jaringan Minyak dan Gas Bumi**											
		a.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Minyak dan Gas Bumi		PLTP Kotamobagu di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten	APBN	Kementerian Energi dan							
	3.2	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan**												
		3.2.1	**Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya**											
		a. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik												
		1)	Penyusunan *Feasibility Study* Pembangunan		BESS Sulbagut Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta							
		2)	Penyusunan DED Pembangunan		*Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC) di Wilayah Pesisir Kabupaten									
					Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) di Wilayah Pesisir Kabupaten									
					Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) di Wilayah Pesisir Kota Manado Kota									
					PLT EBT *Base* Sulbagut 3 tersebar di Sulawesi Utara									
					PLTA Bendungan Kuwil Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTA/PLTM Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTA Minut 1 di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTA Minut 2 di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTA Minut 3 di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTA Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTA Pindol di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTA Poigar 2-6 Minahasa Selatan & Bolaang Mongondow di Kabupaten Minahasa									
					PLTA Poigar II di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTA Modoinding/Poigar 3 di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTA Poigar IV di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTA Poigar V di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTA Ranoyapo 1 di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTA Ranoyapo 2 di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTA Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTA Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTA Sulbagut (Kuota) tersebar di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTA Poigar-2 di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTB Bitung Kota Bitung									
					PLTB Kepulauan Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTB Wawo Kota Tomohon									
					PLTB Sulut									
					PLTBio Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTD Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTH Bitung									
					PLTM Apado di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTM Belengang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					PLTM Bilalang di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTM Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					PLTM Dominanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTM Kilotiga di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTM Kinali di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Klabat Wineru (10 MW) di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Klabat Wineru (40 MW) di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Kotamobagu I (FTP 2) Kota Kotamobagu									
					PLTM Kotamobagu II (FTP 2) Kota Kotamobagu									
					PLTM Lobong II di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTM Milangodaa I di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Milangodaa II di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Molobog di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					PLTM Morea di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					PLTM Paku di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					PLTM Pidung di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Pilolahunga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Ranowangko di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Tangangah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Tincep di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Tincep 1 di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Tincep 2 di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Tincep 3 di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Tincep 4 di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Tombolango di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					PLTM Totabuan 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTM Totabuan 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTM Totabuan I di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTM Totabuan II di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTM Totabuan IV di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTM Totabuan V di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTM Ulupelang II di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					PLTM Woran di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTM Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTM Bumbung									
					PLTM Sepa 1 dan 2									
					PLTMG Minahasa di Kabupaten Minahasa									
					PLTMG Tahuna 1 di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					PLTMG Tahuna 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					PLTMG Tahuna 3 di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					PLTMG Sulbagut Tersebar di Sulawesi Utara									
					PLTMH Apado di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTMH Bilalang di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTMH Duminanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTMH Kilometer Tiga di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTMH Lobong 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTMH Makalu di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					PLTMH Maulit di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					PLTMH Milangodaa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTMH Milangodaa I di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTMH Mokobang di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTMH Molobog di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					PLTMH Morea di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					PLTMH Pilolahungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTMH Sakongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTMH Sinandaka di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTMH Tababo di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					PLTMH Tara-Tara Kota Tomohon									
					PLTMH Tincep 1 di Kabupaten Minahasa									
					PLTMH Tincep 4 di Kabupaten Minahasa									
					PLTMH Tinoor Kota Tomohon									

					PLTMH Totabuan III di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTMH Wiau di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					PLTMH Wongkai di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					PLTMH Worang di Kabupaten Minahasa									
					PLTP Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTP Bitung Kota Bitung									
					PLTP Kaleosan Kalawat di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTP Lahendong Small Scale Binary									
					PLTP Lahendong #9									
					PLTP Lahendong BU #4									
					PLTP Lahendong LP									
					PLTP Lahendong 7 Kota Tomohon									
					PLTP Klabat Wineru Minahasa Utara dan Bitung di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTP Kotamobagu 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTP Kotamobagu 3 di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTP Kotamobagu 4 di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTP Kotamobagu 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTS Tomohon Timur Kota Tomohon									
					PLTS + Baterai Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTS Bitung Kota Bitung									
					PLTS Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					PLTS Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					PLTS Marore II di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					PLTS Nusa Tabukan									
					PLTS Kabaruan									
					PLTS Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					PLTS Nanusa									
					PLTS Beo									
					PLTS Pulau Manado Tua Kota Manado									
					PLTS Pulau Siladen Kota Manado									
					PLTS Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					PLTS Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					PLTS Terapung Danau Bunong di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					PLTS Terapung Danau Iloloi di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTS Terapung Danau Linow Kota Tomohon									
					PLTS Terapung Danau Luah Bulilin di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					PLTS Terapung Danau Pononotokan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					PLTS Terapung Danau Tabang Tabakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					PLTS Terapung Danau Tondano di Kabupaten Minahasa									
					PLTS Terapung Mooat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					PLTS Tomohon Timur Kota Tomohon									
					PLTS Lisdes Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTS + BESS Isolated Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTS + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTS + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTS + BESS Dedieselisasi Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTS + Batt Lolak									
					PLTS + Batt Kema									
					PLTS + Batt Likupang									
					PLTS Kuwil Kawangkoan									
					PLTSa Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTSa Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTU Sulut 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					PLTU Isolated Talaud									
	3)	Penetapan Lokasi Pembangunan			BESS Sulbagut Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Provinsi, BUMN/ Swasta	DLH Provinsi, BUMN/Swasta							
	4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup			Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa									
	5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan			Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa									
					Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) di Wilayah Pesisir Kota Manado Kota									
					PLT EBT Base Sulbagut 3 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					PLTA Bendungan Kuwil Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTA/PLTM Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTA Minut 1 di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTA Minut 2 di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTA Minut 3 di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTA Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTA Pindol di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTA Poigar 2-6 Minahasa Selatan & Bolaang Mongondow di Kabupaten Minahasa									
					PLTA Poigar II di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTA Modoinding/Poigar 3 di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTA Poigar IV di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTA Poigar V di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTA Ranoyapo 1 di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTA Ranoyapo 2 di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTA Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTA Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTA Sulbagut (Kuota) tersebar di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTA Poigar-2 di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTB Bitung Kota Bitung									
					PLTB Kepulauan Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					PLTB Wawo Kota Tomohon									
					PLTB Sulut									
					PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTBio Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTD Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTG/MG Minahasa di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTM Apado di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTM Bekungang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					PLTM Bilalang di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTM Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					PLTM Dominanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara									
					PLTM Kilotiga di Kabupaten Minahasa Selatan									
					PLTM Kinali di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Klabat Wineru (10 MW) di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Klabat Wineru (40 MW) di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Kotamobagu I (FTP 2) Kota Kotamobagu									
					PLTM Kotamobagu II (FTP 2) Kota Kotamobagu									
					PLTM Lobong II di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTM Milangodaa I di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Milangodaa II di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Molobog di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					PLTM Morea di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					PLTM Paku di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					PLTM Pidung di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Pilolahunga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Ranowangko di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Sulbagut (Kuota Tersebar) Provinsi Sulawesi Utara									
					PLTM Tangangah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					PLTM Tincep di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Tincep 1 di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Tincep 2 di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Tincep 3 di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Tincep 4 di Kabupaten Minahasa									
					PLTM Tombolango di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					PLTM Totabuan 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					PLTM Totabuan 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow									

					PLTM Totabuan I di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTM Totabuan II di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTM Totabuan IV di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTM Totabuan V di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTM Ulupeliang II di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					PLTM Woran di Kabupaten Minahasa										
					PLTM Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTM Bumbung										
					PLTM Sepa 1 dan 2										
					PLTMG Minahasa di Kabupaten Minahasa										
					PLTMG Tahuna I di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					PLTMG Tahuna 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					PLTMG Tahuna 3 di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					PLTMG Sulbagut Tersebar di Sulawesi Utara										
					PLTMH Apado di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTMH Bilalang di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTMH Duminanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTMH Kilometer Tiga di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTMH Lobong 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTMH Makalu di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTMH Maulit di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTMH Milangodaa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTMH Milangodaa I di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTMH Mokobang di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTMH Mokoboo di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					PLTMH Morea di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTMH Pilolahungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTMH Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTMH Sinandaka di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTMH Tababo di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTMH Tara-Tara Kota Tomohon										
					PLTMH Tincep 1 di Kabupaten Minahasa										
					PLTMH Tincep 4 di Kabupaten Minahasa										
					PLTMH Tinoor Kota Tomohon										
					PLTMH Totabuan III di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTMH Wisu di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTMH Wongkai di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTMH Worang di Kabupaten Minahasa										
					PLTP AirMadidi di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTP Bitung Kota Bitung										
					PLTP Kaleosan Kalawat di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTP Lahendong Small Scale Binary										
					PLTP Lahendong #9										
					PLTP Lahendong BU #4										
					PLTP Lahendong LP										
					PLTP Lahendong 7 Kota Tomohon										
					PLTP Sulbagut (Kuato Tersebar) Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTP Klabat Wineru Minahasa Utara dan Bitung di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTP Kotamobagu 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTP Kotamobagu 3 di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTP Kotamobagu 4 di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTP Kotamobagu 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTS Tomohon Timur Kota Tomohon										
					PLTS + Baterai Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTS Bitung Kota Bitung										
					PLTS Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					PLTS Lamanggo di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					PLTS Marore II di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					PLTS Nusa Tabukan										
					PLTS Kabaruan										
					PLTS Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					PLTS Nanusa										
					PLTS Beo										
					PLTS Pulau Manado Tua Kota Manado										
					PLTS Pulau Siladen Kota Manado										
					PLTS Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					PLTS Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					PLTS Terapung Danau Bunong di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					PLTS Terapung Danau Iloloi di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTS Terapung Danau Linow Kota Tomohon										
					PLTS Terapung Danau Luah Bulilin di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTS Terapung Danau Pononotokan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					PLTS Terapung Danau Tabang Tabakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					PLTS Terapung Danau Tondano di Kabupaten Minahasa										
					PLTS Terapung Mooat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					PLTS Tomohon Timur Kota Tomohon										
					PLTS Lisdes Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTS + BESS Isolated Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTS + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTS + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTS + BESS Dedieselisasi Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTS + Batt Lolak										
					PLTS + Batt Kema										
					PLTS + Batt Likupang										
					PLTS Kuwil Kawangkoan										
					PLTSa Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTSa Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTU Sulut 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					PLTU Isolated Talaud										
			7)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	BESS Sulbagut Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara	APBD Kabupaten/Kota, BUMN/ Swasta	Kantah Kabupaten/Kota, BUMN/Swasta								
			8)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa										
					Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa										
					Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) di Wilayah Pesisir Kota Manado Kota										
					PLT EBT Base Sulbagut 3 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					PLT EBT Base Sulbagut 3 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					PLTA Bendungan Kuwil Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTA/PLTM Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTA Minut 1 di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTA Minut 2 di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTA Minut 3 di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTA Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTA Pindol di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTA Poigar 2-6 Minahasa Selatan & Bolaang Mongondow di Kabupaten Minahasa										
					PLTA Poigar II di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTA Modoinding/Poigar 3 di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTA Poigar IV di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTA Poigar V di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTA Ranoyapo 1 di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTA Ranoyapo 2 di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTA Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTA Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTA Sulbagut (Kuota) tersebar di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTA Poigar-2 di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTB Bitung Kota Bitung										
					PLTB Kepulauan Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					PLTB Wawo Kota Tomohon										
					PLTB Sulut										
					PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara										

PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara
PLTBio Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTD Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTG/MG Minahasa di Kabupaten Minahasa Utara
PLTH Bitung
PLTM Apado di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTM Belengang di Kabupaten Kepulauan Sangihe
PLTM Bilalang di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTM Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
PLTM Dominanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTM Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara
PLTM Kilotiga di Kabupaten Minahasa Selatan
PLTM Kinali di Kabupaten Minahasa
PLTM Klabat Wineru (10 MW) di Kabupaten Minahasa
PLTM Klabat Wineru (40 MW) di Kabupaten Minahasa
PLTM Kotamobagu I (FTP 2) Kota Kotamobagu
PLTM Kotamobagu II (FTP 2) Kota Kotamobagu
PLTM Lobong II di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTM Milangodaa I di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTM Milangodaa II di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTM Molobog di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
PLTM Morea di Kabupaten Minahasa Tenggara
PLTM Paku di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
PLTM Pidung di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTM Pilolahunga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTM Ranowangko di Kabupaten Minahasa
PLTM Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTM Sulbagut (Kuato Tersebar) Provinsi Sulawesi Utara
PLTM Tangangah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTM Tincep di Kabupaten Minahasa
PLTM Tincep 1 di Kabupaten Minahasa
PLTM Tincep 2 di Kabupaten Minahasa
PLTM Tincep 3 di Kabupaten Minahasa
PLTM Tincep 4 di Kabupaten Minahasa
PLTM Tombolango di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
PLTM Totabuan 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTM Totabuan 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTM Totabuan I di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTM Totabuan II di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTM Totabuan IV di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTM Totabuan V di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTM Ulupeliang II di Kabupaten Kepulauan Sangihe
PLTM Woran di Kabupaten Minahasa
PLTM Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara
PLTM Bumbung
PLTM Sepa 1 dan 2
PLTMG Minahasa di Kabupaten Minahasa
PLTMG Tahuna I di Kabupaten Kepulauan Sangihe
PLTMG Tahuna 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe
PLTMG Tahuna 3 di Kabupaten Kepulauan Sangihe
PLTMG Sulbagut Tersebar di Sulawesi Utara
PLTMH Apado di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTMH Bilalang di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTMH Duminanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTMH Kilometer Tiga di Kabupaten Minahasa Selatan
PLTMH Lobong 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTMH Makalu di Kabupaten Minahasa Tenggara
PLTMH Maulit di Kabupaten Minahasa Tenggara
PLTMH Milangodaa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTMH Milangodaa I di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTMH Mokobang di Kabupaten Minahasa Selatan
PLTMH Molobog di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
PLTMH Morea di Kabupaten Minahasa Tenggara
PLTMH Pilolahungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTMH Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTMH Sinandaka di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
PLTMH Tabubo di Kabupaten Minahasa Tenggara
PLTMH Tara-Tara Kota Tomohon
PLTMH Tincep 1 di Kabupaten Minahasa
PLTMH Tincep 4 di Kabupaten Minahasa
PLTMH Tinoor Kota Tomohon
PLTMH Totabuan III di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTMH Wiau di Kabupaten Minahasa Tenggara
PLTMH Wongkai di Kabupaten Minahasa Tenggara
PLTMH Worang di Kabupaten Minahasa
PLTP Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara
PLTP Bitung Kota Bitung
PLTP Kaleosan Kalawat di Kabupaten Minahasa Utara
PLTP Lahendong Small Scale Binary
PLTP Lahendong #9
PLTP Lahendong BU #4
PLTP Lahendong LP
PLTP Lahendong 7 Kota Tomohon
PLTP Sulbagut (Kuato Tersebar) Provinsi Sulawesi Utara
PLTP Klabat Wineru Minahasa Utara dan Bitung di Kabupaten Minahasa Utara
PLTP Kotamobagu 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTP Kotamobagu 3 di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTP Kotamobagu 4 di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTP Kotamobagu 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow
PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara
PLTS Tomohon Timur Kota Tomohon
PLTS + Baterai Provinsi Sulawesi Utara
PLTS Bitung Kota Bitung
PLTS Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud
PLTS Lamanggo di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
PLTS Marore II di Kabupaten Kepulauan Sangihe
PLTS Nusa Tabukan
PLTS Kabaruan
PLTS Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud
PLTS Nanusa
PLTS Beo
PLTS Pulau Manado Tua Kota Manado
PLTS Pulau Siladen Kota Manado
PLTS Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
PLTS Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
PLTS Terapung Danau Bunong di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
PLTS Terapung Danau Iloloi di Kabupaten Minahasa Selatan
PLTS Terapung Danau Linow Kota Tomohon
PLTS Terapung Danau Luah Bulilin di Kabupaten Minahasa Tenggara
PLTS Terapung Danau Pononotokan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
PLTS Terapung Danau Tabang Tabakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
PLTS Terapung Danau Tondano di Kabupaten Minahasa
PLTS Terapung Mooat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
PLTS Tomohon Timur Kota Tomohon
PLTS Lisdes Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara
PLTS + BESS Isolated Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara
PLTS + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara
PLTS + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara
PLTS + BESS Dedieselisasi Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara
PLTS + Batt Lolak
PLTS + Batt Kema

					PLTS + Batt Likupang										
					PLTS Kuwil Kawangkoan										
					PLTSa Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTSa Sulbagut (Kuato Tersebar) Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTU Sulut 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					PLTU Isolated Talaud										
			9)	Pembangunan	BESS Sulbagut Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta								
					Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa										
					Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa										
					Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) di Wilayah Pesisir Kota Manado Kota										
					PLT EBT Base Sulbagut 3 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					PLT EBT Base Sulbagut 3 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					PLTA Bendungan Kuwil Kawangkoan Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTA/PLTM Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTA Minut 1 di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTA Minut 2 di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTA Minut 3 di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTA Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTA Pindol di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTA Poigar 2-6 Minahasa Selatan & Bolaang Mongondow di Kabupaten Minahasa										
					PLTA Poigar II di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTA Modoinding/Poigar 3 di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTA Poigar IV di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTA Poigar V di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTA Ranoyapo 1 di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTA Ranoyapo 2 di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTA Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTA Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTA Sulbagut (Kuota) tersebar di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTA Poigar-2 di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTB Bitung Kota Bitung										
					PLTB Kepulauan Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					PLTB Wawo Kota Tomohon										
					PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTB Sulut										
					PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTBio Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTD Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTG/MG Minahasa di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTH Bitung										
					PLTM Anado di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTM Belengang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					PLTM Bilalang di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTM Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					PLTM Dominanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTM Kawangkoan di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTM Kilotiea di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTM Kinali di Kabupaten Minahasa										
					PLTM Klabat Wineru (10 MW) di Kabupaten Minahasa										
					PLTM Klabat Wineru (40 MW) di Kabupaten Minahasa										
					PLTM Kotamobagu I (FTP 2) Kota Kotamobagu										
					PLTM Kotamobagu II (FTP 2) Kota Kotamobagu										
					PLTM Lobong II di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTM Milangodaa I di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTM Milangodaa II di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTM Mokobog di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					PLTM Morea di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTM Paku di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					PLTM Pidung di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTM Pilolahunga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTM Ranowangko di Kabupaten Minahasa										
					PLTM Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTM Sulbagut (Kuato Tersebar) Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTM Tangangih di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTM Tincep di Kabupaten Minahasa										
					PLTM Tincep 1 di Kabupaten Minahasa										
					PLTM Tincep 2 di Kabupaten Minahasa										
					PLTM Tincep 3 di Kabupaten Minahasa										
					PLTM Tincep 4 di Kabupaten Minahasa										
					PLTM Tombolango di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					PLTM Totabuan 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTM Totabuan 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTM Totabuan I di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTM Totabuan II di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTM Totabuan IV di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTM Totabuan V di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTM Ulunseliang II di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					PLTM Woran di Kabupaten Minahasa										
					PLTM Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara										
					PLTM Bumbung										
					PLTM Sena 1 dan 2										
					PLTMG Minahasa di Kabupaten Minahasa										
					PLTMG Tahuna I di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					PLTMG Tahuna 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					PLTMG Tahuna 3 di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					PLTMG Sulbagut Tersebar di Sulawesi Utara										
					PLTMH Anado di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTMH Bilalang di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTMH Dominanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTMH Kilometer Tiga di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTMH Lobong 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTMH Makalu di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTMH Maulit di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTMH Milangodaa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTMH Milangodaa I di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTMH Mokobang di Kabupaten Minahasa Selatan										
					PLTMH Mokbog di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					PLTMH Morea di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTMH Pilolahungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTMH Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTMH Sinandaka di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					PLTMH Tabahe di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTMH Tara-Tara Kota Tomohon										
					PLTMH Tincep 1 di Kabupaten Minahasa										
					PLTMH Tincep 4 di Kabupaten Minahasa										
					PLTMH Tinoor Kota Tomohon										
					PLTMH Totabuan III di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					PLTMH Wisu di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTMH Wongkai di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					PLTMH Worang di Kabupaten Minahasa										
					PLTP Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTP Bitung Kota Bitung										
					PLTP Kaleosan Kakaset di Kabupaten Minahasa Utara										
					PLTP Lahendong Small Scale Binary										
					PLTP Lahendong #9										
					PLTP Lahendong BU #4										
					PLTP Lahendong LP										
					PLTP Lahendong 7 Kota Tomohon										
					PLTP Sulbagut (Kuato Tersebar) Provinsi Sulawesi Utara										

					PLTP Klabat Winenu Minahasa Utara dan Bitung di Kabupaten Minahasa Utara												
					PLTP Kotamobagu 2 di Kabupaten Bolaang Mongondow												
					PLTP Kotamobagu 3 di Kabupaten Bolaang Mongondow												
					PLTP Kotamobagu 4 di Kabupaten Bolaang Mongondow												
					PLTP Kotamobagu 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow												
					PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara												
					PLTS Tomohon Timur Kota Tomohon												
					PLTS + Baterai Provinsi Sulawesi Utara												
					PLTS Bitung Kota Bitung												
					PLTS Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTS Lamanggo di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					PLTS Marore II di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					PLTS Nusa Tabukan												
					PLTS Kabaruan												
					PLTS Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTS Nanusa												
					PLTS Beo												
					PLTS Pulau Manado Tua Kota Manado												
					PLTS Pulau Siladen Kota Manado												
					PLTS Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					PLTS Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					PLTS Terapung Danau Bunong di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur												
					PLTS Terapung Danau Iloloi di Kabupaten Minahasa Selatan												
					PLTS Terapung Danau Linow Kota Tomohon												
					PLTS Terapung Danau Luah Bulilin di Kabupaten Minahasa Tenggara												
					PLTS Terapung Danau Pononotokan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur												
					PLTS Terapung Danau Tabang Tabakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur												
					PLTS Terapung Danau Tondano di Kabupaten Minahasa												
					PLTS Terapung Mooat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur												
					PLTS Tomohon Timur Kota Tomohon												
					PLTS Lisdes Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara												
					PLTS + BESS Isolated Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara												
					PLTS + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara												
					PLTS + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan di Provinsi Sulawesi Utara												
					PLTS + BESS Dedieselisasi Tersebar di Provinsi Sulawesi Utara												
					PLTS + Batt Lolak												
					PLTS + Batt Kema												
					PLTS + Batt Likupang												
					PLTS Kuwil Kawangkoan												
					PLTSa Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara												
					PLTSa Sulbagut (Kuato Tersebar) Provinsi Sulawesi Utara												
					PLTU Sulut 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara												
					PLTU Isolated Talaud												
				b. Pengembangan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik	PLTP Kotamobagu di Kabupaten Bolaang Mongondow	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta										
					PLTD Kotamobagu di Kota Kotamobagu												
					PLTP Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur												
					PLTBm Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow												
					PLTU Sulut 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara												
					PLTP Lahendong 8 di Kabupaten Minahasa												
					PLTP Lahendong V di Kabupaten Minahasa												
					PLTP Lahendong VI di Kabupaten Minahasa												
					PLTP Lahendong 7 di Kabupaten Minahasa												
					PLTU Amurang I di Kabupaten Minahasa Selatan												
					PLTU Amurang II di Kabupaten Minahasa Selatan												
					PLTMG MVPP Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan												
					PLTD Lopana di Kabupaten Minahasa Selatan												
					PLTP Lahendong I dan II di Kota Tomohon												
					PLTP Lahendong III dan IV di Kota Tomohon												
					PLTP Tomohon di Kota Tomohon												
					PLTA Tonsealama di Kabupaten Minahasa												
					PLTA Tanggari 1 di Kabupaten Minahasa Utara												
					PLTP Tanggari di Kabupaten Minahasa Utara												
					PLTA Tanggari 2 di Kabupaten Minahasa Utara												
					PLTA/M Sulbagut												
					PLTA/M Tahuna												
					PLTD Sulbagut												
					PLTD Talaud												
					PLTD Isolated tersebar daerah Manado												
					PLTD Isolated tersebar daerah Tahuna												
					PLTU Sulut 3 di Kabupaten Minahasa Utara												
					PLTD Papusungan di Kota Bitung												
					PLT Energi Laut Bitung Wilayah Laut												
					PLTD Bitung di Kota Bitung												
					PLTD Pulau Bunaken di Kota Manado												
					PLTS Bunaken di Kota Manado												
					PLTD Pulau Siladen di Kota Manado												
					PLTD Pulau Manado Tua di Kota Manado												
					PLTS Likupang di Kabupaten Minahasa Utara												
					PLTD Mantehage di Kabupaten Minahasa Utara												
					PLTD Gangga di Kabupaten Minahasa Utara												
					PLTD Nain di Kabupaten Minahasa Utara												
					PLTD Bangka di Kabupaten Minahasa Utara												
					PLTD Talise di Kabupaten Minahasa Utara												
					PLTD Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					PLTD Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					PLTS Pahepa di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					PLTS Tapile di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					PLTS Buhias di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					PLTD Ondong di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					PLTD Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					PLTS Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					PLTD Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					PLTB Malampegeu di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					PLTD Pokol di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					PLTD Lesabe di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					PLTD Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					PLTS Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					PLTD Bengketang di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					PLTD Nanodakele di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					PLTD Bukide di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					PLTD Mangaran di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTD Lirung di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTD Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTD Tarun di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTU Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTD Karakelang/Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTD Dapalan di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTD Essang di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTD Gemeh di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTD Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTD Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTD Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					PLTS Marore I di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					PLTD Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTS Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTD Mangas di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTS Mangas di Kabupaten Kepulauan Talaud												
					PLTM Sulbagut												
					PLTMH Sulbagut												
					PLTP Sulbagut												
					PLTS Sulbagut												

			PLTS Isolated tersebar daerah Manado									
			PLTS Isolated tersebar daerah Tahuna									
			PLTU Sulbagut									
		c. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan										
		1) Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	PLTD Lisdes Pulau Babi di Kabupaten Minahasa Tenggara	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta							
		2) Penyusunan DED Pembangunan	PLTD Lisdes Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Batunderang di Kabupaten Minahasa Utara									
			PLTD Lisdes Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Beeng Darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Beeng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Bunaken di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Dakupang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Gangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Gunatin di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Karatung di Kabupaten Minahasa Tenggara									
			PLTD Lisdes Pulau Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Kawio Kota Manado									
			PLTD Lisdes Pulau Kembolong Kota Bitung									
			PLTD Lisdes Pulau Kinabuhutan di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Lembeh di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa Utara									
			PLTD Lisdes Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
			PLTD Lisdes Pulau Mahengetang di Kabupaten Kepulauan Talaud									
			PLTD Lisdes Pulau Mahumu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Talaud									
			PLTD Lisdes Pulau Manado Tua di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Mantehage di Kabupaten Kepulauan Talaud									
			PLTD Lisdes Pulau Manumpitaeng di Kabupaten Kepulauan Talaud									
			PLTD Lisdes Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Nain Besar di Kabupaten Minahasa Utara									
			PLTD Lisdes Pulau Nain Kecil Kota Bitung									
			PLTD Lisdes Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Salengkere di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
			PLTD Lisdes Pulau Salibabu Kota Manado									
			PLTD Lisdes Pulau Sambayang Napo di Kabupaten Minahasa Utara									
			PLTD Lisdes Pulau Sanggahahang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
			PLTD Lisdes Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud									
			PLTD Lisdes Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara									
			PLTD Lisdes Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara									
			PLTD Lisdes Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
			PLTD Lisdes Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
			PLTD Lisdes Pulau Tentumbanao Marulung di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang									
			PLTD Lisdes Pulau Tolengbara di Kabupaten Bolaang Mongondow									
			PLTD Lisdes Pulau Tudunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan									
			PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Kawaluso di Kabupaten Kepulauan									
			PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau									
			PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Mantehage di Kabupaten Minahasa Utara									
			PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud									
		3) Penetapan Lokasi Pembangunan	PLTD Lisdes Pulau Babi di Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi, APBD	DLH Provinsi, Kantah							
		4) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	PLTD Lisdes Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten/Kota,	Kabupaten/Kota,							
		5) Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	PLTD Lisdes Pulau Batunderang di Kabupaten Minahasa Utara	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta							
			PLTD Lisdes Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Beeng Darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Beeng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Bunaken di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Dakupang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Gangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Gunatin di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Karatung di Kabupaten Minahasa Tenggara									
			PLTD Lisdes Pulau Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Kawio Kota Manado									
			PLTD Lisdes Pulau Kembolong Kota Bitung									
			PLTD Lisdes Pulau Kinabuhutan di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Lembeh di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa Utara									
			PLTD Lisdes Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
			PLTD Lisdes Pulau Mahengetang di Kabupaten Kepulauan Talaud									
			PLTD Lisdes Pulau Mahumu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Talaud									
			PLTD Lisdes Pulau Manado Tua di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Mantehage di Kabupaten Kepulauan Talaud									
			PLTD Lisdes Pulau Manumpitaeng di Kabupaten Kepulauan Talaud									
			PLTD Lisdes Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Nain Besar di Kabupaten Minahasa Utara									
			PLTD Lisdes Pulau Nain Kecil Kota Bitung									
			PLTD Lisdes Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Salengkere di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
			PLTD Lisdes Pulau Salibabu Kota Manado									
			PLTD Lisdes Pulau Sambayang Napo di Kabupaten Minahasa Utara									
			PLTD Lisdes Pulau Sanggahahang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
			PLTD Lisdes Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud									
			PLTD Lisdes Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara									
			PLTD Lisdes Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara									
			PLTD Lisdes Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			PLTD Lisdes Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									

| | | |

		PLTD Lisdes Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		PLTD Lisdes Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud										
		PLTD Lisdes Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara										
		PLTD Lisdes Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara										
		PLTD Lisdes Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		PLTD Lisdes Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		PLTD Lisdes Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
		PLTD Lisdes Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
		PLTD Lisdes Pulau Tentumbanao Maruhing di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang										
		PLTD Lisdes Pulau Tolengbara di Kabupaten Bolaang Mongondow										
		PLTD Lisdes Pulau Tudunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan										
		PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Kawahuso di Kabupaten Kepulauan										
		PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Kawio di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau										
		PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Mantehage di Kabupaten Minahasa Utara										
		PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		PLTS Off Grid Kawasan Perbatasan Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud										
3.2.2	**Perwujudan Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya**											
3.2.2.1	**Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem**											
a. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik												
1) Penyusunan Feasibility Study Pembangunan		Pemindahan SUTT Likupang-Bitung akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta								
		SKTT Mapanget - Sario di Kota Manado										
2) Penyusunan DED Pembangunan		SUTT Belang - Tutuyan di Kabupaten Minahasa Tenggara , Kabupaten Bolaang										
		SUTT Kema (PLTU Sulut 3) - Belang di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa										
		SUTT Tanjung Merah - Bitung di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung										
		SUTT Tutuyan - Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten										
		SUTT Molibagu – Botupingge di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Lolak - Kawasan Industri Boalangan Mongondow (KIMO) di Kabupaten Bolaang										
		PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar 30 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar 40 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar 50 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 15 MW - GIEksisting/New Sistem Sulbagut										
		PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 60 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 17 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan 20 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan 20 MW - GI Eksisting/New										
		PLTA Poigar-2 - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di Kabupaten Bolaang										
		SUTT PLTA Sawangan – Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara										
		PLTA Sulbagut (Kuota) Tersebar 30 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 20 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTP Kotamobagu 1 – Otam di Kabupaten Bolaang Mongondow										
		PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar 65 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 20 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTA Sulbagut (Kuota) Tersebar 100 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
3) Penetapan Lokasi Pembangunan		Pemindahan SUTT Likupang-Bitung akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten	APBD Provinsi,	DLH Provinsi,								
4) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup		SKTT Mapanget - Sario di Kota Manado	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta								
		SUTT Belang - Tutuyan di Kabupaten Minahasa Tenggara , Kabupaten Bolaang										
		SUTT Kema (PLTU Sulut 3) - Belang di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa										
		SUTT Tanjung Merah - Bitung di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung										
		SUTT Tutuyan - Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten										
		SUTT Molibagu – Botupingge di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Lolak - Kawasan Industri Boalangan Mongondow (KIMO) di Kabupaten Bolaang										
		PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar 30 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar 40 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar 50 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 15 MW - GIEksisting/New Sistem Sulbagut										
		PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 60 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 17 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan 20 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan 20 MW - GI Eksisting/New										
		PLTA Poigar-2 - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di Kabupaten Bolaang										
		SUTT PLTA Sawangan – Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara										
		PLTA Sulbagut (Kuota) Tersebar 30 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 20 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTP Kotamobagu 1 – Otam di Kabupaten Bolaang Mongondow										
		PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar 65 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 20 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTA Sulbagut (Kuota) Tersebar 100 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
5) Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan		Pemindahan SUTT Likupang-Bitung akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten	APBD	Kantah								
6) Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan Pemindahan		SKTT Mapanget - Sario di Kota Manado	Kabupaten/Kota,	Kabupaten/Kota,								
		SUTT Belang - Tutuyan di Kabupaten Minahasa Tenggara , Kabupaten Bolaang	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta								
		SUTT Kema (PLTU Sulut 3) - Belang di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa										
		SUTT Tanjung Merah - Bitung di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung										
		SUTT Tutuyan - Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten										
		Kema (PLTU Sulut 3) – Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten										
		SUTT Molibagu – Botupingge di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Lolak - Kawasan Industri Boalangan Mongondow (KIMO) di Kabupaten Bolaang										
		PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar 30 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar 40 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar 50 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 15 MW - GIEksisting/New Sistem Sulbagut										
		PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 60 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 17 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan 20 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan 20 MW - GI Eksisting/New										
		PLTA Poigar-2 - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di Kabupaten Bolaang										
		SUTT PLTA Sawangan – Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara										
		PLTA Sulbagut (Kuota) Tersebar 30 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 20 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTP Kotamobagu 1 – Otam di Kabupaten Bolaang Mongondow										
		PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar 65 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 20 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTA Sulbagut (Kuota) Tersebar 100 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
7) Pembangunan		Pemindahan SUTT Likupang-Bitung akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta								
		SKTT Mapanget - Sario di Kota Manado										
		SUTT Belang - Tutuyan di Kabupaten Minahasa Tenggara , Kabupaten Bolaang										
		SUTT Kema (PLTU Sulut 3) - Belang di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa										
		SUTT Tanjung Merah - Bitung di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung										
		SUTT Tutuyan - Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten										
		Kema (PLTU Sulut 3) – Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten										
		SUTT Molibagu – Botupingge di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Lolak - Kawasan Industri Boalangan Mongondow (KIMO) di Kabupaten Bolaang										
		PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar 30 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar 40 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar 50 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 15 MW - GIEksisting/New Sistem Sulbagut										
		PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 60 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 17 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTBm Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan 20 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTB + BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar Tambahan 20 MW - GI Eksisting/New										
		PLTA Poigar-2 - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di Kabupaten Bolaang										
		SUTT PLTA Sawangan – Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara										
		PLTA Sulbagut (Kuota) Tersebar 30 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 20 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTP Kotamobagu 1 – Otam di Kabupaten Bolaang Mongondow										
		PLTP Sulbagut (Kuota) Tersebar 65 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
		PLTS+BESS Sulbagut (Kuota) Tersebar 20 MW - GI Eksisting/New Sistem										
		PLTA Sulbagut (Kuota) Tersebar 100 MW - GI Eksisting/New Sistem Sulbagut di										
b. Pengembangan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik		SKTT Sario - Teling di Kota Manado	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta								
		SUTT GI Ranomuut – GI Teling di Kota Manado										

		SUTT Isimu - Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
		SUTT Kawangkoan - Lopana di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa									
		SUTT Kawangkoan - PLTP Lahendong V & VI di Kabupaten Minahasa									
		SUTT Likupang - Bitung di Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung									
		SUTT Likupang - Paniki di Kabupaten Minahasa Utara									
		SUTT Likupang - Pandu di Kabupaten Minahasa Utara									
		SUTT Lolak - Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang									
		SUTT Lopana - GIS Teling Jaringan di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa									
		SUTT Lopana - Otam di Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang									
		SUTT Otam - Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow									
		SUTT Otam - Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Kotamobagu									
		SUTT Otam - Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow									
		SUTT PLTA Tangsari 1 - Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara									
		SUTT PLTA Tanggari 2 - Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara									
		SUTT PLTMG Minahasa - Likupang di Kabupaten Minahasa Utara									
		SUTT PLTP Lahendong - Kawangkoan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon									
		SUTT PLTP Lahendong - Tomohon di Kota Tomohon									
		SUTT PLTU Amurang - Lopana di Kabupaten Minahasa Selatan									
		SUTT PLTU Sulut 1 - Incomer Double Phi (Lolak - Boroko) di Kabupaten Bolaang									
		SUTT PLTU Sulut 3 - Tanjung Merah									
		SUTT Sawangan - Bitung di Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara									
		SUTT Sawangan - Ranomut di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado									
		SUTT Tanjung Merah - Paniki di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung									
		SUTT Teling - Paniki di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota									
		SUTT Tomohon – Tasik Ria di Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa									
		SUTT Tomohon - Teling di Kabupaten Minahasa, Kota Manado, dan Kota Tomohon									
		SUTT Tonsealama - Sawangan di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa									
		SUTT Tonsealama - Tomohon di Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon									
		SUTT PLTA TNSLM - TNSLM									
c. Pembangunan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik											
1)	Penyusunan *Feasibility Study* Pembangunan	GH Bandara - GI Paniki di Kabupaten Minahasa Utara	APDB Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, BUMN/ Swasta	DLH Provinsi, Kantah Kabupaten/Kota, BUMN/Swasta							
2)	Penyusunan DED Pembangunan	SKTM GH Sukur - GI Paniki di Kabupaten Minahasa Utara									
		SKTT Mapanget - Sario di Kota Manado									
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	GH Bandara - GI Paniki di Kabupaten Minahasa Utara									
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	SKTM GH Sukur - GI Paniki di Kabupaten Minahasa Utara									
5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	SKTT Mapanget – Sario di Kota Manado									
6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	GH Bandara - GI Paniki di Kabupaten Minahasa Utara									
7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	SKTM GH Sukur - GI Paniki di Kabupaten Minahasa Utara									
		SKTT Mapanget - Sario di Kota Manado									
8)	Pembangunan	GH Bandara - GI Paniki di Kabupaten Minahasa Utara									
		SKTM GH Sukur - GI Paniki di Kabupaten Minahasa Utara									
		SKTT Mapanget - Sario di Kota Manado									
d. Pengembangan Sarana dan prasarana Jaringan Distribusi Tenaga Listrik		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kabupaten Kepulauan Sangihe di	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta							
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kabupaten Kepulauan Talaud di									
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kabupaten Bolaang Mongondow di									
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kabupaten Kepulauan Siau									
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kabupaten Minahasa di Kabupaten									
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kabupaten Minahasa Selatan di									
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kabupaten Minahasa Tenggara di									
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kabupaten Minahasa Utara di									
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kota Bitung di Kota Bitung									
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kota Kotamobagu di Kota									
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kota Manado di Kota Manado									
		Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Kota Tomohon di Kota Tomohon									
		SKTM GH Bandara – GI Paniki di Kota Manado									
		SKTM GIS Sario – Jalan Pierre Tendean di Kota Manado									
		SKTM GIS Teling – GH Gubernuran di Kota Manado									
3.2.2.2	**Perwujudan Gardu Listrik**										
a. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik											
1)	Penyusunan *Feasibility Study* Pembangunan	GI Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta							
2)	Penyusunan DED Pembangunan	GI Bitung Baru New di Kota Bitung									
		GI Lembeh di Kota Bitung									
		GI Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		GI Kema (PLTU Sulut 3) di Kabupaten Minahasa Utara									
		GI Likupang 2 LB arah Bitung Baru									
		GI Likupang 2 LB arah PLTMG Minahasa									
		GI Molibagu 2 LB arah Botupingge									
		GI Molibagu 2 LB arah Tutuyan									
		GI Tutuyan 2 LB arah Belang									
		GI Tutuyan 2 LB arah Molibagu									
		GI Lolak Ext 2 LB arah Kawasan Industri Boalangan Mongondow (KIMO)									
		GI Sawangan 2 LB arah PLTA Sawangan									
		GIS Sario di Kota Manado *Ext*									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Manado									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Bitung									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Tomohon									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Kotamobagu									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Selatan									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Sitaro									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sitaro									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Talaud									
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	GI Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		GI Bitung Baru New di Kota Bitung									
		GI Lembeh di Kota Bitung									
		GI Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		GI Kema (PLTU Sulut 3) di Kabupaten Minahasa Utara									
		GI Likupang 2 LB arah Bitung Baru									
		GI Likupang 2 LB arah PLTMG Minahasa									
		GI Molibagu 2 LB arah Botupingge									
		GI Molibagu 2 LB arah Tutuyan									
		GI Tutuyan 2 LB arah Belang									
		GI Tutuyan 2 LB arah Molibagu									
		GI Lolak Ext 2 LB arah Kawasan Industri Boalangan Mongondow (KIMO)									
		GI Sawangan 2 LB arah PLTA Sawangan									
		GI Otam 2 LB arah PLTP Kotamobagu 1									
		GIS Sario di Kota Manado *Ext*									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Manado									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Bitung									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Tomohon									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Kotamobagu									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Selatan									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Sitaro									

		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sitaro									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Talaud									
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	GI Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	DLH Provinsi, DLH Kabupaten/Kota							
		GI Bitung Baru New di Kota Bitung									
		GI Lembeh di Kota Bitung									
		GI Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		GI Kema (PLTU Sulut 3) di Kabupaten Minahasa Utara									
		GI Likupang 2 LB arah Bitung Baru									
		GI Likupang 2 LB arah PLTMG Minahasa									
		GI Molibagu 2 LB arah Botupingge									
		GI Molibagu 2 LB arah Tutuyan									
		GI Tutuyan 2 LB arah Belang									
		GI Tutuyan 2 LB arah Molibagu									
		GI Lolak Ext 2 LB arah Kawasan Industri Boalangan Mongondow (KIMO)									
		GI Sawangan 2 LB arah PLTA Sawangan									
		GI Otam 2 LB arah PLTP Kotamobagu 1									
		GIS Sario di Kota Manado *Ext*									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Tomohon									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Kotamobagu									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Selatan									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Sitaro									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sitaro									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Talaud									
5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	GI Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi, APBD	Dinas PUPR Provinsi,							
		GI Bitung Baru New di Kota Bitung									
		GI Lembeh di Kota Bitung									
		GI Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		GI Kema (PLTU Sulut 3) di Kabupaten Minahasa Utara									
		GI Likupang 2 LB arah Bitung Baru									
		GI Likupang 2 LB arah PLTMG Minahasa									
		GI Molibagu 2 LB arah Botupingge									
		GI Molibagu 2 LB arah Tutuyan									
		GI Tutuyan 2 LB arah Belang									
		GI Tutuyan 2 LB arah Molibagu									
		GI Lolak Ext 2 LB arah Kawasan Industri Boalangan Mongondow (KIMO)									
		GI Sawangan 2 LB arah PLTA Sawangan									
		GI Otam 2 LB arah PLTP Kotamobagu 1									
		GIS Sario di Kota Manado *Ext*									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Tomohon									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Kotamobagu									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Selatan									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Sitaro									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sitaro									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Talaud									
6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	GI Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Kabupaten Kota, BUMN/Swasta	Kantah Kabupaten/Kota, BUMN/Swasta							
7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	GI Bitung Baru New di Kota Bitung									
		GI Lembeh di Kota Bitung									
		GI Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		GI Kema (PLTU Sulut 3) di Kabupaten Minahasa Utara									
		GI Likupang 2 LB arah Bitung Baru									
		GI Likupang 2 LB arah PLTMG Minahasa									
		GI Molibagu 2 LB arah Botupingge									
		GI Molibagu 2 LB arah Tutuyan									
		GI Tutuyan 2 LB arah Belang									
		GI Tutuyan 2 LB arah Molibagu									
		GI Lolak Ext 2 LB arah Kawasan Industri Boalangan Mongondow (KIMO)									
		GI Sawangan 2 LB arah PLTA Sawangan									
		GI Otam 2 LB arah PLTP Kotamobagu 1									
		GIS Sario di Kota Manado *Ext*									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Selatan									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Sitaro									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sitaro									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Talaud									
8)	Pembangunan	GI Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta							
		GI Bitung Baru New di Kota Bitung									
		GI Lembeh di Kota Bitung									
		GI Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		GI Kema (PLTU Sulut 3) di Kabupaten Minahasa Utara									
		GI Likupang 2 LB arah Bitung Baru									
		GI Likupang 2 LB arah PLTMG Minahasa									
		GI Molibagu 2 LB arah Botupingge									
		GI Molibagu 2 LB arah Tutuyan									
		GI Tutuyan 2 LB arah Belang									
		GI Tutuyan 2 LB arah Molibagu									
		GI Lolak Ext 2 LB arah Kawasan Industri Boalangan Mongondow (KIMO)									
		GI Sawangan 2 LB arah PLTA Sawangan									
		GI Otam 2 LB arah PLTP Kotamobagu 1									
		GIS Sario di Kota Manado *Ext*									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Manado									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Bitung									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Tomohon									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kota Kotamobagu									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Selatan									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Minahasa Tenggara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Sitaro									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Sitaro									
		Gardu distribusi yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Talaud									
b. Pengembangan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik											

					GI Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan	BUMN/ Swasta	BUMN/Swasta							
					GI Bitung di Kota Bitung									
					GI Bintauna (*Town Feeder*) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					GI Buroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					GI Kawangkoan I di Kabupaten Minahasa									
					GI Kawangkoan II di Kabupaten Minahasa									
					GI Kawangkoan - PLTP Lahendong (1,2) 2									
					GI Likupang di Kabupaten Minahasa Utara									
					GI Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					GI Lopana di Kabupaten Minahasa Selatan									
					GI Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					GI Otam di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					GI Pandu di Kabupaten Minahasa Utara									
					GI Paniki di Kabupaten Minahasa Utara									
					GI Ranomut di Kota Manado									
					GI Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara									
					GI Tanjung Merah di Kota Bitung									
					GI Tasik Ria di Kabupaten Minahasa									
					GI Teling di Kota Manado									
					GI Tomohon di Kota Tomohon									
					GI Tonsealama di Kabupaten Minahasa									
					GI Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					GI PLTU Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan									
					GIS Sario di Kota Manado									
					GIS Sinsingon di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					GIS Teling di Kota Manado									
4	**Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi**													
	4.1	**Perwujudan Jaringan Tetap**												
		a. Pembangunan Jaringan Tetap												
		1)	Penyusunan *Feasibility Study* Pembangunan		Backbone Kabupaten Minahasa di Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian Komunikasi dan Digital							
		2)	Penyusunan DED Pembangunan		Backbone Kota Manado di Kota Manado									
					Backbone Kota Tomohon di Kota Tomohon									
		3)	Penetapan Lokasi Pembangunan		Backbone Kabupaten Minahasa di Kabupaten Minahasa									
		4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup		Backbone Kota Manado di Kota Manado									
					Backbone Kota Tomohon di Kota Tomohon									
		5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan		Backbone Kabupaten Minahasa di Kabupaten Minahasa									
		6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan		Backbone Kota Manado di Kota Manado									
					Backbone Kota Tomohon di Kota Tomohon									
		7)	Pembangunan		Backbone Kabupaten Minahasa di Kabupaten Minahasa									
					Backbone Kota Manado di Kota Manado									
					Backbone Kota Tomohon di Kota Tomohon									
		b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jaringan Tetap												
					Backbone Kabupaten Bolaang Mongondow di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian Komunikasi dan Digital							
					Backbone Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Kabupaten Bolaang									
					Backbone Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Kabupaten Bolaang									
					Backbone Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Kabupaten Bolaang									
					Backbone Kabupaten Kepulauan Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Backbone Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Kabupaten Kepulauan									
					Backbone Kabupaten Kepulauan Talaud di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Backbone Kabupaten Minahasa di Kabupaten Minahasa									
					Backbone Kabupaten Minahasa Selatan di Kabupaten Minahasa Selatan									
					Backbone Kabupaten Minahasa Tenggara di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Backbone Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
					Backbone Kota Bitung di Kota Bitung									
					Backbone Kota Kotamobagu di Kota di Kotamobagu									
					Backbone Kota Manado di Kota Manado									
					Backbone Kota Tomohon di Kota Tomohon									
					Alur Kabel Bawah Laut Luwuk-Tutuyan;									
					Alur Kabel Bawah Laut Manado (*Landing Station*) - Ondong Siau;									
					Alur Kabel Bawah Laut Ondong Siau-Tahuna;									
					Alur Kabel Bawah Laut Kauditan-Davao;									
					Alur Kabel Bawah Laut Kauditan-Sofifi;									
					Alur Kabel Bawah Laut Melonguane-Morotai;									
					Alur Kabel Bawah Laut Tahuna-Melonguane;									
					Alur Kabel Bawah Laut Kauditan-Ondong Siau									
					Alur Kabel Bawah Laut WP-Makassar-Manado (*Landing Station)*									
					Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL)-Bifrost									
	4.2	**Perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap**												
		a. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Tetap												
		1)	Penyusunan *Feasibility Study* Pembangunan		Landing Station Manado di Kota Manado	APBN	Kementerian Komunikasi dan Digital							
		2)	Penyusunan DED Pembangunan		Sentral Telepon Otomat setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara									
		3)	Penetapan Lokasi Pembangunan		Landing Station Manado di Kota Manado									
		4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup		Sentral Telepon Otomat setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara									
		5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan											
		6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan		Landing Station Manado di Kota Manado									
		7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan		Sentral Telepon Otomat setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara									
		8)	Pembangunan		Landing Station Manado di Kota Manado									
					Sentral Telepon Otomat setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara									
		b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jaringan Tetap												
					Beach Manhole (BMH) dan Terminal Station Kauditan di Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian Komunikasi dan Digital							
					Beach Manhole (BMH) dan Terminal Station Manado di Kota Manado									
					Beach Manhole (BMH) dan Terminal Station Melonguane di Kabupaten Kepualaun									
					Beach Manhole (BMH) dan Terminal Station Ondong di Kabupaten Kepulauan Siau									
					Beach Manhole (BMH) dan Terminal Station Siau di Kabupaten Kepulauan Siau									
					Beach Manhole (BMH) dan Terminal Station Tahuna di Kabupaten Kepulauan									
					Beach Manhole (BMH) dan Terminal Station Tutuyan di Kabupaten Kepualaun									
					BMH Kota Manado di Kabupaten Minahasa									
					Sentral Telepon Otomat Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan									
					Sentral Telepon Otomat Bahu di Kota Manado									
					Sentral Telepon Otomat Langowan di Kabupaten Minahasa									
					Sentral Telepon Otomat Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang									
					Sentral Telepon Otomat Tondano di Kabupaten Minahasa									
					Sentral Telepon Otomat Ulu Siau di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
	4.3	**Perwujudan Jaringan Bergerak**												
		a.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		Satelit Multi Fungsi di Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian Komunikasi dan Digital							
					Stasiun Bumi Beo di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Stasiun Bumi Dendengan di Kota Manado									
					Stasiun Bumi Mahakeret Timur di Kota Manado									
					Stasiun Bumi Bakamla Bitung di Kota Bitung									
					Stasiun Bumi Tagulandang di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro									
					Stasiun Bumi Tahuna di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Stasiun Bumi Ulu Siau di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro									
5	**Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air**													
	5.1	**Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi**												
		a.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		Jaringan Irigasi Dataran Kotamobagu Melintas Di Bolaang Mongondow Timur Dan Kota Kotamobagu;	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
					Jaringan Irigasi Kosinggolan Melintas Di Kabupaten Bolaang Mongondow;	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
					Jaringan Irigasi Tongat Melintas Di Kabupaten Bolaang Mongondow;	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
					Jaringan Irigasi Sangkub Melintas Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;	APBN	Kementerian PU							
					Jaringan Irigasi Premium Lolak Melintas Di Kabupaten Bolaang Mongondow;	APBN	Kementerian PU							
					Jaringan Irigasi Ayong Bolangat Maelang Melintas Di Kabupaten Bolaang	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
					Jaringan Irigasi Buko Tuntung Melintas Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
					Jaringan Irigasi Buyat Melintas Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dan	APBN	Kementerian PU							
					Jaringan Irigasi Lahendong Melintas Di Kabupaten Minahasa Tenggara;	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
					Jaringan Irigasi Lolak, Pinogaluman, Monanow Melintas Di Kabupaten Bolaang	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
					Jaringan Irigasi Moayat-Pawak Melintas Di Kabupaten Bolaang Mongondow Dan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							

				Jaringan Irigasi Noongan Melintas Di Kabupaten Minahasa;	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Jaringan Irigasi Pusian Molong Melintas Di Kabupaten Bolaang Mongondow;	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Jaringan Irigasi Ranombolay Melintas Di Kabupaten Minahasa Tenggara;	APBN, APBD	Kementerian PU, Dinas								
				Jaringan Irigasi Ranoyapo Melintas Di Kabupaten Minahasa Selatan;	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Jaringan Irigasi Talawaan Meras Melintas Di Kabupaten Minahasa Utara; Dan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Jaringan Irigasi Tombolikat Sita Melintas Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.	APBN	Kementerian PU								
				Jaringan Irigasi Dumoga untuk Pengembangan Food Estate di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian PU, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
	5.2	**Perwujudan Sistem Pengendalian Banjir**												
		5.2.1	**Perwujudan Jaringan Pengendalian Banjir**											
		a. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir												
		1)	Penyusunan *Feasibility Study* Pembangunan	Tanggul Sungai Kayuwale di Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian PU								
		2)	Penyusunan DED Pembangunan	Tanggul Sungai Awuwangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Bailang di Kota Manado										
				Tanggul Sungai Bulo di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kalasey di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kaweruan di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kawiley Wangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kawis di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kayuwatu Wangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Malalayang di Kabupaten Minahasa, Kota Manado										
				Tanggul Sungai Manembo di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Ngaralewo di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Nimanga di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Ranoilokon di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Ranowangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Sario di Kota Manado, Kabupaten Minahsa										
				Tanggul Sungai Sawangan di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Sindoran di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Tambala di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Tateli di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Temboan di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Tikala di Kota Manado										
				Tanggul Sungai Tondano di Kota Manado										
				Tanggul Sungai Toulour di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Watulaney di Kabupaten Minahasa										
		3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Tanggul Sungai Kayuwale di Kabupaten Minahasa										
		4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Tanggul Sungai Awuwangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Bailang di Kota Manado										
				Tanggul Sungai Bulo di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kalasey di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kaweruan di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kawiley Wangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kawis di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kayuwatu Wangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Malalayang di Kabupaten Minahasa, Kota Manado										
				Tanggul Sungai Manembo di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Ngaralewo di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Nimanga di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Ranoilokon di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Ranowangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Sario di Kota Manado, Kabupaten Minahsa										
				Tanggul Sungai Sawangan di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Sindoran di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Tambala di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Tateli di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Temboan di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Tikala di Kota Manado										
				Tanggul Sungai Tondano di Kota Manado										
				Tanggul Sungai Toulour di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Watulaney di Kabupaten Minahasa										
		5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Tanggul Sungai Kayuwale di Kabupaten Minahasa										
		6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Tanggul Sungai Awuwangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Bailang di Kota Manado										
				Tanggul Sungai Bulo di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kalasey di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kaweruan di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kawiley Wangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kawis di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kayuwatu Wangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Malalayang di Kabupaten Minahasa, Kota Manado										
				Tanggul Sungai Manembo di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Ngaralewo di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Nimanga di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Ranoilokon di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Ranowangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Sario di Kota Manado, Kabupaten Minahsa										
				Tanggul Sungai Sawangan di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Sindoran di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Tambala di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Tateli di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Temboan di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Tikala di Kota Manado										
				Tanggul Sungai Tondano di Kota Manado										
				Tanggul Sungai Toulour di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Watulaney di Kabupaten Minahasa										
		7)	Pembangunan	Tanggul Sungai Kayuwale di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Awuwangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Bailang di Kota Manado										
				Tanggul Sungai Bulo di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kalasey di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kaweruan di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kawiley Wangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kawis di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Kayuwatu Wangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Malawu										
				Tanggul Sungai Malalayang di Kabupaten Minahasa, Kota Manado										
				Tanggul Sungai Manembo di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Ngaralewo di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Nimanga di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Ranoilokon di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Ranowangko di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Sario di Kota Manado, Kabupaten Minahsa										
				Tanggul Sungai Sawangan di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Sindoran di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Tambala di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Tateli di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Temboan di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Tikala di Kota Manado										
				Tanggul Sungai Tondano di Kota Manado										
				Tanggul Sungai Toulour di Kabupaten Minahasa										
				Tanggul Sungai Watulaney di Kabupaten Minahasa										
		b. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Sistem Pengendali Banjir Bronjong Sungai Lonsjow Desa Motongkad di Kabupaten										
				Sistem Pengendali Banjir Talud Sungai Kokapov Desa Molobog I di Kabupaten										
				Sistem Pengendali Banjir Talud Sungai Kokapov Desa Molobog II di Kabupaten										
				Sistem Pengendali Banjir Talud Sungai Lontup Desa Paret di Kabupaten Bolaang										

			Sistem Pengendali Banjir Talud Sungai Modayag II di Kabupaten Bolaang	APBN	Kementerian PU						
			Sistem Pengendali Banjir Talud Sungai Sinalogan di Kabupaten Bolaang Mongondow								
			Sistem Pengendali Banjir Tanggul Banjir Sungai Maen di Kabupaten Minahasa Utara								
			Tanggul Danau Tondano di Kota Manado								
			Tanggul Sungai Buyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur								
			Tanggul Sungai Tondano di Kota Manado								
		c. Pengembangan Tanggul Pantai dan Pengaman Pantai	Tanggul Pantai dan Pengaman Pantai Jetty Sungai Tondano di Kota Manado	APBN	Kementerian PU						
	5.2.2	**Perwujudan Bangunan Pengendalian Banjir**									
	a. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir										
	1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Bendungan Bendungan Kali Sario dan Kali Malalayang di Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian PU						
			Bendungan Sawangan di Kabupaten Minahasa								
			Bendungan Toraut-Kosinggolan								
			Bendungan Girian								
			Bendungan Abuang								
			Bendungan Dumoga								
			Bendungan Ranoyapo								
			Embung Bailang di Kota Manado								
			Kolam Retensi Karombasan di Kota Manado								
			Kolam Retensi/Embung Buatan Tingkulu di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sungai Maasing di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sugai Mahawu di Kota Manado								
			Pengaman Pantai Marore 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Pengaman Pantai Pasar Towo'e di Kabupaten Kepuluan Sangihe								
			Sabodam Gunung Lokon Kota Tomohon								
			Sabo Dam Gunung Marampit								
			Sabo Dam Gunung Ruang								
			Sabo Dam Gunung Soputan di Minahasa Tenggara								
			Pembangunan Pengaman Pantai Boroko di Bolaang Mongondoww Utara								
	2)	Penyusunan DED Pembangunan	Bendungan Kali di Kabupaten Minahasa								
			Bendungan Sawangan di Kabupaten Minahasa								
			Bendungan Girian								
			Embung Bailang di Kota Manado								
			Kolam Retensi Karombasan di Kota Manado								
			Kolam Retensi/Embung Buatan Tingkulu di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sungai Maasing di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sugai Mahawu di Kota Manado								
			Pengaman Pantai Pasar Towo'e di Kabupaten Kepuluan Sangihe								
			Pengaman Pantai Marore 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Sabodam Gunung Lokon Kota Tomohon								
			Pembangunan Pengaman Pantai Boroko di Bolaang Mongondoww Utara								
	3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Bendungan Kali di Kabupaten Minahasa								
			Bendungan Sawangan di Kabupaten Minahasa								
			Bendungan Girian								
			Embung Bailang di Kota Manado								
			Kolam Retensi Karombasan di Kota Manado								
			Kolam Retensi/Embung Buatan Tingkulu di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sungai Maasing di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sugai Mahawu di Kota Manado								
			Pengaman Pantai Pasar Towo'e di Kabupaten Kepuluan Sangihe								
			Pengaman Pantai Marore 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Sabodam Gunung Lokon Kota Tomohon								
			Pembangunan Pengaman Pantai Boroko di Bolaang Mongondoww Utara								
	4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Bendungan Kali di Kabupaten Minahasa	APBN, APBD	Kementerian PU, DLH						
			Bendungan Sawangan di Kabupaten Minahasa								
			Bendungan Girian								
			Embung Bailang di Kota Manado								
			Kolam Retensi Karombasan di Kota Manado								
			Kolam Retensi/Embung Buatan Tingkulu di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sungai Maasing di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sugai Mahawu di Kota Manado								
			Pengaman Pantai Pasar Towo'e di Kabupaten Kepuluan Sangihe								
			Pengaman Pantai Marore 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Sabodam Gunung Lokon Kota Tomohon								
			Pembangunan Pengaman Pantai Boroko di Bolaang Mongondoww Utara								
	5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Bendungan Kali di Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian PU						
			Bendungan Sawangan di Kabupaten Minahasa								
			Bendungan Girian								
			Embung Bailang di Kota Manado								
			Kolam Retensi Karombasan di Kota Manado								
			Kolam Retensi/Embung Buatan Tingkulu di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sungai Maasing di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sugai Mahawu di Kota Manado								
			Pengaman Pantai Pasar Towo'e di Kabupaten Kepuluan Sangihe								
			Pengaman Pantai Marore 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Sabodam Gunung Lokon Kota Tomohon								
			Pembangunan Pengaman Pantai Boroko di Bolaang Mongondoww Utara								
	6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Bendungan Kali di Kabupaten Minahasa	APBD	Kantah Kabupten/Kota						
			Bendungan Sawangan di Kabupaten Minahasa								
			Bendungan Girian								
			Embung Bailang di Kota Manado								
			Kolam Retensi Karombasan di Kota Manado								
			Kolam Retensi/Embung Buatan Tingkulu di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sungai Maasing di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sugai Mahawu di Kota Manado								
			Pengaman Pantai Pasar Towo'e di Kabupaten Kepuluan Sangihe								
			Pengaman Pantai Marore 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Sabodam Gunung Lokon Kota Tomohon								
			Pembangunan Pengaman Pantai Boroko di Bolaang Mongondoww Utara								
	7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Bendungan Kali di Kabupaten Minahasa	APBD	Kantah Kabupten/Kota						
			Bendungan Sawangan di Kabupaten Minahasa								
			Bendungan Girian								
			Embung Bailang di Kota Manado								
			Kolam Retensi Karombasan di Kota Manado								
			Kolam Retensi/Embung Buatan Tingkulu di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sungai Maasing di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sugai Mahawu di Kota Manado								
			Pengaman Pantai Pasar Towo'e di Kabupaten Kepuluan Sangihe								
			Pengaman Pantai Marore 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Sabodam Gunung Lokon Kota Tomohon								
			Pembangunan Pengaman Pantai Boroko di Bolaang Mongondoww Utara								
	8)	Pembangunan	Bendungan Kali di Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian PU						
			Bendungan Sawangan di Kabupaten Minahasa								
			Bendungan Girian								
			Embung Bailang di Kota Manado								
			Kolam Retensi Karombasan di Kota Manado								
			Kolam Retensi/Embung Buatan Tingkulu di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sungai Maasing di Kota Manado								
			Pengendali Banjir Sugai Mahawu di Kota Manado								
			Pengaman Pantai Pasar Towo'e di Kabupaten Kepuluan Sangihe								
			Pengaman Pantai Marore 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Sabodam Gunung Lokon Kota Tomohon								
			Sabo Dam Sungai moayat								
			Pembangunan Pengaman Pantai Boroko di Bolaang Mongondoww Utara								
			Pengaman Pantai Sampiro								
			Pengaman Pantai Langowan Selatan di Kabupaten Minahasa								
			Pengaman Pantai Kakas								
			Pengaman Pantai Pulau Marampit Kabupaten Kepulauan Talaud								
			Pengaman Pantai Pulau Bebalang dan Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Pengaman Pantai Kalasuge di Kabupaten Kepulauan Sangihe								
			Pengaman Pantai Pulau Beeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe								

					Pengaman Pantai Minaga										
					Pengaman Pantai Rap-Rap Arakan										
					Pengaman Pantai Kamenti										
					Pengaman Pantai Lolak										
					Pengaman Pantai Bolaang dan Pantai Ambang										
					Pengaman Pantai Pasir Panjang										
					Pengaman Pantai Batupinagut, Boroko, Kuala Utara di Kabupaten Mongondow Utara										
					Pengaman Pantai Bulawan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Pengaman Pantai Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Pengaman Pantai Jiko di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Pengaman Pantai Matabulu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Pengaman Pantai Desa Tumpaan Kabupaten Minahasa										
					Pengaman Pantai Modisi di Kabuapten Bolaang Mongondow Selatan										
					Pengaman Pantai Nusa Tabukan di Kabupayen Kepulauan Sangihe										
					Pengaman Pantai Likupang										
					Pengaman Pantai Tamako dan Manganitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Pengaman Pantai Naha										
					Pengaman Pantai Ondong										
					Pengaman Pantai Kecamatan Posigadan										
					Pengaman Pantai Desa Towoali										
					Pengaman Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Pengaman Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Pengaman Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Pengaman Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Pengaman Pantai Kabupaten Minahasa Selatan										
					Pengaman Pantai Kabupaten Minahasa										
					Pengaman Pantai Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Pengaman Pantai Kabupaten Minahasa Utara										
					Pengaman Pantai Kota Manado										
					Pengaman Pantai Kota Bitung										
					Pengaman Pantai Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pengaman Pantai Kabupaten Kepulauan Sitaro										
					Pengaman Pantai Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Pengaman Pantai Pulau-Pulau Terluar di Provinsi Sulawesi Utara										
			b. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Amurang di Kabupaten	APBN	Kementerian PU								
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Bakida di Kabupaten Bolaang										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Batuderang Metegehi di										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Bebalang Sapaeng di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Bentenan 1 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Bentenan 2 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Bentenan 3 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Bentenan Indah di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Bukit Tinggi di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Buko 1 di Kabupaten Bolaang										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Buko 2 di Kabupaten Bolaang										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Buku di Kabupaten Minahasa										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Dodepo 1 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Dodepo 2 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Inobonto di Kabupaten Bolaang										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Kalasuge di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Kamenti di Kabupaten Minahasa										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Lion di Kabupaten Bolaang										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Lungkap di Kabupaten Bolaang										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Luwoo di Kabupaten Bolaang										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Mamalia di Kabupaten Bolaang										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Marore di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Miangas 1 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Miangas 2 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Milangodaa di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Minanga di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Mokupa di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Molompar 1 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Molompar 2 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Molompar 3 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Pantai Rumbia di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Pinolosian 1 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Pinolosian 2 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Pinolosian 3 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Pinolosian Selatan di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Poigar di Kabupaten Bolaang										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Poopo di Kabupaten Minahasa										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Pulau Gangga 1 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Pulau Gangga 2 di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Pulau Kalama di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Pulau Kebarusan di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Pulau Miangas di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Pulau Para di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Pulau Pehe Ondong di										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Rap-rap dan Arakan di										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Rumbia di Kabupaten Minahasa										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Saputa di Kabupaten Bolaang										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Sinombayuga di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Tahuna di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Ulu Siau di Kabupaten										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Wori 1 di Kabupaten Minahasa										
					Bangunan Sistem Pengendali Banjir Pengaman Pantai Wori 2 di Kabupaten Minahasa										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Bendungan Kuwil Kawangkoan di										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Embung Tote di Kabupaten Bolaang										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Kolam Retensi/Embung Buatan Tikala di										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Bps Alur Belerang Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Laikit di Kabupaten										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Leleko Sungai Tondano										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Lokna di Kabupaten										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Makalonsow Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Panasen 1 Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Panasen 2 Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Pinamangkuran Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Bps S. Batuawang (Series 1)										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Bps S. Batuawang (Series 2)										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Bps S. Kahetang (Series 1)										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Bps S. Kahetang (Series 2)										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Bps S. Kahetang (Series 3)										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Bps S. Kahetang (Series 4)										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Bps S. Kahetang (Series 5)										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Bps S. Kahetang (Series 6)										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS S. Moayat Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS S. Paleloan Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS S. Sikala 2 Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS S. Sikala Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS S. Tungoi Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Talikuran II Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Talikuran III Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Talikuran Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Tataran di Kabupaten										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Tataran Patar Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Telap Sungai Tondano										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Toliang Oki Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Tonipus Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Tungoi Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam BPS Urongo Sungai										
					Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Check Dam Talikuran Sungai										

			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Check Dam Tandengan										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Groundsill Kalesuge Kanan										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Groundsill Kalesuge Kiri										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Kilometer Tiga Sungai Lewet										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Modayag Sungai Lombagin										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Pananekeng Sungai Mala di										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Sabo Dam Kalekube 1 Kanan										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Sabo Dam Kalekube 1 Kiri										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabo Dam Sabo Dam Kalekube 2 Kiri										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabodam Alur 6/10 5 Kadoodan di Kota										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabodam Alur 6/11 4 Kadoodan di Kota										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabodam Alur 6/12 3 Kadoodan di Kota										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabodam Alur 6/13 1 Kadoodan di Kota										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabodam Alur 6/14 2 Kadoodan di Kota										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabodam Alur 6/7 3 Pakadoodan di										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabodam Alur 6/8 2 Pakadoodan di										
			Bangunan/Jaringan Sistem Pengendali Banjir Sabodam Alur 6/9 1 Pakadoodan di										
	5.3	**Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air**											
		a. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya											
		1) Penyusunan Feasibility Study	Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Babi di Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian PU								
		2) Penyusunan DED Pembangunan	Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Batunderang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bebalang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Beeng Darat di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Beeng Laut di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bunaken di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Dakupang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Gangga di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Gunatin di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kabaruan di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kahakitang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kakorotan di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Karakelang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Karatung di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kawaluso di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kawio di Kota Manado										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kemboleng di Kota Bitung										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kinabuhutan di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Lembeh di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mahengetang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mahumu di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Makalehi di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Manado Tua di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mantehage di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Manumpitaeng di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Matutuang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Miangas di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nain Besar di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nain Kecil di Kota Bitung										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Para di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Salengkere di Kabupaten Kep.										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Salibabu di Kota Manado										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sambayang Napo di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sanggaluhang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sangihe di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tagulandang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tapahing Napo di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tentumbango Marulung di										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tokengbara di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tudunya di Kabupaten										
			Embung Kaput di Kabupaten Minahasa Utara										
			Embung di Provinsi Sulawesi Utara										
			Embung di Kota Manado										
		3) Penetapan Lokasi Pembangunan	Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Babi di Kabupaten Minahasa	APBN, APBD Provinsi	Kementerian PU, DLH								
		4) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan										
		5) Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Batunderang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bebalang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Beeng Darat di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Beeng Laut di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bunaken di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Dakupang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Gangga di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Gunatin di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kabaruan di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kahakitang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kakorotan di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Karakelang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Karatung di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kawaluso di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kawio di Kota Manado										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kemboleng di Kota Bitung										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kinabuhutan di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Lembeh di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mahengetang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mahumu di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Makalehi di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Manado Tua di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mantehage di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Manumpitaeng di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Matutuang di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Miangas di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nain Besar di Kabupaten										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nain Kecil di Kota Bitung										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Para di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan										
			Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Salengkere di Kabupaten Kep.										

					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Salibabu di Kota Manado									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sambayang Napo di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sanggaluhang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sangihe di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tagulandang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tapahing Napo di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tentumbango Marulung di									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tolengbara di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tudunya di Kabupaten									
					Embung Kaput di Kabupaten Minahasa Utara									
			6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Babi di Kabupaten Minahasa	APBD Kabupaten/Kota	Kantah Kabupaten/Kota							
			7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Batunderang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bebalang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Beeng Darat di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Beeng Laut di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bunaken di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Dakupanu di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Gangga di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Gunatin di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kabaruan di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kahakitang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kakorotan di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Karakelang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Karatung di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kawakuso di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kawio di Kota Manado									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kemboleng di Kota Bitung									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kinabuhutan di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Lembeh di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mahengetang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mahumu di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Makalehi di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Manado Tua di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mantehage di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Manumpitaeng di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Matutuang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mangas di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nain Besar di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nain Kecil di Kota Bitung									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Para di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Salengkere di Kabupaten Kep.									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Salibabu di Kota Manado									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sambayang Napo di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sanggaluhang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sangihe di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tagulandang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tapahing Napo di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tentumbango Marulung di									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tolengbara di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tudunya di Kabupaten									
					Embung Kaput di Kabupaten Minahasa Utara									
			8)	Pembangunan	Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Babi di Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian PU							
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Batunderang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bebalang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Beeng Darat di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Beeng Laut di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Bunaken di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Dakupanu di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Gangga di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Gunatin di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kabaruan di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kahakitang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kakorotan di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Karakelang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Karatung di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kawakuso di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kawio di Kota Manado									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kemboleng di Kota Bitung									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Kinabuhutan di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Lembeh di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mahengetang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mahumu di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Makalehi di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Manado Tua di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mantehage di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Manumpitaeng di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Matutuang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Mangas di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nain Besar di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nain Kecil di Kota Bitung									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Para di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Salengkere di Kabupaten Kep.									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Salibabu di Kota Manado									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sambayang Napo di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sanggaluhang di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sangihe di Kabupaten									
					Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan									

				Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan										
				Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa										
				Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tagulandang di Kabupaten										
				Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan										
				Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tapahing Nano di Kabupaten										
				Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau										
				Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau										
				Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tentumbanao Marulung di										
				Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tolengbara di Kabupaten										
				Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Pulau Tudunya di Kabupaten										
				Embung Kaput di Kabupaten Minahasa Utara										
				Embung Kawaluso Kabupaten Kepulauan Sangihe (Pulau 3T)										
				Embung Nunuka										
				Embung Bohabak										
			b. Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Bendung Abuang I Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Abuang II Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Abuang III Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Abuang IV Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Abuang V Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Abuang VI Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Ayong Daerah Irigasi Ayong Bolangat Maelang di Kabupaten Bolaang	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Bendung Bolangat Daerah Irigasi Ayong Bolangat Maelang di Kabupaten Bolaang										
				Bendung Botu Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Buko Daerah Irigasi Buko Tuntung di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Bendung Buyat Daerah Irigasi Buyat di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Dilangon Daerah Irigasi Lolak Pinogaluman Mononow Mononow di										
				Bendung Inrut Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Kalambong Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Kaliputi Daerah Irigasi Dataran Kotamobagu di Kabupaten Bolaang	APBN	Kementerian PU								
				Bendung Kawiwi Daerah Irigasi Lahendong di Kota Tomohon										
				Bendung Kawiwi I Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Kawiwi II Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Kawiwi III Daerah Irigasi Lahendong di Kota Tomohon										
				Bendung Kinalwigran Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Kokor 2 Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Bendung Kokor 3 Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Kokor 4 Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Kokor I Daerah Irigasi Lahendong di Kota Tomohon										
				Bendung Kokor V Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Kokor VI Daerah Irigasi Lahendong di Kota Tomohon										
				Bendung Kosinggolan Daerah Irigasi Kosinggolan di Kabupaten Bolaang	APBN	Kementerian PU								
				Bendung Lahendong 2 Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Lahendong I Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Lahendong III Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Lahendong IV Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Bendung Lahendong V Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Lahendong VI Daerah Irigasi Lahendong di Kota Tomohon										
				Bendung Liang Daerah Irigasi Pusian Molong di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Bendung Lolak Daerah Irigasi Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian PU								
				Bendung Lolak Daerah Irigasi Lolak Pinogaluman Mononow Mononow di Kabupaten	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Bendung Lombuiawan Daerah Irigasi Dataran Kotamobagu di Kabupaten Bolaang	APBN	Kementerian PU								
				Bendung Lumbuhan Daerah Irigasi Ranombolay di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Maelang Ayong Bolangat Maelang di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Bendung Malemboh Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Mananow Daerah Irigasi Lolak Pinogaluman Mononow Mononow di										
				Bendung Manasnera Daerah Irigasi Talawaan Meras di Kabupaten Minahasa Utara										
				Bendung Mbuhuk Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Mbuhuk I Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Meras Daerah Irigasi Talawaan Meras di Kabupaten Minahasa Utara										
				Bendung Miwimbongen I Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Miwimbongen II Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Moayat Daerah Irigasi Moayat Pawak di Kota di Kotamobagu										
				Bendung Molong 1 Daerah Irigasi Pusian Molong di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Bendung Molong 2 Daerah Irigasi Pusian Molong di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Bendung Moyondok Atas Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Moyondok Bawah Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Moyondok II Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Moyondok III Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Moyondok IV Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Moyondok V Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Noan I Daerah Irigasi Ranombolay di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Noan II Daerah Irigasi Ranombolay di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Noan III Daerah Irigasi Ranombolay di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Noongan Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Bendung Palaus Daerah Irigasi Lahendong di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Palaus II Daerah Irigasi Lahendong di Kota Tomohon										
				Bendung Palaus III Daerah Irigasi Lahendong di Kota Tomohon										
				Bendung Palembu Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Panasen Hilir Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Pinamangkulan Daerah Irigasi Ranombolay di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Pinontalan I Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Pinontalan II Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Pinontalan III Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Pinontalan IV Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Polimaan Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Polimaan I Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Ponombisan Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Poyangat Daerah Irigasi Lolak Pinogaluman Mononow Mononow di										
				Bendung Pusian Kanan Daerah Irigasi Pusian Molong di Kabupaten Bolaang										
				Bendung Pusian Kiri Daerah Irigasi Pusian Molong di Kabupaten Bolaang										
				Bendung Ranombolay Atas Daerah Irigasi Ranombolay di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Ranombolay Daerah Irigasi Ranombolay di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Ranowoleng Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Ranoyapo I Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Ranoyapo II Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Ranoyapo III Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Ranoyapo IV Daerah Irigasi Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Bendung Sangkub Daerah Irigasi Sangkub di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	APBN	Kementerian PU								
				Bendung Saresso Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Sina 1 Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Sina II Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Sita Daerah Irigasi Tombolikat Sita Sita di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Bendung Suplesi Daerah Irigasi Buyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
				Bendung Suplesi Pusian Daerah Irigasi Pusian Molong di Kabupaten Bolaang										
				Bendung Talawaan 1 (Terintegrasi) Daerah Irigasi Talawaan Meras di Kabupaten										
				Bendung Talawaan 2 (Terintegrasi) Daerah Irigasi Talawaan Meras di Kabupaten	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Bendung Talawaan 3 (Terintegrasi) Daerah Irigasi Talawaan Meras di Kabupaten										
				Bendung Talawaan 4 (Terintegrasi) Daerah Irigasi Talawaan Meras di Kabupaten										
				Bendung Talawaan Atas Ib Daerah Irigasi Talawaan Meras di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Talawaan Atas V Daerah Irigasi Talawaan Meras di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Talawaan Atas VI Daerah Irigasi Talawaan Meras di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Talawaan Daerah Irigasi Talawaan Meras di Kabupaten Minahasa Utara										
				Bendung Tatayan Daerah Irigasi Ranombolay di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Bendung Timbukar Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Tirtona Daerah Irigasi Torout di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian PU								
				Bendung Torualat Daerah Irigasi Pusian Molong di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Bendung Touliang Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										
				Bendung Toyot Daerah Irigasi Dataran Kotamobagu di Kabupaten Bolaang	APBN	Kementerian PU								
				Bendung Tuntung Daerah Irigasi Buko Tuntung di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Bendung Watuporong Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Bendung Wawowanga Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa										

				Bendung Wimbonsem Daerah Irigasi Noongan di Kabupaten Minahasa									
				Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian PU							
				Bendungan Talawaan Daerah Irigasi Talawaan Meras di Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				Embung Werdhi Agung	APBN	Kementerian PU							
				Embung Tadoy									
				Embung Tanawangko									
				bendung Domara di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				bendung Dondomon di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				bendung Dulangon di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				bendung Kope di Kota Kotamobagu									
				bendung Kope II di Kota Kotamobagu									
				bendung Koppe I di Kota Kotamobagu									
				bendung Lolak Atas di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				bendung Tangaton di Kota Kotamobagu									
				bendung Toraut di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				bendung Wuwuk 1 di Kabupaten Bolsang Mongondow Timur									
				bendung Wuwuk 2 di Kota Kotamobagu									
				bendung Yantaton 1 di Kota Kotamobagu									
				bendung Yantaton 2 di Kota Kotamobagu									
				bendung Yantaton 3 di Kota Kotamobagu									
6	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**												
	6.1	**Perwujudan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**											
	a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota												
		1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	SPAM Air Baku Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian PU							
		2)	Penyusunan DED Pembangunan	SPAM Pulau Babi di Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Batunderang di Kabupaten Minahasa Utara									
				SPAM Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Beeng Darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Beeng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Bunaken di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Dakupang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Gangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Gunatin di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Karatung di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				SPAM Pulau Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Kawio di Kota Manado	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Kemboleng di Kota Bitung	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Kinabuhutan di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Lembeh di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa Utara									
				SPAM Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
				SPAM Pulau Mahengetang di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				SPAM Pulau Mahumu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Manado Tua di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Mantehage di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Manumpitaeng di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Nain Besar di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Nain Kecil di Kota Bitung									
				SPAM Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Salengkere di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
				SPAM Pulau Salibabu di Kota Manado									
				SPAM Pulau Sambayang Napo di Kabupaten Minahasa Utara									
				SPAM Pulau Sanggaluhang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
				SPAM Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				SPAM Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara									
				SPAM Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara									
				SPAM Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
				SPAM Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
				SPAM Pulau Tentumbango Marulung di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
				SPAM Pulau Tolengbara di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				SPAM Pulau Tudunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Regional Bimantara di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Regional Mitramon di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa,									
				SPAM KEK Likupang di Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian PU							
		3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	SPAM Air Baku Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian PU							
		4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	SPAM Pulau Babi di Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi	DLH Provinsi, Dinas PUPR Provinsi							
		5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	SPAM Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Batunderang di Kabupaten Minahasa Utara									
				SPAM Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Beeng Darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Beeng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Bunaken di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Dakupang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Gangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Gunatin di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Karatung di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				SPAM Pulau Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Kawio di Kota Manado	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Kemboleng di Kota Bitung	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Kinabuhutan di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Lembeh di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa Utara									
				SPAM Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro									
				SPAM Pulau Mahengetang di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				SPAM Pulau Mahumu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				SPAM Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Manado Tua di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Mantehage di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Manumpitaeng di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				SPAM Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU							
				SPAM Pulau Nain Besar di Kabupaten Minahasa Utara									
				SPAM Pulau Nain Kecil di Kota Bitung									
				SPAM Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									

					SPAM Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Salengkere di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
					SPAM Pulau Salibabu di Kota Manado										
					SPAM Pulau Sambayang Napo di Kabupaten Minahasa Utara										
					SPAM Pulau Sanggaluhang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
					SPAM Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					SPAM Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara										
					SPAM Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara										
					SPAM Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
					SPAM Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
					SPAM Pulau Tentumbango Marulung di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
					SPAM Pulau Tolengbara di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					SPAM Pulau Tudunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Regional Bimantara di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Regional Mitramon di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa,										
	6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan			SPAM Air Baku Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian PU								
	7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan			SPAM Pulau Babi di Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR Provinsi, Kantah Kabupaten/Kota								
					SPAM Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Batunderang di Kabupaten Minahasa Utara										
					SPAM Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Beeng Darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Beeng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Bunaken di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Dakupang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Gangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Gunatin di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Karatung di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					SPAM Pulau Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Kawio di Kota Manado	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Kemboleng di Kota Bitung	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Kinabuhutan di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Lembeh di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa Utara										
					SPAM Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
					SPAM Pulau Mahengetang di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					SPAM Pulau Mahumu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Manado Tua di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Mantehage di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Manumpitaeng di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Nain Besar di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Nain Kecil di Kota Bitung										
					SPAM Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Salengkere di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
					SPAM Pulau Salibabu di Kota Manado										
					SPAM Pulau Sambayang Napo di Kabupaten Minahasa Utara										
					SPAM Pulau Sanggaluhang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
					SPAM Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					SPAM Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara										
					SPAM Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara										
					SPAM Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
					SPAM Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
					SPAM Pulau Tentumbango Marulung di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
					SPAM Pulau Tolengbara di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					SPAM Pulau Tudunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Regional Bimantara di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Regional Mitramon di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa,										
	h	Pembangunan			SPAM Air Baku Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Babi di Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Batunderang di Kabupaten Minahasa Utara										
					SPAM Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Beeng Darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Beeng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Bunaken di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Dakupang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Gangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Gunatin di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Karatung di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					SPAM Pulau Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Kawio di Kota Manado	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Kemboleng di Kota Bitung	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Kinabuhutan di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Lembeh di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa Utara										
					SPAM Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
					SPAM Pulau Mahengetang di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					SPAM Pulau Mahumu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Manado Tua di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Mantehage di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Manumpitaeng di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					SPAM Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					SPAM Pulau Nain Besar di Kabupaten Minahasa Utara										
					SPAM Pulau Nain Kecil di Kota Bitung										
					SPAM Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					SPAM Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										

			SPAM Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			SPAM Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			SPAM Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			SPAM Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			SPAM Pulau Salengkere di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
			SPAM Pulau Salibabu di Kota Manado										
			SPAM Pulau Sambayang Napo di Kabupaten Minahasa Utara										
			SPAM Pulau Sanggaluhang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
			SPAM Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			SPAM Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			SPAM Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud										
			SPAM Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara										
			SPAM Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara										
			SPAM Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			SPAM Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			SPAM Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
			SPAM Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
			SPAM Pulau Tentumbango Marulung di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro										
			SPAM Pulau Tolengbara di Kabupaten Bolaang Mongondow										
			SPAM Pulau Tudunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			SPAM Regional Binantara di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang	APBN	Kementerian PU								
			SPAM Regional Mitramon di Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa,										
6.2	**Perwujudan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**												
a. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota													
	1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Infrastruktur SPAM regional Bimatara di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa U	APBN	Kementerian PU								
	2)	Penyusunan DED Pembangunan	Infrastruktur SPAM regional Boltagu di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten										
			Infrastruktur SPAM regional Mitramon di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa										
	3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Infrastruktur SPAM regional Bimatara di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa	APBN, APBD	Kementerian PU, DLH								
	4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Infrastruktur SPAM regional Boltagu di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten										
	5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Infrastruktur SPAM regional Mitramon di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa										
	6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Infrastruktur SPAM regional Bimatara di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa	APBD Kabupaten/Kota	Kantah Kabupaten/Kota								
	7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Infrastruktur SPAM regional Boltagu di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten										
			Infrastruktur SPAM regional Mitramon di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa										
	8)	Pembangunan	Infrastruktur SPAM regional Bimatara di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian PU								
			Infrastruktur SPAM regional Boltagu di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten										
			Infrastruktur SPAM regional Mitramon di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa										
6.3	**Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**												
a. Pembangunan Tempat Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
	1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) & Pengelolaan Limbah Medik Regional Ilo-Ilo di Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian PU								
	2)	Penyusunan DED Pembangunan	Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Babi di Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Batunderang di Kabupaten Minahasa Utara										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Darat di Kabupaten Kepulauan										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bunaken di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Dakupang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gunatin di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karatung di Kabupaten Minahasa Tenggara										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawahuso di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawio di Kota Manado	APBN	Kementerian PU								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kemboleng di Kota Bitung	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kinabuhutan di Kabupaten Kepulauan										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lembeh di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lengizis di Kabupaten Minahasa Utara										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahengetang di Kabupaten Kepulauan										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahumu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manado Tua di Kabupaten Kepulauan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mantehage di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manumpitasng di Kabupaten Kepulauan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Besar di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Kecil di Kota Bitung										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salengkere di Kabupaten Kep. Siau										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salibabu di Kota Manado										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sambayang Napo di Kabupaten Minahasa										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sanggaluhang di Kabupaten Kep. Siau										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tentumbango Marulung di Kabupaten Kep.										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tolengbara di Kabupaten Bolaang										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tudunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sampah Bolaang Mongondow di	APBN	Kementerian PU								
	3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) & Pengelolaan	APBN	Kementerian PU								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Babi di Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Batunderang di Kabupaten Minahasa Utara										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Darat di Kabupaten Kepulauan										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bunaken di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Dakupang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gunatin di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karatung di Kabupaten Minahasa Tenggara										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawahuso di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawio di Kota Manado	APBN	Kementerian PU								
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kemboleng di Kota Bitung										
			Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kinabuhutan di Kabupaten Kepulauan										

				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lembeh di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa Utara										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahengetang di Kabupaten Kepulauan										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahumu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manado Tua di Kabupaten Kepulauan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mantehage di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manumpitaeng di Kabupaten Kepulauan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Besar di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Kecil di Kota Bitung										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salengkere di Kabupaten Kep. Siau										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salibabu di Kota Manado										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sambayang Napo di Kabupaten Minahasa										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sanggalahang di Kabupaten Kep. Siau										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tentumbango Marulang di Kabupaten Kep.										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tolengbara di Kabupaten Bolaang										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tudunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sampah Bolaang Mongondow di	APBN	Kementerian PU								
	4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan		Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) & Pengelolaan	APBN, APBD Provisni	Kementerian PU, DLH Provinsi								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Babi di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Batunderang di Kabupaten Minahasa Utara										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Darat di Kabupaten Kepulauan										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bunaken di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Dakupang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gunatin di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karatung di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawio di Kota Manado										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kemboleng di Kota Bitung										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kinabuhutan di Kabupaten Kepulauan										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lembeh di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa Utara										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahengetang di Kabupaten Kepulauan										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahumu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Talaud										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manado Tua di Kabupaten Kepulauan										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mantehage di Kabupaten Kepulauan Talaud										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manumpitaeng di Kabupaten Kepulauan										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Besar di Kabupaten Minahasa Utara										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Kecil di Kota Bitung										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salengkere di Kabupaten Kep. Siau										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salibabu di Kota Manado										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sambayang Napo di Kabupaten Minahasa										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sanggalahang di Kabupaten Kep. Siau										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tentumbango Marulang di Kabupaten Kep.										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tolengbara di Kabupaten Bolaang										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tudunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sampah Bolaang Mongondow di										
	5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan		Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) & Pengelolaan	APBN	Kementerian PU								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Babi di Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Batunderang di Kabupaten Minahasa Utara										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Darat di Kabupaten Kepulauan										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bunaken di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Dakupang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gunatin di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karatung di Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawio di Kota Manado	APBN	Kementerian PU								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kemboleng di Kota Bitung	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kinabuhutan di Kabupaten Kepulauan										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lembeh di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa Utara										
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau										

				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahengetang di Kabupaten Kepulauan									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahumu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU							
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manado Tua di Kabupaten Kepulauan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mantehage di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU							
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manumpitaeng di Kabupaten Kepulauan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU							
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU							
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Besar di Kabupaten Minahasa Utara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Kecil di Kota Bitung									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salengkere di Kabupaten Kep. Siau									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salibabu di Kota Manado									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sambayang Napo di Kabupaten Minahasa									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sanggaluhang di Kabupaten Kep. Siau	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi							
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tentumbango Marulang di Kabupaten Kep.									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tolengbara di Kabupaten Bolaang									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tudunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sampah Bolaang Mongondow di	APBN	Kementerian PU							
	6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan		Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) & Pengelolaan	APBD Provinsi	Kantah Kabupaten/Kota							
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Babi di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Batunderang di Kabupaten Minahasa Utara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Darat di Kabupaten Kepulauan									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bunaken di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Dakupang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gunatin di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karatung di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawio di Kota Manado									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kemboleng di Kota Bitung									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kinabuhutan di Kabupaten Kepulauan									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lembeh di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa Utara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahengetang di Kabupaten Kepulauan									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahumu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manado Tua di Kabupaten Kepulauan									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mantehage di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manumpitaeng di Kabupaten Kepulauan									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Besar di Kabupaten Minahasa Utara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Kecil di Kota Bitung									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salengkere di Kabupaten Kep. Siau									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salibabu di Kota Manado									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sambayang Napo di Kabupaten Minahasa									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sanggaluhang di Kabupaten Kep. Siau									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tentumbango Marulang di Kabupaten Kep.									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tolengbara di Kabupaten Bolaang									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tudunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sampah Bolaang Mongondow di									
	7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan		Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) & Pengelolaan	APBD Provinsi	Kantah Kabupaten/Kota							
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Babi di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Batunderang di Kabupaten Minahasa Utara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Darat di Kabupaten Kepulauan									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bunaken di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Dakupang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gunatin di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karatung di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawio di Kota Manado									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kemboleng di Kota Bitung									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kinabuhutan di Kabupaten Kepulauan									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lembeh di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa Utara									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahengetang di Kabupaten Kepulauan									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahumu di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Talaud									

					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manado Tua di Kabupaten Kepulauan										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mantehage di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manumpitaeng di Kabupaten Kepulauan										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Besar di Kabupaten Minahasa Utara										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Kecil di Kota Bitung										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salengkere di Kabupaten Kep. Siau										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salibabu di Kota Manado										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sambayang Napo di Kabupaten Minahasa										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sanggaluhang di Kabupaten Kep. Siau										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tentumbango Marulang di Kabupaten Kep.										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tolengbara di Kabupaten Bolaang										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tudunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sampah Bolaang Mongondow di										
			8)	Pembangunan	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) & Pengelolaan	APBN	Kementerian PU								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Babi di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bangka di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Batunderang di Kabupaten Minahasa Utara										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Darat di Kabupaten Kepulauan										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Beeng Laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bohoi Kecil di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Bunaken di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Dakupang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gangga di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Gunatin di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kahakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kalama di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karakelang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Karatung di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawahiso di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kawio di Kota Manado	APBN	Kementerian PU								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kemboleng di Kota Bitung										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Kinabuhutan di Kabupaten Kepulauan										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lembeh di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lenggis di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Lipaeng di Kabupaten Kep. Siau										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahengetang di Kabupaten Kepulauan										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mahumu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manado Tua di Kabupaten Kepulauan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Mantehage di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian PU								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Manumpitaeng di Kabupaten Kepulauan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Matutuang di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian PU								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Besar di Kabupaten Minahasa Utara										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nain Kecil di Kota Bitung										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Nusa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Pahepa di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Paniki di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Para di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salengkere di Kabupaten Kep. Siau										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Salibabu di Kota Manado										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sambayang Napo di Kabupaten Minahasa										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sanggaluhang di Kabupaten Kep. Siau	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Sela di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siau di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Siladen di Kabupaten Minahasa Utara										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tagulandang di Kabupaten Minahasa Utara										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Talise di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tapahing Napo di Kabupaten Kepulauan										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tehang di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tengah di Kabupaten Kep. Siau Tagulandang										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tentumbango Marulang di Kabupaten Kep.										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tolengbara di Kabupaten Bolaang										
					Sistem Pengelolaan Persampahan Pulau Tudunya di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sampah Bolaang Mongondow di	APBN	Kementerian PU								
			b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
			1)	Peningkatan Kapasitas	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian PU								
			2)	Peningkatan Teknologi											
		6.4	**Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan Wilayah**												
			a. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir		Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian PU								
			b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir												
			1)	Peningkatan Kapasitas											
			2)	Peningkatan Teknologi											
		6.5	**Perwujudan Sistem Drainase Perkotaan**												
			a.	Pembangunan Drainase	Drainase Danau Tondano	APBN	Kementerian PU								
			b.	Pengembangan Sistem Drainase Kota Resilien (Tahan Bencana)	Kota Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Kementerian PU, BUMN, BPBD, Dinas PUPR, Swasta								
B.	**Perwujudan Pola Ruang**														
	1	**Perwujudan Kawasan Lindung**													
		1.1	**Perwujudan Badan Air dengan kode BA**												
			a.	Operasi dan Pemeliharaan Situ	Situ Ambang Dua di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBN	Kementerian PU								
					Situ Bunong di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Situ Holui di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Situ Kapeta di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Situ Linow di Kota Tomohon										
					Situ Lot Sendow di Kabupaten Minahasa										
					Situ Luah Bulilin di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Situ Luah Kayelaan di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Situ Luah Kuyanga di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Situ Luah Lahendong di Kota Tomohon										
					Situ Luah Mangkawok di Kabupaten Minahasa Tenggara										

					Situ Luah Sossong di Kabupaten Minahasa Tenggara														
					Situ Luah Tutud di Kabupaten Minahasa Tenggara														
					Situ Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro														
					Situ Moleben di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur														
					Situ Mongawo di Kabupaten Minahasa Selatan														
					Situ Pangolombian di Kota Tomohon														
					Situ Ponotokan di Kabupaten Minahasa Tenggara														
					Situ Ratahan 1 di Kabupaten Minahasa Tenggara														
					Situ Tabang Ambang di Kota Kotamobagu														
					Situ Tabang Babakan di Kota Kotamobagu														
					Situ Tampusu di Kabupaten Minahasa														
					Situ Telaga Lotta Indah 1 di Kabupaten Kepulauan Talaud														
					Situ Telaga Lotta Indah 2 di Kabupaten Kepulauan Talaud														
				b.	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Embung Belang 1 di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Belang 2 di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Belang 3 di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Belang 4 di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Belang 5 di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Belang 6 di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Boltim 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur													
						Embung Botuliodu di Kabupaten Minahasa Selatan													
						Embung Daud Sendow di Kabupaten Minahasa													
						Embung Kalawiran di Kabupaten Minahasa													
						Embung Kampung Loyang 1 Kota Bitung													
						Embung Kampung Loyang 2 Kota Bitung													
						Embung Kauditan 1 di Kabupaten Minahasa Utara													
						Embung Kema 1 di Kabupaten Minahasa Utara													
						Embung Kema 2 di Kabupaten Minahasa Utara													
						Embung Koha di Kabupaten Minahasa													
						Embung Kotabunan 1 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur													
						Embung Kulo di Kabupaten Minahasa													
						Embung Luah Derel di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Luah Useban di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Luak Pasiaten di Kabupaten Minahasa Utara													
						Embung Mokobang di Kabupaten Minahasa Selatan													
						Embung Molobog di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur													
						Embung Pasan 1 di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Pasan 2 di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Pasan 3 di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Pusomaen 1 di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Rano Pakioan 1 di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Rano Pakioan 2 Kota Bitung													
						Embung Ranoketang 1 di Kabupaten Minahasa Selatan													
						Embung Ranoketang 2 di Kabupaten Minahasa Selatan													
						Embung Ranoketang 3 di Kabupaten Minahasa Selatan													
						Embung Ranoketang 4 di Kabupaten Minahasa Selatan													
						Embung Ranoketang 5 di Kabupaten Minahasa Selatan													
						Embung Ranoketang 6 di Kabupaten Minahasa Selatan													
						Embung Ranoketang 7 di Kabupaten Minahasa Selatan													
						Embung Ranoketang 8 di Kabupaten Minahasa Selatan													
						Embung Ranolewo 1 di Kabupaten Minahasa													
						Embung Ranolewo 2 di Kabupaten Minahasa													
						Embung Ranolewo 3 di Kabupaten Minahasa													
						Embung Ranowangko di Kabupaten Minahasa													
						Embung Remboken 1 di Kabupaten Minahasa													
						Embung Remboken 2 di Kabupaten Minahasa													
						Embung Seledan di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Seper di Kabupaten Minahasa Utara													
						Embung Silian Raya 1 di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Sumasempot di Kabupaten Minahasa													
						Embung Tabukan Selatan 1 di Kabupaten Kepulauan Sangihe													
						Embung Tabukan Selatan 2 di Kabupaten Kepulauan Sangihe													
						Embung Tadoy di Kabupaten Bolaang Mongondow													
						Embung Taman Raya Megawati di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Tanawangko di Kabupaten Minahasa													
						Embung Tombakar di Kabupaten Minahasa													
						Embung Tombatu Timur 1 di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Embung Tote di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara													
						Embung Treuman di Kabupaten Minahasa Utara													
						Embung Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur													
						Embung Wanua Ure di Kabupaten Minahasa Utara													
						Waduk Kuwil di Kabupaten Minahasa Utara													
						Waduk Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow													
				c.	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Danau Bulilin di Kabupaten Minahasa Tenggara													
						Danau Bunong di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara													
						Danau Buyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur													
						Danau Iloloi di Kabupaten Minahasa Selatan													
						Danau Kapeta di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro													
						Danau Linow di Kota Tomohon													
						Danau Luok di Kabupaten Bolaang Mongondow													
						Danau Mahena di Kabupaten Kepulauan Sangihe													
						Danau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro													
						Danau Moat di Kabupaten Minahasa Selatan/Kabupaten Bolaang Mongondow Timur													
						Danau Mokobang di Kabupaten Minahasa Selatan													
						Danau Pangolombian di Kota Tomohon													
						Danau Tampusu diKabupaten Minahasa													
						Danau Tondano di Kabupaten Minahasa													
						Danau Tondok di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur													
				d.	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Sungai Awuwangko di Kabupaten Minahasa													
						Sungai Bakida di Desa Bakida di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Bolangaso di Desa Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Bulo di Kabupaten Minahasa													
						Sungai Dayow di Desa Dayow di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Deaga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Damage di Desa Damagin A di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Dutula Dudepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Dutula Minanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Dutula Palolahunga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Dutula Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Ilomata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Kalasey di Kabupaten Minahasa													
						Sungai Kaweruan di Kabupaten Minahasa													
						Sungai Kawilev Wangko di Kabupaten Minahasa													
						Sungai Kawis di Kabupaten Minahasa													
						Sungai Kayuwale di Kabupaten Minahasa													
						Sungai Kayuwatu Wangko di Kabupaten Minahasa													
						Sungai Kombot di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Kuala Asam di Desa Adow di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Likupang pada WS Tondano-Likupang di Kabupaten Minahasa													
						Sungai Linawan di Desa Linawan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Lion di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Lungkap di Desa Lungkap di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Malalayang dan Pengendalian Pencemaran Sungai Talawaan di Kota Manado													
						Sungai Malalayang di Kabupaten Minahasa													
						Sungai Manembo di Kabupaten Minahasa													
						Sungai Manggadaa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Mataindo di Desa Mataindo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Matandoi di Desa Matandoi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Milangodaa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Minangalonduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													
						Sungai Momalia di Desa Momalia di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan													

					Sungai Ngaralewo di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Nimanga di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Nunuk di Desa Nunuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Nunuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Ongkag Onggunoi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Ongkag Posilagon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Ongkag Tolotoyon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Ongkaw Mongondow di Kotamobagu											
					Sungai pada WS Sangihe-Talaud, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Kabupaten											
					Sungai Panango di Desa Tabilaa dan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow											
					Sungai Popodu di Desa Popodu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Posilagon di Desa Posilagon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Rainolokon di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Ranopaso di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Ranowangko di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan											
					Sungai Saibuah di Desa Saibuah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Sakti di Desa Sakti di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Sangkup di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara											
					Sungai Sario di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Sawangan di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Sindoran di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Tambala di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Tateli di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Temboan di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Tobayagan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Tolondadu di Desa Tolondadu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Tolotoyon di Desa Tolotoyon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Tonala di Desa Meyambanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Tondano di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Torosik di Desa Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Touloun di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Tubik Mataindo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi									
					Sungai Watulaney di Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi									
			e.	Rehabilitasi Vegetasi Riparian	Sungai Awuwangko di Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian PU									
					Sungai Bakida di Desa Bakida di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Bolangaso di Desa Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Bulo di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Dayow di Desa Dayow di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Deaga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Dumage di Desa Dumagin A di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Dutula Dudepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Dutula Minanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Dutula Pilolahunga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Dutula Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Ilomata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Kalasey di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Kaweruan di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Kawiley Wangko di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Kawis di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Kayuwale di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Kayuwatu Wangko di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Kombot di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Kuala Asam di Desa Adow di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Likupang pada WS Tondano-Likupang di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Linawan di Desa Linawan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Lion di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Lungkap di Desa Lungkap di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Malalayang dan Pengendalian Pencemaran Sungai Talawaan di Kota Manado											
					Sungai Malalayang di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Manembo di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Manggadaa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Mataindo di Desa Mataindo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Matandoi di Desa Matandoi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Milangodaa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Minangalonduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Momalia di Desa Momalia di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Ngaralewo di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Nimanga di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Nunuk di Desa Nunuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Nunuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Ongkag Onggunoi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Ongkag Posilagon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Ongkag Tolotoyon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Ongkaw Mongondow di Kotamobagu											
					Sungai pada WS Sangihe-Talaud, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Kabupaten											
					Sungai Panango di Desa Tabilaa dan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow											
					Sungai Popodu di Desa Popodu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Posilagon di Desa Posilagon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Rainolokon di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Ranopaso di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Ranowangko di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan											
					Sungai Saibuah di Desa Saibuah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Sakti di Desa Sakti di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Sangkup di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara											
					Sungai Sario di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Sawangan di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Sindoran di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Tambala di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Tateli di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Temboan di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Tobayagan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Tolondadu di Desa Tolondadu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Tolotoyon di Desa Tolotoyon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Tonala di Desa Meyambanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Tondano di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Torosik di Desa Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Touloun di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Tubik Mataindo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi									
					Sungai Watulaney di Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi									
			f.	Pengendalian Pencemaran	Sungai Awuwangko di Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian PU									
					Sungai Bakida di Desa Bakida di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Bolangaso di Desa Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Bulo di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Dayow di Desa Dayow di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Deaga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Dumage di Desa Dumagin A di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Dutula Dudepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Dutula Minanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Dutula Pilolahunga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Dutula Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Ilomata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan											
					Sungai Kalasey di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Kaweruan di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Kawiley Wangko di Kabupaten Minahasa											
					Sungai Kawis di Kabupaten Minahasa											

					Sungai Kayuwale di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Kayuwatu Wangko di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Kombot di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Kuala Asam di Desa Adow di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Likupang pada WS Tondano-Likupang di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Linawan di Desa Linawan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Lion di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Lungkap di Desa Lungkap di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Malalayang dan Pengendalian Pencemaran Sungai Talawaan di Kota Manado										
					Sungai Malalayang di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Manembo di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Mangagadas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Mataindo di Desa Mataindo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Matandoi di Desa Matandoi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Milangodaa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Minangalonduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Momalia di Desa Momalia di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Ngaralewo di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Nimanga di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Nunuk di Desa Nunuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Nunuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Ongkag Onggunoi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Ongkag Posilagon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Ongkag Tolotoyon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Ongkaw Mongondow di Kotamobagu										
					Sungai pada WS Sangihe-Talaud, di Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Kabupaten										
					Sungai Pananago di Desa Tabilaa dan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Sungai Popodu di Desa Popodu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Posilagon di Desa Posilagon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Rainolokon di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Ranopaso di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Ranowangko di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Ranovapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Sungai Saibuah di Desa Saibuah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Sakti di Desa Sakti di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Sangkup di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Sungai Sario di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Sawangan di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Sindoran di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Tambala di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Tateli di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Temboan di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Tobayagan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Tolondadu di Desa Tolondadu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Tolotoyon di Desa Tolotoyon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Tonala di Desa Meyambanga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Tondano di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Torosik di Desa Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Sungai Touloun di Kabupaten Minahasa										
					Sungai Tubik Mataindo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Sungai Watuluney di Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			g. Pemindahan Aliran Sungai												
				1) Penyusunan Feasibility Study Pemindahan	Aliran Sungai Araren Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung	APBN	Kementerian PU								
					Aliran Sungai Batupangah Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung										
				2) Penyusunan DED Pemindahan	Aliran Sungai Araren Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung										
					Aliran Sungai Batupangah Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung										
				3) Penetapan Lokasi Pemindahan	Aliran Sungai Araren Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung										
					Aliran Sungai Batupangah Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung										
				4) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pemindahan	Aliran Sungai Araren Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung	APBD Provinsi	DLH Provinsi								
					Aliran Sungai Batupangah Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung										
				5) Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pemindahan	Aliran Sungai Araren Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung	APBD Kabupaten/Kota	Kantah Kabuptaen/Kota								
					Aliran Sungai Batupangah Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung										
				6) Penyelesaian Santunan Tanah Pemindahan	Aliran Sungai Araren Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung										
					Aliran Sungai Batupangah Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung										
				7) Pemindahan	Aliran Sungai Araren Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung	APBN	Kementerian PU								
					Aliran Sungai Batupangah Akibat Kegiatan Pertambangan di Kota Bitung										
			h. Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan Kawasan Lindung Geologi di Badan Air												
				1) Inventarisasi objek	Kawasan Plato Minahasa, Danau Tondano (sebagai danau vulkanik terbesar di Pulau Sulawesi), serta objek geologi lainnya.	APBN, APBD	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, lembaga penelitian perguruan tinggi								
				2) Pemetaan objek	Kawasan Plato Minahasa, Danau Tondano (sebagai danau vulkanik terbesar di Pulau Sulawesi), serta objek geologi lainnya.	APBN, APBD	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, lembaga penelitian perguruan tinggi								
				3) Hasil Penyelidikan berupa Laporan dan Peta Kawasan	Kawasan Plato Minahasa, Danau Tondano (sebagai danau vulkanik terbesar di Pulau Sulawesi), serta objek geologi lainnya.	APBN, APBD	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, lembaga penelitian perguruan tinggi								
			i.	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung dan Waduk di Badan Air	Kota Manado, Kota Tomohon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
			j.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst di Badan Air	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Kabupaten Minahasa Tenggara										
			k. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Badan Air		Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Kabupaten Minahasa										
					Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Kabupaten Minahasa Utara										
					Kota Bitung										
			l.	Penetapan Koridor Hidupan Kawasan Migrasi Satwa Liar di Badan Air	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
			m.	Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, APBD	Kementerian								
					Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN, APBD	Kementerian								
					Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	APBN, APBD	Kementerian								
					Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN, APBD	Kementerian								
					Kabupaten Minahasa	APBN, APBD	Kementerian								
					Kabupaten Minahasa Utara	APBN, APBD	Kementerian								
					Kota Manado	APBN, APBD	Kementerian								
			n.	Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Badan Air	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi								
		1.2	**Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB**												
			a.	Pembangunan Pagar Keliling Pembatas Kawasan Hutan	Hutan Lindung Bakau Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan								
					Hutan Lindung Bakau Bohabak di Kabupaten Bolaang Monogondow Utara										
					Hutan Lindung Bakau Dumi I di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										

					Hutan Lindung Bakau Dumi II di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan		Hutan								
					Hutan Lindung Bakau Duminanga di Kabupaten Bolaang Mongondow, di Kabupaten										
					Hutan Lindung Bakau Essang di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Hutan Lindung Bakau Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Hutan Lindung Bakau Karakelang Selatan di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Hutan Lindung Bakau Karakelang Utara di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Hutan Lindung Bakau Kombot di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Hutan Lindung Bakau Kuma di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Hutan Lindung Bakau Likupang di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Bakau Makalisung di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Bakau Manalu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Hutan Lindung Bakau P. Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Hutan Lindung Bakau P. Pasige di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Hutan Lindung Bakau Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Hutan Lindung Bakau Salimburung di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Hutan Lindung Bakau Siau Barat Selatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang										
					Hutan Lindung Bakau Siau Timur Selatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang										
					Hutan Lindung Bakau Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Hutan Lindung Bakau Tg. Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Hutan Lindung Bakau Tg. Kelapa di Kabupaten Minahasa										
					Hutan Lindung Bakau Tg. Pisok di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Bakau Tg. Walintau di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Hutan Lindung Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Hutan Lindung Duminanga di Kabupaten Bolaang Mongondow, di Kabupaten										
					Hutan Lindung G. Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Hutan Lindung Gn. Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Hutan Lindung Gn. Ambang II di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Hutan Lindung Gn. Begambalo di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Hutan Lindung Gn. Bumbungon di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Hutan Lindung Gn. Gambuta di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di										
					Hutan Lindung Gn. Kaweng di Kabupaten Minahasa										
					Hutan Lindung Gn. Klabat di Kota Bitung										
					Hutan Lindung Gn. Lembean di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Gn. Lokombulan di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Hutan Lindung Gn. Mahawu di Kota Tomohon										
					Hutan Lindung Gn. Masarang di Kota Tomohon										
					Hutan Lindung Gn. Masinggi di Kabupaten Minahasa										
					Hutan Lindung Gn. Mobungayom di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di										
					Hutan Lindung Gn. Popotelu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Hutan Lindung Gn. Sahendaruman I di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Hutan Lindung Gn. Sahendaruman II di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Hutan Lindung Gn. Saoan I di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Gn. Saoan II di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Gn. Simbalang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di										
					Hutan Lindung Gn. Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Hutan Lindung Gn. Tamata di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Hutan Lindung Gn. Tampusu di Kabupaten Minahasa										
					Hutan Lindung Gn. Wakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Hutan Lindung Gn. Watampone										
					Hutan Lindung Gn. Wiau di Kota Bitung										
					Hutan Lindung Karakelang Selatan I di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Hutan Lindung Karakelang Selatan II di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Hutan Lindung Karakelang Utara I di Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Hutan Lindung Labuan Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Hutan Lindung P. Bangka di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung P. Lembeh di Kota Bitung										
					Hutan Lindung P. Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Hutan Lindung P. Tagulandang I di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Hutan Lindung P. Tagulandang II di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Hutan Lindung Pinolosian di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Hutan Lindung Pulau Babi Besar di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Hutan Lindung Pulau Babi Kecil di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Hutan Lindung Pulau Bentenan di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Hutan Lindung Pulau Didike 1 di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Hutan Lindung Pulau Didike 2 di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Hutan Lindung Pulau Didike 3 di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Hutan Lindung Pulau Hogouw di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Hutan Lindung Pulau Mandar I di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Pulau Mandar II di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Pulau Mandar III di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Pulau Mandar IV di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Pulau Napodaong di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Pulau Nanomanuk di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Pulau Paniki di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Pulau Paniki Kecil di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Pulau Punten di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Hutan Lindung Pulau Resaan di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Pulau Tamperong di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Pulau Tamperong Kecil di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Pulau Tatanaan Kecil 1 di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Hutan Lindung Pulau Tatanaan Kecil 2 di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Hutan Lindung Pulau Tg. Putus Ds di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Hutan Lindung S. Ongunuo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di										
					Hutan Lindung S. Toadan I di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Hutan Lindung S. Toadan II di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Hutan Lindung S. Tubile Buyat di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Hutan Lindung Tg Kerak (Bobong I) di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Hutan Lindung Tg Kerak (Bobong II) di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Hutan Lindung Tg Kerak (Bobong III) di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Hutan Lindung Tg Popaya di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Hutan Lindung Tg. Pulisan di Kabupaten Minahasa Utara										
					Hutan Lindung Torout di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Hutan Lindung. Bakau Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Hutan Lindung. Gn. Kawatak di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Hutan Lindung. Gn. Lengkoan di Kabupaten Minahasa										
					Hutan Lindung. P. Tagulandang II di Kabupaten Kepulauan Talaud										
			b.	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan di Kawasan yang	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	APBN, APBD	Kementerian								
			e.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst di Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								
					Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kabupaten Minahasa Tenggara										
			f.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan yang Memberikan	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas ESDM								
					Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Kabupaten Minahasa										
					Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Kabupaten Minahasa Utara										
					Kota Bitung										
					Kota Kotamobagu										
			g.	Penetapan Koridor Hidupan Kawasan Migrasi Satwa di Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi								
					Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
			h.	Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan yang	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, APBD	Kementerian Perhubungan, BUMN								
					Kabupaten Kepulauan Sangihe										

				Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Utara Kota Bitung Kota Manado	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, BUMN	Pemerintah, BUMN, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota							
			i.	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Hutan Lindung Bakau Beo di Kabupaten Kepulauan Talaud Hutan Lindung Bakau Bohabak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Hutan Lindung Bakau Dumi I di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Hutan Lindung Bakau Dumi II di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Hutan Lindung Bakau Duminanga di Kabupaten Bolaang Mongondow, di Kabupaten Hutan Lindung Bakau Essang di Kabupaten Kepulauan Talaud Hutan Lindung Bakau Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Hutan Lindung Bakau Karakelang Selatan di Kabupaten Kepulauan Talaud Hutan Lindung Bakau Karakelang Utara di Kabupaten Kepulauan Talaud Hutan Lindung Bakau Kombot di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Hutan Lindung Bakau Kuma di Kabupaten Kepulauan Sangihe Hutan Lindung Bakau Likupang di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Bakau Makalisung di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Bakau Manalu di Kabupaten Kepulauan Sangihe Hutan Lindung Bakau P. Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Hutan Lindung Bakau P. Pasige di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Hutan Lindung Bakau Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud Hutan Lindung Bakau Salimburung di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Hutan Lindung Bakau Siau Barat Selatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Hutan Lindung Bakau Siau Timur Selatan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Hutan Lindung Bakau Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Hutan Lindung Bakau Tg. Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Hutan Lindung Bakau Tg. Kelapa di Kabupaten Minahasa Hutan Lindung Bakau Tg. Pisok di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Bakau Tg. Walintau di Kabupaten Minahasa Selatan Hutan Lindung Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Hutan Lindung Duminanga di Kabupaten Bolaang Mongondow, di Kabupaten Hutan Lindung G. Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe Hutan Lindung Gn. Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Hutan Lindung Gn. Ambang II di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Hutan Lindung Gn. Begambalo di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Hutan Lindung Gn. Bumbungon di Kabupaten Bolaang Mongondow Hutan Lindung Gn. Gambuta di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di Hutan Lindung Gn. Kaweng di Kabupaten Minahasa Hutan Lindung Gn. Klabat di Kota Bitung Hutan Lindung Gn. Lembean di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Gn. Lokombulan di Kabupaten Minahasa Selatan Hutan Lindung Gn. Mahawu di Kota Tomohon Hutan Lindung Gn. Masarang di Kota Tomohon Hutan Lindung Gn. Masinggi di Kabupaten Minahasa Hutan Lindung Gn. Mobungayom di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di Hutan Lindung Gn. Popotelu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Hutan Lindung Gn. Sahendaruman I di Kabupaten Kepulauan Sangihe Hutan Lindung Gn. Sahendaruman II di Kabupaten Kepulauan Sangihe Hutan Lindung Gn. Saoan I di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Gn. Saoan II di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Gn. Simbalang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di Hutan Lindung Gn. Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara Hutan Lindung Gn. Tamata di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Hutan Lindung Gn. Tampusu di Kabupaten Minahasa Hutan Lindung Gn. Wakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Hutan Lindung Gn. Watampone Hutan Lindung Gn. Wiau di Kota Bitung Hutan Lindung Karakelang Selatan I di Kabupaten Kepulauan Talaud Hutan Lindung Karakelang Selatan II di Kabupaten Kepulauan Talaud Hutan Lindung Karakelang Utara I di Kabupaten Kepulauan Talaud Hutan Lindung Labuan Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow Hutan Lindung P. Bangka di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung P. Lembeh di Kota Bitung Hutan Lindung P. Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Hutan Lindung P. Tagulandang I di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Hutan Lindung P. Tagulandang II di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Hutan Lindung Pinolosian di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Hutan Lindung Pulau Babi Besar di Kabupaten Minahasa Tenggara Hutan Lindung Pulau Babi Kecil di Kabupaten Minahasa Tenggara Hutan Lindung Pulau Bentenan di Kabupaten Minahasa Tenggara Hutan Lindung Pulau Didike 1 di Kabupaten Minahasa Selatan Hutan Lindung Pulau Didike 2 di Kabupaten Minahasa Selatan Hutan Lindung Pulau Didike 3 di Kabupaten Minahasa Selatan Hutan Lindung Pulau Hogouw di Kabupaten Minahasa Tenggara Hutan Lindung Pulau Mandar I di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Pulau Mandar II di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Pulau Mandar III di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Pulau Mandar IV di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Pulau Napodaong di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Pulau Napomanuk di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Pulau Paniki di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Pulau Paniki Kecil di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Pulau Punten di Kabupaten Minahasa Tenggara Hutan Lindung Pulau Resaan di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Pulau Tamperong di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Pulau Tamperong Kecil di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Pulau Tatapaan Kecil 1 di Kabupaten Minahasa Selatan Hutan Lindung Pulau Tatapaan Kecil 2 di Kabupaten Minahasa Selatan Hutan Lindung Pulau Tg. Putus Ds di Kabupaten Minahasa Tenggara Hutan Lindung S. Onggunoi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di Hutan Lindung S. Toadan I di Kabupaten Bolaang Mongondow Hutan Lindung S. Toadan II di Kabupaten Bolaang Mongondow Hutan Lindung S. Tubile Buyat di Kabupaten Minahasa Tenggara Hutan Lindung Tg Kerak (Bobong I) di Kabupaten Minahasa Tenggara Hutan Lindung Tg Kerak (Bobong II) di Kabupaten Minahasa Tenggara Hutan Lindung Tg Kerak (Bobong III) di Kabupaten Minahasa Tenggara Hutan Lindung Tg Popaya di Kabupaten Minahasa Tenggara Hutan Lindung Tg. Pulisan di Kabupaten Minahasa Utara Hutan Lindung Toraut di Kabupaten Bolaang Mongondow Hutan Lindung. Bakau Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe Hutan Lindung. Gn. Kawatak di Kabupaten Minahasa Tenggara Hutan Lindung. Gn. Lengkoan di Kabupaten Minahasa Hutan Lindung. P. Tagulandang II di Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian Kehutanan							
			j.	Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi							
	1.3	**Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS**												
			a.	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan di Kawasan Sempadan Pantai	Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Kepulauan Sangihe Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Kepulauan Talaud Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Minahasa Selatan Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Minahasa Tenggara Kawasan Sempadan Pantai Kabupaten Minahasa Utara Kawasan Sempadan Pantai Kota Bitung Kawasan Sempadan Pantai Kota Manado	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota							

	b.	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan di Kawasan Sempadan Sungai dan Danau	Kawasan Sempadan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Andagile di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kawasan Sempadan Sungai Awuwangko di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kawasan Sempadan Sungai Biontong di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kawasan Sempadan Sungai Bolangitang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kawasan Sempadan Sungai Bulo di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kawasan Sempadan Sungai Kalasey di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Kawerusan di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Kawiley Wangko di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Kawis di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Kayuwale di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Kayuwatu Wangko di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Malalayang di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Manembo di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Ngaralewo di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Nimanga di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Nunuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kawasan Sempadan Sungai Rainolokon di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Ranowangko di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Saleo di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kawasan Sempadan Sungai Sangkub di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kawasan Sempadan Sungai Sario di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Sawangan di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Sindoran di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Tambala di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Tateli di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Temboan di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Touloun di Kabupaten Minahasa Kawasan Sempadan Sungai Tuntung di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kawasan Sempadan Sungai Watulaney di Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR								
	c.	Penyusunan DED Permukiman	Kawasan Sempadan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa										
	d.	Penyusunan LARAP (Land Aquistion Resettlement Action Plan)	Kawasan Sempadan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa										
	e.	Penyediaan Tanah/ Penyediaan Relokasi Permukiman	Kawasan Sempadan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa										
	f.	Penataan Permukiman	Kawasan Sempadan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa										
	g.	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan di Kawasan Perlindungan Setempat	Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Utara Kota Manado Kota Tomohon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
	h.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan Perlindungan	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
	i.	Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan Perlindungan Setempat	Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Minahasa Utara Kota Manado										
	j.	Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Kawasan Perlindungan Setempat	Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Utara Kota Manado Kota Tomohon	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi								
1.4	**Perwujudan Kawasan Konservasi dengan kode KS**												
	a.	Pembangunan Pengamanan Kawasan Konservasi	Cagar Alam Duasudara di Kota Bitung;	APBN	Kementerian Kehutanan								
	b.	Pembangunan Pagar Keliling Pembatas untuk Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Konservasi	Cagar Alam Gunung Ambang di Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu; Cagar Alam Gunung Lokon di Kota Tomohon; Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Tatoareng dan Perairan Sekitarnya di Wilayah Laut; Suaka Margasatwa Karakelang di Kabupaten Kepulauan Talaud; Suaka Margasatwa Gunung Manembo Nembo di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan; Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara; Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; Taman Nasional Bunaken di Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Wilayah Laut; Taman Wisata Alam Batu Angus di Kota Bitung; Taman Wisata Alam Batu Putih di Kota Bitung; dan Taman Wisata Alam Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Minahasa Selatan.									
	c.	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan di Kawasan Konservasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Utara Kota Bitung Kota Manado	APBN	Kementerian Kehutanan								
	f.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan Konservasi	Kota Bitung	APBN	Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM								
	g.	Penetapan Koridor Hidupan Kawasan Migrasi Satwa di Kawasan Konservasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Wilayah Laut	APBN	Kementerian Kehutanan								
	h.	Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan Konservasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Utara Kota Manado Wilayah Laut	APBN	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan								
	i.	Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Kawasan Konservasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi								
1.5	**Perwujudan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut**												
	a.	Penetapan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-pulau Kecil, Mencakup Pengajuan Usulan Inisiatif, identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kawasan	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								

					Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Talaud di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Selatan di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Tenggara di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Utara di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kota Manado di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Rencana Kawasan Konservasi Ikan Purba Coelacanth di Wilayah Perairan Pulau Tallise Kabupaten Minahasa Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	BRIN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Swasta, Investor, dan/atau Kerjasama Pendanaan lain yang relevan									
			b.	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-pulau Kecil	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									

					Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Talaud di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Selatan di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Tenggara di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Utara di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kota Manado di Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									
					Rencana Kawasan Konservasi Ikan Purba Coelacanth di Wilayah Perairan Pulau Tallise Kabupaten Minahasa Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	BRIN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Swasta, Investor, dan/atau Kerjasama Pendanaan lain yang relevan									
			c.	Pengembangan, Pengelolaan dan Penataan Pesisir, Zonasi Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Wisata Lainnya	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota									

					Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Tenggara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kota Manado	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
					Taman Wisata Perairan Bitung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
					Rencana Kawasan Konservasi Ikan Purba Coelacanth di Wilayah Perairan Pulau Talise Kabupaten Minahasa Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	BRIN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Swasta, Investor, dan/atau Kerjasama Pendanaan lain yang relevan								

		d.	Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-pulau Kecil	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
				Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
				Taman Wisata Perairan Bitung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
		e.	Penyusunan Arahan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-pulau Kecil	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
				Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
				Taman Wisata Perairan Bitung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
		f.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-pulau Kecil	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
				Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
				Taman Wisata Perairan Bitung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
		g.	Rehabilitasi Ekosistem Laut pada Kawasan Pencadangan Konservasi Laut	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
				Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, atau sumber pendapatan lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
		h.	Penetapan Koridor Hidupan Kawasan Migrasi Satwa yang dilindungi di Kawasan Pencadangan Konservasi Laut	Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi								
				Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Kabupaten Minahasa									
				Kabupaten Minahasa Utara									
		i.	Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Kawasan Pencadangan Konservasi Laut	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi								
				Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro									
				Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
				Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa									
				Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Selatan									
				Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Utara									
				Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kota Manado									
				Taman Wisata Perairan Bitung									
		j.	Peningkatan Fungsi, Pelestearian, Perlindungan Kawasan Pencadangan Konservasi Laut	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara									
				Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro									
				Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									

					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi								
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa										
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Selatan										
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Minahasa Utara										
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kota Manado										
					Taman Wisata Perairan Bitung										
			k.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan Pencadangan Konservasi Laut	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara	APBD Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi								
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi								
					Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Provinsi	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi								
			l.	Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan Pencadangan Konservasi Laut	Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, BUMN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Perhubungan Kabupaten/Kota, BUMN								
					Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Siau Tagulandang Biaro	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, BUMN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Perhubungan Kabupaten/Kota, BUMN								
		1.6	**Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM**												
			a. Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Ekosistem Mangrove												
			1)	Pembangunan Pagar Pembatas Keliling	Kawasan Mangrove Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN	Kementerian Kehutanan								
			2)	Peningkatan Fungsi, Pelestarian, Perlindungan Kawasan Ekosistem Mangrove	Kawasan Mangrove Kabupaten Kepulauan Talaud										
			3)	Perlindungan dan Pemulihan	Kawasan Mangrove Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Kawasan Mangrove Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Kawasan Mangrove Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kawasan Mangrove Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kawasan Mangrove Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Kawasan Mangrove Kabupaten Minahasa										
					Kawasan Mangrove Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kawasan Mangrove Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Kawasan Mangrove Kabupaten Minahasa Utara										
					Kawasan Mangrove Kota Bitung										
					Kawasan Mangrove Kota Manado										
			b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pessisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil												
			1)	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan di Kawasan Mangrove	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
					Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Kabupaten Minahasa										
					Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Kabupaten Minahasa Utara										
					Kota Bitung										
					Kota Manado										
			c.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst di Kawasan Ekosistem	Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi	Dinas Lingkungan								
			d.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan Ekosistem Mangrove	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	ESDM								
					Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Kabupaten Minahasa										
					Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kabupaten Minahasa Utara										
			e.	Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan Ekosistem Mangrove	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, BUMN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Perhubungan Kabupaten/Kota, BUMN								
					Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Kabupaten Minahasa Utara										
					Kota Manado										
			f.	Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Kawasan Ekosistem Mangrove	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kehutanan								
					Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Kabupaten Minahasa										
					Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Kabupaten Minahasa Utara										
					Kota Bitung										
					Kota Manado										
2	**Perwujudan Kawasan Budidaya**														
	2.1	**Perwujudan Kawasan Hutan Produksi dengan Kode KHP**													
		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi													
			a.	Pembangunan Pagar Keliling Pembatas	Hutan Produksi Gunung Simbalang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBN	Kementerian Kehutanan								
					Hutan Produksi Gunung Simbalang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Hutan Produksi Terbatas Gunung Mobungayom di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Hutan Produksi Terbatas Gunung Mobungayom di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Kawasan Hutan Produksi Bolaang Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Kawasan Hutan Produksi Bolaang Uki II di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Kawasan Hutan Produksi Inobonto Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kawasan Hutan Produksi Lonsjouw di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kawasan Hutan Produksi S. Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kawasan Hutan Produksi Sungai Ilanga I di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kawasan Hutan Produksi Sungai Ilanga II di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kawasan Hutan Produksi Sungai Matabulu di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Kawasan Hutan Produksi Toraut di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kawasan HPK Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang										
					Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Bumbungon di Kabupaten Bolaang										
					Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Gogugu di Kabupaten Bolaang										
					Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Lolombulan di Kabupaten Minahasa										
					Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Sagan di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Surat di Kabupaten Minahasa Selatan, di										
					Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Wiau di Kota Bitung										

				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Insarang I di Kabupaten Minahasa										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Insarang II di Kabupaten Minahasa										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kayuwatu di Kabupaten Minahasa										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Mintu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas P. Kabaruan II di Kota Bitung										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Salibabu I di Kota Bitung										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Salibabu II di Kota Bitung										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sinonsayang di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Andagile – Sungai Gambuta di Kabupaten										
		b. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi												
		1)	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha	Hutan Produksi Gunung Simbalang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi								
				Hutan Produksi Gunung Simbalang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
				Hutan Produksi Terbatas Gunung Mobungayom di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Hutan Produksi Terbatas Gunung Mobungayom di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Kawasan Hutan Produksi Bolaang Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
				Kawasan Hutan Produksi Bolaang Uki II di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
				Kawasan Hutan Produksi Inobonto Poigar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Kawasan Hutan Produksi Lonsiouw di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
				Kawasan Hutan Produksi S. Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Kawasan Hutan Produksi Sungai Ilanga I di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Kawasan Hutan Produksi Sungai Ilanga II di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Kawasan Hutan Produksi Sungai Matabulu di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Kawasan Hutan Produksi Toraut di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Kawasan HPK Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Bumbumeon di Kabupaten Bolaang										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Gogugu di Kabupaten Bolaang										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Lolombulan di Kabupaten Minahasa										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Saoan di Kabupaten Minahasa Utara										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Surat di Kabupaten Minahasa Selatan, di										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Gunung Wiau di Kota Bitung										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Insarang I di Kabupaten Minahasa										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Insarang II di Kabupaten Minahasa										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kayuwatu di Kabupaten Minahasa										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Mintu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas P. Kabaruan II di Kota Bitung										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Salibabu I di Kota Bitung										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Salibabu II di Kota Bitung										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sinonsayang di Kabupaten Minahasa Selatan										
				Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Andagile – Sungai Gambuta di Kabupaten										
		c.	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan di Kawasan Hutan Produksi	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi								
				Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
				Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
				Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Kabupaten Minahasa Selatan										
				Kabupaten Minahasa Selatan/Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
				Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Kabupaten Minahasa Utara										
		d.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan Hutan Produksi	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM								
				Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
				Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
				Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Kabupaten Kepulauan Talaud										
				Kabupaten Minahasa										
				Kabupaten Minahasa Selatan										
				Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Kabupaten Minahasa Utara										
				Kota Bitung										
				Kota Kotamobagu										
		e.	Penetapan Koridor Hidupan Kawasan Migrasi Satwa Liar di Kawasan Hutan Produksi	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBN	Kementerian Kehutanan								
				Kabupaten Bolaang Mongondow										
		f.	Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan Hutan Produksi	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian Perhubungan								
				Kabupaten Kepulauan Talaud										
				Kabupaten Minahasa Utara										
		g.	Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Kawasan Hutan Produksi	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi								
				Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
				Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
				Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Kabupaten Kepulauan Talaud										
				Kabupaten Minahasa										
				Kabupaten Minahasa Selatan										
				Kabupaten Minahasa Selatan/Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
				Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Kabupaten Minahasa Utara										
				Kota Bitung										
				Kota Kotamobagu										
				Kota Tomohon										
	2.2	**Perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat**												
		a. Pengembangan Prasarana Pertanian												
		1)	Pengendalian dan pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Kabupaten Minahasa	APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pertanian Kabupaten/Kota								
		2)	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan											
		3)	Peningkatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan Produk Unggulan											
		b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian												
		1)	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan	Kabupaten Minahasa	APBD Kabupaten/	Dinas Pertanian								
		c. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah												
		1)	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kabupaten Minahasa	APBD Kabupaten/	Dinas Pertanian								
		2)	Penyelenggaraan Penelitian dan Pembangunan Kawasan Kebun Raya Minahasa		APBN	Badan Riset dan Inovasi Nasional								
		3)	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Kebun Raya Minahasa											
		d.	Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Kawasan Perkebunan Rakyat	Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi								
	2.3	**Perwujudan Kawasan Pertanian**												
		a. Pengelolaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B												
		1)	Cetak Sawah Baru	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota								
		2)	Intensifikasi Lahan Sawah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		3)	Hilirisasi Pertanian	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		4)	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
				Kabupaten Kepulauan Sangihe										
				Kabupaten Kepulauan Talaud										
				Kabupaten Minahasa										
				Kabupaten Minahasa Selatan										
				Kabupaten Minahasa Tenggara										
				Kabupaten Minahasa Utara										
				Kota Bitung										
				Kota Kotamobagu										
				Kota Tomohon										
		5)	Optimalisasi Lahan Terhadap Sawah Eksisting	Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota								
		b. Peningkatan Agro-Produksi, Agro-Industri, dan Agro-Marketing												
		1)	Pembangunan Kawasan Sentra Pembibitan	Kawasan Sentra Pembibitan Ayam di Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	Dinas Pertanian								
				Kawasan Sentra Pembibitan Babi di Kabupaten Minahasa										
				Kawasan Sentra Pembibitan Benih Bunga di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Kawasan Sentra Pembibitan Benih Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow										
				Kawasan Sentra Pembibitan Cengkih di Kabupaten Minahasa										

			Kawasan Sentra Pembibitan Nanas di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Provinsi								
			Kawasan Sentra Pembibitan Pala di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
			Kawasan Sentra Pembibitan Pisang Abaka di Kabupaten Kepulauan Talaud										
			Kawasan Sentra Pembibitan Pisang Goroho di Kabupaten Bolaang Mongondow										
			Kawasan Sentra Pembibitan Sapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		2) Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa	Kabupaten Minahasa Selatan	Swasta	Swasta, Dinas Pertanian, Dinas Pangan								
		3) Pembangunan Pabrik Pakan Ternak	Kabupaten Bolaang Mongondow										
		4) Pembangunan Peternakan Unggas	Kabupaten Minahasa										
		5) Pembangunan Peternakan Unggas	Kabupaten Minahasa Selatan										
		6) Pembangunan Peternakan Sapi (*Triple Helix*)	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	APBD, Swasta	Swasta, Dinas Pertanian, Dinas Pangan								
		7) Pengembangan Resi Gudang, Kredit Usaha Rakyat, dan *Marketplace Agribussiness*	Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon	APBD, Swasta, Sumber Pembiayaan lain yang relevan	Dinas Koperasi, UMKM								
		c. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan											
		1) Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kawasan Sentra Pembibitan Benih Bunga di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Pertanian Provinsi								
		2) Pengadaan dan Pemilihan Bibit	Kawasan Sentra Pembibitan Benih Padi di Kabupaten Bolaang Mongondow										
			Kawasan Sentra Pembibitan Cengkih di Kabupaten Minahasa										
			Kawasan Sentra Pembibitan Nanas di Kabupaten Bolaang Mongondow										
			Kawasan Sentra Pembibitan Pala di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
			Kawasan Sentra Pembibitan Pisang Abaka di Kabupaten Kepulauan Talaud										
			Kawasan Sentra Pembibitan Pisang Goroho di Kabupaten Bolaang Mongondow										
		d. Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi											
		1) Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kawasan Sentra Pembibitan Ayam di Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	Dinas Pertanian Provinsi								
		2) Pengadaan dan Pemilihan Bibit	Kawasan Sentra Pembibitan Babi di Kabupaten Minahasa										
			Kawasan Sentra Pembibitan Sapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		e. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya di Kawasan Pertanian	Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	Dinas Kebudayaan								
		f. Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan di Kawasan Pertanian	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Pertanahan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
		g. Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst di Kawasan Pertanian	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi								
			Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
			Kabupaten Minahasa Tenggara										
			Kota Kotamobagu										
		h. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan Pertanian	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Pertanian Provinsi								
			Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
			Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
			Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
			Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
			Kabupaten Kepulauan Talaud										
			Kabupaten Minahasa										
			Kabupaten Minahasa Selatan										
			Kabupaten Minahasa Tenggara										
			Kabupaten Minahasa Utara										
			Kota Bitung										
			Kota Kotamobagu										
			Kota Tomohon										
		i. Penetapan Koridor Hidupan Kawasan Migrasi Satwa di Kawasan Pertanian	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi								
			Kabupaten Bolaang Mongondow										
		j. Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan Pertanian	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, BUMN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota								
			Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
			Kabupaten Kepulauan Talaud										
			Kabupaten Minahasa										
			Kabupaten Minahasa Utara										
			Kota Manado										
		k. Pengelolaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota								
			Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
			Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
			Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
			Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Kabupaten Kepulauan Talaud										
			Kabupaten Minahasa										
			Kabupaten Minahasa Selatan										
			Kabupaten Minahasa Tenggara										
			Kabupaten Minahasa Utara										
			Kota Kotamobagu										
			Kota Tomohon										
		l. Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah di Kawasan Pertanian	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, Swasta	ATR/BPN, Dinas PUPRD Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Swasta								
	d.	Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Kawasan Pertanian	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi								
2.4	**Perwujudan Kawasan Perikanan**												
	a. Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan												
	1) Penyusunan Feasibility Study Pembangunan		Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi								
	2) Penyusunan DED Pembangunan		Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
			Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
			Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
			Balai Benih Ikan Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Balai Benih Ikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
			Balai Benih Ikan Kabupaten Kepulauan Talaud										
			Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa										
			Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa Selatan										
			Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa Tenggara										
			Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa Utara										
			Terminal Pendukung Perikanan Tangkap di Ondong										
			Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow										
			Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
			Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
			Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
			Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
			Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Kepulauan Talaud										

		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa Selatan										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa Utara										
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi								
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa Selatan										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa Utara										
		Terminal Pendukung Perikanan Tangkap di Ondong										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa Selatan										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa Utara										
5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi								
6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan											
7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa Selatan										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa Utara										
		Terminal Pendukung Perikanan Tangkap di Ondong										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa Selatan										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa Utara										
8)	Pembangunan	Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi								
		Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa Selatan										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Balai Benih Ikan Kabupaten Minahasa Utara										
		Terminal Pendukung Perikanan Tangkap di Ondong										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa Selatan										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Unit Pengolahan Ikan (UPI) Kabupaten Minahasa Utara										
9)	Hilirisasi Kelautan dan Perikanan	Kota Bitung	Swasta	Dinas Kelautan dan Perikanan, Swasta, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan								
		Kab. Kepulauan Talaud										
		Kab. Kepulauan Sangihe										
		Kab. Bolaang Mongondow Utara										
		Kab. Minahasa Utara										
b. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih												
1)	Penentuan dan Penetapan Lokasi	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
2)	Sosialisasi dan Verifikasi Lapangan	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Kabupaten Minahasa										
		Kabupaten Minahasa Selatan										
		Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Kabupaten Minahasa Utara										
		Kota Bitung										
		Kota Manado										
3)	Penataan Fisik (Infrastruktur), penyediaan dan perbaikan sarana prasarana pendukung	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, Pendanaan lain yang relevan	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, dan/atau kerjasama pendanaan								
4)	Pengadaan Bantuan Kampung Nelayan Merah	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
5)	Pendampingan Pengelolaan Bantuan Kampung Nelayan Merah	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Kabupaten Minahasa										
		Kabupaten Minahasa Selatan										
		Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Kabupaten Minahasa Utara										
		Kota Bitung										
		Kota Manado										
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil												
1)	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan di Kawasan Perikanan	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	ATR/BPN, Dinas PUPRD Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
		Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Kabupaten Minahasa										
		Kabupaten Minahasa Selatan										
		Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Kabupaten Minahasa Utara										

			Kota Bitung										
			Kota Manado										
			Wilayah Laut										
	2)	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan Perikanan	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian ESDM								
			Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
			Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
			Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
			Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Kabupaten Minahasa Selatan										
			Kabupaten Minahasa Utara										
			Wilayah Laut										
	3)	Hilirisasi Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, Swasta, Investor,								
			Kabupaten Minahasa Utara										
	d.	Penetapan Koridor Hidupan Kawasan Migrasi Satwa di Kawasan Perikanan	Wilayah Laut	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan								
	e.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan di Kawasan Perikanan	Wilayah Laut	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan								
	f.	Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan Perikanan	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, BUMN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, BUMN								
			Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
			Kabupaten Kepulauan Talaud										
			Kabupaten Minahasa Utara										
			Kota Manado										
			Wilayah Laut										
	g.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah di Kawasan Perikanan	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, Swasta	ATR/BPN, Dinas PUPRD Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota								
	h.	Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Kawasan Hutan Produksi	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi								
			Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
			Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
			Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
			Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
			Kabupaten Kepulauan Talaud										
			Kabupaten Minahasa										
			Kabupaten Minahasa Selatan										
			Kabupaten Minahasa Tenggara										
			Kabupaten Minahasa Utara										
			Kota Manado										
2.5	**Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi**												
	a. Pemberian Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan												
	1)	Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian ESDM								
			Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
			Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
			Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
			Kabupaten Minahasa Tenggara										
			Kabupaten Minahasa Selatan										
			Kabupaten Minahasa Utara										
			Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Kabupaten Kepulauan Siau Biaro Tagulandang										
	b. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
	1)	Pengendalian dan Pemanfaatan	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik PLTD Bitung dan GI Bitung	APBN, Swasta	Kementerian ESDM, PLN, Swasta, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan								
			Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik PLTS Tahuna										
			Kawasan Pertambangan Batuan Kota Bitung										
			Kawasan Pertambangan Energi Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow										
			Kawasan Pertambangan Energi Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
			Kawasan Pertambangan Energi Mineral Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
			Kawasan Pertambangan Energi Mineral Kabupaten Kepulauan Talaud										
			Kawasan Pertambangan Energi Mineral Kabupaten Minahasa										
			Kawasan Pertambangan Energi Mineral Kabupaten Minahasa Tenggara										
			Kawasan Pertambangan Energi Mineral Kabupaten Minahasa Utara										
			Kawasan Pertambangan Energi Mineral Kota Tomohon										
			Kawasan Pertambangan Mineral Logam (emas) Kota Bitung										
	2)	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya di Kawasan Pertambangan dan Energi	Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian ESDM, Kementerian Kebudayaan								
	c.	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan di Kawasan Pertambangan dan Energi	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian ESDM								
			Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
			Kabupaten Kepulauan Talaud										
			Kabupaten Minahasa										
			Kabupaten Minahasa Selatan										
			Kabupaten Minahasa Utara										
			Wilayah Laut										
	d.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan Pertambangan dan Energi	Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian ESDM								
			Kabupaten Minahasa Utara										
			Kota Tomohon										
	e.	Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan Pertambangan dan Energi	Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	Kementerian Perhubungan								
			Wilayah Laut										
	f.	Pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Kabupaten Kepulauan Talaud	APBN	BUMN								
			Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
	g.	Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Kawasan Pertambangan dan Energi	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas ESDM Provinsi								
			Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
			Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
			Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
			Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
			Kabupaten Kepulauan Talaud										
2.6	**Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri**												
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri												
	1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Fasilitas Pendukung Industri di Paceda dan Madidir Unet	Swasta	Swasta, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan								
	2)	Penyusunan DED Pembangunan	Fasilitas Pendukung Industri di Manembo-nembo										
			Fasilitas Pendukung Industri di Pesisir Bitung										
			KEK Bitung	APBN	Kementerian Perindustrian								
			Kawasan Logistik Hub di Kota Manado										
			Kawasan Logistik Hub di Kabupaten Minahasa										
			Kawasan Logistik Hub di Kabupaten Minahasa Utara										
			Kawasan Pengembangan Ekonomi Perbatasan Mane'e	Swasta	Swasta, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan								
			Kawasan Industri Mongondow (KIMONG)										
			Kawasan Industri Bolaang Mongondow Utara										
			Kawasan Industri Pengolahan berupa Pabrik Semen Bolaang Mongondow										
			Kawasan Industri Pengolahan berupa Pabrik Semen Bolaang Mongondow Timur										
			Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Bolaang Mongondow										
			Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Bolaang Mongondow Utara										
			Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kota Bitung										
			Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Minahasa Tenggara										
			Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Minahasa Selatan										
			Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Kepulauan Talaud										
			Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Minahasa										
	3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Fasilitas Pendukung Industri di Paceda dan Madidir Unet	Swasta	Swasta, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan								
	4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Fasilitas Pendukung Industri di Manembo-nembo										
			Fasilitas Pendukung Industri di Pesisir Bitung										
			KEK Bitung	APBN	Kementerian								
			Kawasan Logistik Hub di Kota Manado										

				Kawasan Logistik Hub di Kabupaten Minahasa	APBN	Perindustrian							
				Kawasan Logistik Hub di Kabupaten Minahasa Utara									
				Kawasan Pengembangan Ekonomi Perbatasan Mane'e	Swasta	Swasta, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan							
				Kawasan Industri Mongondow (KIMONG)									
				Kawasan Industri Bolaang Mongondow Utara									
				Kawasan Industri Pengolahan berupa Pabrik Semen Bolaang Mongondow									
				Kawasan Industri Pengolahan berupa Pabrik Semen Bolaang Mongondow Timur									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Bolaang Mongondow									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Bolaang Mongondow Utara									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kota Bitung									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Minahasa Tenggara									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Minahasa Selatan									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Minahasa									
		5)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Fasilitas Pendukung Industri di Paceda dan Madidir Unet	Swasta	Swasta, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan							
		6)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Fasilitas Pendukung Industri di Manembo-nembo									
				Fasilitas Pendukung Industri di Pesisir Bitung									
				KEK Bitung	APBN	Kementerian Perindustrian							
				Kawasan Logistik Hub di Kota Manado									
				Kawasan Logistik Hub di Kabupaten Minahasa									
				Kawasan Logistik Hub di Kabupaten Minahasa Utara									
				Kawasan Pengembangan Ekonomi Perbatasan Mane'e	Swasta	Swasta, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan							
				Kawasan Industri Mongondow (KIMONG)									
				Kawasan Industri Bolaang Mongondow Utara									
				Kawasan Industri Pengolahan berupa Pabrik Semen Bolaang Mongondow									
				Kawasan Industri Pengolahan berupa Pabrik Semen Bolaang Mongondow Timur									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Bolaang Mongondow									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Bolaang Mongondow Utara									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kota Bitung									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Minahasa Tenggara									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Minahasa Selatan									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Minahasa									
		7)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	KEK Bitung	APBN	Kementerian Perindustrian							
		8)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	Kawasan Logistik Hub di Kota Manado									
				Kawasan Logistik Hub di Kabupaten Minahasa									
				Kawasan Logistik Hub di Kabupaten Minahasa Utara									
				Kawasan Pengembangan Ekonomi Perbatasan Mane'e	Swasta	Swasta, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan							
				Kawasan Industri Mongondow (KIMONG)									
				Kawasan Industri Bolaang Mongondow Utara									
				Kawasan Industri Pengolahan berupa Pabrik Semen Bolaang Mongondow									
				Kawasan Industri Pengolahan berupa Pabrik Semen Bolaang Mongondow Timur									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Bolaang Mongondow									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Bolaang Mongondow Utara									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kota Bitung									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Minahasa Tenggara									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Minahasa Selatan									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Minahasa									
		9)	Pembangunan	Fasilitas Pendukung Industri di Paceda dan Madidir Unet	Swasta	Swasta, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan							
				Fasilitas Pendukung Industri di Manembo-nembo									
				Fasilitas Pendukung Industri di Pesisir Bitung									
				KEK Bitung	APBN	Kementerian Perindustrian							
				Kawasan Logistik Hub di Kota Manado									
				Kawasan Logistik Hub di Kabupaten Minahasa									
				Kawasan Logistik Hub di Kabupaten Minahasa Utara									
				Kawasan Pengembangan Ekonomi Perbatasan Mane'e	Swasta	Swasta, Investor, dan/atau kerjasama pendanaan							
				Kawasan Industri Mongondow (KIMONG)									
				Kawasan Industri Bolaang Mongondow Utara									
				Kawasan Industri Pengolahan berupa Pabrik Semen Bolaang Mongondow									
				Kawasan Industri Pengolahan berupa Pabrik Semen Bolaang Mongondow Timur									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Bolaang Mongondow									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Bolaang Mongondow Utara									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kota Bitung									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Minahasa Tenggara									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Minahasa Selatan									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Kabupaten Minahasa									
		b.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya di Kawasan Peruntukan	Kota Bitung	APBN	Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPRD Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota							
		c.	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan di Kawasan Peruntukan Industri	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota								
				Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
				Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Kabupaten Minahasa									
				Kabupaten Minahasa Selatan									
				Kota Bitung									
				Kota Manado									
				Wilayah Laut									
		d.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst di Kawasan Peruntukan	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian Kehutanan							
		e.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan Peruntukan Industri	Wilayah Laut	APBN	Kementerian ESDM							
		f.	Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Kawasan Peruntukan Industri	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas ESDM Provinsi							
				Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
				Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Kabupaten Minahasa									
				Kabupaten Minahasa Selatan									
				Kabupaten Minahasa Utara									
				Kota Bitung									
				Kota Manado									
	2.7	**Perwujudan Kawasan Pariwisata**											
	a. Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi												
		1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	KEK Pariwisata Likupang Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian Pariwisata							
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata							
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Kotamobagu									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Selatan									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Utara									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Tomohon									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Manado									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Siau									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Bitung									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Tateli Satu Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisat di Paceda dan Madidir Unet Kota Bitung									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Manembo-nembo Kota Bitung									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu I Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu II Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu III Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Paputungan Kabupaten Minahasa Utara									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Poopoh Kabupaten Minahasa									

					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago II dan Bungalawang Kabupaten Kepulauan									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu IV Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu V Kabupaten Minahasa									
					Pembangunan Bumi Perkemahan di Kabupaten Minahasa Utara									
			2)	Penyusunan DED Pembangunan	KEK Pariwisata Likupang Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian Pariwisata							
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata							
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Kotamobagu									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Selatan									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Tomohon									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Manado									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Siau									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Bitung									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Tateli Satu Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisat di Paceda dan Madidir Unet Kota Bitung									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Manembo-nembo Kota Bitung									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu I Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu II Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu III Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Paputungan Kabupaten Minahasa Utara									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Poopoh Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago II dan Bungalawang Kabupaten Kepulauan									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu IV Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu V Kabupaten Minahasa									
					Pembangunan Bumi Perkemahan di Kabupaten Minahasa Utara									
			3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	KEK Pariwisata Likupang Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian Pariwisata							
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata							
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Kotamobagu									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Selatan									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Tomohon									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Manado									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Siau									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Bitung									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Tateli Satu Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisat di Paceda dan Madidir Unet Kota Bitung									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Manembo-nembo Kota Bitung									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu I Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu II Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu III Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Paputungan Kabupaten Minahasa Utara									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Poopoh Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago II dan Bungalawang Kabupaten Kepulauan									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu IV Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu V Kabupaten Minahasa									
					Pembangunan Bumi Perkemahan di Kabupaten Minahasa Utara									
			4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	KEK Pariwisata Likupang Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian Pariwisata							
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata							
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Kotamobagu									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Selatan									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Tomohon									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Manado									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Siau									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Bitung									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Tateli Satu Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisat di Paceda dan Madidir Unet Kota Bitung									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Manembo-nembo Kota Bitung									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu I Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu II Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu III Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Paputungan Kabupaten Minahasa Utara									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Poopoh Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago II dan Bungalawang Kabupaten Kepulauan									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu IV Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu V Kabupaten Minahasa									
					Pembangunan Bumi Perkemahan di Kabupaten Minahasa Utara									
			5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	KEK Pariwisata Likupang Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian Pariwisata							
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota							
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Kotamobagu									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Selatan									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Tomohon									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Manado									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Siau									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Bitung									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Tateli Satu Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisat di Paceda dan Madidir Unet Kota Bitung									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Manembo-nembo Kota Bitung									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu I Kabupaten Minahasa									
					Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu II Kabupaten Minahasa									

				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu III Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Paputungan Kabupaten Minahasa Utara									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Poopoh Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago II dan Bungalawang Kabupaten Kepulauan									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu IV Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu V Kabupaten Minahasa									
				Pembangunan Bumi Perkemahan di Kabupaten Minahasa Utara									
		6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	KEK Pariwisata Likupang Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian Pariwisata							
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota							
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Kotamobagu									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Selatan									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Utara									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Tomohon									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Manado									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Siau									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Bitung									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Tateli Satu Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisat di Paceda dan Madidir Unet Kota Bitung									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Manembo-nembo Kota Bitung									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu I Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu II Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu III Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Paputungan Kabupaten Minahasa Utara									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Poopoh Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago II dan Bungalawang Kabupaten Kepulauan									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu IV Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu V Kabupaten Minahasa									
				Pembangunan Bumi Perkemahan di Kabupaten Minahasa Utara									
		7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan	KEK Pariwisata Likupang Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian Pariwisata							
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota							
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Kotamobagu									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Selatan									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Utara									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Tomohon									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Manado									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Siau									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Bitung									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Tateli Satu Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisat di Paceda dan Madidir Unet Kota Bitung									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Manembo-nembo Kota Bitung									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu I Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu II Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu III Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Paputungan Kabupaten Minahasa Utara									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Poopoh Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago II dan Bungalawang Kabupaten Kepulauan									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu IV Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu V Kabupaten Minahasa									
				Pembangunan Bumi Perkemahan di Kabupaten Minahasa Utara									
		8)	Pembangunan	KEK Pariwisata Likupang Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian Pariwisata							
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota							
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Kotamobagu									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Selatan									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Minahasa Utara									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Tomohon									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Manado									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Siau									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Pembuatan Kawasan Sentra Cendera Mata di Kota Bitung									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Tateli Satu Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisat di Paceda dan Madidir Unet Kota Bitung									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Manembo-nembo Kota Bitung									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu I Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu II Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu III Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Paputungan Kabupaten Minahasa Utara									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Poopoh Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Santiago II dan Bungalawang Kabupaten Kepulauan									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu IV Kabupaten Minahasa									
				Fasilitas Pendukung Pariwisata di Kalasey Satu V Kabupaten Minahasa									
				Pembangunan Bumi Perkemahan di Kabupaten Minahasa Utara									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata DPP Paleloan Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian Pariwisata							
				Prasarana dan Sarana Pariwisata DPP Tasik Oki Kabuten Minahasa Utara									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata DPP Pangalisang Kota Manado									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Gunung Mahawu Kota Tomohon									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Wisata Air Terjun Tekaan Telu Kota									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Permandian Air Panas Tumatangtang Kota									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Wisata Woloan Kota Tomohon									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Wisata Bukit Wawo Kota Tomohon									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Hutan Mangrove Meras Kota									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Hutan Mangrove Tongkaina Kota									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Pantai Malalayang Kota Manado									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Teluk Manado Kota Manado									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Wisata Lembeh Utara Kota Bitung									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Wisata Ranowulu Kota Bitung									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Wisata Kuliner Girian Kota Bitung									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Wisata Aertembaga Kota Bitung									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Bukit Kasih Kabupaten Minahasa									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Benteng Moraya Kabupaten									
				Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Sumaru Endo Minahasa									

					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Pantai Barat Minahasa (Pantai										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Watu Pinawetengan Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Makam Sam Ratulangi Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Kampung Jawa Tondano dan										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Makam Imam Bonjol Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Air Terjun Nomorampa Kabupaten Minahasa										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Pantai Moinit Kabupaten Minahasa Selatan										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Penyangga Taman Laut Bunaken										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Pantai Molinow Kabupaten Minahasa Selatan										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Gunung Payung Poopo Minahasa Selatan										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Bukit Duluong Minahasa Selatan										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Pantai Perjuangan Desa Matani Minahasa										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Wisata Mangrove Sondaken Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Kolongan-Kuwil dan sekitarnya										
					Prasarana dan Sarana										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Kema dan sekitarnya Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Pantai Bentetan Minahasa Tenggara										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Gunung Soputan Kabupaten Minahasa										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Danau Bulilin Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Desa Adat Musi Kabupaten Kepulauan										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Pulau Intata – Kakorotan – Nanusa										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Gugusan Pulau Mahoro Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Pulau Gunung Ruang Kabupaten Kepulauan										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kawasan Wisata Penangkaran Burung Maleo										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Agrowisata (Kebun Hortikulhtra) Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Air Terjun Muntoi Kabupaten Bolaang										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Goa Kristal Inuai Kabupaten Bolaang										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Air Terjun Mominit Kabupaten Bolaang										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Air Panas Mugoyunggung Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Hutan Kota Bonawang Kota Kotamobagu										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Air Terjun Bollagonan Kota Kotamobagu										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Pantai Bunga Indah Kabupaten Bolaang										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Kompleks Keraton Boroko Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Pantai Modisi Kabupaten Bolaang										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Wisata Mangrove Panango Bolaang										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Gunung Ambang Kabupaten Bolaang										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Pulau Bombuyanoy/P.Nenas Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KPPP Pantai Kasaraeng Kabupaten Sangihe										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Ekowisata Danau Linouw Kota Tomohon										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Ekowisata Gunung Lokon Kota										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Ekowisata Rurukan Kota Tomohon										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Pulau Bunaken dan sekitarnya Kota										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Pulau Manado Tua Kota Manado										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Pulau Siladen Kota manado										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Kampung Arab Kota Manado										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Kampung Cina Kota Manado										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Kota Tua Kota Manado										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Wisata Lembeh Selatan Kota Bitung										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Wisata Kesatuan Pengelolaan Hutan										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Wisata Kuliner Maesa Kota Bitung										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Danau Tondano Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Agrowisata Lengkoan-Wawona										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Agrowisata Tombariri Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Pantai Timur Minahasa (Pantai										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Ekowisata Kebun Raya Minahasa										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Lapangan Sam Ratulangi Tondano										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Bukit Sasayaban Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Pantai Alar Kabupaten Minahasa										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Air Terjun Kulung kulung dan										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan GABATA (Gangga, Bangka dan										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Nain-Mantehage dan sekitarnya										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Airmadidi Sawangan dan sekitarnya										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Pulisan Marinsow dan sekitarnya										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kebun Raya Megawati Kabupaten Minahasa										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Pulau Sara Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Pulau Makalehi Kabupaten Kepulauan Sitaro										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Pulau Tiga Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Wisata Gunung Kramat Bumbungon Kec.										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Air Terjun Molipungan Kota Kotamobagu										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Pantai Batu Pinagut – Pulau Bongkil										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Makam Raja Hasan Van Gobel Kabupaten										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Danau Mooat Kabupaten Bolaang										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Pantai Jiko dsk Kabupaten Bolaang										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Pantai Kotabunan Kabupaten Bolaang										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Kawasan Mangrove Kabupaten Kepulauan										
					Prasarana dan Sarana Pariwisata KSPP Pantai Pananualeng Kabupaten Kepulauan										
					Pembangunan Bumi Perkemahan di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata / Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
	b. Pengembangan Kawasan Pariwisata														
		1) Kelembagaan Hukum													
			a)	Pengembangan Desa wisata di DPN Manado-Likupang	DPN Manado- Likupang	APBN	Kementerian Pariwisata								
			b)	Penyusunan dan pembaharuan konsep *sustainable tourism deuelopment* dalam proses bisnis	DPN Manado- Likupang KTA Manado - Bunaken	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif								
			c)	Penetapan dan pelestarian cagar budaya serta warisan budaya takbenda	DPN Manado- Likupang	APBN	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XVII								
			d)	Pembentukan forum pengurangan risiko bencana Kabupaten Minahasa Utara	KTA Likupang KTA Airmadidi	APBD Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara								

e)	Penyusunan rencana keberlanjutan usaha dan layanan (*business continuity plan*) bagi pengelola, pemerintah, dan masyarakat	KTA Likupang KTA Airmadidi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Minahasa Utara								
f)	Pelatihan rencana keberlanjutan usaha dan layanan (*business continuity plan*) bagi pengelola, pemerintah, dan masyarakat	KTA Likupang KTA Airmadidi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Usaha pembangunan dan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Perikanan Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Perindustrian Kabupaten Minahasa Utara, Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara								
g)	Penyusunan rencana penanganan kedaruratan bencana pada KSPN Likupang	KTA Likupang KTA Airmadidi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Usaha pembangunan dan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Minahasa Utara								
h)	Penyusunan rencana kontingensi menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, banjir bandang, wabah penyakit dan pandemi COVID-19, tanah longsor, dan cuaca ekstrem\	KTA Likupang KTA Airmadidi	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Utara								
i)	Pelatihan dan Workshop bagi sumber daya manusia Perangkat Daerah di bidang Kepariwisataan dengan pelibatan Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataan	DPN Manado- Likupang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara								
j)	Penyusunan rencana induk perencanaan (masterplan pengembangan desa wisata bahari dan *Detail Engineering Design* (DED)	Kabupaten Minahasa Utara (Desa Palues, Likupang Barat)	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan								
k)	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Kabupaten Minahasa Utara (Desa Palues, Likupang Barat)	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan								
l)	Evaluasi jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di setiap DTW prioritas	KTA Tondano	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Kebudayaan Kabupaten								
m)	Penyusunan *grand strategy* pengembangan bisnis ekonomi kreatif	DPN Manado- Likupang	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif								
n)	Bimbingan teknis tata kelola destinasi	DPN Manado-Likupang KTA Manado-Bunaken KTA Bitung-Lembeh KTA Tondano KTA Tomohon KTA Airmadidi KTA Minahasa Pantai	APBN	Kementerian Pariwisata								
o)	Reaktivasi kelompok sadar wisata dan pelatihan kewirausahaan desa di 4 (empat) desa di Pulau Bangka	KTA Likupang	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif								
2) Pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW)												
a)	Pencadangan kawasan konservasi untuk mendukung pengembangan wisata bahari Pulau Bangka	Pulau Bangka Sub KTA Likupang Kepulauan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara								
b)	Rehabilitasi hutan mangrove	DPN Manado - Likupang	APBN	Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup								
c)	Peningkatan DTW berbasis *agroforestry*	Pulau Bangka Sub KTA Likupang Kepulauan	APBN	Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup								
d)	Perlindungan kawasan keanekaragaman spesies serta genetik tumbuhan dan satwa liar	KTA Manado Bunaken	APBN	Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup								

e)	Pengembangan wisata alam di kawasan perlindungan konservasi	DPN Manado - Likupang	APBN	Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup								
f)	Perlindungan kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi BKSDA Sulawesi Utara	DPN Manado - Likupang	APBN	Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup								
g)	Pemulihan ekosistem di kawasan perlindungan konservasi	DPN Manado - Likupang	APBN	Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup								
h)	Peningkatan DTW berbasis *sport tourism*	Sub KTA Manado	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara								
i)	Peningkatan DTW berbasis religi melalui pembangunan Gereja Kastel/Patung Yesus	Sub KTA Gunung Tumpa	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara								
j)	Pendampingan masyarakat desa wisata	DPN Manado - Likupang KTA Manado - Bunaken Sub KTA Bunaken	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif								
k)	Penyiapan desa wisata dalam menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan	DPN Manado - Likupang	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif								
l)	Pelatihan, pendampingan, dan pengembangan desa wisata di Kabupaten Minahasa Utara	Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal								
m)	Pengembangan amenitas dan atraksi DTW Pulau Bangka, Pulau Gangga, dan Pulau Talise	KTA Likupang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara								
3) Pemasaran												
a)	Sosialisasi/diseminasi petunjuk teknis komunikasi media digital	DPN Manado - Likupang KTA Likupang	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif								
b)	Perancangan kegiatan aktivasi komunikasi pemasaran	DPN Manado - Likupang										
c)	Koordinasi evaluasi pemasaran (*pra event, on event, dan post event*) untuk pasar dalam dan luar negeri											
d)	Publikasi di media digital dalam rangka kerja sama terpadu (asia pasifik)											
e)	Dukungan partisipasi mengikuti festival ITB Asia-Singapura											
f)	Pembuatan footage foto dan video promosi untuk pasar nusantara	KTA Tondano	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara								
g)	Bimbingan teknis *digital marketing*	DPN Manado - Likupang	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif								
h)	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran dan Promosi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	DPN Manado-Bunaken dan sekitarnya DPP Bukit Kasih DPP Paleloan DPP Pangalisang DPP Sumaru Endo DPP Tasik Oki DPSP Manado-Likupang	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif								
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Talaud Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa Selatan Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa Tenggara Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa Utara Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kota Bitung Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kota Manado Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Agrowisata Lengkoan-Wawona Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Agrowisata Tombariri Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Danau Tondano Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Ekowisata Danau Linow Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Ekowisata Gunung Lokon Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Ekowisata Rurukan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kampung Arab Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kampung Cina Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (Kphk) Tangkoko (Cagar Alam Duasudara di Taman Wisata Alam Batuputih Dan Taman Wisata Alam Batu Angus) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kota Tua Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Lembeh Selatan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pulau Bunaken Dsk Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pulau Manado Tua Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pulau Siladen Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang Kawasan Wisata Kuliner Maesa	APBD Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi								
		KPPN Bitung-Lembeh dan sekitarnya KPPN Bogani Nani Wartabone dan sekitarnya KPPN Bunaken dan sekitarnya KPPN Likupang dan sekitarnya KPPN Manado Kota dan sekitarnya KPPN Sangihe-Talaud dan sekitarnya KPPN Tomohon-Tondano dan sekitarnya	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif								
		KSPN Bitung-Lembeh dan sekitarnya KSPN Bunaken dan sekitarnya KSPN Tomohon-Tondano dan sekitarnya KTA Airmadidi KTA Bitung Lembeh KTA Likupang KTA Manado Bunaken	APBD Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi								

		KTA Minahasa Pantai KTA Tomohon KTA Tondano									
4) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata											
a)	Pembangunan sarana dan prasarana persemaian modern	KTA Likupang	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan							
b)	Pembangunan prasarana pengolahan hortikultura	DPN Manado - Likupang	APBN	Kementerian Pertanian							
c)	Pengadaan sarana dan prasarana fasilitasi pengolahan pala										
d)	Sarana pasca panen tanaman pala										
e)	Perluasan tanaman pala										
f)	Monitoring infrastruktur dan layanan telekomunikasi, pos, dan penyiaran	DPN Manado - Likupang	APBN	kementerian Komunikasi Informatika							
g)	Pembangunan agroforestry di Pulau Bangka	KTA Likupang	Swasta	Swasta							
h)	Penataan kawasan Pantai Malalayang dan Penataan Ecotourism Village Bunaken	Sub KTA Manado	APBN	Kementerian PU							
i)	Pembangunan sarana dan prasarana desa wisata di Kabupaten Minahasa Utara	Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal							
j)	Pembangunan major project pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional	Sub KTA Likupang Darat	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan							
k)	Pembangunan dermaga wisata di Kawasan Danau Tondano	KTA Tondano	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa							
l)	Pembangunan boardwalk ekowisata mangrove	KTA Tondano	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa							
m)	Pembangunan resort dan dive center di Pulau Bangka	KTA Likupang	Swasta	Swasta							
n)	Pembangunan ranch kuda di Pulau Bangka	KTA Likupang	Swasta	Swasta							
o)	Pembangunan sarana hunian pariwisata/peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (homestagl dan usaha pariwisata lainnya di Desa Lihunu	DPN Manado-Likupang KTA Likupang Sub KTA Likupang Kepulauan Pulau Bangka Desa Lihunu	APBN	Kementerian PU							
p)	Pembangunan sarana hunian pariwisata/peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (homestay) dan usaha pariwisata lainnya di Desa Kahuku	DPN Manado-Likupang KTA Likupang Sub KTA Likupang Kepulauan Pulau Bangka Desa Kahuku	APBN	Kementerian PU							
q)	Pembangunan sarana hunian pariwisata/peningkatan kualitas rumah swadaya untuk usaha pondok wisata (*homestag*) dan usaha Pariwisata lainnya di Desa Libas	DPN Manado-Likupang KTA Likupang Sub KTA Likupang Kepulauan Pulau Bangka Desa Libas	APBN	Kementerian PU							
r)	Penataan kawasan Pariwisata Pulau Bangka di kawasan strategis kabupaten	DPN Manado Likupang KTA Likupang Sub KTA Likupang Kepulauan Pulau Bangka Desa Lihunu, Desa Ehe, Desa Kahuku, dan Desa Libas	APBN	Kementerian PU							
5) Peningkatan SDM Industri Pariwisata											
a)	Penyelenggaraan program penagangan dalam negeri di perusahaan	DPN Manado - Likupang	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan							
b)	Pelatihan berbasis kompetensi Provinsi Sulawesi Utara di Balai Latihan Keria Minahasa Utara	KTA Likupang	APBN	Kementerian Ketenagakerjaan							
c)	Sertifikasi SDM Pariwisata	DPN Manado - Likupang	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif							
d)	Sertifikasi SDM ekonomi kreatif	DPN Manado - Likupang	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif							
e)	Pelatihan SDM Pariwisata berbasis kompetensi: sosialisasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dan perizinan berusaha pemanfaatan ruang laut pesisir dan pulau pulau kecil	Kota Manado Kabupaten Minahasa Utara Kota Bitung Kota Tomohon Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Kelautan dan Perikanan							
f)	Pelatihan usaha jasa Kepariwisataan (13 jasa usaha)	DPN Manado - Likupang	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif							
g)	Kerja sama lembaga pendidikan dengan industri Pariwisata/ dunia usaha	Sub KTA Manado	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara							
h)	Pemberdayaan Masyarakat Lokal Penunjang	DPN Manado-Bunaken dan sekitarnya	APBN	Kementerian Pariwisata							
		DPP Bukit Kasih	APBD Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi							
		DPP Paleloan									
		DPP Pangalisang									
		DPP Sumaru Endo									
		DPP Tasik Oki									
		DPSP Manado-Likupang									
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe									
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Talaud									
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow									
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa									
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa Selatan									
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa Tenggara									
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa Utara									
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kota Bitung									
		Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kota Manado									
		Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Agrowisata Lengkoan-Wawona									
		Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Agrowisata Tombariri									
		Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Danau Tondano									
		Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Ekowisata Danau Linow									
		Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Ekowisata Gunung Lokon									
		Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Ekowisata Rurukan									
		Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kampung Arab									
		Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kampung Cina									

			Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (Kphk) Tangkoko (Cagar Alam Duasudara di Taman Wisata Alam Batuputih Dan Taman Wisata Alam Batu Angus)									
			Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kota Tua									
			Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Lembeh Selatan									
			Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pulau Bunaken Dsk									
			Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pulau Manado Tua									
			Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pulau Siladen									
			Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang									
			Kawasan Wisata Kuliner Maesa									
			KPPN Bitung-Lembeh dan sekitarnya	APBN	Kementerian Pariwisata							
			KPPN Bogani Nani Wartabone dan sekitarnya									
			KPPN Bunaken dan sekitarnya									
			KPPN Likupang dan sekitarnya									
			KPPN Manado Kota dan sekitarnya									
			KPPN Sangihe-Talaud dan sekitarnya									
			KPPN Tomohon-Tondano dan sekitarnya									
			KSPN Bitung-Lembeh dan sekitarnya									
			KSPN Bunaken dan sekitarnya									
			KSPN Tomohon-Tondano dan sekitarnya									
			KTA Airmadidi									
			KTA Bitung Lembeh									
			KTA Likupang									
			KTA Manado Bunaken									
			KTA Minahasa Pantai									
			KTA Tomohon									
			KTA Tondano									
6) Pengembangan UMKM												
	a)	Pelatihan vokasional bagi usaha mikro di sektor Pariwisata	DPN Manado - Likupang	APBN	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
	b)	Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM perkoperasian										
	c)	Peningkatan kompetensi SDM UKM melalui pendampingan dan praktik lapangan pada sektor kluster usaha UKM										
	d)	Mini plant produk olahan kalapa menjadi clear coconut oil sebagai unggulan daerah	KTA Manado-Bunaken									
	e)	Bimbingan teknis pembuatan kain *eco print*	DPN Manado - Likupang	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara							
	f)	Bimbingan teknis kerajinan berbahan baku bambu										
	g)	Bimbingan teknis pengolahan ikan bagi wirausaha baru										
	h)	Pelatihan UMKM Pariwisata		APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif							
	i)	Pengembangan kapasitas bisnis pelaku usaha perdagangan										
	j)	Implementasi proses bisnis dan industri 4.0 dalam pra-produksi, produksi, hingga										
	k)	Sertifikasi program SNI CHSE untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK)										
7) Pengembangan Investasi Pariwisata												
	a)	Pemetaan potensi industri, temu bisnis dan fasilitasi kemitraan industri Pariwisata dan	Provinsi Sulawesi Utara	APBN	Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif /Badan Ekonomi Kreatif							
	b)	Penyusunan Investment *Project Ready to Offer* (IPRO) bidang Pariwisata Likupang	KTA Manado-Likupang									
	c)	Pendataan nilai realisasi investasi	DPN Manado - Likupang									
	d)	Advokasi (pendampingan) insentif penanaman modal sektor Pariwisata dan ekonomi										
	e)	Pendampingan dan monitoring progres KEK Likupang										
	f)	Fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal wilayah III		APBN	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan koordinasi Penanaman Modal							
	g)	IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) pada Destinasi Pariwisata Prioritas		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan koordinasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa							
	h)	Harmonisasi regulasi terkait perizinan berusaha di pusat dan daerah		APBN	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan koordinasi Penanaman Modal							
	i)	Pemetaan peluang komoditi ekspor produk pertanian dan kehutanan										
	j)	Pemetaan sistem logistik perdagangan antarpulau di kawasan Provinsi Sulawesi Utara dan sekitarnya										
	k)	Pengembangan sistem logistik DerDasaran dan KEK										
	l)	Identifikasi eksportir dan calon eksportir potensial berdasarkan produk										
	m)	Fasilitas kebijakan peningkatan nilai tambah ekspor produk pertanian dan kehutanan										
	n)	Evaluasi kinerja logistik barang okok hasil pertanian, industri, dan peternakan										
	o)	Monitoring dan evaluasi business sustainabilitg yang berdampak kepada sektor ekonomi dan industri Pariwisata										
	p)	Promosi investasi sektor industri (forum bisnis) di Jepang, Korea, dan Amerika Serikat	KTA Manado-Bunaken KTA Likupang DPN Manado - Likupang									
	q)	Fasilitasi promosi investasi sektor Pariwisata berskala nasional melalui pihak ketiga/ konsultan										
	r)	Penyusunan profil produk industri investasi kecil dan menengah		APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara							
	s)	Fasilitasi Pengembangan investasi bahan baku industri		APBN	Kementerian Perindustrian							
8) Pengembangan Pariwisata Cerdas (Smart Tourism) Berbasis Pesona Alam, Aset Budaya dan Kearifan Lokal, Kesehatan dan Kebugaran, dan MICE												
	a)		DPN Manado-Bunaken dan sekitarnya	APBN, APBD Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi , Dinas Kebudayaan Provinsi, DKIPS							
			DPP Bukit Kasih									
			DPP Paleloan									
			DPP Pangalisang									
			DPP Sumaru Endo									
			DPP Tasik Oki									
			DPSP Manado-Likupang									
			Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Talaud									
			Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow									
			Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
			Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									

					Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	APBD Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi , Dinas Kebudayaan Provinsi, DKIPS								
					Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa										
					Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kabupaten Minahasa Utara										
					Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kota Bitung										
					Kawasan Pariwisata di Wilayah Pesisir Kota Manado										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Agrowisata Lengkoan-Wawona										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Agrowisata Tombariri										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Danau Tondano										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Ekowisata Danau Linow										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Ekowisata Gunung Lokon										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Ekowisata Rurukan										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kampung Arab										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kampung Cina										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (Kphk) Tangkoko (Cagar Alam Duasudara di Taman Wisata Alam Batuputih Dan Taman Wisata Alam Batu Angus)										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Kota Tua										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Lembeh Selatan										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pulau Bunaken Dsk										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pulau Manado Tua										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pulau Siladen										
					Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang										
					Kawasan Wisata Kuliner Maesa										
					KPPN Bitung-Lembeh dan sekitarnya	APBN	Dinas Pariwisata Provinsi , Dinas Kebudayaan Provinsi, DKIPS								
					KPPN Bogani Nani Wartabone dan sekitarnya										
					KPPN Bunaken dan sekitarnya										
					KPPN Likupang dan sekitarnya										
					KPPN Manado Kota dan sekitarnya										
					KPPN Sangihe-Talaud dan sekitarnya										
					KPPN Tomohon-Tondano dan sekitarnya										
					KSPN Bitung-Lembeh dan sekitarnya	APBD Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi , Dinas Kebudayaan Provinsi, DKIPS								
					KSPN Bunaken dan sekitarnya										
					KSPN Tomohon-Tondano dan sekitarnya										
					KTA Airmadidi										
					KTA Bitung Lembeh										
					KTA Likupang										
					KTA Manado Bunaken										
					KTA Minahasa Pantai										
					KTA Tomohon										
					KTA Tondano										
	9) Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota														
		a) Peningkatan Sarana dan Prasarana			Agrowisata (Kebun Hortikultura)	APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota								
					Agrowisata Kopi Koya										
					Air Panas Mugoyunggung										
					Air Terjun 3 Dimensi Desa Lolayan										
					Air Terjun Badaro Desa Badaro (Kec. Modayag)										
					Air Terjun Batunangan Desa Siloda										
					Air Terjun Boliagonan										
					Air Terjun Garini Desa Bukaka (Kec. Kotabunan)										
					Air Terjun Inuai Desa Inuai										
					Air Terjun Kandera										
					Air Terjun Kayuuwi										
					Air Terjun Lelema										
					Air Terjun Liberia Desa Liberia Timur (Kec. Modayag)										
					Air Terjun Lolayan										
					Air Terjun Mariri Lama Desa Mariri Lama										
					Air Terjun Matabulu Desa Matabulu (Kec. Nuangan)										
					Air Terjun Mengkang										
					Air Terjun Molipungan										
					Air Terjun Mominit										
					Air Terjun Muntoi										
					Air Terjun Nomoram Kembuan										
					Air Terjun Nomorampa										
					Air Terjun Pogabat Desa Otam										
					Air Terjun Poniki										
					Air Terjun Pontak Desa Gihang Kec. Kaidipang										
					Air Terjun Popontolen										
					Air Terjun Purworejo Desa Purworejo (Kec. Modayag)										
					Air Terjun Ranowangko Kecamatan Kombi										
					Air Terjun Sauk Desa Sauk										
					Air Terjun Tadunan										
					Air Terjun Tincep										
					Air Terjun Toley Tumpaan										
					Air Terjun Tombolikat Desa Tombolikat (Kec. Tutuyan)										
					Air Terjun Tondey										
					Air Terjun Toraut										
					Arung Jeram Timbukar										
					Atraksi Pendaratan Penyu Kawasan Pantai Timur										
					Batas Kota Kalasey Dive Spot										
					Batu Berkamar Desa Toraut										
					Batu Dinding Keloota										
					Batu Tulis Kapataran										
					Biara Mater Dei										
					Bukide Batu										
					Bukit Doa Pinaling										
					Bukit Duluong										
					Bukit Salib Sumarayar										
					Danau Bulilin										
					Danau Bunong Desa Togid (Kec. Tutuyan)										
					Danau Kapeta Siau										
					Danau Mongawo										
					Danau Nenas Desa Kotabunan Selatan (Kec.Kotabunan)										
					Danau Pononotok Desa Motongkad (Kec. Motongkad)										
					Danau Ranowangko Tataaran										
					Danau Tampusu										
					Danau Tutud										
					Desa Adat Musi										
					Desa Wisata Beong										
					Desa Wisata Kapeta										
					Desa Wisata Lamanggo										
					Desa Wisata Mini										
					Desa Wisata Tapile										
					Diving Centre Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)										
					Dungusan Soputan										
					Embong Tote Dsk Desa Tote Kec. Bolangitang Barat										
					Geowisata Desa Wangga										
					Gereja Tua Watumea										
					Glamour Camping Danau Mooat Desa Mooat (Kec. Mooat)										
					Goa Kristal Inuai										
					Gua 50 Kamar Kawangkoan										
					Gua Jepang Sinuian Remboken										
					Gua Jepang Tonsea										
					Gugusan Pulau Mahoro										

Gunung Ambang
Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu
Gunung Api Karangetang
Gunung Mahawu
Gunung Payung Poopo
Gunung Soputan
Hutan Kota Bonawang
Hutan Mangrove Desa Domisil
Hutan Mangrove Desa Iyok (Kec. Nuangan)
Hutan Mangrove Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)
Kapal Karam Tahuna (Diving Ship Wreck / Kapal Jepang Masa Perang Dunia Ke 2)
Kawasan Agrowisata Likupang Selatan Dan Sekitarnya
Kawasan Agrowisata Rurukan
Kawasan Air Terjun Kali Pineleng
Kawasan Air Terjun Kima Atas
Kawasan Benteng Moraya
Kawasan Bisnis Bahu Mall
Kawasan Bisnis Manado Town Square
Kawasan Bisnis Marina
Kawasan Bisnis Megamall
Kawasan Bukit Bambe'an
Kawasan Bukit Kasih
Kawasan Dimembe
Kawasan Gelanggang Olahraga Balitka
Kawasan Hutan Mangrove Meras
Kawasan Hutan Mangrove Tongkaina
Kawasan Kampung Jawa Tondano Dan Makam Kyai Modjo
Kawasan Kauditan-Lembean Dan Sekitarnya
Kawasan Kema Dan Sekitarnya
Kawasan Kolongan-Kuwil Dan Sekitarnya
Kawasan Kuliner Karang Ria
Kawasan Kuliner Maasing
Kawasan Kuliner Sindulang
Kawasan Kuliner Tumumpa
Kawasan Makam Imam Bonjol
Kawasan Makam Sam Ratulangi
Kawasan Mangrove
Kawasan Pantai Barat Minahasa (Pantai Mangatasik, Pinasungkulan, Kumu, Telling,
Kawasan Pantai Malalayang (Malalayang Beach Walk) (Malalayang Beach Walk)
Kawasan Penyangga Taman Laut Bunaken (Wisata Bahari Tatapaan Poparenq)
Kawasan Pulau-Pulau Nusa Tabukan
Kawasan Pulau-Pulau Tatoareng (Pulau Nitu)
Kawasan Pulau-Pulau Tatoareng (Pulau Siha)
Kawasan Pusat Kota/Pasar Tua dan Sekitarnya
Kawasan Sumaru Endo
Kawasan Talawaan Dan Sekitarnya
Kawasan Tanjung Binerean
Kawasan Teluk Manado
Kawasan Watu Pinawetengan
Kawasan Wisata Aertembaga
Kawasan Wisata Air Terjun Baki (Desa Lolan II)
Kawasan Wisata Air Terjun Kuala Batau (Desa Ambang Ii)
Kawasan Wisata Air Terjun Motondong (Desa Lolan II)
Kawasan Wisata Air Terjun Tekaan Telu
Kawasan Wisata Budaya Komalig (Istana Raja Dan Makam Raja) Desa
Kawasan Wisata Budaya Makam Raja Bua Hotinimbang (Desa Langagon)
Kawasan Wisata Bukit Wawo
Kawasan Wisata Dirgantara
Kawasan Wisata Gunung Lokon
Kawasan Wisata Kampung Nelayan Desa Maelang
Kawasan Wisata Kasawari
Kawasan Wisata Kuliner Girian
Kawasan Wisata Lembeh Utara
Kawasan Wisata Mangrove
Kawasan Wisata Negeri Diatas Awan Desa Lolayan
Kawasan Wisata Pacuan Kuda
Kawasan Wisata Pantai Babo
Kawasan Wisata Pantai Bungin
Kawasan Wisata Pantai Desa Bolaang I
Kawasan Wisata Pantai Lolak Indah
Kawasan Wisata Pantai Lolan (Desa Lolan I Dan Ii)
Kawasan Wisata Pantai Loni Desa Labuang Uki
Kawasan Wisata Pantai Nyara Desa Poigar
Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih Tanjung Mariri
Kawasan Wisata Pantai Sumpit Desa Bolangat
Kawasan Wisata Penangkaran Burung Maleo Desa Tambun
Kawasan Wisata Ranowulu
Kawasan Wisata Religius Patung Yesus Memberkati Balirangeng
Kawasan Wisata Taman Bung Karno di Desa Balingareng, Kecamatan Siau Timur
Kawasan Wisata Uap Belerang
Kawasan Wisata Waduk Pindol
Kawasan Wisata Wokoan
Kawasan Wori-Tiwoho Dan Sekitarnya
Kebun Raya Megawati
Kentur Mahawu
Kompleks Keraton Boroko
Lomban Water Park
Makam Penginjil Sibold Ulvers
Makam Raja Hasan Van Gobel
Makatete Dan Padies Kimuwu
Mangrove Binuanga Dot Desa Binuanga Kec. Bolangitang Timur
Mata Air Panas Tountimomor
Menara Pandang Paleloan
Meriam Kuno Pulau Mangas
Monumen Kawangkoan
Muck Dive Poopo (Atraksi Lumba-Lumba)
Pantai Abadi Desa Iyok (Kec. Motongkad)
Pantai Ar Panas Timbako di Desa Mini
Pantai Batu Merah
Pantai Batu Pinagut - P. Bongkil
Pantai Bentenan
Pantai Bira Kiama
Pantai Bunga Indah
Pantai Buyat Desa Buyat (Kec. Kotabunan)
Pantai Dapalan
Pantai Iyok Desa Iyok (Kec. Nuangan)
Pantai Jembatan Cinta Desa Tombolikat Selatan(Kec. Tutuyan)
Pantai Jiko Belanga/Tanjung Flesko Desa Jiko Belanga (Kec. Nuangan)
Pantai Jiko/Pantai Woka Desa Dodap Pantai (Kec. Tutuyan)
Pantai Kalongan
Pantai Kasaraeng
Pantai Kekel Desa Tanjung Sidupa Kec. Pinogaluman
Pantai Kolongan Beha Kec. Tahuna Barat
Pantai Kotabunan Desa Kotabunan (Kec.Kotabunan)
Pantai Loyow/Pasir Putih Loyow Desa Loyow (Kec. Nuangan)
Pantai Matabulu Desa Matabulu (Kec. Nuangan)
Pantai Matabulu/Pasir Putih Matabulu Desa Matabulu (Kec. Nuangan)
Pantai Modisi
Pantai Moinit Desa Tawaang
Pantai Molinow
Pantai Molobog Desa Molobog (Kec. Motongkad)

					Pantai Motongkad/Pantai Ariang Desa Motongkad (Kec. Motongkad)									
					Pantai Nuangan Desa Nuangan (Kec. Nuangan)									
					Pantai Pananualeng									
					Pantai Pangi									
					Pantai Paret Desa Paret (Kec. Kotabunan)									
					Pantai Pasir Putih/Tanjung Merah									
					Pantai Patokan/Chimoki Beach Desa Jiko (Kec. Motongkad)									
					Pantai Perjuangan Desa Matani (Mangrove Pateteau)									
					Pantai Riang									
					Pantai Salongo Timur									
					Pantai Sangkub Timur Dsk Desa Sangkub Timur Kec. Sangkub									
					Pantai Silar/Tanjung Silar Desa Jiko (Kec. Motongkad)									
					Pantai Tanjung Dulang Desa Solo Kec. Kaidipang									
					Pantai Tanjung Mobongo									
					Pantai Tawara									
					Pantai Tersakiti									
					Pantai Togid Desa Togid (Kec. Tutuyan)									
					Pantai Tombolikat Desa Tombolikat (Kec. Tutuyan)									
					Pantai Tutuyan Desa Tutuyan (Kec. Tutuyan)									
					Pantai Wakat Desa Wakat Kec. Bolangitang Barat									
					Pantai Wisata Bahari Mariri Baru Desa Mariri Baru									
					Paragliding Sehan Landjar Site Desa Togid (Kec. Tutuyan)									
					Paralayang Puncak Gunung Kamintong Dan Pulau Likri									
					Paralayang Tetempangan									
					Pemandian Air Panas									
					Pemandian Air Panas (Geo Wisata) Desa Bakan									
					Pemandian Air Panas Citawaya Pinonobatuan									
					Pemandian Air Panas Kelewaha									
					Pemandian Air Panas Lowian									
					Pemandian Air Panas Raturaindang Desa Leilem									
					Pemandian Ulina Tondano Selatan									
					Penghasil Minuman Tradisional Captikus Kec. Motoling, Tareran, Ranoyapo,									
					Permandian Air Panas Tumatangtang									
					Pulau Biaro									
					Pulau Bombuyanov/P.Nenas									
					Pulau Dakupang									
					Pulau Garat Nanusa									
					Pulau Gunung Ruang									
					Pulau Ibantong Desa Togid (Kec.Tutuyan)									
					Pulau Intata - Kakorotan - Nanusa									
					Pulau Kumeke Desa Kotabunan (Kec.Kotabunan)									
					Pulau Laga Besar Desa Iyok (Kec. Nuangan)									
					Pulau Laga Kecil Desa Iyok (Kec. Nuangan)									
					Pulau Mendaku									
					Pulau Poa									
					Pulau Racun Desa Bulawan (Kec. Kotabunan)									
					Pulau Salimburung									
					Pulau Sara									
					Pulau Tiga									
					Puncak Keletambal									
					Puncak Lose/Panenteng									
					Puncak Pusunge									
					Puncak Urongo									
					Taman Sema									
					Taman Wisata Toar Lumimuut									
					Tanjung Kotabunan Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)									
					Tanjung Ompuk Desa Lolak									
					Tanjung Pangi									
					Tempat Pemandian Pingkan di Tombariri									
					Tetetana									
					Tracking Gunung Potong Pangu									
					Transpatoa Ocean Park									
					Wisata Babo Beach									
					Wisata Bahari Pulau Salu Bobaki Maelang									
					Wisata Deaga Bay									
					Wisata Embung Desa Mopait									
					Wisata Embung Desa Tuduaog									
					Wisata Embung Kinomaligan									
					Wisata Gunung Kramat Bumbungon Kec. Dumoga									
					Wisata Holtikultura Modoinding									
					Wisata Mangrov Tombariri									
					Wisata Mangrove Panango									
					Wisata Mangrove Sondaken									
					Wisata Nyiur Melambai Babo									
					Wisata Pantai Hidayah Babo									
					Wisata Reliji Werdhi Agung Selatan									
					Wisata Sungai Lembah Indah Konarom									
					DPN Manado-Bunaken dan sekitarnya. Destinasi pariwisata prioritas Manado-Likupang. KEK Likupang. kawasan pengembangan pariwisata nasional Bunaken dan sekitarnya; kawasan pengembangan pariwisata nasional Bitung-Lembeh dan sekitarnya; kawasan pengembangan pariwisata nasional Tomohon-Tondano dan sekitarnya; kawasan pengembangan pariwisata nasional Bogani Nani Wartabone dan sekitarnya; kawasan pengembangan pariwisata nasional Manado Kota dan sekitarnya; kawasan pengembangan pariwisata nasional Likupang dan sekitarnya; dan kawasan pengembangan pariwisata nasional Sangihe-Talaud dan sekitarnya. kawasan strategis pariwisata nasional Bunaken dan sekitarnya; kawasan strategis pariwisata nasional Bitung-Lembeh dan sekitarnya; dan kawasan strategis pariwisata nasional Tomohon-Tondano dan sekitarnya. key tourism area Manado Bunaken di Kota Manado; key tourism area Likupang di Kabupaten Minahasa Utara; key tourism area Bitung Lembeh Di Kota Bitung; key tourism area Tomohon di Kota Tomohon; key tourism area Tondano di Kabupaten Minahasa; key tourism area Minahasa Pantai di Kabupaten Minahasa; dan key tourism area Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara.	APBN	Kementerian Pariwisata								
					DPP Bukit Kasih di Kabupaten Minahasa; DPP Sumaru Endo di Kabupaten Minahasa; DPP Paleloan di Kabupaten Minahasa; DPP Tasik Oki di Kabupaten Minahasa Utara; dan DPP Pangalisang di Kota Manado. KPPP Gunung Mahawu di Kota Tomohon; KPPP Wisata Air Terjun Tekaan Telu di Kota Tomohon; KPPP Pemandian Air Panas Tumatangtang di Kota Tomohon; KPPP Kawasan Wisata Wokoan di Kota Tomohon; KPPP Kawasan Wisata Bukit Wawo di Kota Tomohon; KPPP Kawasan Hutan Mangrove Meras di Kota Manado; KPPP Kawasan Hutan Mangrove Tongkaina di Kota Manado; KPPP Pantai Malalayang di Kota Manado; KPPP Teluk Manado di Kota Manado; KPPP Kawasan Wisata Lembeh Utara di Kota Bitung; KPPP Kawasan Wisata Ranowulu di Kota Bitung; KPPP Kawasan Wisata Kuliner Girian di Kota Bitung; KPPP Kawasan Wisata Aertembaga di Kota Bitung; KPPP Kawasan Bukit Kasih di Kabupaten Minahasa; KPPP Kawasan Benteng Moraya di Kabupaten Minahasa; KPPP Kawasan Sumaru Endo di Kabupaten Minahasa; KPPP Kawasan Pantai Barat Minahasa (Pantai Mangatasik, Pinasungkulan, Kumu, KPPP Kawasan Watu Pinawetengan di Kabupaten Minahasa;	APBD Provinsi	Dinas Pariwisata Provinsi								

						KPPP Kawasan Makam Sam Ratulangi di Kabupaten Minahasa; KPPP Kawasan Kampung Jawa Tondano dan Makam Kyai Modjo di Kabupaten KPPP Kawasan Makam Imam Bonjol di Kabupaten Minahasa; KPPP Air Terjun Nomorampa di Kabupaten Minahasa; KPPP Pantai Moinit di Kabupaten Minahasa Selatan; KPPP Kawasan Penyangga Taman Laut Bunaken (Wisata Bahari Tatapaan Popareng) KPPP Pantai Molinow di Kabupaten Minahasa Selatan; KPPP Gunung Payung Poopo di Kabupaten Minahasa Selatan; KPPP Bukit Duluong di Kabupaten Minahasa Selatan; KPPP Pantai Perjuangan Desa Matani di Kabupaten Minahasa Selatan; KPPP Wisata Mangrove Sondaken di Kabupaten Minahasa Selatan; KPPP Kawasan Kolongan-Kuwil dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara; KPPP Kawasan Kauditan-Lembean dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara; KPPP Kawasan Wori-Tiwoho dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara; KPPP Kawasan Kema dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara; KPPP Pantai Bentenan di Kabupaten Minahasa Tenggara; KPPP Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara; KPPP Danau Buliin di Kabupaten Minahasa Tenggara; KPPP Desa Adat Musi di Kabupaten Kepulauan Talaud; KPPP Pulau Intata – Kakorotan – Nanusa di Kabupaten Kepulauan Talaud; KPPP Gugusan Pulau Mahoro di Kabupaten Kepulauan Sitaro; KPPP Pulau Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro; KPPP Kawasan Wisata Penangkaran Burung Maleo Desa Tambun di Kabupaten KPPP Agrowisata (Kebun Hortikultura) di Kabupaten Bolaang Mongondow; KPPP Air Terjun Mantoi di Kabupaten Bolaang Mongondow; KPPP Goa Kristal Inuai di Kabupaten Bolaang Mongondow; KPPP Air Terjun Mominit di Kabupaten Bolaang Mongondow; KPPP Air Panas Mugoyunggung di Kabupaten Bolaang Mongondow; KPPP Hutan Kota Bonawang di Kota Kotamobagu; KPPP Air Terjun Boliagonan di Kota Kotamobagu; KPPP Pantai Bunga Indah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; KPPP Kompleks Keraton Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; KPPP Pantai Modisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; KPPP Wisata Mangrove Panango di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; KPPP Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; KPPP Pulau Bombuyanoy/P.Nenas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; KPPP Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan KPPP Pantai Kasaraeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe. KSPP Ekowisata Danau Linouw di Kota Tomohon; KSPP Kawasan Ekowisata Gunung Lokon di Kota Tomohon; KSPP Kawasan Ekowisata Rurukan di Kota Tomohon; KSPP Kawasan Pulau Bunaken dan sekitarnya di Kota Manado; KSPP Pulau Manado Tua di Kota Manado; KSPP Pulau Siladen di Kota Manado; KSPP Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H. V. Worang di Kota Manado; KSPP Kawasan Kampung Arab di Kota Manado; KSPP Kawasan Kampung Cina di Kota Manado; KSPP Kawasan Kota Tua di Kota Manado; KSPP Kawasan Wisata Lembeh Selatan di Kota Bitung; KSPP Kawasan Wisata Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tangkoko KSPP Kawasan Wisata Kuliner Maesa di Kota Bitung; KSPP Kawasan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa; KSPP Kawasan Agrowisata Lengkoan-Wawona di Kabupaten Minahasa; KSPP Kawasan Agrowisata Tombariri di Kabupaten Minahasa; KSPP Kawasan Pantai Timur Minahasa (Pantai Rumbia, Temboan, Bukit Tinggi, KSPP Kawasan Ekowisata Kebun Raya Minahasa Makawembeng di Kabupaten KSPP Kawasan Lapangan Sam Ratulangi Tondano di Kabupaten Minahasa; KSPP Kawasan Bukit Sasayahan di Kabupaten Minahasa Selatan; KSPP Kawasan Pantai Alar di Kabupaten Minahasa Selatan; KSPP Kawasan Air Terjun Kulung-kulung dan Tunan Wiau Lapi di Kabupaten KSPP Kawasan GABATA (Gangga, Bangka dan Talise) dan sekitarnya di Kabupaten KSPP Kawasan Nain-Mantehage dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara; KSPP Kawasan Airmadidi-Sawangan dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara; KSPP Kawasan Pulisan-Marinsow dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara; KSPP Kebun Raya Megawati di Kabupaten Minahasa Tenggara; KSPP Pulau Sara di Kabupaten Kepulauan Talaud; KSPP Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Sitaro; KSPP Pulau Tiga di Kabupaten Bolaang Mongondow KSPP Wisata Gunung Kramat Bumbungon Kec. Dumoga di Kabupaten Bolaang KSPP Air Terjun Molipungan di Kota Kotamobagu; KSPP Pantai Batu Pinagut – Pulau Bongkil di Kabupaten Bolaang Mongondow KSPP Makam Raja Hasan Van Gobel di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; KSPP Danau Mooat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; KSPP Pantai Jiko dsk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; KSPP Pantai Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur KSPP Kawasan Mangrove di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan KSPP Pantai Pananualeng di Kabupaten Kepulauan Sangihe.													
		10) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																
			a) Pemberdayaan Masyarakat Lokal Penunjang Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Agrowisata (Kebun Hortikultura) Agrowisata Kopi Koya Air Panas Mugoyunggung Air Terjun 3 Dimensi Desa Lolayan Air Terjun Badaro Desa Badaro (Kec. Modayag) Air Terjun Batunangan Desa Sidoda Air Terjun Boliagonan Air Terjun Garini Desa Bukaka (Kec. Kotabunan) Air Terjun Inuai Desa Inuai Air Terjun Kandera Air Terjun Kayuuwi Air Terjun Lelema Air Terjun Liberia Desa Liberia Timur (Kec. Modayag) Air Terjun Lolayan Air Terjun Mariri Lama Desa Mariri Lama Air Terjun Matabulu Desa Matabulu (Kec. Nuangan) Air Terjun Mengkang Air Terjun Molipungan Air Terjun Mominit Air Terjun Muntoi Air Terjun Nomoram Kembuan Air Terjun Nomorampa Air Terjun Pogabat Desa Otam Air Terjun Poniki Air Terjun Pontak Desa Gihang Kec. Kaidipang Air Terjun Popontolen Air Terjun Purworejo Desa Purworejo (Kec. Modayag) Air Terjun Ranowangko Kecamatan Kombi Air Terjun Sauk Desa Sauk Air Terjun Tadunan Air Terjun Tincep Air Terjun Toley Tumpaan Air Terjun Tombolikat Desa Tombolikat (Kec. Tutuyan) Air Terjun Tondey Air Terjun Toraut Arung Jeram Timbukar Atraksi Pendaratan Penyu Kawasan Pantai Timur Batas Kota Kalasey Dive Spot Batu Berkamar Desa Toraut Batu Dinding Keleota Batu Tulis Kapataran Biara Mater Dei Bukide Batu	APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota														

Bukit Doa Pinaling
Bukit Duluong
Bukit Salib Sumarayar
Danau Bulilin
Danau Bunong Desa Togid (Kec. Tutuyan)
Danau Kapeta Siau
Danau Mongawo
Danau Nenas Desa Kotabunan Selatan (Kec.Kotabunan)
Danau Ponomotok Desa Motongkad (Kec. Motongkad)
Danau Ranowangko Tataaran
Danau Tampusu
Danau Tutud
Desa Adat Musi
Desa Wisata Beong
Desa Wisata Kapeta
Desa Wisata Lamanggo
Desa Wisata Mini
Desa Wisata Tapile
Diving Centre Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)
Dungusan Soputan
Embong Tote Dsk Desa Tote Kec. Bolangitang Barat
Geowisata Desa Wangga
Gereja Tua Watumea
Glamour Camping Danau Mooat Desa Mooat (Kec. Mooat)
Goa Kristal Inuai
Gua 50 Kamar Kawangkoan
Gua Jepang Sinuian Remboken
Gua Jepang Tonsea
Gugusan Pulau Mahoro
Gunung Ambang
Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu
Gunung Api Karangetang
Gunung Mahawu
Gunung Payung Poopo
Gunung Soputan
Hutan Kota Bonawang
Hutan Mangrove Desa Domisil
Hutan Mangrove Desa Iyok (Kec. Nuangan)
Hutan Mangrove Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)
Kapal Karam Tahuna (Diving Ship Wreck / Kapal Jepang Masa Perang Dunia Ke 2)
Kawasan Agrowisata Likupang Selatan Dan Sekitarnya
Kawasan Agrowisata Rurukan
Kawasan Air Terjun Kali Pineleng
Kawasan Air Terjun Kima Atas
Kawasan Benteng Moraya
Kawasan Bisnis Bahu Mall
Kawasan Bisnis Manado Town Square
Kawasan Bisnis Marina
Kawasan Bisnis Megamall
Kawasan Bukit Bambe'an
Kawasan Bukit Kasih
Kawasan Dimembe
Kawasan Gelanggang Olahraga Balitka
Kawasan Hutan Mangrove Meras
Kawasan Hutan Mangrove Tongkaina
Kawasan Kampung Jawa Tondano Dan Makam Kyai Modjo
Kawasan Kauditan-Lembean Dan Sekitarnya
Kawasan Kema Dan Sekitarnya
Kawasan Kolongan-Kawil Dan Sekitarnya
Kawasan Kuliner Karang Ria
Kawasan Kuliner Maasing
Kawasan Kuliner Sindulang
Kawasan Kuliner Tumumpa
Kawasan Makam Imam Bonjol
Kawasan Makam Sam Ratulangi
Kawasan Mangrove
Kawasan Pantai Barat Minahasa (Pantai Mangatasik, Pinasungkulan, Kumu, Telling,
Kawasan Pantai Malalayang (Malalayang Beach Walk)
Kawasan Penyangga Taman Laut Bunaken (Wisata Bahari Tatapaan Poparenq)
Kawasan Pulau-Pulau Nusa Tabukan
Kawasan Pulau-Pulau Tatoareng (Pulau Nitu)
Kawasan Pulau-Pulau Tatoareng (Pulau Siha)
Kawasan Pusat Kota/Pasar Tua dan Sekitarnya
Kawasan Sumaru Endo
Kawasan Talawaan Dan Sekitarnya
Kawasan Tanjung Binerean
Kawasan Teluk Manado
Kawasan Watu Pinawetengan
Kawasan Wisata Aertembaga
Kawasan Wisata Air Terjun Baki (Desa Lolan II)
Kawasan Wisata Air Terjun Kuala Batau (Desa Ambang Ii)
Kawasan Wisata Air Terjun Motondong (Desa Lolan II)
Kawasan Wisata Air Terjun Tekaan Telu
Kawasan Wisata Budaya Komalig (Istana Raja Dan Makam Raja) Desa
Kawasan Wisata Budaya Makam Raja Bua Hotinimbang (Desa Langagon)
Kawasan Wisata Bukit Wawo
Kawasan Wisata Dirgantara
Kawasan Wisata Gunung Lokon
Kawasan Wisata Kampung Nelayan Desa Maelang
Kawasan Wisata Kasawari
Kawasan Wisata Kuliner Girian
Kawasan Wisata Lembeh Utara
Kawasan Wisata Mangrove
Kawasan Wisata Negeri Diatas Awan Desa Lolayan
Kawasan Wisata Pacuan Kuda
Kawasan Wisata Pantai Babo
Kawasan Wisata Pantai Bungin
Kawasan Wisata Pantai Desa Bolaang I
Kawasan Wisata Pantai Lokak Indah
Kawasan Wisata Pantai Lolan (Desa Lolan I Dan Ii)
Kawasan Wisata Pantai Loni Desa Labuang Uki
Kawasan Wisata Pantai Nyara Desa Poigar
Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih Tanjung Mariri
Kawasan Wisata Pantai Sumpit Desa Bolangat
Kawasan Wisata Penangkaran Burung Maleo Desa Tambun
Kawasan Wisata Ranowulu
Kawasan Wisata Religius Patung Yesus Memberkati Balirangeng
Kawasan Wisata Taman Bung Karno di Desa Balingareng, Kecamatan Siau Timur
Kawasan Wisata Uap Belerang
Kawasan Wisata Waduk Pindol
Kawasan Wisata Woloan
Kawasan Wori-Tiwoho Dan Sekitarnya
Kebun Raya Megawati
Kentur Mahawu
Kompleks Keraton Boroko
Lomban Water Park
Makam Penginjil Sibold Ulvers
Makam Raja Hasan Van Gobel
Makatete Dan Padies Kimuwu
Mangrove Binuanga Dst Desa Binuanga Kec. Bolangitang Timur
Mata Air Panas Tountimomor

						Menara Pandang Palekoan											
						Meriam Kuno Pulau Mangas											
						Monumen Kawangkoan											
						Muck Dive Poopo (Atraksi Lumba-Lumba)											
						Pantai Abadi Desa Iyok (Kec. Motongkad)											
						Pantai Ar Panas Timbako di Desa Mini											
						Pantai Batu Merah											
						Pantai Batu Pinagut - P. Bongkil											
						Pantai Bentenan											
						Pantai Bira Kiama											
						Pantai Bunga Indah											
						Pantai Buyat Desa Buyat (Kec. Kotabunan)											
						Pantai Dapalan											
						Pantai Iyok Desa Iyok (Kec. Nuangan)											
						Pantai Jembatan Cinta Desa Tombolikat Selatan(Kec. Tutuyan)											
						Pantai Jiko Belanga/Tanjung Flesko Desa Jiko Belanga (Kec. Nuangan)											
						Pantai Jiko/Pantai Woka Desa Dodap Pantai (Kec. Tutuyan)											
						Pantai Kalongan											
						Pantai Kasaraeng											
						Pantai Kekel Desa Tanjung Sidupa Kec. Pinogaluman											
						Pantai Kolongan Beha Kec. Tahuna Barat											
						Pantai Kotabunan Desa Kotabunan (Kec.Kotabunan)											
						Pantai Loyow/Pasir Putih Loyow Desa Loyow (Kec. Nuangan)											
						Pantai Matabulu Desa Matabulu (Kec. Nuangan)											
						Pantai Matabulu/Pasir Putih Matabulu Desa Matabulu (Kec. Nuangan)											
						Pantai Modisi											
						Pantai Moinit Desa Tawaang											
						Pantai Molinow											
						Pantai Molobog Desa Molobog (Kec. Motongkad)											
						Pantai Motongkad/Pantai Ariang Desa Motongkad (Kec. Motongkad)											
						Pantai Nuangan Desa Nuangan (Kec. Nuangan)											
						Pantai Pananualeng											
						Pantai Pangi											
						Pantai Paret Desa Paret (Kec. Kotabunan)											
						Pantai Pasir Putih/Tanjung Merah											
						Pantai Patokan/Chimoki Beach Desa Jiko (Kec. Motongkad)											
						Pantai Perjuangan Desa Matani (Mangrove Pateteran)											
						Pantai Riang											
						Pantai Salongo Timur											
						Pantai Sangkub Timur Dsk Desa Sangkub Timur Kec. Sangkub											
						Pantai Silar/Tanjung Silar Desa Jiko (Kec. Motongkad)											
						Pantai Tanjung Dalang Desa Solo Kec. Kaidipang											
						Pantai Tanjung Mobongo											
						Pantai Tawara											
						Pantai Tersakiti											
						Pantai Togid Desa Togid (Kec. Tutuyan)											
						Pantai Tombolikat Desa Tombolikat (Kec. Tutuyan)											
						Pantai Tutuyan Desa Tutuyan (Kec. Tutuyan)											
						Pantai Wakat Desa Wakat Kec. Bolangitang Barat											
						Pantai Wisata Bahari Mariri Baru Desa Mariri Baru											
						Paraqkiding Sehan Landjar Site Desa Togid (Kec. Tutuyan)											
						Paralayang Puncak Gunung Kamintong Dan Pulau Likri											
						Paralayang Tetempangan											
						Pemandian Air Panas											
						Pemandian Air Panas (Geo Wisata) Desa Bakan											
						Pemandian Air Panas Citawaya Pinonobatuan											
						Pemandian Air Panas Kelewaha											
						Pemandian Air Panas Lowian											
						Pemandian Air Panas Raturaindang Desa Leilem											
						Pemandian Ulunu Tondano Selatan											
						Penghasil Minuman Tradisional Captikus Kec. Motoling, Tareran, Ranoyapo,											
						Permandian Air Panas Tumatangtang											
						Pulau Biaro											
						Pulau Bombuyanoy/P.Nenas											
						Pulau Dakupang											
						Pulau Garat Nanusa											
						Pulau Gunung Ruang											
						Pulau Ibantong Desa Togid (Kec.Tutuyan)											
						Pulau Intata - Kakorotan - Nanusa											
						Pulau Kumeke Desa Kotabunan (Kec.Kotabunan)											
						Pulau Laga Besar Desa Iyok (Kec. Nuangan)											
						Pulau Laga Kecil Desa Iyok (Kec. Nuangan)											
						Pulau Mendaku											
						Pulau Poa											
						Pulau Racun Desa Bulawan (Kec. Kotabunan)											
						Pulau Salimburung											
						Pulau Sara											
						Pulau Tiga											
						Puncak Keletambal											
						Puncak Lose/Panenteng											
						Puncak Pusunge											
						Puncak Urongo											
						Taman Senna											
						Taman Wisata Toar Luminuut											
						Tanjung Kotabunan Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)											
						Tanjung Ompuk Desa Lolak											
						Tanjung Pangi											
						Tempat Pemandian Pingkan di Tombariri											
						Tetetana											
						Tracking Gunung Potong Pangu											
						Transpatoa Ocean Park											
						Wisata Babo Beach											
						Wisata Bahari Pulau Salu Bobaki Maelang											
						Wisata Deaga Bay											
						Wisata Embung Desa Mopait											
						Wisata Embung Desa Tuduaog											
						Wisata Embung Kinomaligan											
						Wisata Gunung Kramat Bumbungon Kec. Dumoga											
						Wisata Hohikultura Modoinding											
						Wisata Mangrov Tombariri											
						Wisata Mangrove Panango											
						Wisata Mangrove Sondaken											
						Wisata Nyiur Melambai Babo											
						Wisata Pantai Hidayah Babo											
						Wisata Religi Werdhi Agung Selatan											
						Wisata Sungai Lembah Indah Kongarom											
			11) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														
			a)	Pemasaran dan Promosi		Agrowisata (Kebun Hortikultura)	APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota									
						Agrowisata Kopi Koya											
						Air Panas Mugoyunggung											
						Air Terjun 3 Dimensi Desa Lolayan											
						Air Terjun Badaro Desa Badaro (Kec. Modayag)											
						Air Terjun Batunangan Desa Sikloda											
						Air Terjun Bolagonan											
						Air Terjun Garini Desa Bukaka (Kec. Kotabunan)											
						Air Terjun Inuai Desa Inuai											
						Air Terjun Kandera											
						Air Terjun Kayuuwi											
						Air Terjun Lelema											
						Air Terjun Liberia Desa Liberia Timur (Kec. Modayag)											

Air Terjun Lolayan
Air Terjun Mariri Lama Desa Mariri Lama
Air Terjun Matabulu Desa Matabulu (Kec. Nuangan)
Air Terjun Mengkang
Air Terjun Molipungan
Air Terjun Mominit
Air Terjun Muntoi
Air Terjun Nomoram Kembuan
Air Terjun Nomorampa
Air Terjun Pogabat Desa Otam
Air Terjun Poniki
Air Terjun Pontak Desa Gihang Kec. Kaidipang
Air Terjun Popontolen
Air Terjun Purworejo Desa Purworejo (Kec. Modayag)
Air Terjun Ranowangko Kecamatan Kombi
Air Terjun Sauk Desa Sauk
Air Terjun Tadunan
Air Terjun Tincep
Air Terjun Toley Tumpaan
Air Terjun Tombolikat Desa Tombolikat (Kec. Tutuyan)
Air Terjun Tondey
Air Terjun Toraut
Arung Jeram Timbukar
Atraksi Pendaratan Penyu Kawasan Pantai Timur
Batas Kota Kalasey Dive Spot
Batu Berkamar Desa Toraut
Batu Dinding Keleota
Batu Tulis Kapataran
Biara Mater Dei
Bukide Batu
Bukit Doa Pinaling
Bukit Duluong
Bukit Salib Sumarayar
Danau Bulilin
Danau Bunong Desa Togid (Kec. Tutuyan)
Danau Kapeta Siau
Danau Mongawo
Danau Nenas Desa Kotabunan Selatan (Kec.Kotabunan)
Danau Pononotok Desa Motongkad (Kec. Motongkad)
Danau Ranowangko Tataaran
Danau Tampusu
Danau Tutud
Desa Adat Musi
Desa Wisata Beong
Desa Wisata Kapeta
Desa Wisata Lamanggo
Desa Wisata Mini
Desa Wisata Tapile
Diving Centre Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)
Dungusan Soputan
Embong Tote Duk Desa Tote Kec. Bolangitang Barat
Geowisata Desa Wangga
Gereja Tua Watumea
Glamour Camping Danau Mooat Desa Mooat (Kec. Mooat)
Goa Kristal Inuai
Gua 50 Kamar Kawangkoan
Gua Jepang Sinuian Remboken
Gua Jepang Tonsea
Gugusan Pulau Mahoro
Gunung Ambang
Gunung Api Bawah Laut Banua Wuhu
Gunung Api Karangetang
Gunung Mahawu
Gunung Payung Poopo
Gunung Soputan
Hutan Kota Bonawang
Hutan Mangrove Desa Domisil
Hutan Mangrove Desa Iyok (Kec. Nuangan)
Hutan Mangrove Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)
Kapal Karam Tahuna (Diving Ship Wreck / Kapal Jepang Masa Perang Dunia Ke 2)
Kawasan Agrowisata Likupang Selatan Dan Sekitarnya
Kawasan Agrowisata Rurukan
Kawasan Air Terjun Kali Pineleng
Kawasan Air Terjun Kima Atas
Kawasan Benteng Moraya
Kawasan Bisnis Bahu Mall
Kawasan Bisnis Manado Town Square
Kawasan Bisnis Marina
Kawasan Bisnis Megamall
Kawasan Bukit Bambe'an
Kawasan Bukit Kasih
Kawasan Dimembe
Kawasan Gelanggang Olahraga Balitka
Kawasan Hutan Mangrove Meras
Kawasan Hutan Mangrove Tongkaina
Kawasan Kampung Jawa Tondano Dan Makam Kyai Modjo
Kawasan Kauditan-Lembean Dan Sekitarnya
Kawasan Kema Dan Sekitarnya
Kawasan Kolongan-Kuwil Dan Sekitarnya
Kawasan Kuliner Karang Ria
Kawasan Kuliner Maasing
Kawasan Kuliner Sindulang
Kawasan Kuliner Tumumpa
Kawasan Makam Imam Bonjol
Kawasan Makam Sam Ratulangi
Kawasan Mangrove
Kawasan Pantai Barat Minahasa (Pantai Mangatasik, Pinasungkulan, Kumu, Telling,
Kawasan Pantai Malalayang (Malalayang Beach Walk)
Kawasan Penyangga Taman Laut Bunaken (Wisata Bahari Tatapaan Poparenq)
Kawasan Pulau-Pulau Nusa Tabukan
Kawasan Pulau-Pulau Tatoareng (Pulau Nitu)
Kawasan Pulau-Pulau Tatoareng (Pulau Siha)
Kawasan Pusat Kota/Pasar Tua dan Sekitarnya
Kawasan Sumaru Endo
Kawasan Talawaan Dan Sekitarnya
Kawasan Tanjung Binerean
Kawasan Teluk Manado
Kawasan Watu Pinawetengan
Kawasan Wisata Aertembaga
Kawasan Wisata Air Terjun Baki (Desa Lolan II)
Kawasan Wisata Air Terjun Kuala Batau (Desa Ambang Ii)
Kawasan Wisata Air Terjun Motondong (Desa Lolan II)
Kawasan Wisata Air Terjun Tekaan Telu
Kawasan Wisata Budaya Komalig (Istana Raja Dan Makam Raja) Desa
Kawasan Wisata Budaya Makam Raja Bua Hotinumbang (Desa Langagon)
Kawasan Wisata Bukit Wawo
Kawasan Wisata Dirgantara
Kawasan Wisata Gunung Lokon
Kawasan Wisata Kampung Nelayan Desa Maelang
Kawasan Wisata Kasawari
Kawasan Wisata Kuliner Girian

Kawasan Wisata Lembeh Utara
Kawasan Wisata Mangrove
Kawasan Wisata Negeri Diatas Awan Desa Lolayan
Kawasan Wisata Pacuan Kuda
Kawasan Wisata Pantai Babo
Kawasan Wisata Pantai Bungin
Kawasan Wisata Pantai Desa Bokaang I
Kawasan Wisata Pantai Lolak Indah
Kawasan Wisata Pantai Lolan (Desa Lolan I Dan Ii)
Kawasan Wisata Pantai Loni Desa Labuang Uki
Kawasan Wisata Pantai Nyara Desa Poigar
Kawasan Wisata Pantai Pasir Putih Tanjung Mariri
Kawasan Wisata Pantai Sumpit Desa Bolangat
Kawasan Wisata Penangkaran Burung Maleo Desa Tambun
Kawasan Wisata Ranowulu
Kawasan Wisata Religius Patung Yesus Memberkati Balirangeng
Kawasan Wisata Taman Bung Karno di Desa Balingareng, Kecamatan Siau Timur
Kawasan Wisata Uap Bekrang
Kawasan Wisata Waduk Pindol
Kawasan Wisata Woloan
Kawasan Wori-Tiwoho Dan Sekitarnya
Kebun Raya Megawati
Kentur Mahawu
Kompleks Keraton Boroko
Lomban Water Park
Makam Penginjil Sibold Ulvers
Makam Raja Hasan Van Gobel
Makatete Dan Padies Kimuwu
Mangrove Binuanga Dst Desa Binuanga Kec. Bolangitang Timur
Mata Air Panas Tountimomor
Menara Pandang Paleloan
Meriam Kuno Pulau Miangas
Monumen Kawangkoan
Muck Dive Poopo (Atraksi Lumba-Lumba)
Pantai Abadi Desa Iyok (Kec. Motongkad)
Pantai Ar Panas Timbako di Desa Mini
Pantai Batu Merah
Pantai Batu Pinagut - P. Bongkil
Pantai Bentenan
Pantai Bira Kiama
Pantai Bunga Indah
Pantai Buyat Desa Buyat (Kec. Kotabunan)
Pantai Dapsalan
Pantai Iyok Desa Iyok (Kec. Nuangan)
Pantai Jembatan Cinta Desa Tombolikat Selatan(Kec. Tutuyan)
Pantai Jiko Belanga/Tanjung Flesko Desa Jiko Belanga (Kec. Nuangan)
Pantai Jiko/Pantai Woka Desa Dodap Pantai (Kec. Tutuyan)
Pantai Kalongan
Pantai Kasaraeng
Pantai Kekel Desa Tanjung Sidupa Kec. Pinogaluman
Pantai Kolongan Beha Kec. Tahuna Barat
Pantai Kotabunan Desa Kotabunan (Kec.Kotabunan)
Pantai Loyow/Pasir Putih Loyow Desa Loyow (Kec. Nuangan)
Pantai Matabulu Desa Matabulu (Kec. Nuangan)
Pantai Matabulu/Pasir Putih Matabulu Desa Matabulu (Kec. Nuangan)
Pantai Modisi
Pantai Moinit Desa Tawaang
Pantai Molinow
Pantai Molobog Desa Molobog (Kec. Motongkad)
Pantai Motongkad/Pantai Ariang Desa Motongkad (Kec. Motongkad)
Pantai Nuangan Desa Nuangan (Kec. Nuangan)
Pantai Pananualeng
Pantai Pangi
Pantai Paret Desa Paret (Kec. Kotabunan)
Pantai Pasir Putih/Tanjung Merah
Pantai Patokan/Chimoki Beach Desa Jiko (Kec. Motongkad)
Pantai Perjuangan Desa Matani (Mangrove Pateteau)
Pantai Riang
Pantai Salongo Timur
Pantai Sangkub Timur Dsk Desa Sangkub Timur Kec. Sangkub
Pantai Silar/Tanjung Silar Desa Jiko (Kec. Motongkad)
Pantai Tanjung Dulang Desa Solo Kec. Kaidipang
Pantai Tanjung Mobongo
Pantai Tawara
Pantai Tersakiti
Pantai Togid Desa Togid (Kec. Tutuyan)
Pantai Tombolikat Desa Tombolikat (Kec. Tutuyan)
Pantai Tutuyan Desa Tutuyan (Kec. Tutuyan)
Pantai Wakat Desa Wakat Kec. Bolangitang Barat
Pantai Wisata Bahari Mariri Baru Desa Mariri Baru
Paragliding Sehan Landjar Site Desa Togid (Kec. Tutuyan)
Paralayang Puncak Gunung Kamintong Dan Pulau Likri
Paralayang Tetempangan
Pemandian Air Panas
Pemandian Air Panas (Geo Wisata) Desa Bakan
Pemandian Air Panas Citawaya Pinonobatuan
Pemandian Air Panas Kelewaha
Pemandian Air Panas Lowian
Pemandian Air Panas Raturaindang Desa Leilem
Pemandian Ulunu Tondano Selatan
Penghasil Minuman Tradisional Captikus Kec. Motoling, Tareran, Ranoyapo,
Permandian Air Panas Tumatangtang
Pulau Biaro
Pulau Bombuyanov/P.Nenas
Pulau Dakupang
Pulau Garat Nanusa
Pulau Gunung Ruang
Pulau Ibantong Desa Togid (Kec.Tutuyan)
Pulau Intata - Kakorotan - Nanusa
Pulau Kumeke Desa Kotabunan (Kec.Kotabunan)
Pulau Laga Besar Desa Iyok (Kec. Nuangan)
Pulau Laga Kecil Desa Iyok (Kec. Nuangan)
Pulau Mendaku
Pulau Poa
Pulau Racun Desa Bulawan (Kec. Kotabunan)
Pulau Salimburung
Pulau Sara
Pulau Tiga
Puncak Keletambal
Puncak Lose/Panenteng
Puncak Pusunge
Puncak Urongo
Taman Sema
Taman Wisata Toar Luminuut
Tanjung Kotabunan Desa Kotabunan Selatan (Kec. Kotabunan)
Tanjung Ompuk Desa Lolak
Tanjung Pangi
Tempat Pemandian Pingkan di Tombariri
Tetetana
Tracking Gunung Potong Pangu
Transpatoa Ocean Park

					Wisata Babo Beach										
					Wisata Bahari Pulau Salu Bobaki Maelang										
					Wisata Deaga Bay										
					Wisata Embung Desa Mopait										
					Wisata Embung Desa Tuduaog										
					Wisata Embung Kinomaligan										
					Wisata Gunung Kramat Bumbungon Kec. Dumoga										
					Wisata Hotikultura Modoinding										
					Wisata Mangrov Tombariri										
					Wisata Mangrove Panangao										
					Wisata Mangrove Sondaken										
					Wisata Nyiur Melambai Babo										
					Wisata Pantai Hidayah Babo										
					Wisata Religi Werdhi Agung Selatan										
					Wisata Sunggi Lembah Indah Konarom										
		e. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi													
			1)	Konservasi dan Restorasi	Air Akesio, di Desa Beong, Kecamatan Siau Tengah di Kabupaten Kepulauan Siau	APBN,APBD Provinsi	Kementerian Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi								
			2)	Perlindungan dan Pengembangan	Altar Batu Mokotompia Kec. Modayag Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Arca Tomatowa di Kabupaten Minahasa										
					Batu Relief / Kompleks Batu Bertulis Kapataran di Kabupaten Minahasa										
					Batu Siow Kurur Manembo-nembo, Kel. Tanjang Merah, Kec. Matuari di Kota										
					Bekas Lubang Tambang Belanda di Kec. Kotabunan di Kabupaten Bolaang										
					Benteng Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Benteng Portugis di Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat di Kabupaten										
					Benteng Sampini/Benteng Santarosa (bangunan benteng sudah tidak teridentifikasi) di										
					eng Pengawas Kanawong di Desa Kanawong, Kecamatan Siau Barat di Kabupaten										
					Gedung Loji Tondano di Kabupaten Minahasa										
					Gedung Meisjesschool di Kota Tomohon										
					Gereja Bunda Hati Kudus Woloan di Kota Tomohon										
					Gereja GMIM Sentrum Manado/Tugu PD II/Waruga di Kota Manado										
					Gereja Gmim Sion Tomohon di Kota Tomohon										
					Gereja Hati Kudus Portugis di Kota Tomohon										
					Gereja Tua GMIM Eris di Kabupaten Minahasa										
					Gereja Tua MALAK (Matungkas Laikit) di Kabupaten Minahasa Utara										
					Gua Jepang Kawangkoan di Kabupaten Minahasa										
					Gua Jepang Likupang di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara										
					Gua jepang Sendangan Tengah (50 ruang) di Kabupaten Minahasa										
					Gua Jepang Sumanti, Kayawu di Kota Tomohon										
					Gua Jepang Tonsea Lama di Kabupaten Minahasa										
					Gua Tengkorak Makalehi di Desa Makalehi Utara, Kecamatan Siau Barat di										
					h Raja Tagulandang di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang di Kabupaten										
					Istana Manganitu-Raja WMP, Mocodompis di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Istana Raja Borokó (Komalig R.S. Pontoh Kadipang Besar) di Kabupaten Bolaang										
					ja peninggalan (GMIST Ulu) di Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur di										
					Kasahu (Bekas Tapak Kaki Raksasa Onding/Perempuan) di Desa Bumbiha,										
					Kawasan Pillbox Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kawasan Tinggalan Jepang di Kabupaten Minahasa										
					Kawasan Waruga Likupang di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kawasan Waruga Tatelu di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kawasan Waruga Treman di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kawasan Waruga Tumalintang di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kinali di Desa Kinali, Kecamatan Siau Barat Utara di Kabupaten Kepulauan Siau										
					Klenteng Ban Hin Kiong di Kota Manado										
					Komp Makam Sekar Kedaton (Permaisuri H.B V) di Kota Manado										
					Komp Watu Tumotowa Talikuran di Kabupaten Minahasa										
					Komplek Megalitik Guaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Kabupaten										
					Komplek Pilbok Tinoor di Kota Tomohon										
					Kompleks Waruga Airmadidi Bawah di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kompleks Waruga Borgo Mahakeret Barat di Kota Manado										
					Kompleks Waruga Kaima di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kompleks Waruga Kiawa I di Kabupaten Minahasa										
					Kompleks Waruga Kokole II di Kabupaten Minahasa Utara										
					kompleks Waruga Laikit di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kompleks Waruga Matungkas di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kompleks Waruga Maumbi di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kompleks Waruga Niwanua Kakaskasen di Kota Tomohon										
					Kompleks Waruga Opoworang di Kota Tomohon										
					Kompleks Waruga Sawangan di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kompleks Waruga Wanua Ure Sukur di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kubur Tebing Batu Dumoga di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Lesung Batu Ratu Oki di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Linsaha di Desa Lamanggo, Kecamatan Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau										
					Lumpang Batu Bukaka I Kec. Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Lumpang Batu Bukaka II Kec. Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Lumpang Batu Kec. Modayag Barat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Lumpang Batu Kotabunan Kec. Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Lumpang Batu Mokitompia Kec, Modayag Timurka di Kabupaten Bolaang										
					Makam Palljawa di Desa Paseng, Kecamatan Siau Barat di Kabupaten Kepulauan Siau										
					Makam Raja Ismail Jacobus di Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat di										
					Makam Bataha Santiago di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Makam Bua Hotinimbang Manopo Sugeha di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Makam Henric Pontoh di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara										
					Makam Islam Tua Tumaintang di Kota Manado										
					Makam Korban Pembantaian Tentara Jepang di Desa Makalehi, Kecamatan Siau Barat										
					Makam Kulano Manento Nan di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Makam Kyai Mojo di Kabupaten Minahasa										
					Makam Pahlawan Ibu Maria J.C. Walanda Maramis di Kabupaten Minahasa Utara										
					Makam Pahlawan Tuanku Imam Bonjol di Kabupaten Minahasa										
					Makam Palljawa Buise di Desa Buise, Kecamatan Siau Timur di Kabupaten										
					Makam Panglima Hengkeng U Naung di Desa Kawang, Kecamatan Siau Barat Utara										
					Makam Panglima Walandango di Desa Tulusan, Kecamatan Tagulandang di										
					Makam Pendeta Fredrick Kelling di Kelurahan Balehumara, Kecamatan Tagulandang										
					Makam Pendeta Paul Kelling di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur di										
					Makam Raja M Mocodompis di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Makam Raja Abraham di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Makam Raja Aling Janis di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur di Kabupaten										
					Makam Raja Anthony Jafet Bogar di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur di										
					Makam Raja Biga di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Makam Raja Don Jeronimus Winsulangi di Desa Pebe, Kecamatan Siau Barat di										
					Makam Raja Dulag Kansil di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur di										
					Makam Raja H.Ph Jacobs di Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang di Kabupaten										
					Makam Raja Lokongbanua di Kelurahan Paseng, Kecamatan Siau Barat di Kabupaten										
					Makam Raja Makaampo Wawengehe di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Makam Raja Paparang di Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat di Kabupaten										
					Makam Raja Tatehe Hoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Makam Raja-raja Sangihe / Makam Raja dan Tokoh Masyarakat yang dipancung										
					Makam Tua Borgo Kabupaten Minahasa Tenggara di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Makam Tua Raja-Raja Gereh di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Masjid Nurul Iman di Kota Tomohon										
					Masjid Tua A.S. Bachdar di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Megalit Desa Tolok di Kabupaten Minahasa										
					Menara Suar Belanda / Tugu di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Menhir Tumpaan dan sebaran Waruga di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Merah Putih di Desa Peling, Kecamatan Siau Barat di Kabupaten Kepulauan Siau										
					Mesin Penumbuk Biji Emas di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Minanga di Desa Minanga, Kecamatan Tagulandang Utara di Kabupaten Kepulauan										
					Monumen Dotu Lolong Lasut di Kota Manado										
					Monumen Jepang di Kel. Tanjang Merah, Kec. Matuari di Kota Bitung										
					Monumen Jose Rizal di Kel. Madidir Weru, Kec. Madidir di Kota Bitung										
					Monumen Kedaulatan NKRI di Desa Makalehi Utara, Kecamatan Siau Barat di										
					Monumen Runtukahu Pusung, Kel. Girian Atas, Kec. Girian di Kota Bitung										

				Monumen Trikora, Kel. Batu Lubang, Kec. Lembeh Selatan di Kota Bitung									
				Monumen Xaverius T. Dotulong di Kel. Madidir Weru, Kec. Madidir di Kota Bitung									
				Nahepese di Desa Peling, Kecamatan Siau Barat di Kabupaten Kepulauan Siau									
				Penjara Tua Kema Portugis (Penjara Tua Kema) di Kabupaten Minahasa Utara									
				Pilboks Pantai Kora-Kora di Kabupaten Minahasa									
				Pillbox Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan									
				Pondasi Bekas Kincir Air Belanda Kec. Modayag Barat di Kabupaten Bolaang									
				Pondasi Penampungan Air Kec. Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Rumah Adat Monopi Desa Mengkang di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Rumah Tradisional Buyat Tengah Kec. Kotabunan di Kabupaten Bolaang									
				Rumah Tradisional Tombolikat Kec. Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Rumah Tua Pendeta Zending dan Makam Elizabeth Steller di Kabupaten Kepulauan									
				Salana di Desa Lamanggo, Kecamatan Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau									
				Siau di Desa Beong, Kecamatan Siau Tengah di Kabupaten Kepulauan Siau									
				Situs Waruga Toarlominu di Kabupaten Minahasa									
				Sumur Peninggalan Pendeta Belanda Pertama di Bolaang Mongondow Desa Bilalang									
				Tempayan Kec. Modayag Barat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Tengkorak dan Sumur Air Hidup Kampung Birarikei di Desa Birarikei, Kecamatan									
				Tengkorak Liang Tembo Tanganga di Desa Tanaki, Kecamatan Siau Barat Selatan di									
				Terowongan Tambang Emas Belanda Paret (Lubang Tambang) di Kotabunan di									
				Tugu Pahlawan Salampaga di Kota Manado									
				Tugu Pahlawan Samudera Trikora di Kel. Bitung Tengah, Kec. Maesa di Kota Bitung									
				Tugu Ratu Lohoraung di Kecamatan Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Siau									
				Tulada Peling di Desa Peling, Kecamatan Siau Barat di Kabupaten Kepulauan Siau									
				Veldbox Bukit Tareten di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Veldbox Pantai Buku (Stelling) di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Villa Ellisabeth Steller di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Waruga Batu Likupang Timur di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa									
				Waruga Eiben Heizer di Kota Tomohon									
				Waruga Kaasar di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Kaasar I di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Kaasar II di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Kakaskasen Satu di Kota Tomohon									
				Waruga Kamalete di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Kamanga di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Karagesan di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Kauditan di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Kawiley di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Kayuuwi di Kabupaten Minahasa									
				Waruga Kema di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Kiawa Barat di Kabupaten Minahasa									
				Waruga Kokole I di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Kokomakasiau-siau di Kabupaten Minahasa									
				Waruga Kolongan di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Kolongan II di Kota Tomohon									
				Waruga Lembean di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Lota / Kulekaling di Kabupaten Minahasa									
				Waruga Mamarinding Kinali di Kabupaten Minahasa									
				Waruga Mapanget di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Matelenteng di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Minawanua di Kabupaten Minahasa									
				Waruga Negeri Lama di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Niwanua Kolongan Tengah di Kota Tomohon									
				Waruga Pangiaran Lontak di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa									
				Waruga Pena'en di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Talawaan di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Talawaan II di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Tara-Tara di Kota Tomohon									
				Waruga Tenget Watu di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Timbukar Sendangan di Kabupaten Minahasa									
				Waruga Tololiu Palar di Kota Tomohon									
				Waruga Wangurer di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Warusa Sae di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Waruga Warukapas di Kabupaten Minahasa Utara di Kabupaten Minahasa Utara									
				Watu Pasak Wanua Lowu (menhir) di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Watu Pasak Wanua Nataan (menhir) di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Watu Pasak Wanua Pangu (Menhir) di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Watu Pasak Wanua Pangu II Menhir di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Watu Pasak Wanua Ratahan (Menhir) di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Watu Pasak Wanua Wawali (Menhir) di Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Watu Pasuwengan di Kota Tomohon									
				Watu Pinatik Kali di Kabupaten Minahasa									
				Watu Pinawetengan di Kabupaten Minahasa									
				Watu Sumanti dan Waruga Kayawu di Kota Tomohon									
				Watu Tumotowa (Toi-toi) di Kabupaten Minahasa									
				Watu Tumotowa Tinoor di Kota Tomohon									
				Wisata Budaya Gereja Kalvali / Gereja Pertama di Desa Bolaang 1 di Kabupaten									
				Wisata Budaya Kuburan Penduduk Tionghoa di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Wisata Budaya Makam Kapten Kanal Zaman Kerajaan Bolaang di Kabupaten Bolaang									
				Wisata Budaya Makam Pendeta dan Guru Pertama di Bolmong di Kabupaten Bolaang									
				Wisata Budaya Tudu In Passi di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Wisata Kuburan Bogani Desa Passi II di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Wisata Religi Motawok di Kabupaten Bolaang Mongondow									
	3)	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya di Kawasan Pariwasata		Kabupaten Minahasa	APBN, APBD Provinsi	Kementeian Pariwisata, Kementerian							
				Kabupaten Minahasa Tenggara									
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil													
		1)	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan di Kawasan Pariwisata	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Kementerian Pariwisata, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota							
				Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
				Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
				Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
				Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Kabupaten Minahasa									
				Kabupaten Minahasa Selatan									
				Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Kabupaten Minahasa Utara									
				Kota Bitung									
				Kota Manado									
				Kota Tomohon									
				Wilayah Laut									
e. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam													
		1)	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst di Kawasan Pariwisata	Kabupaten Minahasa Tenggara	APBN	Kementerian ESDM							
f. Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
		1)	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan Pariwisata	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBN	Kementerian ESDM							
				Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
				Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
				Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Kabupaten Minahasa Selatan									
				Kabupaten Minahasa Utara									
				Wilayah Laut									
g. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam													
		1)	Penetapan Koridor Hidupan Kawasan Migrasi Satwa di Kawasan Pariwisata	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBN	Kementerian Pariwisata							
				Wilayah Laut									
h. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan													
		1)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja	Wilayah Laut	APBN	Kementerian							
i. Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi													

	1)	Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan Pariwisata	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian Perhubungan								
			Kabupaten Kepulauan Sangihe										
			Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
			Kabupaten Kepulauan Talaud										
			Kabupaten Minahasa Utara										
			Kota Manado										
			Wilayah Laut										
	j. Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Kawasan Pariwisata		Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota dan Wilayah Laut	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas Pariwisata Kehutanan Provinsi								
2.8	**Perwujudan Kawasan Permukiman**												
	a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman												
	1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Balehumara dan Bahoi	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Dua I	Swasta	Swasta								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Satu I										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Tumpaan I										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Tarorane	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Satu Barat	Swasta	Swasta								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Wenang Selatan										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Dua II										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Tumpaan II										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Utara	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
	2)	Penyusunan DED Pembangunan	Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Balehumara dan Bahoi	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Dua I	Swasta	Swasta								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Satu I										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Tumpaan I										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Tarorane	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Satu Barat	Swasta	Swasta								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Wenang Selatan										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Dua II										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Tumpaan II										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Utara	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
	3)	Penyusunan Izin Lokasi Pembangunan	Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Balehumara dan Bahoi	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Dua I	Swasta	Swasta								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Satu I										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Tumpaan I										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Tarorane	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Satu Barat	Swasta	Swasta								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Wenang Selatan										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Dua II										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Tumpaan II										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Utara	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
	4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Balehumara dan Bahoi	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Dua I	Swasta	Swasta								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Satu I										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Tumpaan I										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Tarorane	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Satu Barat	Swasta	Swasta								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Wenang Selatan										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Dua II										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Tumpaan II										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Utara	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
	5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan	Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Balehumara dan Bahoi	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Dua I	Swasta	Swasta								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Satu I										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Tumpaan I										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Tarorane	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Satu Barat	Swasta	Swasta								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Wenang Selatan										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Dua II										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Tumpaan II										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Utara	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
	6)	Pembangunan	Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Balehumara dan Bahoi	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Dua I	Swasta	Swasta								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Satu I										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Tumpaan I										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sindulang Satu, Sindulang Dua, Bitung										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Tarorane	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Satu Barat	Swasta	Swasta								
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Wenang Selatan										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Malalayang Dua II										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Tumpaan II										
			Fasilitas Pendukung Perdagangan dan Jasa di Sario Utara	APBD Kabupaten/Kota	Dinas PUPR								
	7)	Pembangunan Gedung Kesenian	Kota Manado	APBN	Kementerian PU								
	8)	Pembangunan Fasilitas Olahraga Standar Nasional (PON)	Kota Manado dan Kota Kotamobagu	APBN	Kementerian PU								
	b. Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru												
	1)	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	APBN, APBD Provinsi, ABPD Kabupaten/ Kota	Kementerian PKP, Kementerian PU, Dinas Perkim Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, Dinas PU Kabupaten/Kota								
	2)	Rehabilitasi dan Renovasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota										
	3)	Pemantauan Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota										
	4)	Kawasan Perkotaan Sedang	Kota Manado dan Kota Bitung										
	5)	Pengembangan Kawasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Kab. Kepulauan Sangihe	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan										
	c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota												
	1)	Penentuan Lokasi untuk Konsolidasi Tanah di Kawasan Permukiman Kumuh	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	APBN	Kementerian ATR/BPN								
	2)	Penyusunan Rencana Umum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah (RUPKT)	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota										
	3)	Pendataan Objek dan Subjek Konsolidasi Tanah di Kawasan Permukiman Kumuh	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota										
	4)	Konsolidasi Tanah di Kawasan Permukiman Kumuh	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota										
	d. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi												
	1)	Penyusunan Feasibility Study Rencana Relokasi Perumahan	Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Perkim Provinsi, BPBD Provinsi								
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Selatan										
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Timur										
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Utara										
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Bitung										
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Manado										
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kotamobagu										
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa										
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Selatan										
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Tenggara										
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Utara										
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow										
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										

			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kota Kotamobagu									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Minahasa Selatan									
	2)	Penyusunan DED Relokasi Perumahan	Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Perkim Provinsi, BPBD Provinsi							
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Timur									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Bitung									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Manado									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kotamobagu									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Tenggara									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kota Kotamobagu									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Minahasa Selatan									
	3)	Penetapan Lokasi Relokasi Perumahan	Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Perkim Provinsi, BPBD Provinsi							
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Timur									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Bitung									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Manado									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kotamobagu									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Tenggara									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kota Kotamobagu									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Minahasa Selatan									
	4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Relokasi Perumahan	Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Perkim Provinsi, DLH Provinsi							
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Timur									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Bitung									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Manado									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kotamobagu									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Tenggara									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kota Kotamobagu									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Minahasa Selatan									
	5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Relokasi Perumahan	Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Perkim Provinsi							
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Timur									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Bitung									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Manado									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kotamobagu									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Tenggara									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kota Kotamobagu									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Minahasa Selatan									
	6)	Penyelesaian Santunan Tanah Relokasi Perumahan	Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow	APBD Provinsi	Dinas Perkim Provinsi							
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Timur									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Bitung									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Manado									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kotamobagu									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Tenggara									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kota Kotamobagu									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Minahasa Selatan									
	7)	Pembangunan Relokasi Perumahan	Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow	APBN	Kementerian PU, Kementerian PKP							
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Timur									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Bolaang Mongondow Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Bitung									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kota Manado									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Kotamobagu									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Tenggara									
			Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi di Minahasa Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Kota Kotamobagu									
			Kawasan Rawan Bencana Sesar di Minahasa Selatan									
	e. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
	1)	Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Provinsi Sulawesi Utara	APBD Provinsi	BPBD, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							

2)	Peningkatan keandalan infrastruktur berketahanan bencana seismik	Provinsi Sulawesi Utara	APBN, APBD, Investor dan/atau kerjasama pendanaan	BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Swasta dan/atau kerjasama pendanaan								
f. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana												
1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Jalur dan Ruang Evakuasi	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah dan atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota								
2)	Penyusunan DED Pembangunan Jalur dan Ruang Evakuasi	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Ambang										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Awu bagian utara										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Karangetang										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Lokon dan Gunung										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Ruang dan Gunung Sub										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Soputan										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Sub Marine 1922										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Tangkoko										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Sesar Amurang-Belang										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Lembeh										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Likupang										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Manado-Kema										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Ratatotok										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar yang termasuk dalam sistem Sesar										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Selatan										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Utara										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Bitung										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Kotamobagu										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Manado										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Tomohon										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Bolaang Mongondow										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Selatan										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Utara										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Bitung										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Kotamobagu										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Manado										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Tomohon										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Selatan										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Utara										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Bitung										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Kotamobagu										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Manado										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Tomohon										
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur dan Ruang Evakuasi	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota								
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Ambang										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Awu bagian utara										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Karangetang										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Lokon dan Gunung										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Ruang dan Gunung Sub										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Soputan										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Sub Marine 1922										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Tangkoko										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Sesar Amurang-Belang										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Lembeh										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Likupang										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Manado-Kema										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Ratatotok										
		Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar yang termasuk dalam sistem Sesar										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Selatan										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Utara										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Bitung										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Kotamobagu										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Manado										
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Tomohon										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Bolaang Mongondow										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Selatan										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Tenggara										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Utara										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Bitung										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Kotamobagu										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Manado										
		Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Tomohon										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Sangihe										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Talaud										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										

					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Selatan												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Tenggara												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Utara												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Bitung												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Kotamobagu												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Manado												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Tomohon												
			4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Jalur dan Ruang Evakuasi	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota, DLH Provinsi										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Ambang												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Awu bagian utara												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Karangetang												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Lokon dan Gunung												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Ruang dan Gunung Sub												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Soputan												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Sub Marine 1922												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Tangkoko												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Sesar Amurang-Belang												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Lembeh												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Likupang												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Manado-Kema												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Ratatotok												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar yang termasuk dalam sistem Sesar												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Talaud												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Selatan												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Tenggara												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Utara												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Bitung												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Kotamobagu												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Manado												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Tomohon												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Bolaang Mongondow												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Selatan												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Tenggara												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Utara												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Bitung												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Kotamobagu												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Manado												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Tomohon												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Talaud												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Timur												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Utara												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Selatan												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Tenggara												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Utara												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Bitung												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Kotamobagu												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Manado												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Tomohon												
			5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan Jalur dan Ruang Evakuasi	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah dan atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara	APBD Kabupaten/Kota	BPBD Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Ambang												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Awu bagian utara												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Karangetang												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Lokon dan Gunung												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Ruang dan Gunung Sub												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Soputan												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Sub Marine 1922												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Tangkoko												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Sesar Amurang-Belang												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Lembeh												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Likupang												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Manado-Kema												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Ratatotok												
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar yang termasuk dalam sistem Sesar												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Talaud												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Selatan												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Tenggara												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Utara												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Bitung												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Kotamobagu												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Manado												
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Tomohon												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Bolaang Mongondow												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Selatan												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Tenggara												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Utara												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Bitung												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Kotamobagu												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Manado												
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Tomohon												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Sangihe												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Talaud												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Timur												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Utara												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro												
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa												

					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Utara										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Bitung										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Kotamobagu										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Manado										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Tomohon										
			6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur dan Ruang Evakuasi	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah dan atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim Kabupaten/Kota									
			7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan Jalur dan Ruang Evakuasi	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Ambang										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Awu bagian utara										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Karangetang										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Lokon dan Gunung										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Ruang dan Gunung Sub										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Soputan										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Sub Marine 1922										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Tangkoko										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Sesar Amurang-Belang										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Lembeh										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Likupang										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Manado-Kema										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Ratatotok										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar yang termasuk dalam sistem Sesar										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Utara										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Bitung										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Kotamobagu										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Manado										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Tomohon										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Bitung										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Kotamobagu										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Manado										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Tomohon										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Utara										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Bitung										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Kotamobagu										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Manado										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Tomohon										
			8)	Pembangunan Jalur dan Ruang Evakuasi	Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas PUPR Provinsi									
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Ambang										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Awu bagian utara										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Karangetang										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Lokon dan Gunung										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Ruang dan Gunung Sub										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Soputan										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Sub Marine 1922										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Gunung Tangkoko										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Kawasan Sesar Amurang-Belang										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Lembeh										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Likupang										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Manado-Kema										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar Ratatotok										
					Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana pada Sesar yang termasuk dalam sistem Sesar										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Minahasa Utara										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Bitung										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Kotamobagu										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Manado										
					Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Tomohon										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kabupaten Minahasa Utara										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Bitung										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Kotamobagu										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Manado										
					Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi di Kota Tomohon										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Sangihe										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Talaud										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Selatan										
					Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Tenggara										

		Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Minahasa Utara Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Bitung Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Kotamobagu Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Manado Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kota Tomohon										
g. Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran												
1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Permukiman Baru Program Transmigrasi	Desa Liandok di Kabupaten Minahasa Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBN Kabupaten/Kota	Kementerian PKP, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim Kabupaten/Kota								
2)	Penyusunan DED Pembangunan Permukiman Baru Program Transmigrasi	Desa Mataindo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Desa Modisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Desa Ollot II di Kabupaten Bolaang Monondow Utara Desa Motongkad Utara di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Desa Wioi Timur di Kabupaten Minahasa Tenggara										
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan Permukiman Baru Program Transmigrasi	Desa Liandok di Kabupaten Minahasa Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBN Kabupaten/Kota	Kementerian PKP, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim Kabupaten/Kota, DLH Provinsi, DLH Kabupaten/Kota								
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Permukiman Baru Program	Desa Mataindo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
5)	Persetujuan Bangunan Gedung Pembangunan Permukiman Baru Program	Desa Modisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Desa Ollot II di Kabupaten Bolaang Monondow Utara Desa Motongkad Utara di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Desa Wioi Timur di Kabupaten Minahasa Tenggara										
6)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Permukiman Baru Program	Desa Liandok di Kabupaten Minahasa Selatan	APBN, APBD Provinsi, APBN Kabupaten/Kota	Kementerian PKP, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim Kabupaten/Kota								
7)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan Permukiman Baru Program Transmigrasi	Desa Mataindo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
8)	Pembangunan Permukiman Baru Program Transmigrasi	Desa Modisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Desa Ollot II di Kabupaten Bolaang Monondow Utara Desa Motongkad Utara di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Desa Wioi Timur di Kabupaten Minahasa Tenggara										
9)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi	Desa Pisa di Kabupaten Minahasa Tenggara Desa Kakenturan di Kabupaten Bolaang Mongondow Desa Lowatag di Kabupaten Minahasa Tenggara Desa Motongkad di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Desa Olot di Kabupaten Bolaang Mongondow Desa Suhuyon di Kabupaten Minahasa Tenggara Desa Warembungan di Kabupaten Minahasa	APBN, APBD Provinsi, APBN Kabupaten/Kota	Kementerian PKP, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim Kabupaten/Kota								
h. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya di Kawasan Permukiman			Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Minahasa Utara Kota Bitung Kota Manado Kota Tomohon	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota	Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim Kabupaten/Kota							
i.	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan di Kawasan Permukiman	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/kota dan Wilayah Laut	APBN, APBD	Kementerian PU,								
j.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst di Kawasan Permukiman	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Minahasa Tenggara	APBD Provinsi	DLH Provinsi								
k.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan Permukiman	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Utara Kota Tomohon	APBD Provinsi	Dinas ESDM Provinsi, Dinas Perkim Provinsi								
l.	Penetapan Koridor Hidupan Kawasan Migrasi Satwa di Kawasan Permukiman	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan								
m.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja	Wilayah Laut	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan								
n.	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Kawasan Perlindungan	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/kota dan Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Kelautan								
o.	Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan Permukiman	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Utara Kota Manado Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, BUMN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, BUMN								
p. Program Pengelolaan Pendidikan												
1)	Pengembangan Program Diploma dan Perguruan Tinggi	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
2)	Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda (Taruna Nusantara)	Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP								
3)	Pembangunan Sekolah Rakyat	Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa dan Kota Manado	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP								
4)	Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR Kabupaten/Kota								
5)	Pembangunan Universitas Unggulan	Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Boalaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum								
q. Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat												
1)	Pembangunan Rumah Sakit Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2)	Pengembangan Universal Health Coverage (UHC)	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas KesehatanKabupaten/Kota								
3)	Peningkatan Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat 1 (Puskesmas dan Dokter Umum) dan Faskes Tingkat 2 (RSUD dan Dokter Spesialis)	Seluruh Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas KesehatanKabupaten/Kota								
r. Optimalisasi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan UMKM												
1)	Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Mapalus Kecamatan Langowan Barat	Kabupaten Minahasa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PU, Kementerian PKP, Dinas PUPR Provinsi, Dinas Perkim Provinsi Dinas PUPR Kabupaten/Kota, Dinas Perkim Kabupaten/Kota								
2)	Pengembangan *Smart Village* Berbasis Digital	Provinsi Sulawesi Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PMD Provinsi, Dinas PMD Kabupaten/Kota								
3)	Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Unggulan	Provinsi Sulawesi Utara	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas PMD, Dinas Koperasi, UMKM								
2.9	**Perwujudan Kawasan Transportasi**											
a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman												
1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Kawasan Transit Oriented Development	Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan										
2)	Penyusunan DED Pembangunan Kawasan Transit Oriented Development (TOD)	Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										

		Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Imandi di Kabupaten Bolaang Mongondow Likupang di Kabupaten Minahasa Utara Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow Modayag Barat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara Ratatotok di Kabupaten Minahasa Tenggara Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perkim Provinsi							
3)	Penyusunan Izin Lokasi Pembangunan Kawasan Transit Oriented Development	Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perkim Provinsi							
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Kawasan Transit Oriented	Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
5)	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Transit Oriented	Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
6)	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan Kawasan Transit Oriented Development	Imandi di Kabupaten Bolaang Mongondow Likupang di Kabupaten Minahasa Utara Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow Modayag Barat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara Ratatotok di Kabupaten Minahasa Tenggara Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perkim Provinsi							
7)	Pembangunan Kawasan Transit Oriented Development (TOD)	Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan Bintauna di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Imandi di Kabupaten Bolaang Mongondow Likupang di Kabupaten Minahasa Utara Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow Modayag Barat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara Ratatotok di Kabupaten Minahasa Tenggara Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tutuyan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	APBN	Kementerian Perhubungan							
b. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional											
1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Sawang Bendar Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota							
2)	Penyusunan DED Pembangunan	Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Tambala Kabupaten Minahasa Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Koha - Mokupa Kabupaten Minahasa Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Koha - Mokupa II Kabupaten Minahasa Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Koha - Mokupa III Kabupaten Minahasa Pelabuhan/ Dermaga Pendukung Pelabuhan Laut di Lilang I Kabupaten Minahasa Utara Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Lilang II Kabupaten Minahasa Utara	Swasta	Swasta							
		Terminal Pendukung Pelabuhan Laut di Ondong Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota							
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Sawang Bendar Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota							
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Tambala Kabupaten Minahasa Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Koha - Mokupa Kabupaten Minahasa Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Koha - Mokupa II Kabupaten Minahasa Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Koha - Mokupa III Kabupaten Minahasa Pelabuhan/ Dermaga Pendukung Pelabuhan Laut di Lilang I Kabupaten Minahasa Utara Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Lilang II Kabupaten Minahasa Utara	Swasta	Swasta							
		Terminal Pendukung Pelabuhan Laut di Ondong Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota							
5)	Pembangunan	Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Sawang Bendar Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota							
		Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Tambala Kabupaten Minahasa									
		Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Koha - Mokupa Kabupaten Minahasa Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Koha - Mokupa II Kabupaten Minahasa Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Koha - Mokupa III Kabupaten Minahasa Pelabuhan/ Dermaga Pendukung Pelabuhan Laut di Lilang I Kabupaten Minahasa Utara Fasilitas Pendukung Pelabuhan Laut di Lilang II Kabupaten Minahasa Utara	Swasta	Swasta							
		Terminal Pendukung Pelabuhan Laut di Ondong Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota							
6)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Jalan Pendukung Pelabuhan Laut	Santiago II dan Bungalawang Kabupaten Kepulauan Sangihe	APBD Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas PUPR							
7)	Penyusunan DED Pembangunan Jalan Pendukung Pelabuhan Laut										
8)	Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Pendukung Pelabuhan Laut										
9)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Jalan Pendukung Pelabuhan		APBD Kabupaten/	DLH Kabupaten/Kota							
10)	Pembangunan Jalan Pendukung Pelabuhan Laut		APBD Kabupaten/	Dinas Perhubungan							
c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan											
1)	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Fasilitas Pendukung Pelabuhan Perikanan di Likupang Dua Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian Kelautan							
2)	Penyusunan DED Pembangunan	Fasilitas Pendukung Pelabuhan Perikanan di Tambala Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan							
		Jalan Pendukung Pelabuhan Perikanan di Santiago II dan Bungalawang Kabupaten	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan							
3)	Penetapan Lokasi Pembangunan	Fasilitas Pendukung Pelabuhan Perikanan di Likupang Dua Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian Kelautan							
4)	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Fasilitas Pendukung Pelabuhan Perikanan di Tambala Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan							
		Jalan Pendukung Pelabuhan Perikanan di Santiago II dan Bungalawang Kabupaten	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan							
5)	Pembangunan	Fasilitas Pendukung Pelabuhan Perikanan di Likupang Dua Kabupaten Minahasa	APBN	Kementerian Kelautan							
		Fasilitas Pendukung Pelabuhan Perikanan di Tambala Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan							
		Jalan Pendukung Pelabuhan Perikanan di Santiago II dan Bungalawang Kabupaten	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan							
d. Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Budidaya											
1)	Pembangunan Integrated Likupang Fishing Port and International Fish Market dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)	Pelabuhan Perikanan Samudera Likupang di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi							
		Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung di Kota Bitung									
2)	Perluasan dan Rehabilitasi PPI Dagho, Kema, Sitaro, Minahasa, Belang, dan	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dagho, Kema, Sitaro, Minahasa, Belang, dan	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan							
e. Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan di Kawasan Transportasi		Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Utara Kota Bitung Kota Manado Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota							
f. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan Transportasi		Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Minahasa Utara Wilayah Laut	APBN	Kementerian ESDM							
g. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan di Kawasan Transportasi		Wilayah Laut	APBN	Kementerian Perhubungan							

		h. Pembangunan Lapangan Terbang										
		1) Perpanjangan Landasan Pacu	Bandara Sam Ratulangi di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara, Bandara	BUMN	BUMN							
		2) Pembangunan *Water Aerodrome* dalam *Multi-Airport System*	Pulau Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud Pulau Karakitang di Kabupaten Kepulauan Sangihe Pulau Biaro Likupang di Kabupaten Minahasa Utara Taman Nasional Bunaken di Kota Manado Danau Tondano Danau Moat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Salongo di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	APBN dan Swasta	Kementerian Perhubungan, Swasta							
		3) Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan Transportasi	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Utara Kota Manado Wilayah Laut	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, BUMN	Kementerian Perhubungan, BUMN, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota							
		i. Kegiatan Mitigasi Bencana pada Kawasan Rawan Bencana di Kawasan	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Utara Kota Bitung Kota Manado	APBD Provinsi	BPBD Provinsi, Dinas Perhubungan Provinsi							
2.10	**Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan**											
	a.	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan	Batalion TNI Angkatan Darat di Desa Damau Bowone Kecamatan Damau	APBN, APBD Kabupaten/kota	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, TNI Angkatan Darat							
	b.	Penyusunan DED Pembangunan	Daerah Latihan Militer Kodam XIII/ Merdeka di Kabupaten Bolaang Mongondow									
	c.	Penetapan Lokasi Pembangunan	Dermaga Bakamla Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
	d.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan	Guest House Kelurahan Sario Kota Baru di Kota Manado									
	e.	Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Pembangunan	Guest House Kelurahan Sario Kotabaru di Kota Manado Kantor Bakamla Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe Kodim 1301-02 di Desa Peling Kecamatan Siau Barat Kodim di Desa Tabilaa Markas Kompi Senapan C di Desa Balirangeng, Kecamatan Siau Timur Selatan Sarana dan Prasarana SATKAMLA Bitung, Kel. Winenet Dua, Kec. Aertembaga di Satuan Pendidikan TNI AL Likupang di Kabupaten Minahasa Utara Tempat Latihan TNI AL Desa Bowombaru di Kabupaten Kepulauan Talaud Tempat Latihan TNI AL Kelurahan Naimundung di Kota Bitung									
	f.	Penyediaan Lahan	Koramil Damau Kabupaten Kepulauan Talaud	APBD Kabupaten/ Kota	Pertahanan dan Keamanan							
			Koramil Marore Kabupaten Kepulauan Talaud									
			Koramil Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud									
			Koramil Kolongan Kabupaten Kepulauan Talaud									
			Koramil Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud									
			Koramil Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud									
			Koramil Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud									
			Koramil Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud									
			Koramil Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud									
			Koramil Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud									
			Koramil Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud									
			Kodim Kep Sitaro Kabupaten Kepulauan Sitaro									
			Koramil Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro									
			Koramil Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro									
			Koramil Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro									
			Koramil Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro									
			Koramil Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro									
			Koramil Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro									
			Koramil Biaro Kabupaten Kepulauan Sitaro									
			Koramil Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			Koramil Nusa Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			Koramil Nusa Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			Koramil Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			Koramil Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			Koramil Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe									
			Koramil Aertembaga Kota Bitung									
			Koramil Girian Kota Bitung									
			Koramil Lembeh Utara Kota Bitung									
			Koramil Madidir Kota Bitung									
			Koramil Matuari Kota Bitung									
			Koramil Ranowulu Kota Bitung									
			Kodim Minahasa Utara Kab. Minahasa Utara									
			Koramil Kalawat Kab. Minahasa Utara									
			Koramil Kema Kab. Minahasa Utara									
			Koramil Likupang Barat Kab. Minahasa Utara									
			Koramil Likupang Selatan Kab. Minahasa Utara									
			Koramil Talawaan Kab. Minahasa Utara									
			Koramil Bunaken Kota Manado									
			Koramil Bunaken Kepulauan Kota Manado									
			Koramil Malalayang Kota Manado									
			Koramil Mapanget Kota Manado									
			Koramil Paal Dua Kota Manado									
			Koramil Sario Kota Manado									
			Koramil Sinekil Kota Manado									
			Koramil Tikala Kota Manado									
			Kodim Tomohon									
			Koramil Tomohon Barat									
			Koramil Tomohon Selatan									
			Koramil Tomohon Timur									
			Koramil Tomohon Utara									
			Koramil Tondano Selatan Kabupaten Minahasa									
			Koramil Tondano Utara Kabupaten Minahasa									
			Koramil Tondano Timur Kabupaten Minahasa									
			Koramil Lembean Timur Kabupaten Minahasa									
			Koramil Kakas Barat Kabupaten Minahasa									
			Koramil Tombariri Timur Kabupaten Minahasa									
			Koramil Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa									
			Koramil Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa									
			Koramil Tompaso Kabupaten Minahasa									
			Koramil Tompaso Barat Kabupaten Minahasa									
			Koramil Langowan Barat Kabupaten Minahasa									
			Koramil Langowan Selatan Kabupaten Minahasa									
			Koramil Langowan Timur Kabupaten Minahasa									
			Kodim Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Tenggara									
			Koramil Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara									
			Koramil Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara									
			Koramil Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara									
			Koramil Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara									
			Koramil Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara									
			Koramil Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara									
			Koramil Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara									
			Koramil Utara Kabupaten Minahasa Tenggara									
			Koramil Touhaan Kabupaten Minahasa Tenggara									
			Kodim Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Selatan									
			Koramil Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan									
			Koramil Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan									
			Koramil Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan									
			Koramil Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan									

				Koramil Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan									
				Koramil Motilong Timur Kabupaten Minahasa Selatan									
				Koramil Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan									
				Koramil Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan									
				Koramil Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan									
				Koramil Tareran Kabupaten Minahasa Selatan									
				Koramil Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan									
				Koramil Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan									
				Koramil Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu									
				Koramil Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu									
				Koramil Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu									
				Korem Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Kodim Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Koramil Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Koramil Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Koramil Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Koramil Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Koramil Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Koramil Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Koramil Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Koramil Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Koramil Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Kodim Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
				Koramil Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
				Koramil Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
				Koramil Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
				Kodim Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Koramil Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Koramil Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Koramil Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Koramil Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Koramil Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Kodim Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
				Koramil Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
				Koramil Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
				Koramil Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
	g.	Pengadaan Lahan		Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Brigif TP Kab. Minahasa Utara									
				Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Kab. Minahasa Utara									
				Yon Kav Kab. Minahasa Utara									
				Yon Arhanud Kab. Minahasa Utara									
				Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Kota Manado									
				Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Kota Tomohon		Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	TNI Angkatan Darat						
				Brigif TP Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara									
				Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan									
				Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Kota Kotamobagu									
				Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Brigif TP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
				Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
				Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
				Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
	h.	Penyelesaian Santunan Tanah Pembangunan		Batalion TNI Angkatan Darat di Desa Damau Bowone Kecamatan Damau									
				Daerah Latihan Militer Kodam XIII/ Merdeka di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Dermaga Bakamla Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Guest House Kelurahan Sario Kota Baru di Kota Manado									
				Guest House Kelurahan Sario Kotabaru di Kota Manado		APBN	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia						
				Kantor Bakamla Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Kodim 1301-02 di Desa Peling Kecamatan Siau Barat									
				Kodim di Desa Tabilaa									
				Markas Kompi Senapan C di Desa Balirangeng, Kecamatan Siau Timur Selatan									
				Sarana dan Prasarana SATKAMLA Bitung, Kel. Winenet Dua, Kec. Aertembaga di									
				Satuan Pendidikan TNI AL Likupang di Kabupaten Minahasa Utara		APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pertahanan RI, TNI AL						
				Tempat Latihan TNI AL Desa Bowombaru di Kabupaten Kepulauan Talaud		APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pertahanan RI, TNI AL						
	i.	Pembangunan		Batalion TNI Angkatan Darat di Desa Damau Bowone Kecamatan Damau									
				Daerah Latihan Militer Kodam XIII/ Merdeka di Kabupaten Bolaang Mongondow									
				Dermaga Bakamla Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Guest House Kelurahan Sario Kota Baru di Kota Manado									
				Guest House Kelurahan Sario Kotabaru di Kota Manado									
				Kantor Bakamla Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe		APBN	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia						
				Kodim 1301-02 di Desa Peling Kecamatan Siau Barat									
				Kodim di Desa Tabilaa									
				Markas Kompi Senapan C di Desa Balirangeng, Kecamatan Siau Timur Selatan									
				Sarana dan Prasarana SATKAMLA Bitung, Kel. Winenet Dua, Kec. Aertembaga di									
				Satuan Pendidikan TNI AL Likupang di Kabupaten Minahasa Utara									
				Tempat Latihan TNI AL Desa Bowombaru di Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Tempat Latihan TNI AL Kelurahan Naimundung di Kota Bitung									
				Koramil Damau Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Koramil Marore Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Koramil Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Koramil Kolongan Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Koramil Beo Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud		APBD Kabupaten/ Kota	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia						
				Koramil Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Koramil Tampan'amma Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Koramil Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Koramil Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Koramil Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Koramil Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud									
				Tempat Latihan TNI AL Kelurahan Naimundung di Kota Bitung		APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pertahanan RI, TNI AL						
				Kodim Kep Sitaro Kabupaten Kepulauan Sitaro		APBD Kabupaten/ Kota	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia						
				Koramil Siau Barat Kabupaten Kepulauan Sitaro									
				Koramil Siau Barat Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro									
				Koramil Siau Barat Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro									
				Koramil Siau Tengah Kabupaten Kepulauan Sitaro									
				Koramil Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro									
				Koramil Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro									
				Koramil Biaro Kabupaten Kepulauan Sitaro									
				Koramil Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Koramil Nusa Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Koramil Nusa Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Koramil Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Koramil Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Koramil Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe									
				Koramil Aertembaga Kota Bitung									
				Koramil Girian Kota Bitung									
				Koramil Lembeh Utara Kota Bitung									
				Koramil Madidir Kota Bitung									
				Koramil Matuari Kota Bitung									
				Koramil Ranowulu Kota Bitung									
				Kodim Minahasa Utara Kab. Minahasa Utara									

					Koramil Kalawat Kab. Minahasa Utara										
					Koramil Kema Kab. Minahasa Utara										
					Koramil Likupang Barat Kab. Minahasa Utara										
					Koramil Likupang Selatan Kab. Minahasa Utara										
					Koramil Talawaan Kab. Minahasa Utara										
					Koramil Bunaken Kota Manado										
					Koramil Bunaken Kepulauan Kota Manado										
					Koramil Malalayang Kota Manado										
					Koramil Mapanget Kota Manado										
					Koramil Paal Dua Kota Manado										
					Koramil Sario Kota Manado										
					Koramil Singkil Kota Manado										
					Koramil Tikala Kota Manado										
					Kodim Tomohon Kota Tomohon										
					Koramil Tomohon Barat Kota Tomohon										
					Koramil Tomohon Selatan Kota Tomohon										
					Koramil Tomohon Timur Kota Tomohon										
					Koramil Tomohon Utara Kota Tomohon										
					Koramil Tondano Selatan Kabupaten Minahasa										
					Koramil Tondano Utara Kabupaten Minahasa										
					Koramil Tondano Timur Kabupaten Minahasa										
					Koramil Lembean Timur Kabupaten Minahasa										
					Koramil Kakas Barat Kabupaten Minahasa										
					Koramil Tombariri Timur Kabupaten Minahasa										
					Koramil Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa										
					Koramil Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa										
					Koramil Tompaso Kabupaten Minahasa										
					Koramil Tompaso Barat Kabupaten Minahasa										
					Koramil Langowan Barat Kabupaten Minahasa										
					Koramil Langowan Selatan Kabupaten Minahasa										
					Koramil Langowan Timur Kabupaten Minahasa										
					Kodim Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Koramil Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Koramil Posumaen Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Koramil Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Koramil Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Koramil Silian Raya Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Koramil Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Koramil Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Koramil Utara Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Koramil Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara										
					Kodim Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Selatan										
					Koramil Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan										
					Koramil Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan										
					Koramil Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan										
					Koramil Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan										
					Koramil Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan										
					Koramil Motilong Timur Kabupaten Minahasa Selatan										
					Koramil Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan										
					Koramil Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan										
					Koramil Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan										
					Koramil Tareran Kabupaten Minahasa Selatan										
					Koramil Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan										
					Koramil Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan										
					Koramil Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu										
					Koramil Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu										
					Koramil Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu										
					Korem Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Kodim Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Koramil Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Koramil Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Koramil Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Koramil Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Koramil Dumoga Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Koramil Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Koramil Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Koramil Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Koramil Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow										
					Kodim Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Koramil Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Koramil Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Koramil Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara										
					Kodim Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Koramil Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Koramil Mooat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Koramil Motongkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Koramil Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Koramil Timuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur										
					Kodim Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Koramil Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Koramil Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
					Koramil Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan										
	j.	Pengembangan Sarana dan Prasarana	ADIZ Indonesia Wilayah Udara RI	APBN	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia										
			Aiendam XIII/Manado Kota Manado												
			Ajenrem 131 Kota Manado												
			Ajenrem 131/Stg Kota Manado												
			Asgab SM III Kota Manado												
			Asgab SM IX Kota Manado												
			Asgab SM V Kota Manado												
			Asgab SM VI, VII, X, Denkes Kelurahan Teling Atas di Kota Manado												
			Asgab SM VIII/APT Kota Manado												
			Asgab SM XII Kota Manado												
			Asgab SM XIII Kota Manado												
			Asgab SM XV Kota Manado												
			Asrama Denpal												
			Asrama Denzipur-4/YKN Kelurahan Pakowa di Kota Manado												
			Asrama Kodim 1310/Bitung Bitung												
			Asrama Kodim 1310/Bitung Kota Bitung												
			Asrama Kombos Kota Manado												
			Asrama Pa SM IV Kelurahan Sario Kotabaru di Kota Manado												
			Asrama Pa SM IV Kota Manado												
			Asrama Ton Intel (Eks Wisma Lilitotor) Kota Manado												
			Asrama Ton Intel Kelurahan Paniki Bawah di Kota Manado												
			Babinminvitcaddan Utara Kota Manado												
			Balai Pengobatan, Mess Perwira, Mesjid Desa Apengsembeka di Kapupaten												
			Barak Siaga TNI Kabupaten Kepulauan Talaud												
			Base Ops di Kota Manado	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pertahanan RI, TNI AU										
			Bekangdam XIII/Merdeka	APBN	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia										
			Bengrah XIII/Manado Kota Manado												
			Bintaldam XII/Mdk Utara Kota Manado												
			Daerah disposal amunisin dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya												
			Daerah Latihan Bersama dengan Filipina Perairan Laut Sulawesi												
			Daerah Latihan Kalawiran Kabupaten Minahasa												
			Daerah Latihan Kodam XIII/Merdeka Wilayah Korem 131/Santiago Kabupaten												
			Daerah Latihan Militer Kesatriaan Satkamla Kota Bitung												
			Daerah Latihan Militer Naimundung Kota Bitung												
			Daerah Latihan Militer Perbukitan Kairagi Kota Manado												
			Daerah Latihan Militer TNI AD di Kawasan Lindung Duminanga di Kabupaten												

					Daerah Latihan Penerbangan sementara dasar NOTAM Wilayah Udara RI									
					Daerah Pembuangan Amunisi Perairan Pulau Lembeh									
					Daerah Pembuangan Amunisi Perairan Pulau Manado Tua									
					Daerah Pembuangan Amunisi Perairan Tahuna									
					Daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya									
					Den Pomdam XIII/Mdk Kota Manado									
					Denbekang Kelurahan Sario Kota Baru di Kota Manado									
					Denbekang Kelurahan Sario Kotabaru di Kota Manado									
					Denbekang XIII-44-01.B Kota Manado									
					Denhubrem 131 Jln 14 Februari Kota Manado									
					Denhubrem 131/Stg. Kota Manado									
					Denkesyah Rem 131/Stg Kota Manado									
					Denpom XIII/1/C Tikala Kota Manado									
					Densubpom Kotamobagu Kota Kotamobagu									
					Denzibang 1/XIII, Kota Manado									
					Dermaga Bakamla Zona Tengah di Kabupaten Minahasa Utara									
					Dermaga TNI AL Dagho di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Dodikjur Rindam XIII/Mdk Kota Tomohon									
					Dodiklatpur Rindam XIII/Mdk Kab. Minahasa									
					Eks Asrama Perawat Utara Kota Manado									
					Eks Cadnas Kabupaten Minahasa									
					Eks Hubyah Kota Manado									
					Eks Kipan C Yonif 712/WT (Secaba Amurang)									
					Eks Kodam XIII/Merdeka Kota Manado									
					Eks Kodam XIII/Merdeka Kota Manado									
					Eks Kudam XIII/Mdk									
					Eks Lapter Kalawiran Kabupaten Minahasa									
					Eks Paldam Beringin Kota Manado									
					Eks Pulahta Rem 131/Santiago Utara Kota Manado									
					Eks Rd SD Persit IV Kota Manado									
					Eks Satlak Pom VII/1 Kota Manado									
					Eks Satlak Pom VII/1 Kota Manado									
					Eks. Kipan C. Yonif 712/WT Kabupaten Minahasa Selatan									
					Eks. Kipan C. Yonif 712/WT Kelurahan Ranoyapo di Kabupaten Minahasa Selatan									
					Eks. Koramil 1301-02 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Eks. Koramil 1302-02 Kabupaten Minahasa									
					Eks. Koramil 1302-14									
					Eks. Koramil 1303-04 Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Eks. Koramil 1303-05 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Eks. Koramil 1303-06/Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Eks. Koramil 1303-08 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Eks. Koramil 1303-09 bonto Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Eks. Koramil 1303-10 Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Eks. Koramil 1303-11 Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Eks. Koramil 1303-12 Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Eks. Koramil 1303-14 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Fasharkan Bitung Kota Bitung									
					Fasharkan Bitung, Satkamla Bitung, Disyahal Lant.VIII, Dermaga TNI AL Kota									
					FASHARKAN LANTAMAL Bitung, Kel. Aertembaga Dua, Kec. Aertembaga									
					Fasilitas Penerbangan Bandara Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Fasilitas Penerbangan Bandara Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Fasilitas Penerbangan Bandara Naha Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Fasilitas Penerbangan Bandara Sam Ratulangi Kota Manado									
					Fasilitas Penerbangan FIR Ujung Pandang Wilayah udara NKRI (timur)									
					Fasilitas Penerbangan Mokoagow Airstrip Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Gedung eks Mako Daeral VI , Kota Manado									
					Gudang Amunisi Kairagi Weru Kota Manado									
					Gudang Amunisi Marinir Kota Bitung									
					Gudang GPL Kota Manado	APBN, Sumber	Kementerian Pertahanan							
					Gudang Latpur Rindam XIII/Mdk	APBN	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia							
					Gudang Munisi Kelurahan Paslaten di Kota Tomohon									
					Gudang Peralatan Tempur Desa Noongan Kabupaten Minahasa									
					Gudang Senjata Kairagi Kota Manado									
					Gudang Senjata Marinir Kota Bitung									
					Gudkesyah 13.12.01 di Kota Manado									
					Gudmurah Dam XIII Kota Tomohon									
					Guskamla Armada 2 Kota Bitung									
					Helipad Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Helipad Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Hubdam XIII/Mdk Kota Manado									
					Infolahtadam XIII/Mdk Utara Kota Manado									
					Jalan Tembus Manado Kabupaten Minahasa Utara									
					Jasdam XIII/Mdk Utara Kota Manado									
					Kantor Ajen Rem 131/Santiago Kota Manado									
					Kantor Badan Keamanan Laut RI Zona Maritim tengah Kota Manado									
					Kantor BCA/Lintas Batas Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Kantor BCA/Lintas Batas Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Kantor Densub POM Kotamobagu Kota Kotamobagu									
					Kantor Kodim Talaud Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Kantor Koramil Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Kantor Koramil Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Kantor Koramil Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Kantor Koramil Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					kantor Lanal Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Kantor Lanal Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Kantor Lanal, Rumdis TNI AL Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Kantor Makodim 1301/Satal Kelurahan Bungalawan Kabupaten di Kepulauan Sangihe									
					Kantor Posal Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Kantor Posal Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Kantor Puskopad B Kota Manado									
					Kantor Sub Denpom XIII-21									
					Kawasan Udara Terlarang (WIR) WAR 19 Alpa Three 30NM sampai 100 NM									
					Kawasan Udara Terlarang (WIR) WAR 19 Alpa Two 30NM sampai 100 NM									
					Kawasan Udara Terlarang (WIR) WAR 19 Area One 30NM sampai 100 NM									
					Kesdim 1302 Kabupaten Minahasa									
					Kesdim Kelurahan Bungalawan Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Kesdim Kota Kotamobagu									
					Kikav Serbu Dam VII/Wrb Desa Wori Kabupaten Minahasa Utara									
					Kipan B Yonko 466 Pasopati									
					Kipan C Yonif 713/ST Kota Kotamobagu									
					Kipan C. Yonif 712/WT Kabupaten Minahasa Selatan									
					Kipan C. Yonif 712/WT Kelurahan Pondang Di Kabupaten di Minahasa Selatan di									
					Kipan D. Yonif 712/WT Kota Manado									
					Kodam XIII/Mdk Kota Manado									
					Kodim 1303/BM Kota Kotamobagu									
					Kodim 1309/Manado Unit Inteldim Kota Manado									
					Kodim 1309/Mdo Kota Manado									
					Kodim 1312/Tkl Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Komando Distrik Militer 1310, Likupang									
					Kompi C Yonzipur 19/Ykn Ds. Sukur Kabupaten Minut									
					Kompi Kavaleri 10/Manguni Setia Cakti									
					Komplek Albatros Kota Manado									
					Komplek Fakon Kota Manado									
					Komplek Mustang di Kota Manado	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pertahanan RI, TNI AU							
					Komplek Perumahan Siau Lanudal Kelurahan Paniki Bawah di Kota Manado									
					Komplek Sarbe 2 di Kota Manado									
					Komplek Sarbe 3 di Kota Manado									
					Komplek Sarbe, Mess Wara di Kota Manado									

					Koramil 01/STB Kelurahan Bitung Karangria Kota Manado	APBN	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia							
					Koramil 02/WTPM Kelurahan Calaca Kota Manado									
					Koramil 03/WSM Kelurahan Karombasan Utara Kota Manado									
					Koramil 04/PTM Desa Pineleng Kabupaten Minahasa									
					Koramil 05/WORI Desa Wori Kabupaten Minahasa Utara									
					Koramil 1301-01/Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Koramil 1301-02/Siau Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Koramil 1301-03/Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Koramil 1301-04/Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Koramil 1301-05/Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Koramil 1301-06 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Koramil 1301-07 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Koramil 1301-08 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Koramil 1301-09 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Koramil 1301-10 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Koramil 1302-01/Tondano Kabupaten Minahasa									
					Koramil 1302-02/Eris Kabupaten Minahasa									
					Koramil 1302-03/Kakas Kabupaten Minahasa									
					Koramil 1302-04/Remboken Kabupaten Minahasa									
					Koramil 1302-05/Kombi Kabupaten Minahasa									
					Koramil 1302-06/Tomohon Kota Tomohon									
					Koramil 1302-07/Tombariri Minahasa									
					Koramil 1302-08/Kawangkoan Kabupaten Minahasa									
					Koramil 1302-09/Langowan Kabupaten Minahasa									
					Koramil 1302-10/Sonder Kabupaten Minahasa									
					Koramil 1302-11/Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Koramil 1302-12/Belang Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Koramil 1302-13/Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Koramil 1302-14/Amurang Kabupaten Minahasa Selatan									
					Koramil 1302-15/Tenga Kabupaten Minahasa Selatan									
					Koramil 1302-16/Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan									
					Koramil 1302-17/Motoling Kabupaten Minahasa Selatan									
					Koramil 1302-18/Tompaso Kabupaten Minahasa Selatan									
					Koramil 1302-19/Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan									
					Koramil 1303-01/Kotamobagu Kota Kotamobagu									
					Koramil 1303-02/Passi Kota Kotamobagu									
					Koramil 1303-03/Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Koramil 1303-04/Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Koramil 1303-05/Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Koramil 1303-06/ Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Koramil 1303-07/Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Koramil 1303-08/Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Koramil 1303-09/Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Koramil 1303-10/Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Koramil 1303-11/Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Koramil 1303-12/Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Koramil 1303-13/Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Koramil 1303-14/Bolangitang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Koramil 1303-15/Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Koramil 1309-01 Kota Manado									
					Koramil 1309-02 Kota Manado									
					Koramil 1309-03 Kota Manado									
					Koramil 1309-04 Kabupaten Minahasa									
					Koramil 1309-05 Kabupaten Minahasa Utara									
					Koramil 1310-01 Kota Bitung									
					Koramil 1310-02/Lembeh Kota Bitung									
					Koramil 1310-03/Likupang Kabupaten Minahasa Utara									
					Koramil 1310-04/Dimembe Kabupaten Minahasa Utara									
					Koramil 1310-05/Kauditan Kabupaten Minahasa Utara									
					Koramil 1310-06/Airmadi Kabupaten Minahasa Utara									
					Koramil 1310-08 Kelurahan Saroinsong Kabupaten Minahasa Utara									
					Koramil Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Koramil Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Koramil Tumintingi Kota Manado									
					Koramil Wanea Kota Manado									
					Koramil Wenang Kota Manado									
					Koramil-06/Tomohon Walian Kota Tomohon									
					Korem 131/Stg. Tim Intelrem Kota Manado									
					Ktr BCA/Lintas Batas Mangas									
					Lanal Melonguane Desa Mala di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Lantamal Babinpotmar									
					Lanud Sam Ratulangi Lapangan Kota Manado									
					Lanud SRI di Kabupaten Minahasa Utara	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pertahanan RI, TNI AU							
					Lapangan Tembak Amurang barat	APBN	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia							
					Lapangan tembak Kec Aermadidi									
					Lapangan tembak Kodim 1301/Sgh Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Lapangan Tembak Kodim 1302/Min Kabupaten Minahasa									
					Lapangan Tembak Kodim 1303/BM Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Lapangan Tembak Pistol Mako Yonmarhanlan VIII									
					Lapangan Tembak Pistol, Mako Lantamal VIII									
					Lapangan Tembak Pistol, Mako Lantamal VIII Kelurahan Kairagi Weru di Kota									
					Lapangan Tembak Pistol, Mako Yonmarhanlan VIII Kelurahan Bitung Barat di Kota									
					Lapangan Tembak Secata Rindam Desa Girian Indah									
					Lapangan Tembak Yon Armed 19 Bogani Desa Rerewoka di Kabupaten Minahasa									
					Lapangan Tembak Yon Armed 19 Bogani Desa Rumoong Bawah di Kabupaten									
					Lapangan Tembak Yon Armed 19 Bogani Desa Saroinsong di Kabupaten Minahasa									
					Lapangan Tembak Yonzipur 19/Ykn Kabupaten Minahasa Utara									
					Lapangan Tenis di Kota Manado									
					Lapangan Tenis Kota Manado									
					Lapbak. Kapan D Yonif Raider 712/WT									
					Latbakjatratpur Kikav 10/Msc Desa Tiwohi di Kabupaten Minahasa Utara									
					Latbakjatratpur Kikav 10/Msc Desa Tiwohi Kabupaten Minahasa Utara									
					Latihan Tembak Kikav 10/Msc Desa Wori di Kabupaten Minahasa Utara									
					Latihan Tembak Kikav 10/Msc Desa Wori Kabupaten Minahasa Utara									
					Mabekangdam Kelurahan Wenang Utara di Kota Manado									
					Mabekangdam Utara Kota Manado									
					Madenzipur-4/YKN Desa Maumbi di Kabupaten Minahasa Utara									
					Makesdam XIII/Mdk Utara Kota Manado									
					Makesdam XIII/Mdk Utara Kota Manado									
					Mako Desa Wori di Kabupaten Minahasa Utara									
					Mako Kakaskaseen di Kota Tomohon									
					Mako Kakaskaseen Kota Tomohon									
					Mako Lanal Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Mako Lanal Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Mako Lanal Tahuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Mako Lanal Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Mako Lantamal VIII Manado Kota Manado									
					Mako Lanudal Manado di Kabupaten Minahasa Utara									
					Mako Lanudal Manado Kabupaten Minahasa Utara									
					Makodam XIII/Mdk Kota Manado									
					Makodim 1301/Sangihe Kab. Kepulauan Sangihe									
					Makodim 1302/Min Kabupaten Minahasa									
					Makodim 1303/BM Kotamobagu									
					Makodim 1310/BitungKota Bitung									
					Makodim Kelurahan Winangun Dua di Kota Manado									
					Makodim Kota Bitung									

					Makoramil 1312-01/Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Makoramil 1312-02/Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Makoramil 1312-03/Beo Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Makoramil 1312-04/Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Makoramil 1312-05/Essang Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Makoramil 1312-06/Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Makoramil 1312-07/Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Makoramil 1312-08/Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Makudam XIII/Mdk Utara Kota Manado									
					Makumdam XIII/Mdk Utara Kota Manado									
					Mapaldam XIII/Mdk Kota Manado									
					Matopdam XIII/Mdk Utara Kota Manado									
					Mayonif 712/WT dan Rumah Sakit Kelurahan Teling Bawah di Kota Manado									
					Mazidam XIII/Mdk Kota Manado									
					Menara Air Desa Marore di Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Menara Air Desa Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Menara Pos Jaga Kodim 1302/Mhs Kec Posumaen									
					Mes Babinsa 1309-01 Kota Manado									
					Mes Babinsa 1309-01 Kota Manado									
					Mes Babinsa 1310-01 Kota Bitung									
					Mes Cakalele Kota Manado									
					Mess Ba/Ta Yon-marhanlan Kota Bitung									
					Mess Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Mess Marore/Kawaluso TNI AL									
					Mess Pamen Kota Manado									
					Mess Posal Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Mess Posal Pos jaga Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Mess Pringgondani II (Tikala Baru) Kota Manado	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pertahanan RI, TNI AU							
					Mess Rajawali dan Maleo, Lapangan Bola Kota Manado									
					Mess Rajawali dan Maleo, Lapangan Bola Kota Manado									
					Mess Satrad CSS Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Mess TNI AURI Kota Manado									
					Mess transit Pamen Kota Manado									
					Monumen Ar, TK Hang Tuah Komplek Tugu Aru, Kota Bitung									
					Noongan Kompleks Kabupaten Minahasa									
					Objek vital nasional dan instansi strategis, Stasiun Pengamat Dirgantara									
					Pangkalan Armada Serei Zona Maritim Tengah di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pangkalan Keamanan Serei Minahasa Utara									
					Pangkalan TNI Angkatan Udara Desa Mapanget di Kabupaten Minahasa Utara									
					Pemancar (Rascar) Kabupaten Minahasa									
					Pemukiman Transmigrasi, Posal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Pendam XIII/Mdk Utara Kota Manado									
					Persawahan Desa Kalawiran di Kabupaten Minahasa									
					Persawahan Desa Karondoran di Kabupaten Minahasa									
					Persiapan Kantor Kodim 1303 Bolmong Selatan									
					Persiapan kantor Kodim Boltim									
					Persiapan Kantor Korem Bolmong									
					Persit Kartika Chandra Kirana Korem 131									
					Polisi Militer Kota Kotamobagu									
					Polkes 13.09.01/Satal Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					POM TNI AU Kota Manado									
					POMAL LANTAMALVIII Kota Manado									
					Pomdam XIII/Mdk									
					Pomdam XIII/Mdk, Mazidam XIII/Mdk, Hubdam XIII/Mdk, Mapaldam XIII/Mdk,									
					Pos Angkatan Darat Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Pos Angkatan Laut Panango									
					Pos Babinsa Koramil Bolmut									
					Pos Babinsa Lamangao Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Pos Jaga Babinsa Bohabak I									
					Pos Jaga Babinsa Buko selatan									
					Pos Jaga Babinsa Tanoyan Selatan									
					Pos jaga Perbatsab Desa Lipang									
					Pos jaga Perbatsan Desa Matutuang									
					Pos Koramil 1301-07 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pos Koramil 1301-07 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pos Koramil Dumagin Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan									
					Pos Pamtas Kodim Talaud									
					Pos Paskhas Kalawiran Kabupaten Minahasa									
					Pos Perbatasan Koramil 1301-05/Tahuna									
					Pos Perbatasan Koramil 1301-05/Tahuna									
					Pos TNI AL Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Pos TNI AU Naha Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Posad TNI AD Miangas									
					Posal Amurang Kabupaten Minahasa Selatan									
					Posal Arakan (Satrad IMSS) Kabupaten Minahasa Selatan									
					Posal Atep Oki (Satrad IMSS) Kabupaten Minahasa									
					Posal Bungalawang Desa Bungalawang Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Posal Jiko Belanga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Posal Manado Kota Manado									
					Posal Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Posal Siau Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Posal Tagulandang									
					Posal Tumumpa Kelutahan Tumumpa Kota Manado									
					Posau Naha Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Pospamtas Marore									
					Puslatpur Noongan									
					Puslatpur Noongan Desa Noongan Kabupaten Minahasa									
					RD Danrem 131/Santiago Kelurahan Sario Utara di Kota Manado									
					Rd. Babinsa 1301-02/Siau Timur									
					Rindam XIII/Mdk Dodikjur Rindam XIII/Mdk Kota Tomohon,									
					Rindam XIII/Mdk Dodiklatpur Rindam XIII/Mdk Kab. Minahasa									
					Rindam XIII/Mdk Mako Rindam Kota Tomohon									
					Rindam XIII/Mdk Secaba Rindam XIII/Mdk Kab. Minahasa Selatan									
					Rumah Dinas Babinsa 1301-01 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumah Dinas Babinsa 1301-01 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Rumah Dinas Babinsa 1301-01 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Rumah Dinas Babinsa 1301-02 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Rumah Dinas Babinsa 1301-02 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro									
					Rumah Dinas Babinsa 1301-05 Beha Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumah Dinas Babinsa 1301-06 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumah Dinas Babinsa 1301-07 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumah Dinas Babinsa 1301-08 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumah Dinas Babinsa 1301-09 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumah Dinas Babinsa 1302-01 Kabupaten Minahasa									
					Rumah Dinas Babinsa 1302-08 Kabupaten Minahasa Selatan									
					Rumah Dinas Babinsa 1302-09 Kabupaten Minahasa									
					Rumah Dinas Babinsa 1302-12 Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Rumah Dinas Babinsa 1302-13 Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Rumah Dinas Babinsa 1302-19 Kabupaten Minahasa Selatan									
					Rumah Dinas Babinsa 1303-01 Besar Kota Kotamobagu									
					Rumah Dinas Babinsa 1303-01 Kota Kotamobagu									
					Rumah Dinas Babinsa 1303-02 Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Rumah Dinas Babinsa 1303-03 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Rumah Dinas Babinsa 1303-03 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Rumah Dinas Babinsa 1303-05 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur									
					Rumah Dinas Babinsa 1303-07 Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Rumah Dinas Babinsa 1303-07 Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Rumah Dinas Babinsa 1303-09 Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Rumah Dinas Babinsa 1303-10 Kabupaten Bolaang Mongondow									
					Rumah Dinas Babinsa 1309-02 Kota Manado									
					Rumah Dinas Babinsa 1309-02 Kota Manado									

					Rumah Dinas Babinsa 1309-04 Kabupaten Minahasa									
					Rumah Dinas Babinsa 1309-04 Kabupaten Minahasa									
					Rumah Dinas Babinsa 1309-10 Atas Kabupaten Minahasa Utara									
					Rumah Dinas Babinsa 1309-10 Tinongko Kabupaten Minahasa Utara									
					Rumah Dinas Babinsa 1310-02 Bitung Selatan Kota Bitung									
					Rumah Dinas Babinsa 1310-03 Kabupaten Minahasa Utara									
					Rumah Dinas Babinsa 1310-06 Kabupaten Minahasa Utara									
					Rumah Dinas Babinsa 1310-09 Kabupaten Minahasa Utara									
					Rumah Dinas Babinsa Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumah Dinas Babinsa Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumah Dinas Babinsa Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumah Dinas Babinsa Timur Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumah Dinas Dandim 1301/Satal Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumah Dinas Dandim 1302 Kabupaten Minahasa									
					Rumah Dinas Dandim dan Kasdim Talaud Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumah Dinas Dandim Kelurahan Biga di Kota Kotamobagu									
					Rumah Dinas Dandim Kota Kotamobagu									
					Rumah Dinas Danramil 1312-01 Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumah Dinas Danramil 1312-02/Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumah Dinas Danramil Desa Karatung di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumah Dinas Danramil Desa Kaima di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumah Dinas Danramil Desa Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumah Dinas Danramil Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumah Dinas Danramil Kelurahan Beo Timur di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumah Dinas Danrem 131/Santiago Kelurahan Sario Utara di Kota Manado									
					Rumah Dinas Danrem 131/Santiago Kota Manado									
					Rumah Dinas Kajen Rem 131/Santiago Kelurahan Sario Kotabaru di Kota Manado									
					Rumah Dinas Kajen Rem 131/Santiago Kota Manado									
					Rumah Dinas Kajen Rem 131/Santiago Kota Manado									
					Rumah Dinas Kasdim 1301/Satal Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumah Dinas Kodim Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumah Dinas Kodim Kota Kotamobagu									
					Rumah Dinas Kodim tipe K-38 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumah Dinas Koramil 1301-03 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumah Dinas Koramil 1301-09 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumah Dinas Koramil 1302-03 Kabupaten Minahasa									
					Rumah Dinas Koramil 1302-04 Kabupaten Minahasa									
					Rumah Dinas Koramil 1302-05 Kabupaten Minahasa									
					Rumah Dinas Koramil 1302-08 Kabupaten Minahasa									
					Rumah Dinas Koramil 1302-09 Kabupaten Minahasa									
					Rumah Dinas Koramil 1302-11 Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Rumah Dinas Koramil 1302-12 Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara									
					Rumah Dinas Koramil 1302-18 Baru Kabupaten Minahasa Selatan									
					Rumah Dinas Koramil 1302-19 Kabupaten Minahasa Selatan									
					Rumah Dinas Koramil 1303-14 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara									
					Rumah Dinas Koramil 1309-01 Kota Manado									
					Rumah Dinas Koramil 1310-03 Bitung Selatan Kota Bitung									
					Rumah Dinas Koramil 1310-06 Kabupaten Minahasa Utara									
					Rumah Dinas Pa Kota Kotamobagu									
					Rumah Dinas Pa Kodim Kota Kotamobagu									
					Rumah Dinas Pa tipe H-70 Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumah Dinas Perwira Kelurahan Sario Utara di Kota Manado	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pertahanan RI, TNI AU							
					Rumah Dinas Perwira Kelurahan Tikala Kumaraka di Kota Manado	APBN	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia							
					Rumah Dinas Perwira Kota Manado									
					Rumah Dinas Perwira Kota Manado									
					Rumah Sakit TNI AU Lanud Sam Ratulangi Kota Manado	APBN, Sumber	Kementerian Pertahanan							
					Rumah Sakit TNI AU Lanud Sam Ratulangi Kota Manado	APBN	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia							
					Rumdis Babinsa 1302-08/Kawangkoan									
					Rumdis Babinsa 1303-10/Poigar									
					Rumdis Babinsa 1309-05/Wori desa Mantahage Tinongko									
					Rumdis Babinsa 1309-05/Wori desa Talawaan atas									
					Rumdis Babinsa 1310-06/Airmadidi									
					Rumdis Babinsa 1312-03/Beo									
					Rumdis Babinsa 1312-03/Beo									
					Rumdis Babinsa 1312-04/Rainis									
					Rumdis Babinsa 1312-05/Esang									
					Rumdis Babinsa 1312-05/Esang									
					Rumdis Babinsa 1312-06/Nanusa									
					Rumdis Babinsa 1312-07/Miangas									
					Rumdis Babinsa Kodim 1301									
					Rumdis Danlanud Kota Manado	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pertahanan RI, TNI AU							
					Rumdis Jabatan/Mess Kodim Talaud									
					Rumdis Kesdim 1303/Bolmong									
					Rumdis Kodim 1302/Minahasa									
					Rumdis Kodim 1312/Talaud									
					Rumdis kodim Talaud									
					Rumdis Koramil Batu Kota	APBN	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia							
					Rumdis Koramil 1302-09/Langowan									
					Rumdis Koramil 1303-02/Passi									
					Rumdis Koramil 1312-02/Lirung									
					Rumdis Koramil Karatung									
					Rumdis Koramil Marore									
					Rumdis Koramil Siau Tagulandang Biaro									
					Rumdis Mess Pringgondani, Mess Crew Bethesda Kota Manado	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pertahanan RI, TNI AU							
					Rumdis PA Kodim 1312/Talaud									
					Rumdis Pama Kota Manado									
					Rumdis TNI AL Desa Apengsembeka di Kapupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumdis TNI AL Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumdis TNI AL Jl. Yos Sudarso Kota Bitung									
					Rumdis TNI AL Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumdis TNI AL Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumdis TNI AL Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumdis TNI AL Kelurahan Bitung Karangria di Kota Manado									
					Rumdis TNI Al Kelarahan Bungalawang di Kapupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumdis TNI AL Kota Bitung									
					Rumdis TNI AL Kota Manado									
					Rumdis TNI AL, Mess Ba/Ta									
					Rumjab Danlanal , Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumjab Danlanal Desa Apengsembeka di Kapupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumjab Danlanal Jl. Tahete Kabupaten Kepulauan. Sangihe									
					Rumjab Danlanal Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Rumjab Danlanal Kelurahan Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Rumjab Danlantamal VII, Mess Pati, Mess Pamen, Mess Kowal ,Kota Manado									
					Rumjab Danlantamal VII, Mess Pati, Mess Pamen, Mess Kowal Kelurahan									
					Rumkit Tk III Teling Atas di Kota Manado									
					Rumkitban 13.08.02 Kotamobagu									
					Rumkitban 13.08.02 Kotamobagu Kota Kotamobagu									
					Satrad CSS Desa Apengsembeka Kabupaten Kepulauan Sangihe									
					Satrol Lantamal VIII,Kota Bitung.									
					Satuan Radar Desa Marampit di Kabupaten Kepulauan Talaud									
					Secaba Rindam XIII/Mdk Kab. Minahasa Selatan									
					Secata "B" Eks Gudang Manisi Kelurahan Girian Bawah Kota Bitung	APBN	Kementerian Pertahanan							

					Secata "B" Eks. Gudang Amunisi Rindam XIII/Merdeka Kelurahan Girian Bawah Secata "B" Rindam XIII/Merdeka Kelurahan Girian Bawah di Kota Bitung Secata Rindam XIII/Mdk Kota Bitung Senkom, Gudang Pasint di Kota Manado Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut Kema di Kabupaten Minahasa Stasiun Penamntauan Keamanan dan Keselamatan Laut Kema Minahasa Utara Sub Den Pom Rem 131/Stg Kota Manado Subdenpom XIII/1-1/C Kabupaten Kepulauan Sangihe Subdenpom XIII/1-2, Kota Bitung Sumber Air Denzipur-4/YKN Desa Suwaan Kabupaten Minahasa Utara Tambahan Rencana Pembangunan Pangkalan TNI AL Kec. Bolaang Timur Tanah dan Bangunan Kantor 3 Pilar Tanah dan Bangunan Pos Koramil Pinolosian timur Tanah Kosong (Koramil 1312-04) Kec. Tampaanama Tanah Kosong (Persiapan Koramil 1312-01) Kec. Damau Tanah Kosong (Persiapan Koramil 1312-01) Kec. Damau Tanah Kosong 1301-06/Kendahe Tanah Kosong 1310-03/Likupang Desa Serey Tanah Kosong desa Pilolahunga Tanah Kosong Kec Kakas Tanah Kosong kec Wongkai Tanah Kosong Kodim 1302/Minahasa kec Desa Pondang Tanah Kosong Kodim 1302/Minahasa Kec Tolusan Tanah lapangan 1302-03/Kakas Tanah Lapangan Yon Armed 19 Bogani Desa Totolen di Kabupaten Minahasa Tasuka water base Kabupaten Minahasa	APBN	Republik Indonesia							
					TI, Komplek Pinabetengan di Kota Manado	APBN, Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah	Kementerian Pertahanan RI, TNI AU								
					Tim Intelrem Kota Manado Tk Persit Water Base Tasuka Kabupaten Minahasa Water Base Tasuka Kabupaten Minahasa Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Bangkit Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Batubawaikang Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Intata Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Kabaruan Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Kakarutan Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Kawaluso Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Kawio Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Makalehi Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Manterawu Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Marampit Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Marore Wilayah keadulatan dan yuridiksi nasional Pulau Miangas Wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Pulau Bangkit di Kabupaten Bolaang Wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Pulau Batubawaikang di Kabupaten Wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Pulau Intata di Kabupaten Kepulauan Wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Pulau Kabaruan di Kabupaten Kepulauan Wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Pulau Kakorotan di Kabupaten Kepulauan Wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Pulau Kawaluso di Kabupaten Kepulauan Wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Pulau Kawio di Kabupaten Kepulauan Wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Pulau Makalehi di Kabupaten Kepulauan Wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Pulau Manterawu di Kabupaten Minahasa Wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Pulau Marampit di Kabupaten Kepulauan Wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Pulau Marore di Kabupaten Kepulauan Wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Will Box Selatan Kota Manado Wisma A. Yani I Kelurahan Sario Utara di Kota Manado Wisma Merdeka I diKota Manado Wisma Merdeka I Kota Manado Wisma Merdeka II Kota Manado Wisma TNI AL Kabupaten Kepulauan Sangihe Yomarhanlan VIII, Rumkital, Rumdis TNI AL Kelurahan Bitung Barat di Kota Bitung Yon Armed 19 105/Tarik, Kabupaten Bolaang Mongondow Yon Armed Divisi 3/K Kelurahan Mongkoinit di Kabupaten Bolaang Mongondow Yon Marhanlan VIII Kelurahan Bitung Tengah di Kota Bitung	APBN	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia							
					Yonarmed/19/105/MM/Tarik/Bogani Kabupaten Bolaang Mongondow	APBN	TNI AL								
					Yonif 712/WT Kelurahan Wenang di Kota Manado										
					Yonif 712/WT Kiban Ds. Paniki Kabupaten Manado Yonif 712/WT Kipan B Ds. Sukur Kabupaten Minut Yonif 712/WT Kipan C Ds. Tateli Kabupaten Minahasa Yonif 712/WT Kota Manado Yonif R 712/WT Kipan A Ds. Tateli Kabupaten Minahasa Yonif R 712/WT Kipan B Ds. Sukur Kabupaten Minut Yonif R 712/WT Kipan C Ds. Tateli Kabupaten Minahasa Yonif R 712/WT Mayon dan Kima Ds. Loreng Kel. Bailang Kota Manado	APBN	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia							
					Yonmarhanlan VIII, Rumkital, Rumdis TNI AL Kota Bitung Yonzipur 19/YKN Desa Maumbi Kabupaten Minahasa Utara Yonzipur 19/Yudha Karya Nyata di Kabupaten Minahasa Utara	APBN	TNI AL								
			k.	Pengembangan Fasilitas Sarana Pendukung Operasi Penerbangan	Lanud Sam Ratulangi di Desa Mapanget di Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian Perhubungan								
			l.	Pengembangan Fasilitas Sarana Prasarana Perkantoran											
			m.	Pengembangan Fasilitas Sarana Prasarana Gudang											
			n.	Pengembangan Fasilitas Sarana Prasarana Panggon dan Ibadah											
			o.	Pengembangan Fasilitas Sarana Prasarana Latihan dan Olahraga											
			p.	Penetapan, Penataan, dan Pemeliharaan Kawasan Sempadan di Pertahanan dan Keamanan	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Utara Kota Bitung Kota Manado	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia								
			q.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertambangan di Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Minahasa Utara Wilayah Laut	APBN	Kementerian ESDM								
			r.	Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Utara Kota Manado	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, BUMN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota,								
			r.	Koordinasi dan Sosialisasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara untuk Menjamin Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara di Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Utara Kota Bitung Kota Manado Kota Tomohon	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, BUMN	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, BUMN								
C.	**Perwujudan Kawasan Strategis**														
	1	**Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi**													
		1.1	**Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi**												
			a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
				1) Penataan Tata Letak Bangunan dan Lingkungan pada kawasan strategis provinsi	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan sekitarnya di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara	APBN	Kementerian PU								
				2) Pemeliharaan Berkala Bangunan	Kawasan Koridor Pantai Pesisir Selatan di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa										
				3) Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa	Kawasan Koridor Pantai Pesisir Utara di Kota Manado, Kabupaten Minahasa, KEK Likupang dan sekitarnya di Kabupaten Minahasa Utara	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								

		1.2	**Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya**												
			a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
			1)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	Kawasan Benteng Amurang yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan Kawasan Kampung Arab yang berada di Kota Manado Kawasan Kampung Jawa Tondano yang berada di Kabupaten Minahasa Kawasan Pecinaan yang berada di Kota Manado Kawasan Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara Kompleks Istana Manganitu yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe Kompleks Keraton Boroko yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kompleks Lodji Tondano yang berada di Kabupaten Minahasa	APBD Provinsi	Dinas PUPR Provinsi								

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH PROVINSISULAWESI
UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN

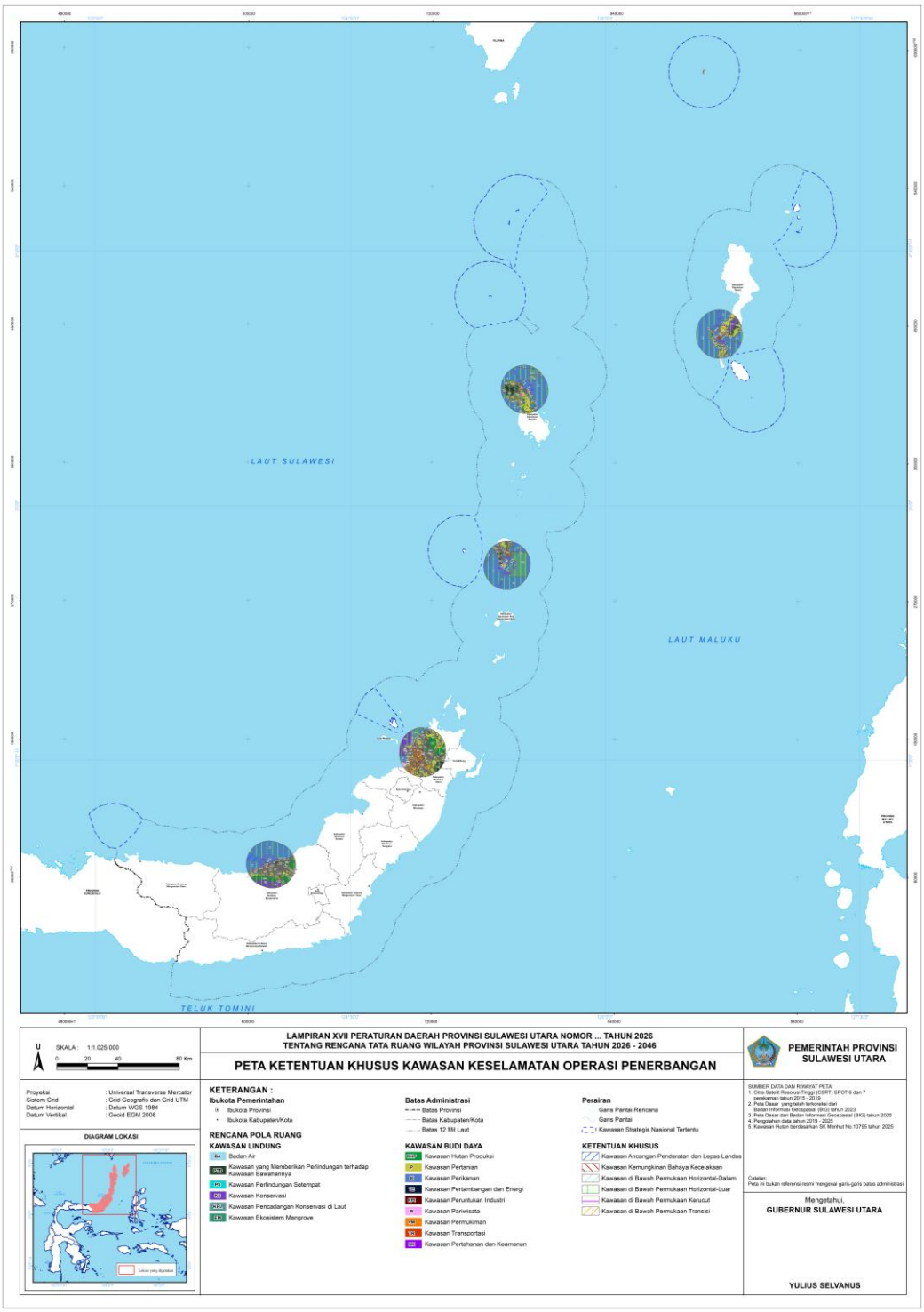

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

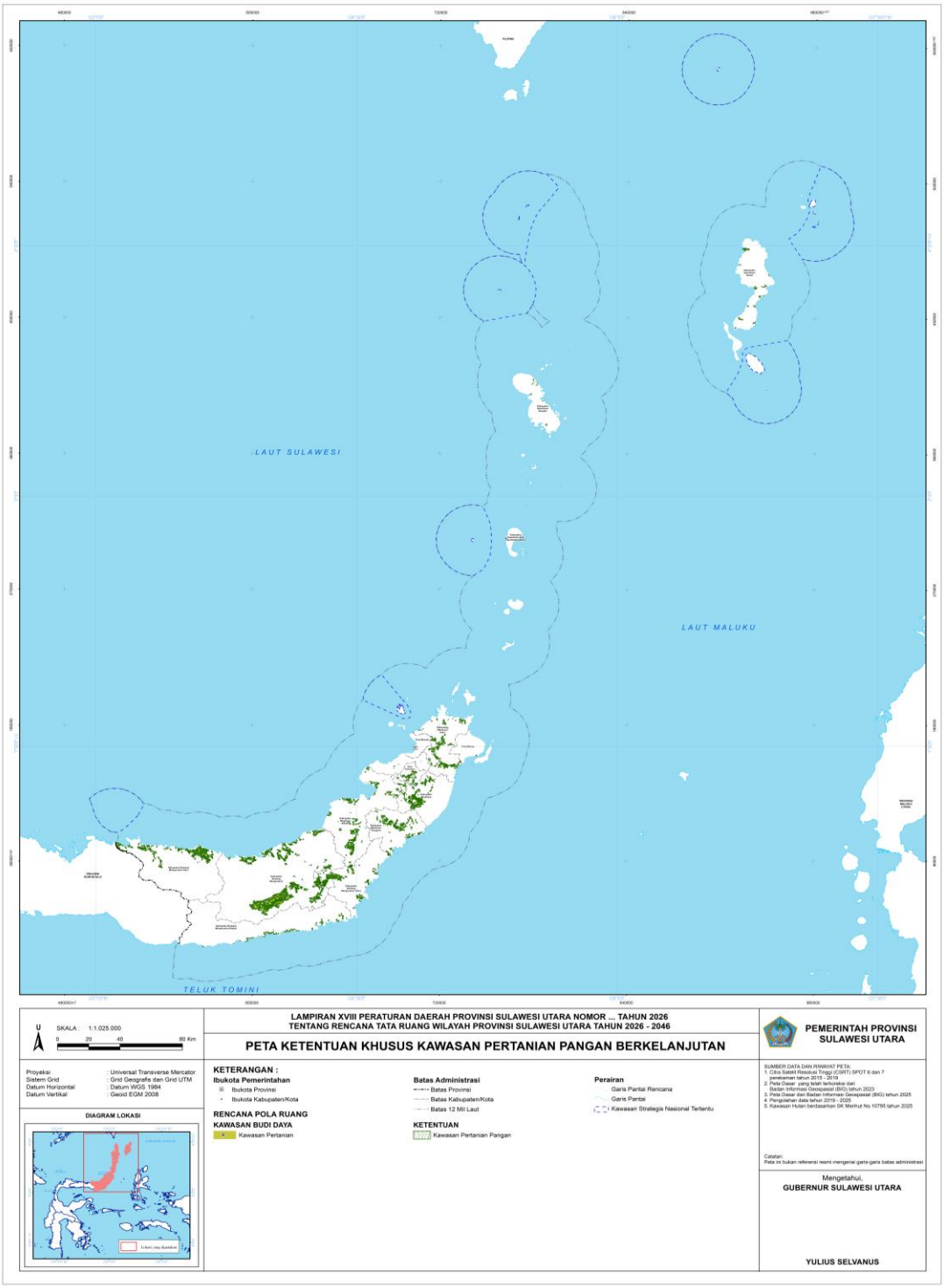

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA

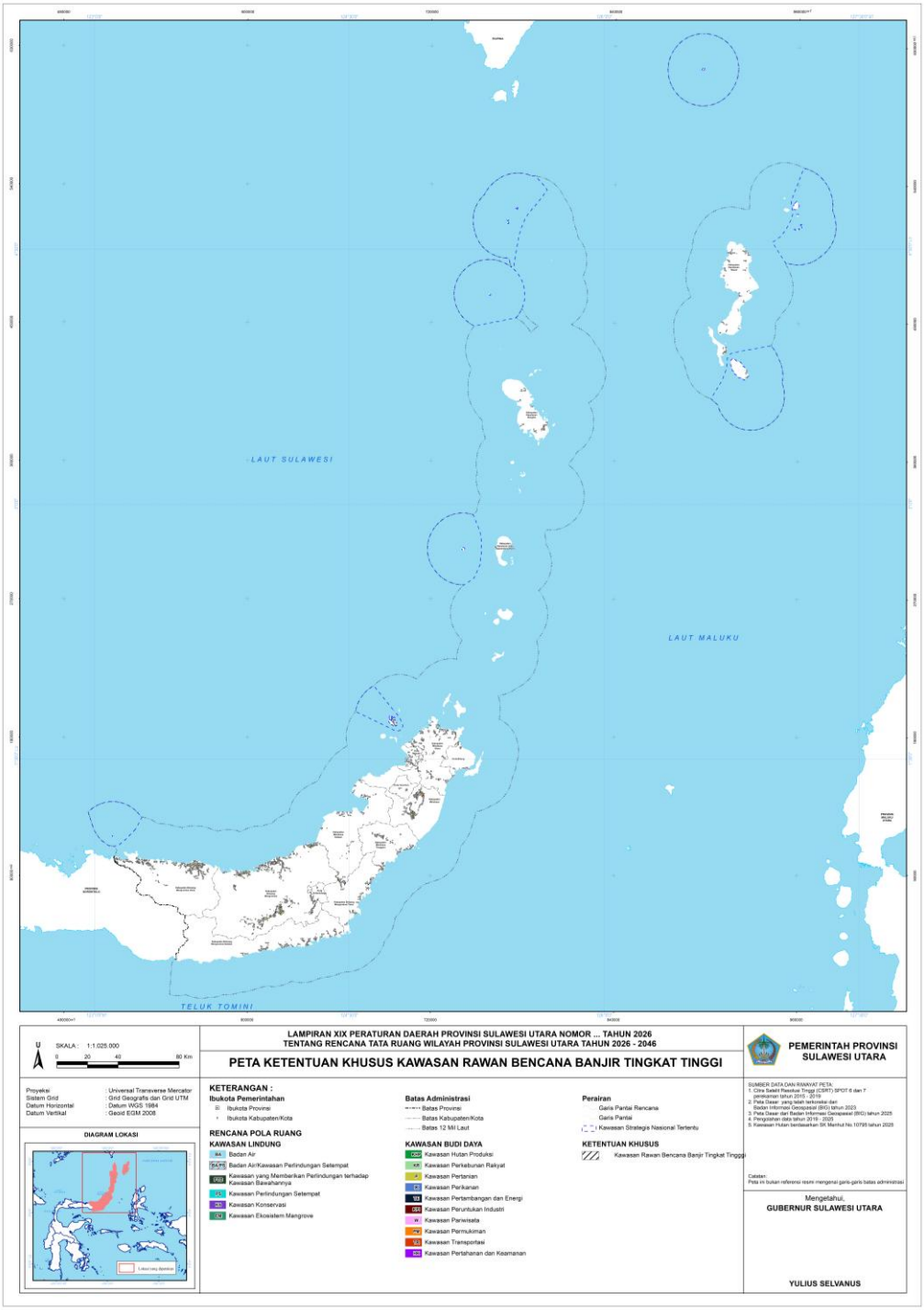

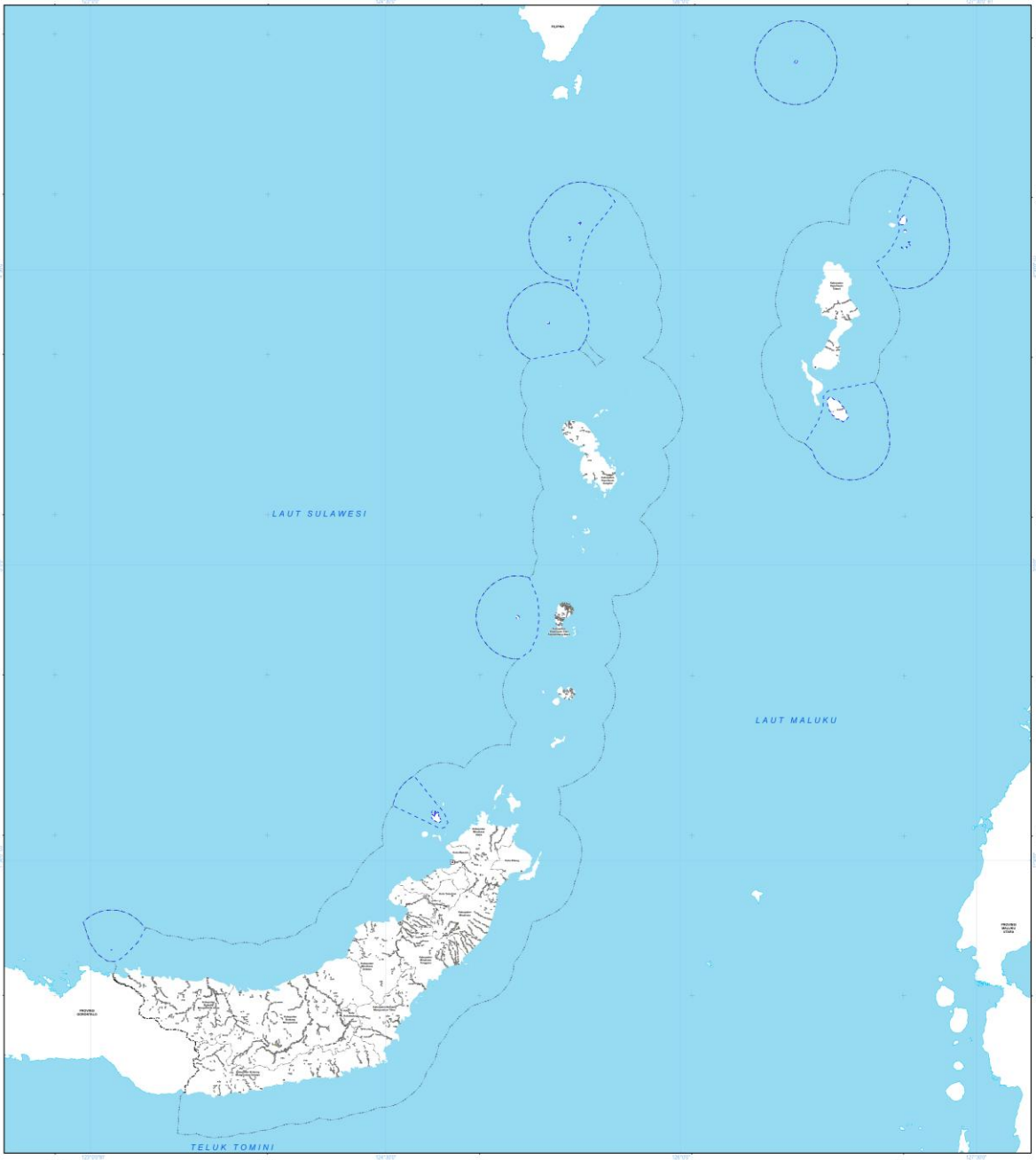

U

SKALA : 1:1.025.000

0 20 40 80 Km

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR BANDANG TINGKAT TINGGI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

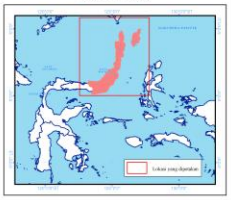

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
- PB Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- PS Kawasan Perlindungan Setempat
- KS Kawasan Konservasi
- EM Kawasan Ekosistem Mangrove

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas 12 Mil Laut

KAWASAN BUDI DAYA
- HP Kawasan Hutan Produksi
- P Kawasan Pertanian
- IK Kawasan Perikanan
- TB Kawasan Pertambangan dan Energi
- IND Kawasan Peruntukan Industri
- W Kawasan Pariwisata
- PM Kawasan Permukiman
- TR Kawasan Transportasi
- HAN Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Perairan
- Garis Pantai Rencana
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tingggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6 dan 7 perekaman tahun 2015 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
4. Pengisihan data tahun 2019 - 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

YULIUS SELVANUS

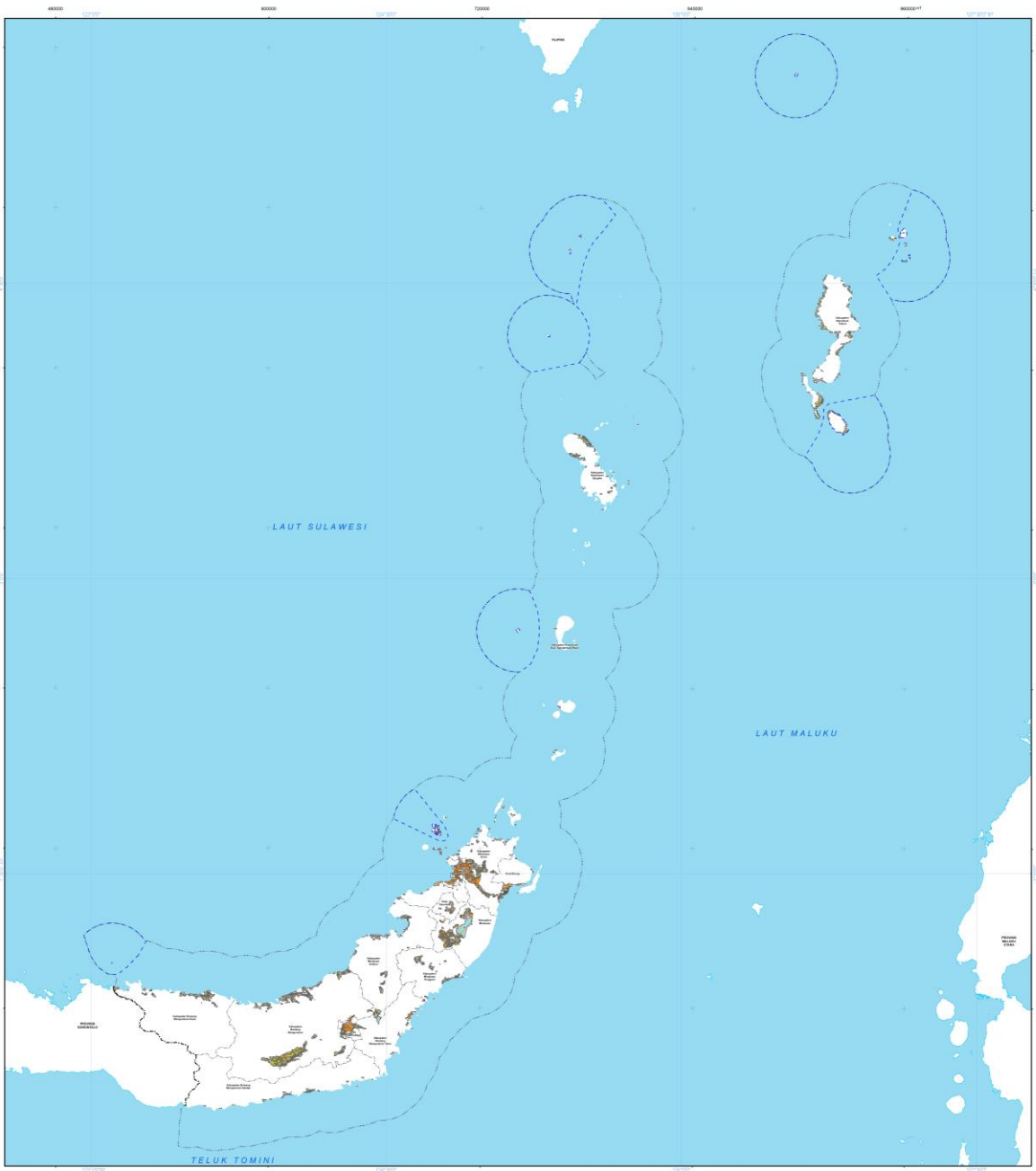

U

SKALA : 1:1.025.000

0 20 40 80 Km

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA CUACA EKSTREM TINGKAT TINGGI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

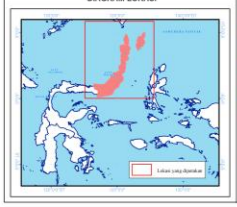

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
- BA Badan Air
- BA/PS Badan Air/Kawasan Perlindungan Setempat
- PSB Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- PS Kawasan Perlindungan Setempat
- PS-BA Kawasan Perlindungan Setempat/Badan Air
- KS Kawasan Konservasi
- EM Kawasan Ekosistem Mangrove

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas 12 Mil Laut

KAWASAN BUDI DAYA
- HP Kawasan Hutan Produksi
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat
- P Kawasan Pertanian
- K Kawasan Perikanan
- TB Kawasan Pertambangan dan Energi
- SPI Kawasan Peruntukan Industri
- W Kawasan Pariwisata
- PM Kawasan Permukiman
- TR Kawasan Transportasi
- HAN Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Perairan
- Garis Pantai Rencana
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrem Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6 dan 7 perekaman tahun 2015 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
4. Pengolahan data tahun 2019 - 2025
5. Kawasan Hutan berdasarkan SK Menhut No.10795 tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

YULIUS SELVANUS

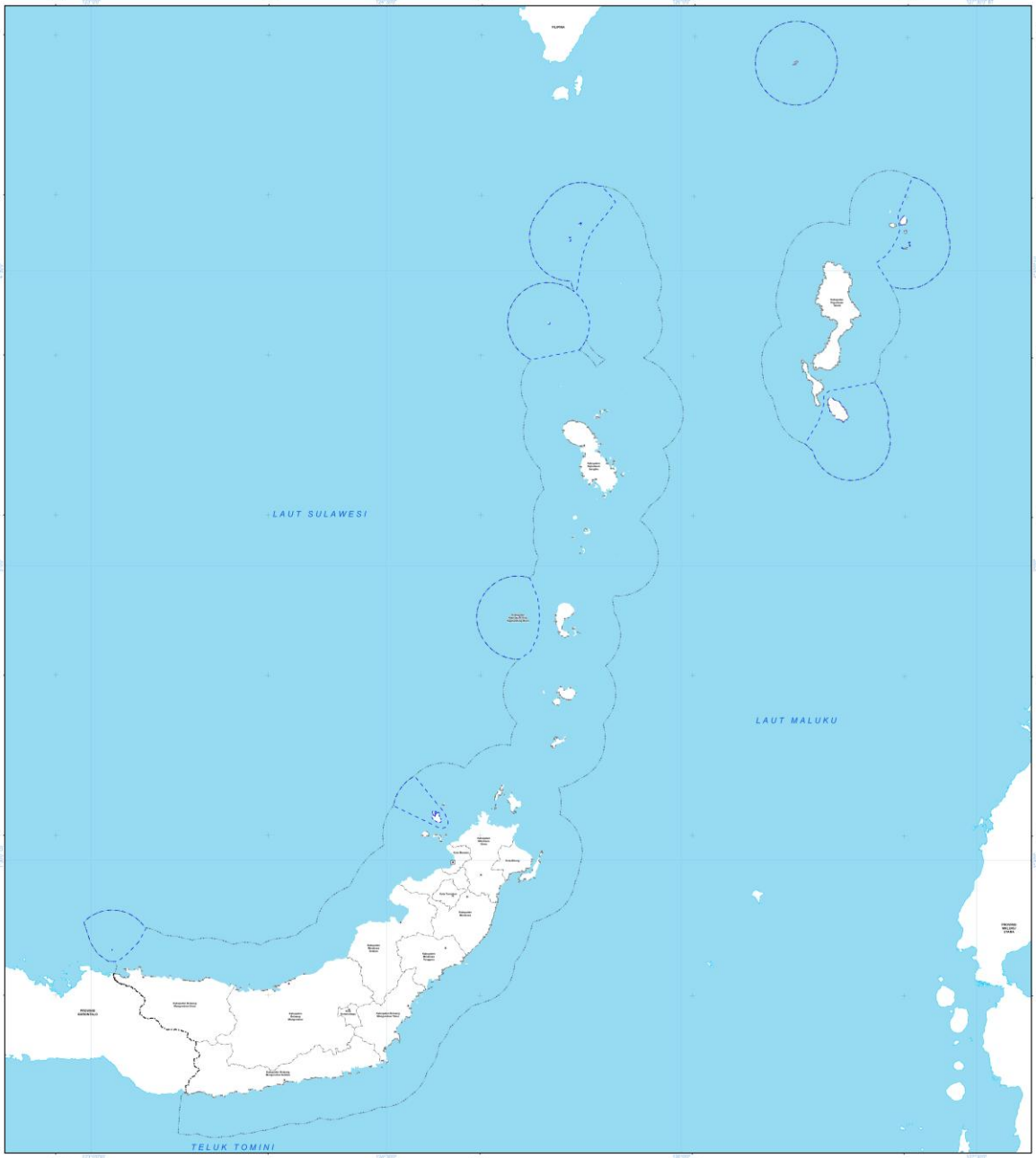

U

SKALA : 1:1.025.000

0 20 40 80 Km

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI TINGKAT TINGGI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

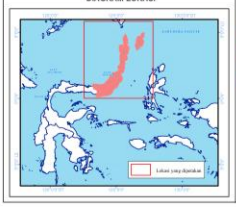

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
- BA Badan Air
- PHD Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- PS Kawasan Perlindungan Setempat
- KS Kawasan Konservasi
- KM Kawasan Ekosistem Mangrove

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas 12 Mil Laut

KAWASAN BUDI DAYA
- HP Kawasan Hutan Produksi
- P Kawasan Pertanian
- KK Kawasan Perikanan
- KB Kawasan Pertambangan dan Energi
- KPI Kawasan Peruntukan Industri
- PW Kawasan Pariwisata
- PM Kawasan Permukiman
- KT Kawasan Transportasi
- KHT Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Perairan
- Garis Pantai Rencana
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Rawan Bencana Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6 dan 7 perekaman tahun 2015 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
4. Pengolahan data tahun 2019 - 2025
5. Kawasan Hutan berdasarkan SK Menhut No.10795 tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

YULIUS SELVANUS

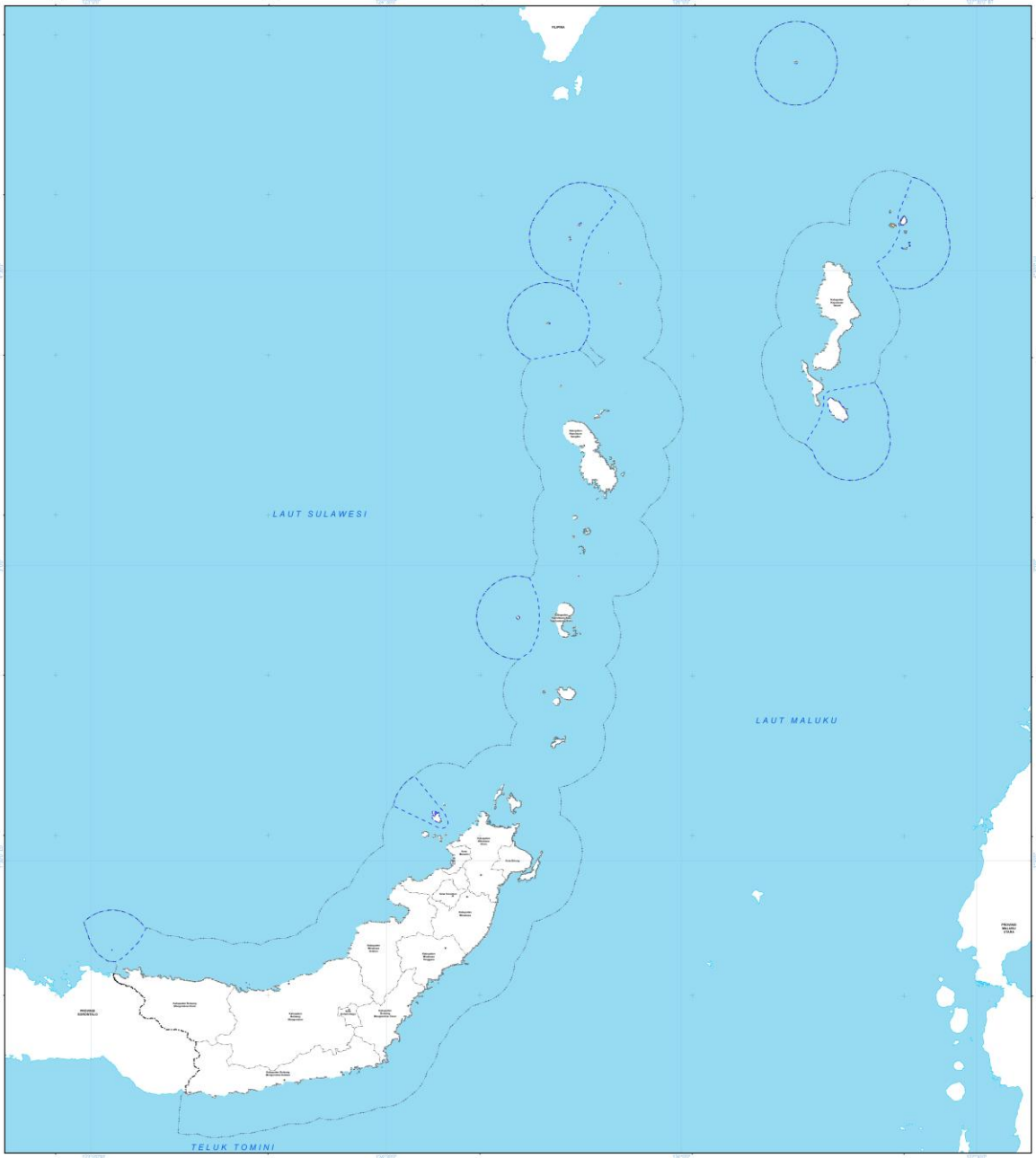

U

SKALA : 1:1.025.000

0 20 40 80 Km

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI TINGKAT TINGGI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
- BA Badan Air
- PHE Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- PS Kawasan Perlindungan Setempat
- KS Kawasan Konservasi
- EM Kawasan Ekosistem Mangrove

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas 12 Mil

KAWASAN BUDI DAYA
- HP Kawasan Hutan Produksi
- P Kawasan Pertanian
- K Kawasan Perikanan
- TB Kawasan Pertambangan dan Energi
- KPI Kawasan Peruntukan Industri
- W Kawasan Pariwisata
- PM Kawasan Permukiman
- KT Kawasan Transportasi
- KHT Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Perairan
- Garis Pantai Rencana
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tingkat

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6 dan 7 perekaman tahun 2015 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
4. Pengolahan data tahun 2019 - 2025
5. Kawasan Hutan berdasarkan SK Menhut No.10795 tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

YULIUS SELVANUS

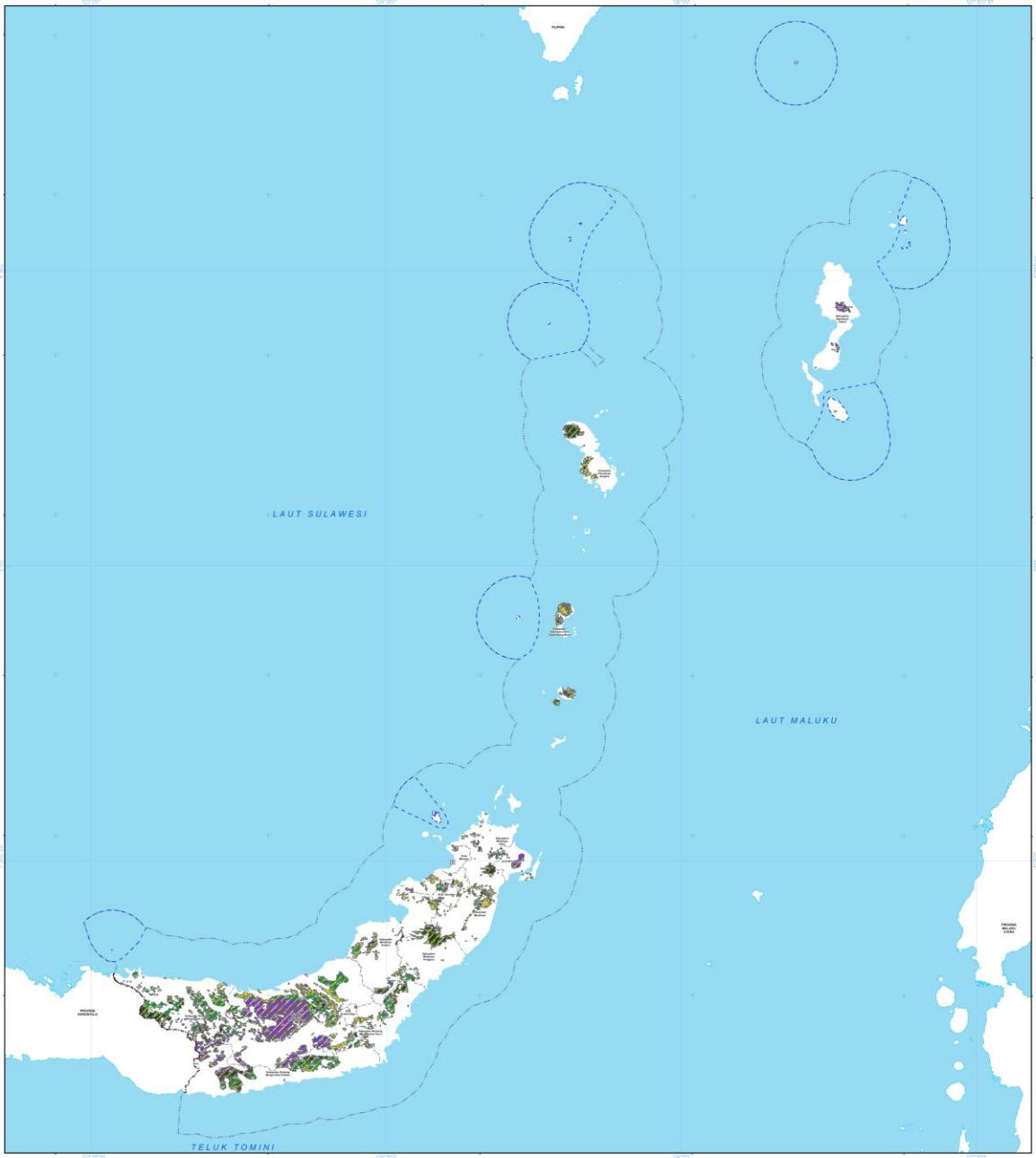

U

SKALA : 1:1.025.000

0 20 40 80 Km

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR TINGKAT TINGGI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

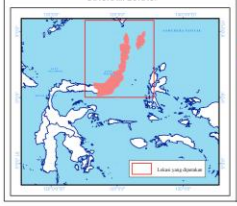

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
- PHD Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- PS Kawasan Perlindungan Setempat
- KS Kawasan Konservasi
- EM Kawasan Ekosistem Mangrove

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas 12 Mil Laut

KAWASAN BUDI DAYA
- HP Kawasan Hutan Produksi
- P Kawasan Pertanian
- TB Kawasan Pertambangan dan Energi
- PIR Kawasan Peruntukan Industri
- W Kawasan Pariwisata
- PM Kawasan Permukiman
- TR Kawasan Transportasi

Perairan
- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Rawan Bencana Longsor Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6 dan 7 perekaman tahun 2015 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
4. Pengolahan data tahun 2019 - 2025
5. Kawasan Hutan berdasarkan SK Menhut No.10795 tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

YULIUS SELVANUS

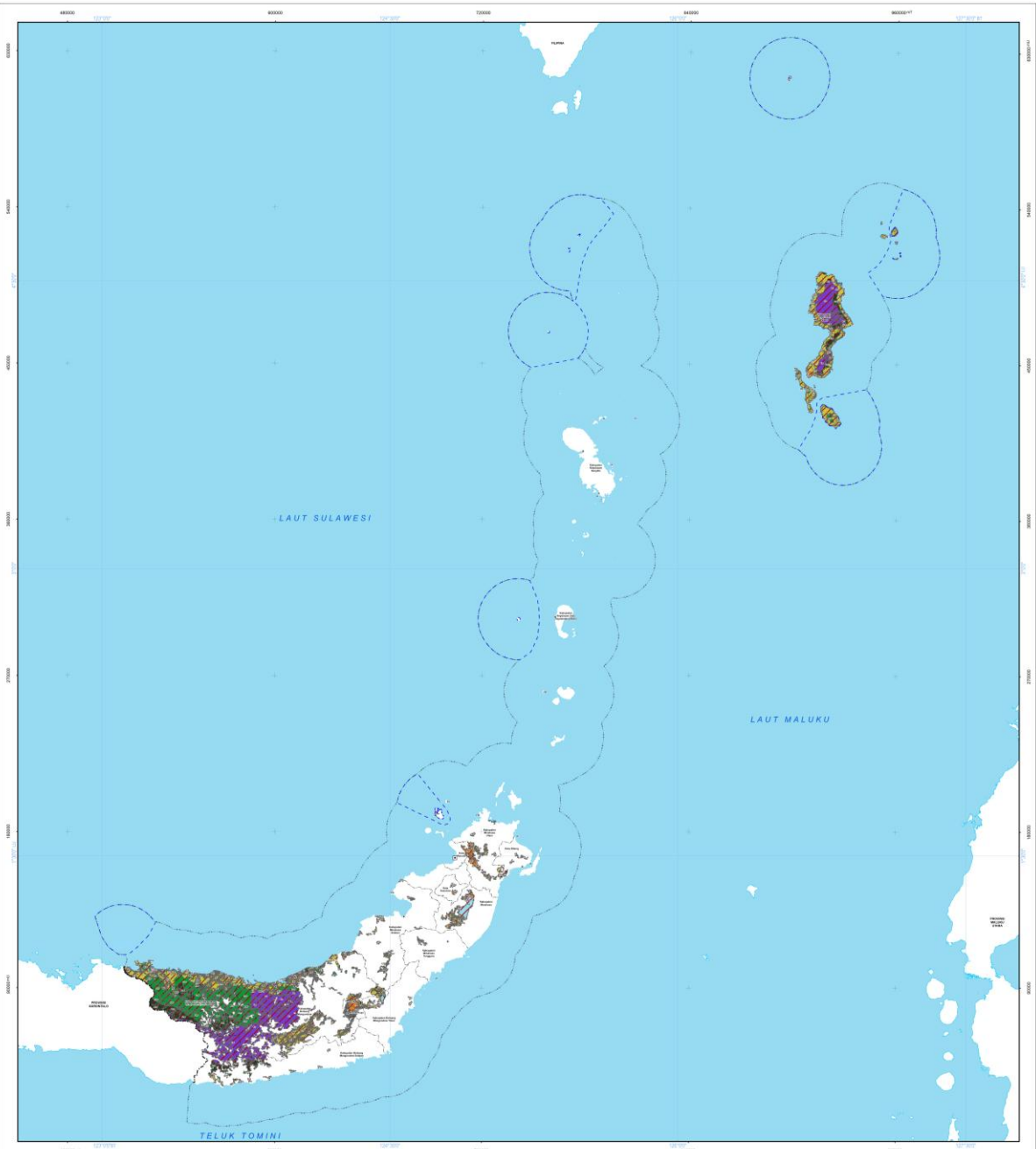

U

SKALA : 1:1.025.000

0 20 40 80 Km

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI TINGKAT TINGGI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

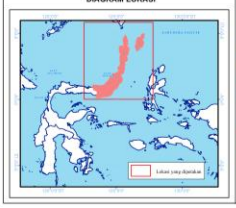

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

KAWASAN LINDUNG

Nama Objek

- BA Badan Air
- BA-PS Badan Air/Kawasan Perlindungan
- CM Kawasan Ekosistem Mangrove
- KS Kawasan Konservasi
- KPC Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut
- PS Kawasan Perlindungan Setempat
- PS-BA Kawasan Perlindungan Setempat/Badan Air
- PKS Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- PKS-KP Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pariwisata

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas 12 Mil Laut

KAWASAN BUDI DAYA

KAWASAN BUDIDAYA

Nama Objek

- HP Kawasan Hutan Produksi
- HP-BDA Kawasan Hutan Produksi/Badan
- W Kawasan Pariwisata
- P Kawasan Perikanan
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat
- PM Kawasan Permukiman
- HAN Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- TM Kawasan Pertambangan dan Energi
- P Kawasan Pertanian
- PI Kawasan Peruntukan Industri
- TR Kawasan Transportasi

Perairan

- Garis Pantai Rencana
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

KETENTUAN KHUSUS

- Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6 dan 7 perekaman tahun 2015 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
4. Pengolahan data tahun 2019 - 2025
5. Kawasan Hutan berdasarkan SK Menhut No.10795 tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

YULIUS SELVANUS

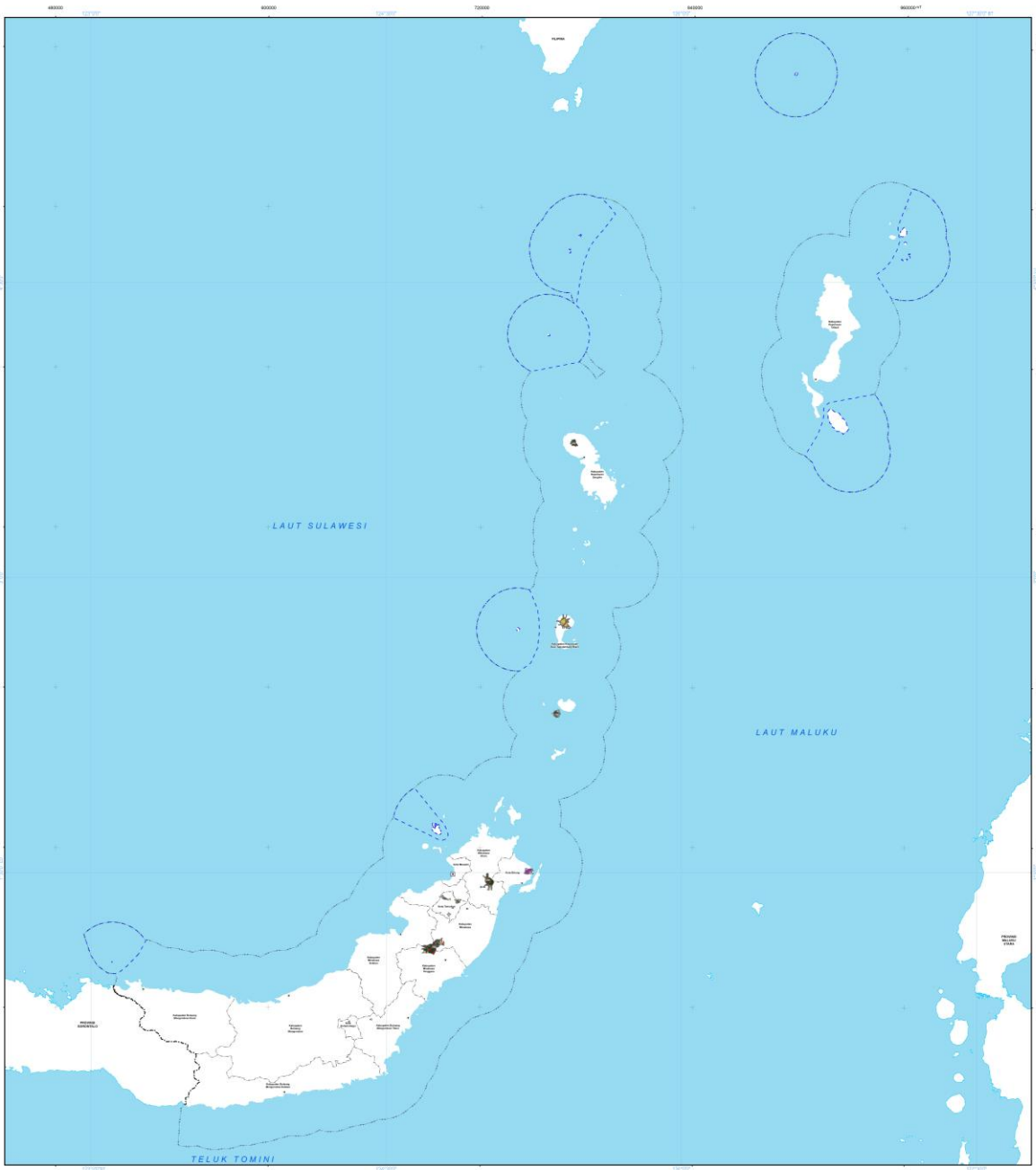

U

SKALA : 1:1.025.000

0 20 40 80 Km

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA LETUSAN GUNUNG API TINGKAT TINGGI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
- KHDT Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- PSS Kawasan Perlindungan Setempat
- KS Kawasan Konservasi

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas 12 Mil Laut

KAWASAN BUDI DAYA
- KHP Kawasan Hutan Produksi
- P Kawasan Pertanian
- KB Kawasan Pertambangan dan Energi
- W Kawasan Pariwisata
- KPM Kawasan Permukiman
- KT Kawasan Transportasi

Perairan
- Garis Pantai Rencana
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6 dan 7 perekaman tahun 2015 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
4. Pengolahan data tahun 2019 - 2025
5. Kawasan Hutan berdasarkan SK Menhut No.10795 tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

YULIUS SELVANUS

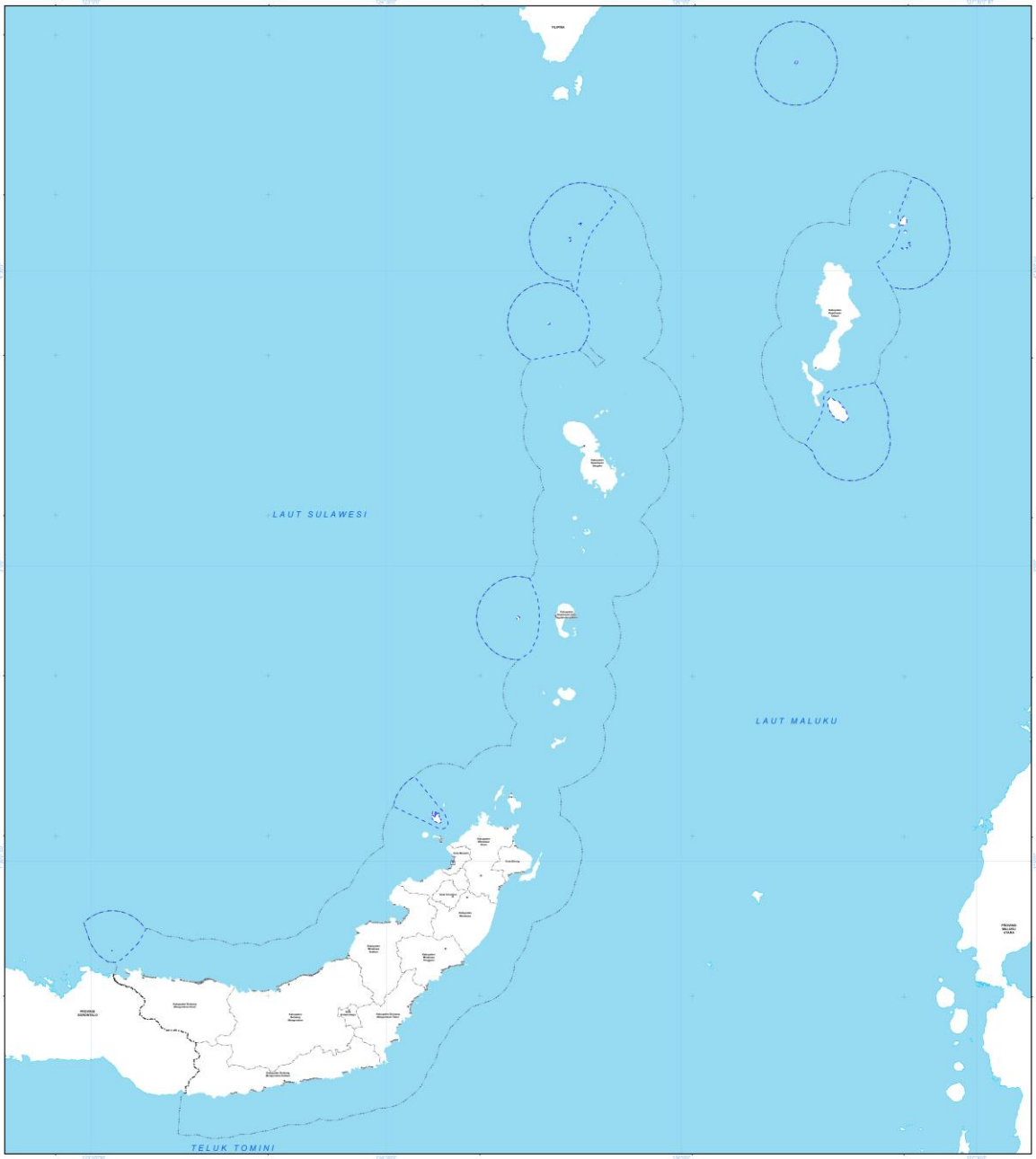

U

SKALA : 1:1.025.000

0 20 40 80 Km

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA LIKUEFAKSI TINGKAT TINGGI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

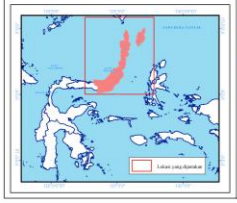

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG

- BA Badan Air
- GPD Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- KSA Kawasan Konservasi
- KM Kawasan Ekosistem Mangrove

Batas Administrasi

- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas 12 Mil Laut

KAWASAN BUDI DAYA

- HP Kawasan Hutan Produksi
- P Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- KI Kawasan Peruntukan Industri
- W Kawasan Pariwisata
- PM Kawasan Permukiman
- TR Kawasan Transportasi

Perairan

- Garis Pantai Rencana
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

KETENTUAN KHUSUS

- Kawasan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6 dan 7 perekaman tahun 2015 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
4. Pengolahan data tahun 2019 - 2025
5. Kawasan Hutan berdasarkan SK Menhut No.10795 tahun 2025

Catatan :
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

YULIUS SELVANUS

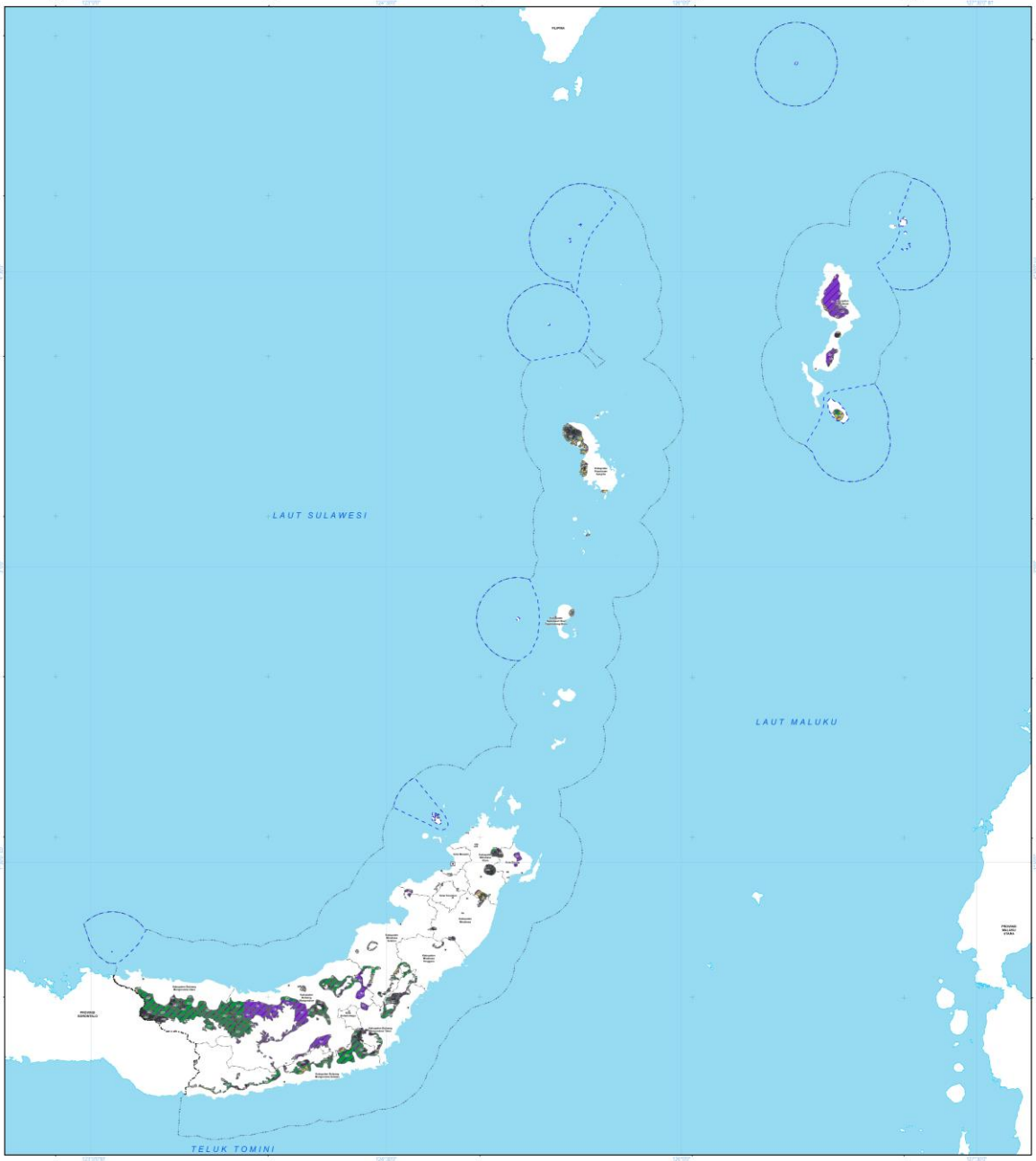

U

SKALA : 1:1.025.000

0 20 40 80 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

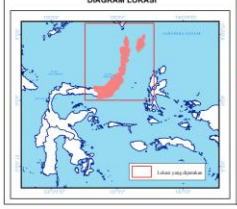

LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026 - 2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TINGKAT TINGGI

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota

RENCANA POLA RUANG

KAWASAN LINDUNG
- KA-PS Badan Air/Kawasan Perlindungan Setempat
- PSB Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- PS Kawasan Perlindungan Setempat
- KS Kawasan Konservasi
- KM Kawasan Ekosistem Mangrove

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas 12 Mil Laut

KAWASAN BUDI DAYA
- KHP Kawasan Hutan Produksi
- P Kawasan Pertanian
- KPI Kawasan Peruntukan Industri
- W Kawasan Pariwisata
- PM Kawasan Permukiman
- KT Kawasan Transportasi

Perairan
- Garis Pantai Rencana
- Garis Pantai
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

KETENTUAN KHUSUS
- Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) SPOT 6 dan 7 perekaman tahun 2015 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Peta Dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025
4. Pengolahan data tahun 2019 - 2025
5. Kawasan Hutan berdasarkan SK Menhut No.10795 tahun 2025

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

YULIUS SELVANUS

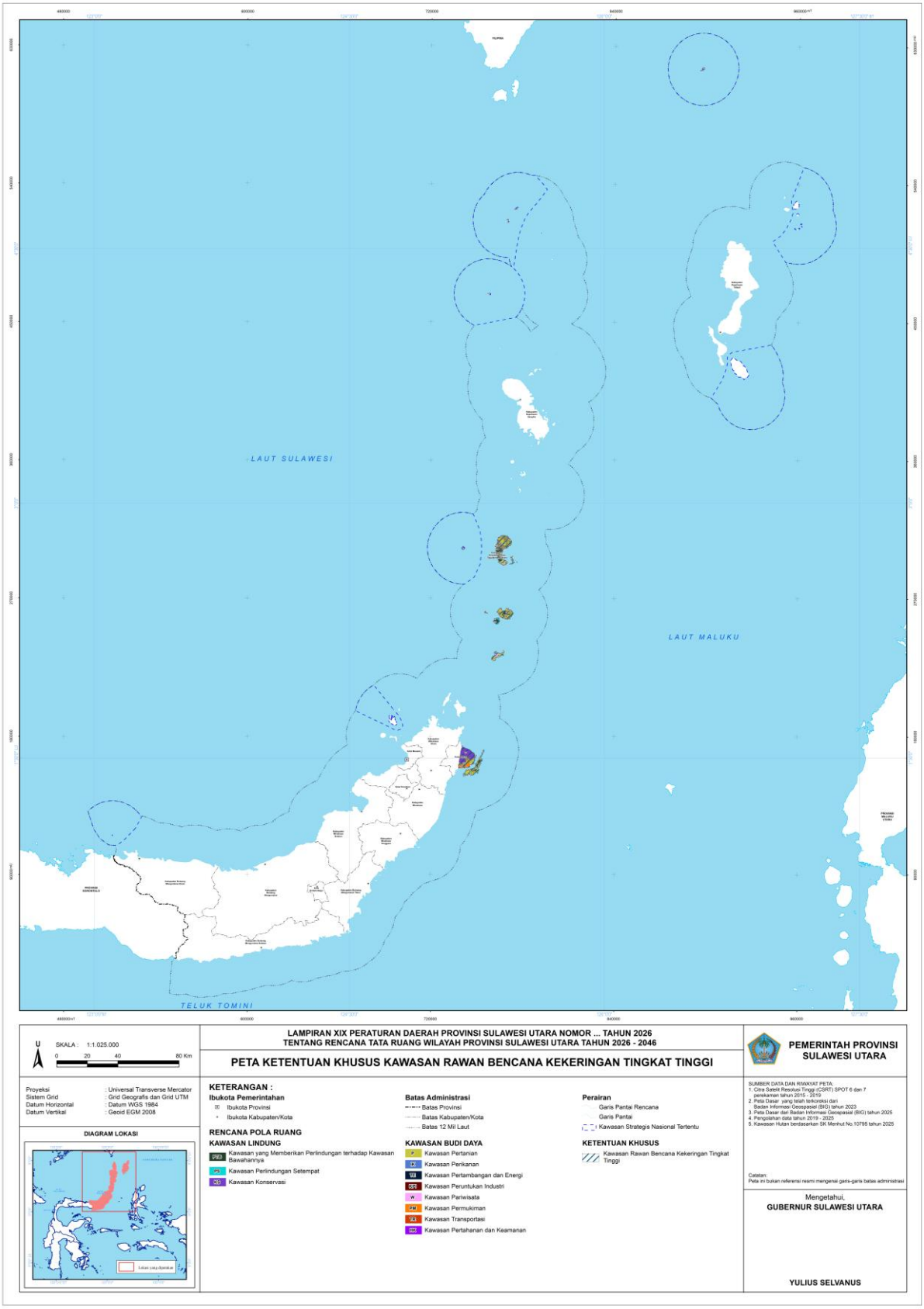

GUBERNUR SULAWESI UTARA

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN CAGAR BUDAYA

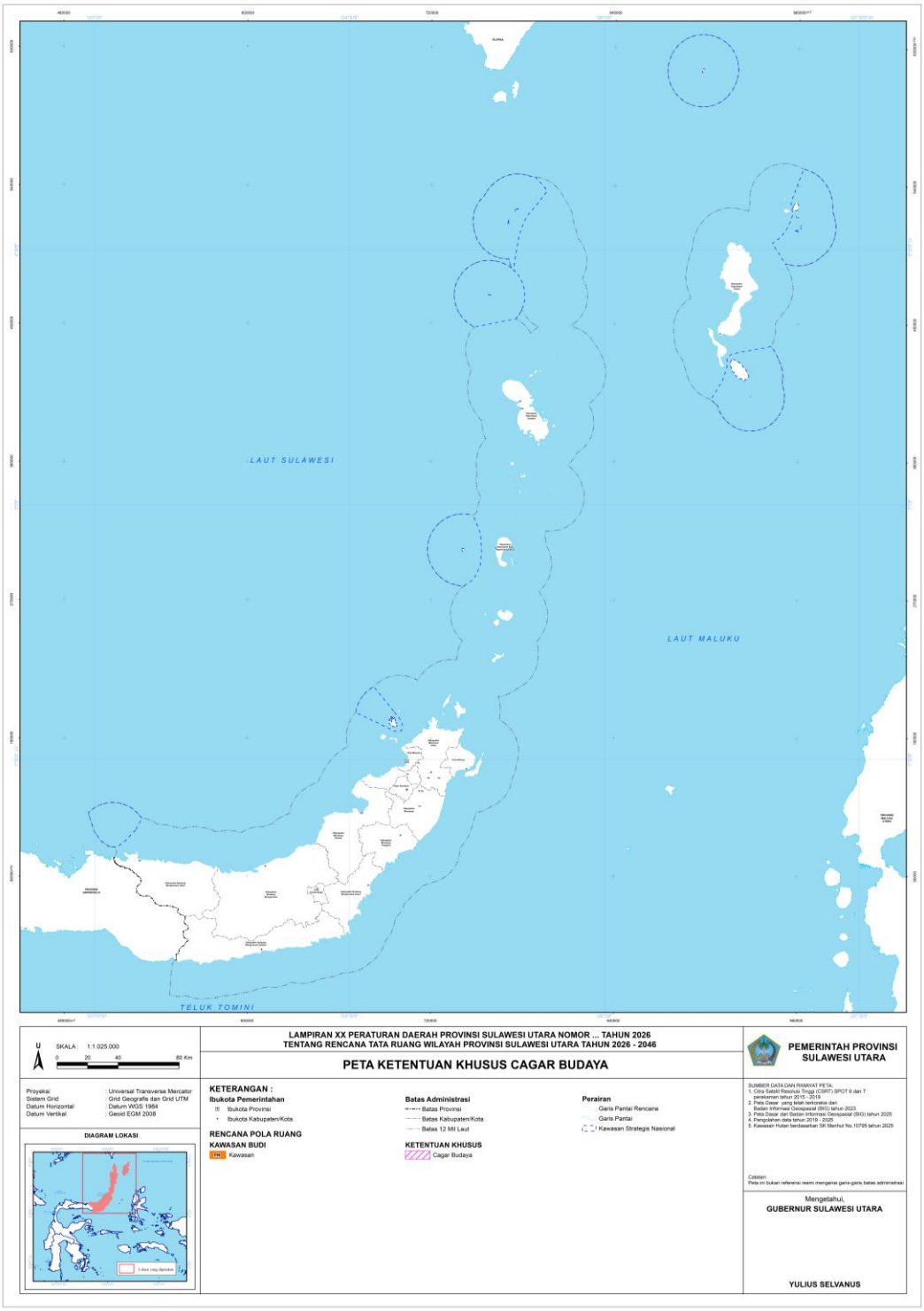

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR

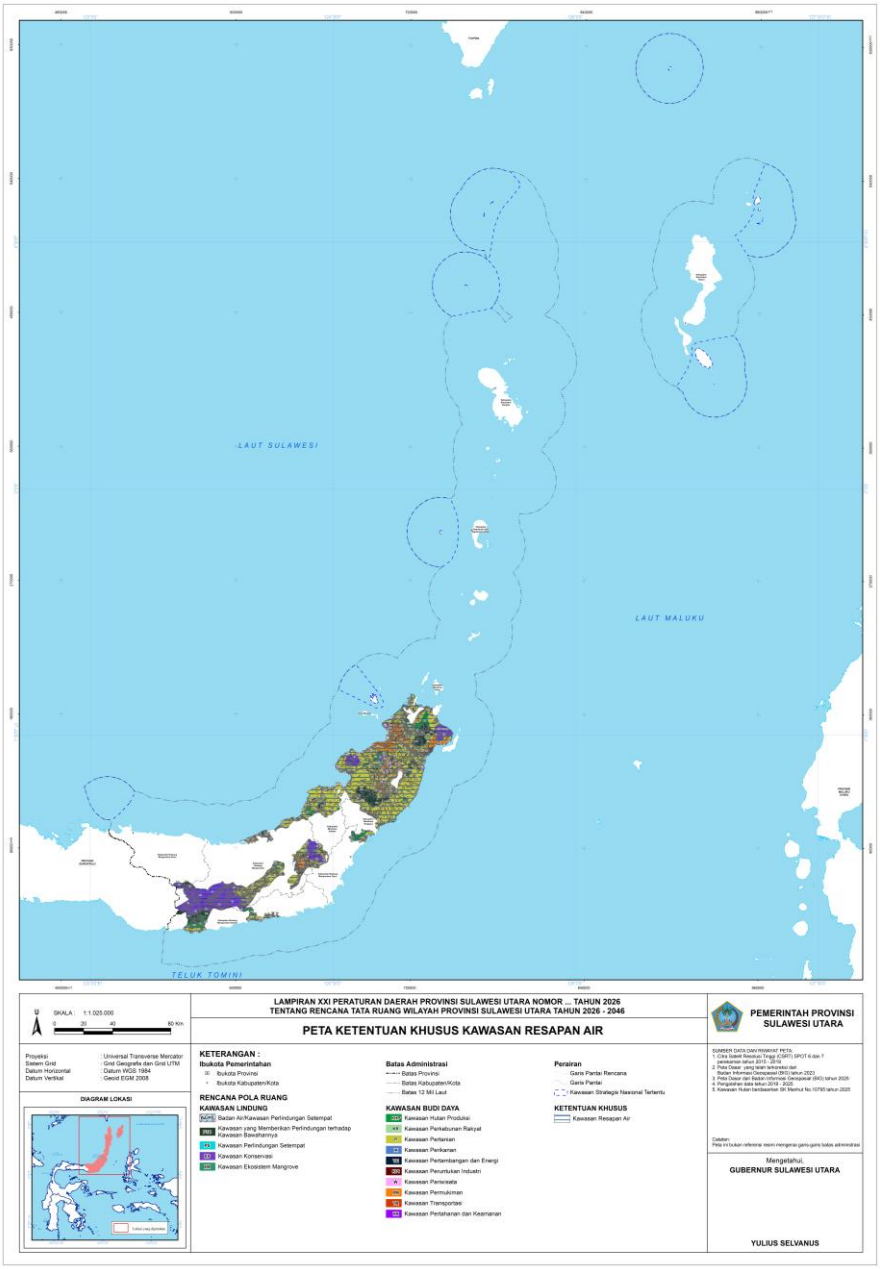

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XXII
PERATURAN DAERAH PROVINSISULAWESI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN

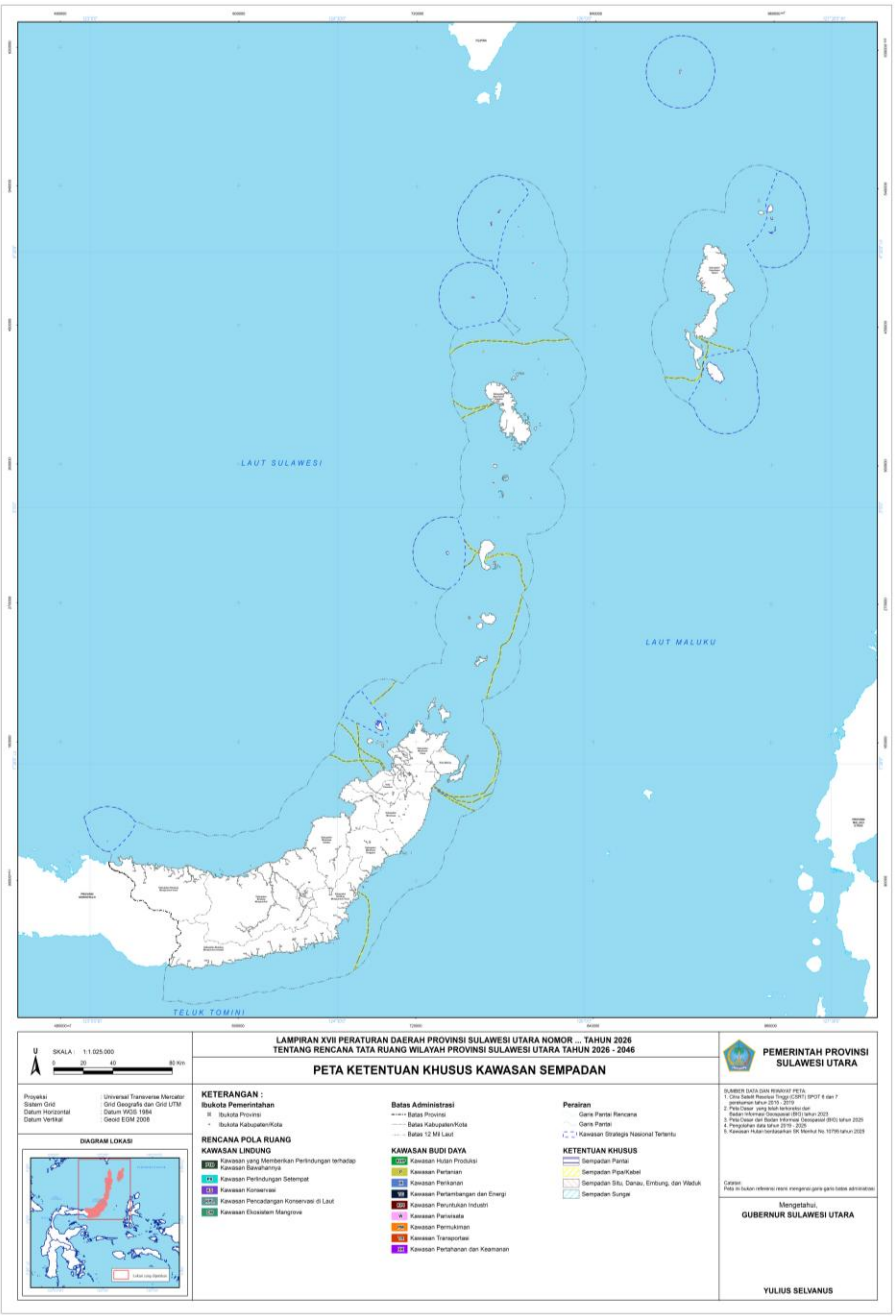

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

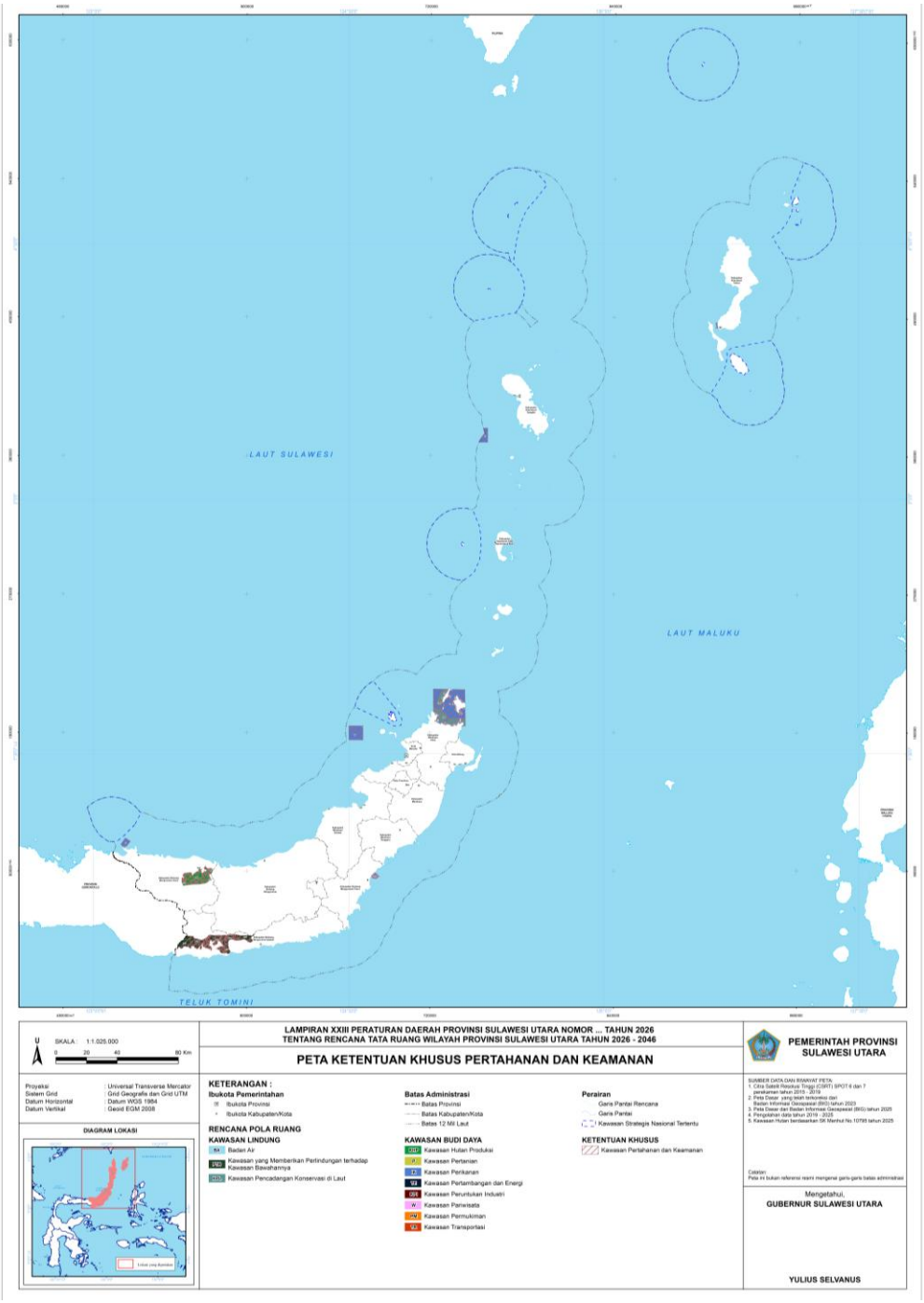

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KARST

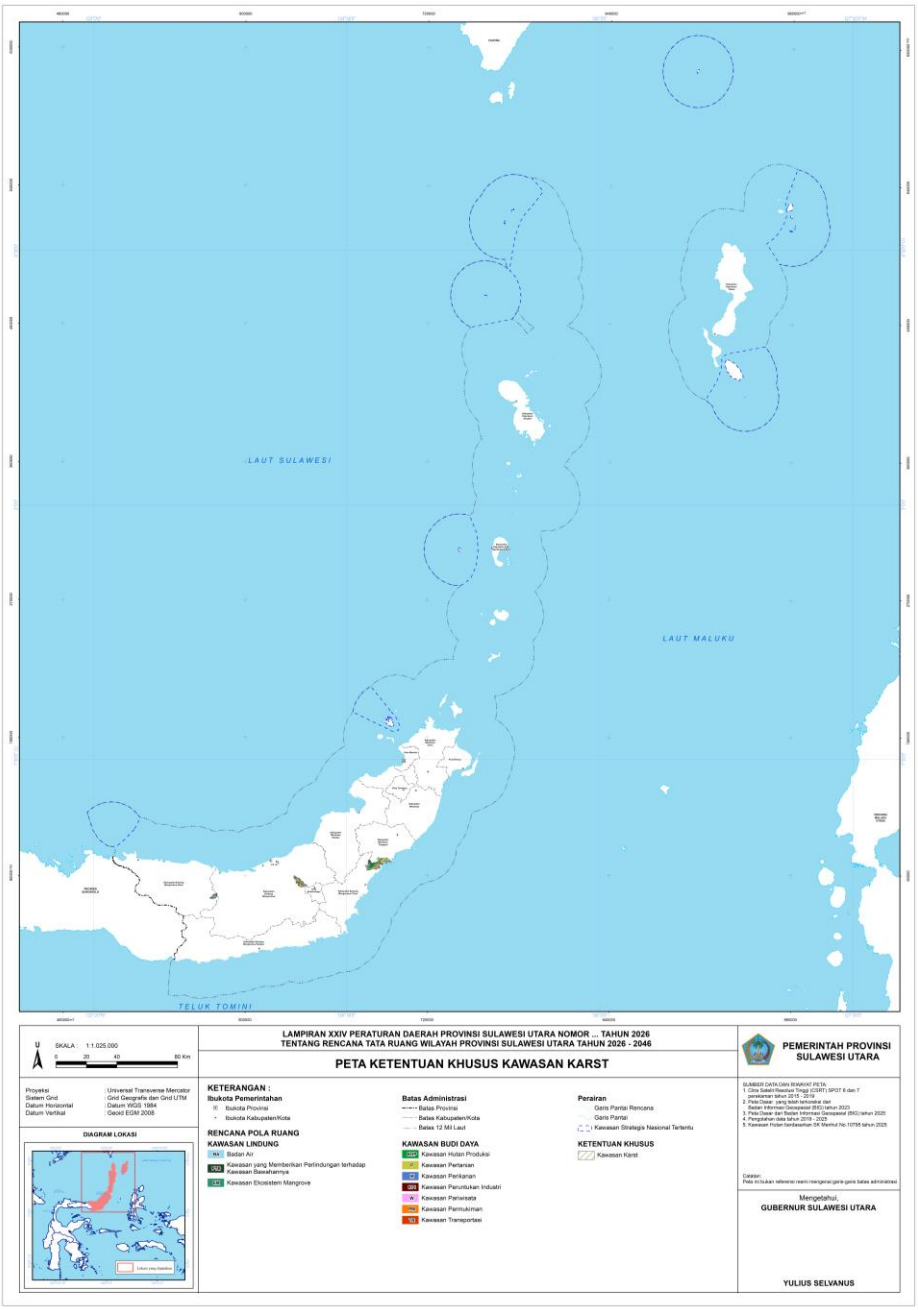

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XXV
PERATURAN DAERAH PROVINSISULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

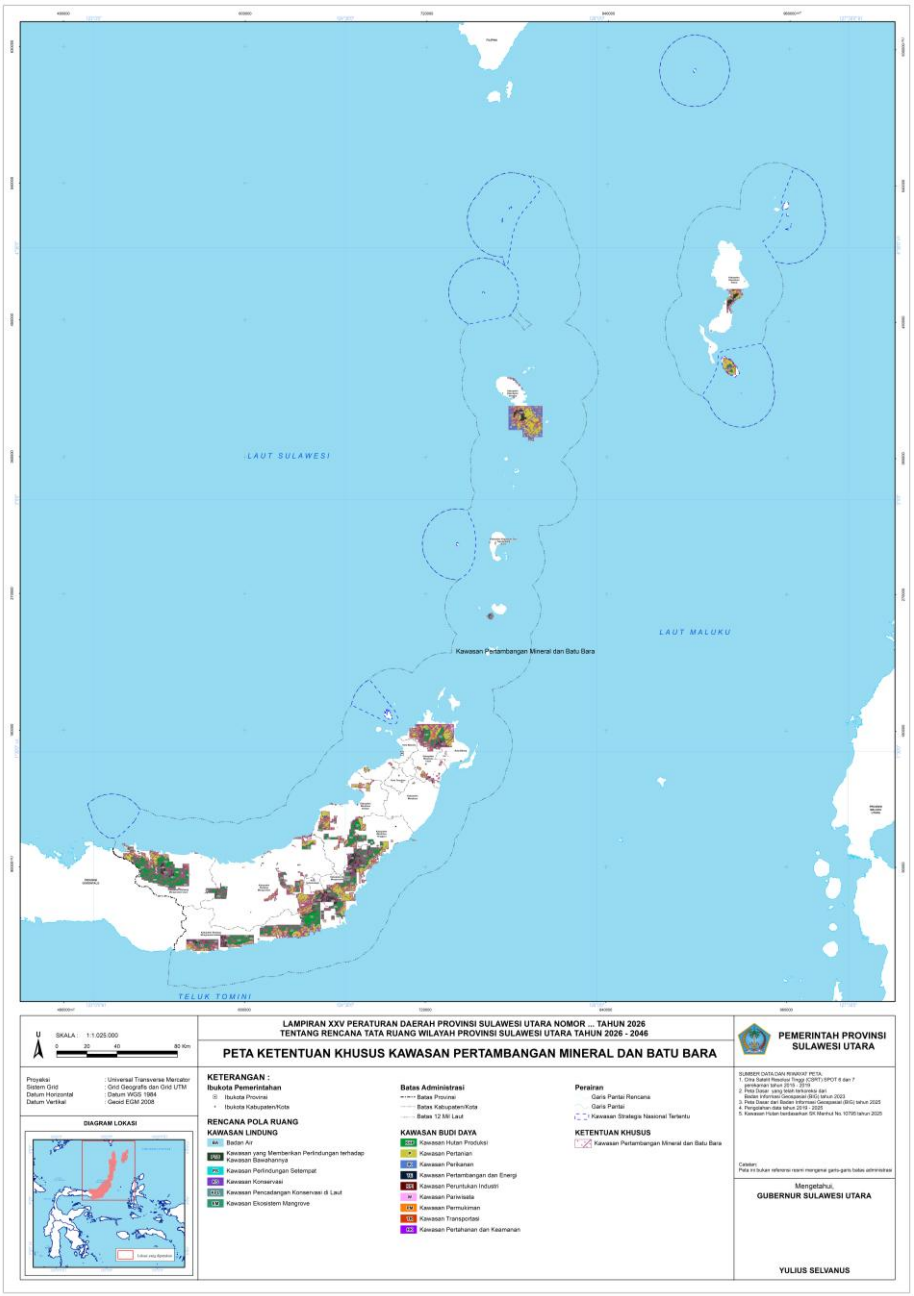

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN MIGRASI SATWA

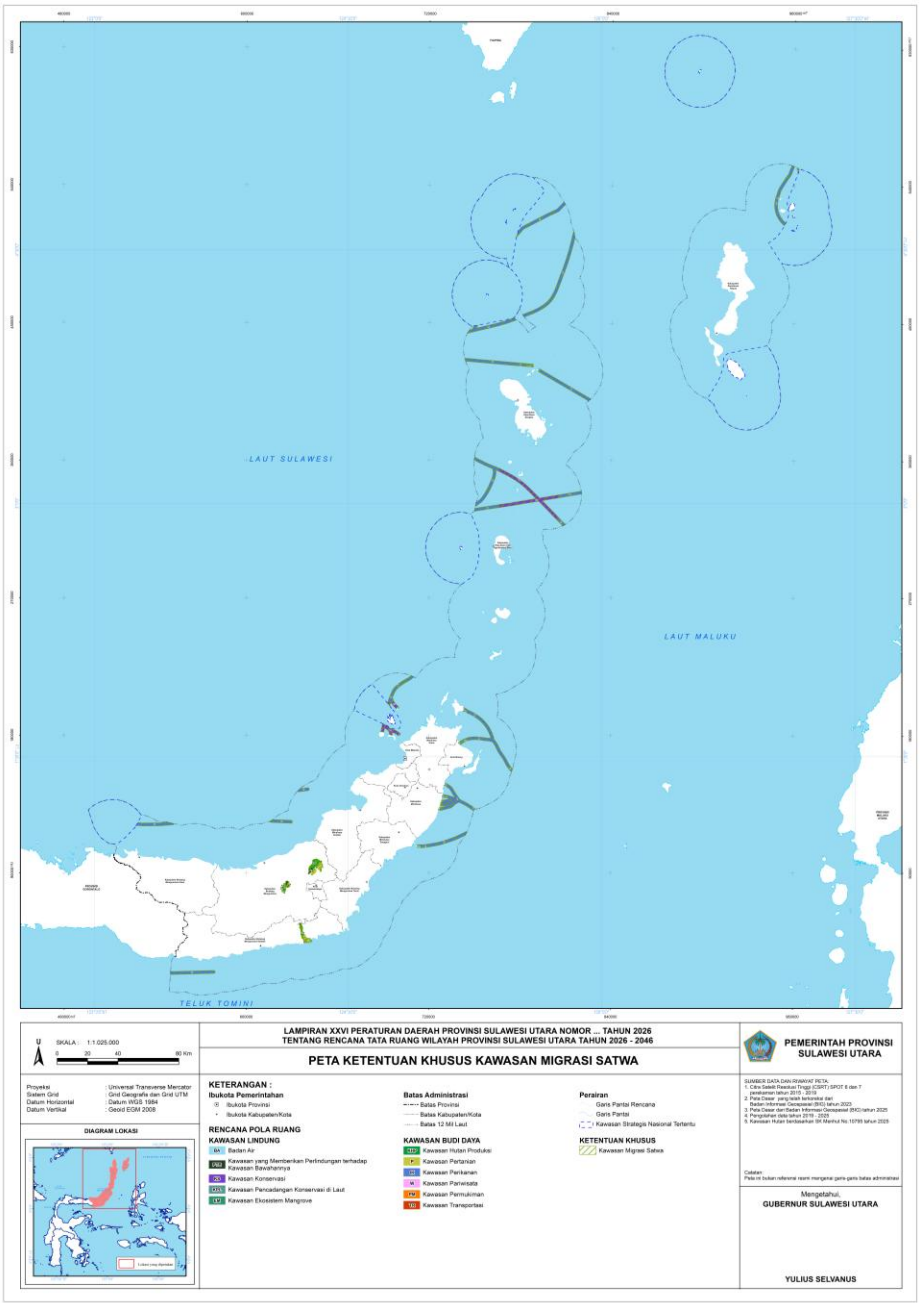

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

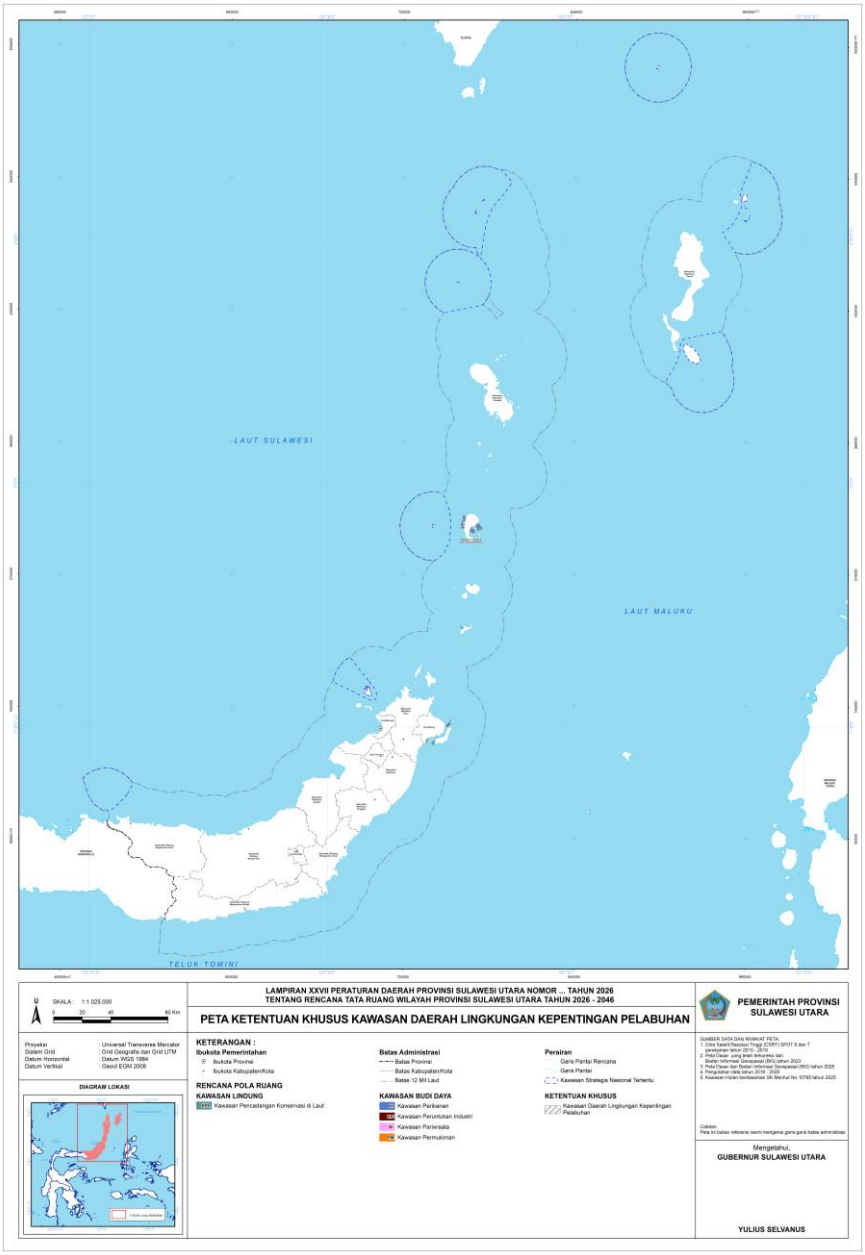

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

YULIUS SELVANUS

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN DAERAH PROVINSISULAWESI
UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026-2046

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM LAUT

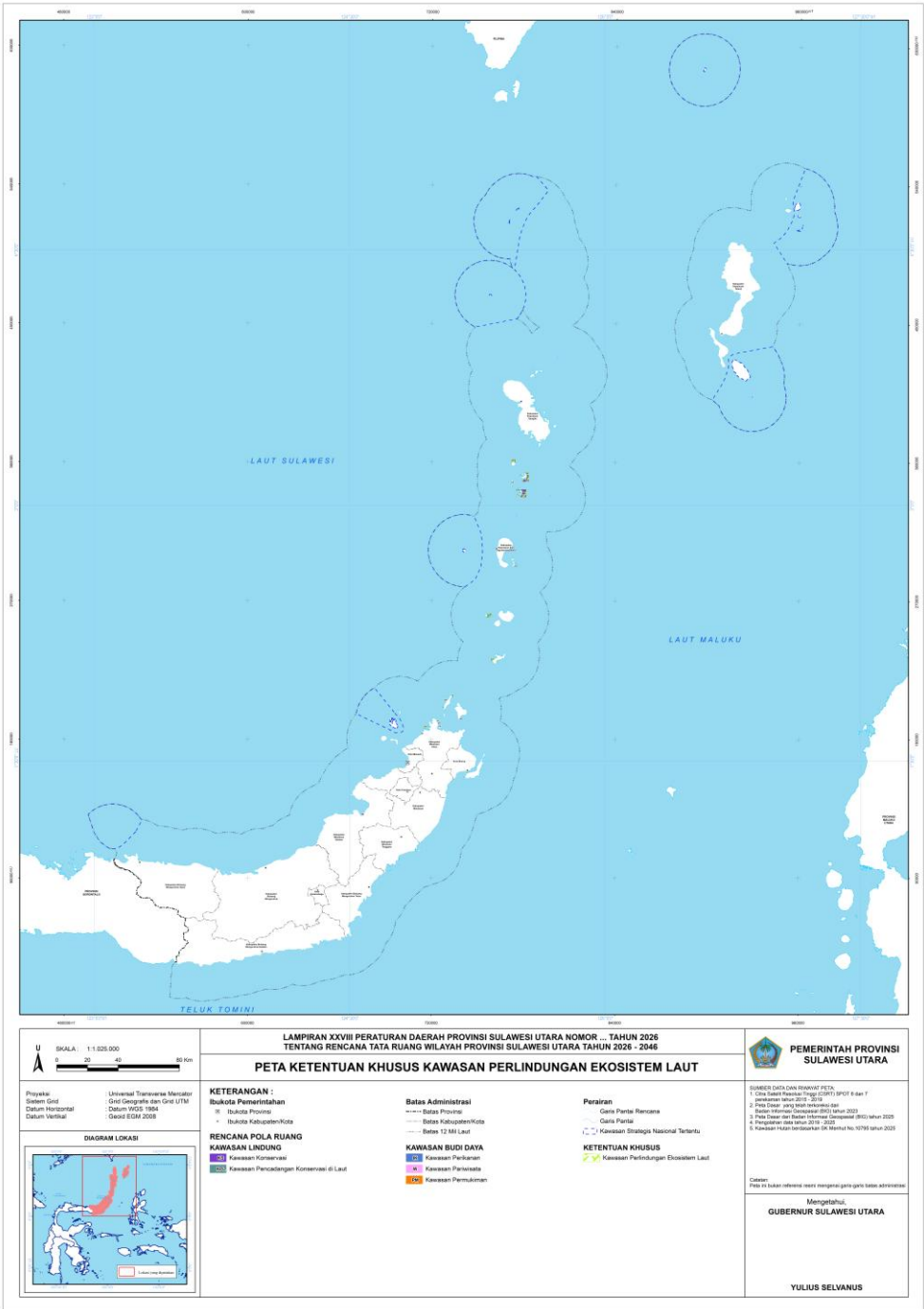

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD

YULIUS SELVANUS